

TAHUN 2019



PROFIL KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2019

351.077
Ind
p

Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI
Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Sekretariat Jenderal
Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019. --
Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2020

ISBN 978-602-416-977-0

1. Judul I. HEALTH STATISTICS
 II. HEALTH INFORMATION SYSTEMS

Buku ini diterbitkan oleh
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta 12950
Telepon no: 62-21-5229590, 5221432, 5277168
Fax no: 62-21-5277168
E-mail: datainformasi.pusdatin@kemkes.go.id
Website: <http://www.kemkes.go.id>



TIM PENYUSUN

Pengarah

drg. Oscar Primadi, MPH
Sekretaris Jenderal Kemenkes RI

Ketua

Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes
Kepala Pusat Data dan Informasi

Editor

Boga Hardhana, S.Si, MM
Farida Sibuea, SKM, MSc.PH
Winne Widiyanti, SKM, MKM

Anggota

dr. Yoeyoen Aryantin Indrayani; Wardah, SKM, MKM; Marlina Indah Susanti, SKM, M.Epid; Supriyono Pangribowo, SKM, MKM; Annisa Harpini, SKM, MKM; Khairani SKM, MKM; Ratri Aprianda, SKM, MKM; Intan Suryantisa Indah, SKM, MKM; dr. Ellysa, M.Epid; Eka Satriani Sakti, SKM; Tri Wahyudi, S.Si; Dian Mulya Sari, S.Ds; Hira Ahmad Habibi, S.Sn; Hellena Maslinda; Prillia Syafira Liani, SKM; Rizqitha Maula, Amd.

Kontributor

Kementerian Dalam Negeri; Badan Pusat Statistik; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; Biro Perencanaan dan Anggaran; Biro Keuangan dan BMN; Biro Kepegawaian; Pusat Kesehatan Haji; Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan; Setditjen. Pelayanan Kesehatan; Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer; Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan; Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional; Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan; Setditjen. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan; Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung; Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik; Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; Setditjen. Kesehatan Masyarakat; Direktorat Kesehatan Keluarga; Direktorat Kesehatan Lingkungan; Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga; Direktorat Gizi Masyarakat; Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Setditjen. Kefarmasian dan Alat Kesehatan; Set Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Konsil Kedokteran Indonesia; Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

KATA PENGANTAR

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI



Puji syukur kepada Allah SWT atas terbitnya Profil Kesehatan Indonesia 2019 dan semoga dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Kesehatan Indonesia 2019 ini.

Profil Kesehatan Indonesia ini disusun berdasarkan data rutin maupun data survei dari unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan serta institusi lain terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Informasi yang disajikan meliputi data dan narasi tentang situasi demografi, fasilitas pelayanan kesehatan dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), tenaga kesehatan, pembiayaan kesehatan, kesehatan keluarga, serta pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan. Profil ini menyajikan Gambaran nasional, perbandingan antar provinsi, tren dari tahun ke tahun dan narasi lainnya yang dipandang perlu disampaikan.

Buku Profil Kesehatan ini tersedia dalam bentuk *soft copy* yang dapat diunduh melalui *website* www.kemkes.go.id. Kritik dan saran dapat disampaikan kepada kami sebagai masukan untuk penyempurnaan profil kesehatan yang akan datang.

Jakarta, Juni 2020
Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan



Dr. Oscar Primadi, MPH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA SAMBUTAN

MENTERI KESEHATAN RI



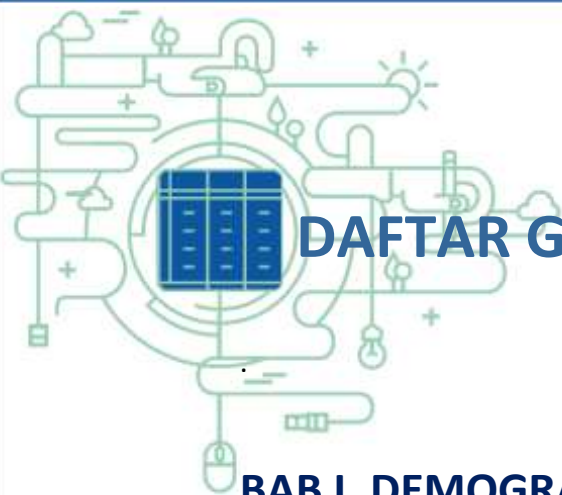
Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Profil Kesehatan Indonesia yang terbit setiap tahun sebagai publikasi data dan informasi kesehatan yang komprehensif diharapkan dapat menyediakan data dan informasi terkini sekaligus menjadi parameter keberhasilan pembangunan kesehatan dari tahun ke tahun. Profil Kesehatan ini diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan dalam setiap proses manajemen kesehatan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Semoga terbitnya Profil Kesehatan Indonesia 2019 ini dapat memberikan akses informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab bagi jajaran pemerintah maupun masyarakat.

Akhir kata saya sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Profil Kesehatan 2019 ini. Para pengelola data baik di pusat maupun daerah diharapkan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas data dari ketepatan waktu, validitas, kelengkapan dan konsistensi data, termasuk di fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan sumber data utama.

Jakarta, Juli 2020
Menteri Kesehatan RI

Letjen TNI (Pur.) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad. (K) RI



GAMBAR 2.7	PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN KESEHATAN OLAHRAGA PADA KELOMPOK MASYARAKAT DI INDONESIA TAHUN 2019	28
GAMBAR 2.8	PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN KESEHATAN OLAHRAGA BAGI ANAK SEKOLAH DASAR (SD) DI INDONESIA TAHUN 2019	28
GAMBAR 2.9	TREN JUMLAH PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI INDONESIA TAHUN 2015-2019	30
GAMBAR 2.10	JUMLAH DAN PERSENTASE PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI INDONESIA TAHUN 2019	31
GAMBAR 2.11	PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN HATRA, ASMAN, DAN PELATIHAN NAKES DI INDONESIA TAHUN 2019	31
GAMBAR 2.12	JUMLAH KLINIK PRATAMA PER PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019	33
GAMBAR 2.13	JUMLAH KLINIK UTAMA PER PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019	34
GAMBAR 2.14	JUMLAH UNIT TRANSFUSI DARAH MENURUT PENYELENGGARA DAN PROVINSI TAHUN 2019	35
GAMBAR 2.15	JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	35
GAMBAR 2.16	JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	36
GAMBAR 2.17	PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DI INDONESIA TAHUN 2015 – 2019	37
GAMBAR 2.18	JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT KELAS TAHUN 2019	38
GAMBAR 2.19	PERSENTASE RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA KELAS C YANG MEMILIKI 4 DOKTER SPESIALIS DASAR DAN 3 DOKTER SPESIALIS PENUNJANG TAHUN 2019	39
GAMBAR 2.20	RASIO JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2014 - 2019	40
GAMBAR 2.21	RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	40
GAMBAR 2.22	JUMLAH SARANA PRODUKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019	41
GAMBAR 2.23	JUMLAH SARANA DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019	42
GAMBAR 2.24	PERSENTASE INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT DAN VAKSIN SESUAI STANDAR DI INDONESIA TAHUN 2019	43
GAMBAR 2.25	PERSENTASE POSYANDU AKTIF PER PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019	44
GAMBAR 2.26	PERSENTASE POSBINDU PTM PER PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019	45

BAB III. SDM KESEHATAN

GAMBAR 3.1	REKAPITULASI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019	50
GAMBAR 3.2	JUMLAH TENAGA MEDIS DI INDONESIA TAHUN 2019	50
GAMBAR 3.3	JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2019	51
GAMBAR 3.4	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019	52
GAMBAR 3.5	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER GIGI DI INDONESIA TAHUN 2019	53
GAMBAR 3.6	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN PERAWAT DI INDONESIA TAHUN 2019	54
GAMBAR 3.7	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN BIDAN DI INDONESIA TAHUN 2018	55
GAMBAR 3.8	JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2019	56
GAMBAR 3.9	JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA	57
GAMBAR 3.10	KABUPATEN/KOTA DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR (3T)	58
GAMBAR 3.11	PERBANDINGAN JUMLAH TENAGA KESEHATAN (DOKTER, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI, PERAWAT, DAN BIDAN) DI DAERAH 3T TERHADAP JUMLAH NASIONAL TAHUN 2019	58
GAMBAR 3.12	JUMLAH DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SPESIALIS YANG MEMILIKI STR PER 31 DESEMBER 2019	59
GAMBAR 3.13	JUMLAH PENERBITAN STR BARU MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2019	60
GAMBAR 3.14	JUMLAH PENERBITAN STR BARU MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	61
GAMBAR 3.15	JUMLAH PENERBITAN STR ULANG MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2019	62
GAMBAR 3.16	JUMLAH PENERBITAN STR ULANG MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	62
GAMBAR 3.17	JUMLAH BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DI INDONESIA PER 31 DESEMBER 2019	64
GAMBAR 3.18	PROPORSI RESIDEN DOKTER SPESIALIS BERDASARKAN REGIONAL WILAYAH PADA TAHUN 2019	65
GAMBAR 3.19	PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA TIM NUSANTARA SEHAT HINGGA TAHUN 2019	66
GAMBAR 3.20	PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA NUSANTARA SEHAT INDIVIDU HINGGA TAHUN 2019	67
GAMBAR 3.21	JUMLAH DOKTER PESERTA INTERNSIP TAHUN 2019	68
GAMBAR 3.22	PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS TAHUN 2019	70
GAMBAR 3.23	JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV POLITEKNIK KESEHATAN MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2019	72
GAMBAR 3.24	JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III RPL MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2019	73

GAMBAR 3.25	JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2019	74
GAMBAR 3.26	JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	75
GAMBAR 3.27	JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS TAHUN 2019	76

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

GAMBAR 4.1	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2010-2019	79
GAMBAR 4.2	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT UNIT ESELON I TAHUN 2019	80
GAMBAR 4.3	PERSENTASE ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2019	81
GAMBAR 4.4	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2019	81
GAMBAR 4.5	REALISASI DANA DEKONSENTRASI KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019	82
GAMBAR 4.6	REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG KESEHATAN DAN KB MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019	83
GAMBAR 4.7	REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BIDANG KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019	84
GAMBAR 4.8	TABELAN SKEMA PROPORSI DAN TOTAL PEMBIAYAAN BELANJA KESEHATAN TAHUN 2010-2017	87
GAMBAR 4.9	PERKEMBANGAN CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) TAHUN 2014-2019	88
GAMBAR 4.10	PERKEMBANGAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2014-2019	89
GAMBAR 4.11	ALOKASI DAN REALISASI PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2014-2019	89
GAMBAR 4.12	JUMLAH FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2014-2019	90
GAMBAR 4.13	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) BEKERJASAMA DENGAN BPJS	90
GAMBAR 4.14	JUMLAH FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT (FKRTL) BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2019	91
GAMBAR 4.15	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT (FKRTL) BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2019	91
GAMBAR 4.16	JUMLAH FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2019	91
GAMBAR 4.17	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2019	91
GAMBAR 4.18	PERSENTASE DESA YANG MEMANFAATKAN DANA DESA UNTUK KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	92

BAB V. KESEHATAN KELUARGA

GAMBAR 5.1	ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP TAHUN 1991 – 2015	98
GAMBAR 5.2	TARGET PENURUNAN AKI DI INDONESIA	98
GAMBAR 5.3	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 DI INDONESIA TAHUN 2006 – 2019	100
GAMBAR 5.4	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	100
GAMBAR 5.5	CAKUPAN IMUNISASI Td1-Td5 PADA WANITA USIA SUBUR DI INDONESIA TAHUN 2019	102
GAMBAR 5.6	CAKUPAN IMUNISASI Td2+ PADA IBU HAMIL DI INDONESIA TAHUN 2019	102
GAMBAR 5.7	CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	104
GAMBAR 5.8	CAKUPAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	105
GAMBAR 5.9	PROPORSI TEMPAT PERSALINAN YANG DIMANFAATKAN OLEH PEREMPUAN UMUR 10-54 TAHUN, RISKESDAS 2018	106
GAMBAR 5.10	PROPORSI PERSALINAN DENGAN KUALIFIKASI TERTINGGI PADA PEREMPUAN UMUR 10-54 TAHUN, RISKESDAS 2018	107
GAMBAR 5.11	CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS (KF3) DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2019	108
GAMBAR 5.12	CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS (KF3) DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	108
GAMBAR 5.13	PUSKESMAS MELAKSANAKAN KELAS IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	110
GAMBAR 5.14	PUSKESMAS MELAKSANAKAN ORIENTASI PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	111
GAMBAR 5.15	TREN PEMAKAIAN KONTRASEPSI PADA WANITA KAWIN SDKI 1991-2017	112
GAMBAR 5.16	CAKUPAN PESERTA KB AKTIF DI INDONESIA TAHUN 2019	113
GAMBAR 5.17	CAKUPAN PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI MODERN TAHUN 2019	114
GAMBAR 5.18	PERSENTASE TEMPAT PELAYANAN KB DI INDONESIA TAHUN 2019	114
GAMBAR 5.19	CAKUPAN PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	115
GAMBAR 5.20	PERSENTASE IBU HAMIL YANG POSITIF HIV MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	116
GAMBAR 5.21	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) TAHUN 2015-2019	117

GAMBAR 5.22	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	118
GAMBAR 5.23	PERSENTASE IBU HAMIL HBSAG REAKTIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	119
GAMBAR 5.24	TREN ANGKA KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA TAHUN 1991 – 2017	120
GAMBAR 5.25	JUMLAH KEMATIAN BALITA (0 – 59 BULAN) DI INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2019	120
GAMBAR 5.26	PROPORSI PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0-28 HARI) DI INDONESIA TAHUN 2019	121
GAMBAR 5.27	PROPORSI PENYEBAB KEMATIAN POST NEONATAL (29 HARI-11 BULAN) DI INDONESIA TAHUN 2019	121
GAMBAR 5.28	PROPORSI PENYEBAB KEMATIAN ANAK BALITA (12-59 BULAN) DI INDONESIA TAHUN 2019	122
GAMBAR 5.29	CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1) TAHUN 2009-2019	123
GAMBAR 5.30	CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	124
GAMBAR 5.31	CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI TAHUN 2011-2019	125
GAMBAR 5.32	CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	126
GAMBAR 5.33	CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK PADA BAYI DI INDONESIA TAHUN 2009-2019	127
GAMBAR 5.34	AKUPAN IMUNISASI CAMPAK PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	177
GAMBAR 5.35	ANGKA DROP OUT IMUNISASI DPT/HB/HiB1-CAMPAK PADA BAYI TAHUN 2009-2019	128
GAMBAR 5.36	CAKUPAN DESA/KELURAHAN UCI MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	129
GAMBAR 5.37	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI TAHUN 2015-2019	130
GAMBAR 5.38	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	130
GAMBAR 5.39	CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-HIB (4) PADA ANAK BADUTA MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	131
GAMBAR 5.40	CAKUPAN SEKOLAH SD/MI YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	133
GAMBAR 5.41	CAKUPAN SEKOLAH SMP/MTS YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	134
GAMBAR 5.42	CAKUPAN SEKOLAH SMA/MA YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	135
GAMBAR 5.43	PERSENTASE GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018	136
GAMBAR 5.44	PERSENTASE GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018	137
GAMBAR 5.45	PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK PADA BALITA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018	138

GAMBAR 5.46	PERSENTASE PENDEK DAN SANGAT PENDEK PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018	139
GAMBAR 5.47	PERSENTASE KURUS DAN SANGAT KURUS PADA BALITA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018	140
GAMBAR 5.48	PERSENTASE KURUS DAN SANGAT KURUS PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018	141
GAMBAR 5.49	PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK DAN SANGAT KURUS DAN KURUS PADA BALITA 0-59 BULAN DI INDONESIA TAHUN 2013-2018	142
GAMBAR 5.50	GRAFIK PROPORSI STUNTING (TB/U) PADA BALITA MENURUT PROVINSI,SSGBI 2019	142
GAMBAR 5.51	CAKUPAN BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI (IMD) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	144
GAMBAR 5.52	CAKUPAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	145
GAMBAR 5.53	PERSENTASE RERATA BALITA UMUR 6-59 BULAN DITIMBANG PER BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	146
GAMBAR 5.54	CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BALITA (6-59 BULAN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	147
GAMBAR 5.55	CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) PADA REMAJA PUTRI MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	148
GAMBAR 5.56	CAKUPAN IBU HAMIL KEK MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN (PMT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	149
GAMBAR 5.57	CAKUPAN BALITA KURUS MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN (PMT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	150

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

GAMBAR 6.1	PROPORSI KASUS TUBERKULOSIS MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2019	154
GAMBAR 6.2	<i>CASE DETECTION RATE (CDR)</i> TAHUN 2009-2019	155
GAMBAR 6.3	<i>CASE DETECTION RATE (CDR)</i> MENURUT PROVINSI 2019	155
GAMBAR 6.4	ANGKA NOTIFIKASI SEMUA KASUS TUBERKULOSIS PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2009-2019	156
GAMBAR 6.5	ANGKA NOTIFIKASI SEMUA KASUS TUBERKULOSIS PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	157
GAMBAR 6.6	ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS DI INDONESIA TAHUN 2009-2019	158
GAMBAR 6.7	ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	158
GAMBAR 6.8	JUMLAH KASUS HIV POSITIF DAN AIDS YANG DILAPORKAN DI INDONESIA SAMPAI TAHUN 2009-2019	159

GAMBAR 6.9	PROPORSI KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DI INDONESIA TAHUN 2019	160
GAMBAR 6.10	PERSENTASE KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2019	160
GAMBAR 6.11	CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA DI INDONESIA TAHUN 2009-2019	161
GAMBAR 6.12	CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	162
GAMBAR 6.13	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) TAHUN 2015-2019	163
GAMBAR 6.14	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	164
GAMBAR 6.15	PREVALENSI DIARE PADA BALITA BERDASARKAN DIAGNOSIS TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2018	165
GAMBAR 6.16	CAKUPAN PELAYANAN PENDERITA DIARE BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	166
GAMBAR 6.17	ANGKA PREVALENSI DAN ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA (NCDR) TAHUN 2011-2019	167
GAMBAR 6.18	PETA ELIMINASI KUSTA PROVINSI DI Indonesia TAHUN 2018 DAN 2019	168
GAMBAR 6.19	ANGKA CACAT TINGKAT 2 PENDERITA KUSTA BARU PER 1.000.000 PENDUDUK TAHUN 2011-2019	169
GAMBAR 6.20	ANGKA CACAT TINGKAT 2 KUSTA PER 1.000.000 PENDUDUK PER PROVINSI TAHUN 2019	169
GAMBAR 6.21	PROPORSI KUSTA MB DAN PROPORSI KUSTA PADA ANAK TAHUN 2012-2019	170
GAMBAR 6.22	DISTRIBUSI KASUS TETANUS NEONATORUM PER PROVINSI TAHUN 2019	171
GAMBAR 6.23	PROPORSI KASUS TETANUS NEONATORUM MENURUT FAKTOR RISIKO TAHUN 2019	172
GAMBAR 6.24	SEBARAN KASUS SUSPEK CAMPAK DI INDONESIA TAHUN 2018 DAN 2019	173
GAMBAR 6.25	JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK PER BULAN DI INDONESIA TAHUN 2019	174
GAMBAR 6.26	PROPORSI SUSPEK CAMPAK BERDASARKAN UMUR DI INDONESIA TAHUN 2019	174
GAMBAR 6.27	PROPORSI SUSPEK CAMPAK YANG DIVAKSINASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019	175
GAMBAR 6.28	FREKUENSI KLB SUSPEK CAMPAK MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019	176
GAMBAR 6.29	SEBARAN KASUS DIFTERI MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	177

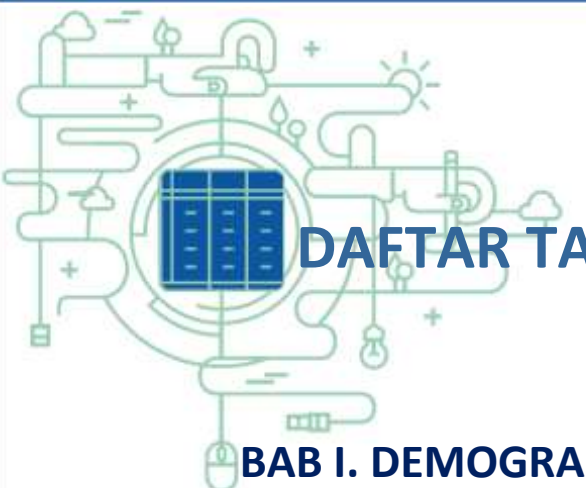
GAMBAR 6.30	PENCAPAIAN <i>NON POLIO AFP RATE</i> PER 100.000 PENDUDUK UMUR < 15 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2018 DAN 2019	179
GAMBAR 6.31	CAPAIAN SURVEILANS AFP DI INDONESIA TAHUN 2007 - 2019	180
GAMBAR 6.32	<i>NON POLIO AFP RATE</i> PER 100.000 PENDUDUK < 15 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2019	181
GAMBAR 6.33	PENCAPAIAN SPESIMEN ADEKUAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2018 DAN 2019	182
GAMBAR 6.34	PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT <i>AFP</i> MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	183
GAMBAR 6.35	PERSENTASE KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI BENCANA DI INDONESIA TAHUN 2019	184
GAMBAR 6.36	JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI DAN WAKTU KEJADIAN DI INDONESIA TAHUN 2019	185
GAMBAR 6.37	PERSENTASE KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA ALAM DI INDONESIA TAHUN 2019	186
GAMBAR 6.38	PERSENTASE KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA NON ALAM DI INDONESIA TAHUN 2019	186
GAMBAR 6.39	JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	187
GAMBAR 6.40	JUMLAH PROVINSI TERKENA KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA TAHUN 2019	188
GAMBAR 6.41	INCIDENCE RATE PER 100.000 PENDUDUK DEMAM BERDARAH DENGUE TAHUN 2010-2018	189
GAMBAR 6.42	ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	190
GAMBAR 6.43	<i>CASE FATALITY RATE</i> DEMAM BERDARAH DENGUE MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	191
GAMBAR 6.44	JUMLAH KABUPATEN/KOTA TERJANGKIT DBD DI INDONESIA TAHUN 2010-2019	192
GAMBAR 6.45	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN IR DBD < 49 PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2019	193
GAMBAR 6.46	ANGKA BEBAS JENTIK DI INDONESIA TAHUN 2010-2019	193
GAMBAR 6.47	JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA TAHUN 2019	194
GAMBAR 6.48	JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA TAHUN 2010-2019	195
GAMBAR 6.49	JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2010 – 2019	196
GAMBAR 6.50	JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	196
GAMBAR 6.51	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA YANG BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI <1% MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	197
GAMBAR 6.52	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN POPM FILARIASIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	198
GAMBAR 6.53	CAKUPAN POPM FILARIASIS TAHUN 2010-2019	198

GAMBAR 6.54	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	199
GAMBAR 6.55	PETA ENDEMISITAS MALARIA TAHUN 2019	200
GAMBAR 6.56	ANGKA KESAKITAN MALARIA (<i>ANNUAL PARACITE INCIDENCE /API</i>) PER 1.000 PENDUDUK TAHUN 2009-2019	201
GAMBAR 6.57	ANGKA KESAKITAN MALARIA (<i>ANNUAL PARACITE INCIDENCE/API</i>) PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	201
GAMBAR 6.58	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN <i>API</i> <1 PER 1.000 PENDUDUK ATAU BEBAS MALARIA DI INDONESIA TAHUN 2019	202
GAMBAR 6.59	PERSENTASE PENGOBATAN <i>ACT ARTEMICIN-BASED COMBINATION THERAPY (ART)</i> MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	203
GAMBAR 6.60	SITUASI RABIES DI INDONESIA TAHUN 2011 – 2019	204
GAMBAR 6.61	SITUASI LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2010 – 2019	205
GAMBAR 6.62	JUMLAH KASUS LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2018 – 2019	205
GAMBAR 6.63	CASE FATALITY RATE LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2019	206
GAMBAR 6.64	PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PENGENDALIAN TERPADU (PANDU) PTM MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2019	208
GAMBAR 6.65	PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN POSBINDU PTM MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2019	209
GAMBAR 6.66	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KEBIJAKAN KTR MINIMAL PADA 50% SEKOLAH MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2019	210
GAMBAR 6.67	PERSENTASE PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM MELALUI METODE INSPEKSI VISUAL ASAM (IVA) DI INDONESIA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019	211
GAMBAR 6.68	HASIL PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DAN KANKER PAYUDARA PADA PEREMPUAN USIA 30-50 DI INDONESIA TAHUN 2019	212
GAMBAR 6.69	PERSENTASE PELAYANAN SKRINING USIA PRODUKTIF DI INDONESIA TAHUN 2019	213
GAMBAR 6.70	PERSENTASE PENDERITA DIABETES MELLITUS MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019	214
GAMBAR 6.71	JUMLAH INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR DI INDONESIA TAHUN 2019	215
GAMBAR 6.72	JUMLAH INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019	216
GAMBAR 6.73	PERSENTASE IPWL AKTIF MENURUT PROVINSI DI INDONESIA	217
GAMBAR 6.74	JUMLAH PASIEN IPWL DI INDONESIA TAHUN 2011-2019	217
GAMBAR 6.75	JUMLAH PASIEN IPWL DI INDONESIA BERDASARKAN JENIS LAYANAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2019	218

GAMBAR 6.76	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MEMILIKI PUSKESMAS MENYELENGGARAKAN UPAYA KESEHATAN JIWA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019	219
GAMBAR 6.77	CAPAIAN PEMERIKSAAN JEMAAH HAJI MENURUT PROVINSI TEMPAT PEMERIKSAAN TAHUN 2019	222
GAMBAR 6.78	JAMAAH HAJI INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN (SELAMA OPERASIONAL HAJI DI ARAB SAUDI) TAHUN 2019	223
GAMBAR 6.79	JAMAAH HAJI INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2019	223
GAMBAR 6.80	PERSENTASE JAMAAH HAJI MENURUT STATUS RISTI	224
GAMBAR 6.81	PERSENTASE JAMAAH HAJI RISTI MENURUT EMBARKASI TAHUN 2019	224
GAMBAR 6.82	PROPORSI 10 PENYAKIT TERBANYAK PADA PASIEN RAWAT JALAN JAMAAH HAJI TAHUN 2019	225
GAMBAR 6.83	PROPORSI JAMAAH HAJI WAFAT TAHUN 2014-2019	226

BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN

GAMBAR 7.1	PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DILAKUKAN INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2019	231
GAMBAR 7.2	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SUMBER AIR MINUM LAYAK TAHUN 2019	232
GAMBAR 7.3	PROPORSI PENGGUNAAN JENIS JAMBAN SEHAT DI INDONESIA TAHUN 2019	233
GAMBAR 7.4	PERSENTASE KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) TAHUN 2019	234
GAMBAR 7.5	CAPAIAN DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2015-2019	236
GAMBAR 7.6	PERSENTASE DESA MELAKSANAKAN STBM MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	237
GAMBAR 7.7	PERSENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN TAHUN 2019	238
GAMBAR 7.8	PERSENTASE TEMPAT PENGOLAHAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN TAHUN 2019	239
GAMBAR 7.9	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN TATANAN KAWASAN SEHAT TAHUN 2019	241
GAMBAR 7.10	PERSENTASE RUMAH SAKIT YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS SESUAI STANDAR TAHUN 2019	243
GAMBAR 7.11	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2019	244
GAMBAR 7.12	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI KEBIJAKAN PHBS TAHUN 2019	245
GAMBAR 7.13	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN MINIMAL 5 TEMA KAMPANYE GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT TAHUN 2019	246



DAFTAR TABEL

BAB I. DEMOGRAFI

TABEL 1.1	PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019	5
TABEL 1.2	PERSEBARAN JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MISKIN MENURUT KELOMPOK BESAR PULAU DI INDONESIA TAHUN 2016 – 2019	8
TABEL 1.3	PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT JENIS KEGIATAN UTAMA 2015-2019 (juta orang)	10

BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

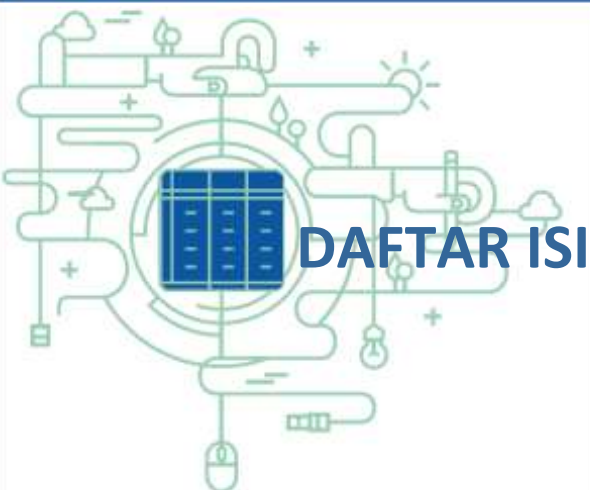
TABEL 2.1	PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM BERDASARKAN PENYELENGGARAANDI INDONESIA TAHUN 2015 – 2019	37
-----------	---	----

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

TABEL 4.1	TOTAL BELANJA KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2010-2017	86
-----------	---	----

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

TABEL 6.1	JUMLAH KEJADIAN BENCANA DAN JUMLAH KORBAN YANG DITIMBULKAN TAHUN 2019	188
-----------	--	-----



Tim Penyusun	i
Kata Pengantar	ii
Kata Sambutan	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	xv
Daftar Isi	xvi
Daftar Lampiran.....	xxi

BAB I. DEMOGRAFI.....	1
A. KEADAAN PENDUDUK.....	1
B. KEADAAN EKONOMI	6
C. KEADAAN PENDIDIKAN.....	11

BAB II FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM	21
A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	21
1. Akreditasi Puskesmas.....	24
2. Perkembangan Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap.....	25
3. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga.....	26
4. Pelayanan Kesehatan Tradisional	29
5. Ketersediaan Obat dan Vaksin	32
B. KLINIK, UTD, DAN LABORATORIUM KESEHATAN.....	32
C. LABORATORIUM	35
D. RUMAH SAKIT	36
1. Jenis Rumah Sakit.....	36
2. Tipe Rumah Sakit.....	38
3. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit	39

E. SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	41
1. Sarana Produksi dan Distribusi Bidang dan Alat Kefarmasian	41
2. Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin sesuai Standar	42
3. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit	39
F. UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	43
BAB III SDM KESEHATAN	49
A. JUMLAH TENAGA KESEHATAN	49
1. Tenaga Kesehatan di Puskesmas	51
2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit	56
3. Tenaga Kesehatan di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)	57
B. REGISTRASI TENAGA KESEHATAN	59
C. PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN	63
1. Tenaga Kesehatan dengan Status Pegawai Tidak Tetap (PTT)	63
2. Tenaga Kesehatan dengan Status Penugasan Khusus	64
3. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Nusantara Sehat Tim)	65
4. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Individu (Nusantara Sehat Individu)	66
5. Program Internsip Dokter	68
6. Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS)	69
D. INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN	70
1. Jumlah Lulusan Poltekkes	72
2. Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi	73
BAB IV PEMBIAYAAN KESEHATAN	79
A. ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN	79
B. DANA DEKONSENTRASI DAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN	
TAHUN ANGGARAN TAHUN 2018	81
C. BELANJA KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN	81
1. Total Belanja Kesehatan/ <i>Total Health Expenditure</i> (THE)	85
2. Jaminan Kesehatan	87
3. Dana Desa	92

BAB V KESEHATAN KELUARGA.....	97
A. KESEHATAN IBU	97
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.....	99
2. Pelayanan Imunisasi Tetanus Toksoid Difteri bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil	101
3. Pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil.....	103
4. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	104
5. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	107
6. Puskesmas Melaksanakan Kelas Ibu Hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K).....	109
7. Pelayanan Kontrasepsi	111
8. Pemeriksaan HIV dan Hepatitis B pada Ibu Hamil	116
B. KESEHATAN ANAK.....	119
1. Pelayanan Kesehatan Neonatal	122
2. Imunisasi	124
3. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah.....	132
C. GIZI	135
1. Status Gizi Balita.....	135
2. Upaya Pencegahan dan Penanganan Masalah Gizi	143
 BAB VI PENGENDALIAN PENYAKIT	 153
A. PENYAKIT MENULAR LANGSUNG	153
1. Tuberkulosis	153
2. HIV	159
3. Pneumonia	161
4. Hepatitis	163
5. Diare	164
6. Kusta.....	167

B. PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I)	170
1. Tetanus Neonatrum	170
2. Campak.....	172
3. Difteri	176
4. Polio dan <i>AFP (Acute Flaccid Paralysis/Lumpuh Layu Akut)</i>	178
C. DAMPAK KESEHATAN AKIBAT BENCANA	184
D. PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOSIS.....	189
1. Demam Berdarah Dengue (DBD)	189
2. Chikungunya.....	194
3. Filariasis.....	195
4. Malaria	199
5. Rabies	203
6. Leptospirosis	204
E. PENYAKIT TIDAK MENULAR.....	206
1. Meningkatkan Upaya Pengendalian PTM di Puskesmas	207
2. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM).....	208
3. Pengendalian Konsumsi Hasil Tembakau.....	209
4. Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara	210
5. Pelayanan Skrining Usia Produktif	212
6. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	213
F. KESEHATAN JIWA DAN NAPZA	215
1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Penyalahgunaan NAPZA di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).....	216
2. Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa	218
3. Jumlah Provinsi yang Menyelenggarakan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang Sederajat.....	220

G. PELAYANAN KESEHATAN HAJI	221
1. Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji.....	222
2. Kondisi Jamaah Haji Indonesia di Arab Saudi.....	223
3. Pola Morbiditas dan Mortalitas Jamaah Haji	224
BAB VII KESEHATAN LINGKUNGAN	229
A. AIR MINUM.....	229
B. AKSES SANITASI LAYAK	232
C. SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM).....	234
D. TEMPAT-TEMPAT UMUM (TTU) YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN.....	237
E. TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM).....	239
F. TATANAN KAWASAN SEHAT	240
G. PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS	242
H. PEMENUHAN KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN	243
I. KEBIJAKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS).....	244
J. GERAKAN MASYARAKAT SEHAT	246
Daftar Pustaka	251
Gambar	



DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. DEMOGRAFI

LAMPIRAN 1	LUAS WILAYAH, JUMLAH KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, DESA/KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH RUMAH TANGGA, DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 2.a	JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019
LAMPIRAN 2.b	ESTIMASI JUMLAH LAHIR HIDUP, JUMLAH BAYI (0 TAHUN), JUMLAH BATITA (0-2 TAHUN), JUMLAH ANAK BALITA (1 - 4 TAHUN), DAN JUMLAH BALITA (0 - 4 TAHUN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 2.c	ESTIMASI JUMLAH ANAK PRA SEKOLAH, JUMLAH ANAK USIA KELAS 1 SD/SETINGKAT, DAN JUMLAH ANAK USIA SD/SETINGKAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 2.d	ESTIMASI JUMLAH WANITA USIA SUBUR (15 - 49 TAHUN), WUS IMUNISASI (15 - 39 TAHUN), IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 3.a	PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN IJAZAH TERTINGGI YANG DIMILIKI TAHUN 2019
LAMPIRAN 3.b	ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDUDUK USIA MUDA, USIA PRODUKTIF, DAN USIA NON PRODUKTIF MENURUT DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019
LAMPIRAN 3.c	JUMLAH PENDUDUK MISKIN, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, DAN GARIS KEMISKINAN TAHUN 2001 - 2019
LAMPIRAN 3.d	GARIS KEMISKINAN, JUMLAH, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI DAN TIPE DAERAH TAHUN 2019
LAMPIRAN 3.e	INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 3.f	INDEKS GINI MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 - 2019
LAMPIRAN 3.g	PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN MENURUT KELOMPOK KOMODITAS TIPE DAERAH MARET 2019
LAMPIRAN 3.h	RATA-RATA PENGELUARAN BUKAN MAKANAN PER KAPITA PER BULAN TAHUN 2019
LAMPIRAN 3.i	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2017 - 2019
LAMPIRAN 3.j	RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019
LAMPIRAN 3.k	ANGKA MELEK HURUF (PERSENTASE PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF) MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2015 - 2019

LAMPIRAN 3.l	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2017 - 2019
LAMPIRAN 3.m	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019
LAMPIRAN 3.n	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2015 - 2019
LAMPIRAN 3.o	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019
LAMPIRAN 3.p	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2015 - 2019
LAMPIRAN 3.q	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PERINGKAT TAHUN 2015-2019
LAMPIRAN 3.r	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KOMPONEN MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2019

BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

LAMPIRAN 4.a	JUMLAH PUSKESMAS PER PROVINSI TAHUN 2015 - 2019
LAMPIRAN 4.b	JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP PER PROVINSI TAHUN 2015 - 2019
LAMPIRAN 4.c	RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN 4.d	AKREDITASI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 4.e	JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI LIMA JENIS TENAGA KESEHATAN PROMOTIF DAN PREVENTIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2018 - 2019
LAMPIRAN 4.f	JUMLAH PUSKESMAS DENGAN PELAYANAN PENGEMBANGAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 4.g	JUMLAH PUSKESMAS YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 4.h	JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT JENIS, KEPEMILIKAN, DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 4.i	AKREDITASI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 4.j	PERSENTASE RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA KELAS C YANG MEMILIKI 4 DOKTER SPESIALIS DASAR DAN 3 DOKTER SPESIALIS PENUNJANG MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 4.k	JUMLAH UNIT TRANSFUSI DARAH MENURUT PROVINSI DAN PENYELENGGARA DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 4.l	JUMLAH KLINIK PRATAMA DAN KLINIK UTAMA MENURUT KEPEMILIKAN DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 4.m	JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 8.a	JUMLAH RUMAH SAKIT DAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT MENURUT KELAS RUMAH SAKIT DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 8.b	JUMLAH RUMAH SAKIT DAN RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2018 - 2019
LAMPIRAN 9.a	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN ESENSIAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

LAMPIRAN 9.b	JUMLAH SARANA PRODUKSI BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 9.c	JUMLAH SARANA DISTRIBUSI BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 9.d	PERSENTASE INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA (IFK) YANG MELAKUKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT DAN VAKSIN SESUAI STANDAR TRIWULAN IV TAHUN 2019
LAMPIRAN 10	JUMLAH POSYANDU DAN POSBINDU PTM MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

BAB III. SDM KESEHATAN

LAMPIRAN 11.a	JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 11.b	JUMLAH TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 11.c	JUMLAH TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 11.d	JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 11.e	KECUKUPAN DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, PERAWAT DAN BIDAN DI PUSKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 11.f	JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR* MENURUT JENIS TENAGA DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 11.g	JUMLAH DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2019
LAMPIRAN 11.h	JUMLAH PESERTA PENUGASAN KHUSUS RESIDEN DOKTER SPESIALIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2017- 2019
LAMPIRAN 11.i	JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN NUSANTARA SEHAT BERBASIS TIM BATCH XII-XIV (PERIODE I-III TAHUN 2019)
LAMPIRAN 11.j	JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA TIM NUSANTARA SEHAT (BATCH XII SAMPAI DENGAN BATCH XIV/ PERIODE I SAMPAI DENGAN III TAHUN 2019) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 11.k	JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN NUSANTARA SEHAT INDIVIDU PERIODE I-X TAHUN 2019 (BATCH XIII s/d XX)
LAMPIRAN 11.l	JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA NUSANTARA SEHAT INDIVIDU (PERIODE I-X TAHUN 2019 / BATCH XIII s/d XX) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 11.m	JUMLAH DOKTER PESERTA INTERNSHIP MENURUT BULAN PEMBERANGKATAN DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 11.n	JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS (PGDS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 12.a	JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 12.b	JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI BARU TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
	JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI ULANG TENAGA KESEHATAN

LAMPIRAN 12.c	MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 12.d	JUMLAH BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF MENURUT KRITEKRIA WILAYAH DAN PROVINSI PER 31 DESEMBER 2019
LAMPIRAN 13.a	JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 13.b	JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 13.c	JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 14.a	JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 14.b	JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 14.c	JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIK DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 15.a	JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 15.b	JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 15.c	JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 16.a	JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 16.b	JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 16.c	JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 16.d	JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 16.e	JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III POLTEKKES MENURUT JENIS PROGRAM STUDI TAHUN 2019
LAMPIRAN 16.f	JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III RPL POLTEKKES MENURUT JENIS PROGRAM STUDI TAHUN 2019
LAMPIRAN 16.g	JUMLAH LULUSAN PROGRAM DIPLOMA IV POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN 16.h	JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI MENURUT JENIS TENAGA DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 16.i	JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

BAB IV PEMBIAYAAN KESEHATAN

LAMPIRAN 17.a	CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) TAHUN 2019
LAMPIRAN 17.b	FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN 18	PERSENTASE DESA YANG MEMANFAATKAN DANA DESA UNTUK KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 19.a	ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019

LAMPIRAN 19.b	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT ESELON I TAHUN 2019
LAMPIRAN 19.c	ALOKASI DAN REALISASI REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN MENURUT JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2019
LAMPIRAN 19.d	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN ESELON 1 KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2019
LAMPIRAN 19.e	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2019
LAMPIRAN 19.f	ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

BAB V KESEHATAN KELUARGA

LAMPIRAN 20	JUMLAH KELAHIRAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 21	JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2019
LAMPIRAN 22	JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 23.a	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 23.b	PERSENTASE PUSKESMAS* MELAKSANAKAN KELAS IBU HAMIL DAN MELAKSANAKAN PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K) SERTA JUMLAH RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 24	CAKUPAN IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 25	PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 26	PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 27.a	JUMLAH IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 27.b	PERSENTASE REMAJA PUTRI MENDAPAT TABLET TAMBAH DARAH (TTD) MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2019
LAMPIRAN 27.c	PERSENTASE BALITA KURUS DAN IBU HAMIL RISIKO KEK* MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2019
LAMPIRAN 28.a	PESERTA KB AKTIF MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 28.b	JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) PESERTA KELUARGA BERENCANA MENURUT TEMPAT PELAYANAN DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 29	CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 30.a	JUMLAH DAN PERSENTASE PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN DAN KOMPLIKASI NEONATAL MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 30.b	PEMERIKSAAN HIV IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 30.c	PERSENTASE IBU HAMIL HBsAg REAKTIF BERDASARKAN PEMERIKSAAN DARAH DENGAN MENGGUNAKAN TEST CEPAT HBsAg MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 31	JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019

LAMPIRAN 32	JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN ANAK BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 33	BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 34	CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 35	PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI (IMD) DAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 37	CAKUPAN DESA/KELURAHAN <i>UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION</i> (UCI) MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 38	CAKUPAN IMUNISASI HEPATITIS B0 (0-7 HARI) DAN BCG PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 39.a	CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-HiB 3, POLIO 4*, CAMPAK/MR, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 39.b	<i>DROP OUT RATE</i> CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB/HiB(1) - CAMPAK DAN CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB/HiB(1) - DPT/HB/HiB(3) PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2017-2019
LAMPIRAN 39.c	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2017-2019
LAMPIRAN 40.a	CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-HiB 4 DAN CAMPAK/MR2 PADA ANAK USIA DIBAWAH DUA TAHUN (BADUTA) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 40.b	CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 41	CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 43	JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 44.a	PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2018
LAMPIRAN 44.b	PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2018
LAMPIRAN 44.c	PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS TB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2018
LAMPIRAN 44.d	PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS TB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2018
LAMPIRAN 44.e	PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/TB MENURUT PROVINSI TAHUN 2018
LAMPIRAN 44.f	PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/TB MENURUT PROVINSI TAHUN 2018
LAMPIRAN 45	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK SD/MI, SMP/MTS, DAN SMA/MA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
LAMPIRAN 48	PELAYANAN SKRINING USIA PRODUKTIF TAHUN 2019
LAMPIRAN 49	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 50	PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

BAB VI PENGENDALIAN PENYAKIT

LAMPIRAN 51.a	JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS ANAK, CASE NOTIFICATION RATE (CNR) PER 100.000 PENDUDUK DAN CASE DETECTION RATE (CDR) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 51.b	JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS SEMUA TIPE MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 51.c	JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 52	ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 53.a	PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 53.b	BALITA BATUK/ KESUKARAN BERNAFAS YANG DIBERIKAN TATALAKSANA STANDAR DAN KABUPATEN/KOTA DENGAN 50% PUSKESMAS MELAKUKAN TATALAKSANA STANDAR MINIMAL 60% MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 54	JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 55.a	JUMLAH KASUS BARU HIV MENURUT PROVINSI TAHUN 2017 - 2019
LAMPIRAN 55.b	JUMLAH KASUS BARU AIDS MENURUT JENIS KELAMIN , KELOMPOK UMUR, DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 55.c	JUMLAH KASUS KUMULATIF AIDS MENURUT JENIS KELAMIN , KELOMPOK UMUR, DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 55.d	JUMLAH KEMATIAN AKIBAT AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR TAHUN 2019
LAMPIRAN 55.e	JUMLAH KASUS BARU DAN KASUS KUMULATIF AIDS MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2019
LAMPIRAN 55.f	JUMLAH DAN PERSENTASE KASUS AIDS PADA PENGGUNA NAPZA SUNTIKAN (IDU) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 56	KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 57	KASUS BARU KUSTA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 58	KASUS BARU KUSTA CACAT TINGKAT 0, CACAT TINGKAT 2, DAN PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 59	JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 59.b	PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT (RELEASE FROM TREATMENT/RFT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 60	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 61	KASUS AFP (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA <15 TAHUN DAN PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 62.a	JUMLAH PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

LAMPIRAN 62.b	JUMLAH KASUS TETANUS NEONATORUM DAN FAKTOR RISIKO MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 62.c	JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK PER BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 62.d	JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK DAN KASUS SUSPEK CAMPAK YANG DIVAKSINASI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 62.e	FREKUENSI KLB DAN JUMLAH KASUS PADA SUSPEK KLB CAMPAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 62.f	DISTRIBUSI KLB CAMPAK BERDASARKAN KONFIRMASI LABORATORIUM MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 63	KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DI DESA/KELURAHAN YANG DITANGANI < 24 JAM MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 63.b	JUMLAH KEJADIAN KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA DAN WAKTU KEJADIAN DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 63.c	JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA TAHUN 2019
LAMPIRAN 63.d	JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 64.f	JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA DAN CAPAIAN PEMERIKSAAN JAMAAH HAJI SEBELUM KEBERANGKATAN MENURUT PROVINSI TEMPAT PEMERIKSAAN TAHUN 2018-2019
LAMPIRAN 64.g	PENYAKIT TERBANYAK RAWAT JALAN KLOTER HAJI TAHUN 2019
LAMPIRAN 64.h	JUMLAH JEMAAH HAJI WAFAT DI ARAB SAUDI BERDASARKAN PENYEBAB PENYAKIT TAHUN 2019
LAMPIRAN 64.i	JUMLAH DAN PROPORSI JEMAAH HAJI WAFAT TAHUN 2015-2019
LAMPIRAN 64.j	JUMLAH JEMAAH HAJI YANG BERANGKAT (SETELAH OPERASIONAL HAJI) TAHUN 2019
LAMPIRAN 65.a	KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA
LAMPIRAN 65.b	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TERJANGKIT DEMAM BERDARAH DENGUE MENURUT PROVINSI TAHUN 2017 - 2019
LAMPIRAN 66.a	KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT MALARIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 66.b	JUMLAH KAB/KOTA DENGAN API<1 DAN YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 66.c	ANNUAL PARASITE INSIDENCE (API) MALARIA PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2016-2019
LAMPIRAN 67.a	PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 67.b	JUMLAH KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA, BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI < 1%, DAN MASIH MELAKSANAKAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL (POPM) FILARIASIS SERTA ELIMINASI FILARIASIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 67.c	SITUASI RABIES MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2017-2019
LAMPIRAN 67.d	JUMLAH KASUS, MENINGGAL, DAN <i>CASE FATALITY RATE</i> (CFR) LEPTOSPIROSIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2017-2019
LAMPIRAN 67.e	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN PENGENDALIAN VEKTOR TERPADU (PVT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

LAMPIRAN 69	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS (DM) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 70.a	REKAPITULASI DETEKSI DINI KANKER SERVIKS (IVA) MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2019
LAMPIRAN 70.b	JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PENGENDALIAN TERPADU (PANDU) PTM MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2019
LAMPIRAN 70.c	JUMLAH DESA YANG MELAKSANAKAN POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU) MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2019
LAMPIRAN 70.d	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KTR DI 50% SEKOLAH MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2019
LAMPIRAN 70.e	PELAYANAN SKRINING USIA PRODUKTIF TAHUN 2019
LAMPIRAN 71.a	JUMLAH DAN PERSENTASE PUSKESMAS MENYELENGGARAKAN UPAYA KESEHATAN JIWA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019
LAMPIRAN 71.b	JUMLAH KABUPATEN/KOTA MENYELENGGARAKAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH PENYALAHGUNAAN NAPZA DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) DAN JUMLAH IPWL AKTIF

BAB VII KESEHATAN LINGKUNGAN

LAMPIRAN 72.a	PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DILAKUKAN PENGAWASAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 72.b	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SUMBER AIR MINUM LAYAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2017-2019
LAMPIRAN 73	JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 74	DESA YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT PER PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 75	PERSENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM (TTU) MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 76.a	TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 76.b	KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN TATANAN KAWASAN SEHAT TAHUN 2019
LAMPIRAN 76.c	KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2019
LAMPIRAN 76.d	PERSENTASE RUMAH SAKIT YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS SESUAI STANDAR TAHUN 2019
LAMPIRAN 76.e	KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI KEBIJAKAN PHBS TAHUN 2019
LAMPIRAN 76.f	JUMLAH KABUPATEN/KOTA* YANG MELAKSANAKAN MINIMAL 5 TEMA KAMPANYE GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT TAHUN 2017-2019



Bab I

DEMOGRAFI

+

I. DEMOGRAFI

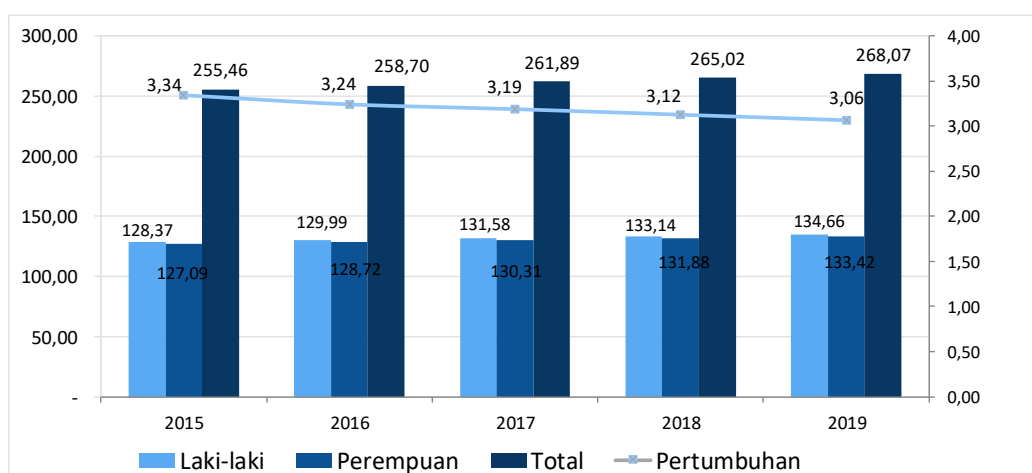
Indonesia terletak di antara 6° Lintang Utara (LU) sampai 11° Lintang Selatan (LS) dan 95° sampai 141° Bujur Timur (BT), diantara Benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 16.056 pulau, luas daratan sebesar 1.916.862,2 km² dan luas perairan sebesar 3.257.483 km² yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Indonesia terbagi atas 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota, 7.230 kecamatan, 8.488 kelurahan, dan 74.953 desa (Lampiran 1).

A. KEADAAN PENDUDUK

Berdasarkan hasil estimasi, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 268.074.565 jiwa yang terdiri atas 133.136.131 jiwa penduduk laki-laki dan 133.416.946 jiwa penduduk perempuan. Gambar 1.1 memperlihatkan pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan jenis kelamin. Penurunan jumlah pertumbuhan penduduk terbesar terjadi pada tahun 2015 - 2016 dari 3,34 juta per tahun menjadi 3,24 juta per tahun (Lihat Gambar 1.1).

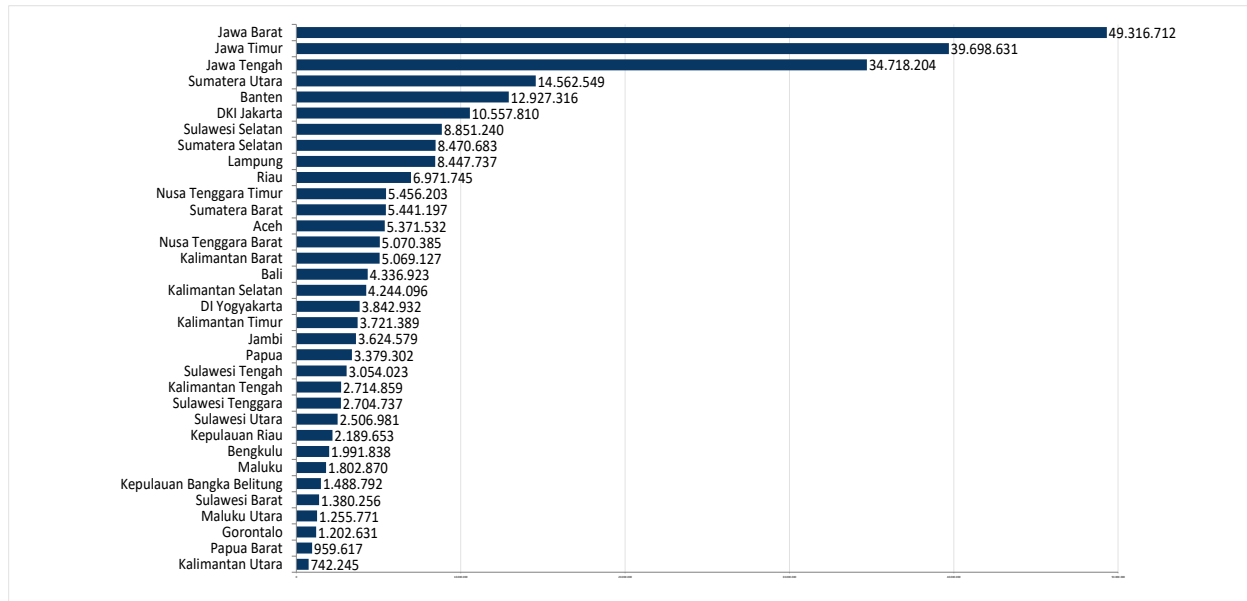
GAMBAR 1.1
JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN 2015 – 2019 (dalam Jutaan)



Sumber: Kepmenkes Nomor 117 Tahun 2017, Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI
diolah dari Proyeksi Hasil Sensus Penduduk 2010 (BPS); Hasil Estimasi Data
Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019

Berdasarkan hasil estimasi, jumlah penduduk paling banyak di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Barat (49.316.712 jiwa), sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kalimantan Utara (742.245 jiwa). Secara rinci data estimasi jumlah penduduk per provinsi dapat dilihat pada Gambar 1.2.

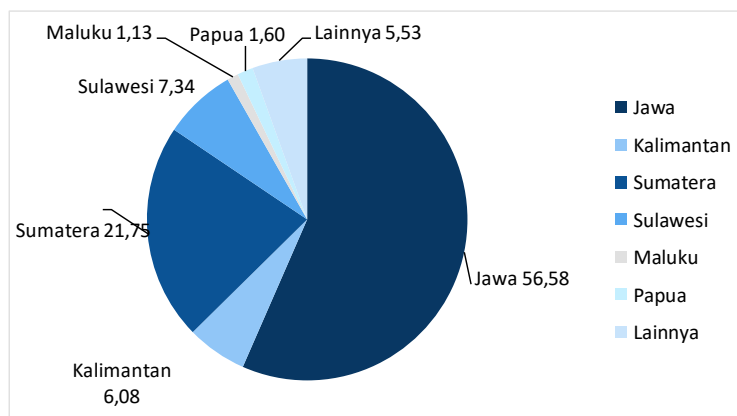
GAMBAR 1.2
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019



Sumber : Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2019, Hasil Estimasi Data Penduduk
 Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019
 (Diolah dari Sensus Penduduk 2010)

Pulau Jawa (56,58%) merupakan pulau dengan populasi penduduk terbanyak dibandingkan pulau lainnya di Indonesia. Daerah timur yaitu Pulau Maluku (1,13%) dan Papua (1,60%) merupakan pulau dengan populasi penduduk paling sedikit. Data mengenai persebaran populasi penduduk beberapa pulau besar di Indonesia dapat dilihat secara rinci pada Gambar 1.3.

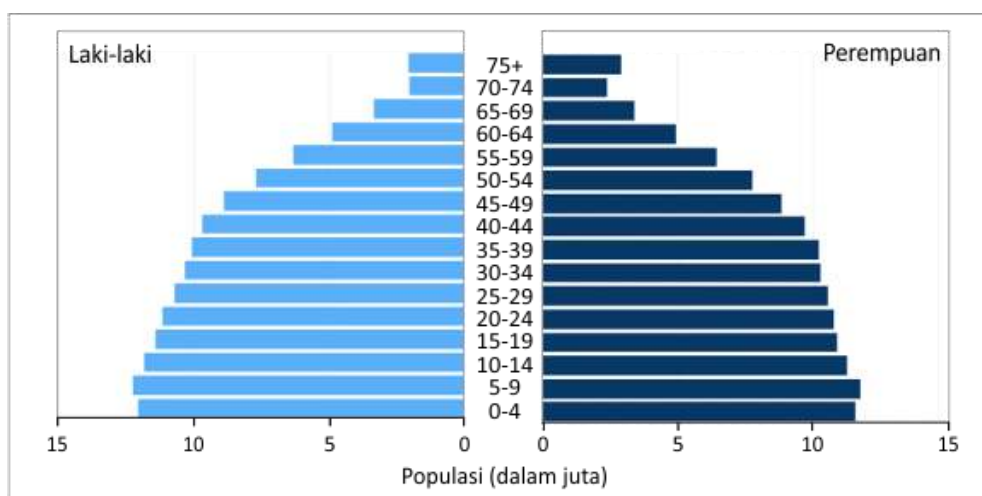
GAMBAR 1.3
PERSENTASE PERSEBARAN PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 2019



Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2019, Hasil Estimasi Data Penduduk
 Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019
 (Diolah dari Sensus Penduduk 2010)

Berdasarkan estimasi jumlah penduduk, dapat disusun sebuah piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan gambaran yang menyajikan komposisi data kependudukan suatu wilayah atau negara (kelompok umur dan jenis kelamin) dalam bentuk grafik batang yang digambarkan berlawanan arah dengan posisi horizontal. Dalam piramida penduduk, terdapat dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu vertikal menggambarkan kelompok umur penduduk dari nol sampai dengan 75 tahun lebih dengan interval lima tahunan dengan jumlah penduduk laki-laki digambarkan di sisi sebelah kiri dan perempuan di sisi sebelah kanan. Sumbu horizontal menggambarkan jumlah penduduk. Piramida tersebut merupakan gambaran struktur penduduk yang terdiri dari struktur penduduk muda, dewasa, dan tua. Struktur penduduk ini menjadi dasar bagi kebijakan kependudukan, sosial, budaya, dan ekonomi.

GAMBAR 1.4
PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 2019

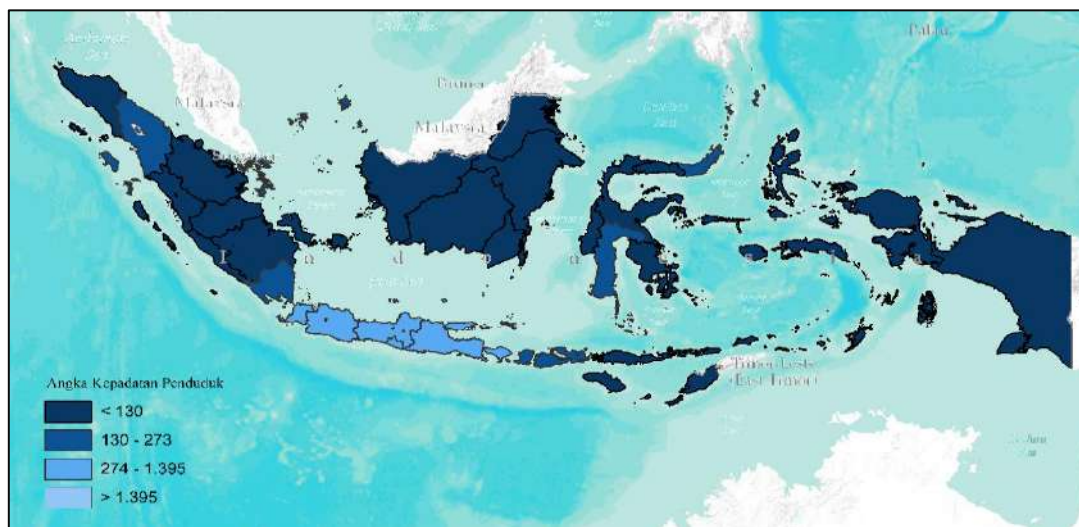


Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2018, Hasil Estimasi Data Penduduk
 Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019
 (Diolah dari Sensus Penduduk 2010)

Piramida penduduk Indonesia pada Gambar 1.4 berbentuk kerucut dengan alas yang lebar dan puncak yang meruncing. Hal ini menunjukkan bahwa struktur penduduk di Indonesia termasuk struktur penduduk muda. Usia 0-14 tahun (usia muda) lebih banyak jumlahnya dibandingkan usia di atasnya. Grafik pada usia muda lebih lebar dibandingkan bagian di atasnya membuktikan bahwa penduduk Indonesia memiliki struktur muda. Bagian atas pada piramida tersebut yang lebih pendek bahwa menunjukkan angka kematian yang masih tinggi pada penduduk usia tua.

Konsentrasi penduduk di suatu wilayah dapat dipelajari dengan menggunakan ukuran kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan tingkat persebaran penduduk suatu wilayah. Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Wilayah yang memiliki kepadatan yang tinggi umumnya adalah pusat permukiman, pusat peradaban, dan pusat aktivitas sosial ekonomi. Rata-rata kepadatan penduduk di Indonesia tahun 2019 berdasarkan hasil estimasi sebesar 139,85 jiwa per km². Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk. Kepadatan penduduk menurut provinsi tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1.

GAMBAR 1.5
PETA PERSEBARAN KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/Km²) DI INDONESIA
TAHUN 2019



Sumber : Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2018, Hasil Estimasi Data Penduduk
Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019 (Diolah dari Sensus Penduduk 2010)

Gambar 1.5 memperlihatkan kepadatan penduduk di Indonesia yang tidak merata. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Pulau Jawa dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi sebesar 15.900,08 jiwa per km². Provinsi dengan kepadatan penduduk terendah yaitu di Provinsi Papua Barat sebesar 9,32 jiwa per km² (Lampiran 1).

Beberapa cara yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemerataan penduduk, antara lain: (1) transmigrasi atau program memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang jarang penduduknya; (2) pemerataan pembangunan terutama di wilayah timur Indonesia; (3) mensosialisasikan program keluarga berencana dan menunda usia pernikahan pertama.

Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui produktivitas penduduk yaitu Angka Beban Ketergantungan (ABK) atau *Dependency Ratio*. Angka Beban Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Angka ini digunakan sebagai indikator yang secara kasar menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka Beban Ketergantungan penduduk Indonesia pada tahun 2019 sebesar 47,82. Hal ini berarti bahwa 100 penduduk Indonesia yang produktif, di samping menanggung dirinya sendiri, juga menanggung kurang lebih 48 orang yang tidak produktif. Angka Beban Ketergantungan per provinsi secara detail dapat dilihat pada lampiran 3.b.

Tabel 1.1 memperlihatkan data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan tahun 2019 berdasarkan jenis kelamin. Data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan diperlukan untuk penyusunan perencanaan dan evaluasi hasil pencapaian upaya kesehatan yang telah dilaksanakan. Data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan tahun 2019 menurut provinsi terdapat pada Lampiran 2.b, 2.c, 2.d, dan 3.b.

TABEL 1.1
PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Sasaran Program	Kelompok Umur/Formula	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Lahir Hidup	-	-	-	4.778.621
2	Bayi	0 Tahun	2.396.105	2.295.398	4.691.503
3	Batita (di Bawah Tiga Tahun)	0 – 2 Tahun	7.202.686	6.908.164	14.110.850
4	Anak Balita	1 – 4 Tahun	9.648.742	9.264.678	18.913.420
5	Balita (di Bawah Lima Tahun)	0 – 4 Tahun	12.044.847	11.560.076	23.604.923
6	Pra Sekolah	5 – 6 Tahun	4.879.979	4.693.374	9.573.353
7	Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat	7 Tahun	2.451.873	2.360.183	4.812.056
8	Anak Usia SD/Setingkat	7 – 12 Tahun	14.501.206	13.837.844	28.339.050
9	Penduduk Usia Muda	< 15 Tahun	36.103.790	34.532.093	70.635.883
10	Penduduk Usia Produktif	15 – 64 Tahun	91.108.081	90.246.841	181.354.922
11	Penduduk Usia Non Produktif	≥ 65 Tahun	7.445.748	8.638.012	16.083.760
12	Penduduk Usia Lanjut	≥ 60 Tahun	12.340.850	13.561.139	25.901.989
13	Penduduk Usia Lanjut Risiko Tinggi	≥ 70 Tahun	4.108.217	5.243.716	9.351.933
14	Wanita Usia Subur (WUS)	15 – 49 Tahun	-	71.149.767	71.149.767
15	Wanita Usia Subur Imunisasi	15 – 39 Tahun	-	52.644.435	52.644.435
16	Ibu Hamil	1,1 X lahir hidup	-	5.256.483	5.256.483
17	Ibu Bersalin/Nifas	1,05 X lahir hidup	-	5.017.552	5.017.552

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2019, Hasil Estimasi Data Penduduk

Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019 (Diolah dari Sensus Penduduk 2010)

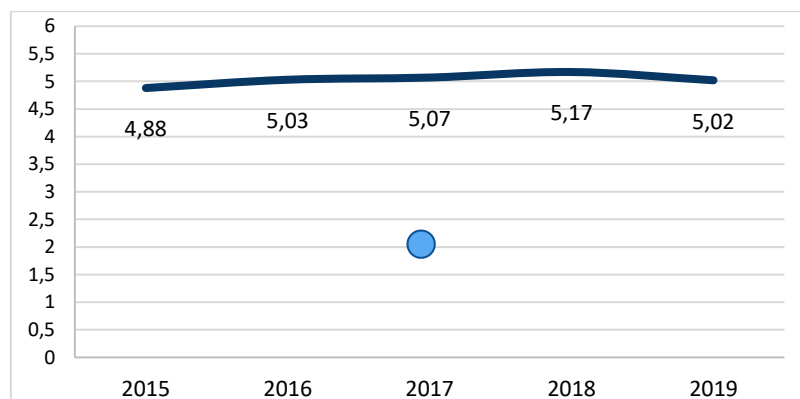
B. KEADAAN EKONOMI

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15.833,9 triliun dan PDB Perkapita mencapai Rp59,1 Juta atau US\$4 174,9. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya kondisi perekonomian global serta harga komoditas yang berfluktuasi.

Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 59 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32 persen, dan Pulau Kalimantan 8,05 persen.

GAMBAR 1.6
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2015 – 2019
(dalam persen)

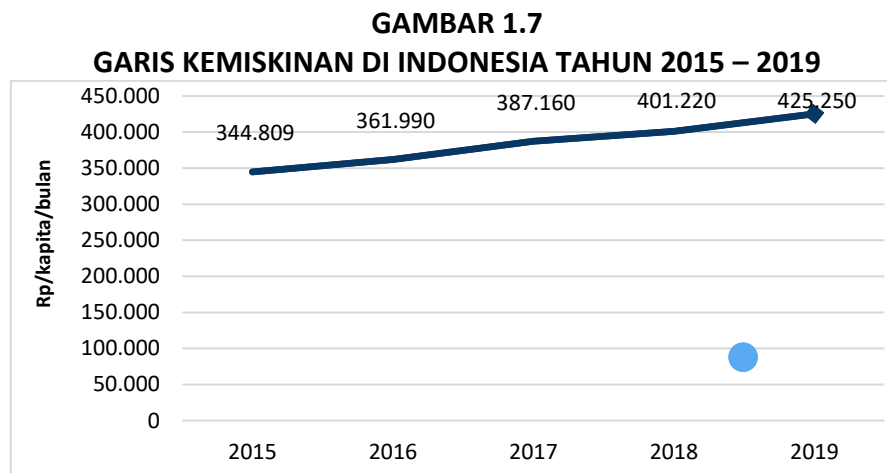


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Kemiskinan dalam arti luas diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya secara relatif sesuai dengan persepsi dirinya. Menurut BPS, Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Angka kemiskinan dapat diukur menggunakan tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, juga kombinasi keduanya. Indonesia termasuk negara yang mengukur data kemiskinan menggunakan tingkat pengeluaran per kapita dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pengukuran angka kemiskinan menggunakan metode garis kemiskinan pengeluaran, baik garis kemiskinan non makanan maupun garis kemiskinan makanan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran

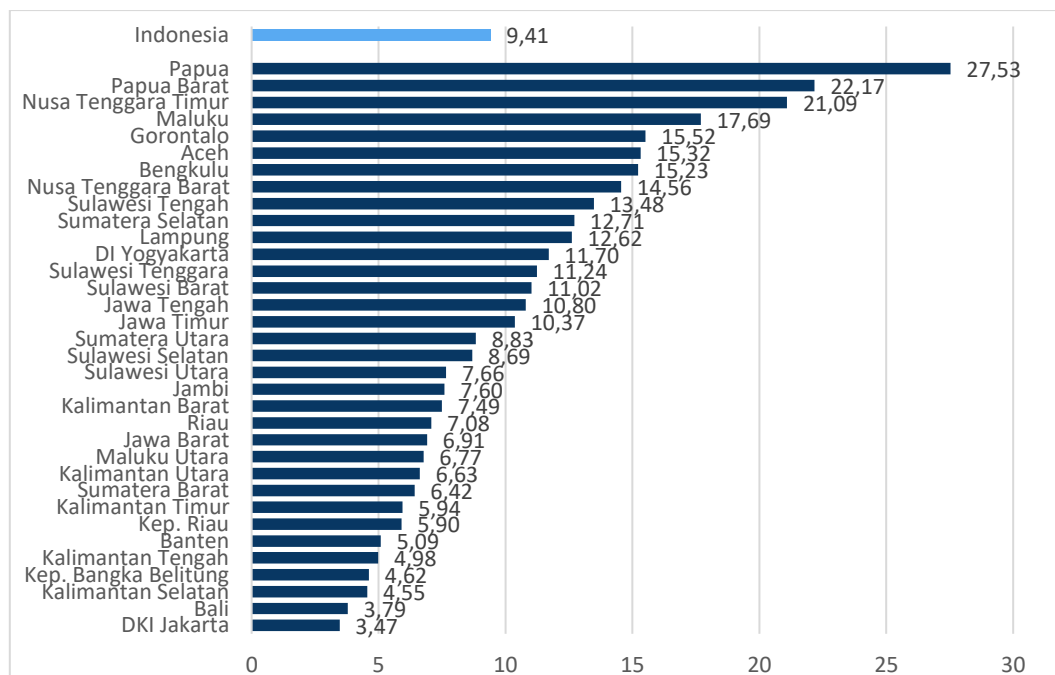
konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Peningkatan garis kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2019 (Gambar 1.7). Batas kemiskinan atau tingkat pengeluaran per kapita per bulan tahun 2019 sebesar Rp425.250,00.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang (9,41 persen), turun dibanding Maret 2018 yang sebesar 25,95 juta orang (9,82 persen). Selama periode Maret 2018 - Maret 2019, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,15 juta orang, sementara di daerah perdesaan berkurang 0,65 juta orang. Persentase penduduk miskin pada September 2018 sebesar 9,66% menurun menjadi 9,41% pada Maret 2019. Hal ini dikarenakan ada peningkatan upah riil buruh tani dan bangunan, inflasi yang stabil dalam periode September 2018-Maret 2019, dan adanya pelaksanaan program bantuan pangan non tunai. Data mengenai jumlah penduduk miskin dan persentasenya secara rinci dapat di lihat pada lampiran 3.c dan 3.d.

GAMBAR 1.8
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Dari gambar 1.8, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019, persentase kemiskinan terendah ada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,47%, sementara yang tertinggi ada di Provinsi Papua yang mencapai angka sebesar 27,53%.

TABEL 1.2
PERSEBARAN JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MISKIN
MENURUT KELOMPOK BESAR PULAU DI INDONESIA TAHUN 2016 – 2019

No	Kelompok Pulau	2016		2017		2018		2019	
		Jumlah (ribu)	%	Jumlah (ribu)	%	Jumlah (ribu)	%	Jumlah (ribu)	%
1	Sumatera	6.214,90	22,4	5969,11	22,5	5.919,3	23,1	5.851,28	23,27
2	Jawa	14.832,80	53,4	13936,46	52,4	13190,22	51,4	12.723,12	50,60
3	Kalimantan	970,2	3,5	988,48	3,7	973,17	3,8	974,18	3,87
4	Bali dan Nusa Tenggara	2.111,60	7,6	2059,34	7,7	2038,07	7,9	2.046,13	8,14
5	Sulawesi	2.088,20	7,5	2107,63	7,9	2025,16	7,9	2.009,87	7,99
6	Maluku dan Papua	1.546,70	5,6	1521,98	5,7	1528,66	6,0	1.540,15	6,13

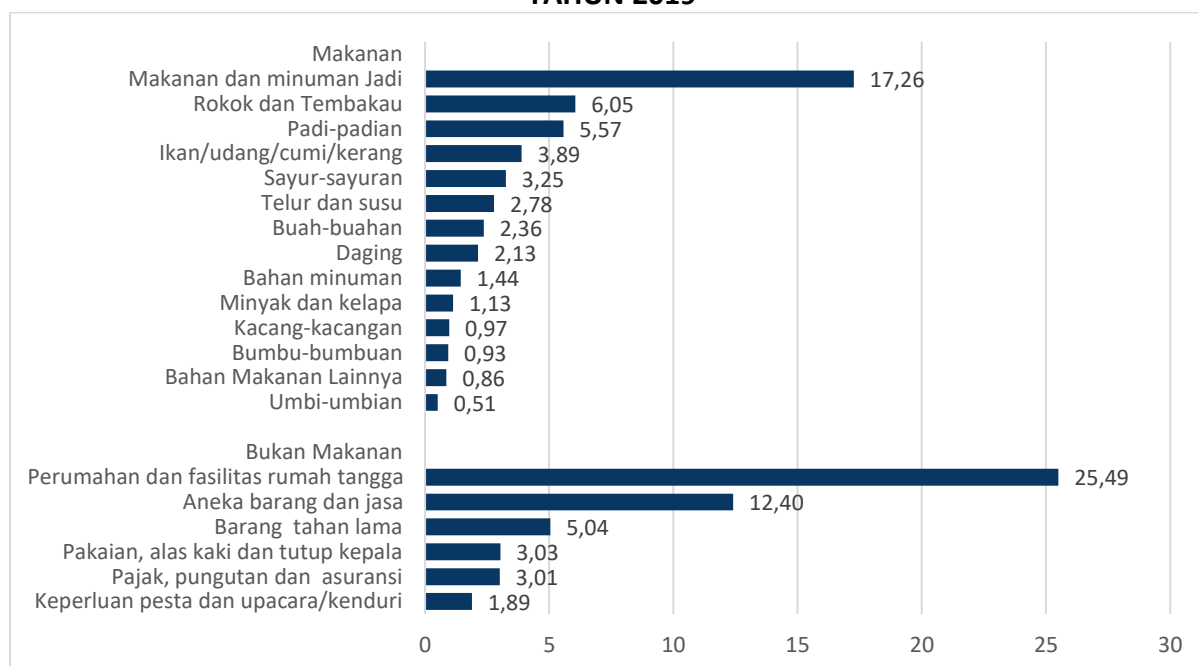
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan tabel 1.2, setengah dari total penduduk miskin di Indonesia berada di Pulau Jawa (50,60%). Walaupun pembangunan di Pulau Jawa merupakan yang paling cepat, namun proporsi penduduk paling besar berada di Pulau Jawa (56,58%) seperti terlihat pada gambar 1.3.

Salah satu alat ukur untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan adalah Koefisien Gini/ Indeks Gini (Gini Ratio). Indeks Gini adalah suatu koefisien yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau pemerataan distribusi pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan (pemerataan sempurna), sedangkan apabila bernilai 1 berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna (ketimpangan sempurna). Pada tahun 2019, nilai Indeks Gini Indonesia adalah 0,38 dimana cenderung tetap bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian mengenai Indeks Gini secara detail dapat dilihat pada lampiran 3.f.

Pendapatan yang diterima oleh keluarga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan keluarga tersebut. Namun informasi mengenai pendapatan rumah tangga yang akurat sulit diperoleh, sehingga dilakukan pendekatan melalui data pengeluaran rumah tangga. Data pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan, kedua kelompok tersebut dapat menggambarkan bagaimana rumah tangga mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya.

GAMBAR 1.9
PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN
TAHUN 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan hasil Susenas pada bulan Maret 2019, persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan (49,14%) lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran untuk non makanan (50,86%). Dari gambar 1.9 terlihat bahwa tiga pengeluaran terbesar yaitu untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga (25,49%), makanan dan minuman jadi (17,26%) dan pengeluaran untuk aneka barang dan jasa (12,40%).

Berdasarkan konsep dari *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization (ILO)*, penduduk terbagi atas dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya, yaitu kelompok Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja (aktif bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja) dan pengangguran (penduduk yang sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha, sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan/putus asa). Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk sedang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Kondisi ketenagakerjaan Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.3. Jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan. Jumlah angkatan kerja pada periode Februari 2016 sebanyak 127,67 juta orang menjadi 136,18 juta orang pada periode Februari 2019. Begitu pula dengan jumlah penduduk yang bekerja, meningkat dari 118,41 juta orang pada Agustus 2016 menjadi 126,52 juta orang pada Agustus 2019. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

mengalami kenaikan, dari 66,34% pada Agustus 2016 menjadi 67,49% pada Agustus 2019. TPAK merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah dan menunjukkan besaran relatif suplai tenaga kerja yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

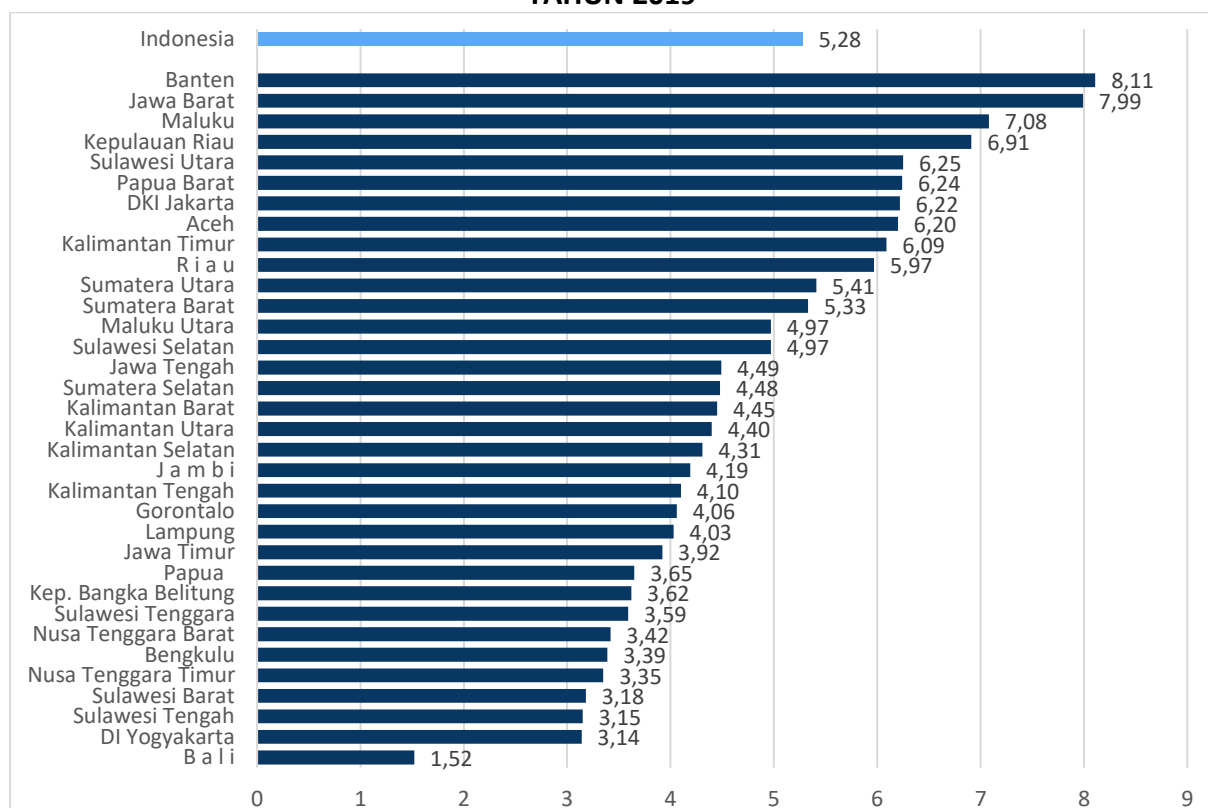
Jumlah pengangguran terbuka nilainya fluktuatif tiap periode dan tahunnya. Pada periode Agustus 2016, jumlah pengangguran terbuka adalah 7,03 juta orang, meningkat menjadi 7,04 juta orang di periode Agustus 2017, menurun menjadi 7,00 juta orang di periode Agustus 2018, dan kembali meningkat menjadi 7,05 juta orang di periode Agustus 2019.

TABEL 1.3
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT JENIS KEGIATAN UTAMA 2015-2019
(juta orang)

Angkatan Kerja	2016		2017		2018		2019	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Jumlah Angkatan Kerja	127,67	125,44	131,54	128,06	133,94	131,01	136,18	133,56
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,06	66,34	69,02	66,67	69,2	67,26	69,32	67,49
Jumlah Penduduk yang Bekerja	120,65	118,41	124,54	121,02	127,07	124,01	129,37	126,52
Jumlah Pengangguran Terbuka	7,02	7,03	7,01	7,04	6,87	7,00	6,82	7,05
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5	5,61	5,33	5,50	5,13	5,34	5,01	5,28

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

GAMBAR 1.10
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PER PROVINSI
TAHUN 2019



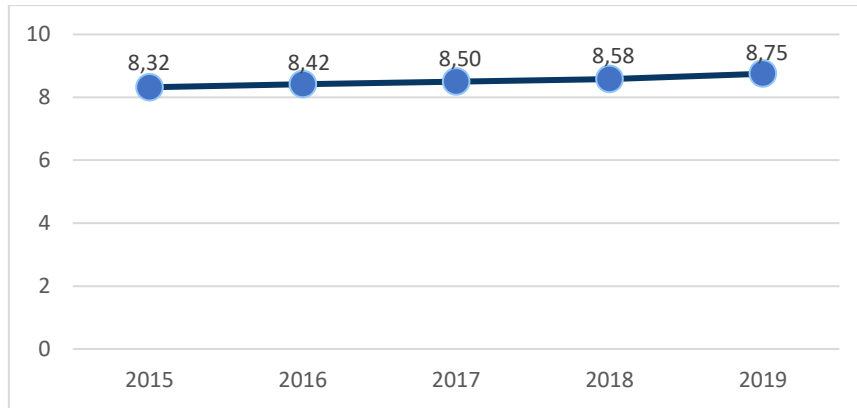
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Agustus 2016 sebesar 5,33% mengalami penurunan di periode Agustus 2019 menjadi 5,28%. Padahal, jumlah pengangguran terbuka naik 0,02 juta orang pada periode Agustus 2016 ke Agustus 2019 tapi dibarengi juga dengan jumlah angkatan kerja yang naik tinggi sekitar 8 juta orang pada periode dan tahun yang sama. TPT menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja, atau perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka biasanya seiring dengan penambahan jumlah penduduk serta tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru atau keengganan untuk menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk dirinya sendiri atau memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau tidak memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja.

C. KEADAAN PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi yang menentukan masa depan bangsa di masa mendatang. Pendidikan bermutu sebagai hasil upaya tersebut akan menjadi modal menuju Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Pendidikan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, salah satu indikator yang secara sensitif dapat mengukur tingkat pendidikan masyarakat yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

GAMBAR 1.11
RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS
TAHUN 2015 – 2019 (dalam tahun)



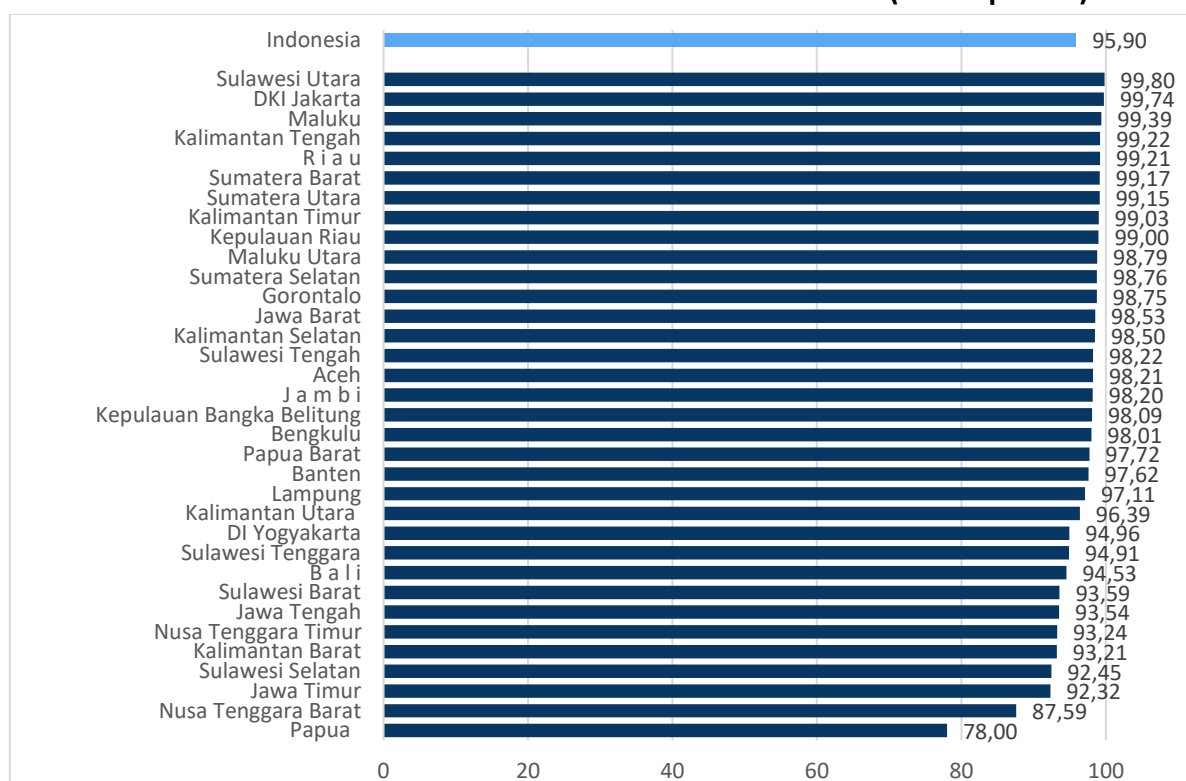
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Dari gambar 1.11, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk berumur 15 tahun ke atas mengalami peningkatan walaupun belum memenuhi program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan terlihat dari gambar yaitu RLS pada tahun 2015 sebesar 8,32 tahun menjadi 8,75 tahun pada tahun 2019.

Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki (9,08 tahun) cenderung lebih lama bersekolah dibandingkan perempuan (8,42 tahun). Rata-rata Lama Sekolah yang paling rendah di Provinsi Papua sebesar 6,85 tahun dan yang tertinggi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 11,11 tahun. Sebanyak 16 (enam belas) provinsi telah mencapai program wajib belajar 9 tahun. Rincian data mengenai Rata-rata Lama Sekolah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut provinsi dan jenis kelamin dapat dilihat pada Lampiran 3.j.

Kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis merupakan kemampuan yang mendasar. Kemampuan baca tulis tersebut dapat dilihat berdasarkan indikator Angka Melek Huruf (AMH). Ukuran AMH digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, sehingga bertambah pengetahuan dan keterampilan mereka, yang pada akhirnya penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya di berbagai bidang kehidupan. AMH merupakan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Berdasarkan jenis kelamin, AMH laki-laki (97,48 %) lebih tinggi dari perempuan (94,33 %). Secara rinci dan detail, AMH (persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf) menurut provinsi dan jenis kelamin dapat dilihat pada Lampiran 3.k. Cakupan AMH per provinsi dapat dilihat seperti Gambar 1.12.

GAMBAR 1.12
ANGKA MELEK HURUF MENURUT PROVINSI TAHUN 2019 (dalam persen)

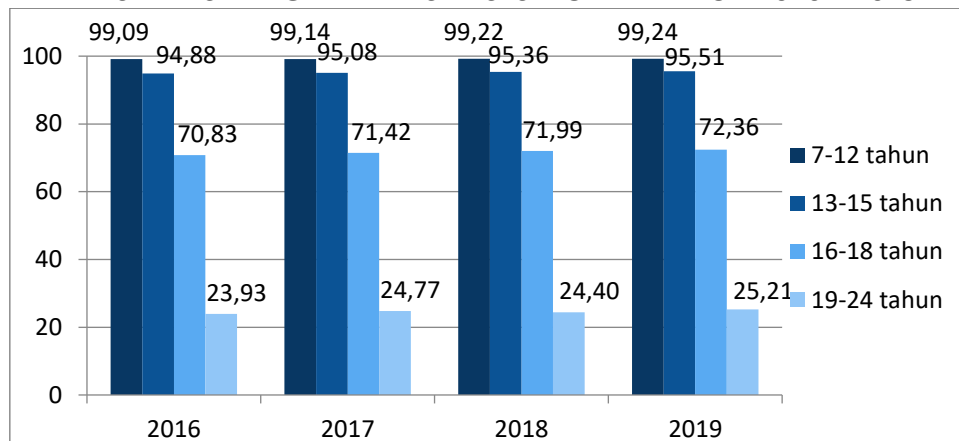


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Angka partisipasi adalah indikator pendidikan yang mengukur tingkat partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur sekolah atau jenjang pendidikan tertentu. Ada tiga jenis indikator yang memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Nilai APS merupakan persentase jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dibagi dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. APS secara umum dikategorikan menjadi 3 kelompok umur, yaitu 7-12 tahun mewakili umur setingkat SD, 13-15 tahun mewakili umur setingkat SMP/MTs, 16-18 tahun mewakili umur setingkat SMA/SMK dan 19-24 tahun mewakili umur setingkat perguruan tinggi.

GAMBAR 1.13
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH TAHUN 2016 – 2019

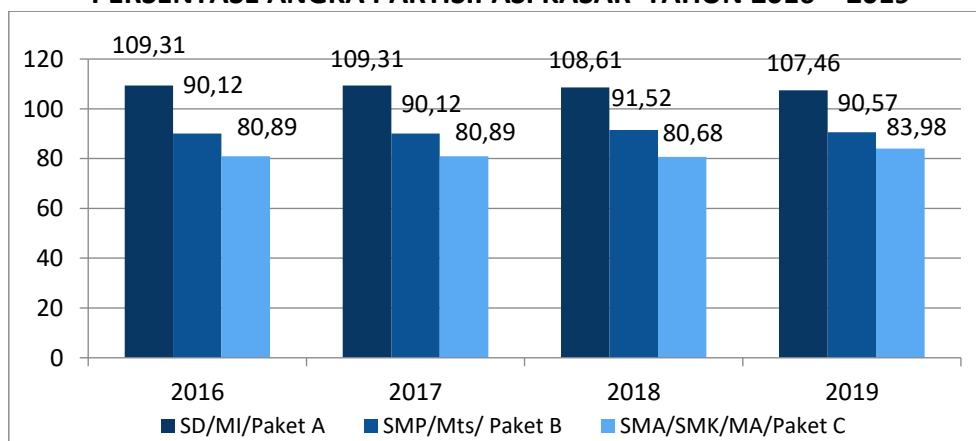


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan gambar 1.13, persentase APS setiap tahunnya di setiap kelompok umur mengalami peningkatan. Semakin tinggi kelompok umur, semakin rendah tingkat partisipasi sekolahnya. Hal ini dimungkinkan karena usia pada kelompok umur yang tinggi (16-18 tahun dan 19-24 tahun) masuk ke dalam angkatan kerja. Peningkatan persentase APS pada kelompok umur 7-12 tahun (setara SD/ sederajat) dan 13-15 tahun (setara SMP/ sederajat) dimungkinkan karena adanya program wajib belajar 9 tahun. Begitupula dengan peningkatan persentase APS pada kelompok 16-18 tahun (SMA/ sederajat) yang terjadi karena adanya program wajib belajar 12 tahun.

Angka Partisipasi Kasar adalah proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Jika jumlah populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu melebihi jumlah anak pada batas usia sekolah sesuai jenjang yang bersesuaian, maka nilai APK pada jenjang tersebut akan lebih dari 100. Hal ini disebabkan karena adanya siswa yang sekolah walaupun usianya belum mencapai usia sekolah yang bersesuaian, siswa yang telat masuk sekolah, atau banyaknya pengulangan kelas pada siswa. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

GAMBAR 1.14
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI KASAR TAHUN 2016 – 2019

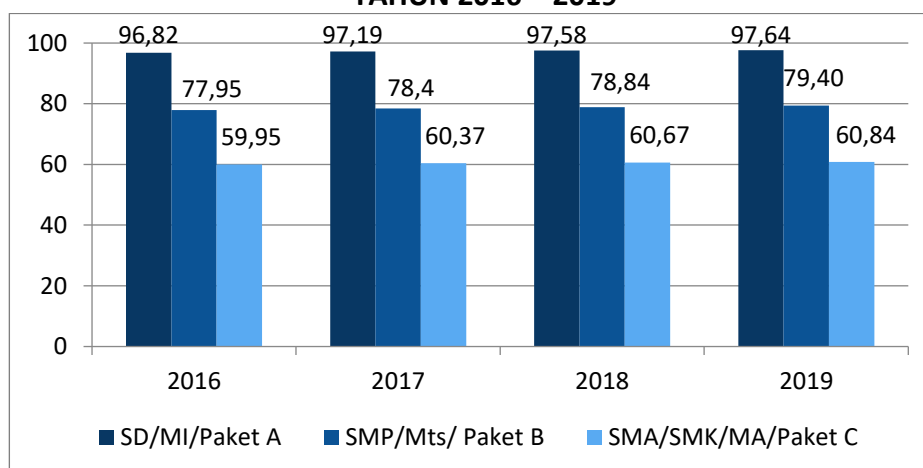


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Nilai APK (Gambar 1.14) untuk SD/MI tahun 2016-2019 melebihi 100% yang menunjukkan masih adanya penduduk yang terlalu cepat sekolah (penduduk usia di bawah 7 tahun yang sudah bersekolah) atau terlambat bersekolah (penduduk usia lebih dari 12 tahun masih bersekolah di SD/ sederajat). Gambar 1.14 menunjukkan bahwa dari tahun 2016-2019, nilai APK untuk SMA/ sederajat mengalami kenaikan namun sempat turun sedikit di tahun 2018 dan naik kembali di tahun 2019. Hal ini cenderung meningkat dibandingkan nilai APK SD/MI dan SMP/MTs. Secara umum APK penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan lebih banyak penduduk perempuan yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Rincian APK menurut provinsi dan jenis kelamin tahun 2019 terdapat pada Lampiran 3.0.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya, dinyatakan dalam persen. APM bertujuan untuk mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator pendidikan yang lebih baik karena memperhitungkan juga partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

GAMBAR 1.15
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MURNI PENDIDIKAN
TAHUN 2016 – 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Tahun 2019 nilai APM untuk SD/ sederajat sebesar 97,64%, SMP/ sederajat sebesar 79,40% dan SMA/ sederajat sebesar 60,84%. Kondisi ini terus meningkat pada semua jenjang pendidikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Nilai APM lebih mencerminkan kondisi partisipasi sekolah dibandingkan nilai APK. Rincian APM menurut provinsi tahun 2016-2019 terdapat pada Lampiran 3.p.

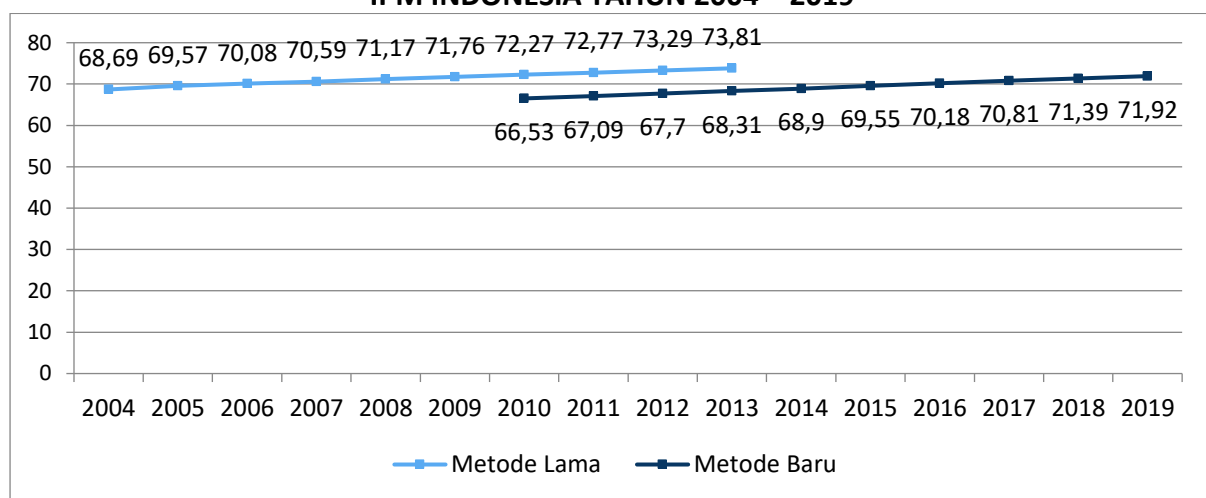
D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang.

Tahun 2014 terjadi perubahan metodologi IPM. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Metode agregasi dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Pembangunan manusia Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik dengan metode lama dan metode baru. Secara umum, pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2018. Nilai IPM Indonesia telah meningkat 5,39 poin, yaitu dari 66,53 tahun 2010 menjadi 71,92 pada tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,89% per tahun dan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” mulai tahun 2016. Pada Tahun 2019 IPM Indonesia naik sebesar 0,53 dari tahun sebelumnya yaitu 71,39.

GAMBAR 1.16
IPM INDONESIA TAHUN 2004 – 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 71,92. Angka ini meningkat sebesar 0,53 poin atau tumbuh sebesar 0,74 persen dibandingkan tahun 2018. Bayi yang lahir pada tahun 2019 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,34 tahun, lebih lama 0,14 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya. Anak-anak yang pada tahun 2019 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,95 tahun (hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang Diploma I), lebih lama 0,04 tahun dibandingkan dengan yang berumur sama pada tahun 2018. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,34 tahun (hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang kelas IX), lebih lama 0,17 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) sebesar 11,30 juta rupiah per tahun, meningkat 240 ribu rupiah dibandingkan pengeluaran tahun sebelumnya (lihat lampiran 3.r).

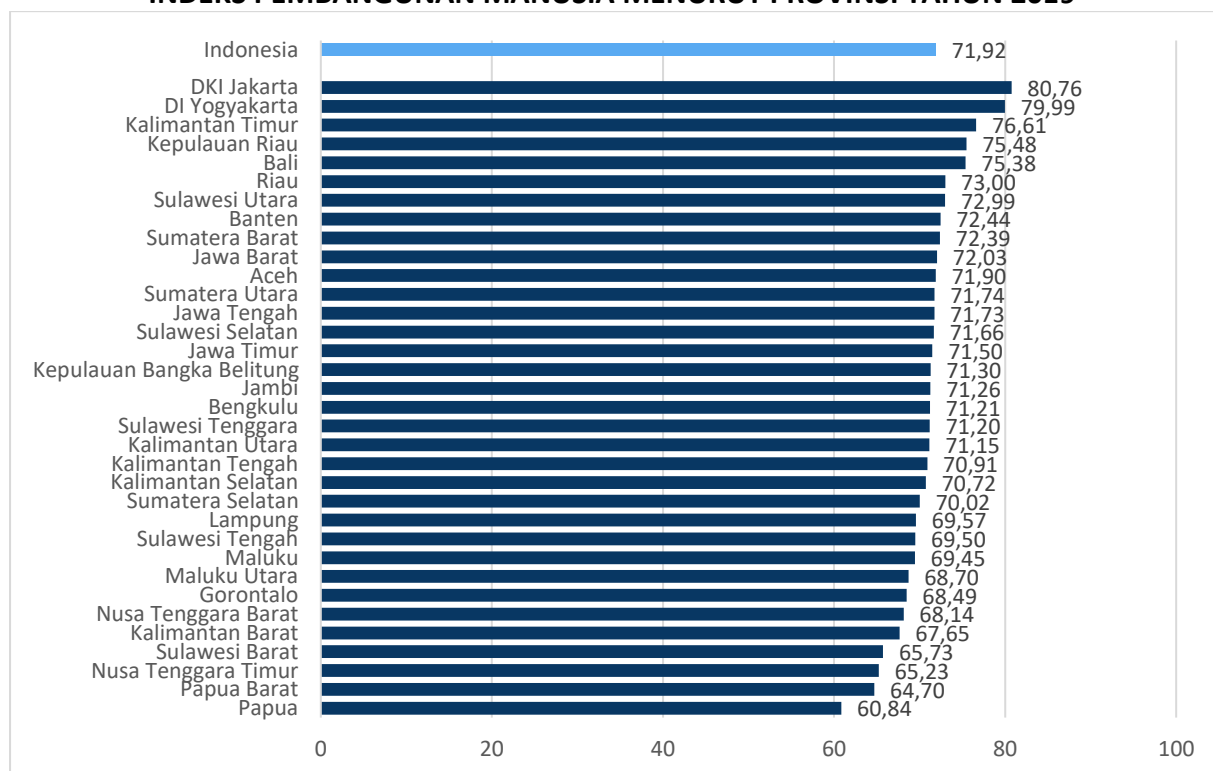
Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu:

- $IPM < 60$: IPM rendah
- $60 \leq IPM < 70$: IPM sedang
- $70 \leq IPM < 80$: IPM tinggi
- ≥ 80 : IPM sangat tinggi

Berdasarkan pembagian tersebut, hanya Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai nilai IPM kategori sangat tinggi (80,76). Terdapat 22 provinsi dengan kategori IPM tinggi dan 11 provinsi masuk dalam kategori IPM sedang.

Provinsi dengan peringkat IPM tertinggi adalah DKI Jakarta. Sejak pertama kali dihitung hingga tahun 2018, capaian IPM Provinsi DKI Jakarta selalu paling tinggi di antara provinsi lainnya. Ketersediaan sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian serta kemudahan akses terhadap semua sarana tersebut membuat Provinsi DKI Jakarta lebih unggul dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Kondisi ini menjadi salah satu faktor pendorong tingginya capaian pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta.

GAMBAR 1.17
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020



+ Bab II

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

+



II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

Keberadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat suatu negara. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bab ini akan membahas tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari FKTP/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, klinik pratama, praktik dokter/dokter gigi perseorangan), FKTRL/Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Lanjut (rumah sakit umum dan rumah sakit khusus), dan bab ini juga menjelaskan data Fasilitas Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) adalah wahana pemberdayaan masyarakat, yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas Puskesmas, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya. Proses dalam mewujudkan upaya pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal yang saling berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergis dan dinamis. Salah satu faktor eksternal dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah pendampingan oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat. Peran fasilitator pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu menyelenggarakan UKBM secara mandiri dan menerapkan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS). Salah satu UKBM yang paling aktif dan dikenal masyarakat adalah Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), selain itu terdapat beberapa jenis UKBM diantaranya Posyandu lansia, Pos UKK (Unit Kesehatan Kerja), Polindes (Pondok Bersalin Desa), Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren), dan Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular).

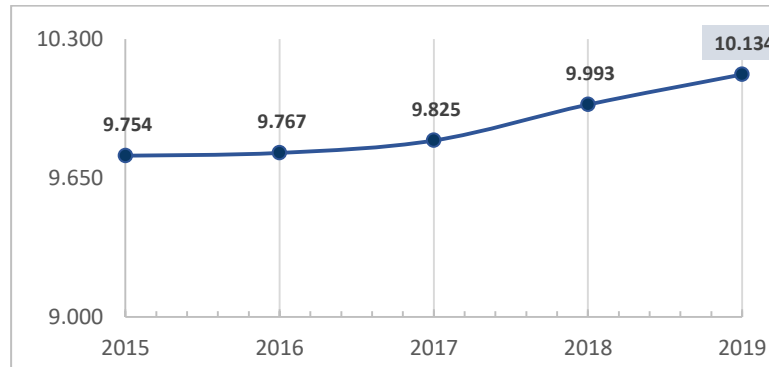
A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Total jumlah Puskesmas di Indonesia sampai dengan Desember 2019 adalah 10.134 puskesmas, yang terdiri dari 6.086 Puskesmas rawat inap dan 4.048 Puskesmas non rawat inap. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2018 yaitu sebanyak 9.993, dengan jumlah Puskesmas

rawat inap sebanyak 3.623 puskesmas dan Puskesmas non rawat inap sebanyak 6.370 puskesmas. Data mengenai jumlah Puskesmas ini dapat dilihat secara lengkap pada Lampiran 2.1.

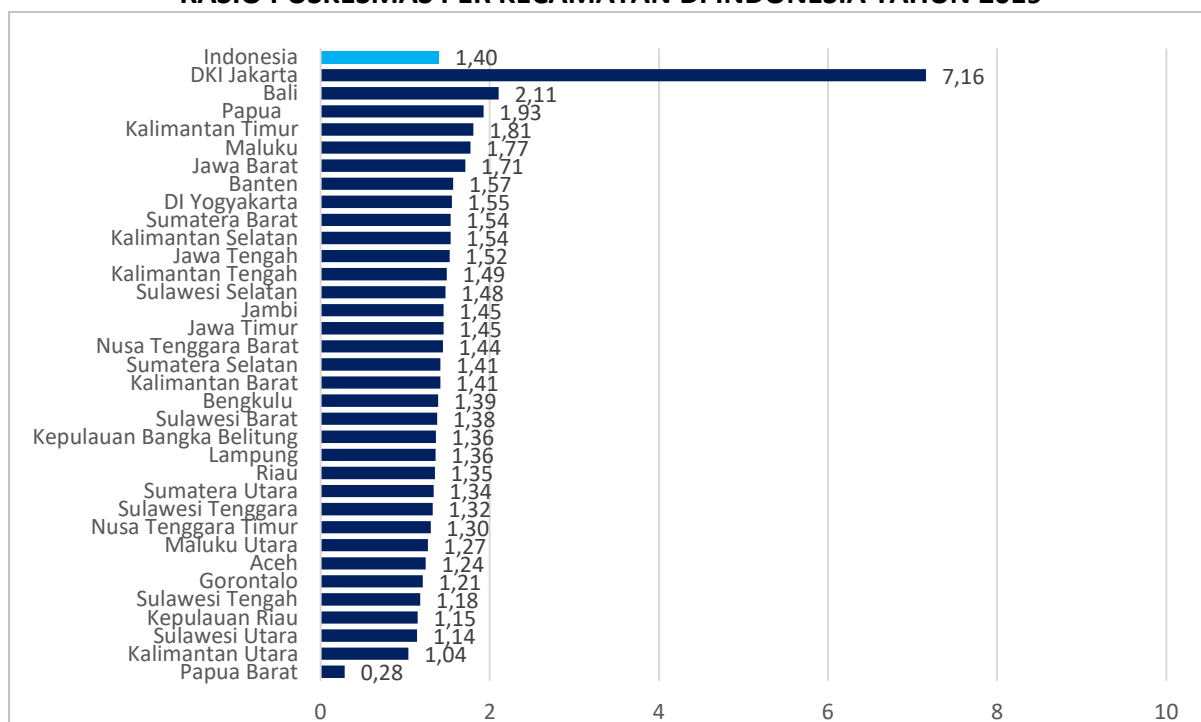
GAMBAR 2.1
JUMLAH PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2015 – 2019



Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2020

Perkembangan jumlah puskesmas sejak tahun 2015 jumlah Puskesmas semakin meningkat, dari 9.754 unit menjadi 10.134 Puskesmas pada tahun 2019. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, peningkatan jumlah Puskesmas rata-rata 70 Puskesmas per tahun, yang dapat dilihat trennya pada Gambar 2.1. Peningkatan jumlah Puskesmas tersebut menggambarkan upaya pemerintah dalam pemenuhan akses terhadap pelayanan kesehatan primer. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer dapat dilihat secara umum dari rasio Puskesmas terhadap kecamatan. Rasio Puskesmas terhadap kecamatan pada tahun 2019 sebesar 1,4. Hal ini menggambarkan bahwa rasio ideal Puskesmas terhadap kecamatan yaitu minimal 1 Puskesmas di 1 kecamatan, secara nasional sudah terpenuhi, tetapi perlu diperhatikan distribusi dari Puskesmas tersebut di seluruh kecamatan.

GAMBAR 2.2
RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN DI INDONESIA TAHUN 2019



Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2019; Kementerian Dalam Negeri, 2020

Gambar 2.2 menjelaskan provinsi dengan rasio Puskesmas terhadap kecamatan tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 7,16 Puskesmas per kecamatan dan Provinsi Bali 2,11 Puskesmas per kecamatan, sedangkan Papua Barat memiliki rasio terendah yaitu sebesar 0,28 Puskesmas per kecamatan. Rasio Puskesmas per kecamatan tersebut dapat menggambarkan kondisi aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer. Selain ketersediaan minimal 1 Puskesmas di setiap kecamatan, aksesibilitas masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya kondisi geografis, luas wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana dasar, sosial ekonomi dan kemajuan suatu daerah. Sebagai contoh, provinsi dengan rasio terendah di provinsi Papua Barat. Hal ini menggambarkan bahwa akses masyarakat di provinsi tersebut terhadap fasilitas pelayanan kesehatan primer masih belum ideal. Rasio di bawah 1 menunjukkan bahwa belum semua kecamatan memiliki puskesmas dan adanya kondisi geografis yang sulit dan rata-rata tingkat sosial ekonomi masyarakat yang rendah di daerah tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan lagi, peta sebaran rasio puskesmas dapat dilihat pada Gambar 2.3. Data mengenai rasio Puskesmas per kecamatan setiap provinsi dapat dilihat pada Lampiran 4.c.

GAMBAR 2.3
PETA RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN DI INDONESIA
TAHUN 2019



Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2020; Kementerian Dalam Negeri, 2020

Dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer, terdapat tiga indikator yang terkait dengan penyelenggaraan Puskesmas pada RPJMN tahun 2015–2019 dan Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019, yaitu 1) Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas terakreditasi 2) jumlah Puskesmas non rawat Inap dan Puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar dan 3) jumlah Puskesmas yang bekerjasama dengan Unit Transfusi Darah (UTD) dan rumah sakit dalam pelayanan darah untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI).

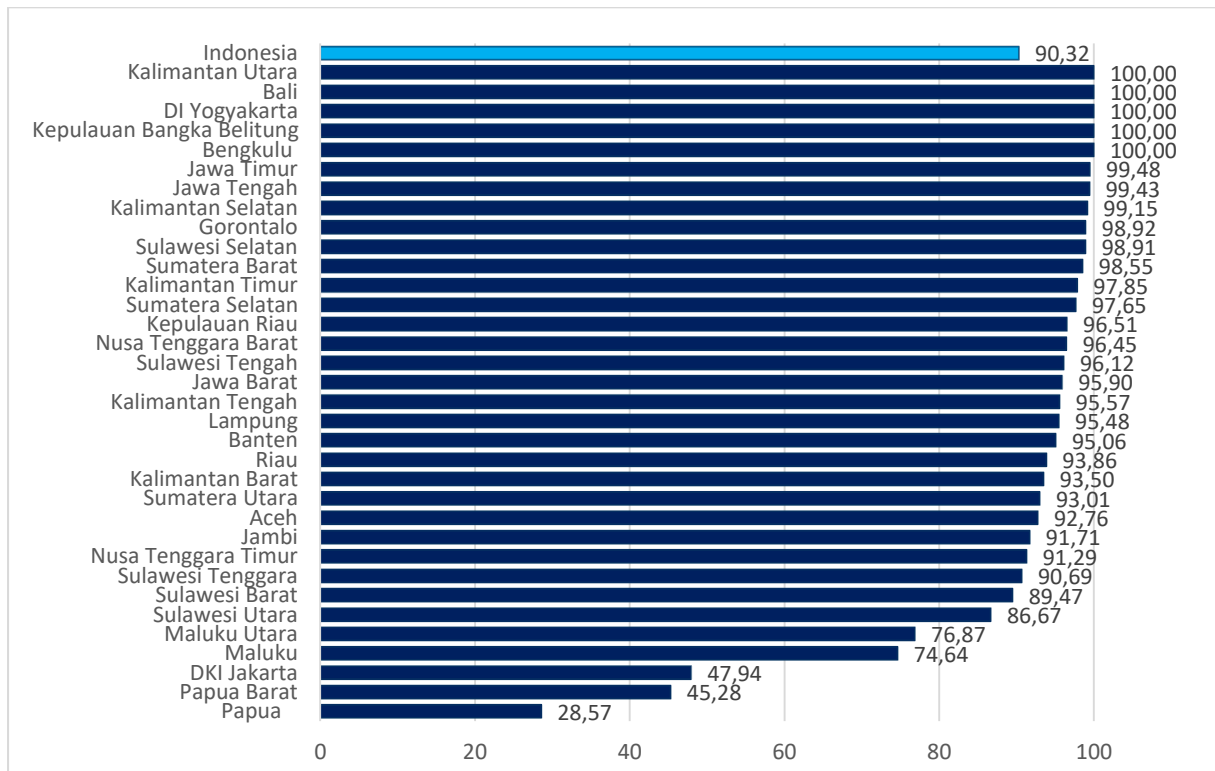
1. Akreditasi Puskesmas

Akreditasi merupakan suatu pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah memenuhi standar akreditasi. Akreditasi merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan termasuk untuk pelayanan FKTP. Sesuai Permenkes Nomor 46 Tahun 2015, akreditasi FKTP bertujuan untuk 1) meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, 2) meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya, serta Puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi sebagai institusi, dan 3) meningkatkan kinerja Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan/atau kesehatan masyarakat. Dengan akreditasi puskesmas diharapkan dapat membangun sistem tata kelola yang lebih baik secara bertahap dan berkesinambungan melalui perbaikan tata kelola: 1) manajemen secara institusi, 2) manajemen program, 3) manajemen risiko, dan 4) manajemen mutu.

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pasal 39 menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Puskesmas wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal tiga tahun sekali. Dan sebagai tindak lanjut, maka diterbitkan dasar hukum yang mengatur teknis pelaksanaan akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melalui Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

Tahun 2019, terdapat 9.153 Puskesmas yang telah terakreditasi atau sekitar 90,32% dari 10.134 Puskesmas (Gambar 2.4). Provinsi dengan persentase Puskesmas terakreditasi 100% adalah Provinsi Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Utara dan DI Yogyakarta. Provinsi dengan persentase Puskesmas terakreditasi terendah adalah Papua (28,57%). Dari 10.134 Puskesmas yang terakreditasi sampai tahun 2019, untuk tingkat kelulusan akreditasi masih didominasi oleh status kelulusan madya dan dasar. Adapun distribusi tingkat kelulusan akreditasi Puskesmas adalah sebanyak 5.068 (55,37%) Puskesmas terakreditasi dengan status kelulusan madya, sebanyak 2.177 (23,78%) Puskesmas terakreditasi dengan status kelulusan dasar, 1.669 (18,23%) Puskesmas terakreditasi status kelulusan utama, dan 239 (2,61%) Puskesmas terakreditasi dengan status kelulusan paripurna. Data mengenai akreditasi Puskesmas dapat dilihat secara lengkap pada Lampiran 4.d.

GAMBAR 2.4
PERSENTASE AKREDITASI PUSKESMAS DI INDONESIA
TAHUN 2019

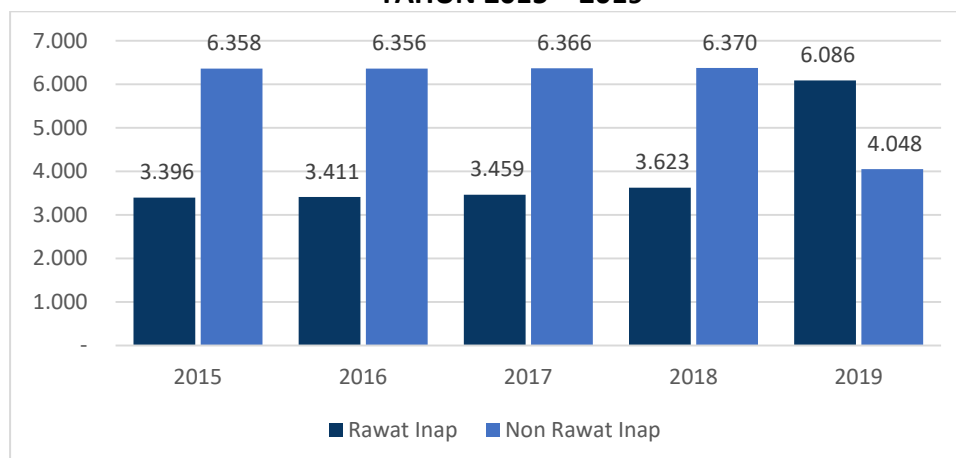


Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

2. Perkembangan Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap

Puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan dibagi atas dua kategori yaitu Puskesmas rawat inap dan Puskesmas non rawat inap. Berikut disajikan perkembangan jumlah Puskesmas rawat inap dan non rawat inap dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

GAMBAR 2.5
JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP DI INDONESIA
TAHUN 2015 – 2019



Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2020

Jumlah Puskesmas rawat inap selama lima tahun terakhir terus meningkat, yaitu sebanyak 3.396 unit pada tahun 2015, lalu meningkat menjadi 6.086 unit pada tahun 2019 (Gambar 2.5).

Puskesmas non rawat inap mengalami penurunan jumlah Puskesmasnya berdasarkan status pada tahun 2018 (6.370 puskesmas non rawat inap) dan pada tahun 2019 (4.048 puskesmas non rawat inap). Gambaran lebih rinci tentang jumlah dan jenis Puskesmas menurut provinsi terdapat pada Lampiran 4.b.

3. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, dalam upayanya melibatkan dan membutuhkan dukungan kerjasama lintas sektor. Oleh karena itu, pencapaian tujuan kesehatan kerja dan olahraga bagi semua pekerja dan peningkatan produktivitas pekerja yang optimal membutuhkan kebijakan dan rencana strategi dalam rangka mengamankan kondisi kerja dan mempromosikan kesehatan kerja, serta paling utama melindungi pekerja pada kelompok berisiko seperti pekerja wanita, pekerja anak, pekerja usia lanjut dan pekerja yang terpajan bahan berbahaya.

Arah kebijakan dan strategi kesehatan kerja dan olah raga adalah berupaya membangun masyarakat yang sehat bugar dan produktif dengan menitikberatkan upaya promotif dan preventif. Memperkuat kemitraan dan pemberdayaan masyarakat Penyelenggaraan program kesehatan kerja dan olahraga secara bertahap, terpadu dan berkesinambungan Pengembangan program kesehatan kerja dan olahraga melibatkan LP/LS, dunia usaha, swasta dan masyarakat. Penyelenggaraan program kesehatan kerja dan olahraga sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan Standar Operasional Prosedur. Strategi Kemitraan dan pemberdayaan kesehatan pada kelompok pekerja berbasis masyarakat pekerja. Advokasi dan sosialisasi kesehatan kerja dan olahraga. Penguatan layanan kesehatan bagi pekerja. Penguatan kebijakan dan manajemen kesehatan kerja dan olahraga. Penguatan sistem informasi kesehatan kerja dan olahraga Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014, pelayanan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga merupakan upaya kesehatan masyarakat pengembangan yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas. Namun demikian, upaya kesehatan masyarakat esensial juga dilakukan terhadap sasaran upaya kesehatan kerja dan olahraga, khususnya pekerja, anak sekolah, dan jemaah haji.

Puskesmas memiliki peran strategis dalam upaya kesehatan kerja kedua sektor tersebut, utamanya pada sektor informal. Upaya kesehatan kerja di Puskesmas diselenggarakan sesuai dengan keadaan dan permasalahan yang ada di wilayah Puskesmas atau lokal spesifik. Dengan demikian sampai saat ini upaya kesehatan kerja di Puskesmas lebih dititikberatkan pada wilayah industri sehingga dapat menjangkau pekerja yang ada di Indonesia.

a. Upaya Kesehatan Kerja

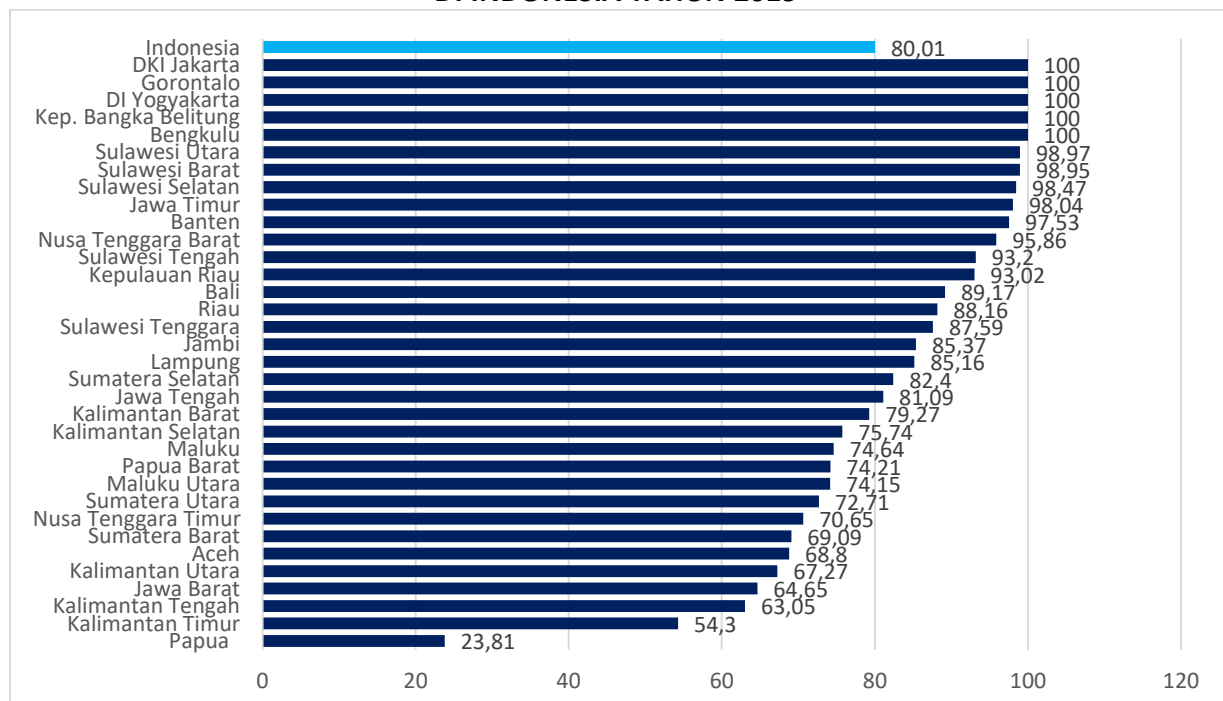
Pada indikator Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, kesehatan kerja memiliki target persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar dan/atau memberikan pelayanan kesehatan bagi pekerja di wilayah kerjanya, diantaranya melalui Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK).

Puskesmas yang telah melaksanakan kesehatan kerja dasar pada tahun 2019 mencapai 8.108 puskesmas atau sebanyak 80,01% lebih banyak dari tahun 2018 yang mencapai 6.963 atau sebanyak 69,68%. Provinsi Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DI Yogyakarta dan Gorontalo merupakan provinsi dengan capaian 100% puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dasar,

sedangkan Provinsi Papua menjadi provinsi dengan capaian terkecil (rincian Gambar 2.6). Untuk capaian jumlah Pos UKK yang ada dan dibina Puskesmas pada tahun 2019 sebanyak 7.289 dengan jumlah sasaran sebesar 7.199.

Selain itu upaya kesehatan kerja juga dilakukan melalui pembentukan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP), upaya kesehatan kerja juga diimplementasikan di perusahaan, GP2SP merupakan upaya dari pemerintah, masyarakat, maupun pemberi kerja dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggalang dan berperan serta guna meningkatkan kepedulian dan mewujudkan upaya memperbaiki kesehatan pekerja/buruh perempuan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kualitas generasi penerus dalam implementasinya, GP2SP dilaksanakan ditempat kerja terutama perusahaan yang didalamnya terdapat program, 1) Pelayanan kesehatan reproduksi , 2) Deteksi Dini PTM, 3) Pemenuhan Gizi Pekerja, 4) Peningkatan pemberian ASI selama waktu kerja, dan 5) Pengendalian lingkungan kerja.

GAMBAR 2.6
PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DASAR
DI INDONESIA TAHUN 2019



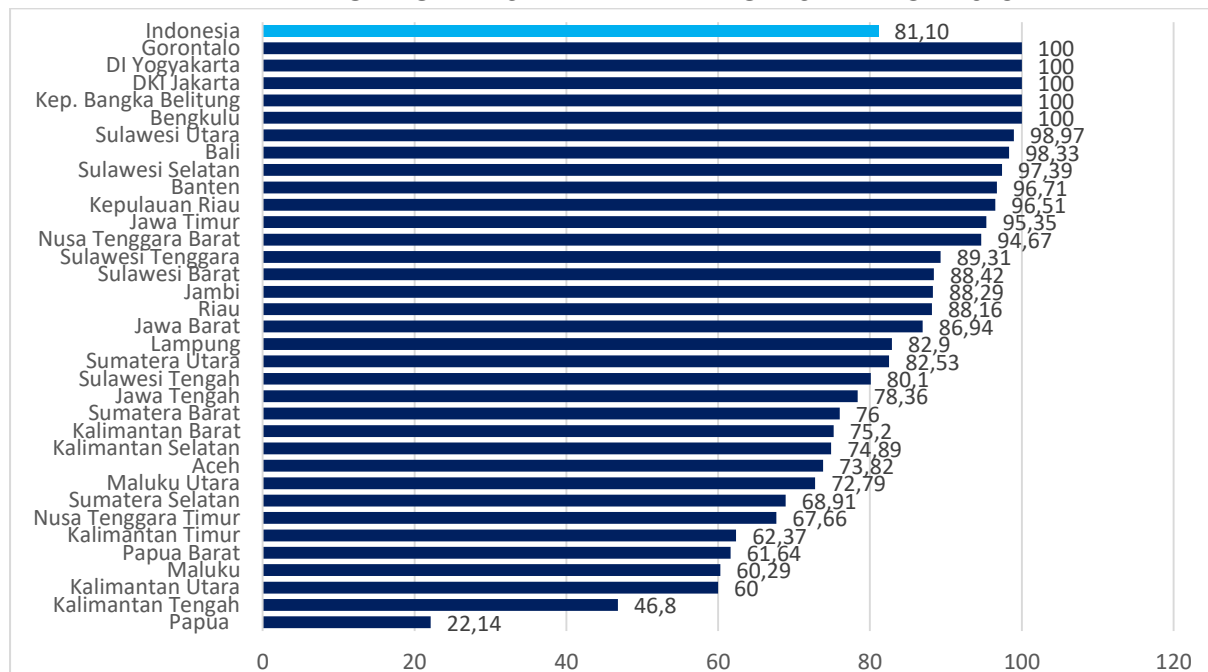
Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2019

b. Upaya Kesehatan Olahraga

Penyelenggaraan upaya kesehatan olahraga di Puskesmas terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya pendataan, pembinaan, dan pelayanan kesehatan olahraga. Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga adalah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan olahraga melalui pembinaan kelompok olahraga dan atau pelayanan kesehatan olahraga di wilayah kerjanya. Pada tahun 2019 indikator persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya tercapai sebanyak 8.219 Puskesmas (80,96%). Dari 34 provinsi tersebut, provinsi dengan jumlah Puskesmas yang mencapai target 50% (target Renstra) berjumlah 24 provinsi, terdapat 3 provinsi dengan capaian 100%

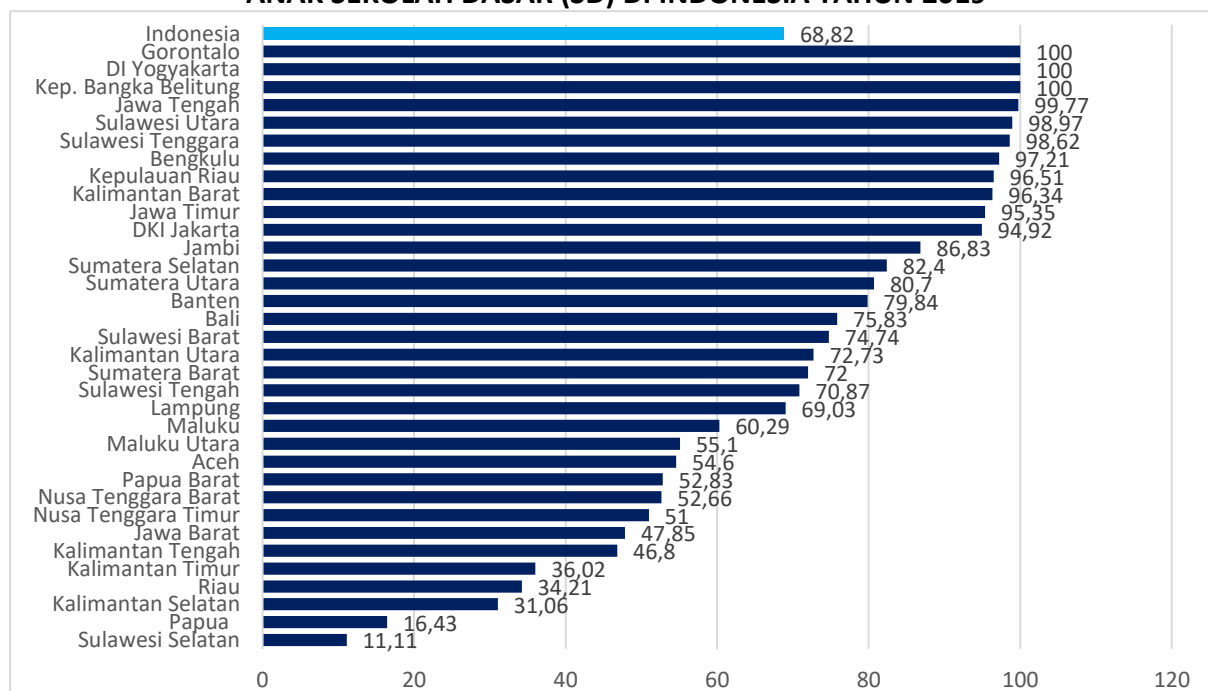
puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga yaitu Sulawesi Barat, Gorontalo, DKI Jakarta dan Kep. Bangka Belitung (Gambar 2.7).

GAMBAR 2.7
PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN KESEHATAN OLAHRAGA
PADA KELOMPOK MASYARAKAT DI INDONESIA TAHUN 2019



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

GAMBAR 2.8
PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN KESEHATAN OLAHRAGA BAGI
ANAK SEKOLAH DASAR (SD) DI INDONESIA TAHUN 2019



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD adalah Puskesmas yang melakukan penjangkauan dini atau pembinaan kebugaran jasmani anak sekolah melalui gerakan peregangan atau bermain pada jam istirahat. Tahun 2019 indikator persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD mencapai 68,82% (6.974 Puskesmas) dari target 75% (7.325 Puskesmas). Provinsi dengan capaian tertinggi berdasarkan jumlah puskesmas adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sedangkan 3 provinsi dengan capaian 100% puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga bagi anak SD adalah Provinsi DI Yogyakarta, Kep. Bangka Belitung, dan Gorontalo (Gambar 2.8). Indikator persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD diperoleh melalui integrasi laporan dengan kegiatan Kesehatan Keluarga dan laporan Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga di wilayah kerjanya.

Data mengenai Puskesmas dengan pelayanan pengembangan (jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar, jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan OR pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya, jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD) secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 4.f.

4. Pelayanan Kesehatan Tradisional

Upaya pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional diperkuat dengan adanya regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah seperti Permenkes No 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Permenkes No 37 tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi, dan Permenkes No 15 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer serta peraturan lain yang mendukung.

Perkembangan pemanfaatan pelayanan kesehatan tradisional di masyarakat dalam bentuk pemberdayaan asuhan mandiri kesehatan tradisional melalui pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresure dapat dilihat pada hasil Riskesdas Tahun 2018, dimana proporsi nasional pemanfaatan TOGA sebesar 24,6% dengan proporsi tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 55,6%. Upaya pelayanan kesehatan tradisional yang dimanfaatkan oleh masyarakat terbanyak dalam bentuk ramuan jadi (48%), ramuan buatan sendiri (31,8%), keterampilan manual (65,3%), keterampilan olah pikir (1,9%), keterampilan energi (2,1%). Sedangkan pemberi pelayanan kesehatan tradisional masih didominasi oleh penyehat tradisional sebanyak 98,5% dan oleh Nakestrad masih terbatas sebesar 2,7%. Berdasarkan data proporsi rumah tangga yang memanfaatkan upaya kesehatan tradisional, sudah 31,4% rumah tangga yang memanfaatkan Yankestrad, 12,9% rumah tangga yang melakukan upaya sendiri dan 55,7% rumah tangga yang tidak memanfaatkan yankestrad.

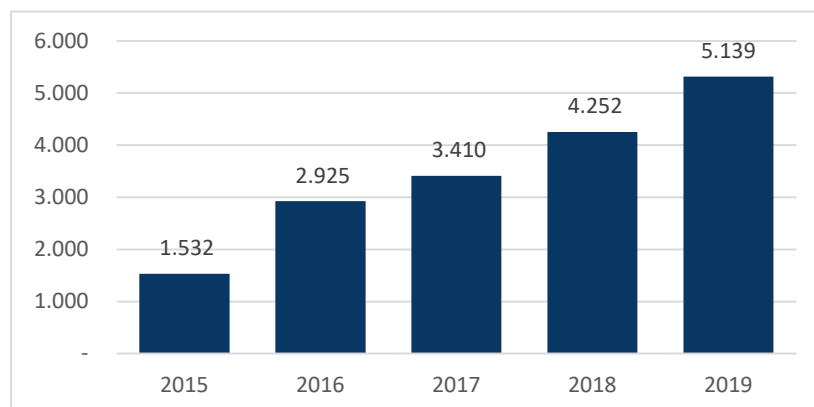
Salah satu strategi pembangunan kesehatan adalah mendorong masyarakat agar mampu memelihara kesehatannya, serta mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri melalui kemampuan asuhan mandiri. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan.

Pemanfaatan TOGA dan Keterampilan (akupresur) ini harus dilakukan dalam satu sistem pelayanan kesehatan dasar sebagai bagian dari program Indonesia Sehat sebagaimana terdapat pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Secara bertahap mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 diharapkan 75% puskesmas di Kabupaten/Kota melakukan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional, termasuk didalamnya puskesmas melakukan pembinaan terhadap kelompok asuhan mandiri dalam memanfaatkan TOGA dan Keterampilan (akupresur) melalui pelaksanaan asuhan

mandiri berarti kita telah berupaya merubah paradigma pengobatan kuratif menjadi promotif dan preventif, yang bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas bagi keluarga dalam menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarganya. Sesuai dengan kebijakan Kementerian Kesehatan, diharapkan kunjungan masyarakat ke Puskesmas merupakan kunjungan dalam rangka konsultasi kesehatan bukan untuk mengobati sakitnya.

Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai potensi yang cukup besar dan perlu mendapat perhatian yang serius sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional. Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019 telah menetapkan indikator pencapaian target penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, yaitu jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dan rumah sakit pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional. Tren perkembangan jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 2.9.

GAMBAR 2.9
TREN JUMLAH PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN
TRADISIONAL DI INDONESIA TAHUN 2015-2019

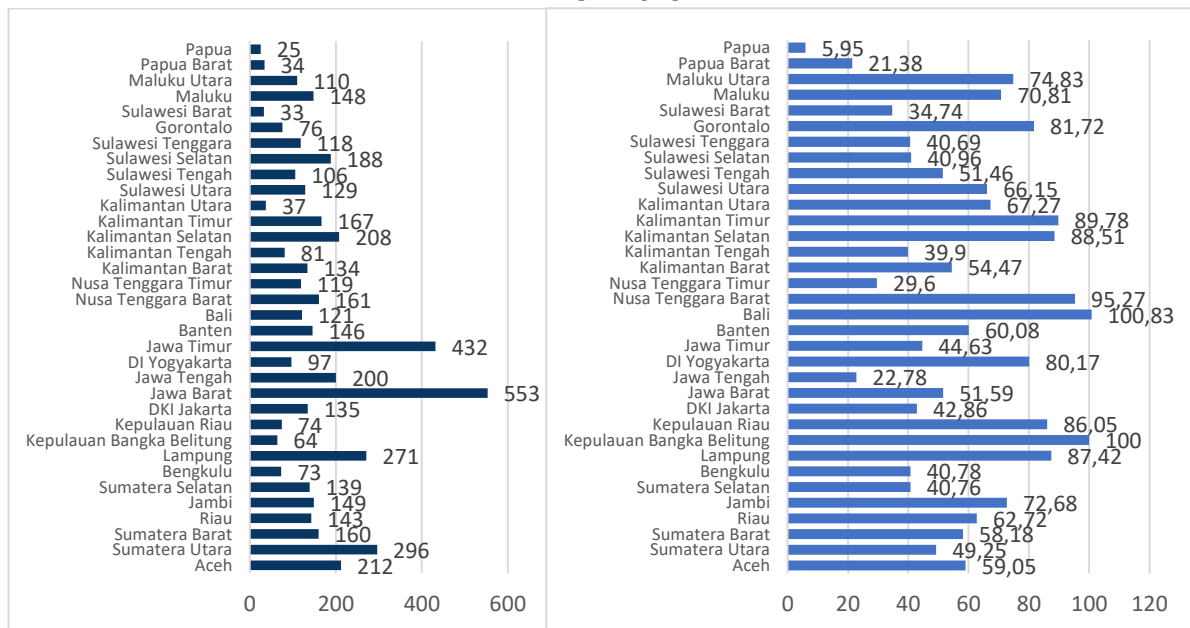


Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional terhadap masyarakat di wilayah kerjanya yang memenuhi salah satu kriteria dibawah ini:

- a. puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sudah dilatih pelayanan kesehatan tradisional;
- b. puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri pelayanan kesehatan tradisional ramuan dan keterampilan;
- c. puskesmas yang melaksanakan kegiatan pembinaan meliputi pengumpulan data pelayanan kesehatan tradisional, fasilitasi registrasi/perizinan dan bimbingan teknis serta pemantauan pelayanan kesehatan tradisional

GAMBAR 2.10
JUMLAH DAN PERSENTASE PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
KESEHATAN TRADISIONAL DI INDONESIA
TAHUN 2019

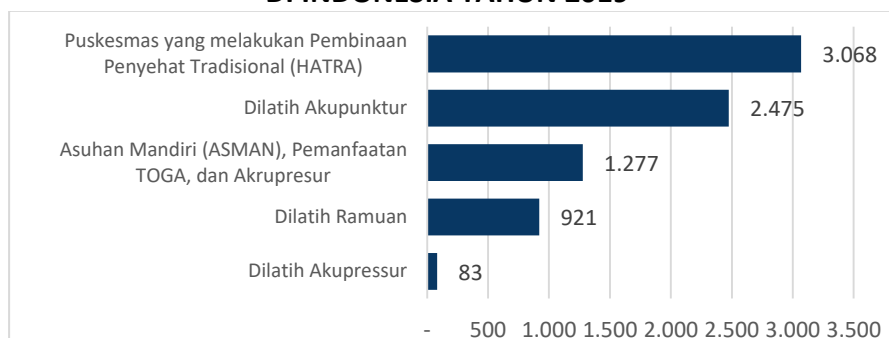


Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Tahun 2019 terdapat 5.522 Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional. Hasil tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 mencapai 4.252 puskesmas. Provinsi dengan capaian jumlah puskesmas terbanyak yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, Lampung, dan Jawa Timur. Sedangkan Provinsi dengan capaian 100% puskesmas memberikan pelayanan kesehatan tradisional adalah Provinsi Bali (Gambar 2.10).

Pencapaian indikator Pelayanan Kesehatan Tradisional tersebut tidak terlepas dari upaya sosialisasi, advokasi, monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis secara berkala dan berkesinambungan baik di pusat maupun di daerah dengan lintas sektor terkait.

GAMBAR 2.11
PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN HATRA, ASMAN, DAN PELATIHAN NAKES
DI INDONESIA TAHUN 2019



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Data tahun 2019, puskesmas yang telah melakukan pembinaan penyehat tradisional (HATRA) sebanyak 3.068 Puskesmas. Seperti tahun sebelumnya pada tahun 2018 provinsi Sulawesi Barat dan

Papua belum terdapat puskesmas yang melakukan pembinaan penyehatan tradisional (HATRA). Data mengenai jumlah Puskesmas yang telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dapat dilihat pada Lampiran 4.g.

5. Ketersediaan Obat dan Vaksin

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah. Kementerian Kesehatan telah menetapkan indikator rencana strategis tahun 2015-2019 terkait program kefarmasian dan alat kesehatan, yaitu meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi, dan alat kesehatan. Indikator tercapainya sasaran hasil ketersediaan obat, vaksin, dan perbekalan alat kesehatan tahun 2019 yaitu persentase Puskesmas yang memiliki 80% obat dan vaksin esensial (pemantauan dilakukan terhadap 20 *item* obat indikator).

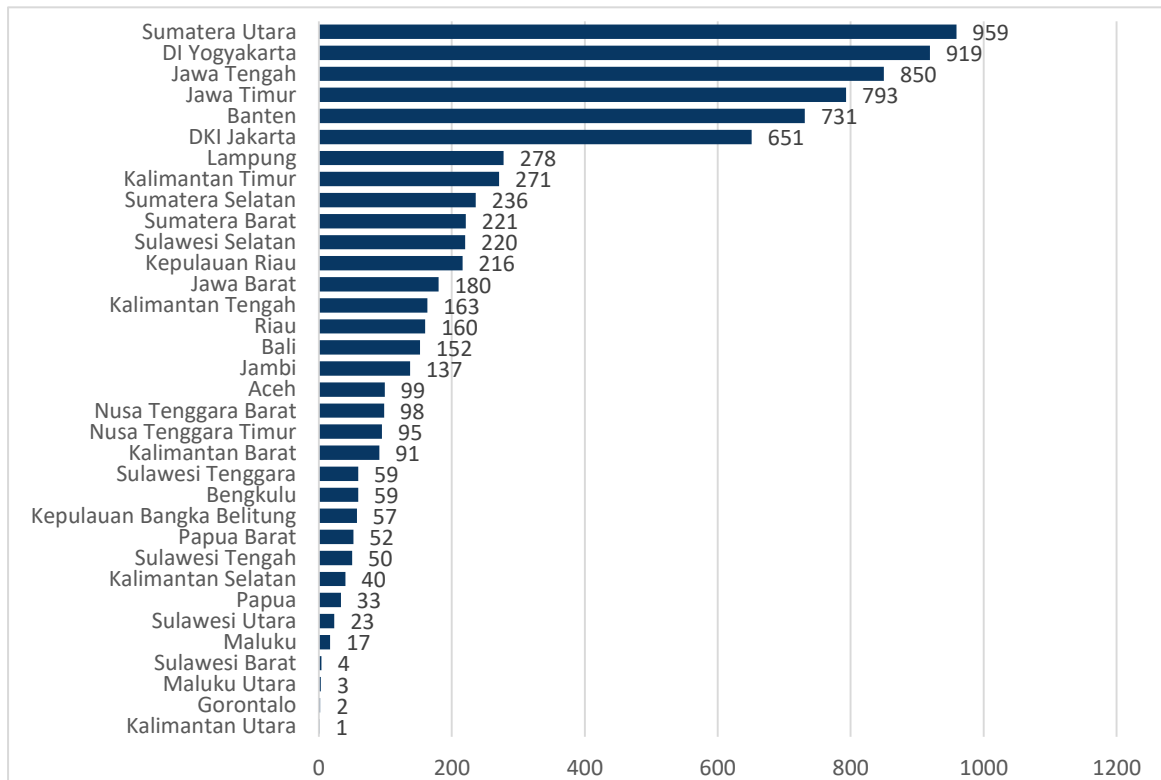
Pemantauan ketersediaan obat dan vaksin dilakukan untuk memperoleh gambaran ketersediaan obat dan vaksin di Indonesia. Obat yang dipantau ketersediaannya merupakan obat indikator yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar dan obat yang mendukung pelaksanaan program kesehatan. Jumlah *item* obat yang dipantau adalah 20 *item* obat dan vaksin. Dari 10.134 puskesmas yang ada di Indonesia, sebanyak 9.480 puskesmas (93,5%) melapor mengenai ketersediaan obat dan vaksin di puskesmasnya. Dari jumlah puskesmas yang melapor tersebut, sebanyak 9.133 puskesmas atau sebesar 96,34% puskesmas memiliki 80% obat dan vaksin esensial. Hasil tersebut menunjukkan bahwa persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas telah mencapai target Renstra tahun 2018. Data dan informasi lebih rinci mengenai Puskesmas yang menyediakan 20 *item* obat dan vaksin terdapat pada Lampiran 9.a.

B. KLINIK, UTD, DAN LABORATORIUM KESEHATAN

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, mendefinisikan klinik sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medik dan/ atau spesialistik. Pada tahun 2019 di Indonesia terdapat 9.205 klinik yang terdiri atas 8.281 klinik pratama dan 924 klinik utama.

Provinsi dengan jumlah klinik pratama terbanyak adalah Sumatera Utara (980 klinik), DI Yogyakarta (934 klinik), dan Jawa Tengah (880). Sedangkan provinsi dengan jumlah klinik pratama terendah yaitu Provinsi Gorontalo (3 klinik), Kalimantan Utara (4 klinik), serta Sulawesi Barat dan Maluku Utara (6 klinik). Provinsi dengan jumlah klinik pratama yang dimiliki oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota terbanyak yaitu Provinsi Sumatera Utara (959 klinik). Sedangkan Provinsi dengan jumlah klinik pratama yang dimiliki oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota terendah yaitu Kalimantan Utara (1 klinik). Provinsi dengan jumlah klinik pratama yang dimiliki oleh TNI/Polri terbanyak yaitu Provinsi Jawa Timur (73). Sedangkan provinsi dengan jumlah klinik pratama yang dimiliki oleh TNI/Polri terendah berada di Bengkulu, Kalimantan Tengah, dan Gorontalo (1 klinik). Data mengenai klinik secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 4.l.

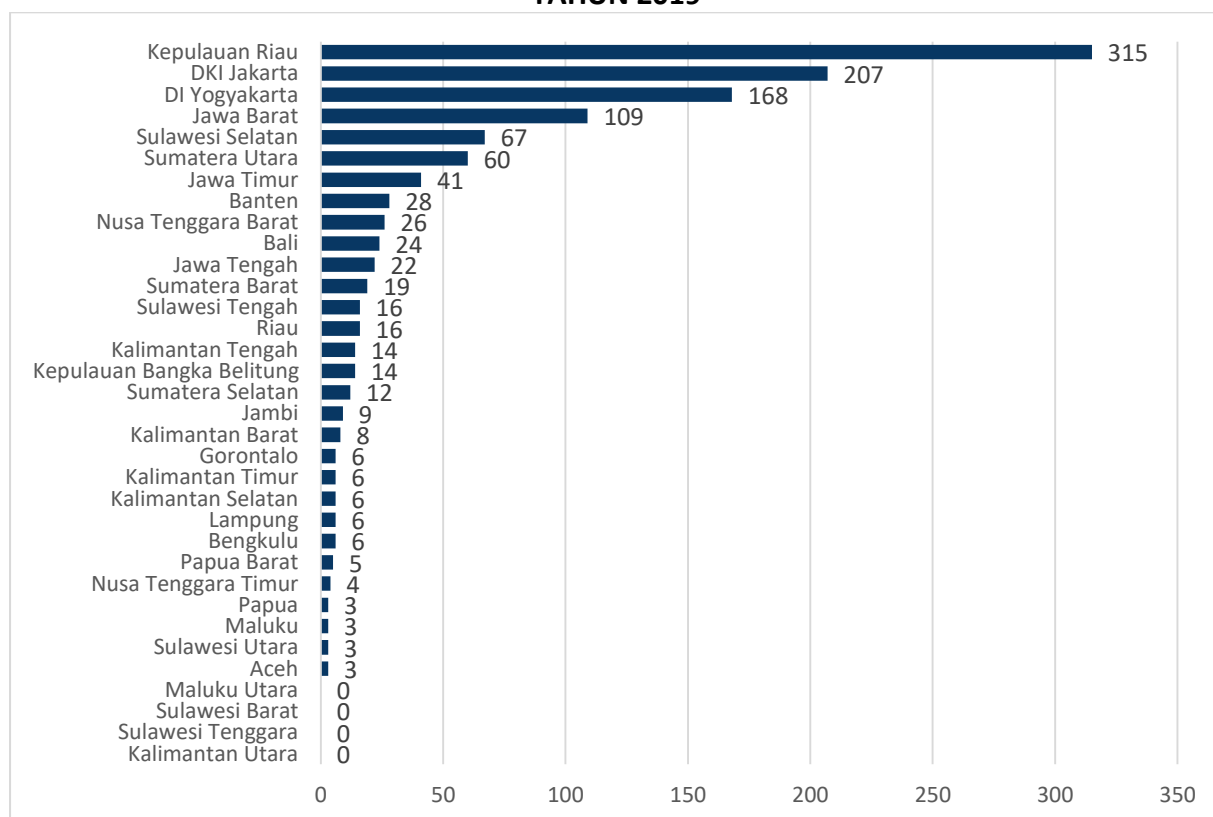
GAMBAR 2.12
JUMLAH KLINIK PRATAMA PER PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2019



Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Jumlah klinik utama di provinsi terbanyak yaitu di Provinsi DKI Jakarta (207 klinik), DI Yogyakarta (168 klinik), dan Jawa Barat (109 klinik). Sedangkan 4 provinsi tidak memiliki klinik utama, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi tenggara, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Semua klinik utama yang terdapat di tiap provinsi dimiliki dan dikelola oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota (tidak ada klinik utama yang dimiliki/dikelola oleh TNI/POLRI).

GAMBAR 2.13
JUMLAH KLINIK UTAMA PER PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2019



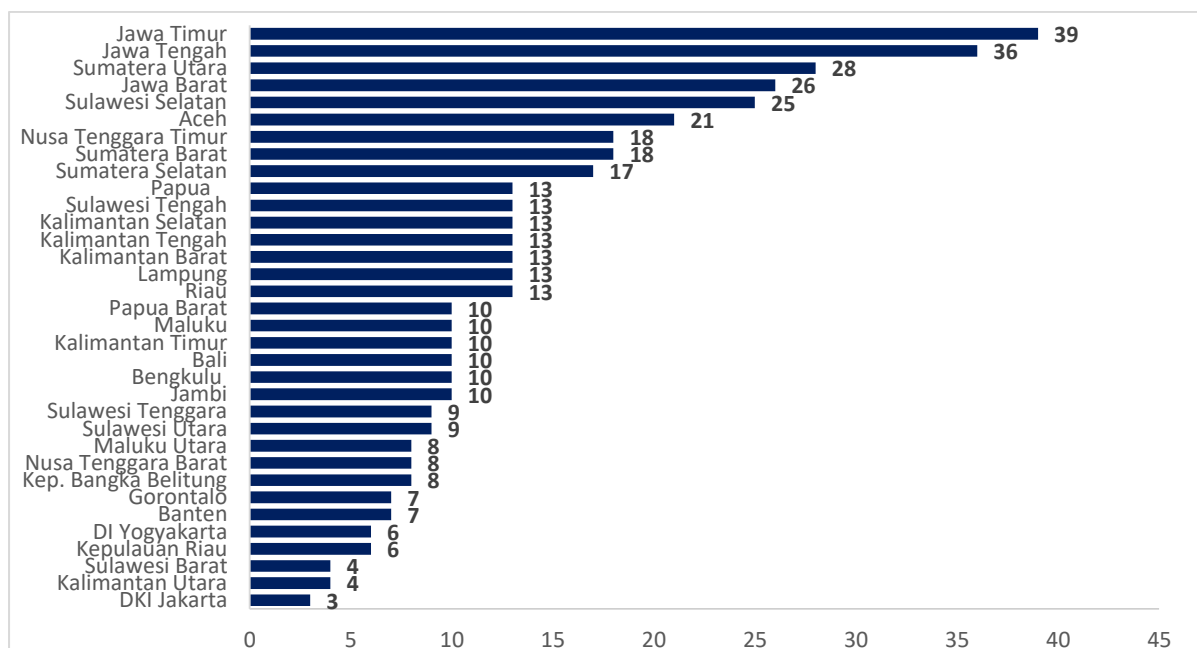
Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD)

Unit Transfusi Darah adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014). Pada tahun 2019, terdapat sebanyak 458 UTD di 398 kabupaten/kota di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan Palang Merah Indonesia (PMI).

Pada tahun 2019, provinsi dengan total jumlah unit transfusi darah (UTD) terbanyak yaitu Provinsi Jawa Timur (39 UTD), Jawa Tengah (36 UTD), dan Sumatera Utara (28 UTD). Sedangkan provinsi dengan total jumlah UTD terendah yaitu Provinsi DKI Jakarta (3 UTD), Kalimantan Utara (4 UTD), dan Sulawesi Barat (4 UTD). UTD yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah terbanyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara (20 UTD). Terdapat 3 provinsi yang tidak memiliki UTD yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Bali, dan Banten. Jumlah UTD yang diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Timur (37 UTD), sedangkan 4 provinsi hanya memiliki 1 UTD yang diselenggarakan oleh PMI, yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Maluku Utara, Jambi, dan Maluku. Data selengkapnya mengenai UTD dapat dilihat pada lampiran 4.k.

GAMBAR 2.14
JUMLAH UNIT TRANSFUSI DARAH MENURUT PENYELENGGARA DAN PROVINSI
TAHUN 2019



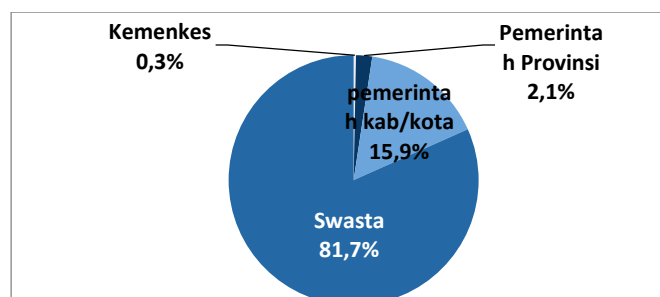
Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2020

C. LABORATORIUM KESEHATAN

Laboratorium kesehatan merupakan salah satu sarana penunjang dalam pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan. Laboratorium kesehatan diperlukan untuk memeriksa, menganalisa, menguraikan, dan mengidentifikasi bahan dalam penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, dan kondisi kesehatan tertentu.

Jumlah laboratorium kesehatan terbanyak dimiliki oleh swasta, yaitu sebanyak 1.056 laboratorium atau sebesar 81,7%. Kepemilikan laboratorium kesehatan terbanyak ke dua yaitu laboratorium pemerintah kabupaten/kota, yakni sebanyak 206 laboratorium atau sebesar 15,9%. Kepemilikan laboratorium kesehatan terbanyak ke tiga yaitu laboratorium milik pemerintah provinsi, yakni sebanyak 27 laboratorium atau sebesar 2,1%. Laboratorium kesehatan paling sedikit dimiliki oleh Kementerian Kesehatan, yaitu 4 laboratorium atau sebesar 0,3%.

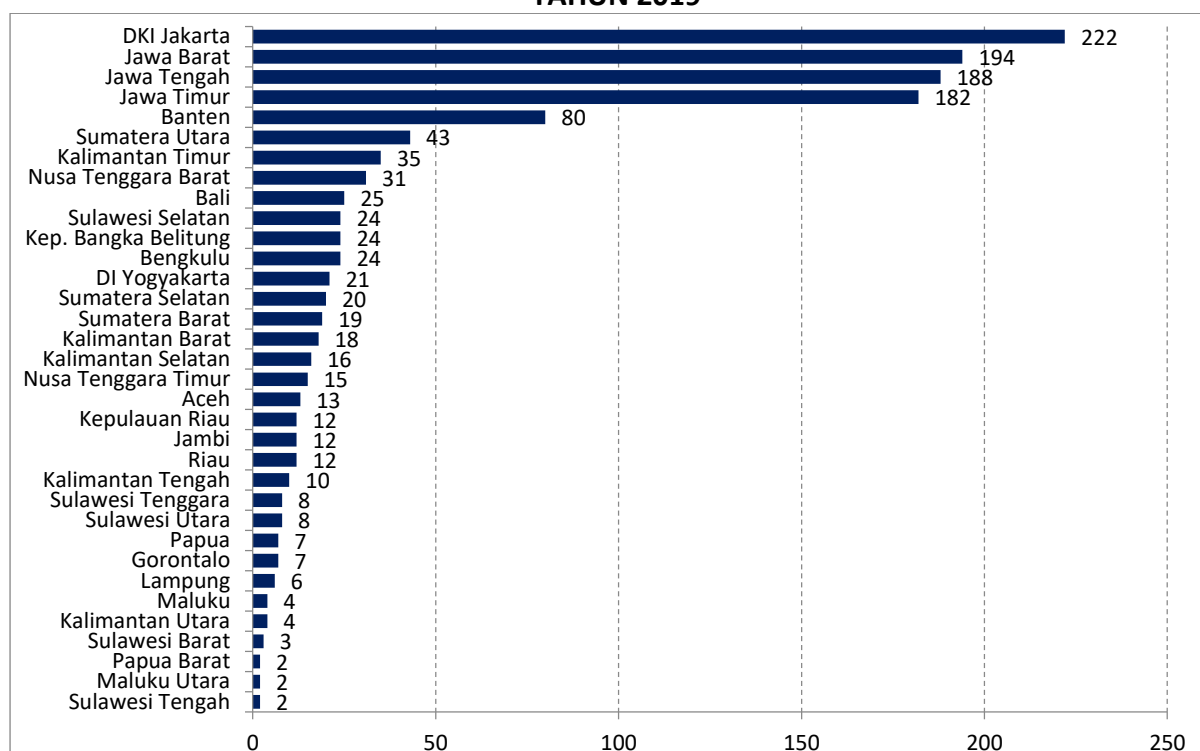
GAMBAR 2.15
JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN DAN PROVINSI
TAHUN 2019



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2020

Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah laboratorium kesehatan terbanyak, yaitu sebanyak 222 laboratorium. Provinsi terbanyak ke dua yaitu Provinsi Jawa Barat dengan jumlah laboratorium kesehatan sebanyak 194, dan terbanyak ke tiga yaitu Provinsi Jawa Tengah (194 laboratorium). Sebanyak 3 provinsi memiliki laboratorium paling sedikit, yaitu Provinsi Sulawesi tengah, Maluku Utara, dan Papua Barat, yaitu sebanyak 2 laboratorium.

GAMBAR 2.16
JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2020

D. RUMAH SAKIT

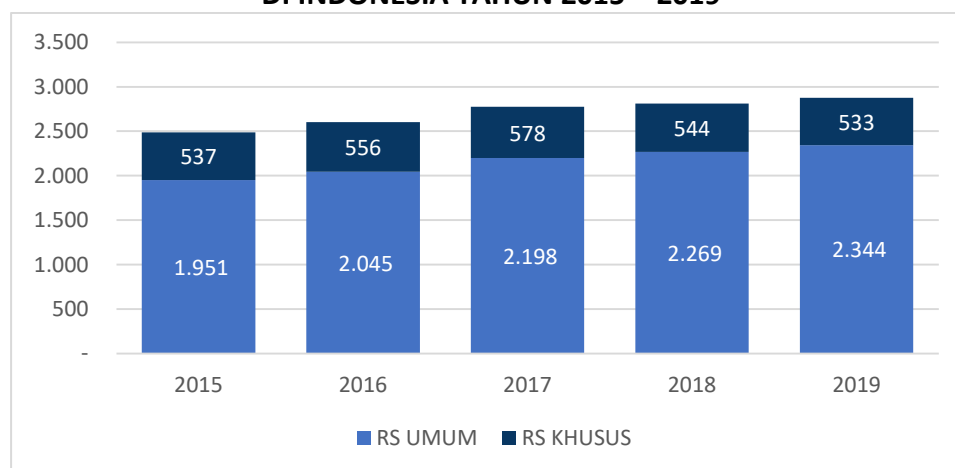
Sebagai upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selain dilakukan upaya promotif dan preventif, diperlukan juga upaya kuratif dan rehabilitatif. Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat diperoleh melalui rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan.

1. Jenis Rumah Sakit

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, pengelompokan rumah sakit berdasarkan penyelenggaraan, yaitu rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, dan rumah sakit swasta. Rumah sakit pemerintah adalah unit pelaksana teknis dari instansi pemerintah (Kementerian Kesehatan, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan BUMN/Kementerian Lainnya). Rumah sakit daerah adalah pelaksana teknis dari daerah (pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota). Sedangkan rumah sakit swasta adalah badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakit, pengecualian bagi Rumah Sakit Publik yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba.

Rumah sakit di Indonesia dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan sebesar 13,52%. Pada tahun 2015 jumlah rumah sakit sebanyak 2.488 meningkat menjadi 2.877 pada tahun 2019. Jumlah rumah sakit di Indonesia sampai dengan tahun 2019 terdiri dari 2.344 Rumah Sakit Umum (RSU) dan 533 Rumah Sakit Khusus (RSK). Perkembangan jumlah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.17.

GAMBAR 2.17
PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS
DI INDONESIA TAHUN 2015 – 2019



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

TABEL 2.1
PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM BERDASARKAN PENYELENGGARAAN
DI INDONESIA TAHUN 2015 – 2019

No	Penyelenggara	2015	2016	2017	2018	2019
PEMERINTAH						
1	Kementerian Kesehatan	14	14	14	15	18
2	TNI/POLRI	162	161	164	158	159
3	Kementerian Lain dan BUMN	61	67	14	55	51
Total		237	242	192	228	228
PEMERINTAH DAERAH						
1	Pemerintah Provinsi	68	75	87	91	92
2	Pemerintah Kabupaten/Kota	553	564	585	614	640
Total		621	639	672	705	732
SWASTA		1.093	1.164	1.334	1.336	1.384
Total Keseluruhan		1.951	2.045	2.198	2.269	2.344

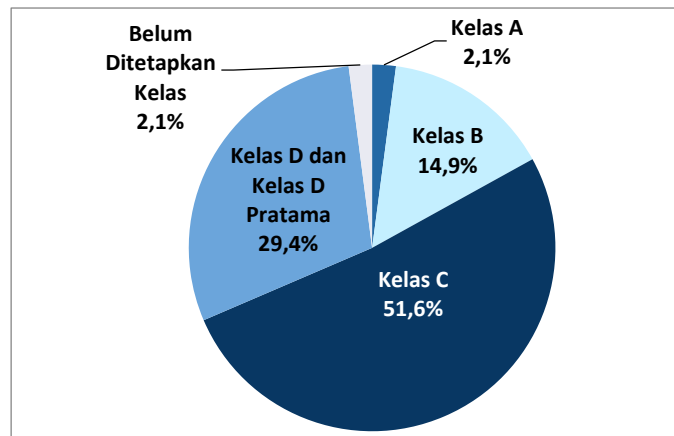
Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

RS Umum terdiri dari 8 jenis RS berdasarkan penyelenggaranya diantaranya 3 jenis oleh pemerintah pusat (Kemenkes, TNI/Polri, K/L, dan BUMN), 2 jenis oleh pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/ Kota) dan RS Umum milik swasta adapun rincian dapat dilihat pada Lampiran 4.h.

2. TIPE RUMAH SAKIT

Rumah sakit dikelompokkan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan, menjadi Kelas A, Kelas B, Kelas C, dan Kelas D. Jumlah rumah sakit (RS) di Indonesia menurut kelas terbanyak yaitu tipe C (1.484 RS) sebesar 51,6%, kemudian kelas D dan D Pratama (846 RS) sebesar 29,4%, kelas B (428 RS) sebesar 14,9%, serta masing-masing 2,1% pada kelas A dan RS yang belum ditetapkan kelas (60 dan 59 RS).

GAMBAR 2.18
JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT KELAS TAHUN 2019

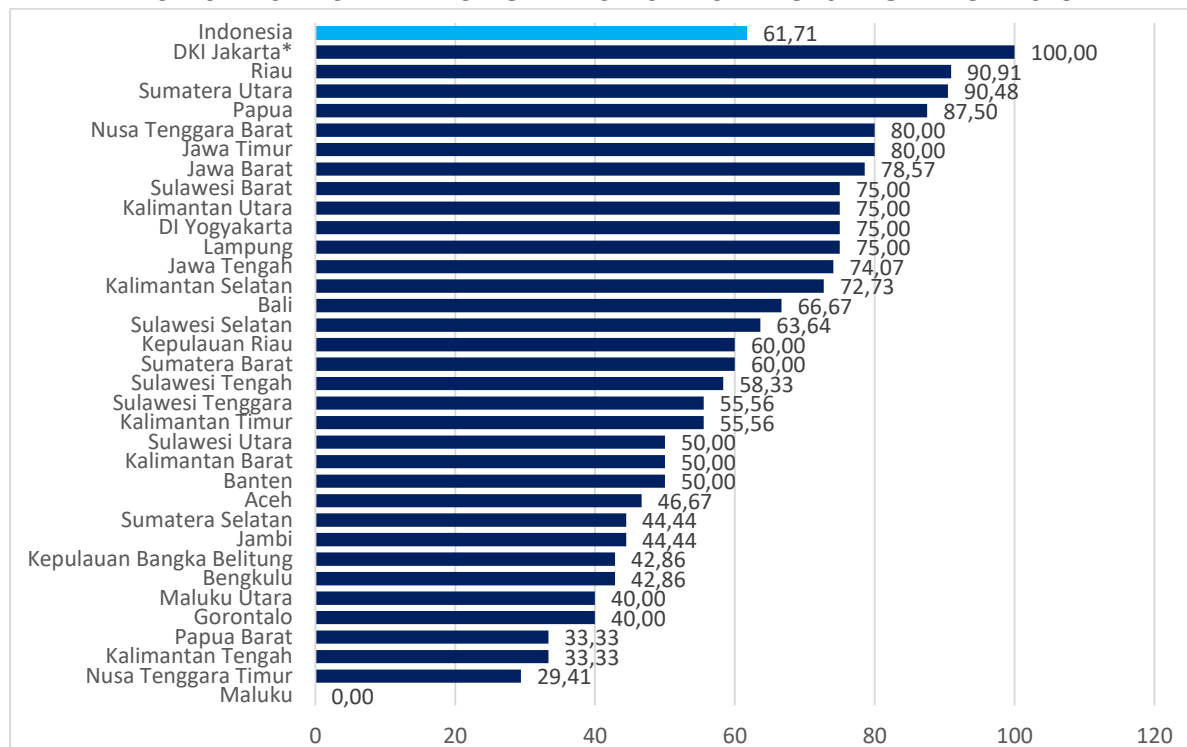


Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2020

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Pasal 3 menyatakan bahwa rumah sakit harus mempunyai kemampuan pelayanan sekurang-kurangnya pelayanan medik umum, gawat darurat, pelayanan keperawatan, rawat jalan, rawat inap, operasi/bedah, pelayanan medik spesialis dasar, penunjang medik, farmasi, gizi, sterilisasi, rekam medik, pelayanan administrasi dan manajemen, penyuluhan kesehatan masyarakat, pemulasaran jenazah, laundry, dan ambulance, pemeliharaan sarana rumah sakit, serta pengolahan limbah. Selain itu, pada pasal 5 juga dinyatakan bahwa klasifikasi Rumah Sakit Umum ditetapkan berdasarkan: (a) Pelayanan; (b) Sumber Daya Manusia; (c) Peralatan; (d) Sarana dan Prasarana; (e) administrasi dan manajemen

Adapun persentase rumah sakit kabupaten/kota kelas c yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 2.19 berikut.

GAMBAR 2.19
PERSENTASE RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA KELAS C YANG MEMILIKI 4 DOKTER
SPELIALIS DASAR DAN 3 DOKTER SPELIALIS PENUNJANG TAHUN 2019

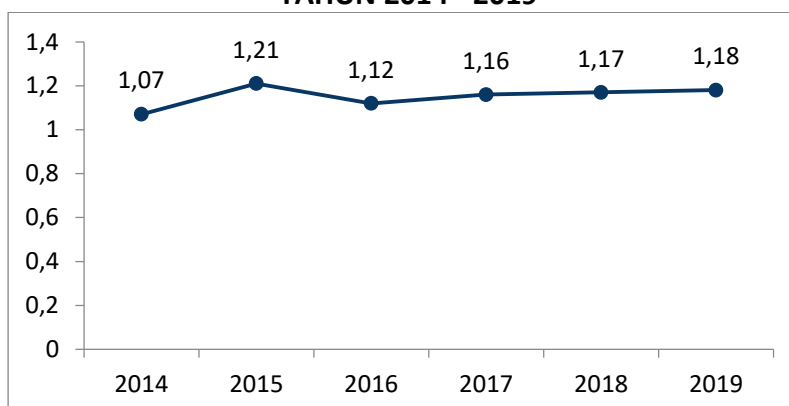


Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

3. RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT

Dalam standar WHO, standar terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk. Standar WHO adalah 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Rasio tempat tidur di rumah sakit di Indonesia sejak tahun 2014 hingga 2019 yaitu lebih dari 1 per 1.000 penduduk. Sehingga, Jumlah tempat tidur di Indonesia sudah tercukupi menurut WHO. Rasio tempat tidur rumah sakit di Indonesia sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut:

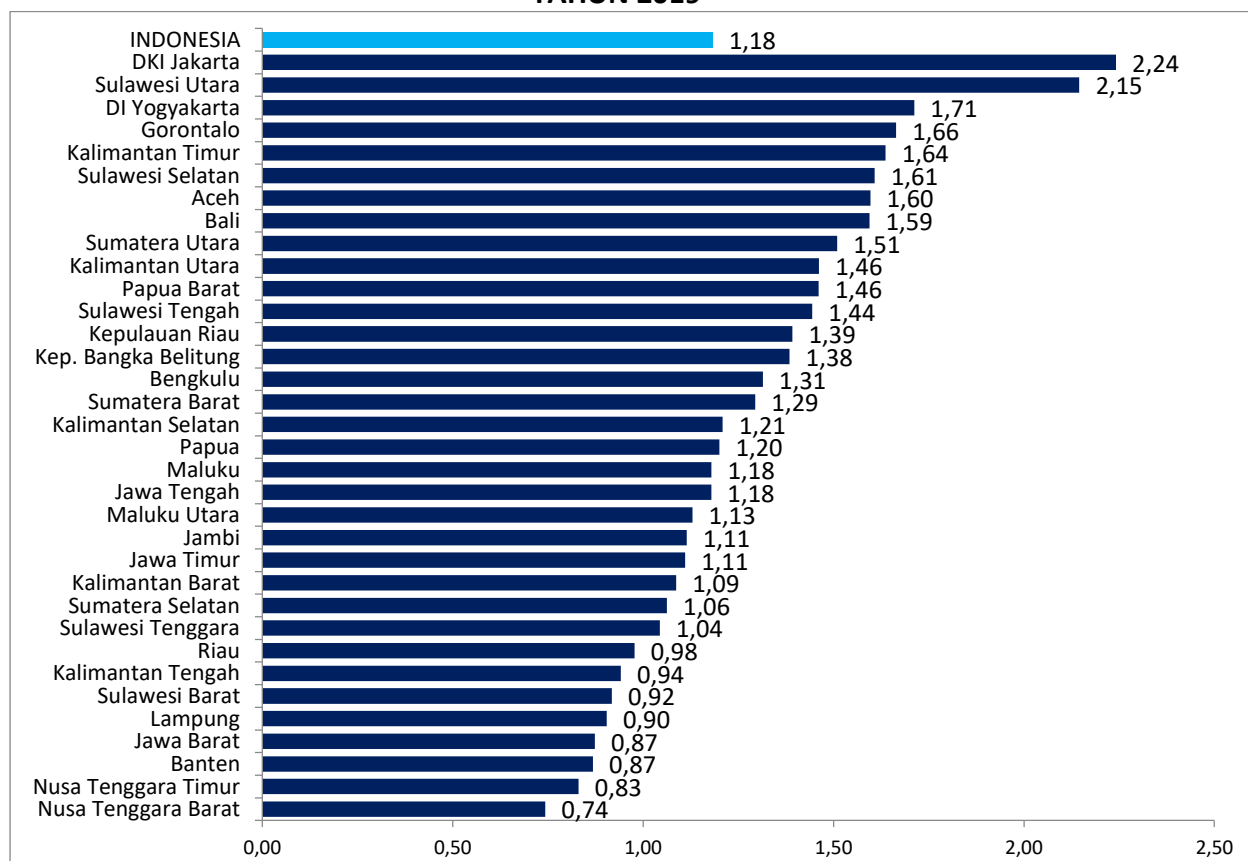
GAMBAR 2.20
RASIO JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA
TAHUN 2014 - 2019



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2020

Secara nasional, rasio jumlah tempat tidur terhadap 1.000 penduduk di Indonesia pada tahun 2019 telah mencapai standar minimal dari WHO. Meskipun demikian, terdapat 8 provinsi yang rasio tempat tidurnya belum dapat memenuhi standar ini, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat (0,74), Nusa Tenggara Timur (0,83), Banten (0,87), Jawa Barat (0,87), Lampung (0,90), Sulawesi Barat (0,92), Kalimantan Tengah (0,94), dan Riau (0,98).

GAMBAR 2.21
RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA
MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2020

E. SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

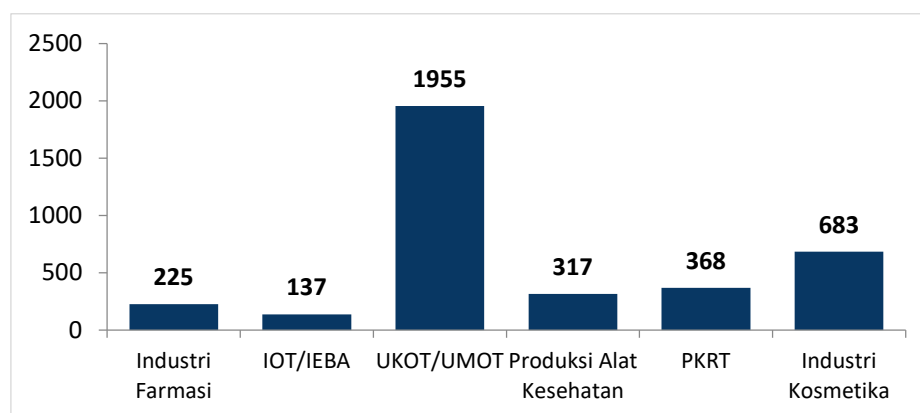
1. Sarana Produksi dan Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Cakupan sarana produksi bidang kefarmasian dan alat kesehatan menggambarkan tingkat ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang melakukan upaya produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Sarana produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan antara lain Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional/Usaha Mikro Obat Tradisional (UKOT/UMOT), Produksi Alat Kesehatan (Alkes) dan Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), dan Industri Kosmetika.

Jika ditelaah, sarana produksi dan distribusi di Indonesia masih menunjukkan adanya ketimpangan dalam hal persebaran jumlah. Sebagian besar sarana produksi maupun distribusi berlokasi di Pulau Sumatera dan Jawa sebesar 94,25% sarana produksi dan 76% sarana distribusi. Ketersediaan ini terkait dengan sumber daya yang dimiliki dan kebutuhan pada wilayah setempat. Kondisi ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam kebijakan untuk mengembangkan jumlah sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan di wilayah Indonesia lainnya, sehingga terjadi pemerataan jumlah sarana tersebut di seluruh Indonesia. Selain itu, hal ini bertujuan untuk membuka akses keterjangkauan masyarakat terhadap sarana kesehatan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

Pada tahun 2019 terdapat 3.685 sarana produksi kefarmasian dan alat kesehatan di Indonesia. Provinsi dengan jumlah sarana produksi terbanyak adalah Jawa Barat, yaitu sebanyak 1.025 sarana produksi. Hal ini dapat disebabkan karena Jawa Barat memiliki populasi yang besar dan wilayah yang luas. Namun, terdapat 8 provinsi yang tidak memiliki sarana produksi kefarmasian dan alat kesehatan. Rincian jumlah sarana produksi kefarmasian dan alat kesehatan berdasarkan jenis pada tahun 2019 terdapat pada Gambar 2.23 berikut.

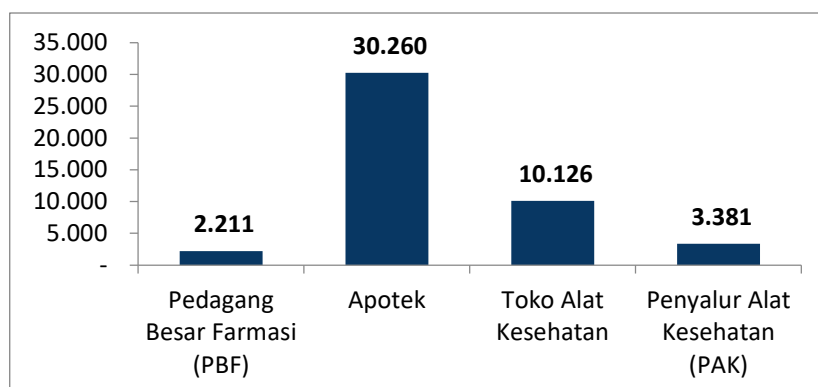
GAMBAR 2.22
JUMLAH SARANA PRODUKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA
TAHUN 2019



Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, 2020

Sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan yang dipantau jumlahnya oleh Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan antara lain Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Toko Alat Kesehatan, dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK). Jumlah sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 45.978 sarana. Provinsi dengan jumlah sarana distribusi terbanyak adalah Jawa Barat, yaitu sebanyak 7.332 sarana. Gambar 2.24 berikut menyajikan jumlah sarana distribusi kefarmasian pada tahun 2019.

GAMBAR 2.23
JUMLAH SARANA DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA
TAHUN 2019

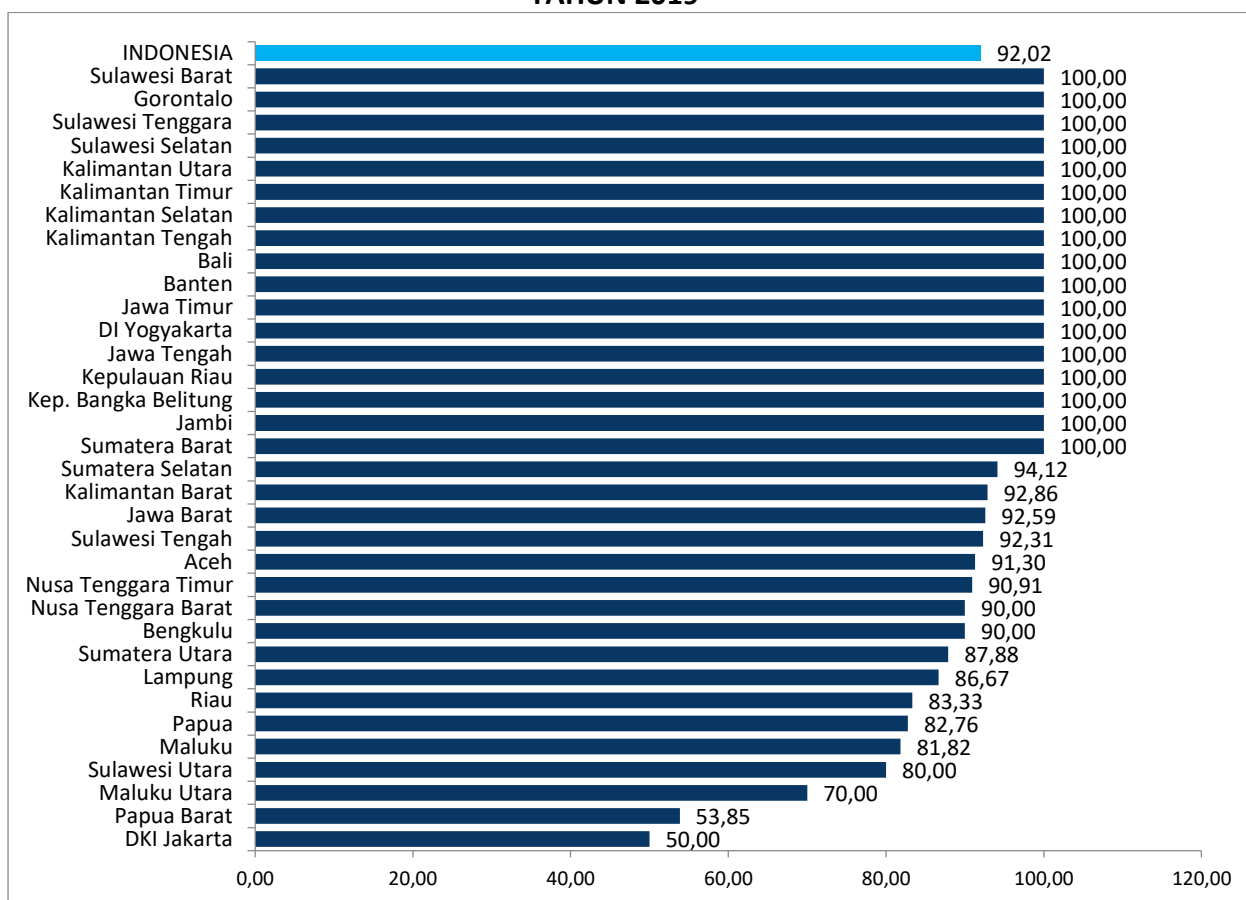


Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, 2020

2. Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin sesuai Standar

Tahun 2019 di Indonesia terdapat 92,02% instalasi farmasi kabupaten/kota yang telah melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar. Persentase tersebut telah memenuhi target Renstra tahun 2019 yaitu sebesar 75%. Pada Gambar 2.25 dapat diketahui bahwa sebagian besar provinsi telah memenuhi target 75% yaitu 31 provinsi. Terdapat 3 provinsi yang belum mencapai target Renstra 2019 dan terdapat 17 provinsi yang telah mencapai target 100%. Khusus Provinsi DKI Jakarta dari 6 instalasi farmasi kabupaten/kota tidak langsung melakukan pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar namun pengelolaan dan pendistribusian dilakukan langsung pada Instalasi Farmasi Kecamatan melalui dana APBD. Data dan informasi lebih rinci mengenai instalasi farmasi kabupaten/kota yang telah melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar menurut provinsi terdapat pada Lampiran 9.d.

GAMBAR 2.24
PERSENTASE INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN
MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT DAN VAKSIN SESUAI STANDAR DI INDONESIA
TAHUN 2019



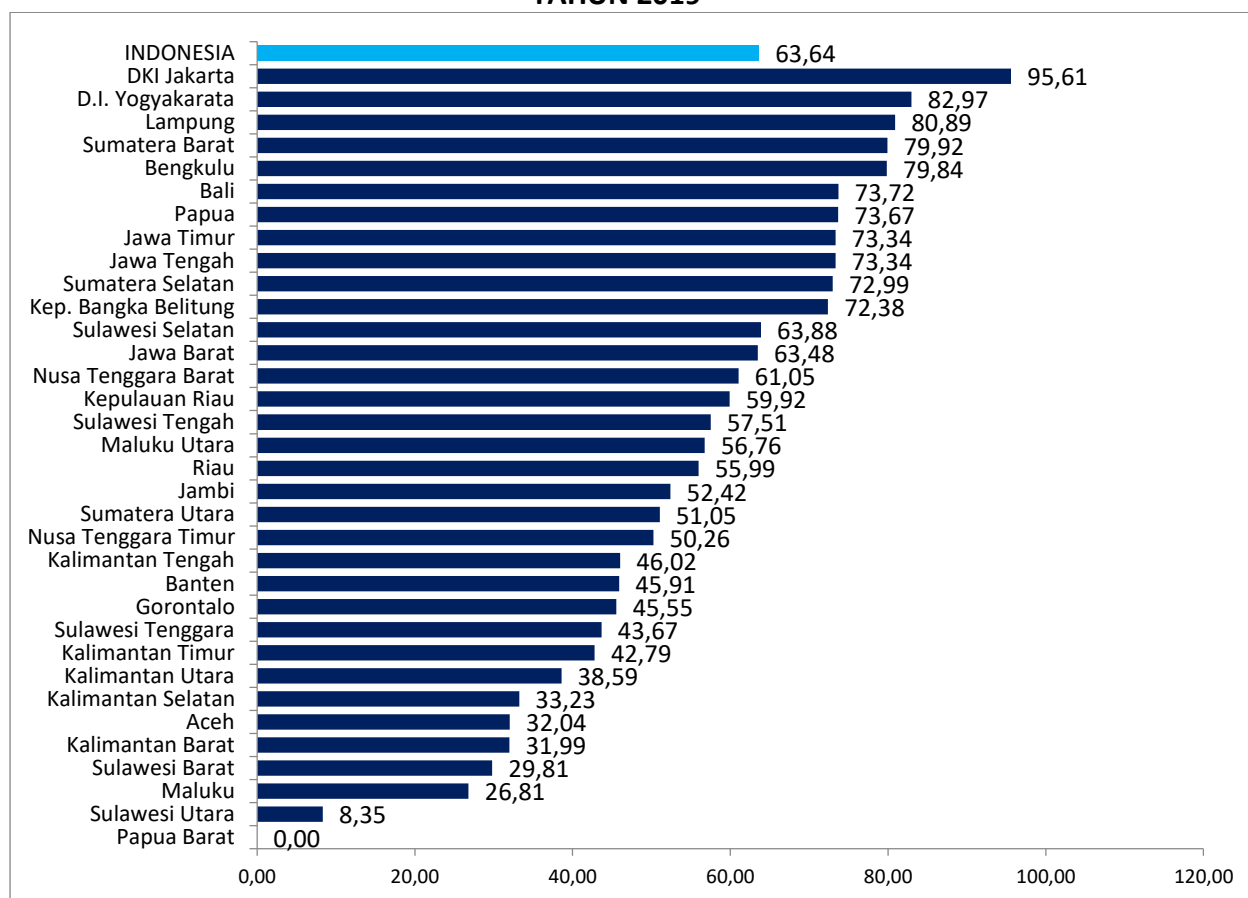
Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, 2020

F. UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita.

Pada tahun 2019, terdapat 296.777 Posyandu di seluruh Indonesia. Sebanyak 188.855 atau sekitar 63,6% posyandu diantaranya merupakan posyandu aktif. Posyandu aktif adalah posyandu yang mampu melaksanakan kegiatan utamanya secara rutin setiap bulan (KIA: ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita, KB, imunisasi, gizi, pencegahan, dan penanggulangan diare) dengan cakupan masing-masing minimal 50% dan melakukan kegiatan tambahan. Data mengenai Posyandu secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 10.

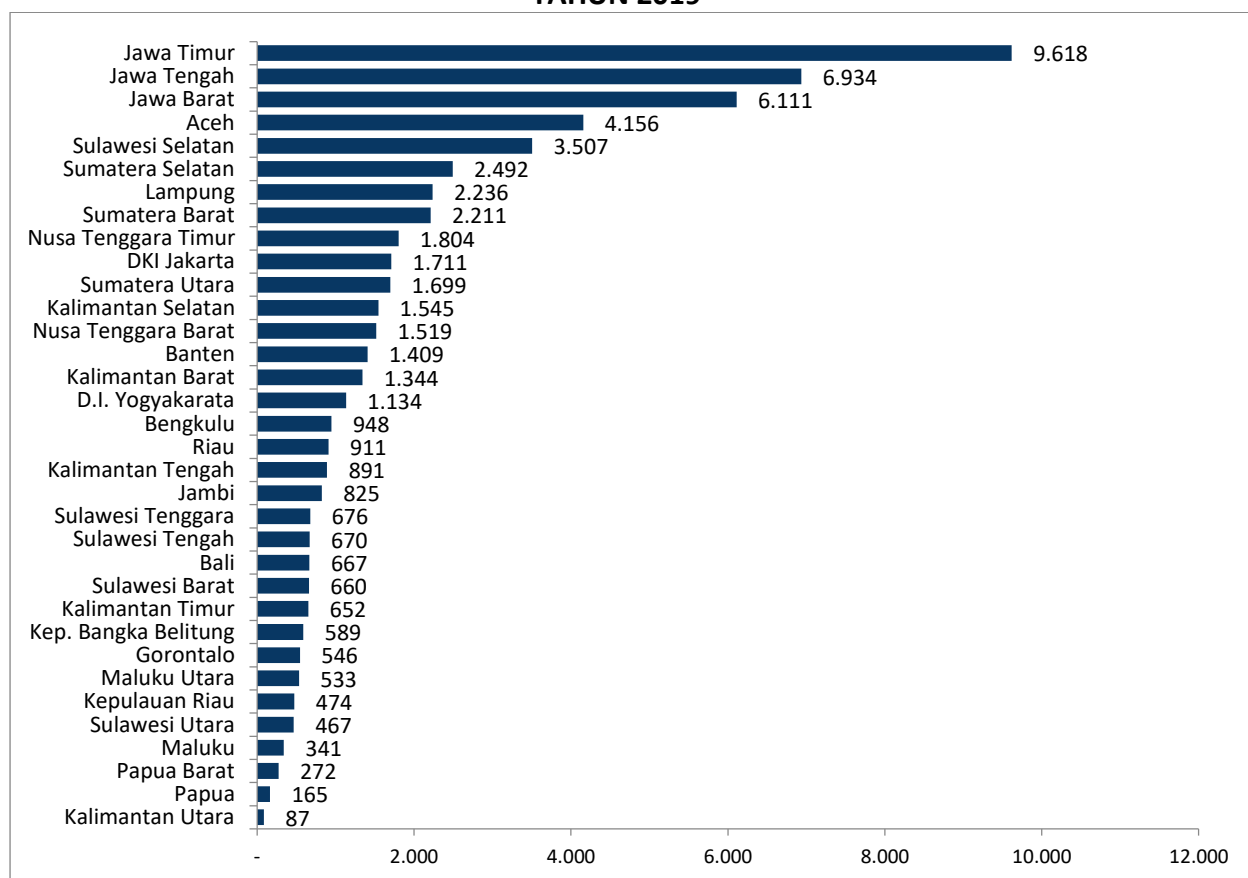
GAMBAR 2.25
PERSENTASE POSYANDU AKTIF PER PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2019



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, 2020

Selain Posyandu, terdapat beberapa jenis UKBM, yaitu Poskesdes (Pos Kesehatan Desa), Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren), Posyandu Lanjut Usia (Lansia), dan Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular). Pergeseran tipe penyakit penyebab kematian terbanyak di Indonesia dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular menjadikan peran Posbindu PTM menjadi sangat penting. Pada tahun 2019 di Indonesia terdapat 59.804 Posbindu PTM. Provinsi dengan jumlah Posbindu PTM terbanyak yaitu Jawa Timur dengan 9.618 Posbindu dan provinsi dengan jumlah Posbindu PTM terendah yaitu Kalimantan Utara (87 Posbindu).

GAMBAR 2.26
PERSENTASE POSBINDU PTM PER PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2019



Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, 2020



+ Bab III
**SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN**

+



III. SDM KESEHATAN

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) merupakan salah satu subsistem dalam Sistem Kesehatan Nasional. Komponen ini memainkan peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagai pelaksana upaya dan pelayanan kesehatan. SDMK juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang menyebutkan bahwa sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan.

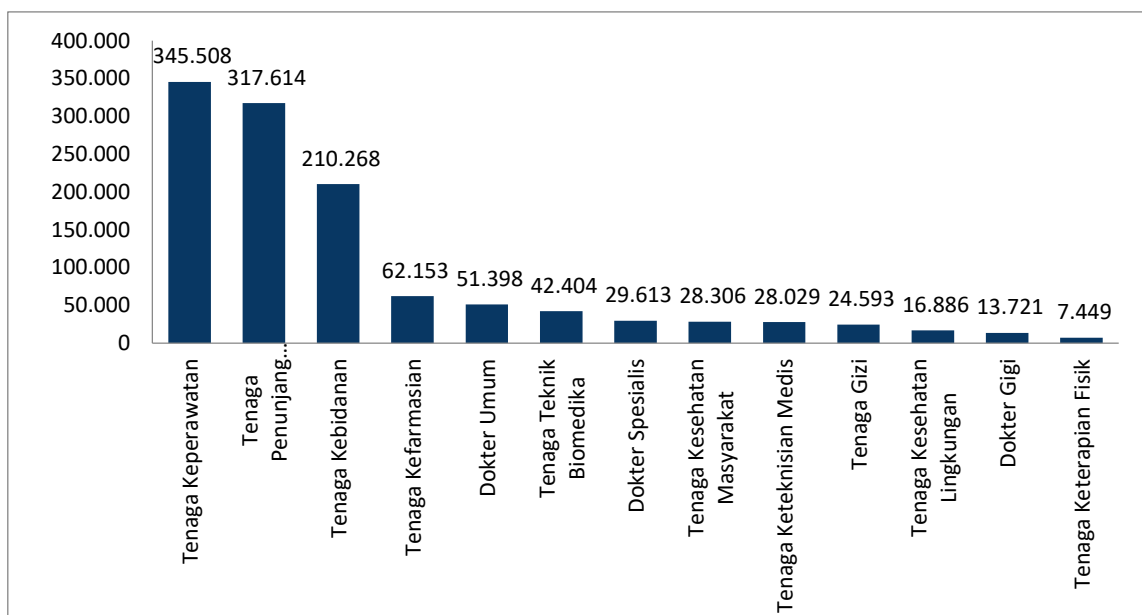
Pembahasan mengenai SDMK pada bab ini mencakup jumlah, rasio, registrasi, jumlah lulusan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan.

A. JUMLAH TENAGA KESEHATAN

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan). Undang-Undang mengelompokkan tenaga kesehatan menjadi beberapa rumpun dan sub rumpun yaitu tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapihan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain.

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) setiap tahunnya menggunakan pendekatan tugas dan fungsi SDMK dalam pengelolaan data SDMK. Jumlah SDMK di Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 1.182.024 orang yang terdiri dari 864.410 orang tenaga kesehatan (73,13 %) dan 317.614 orang tenaga penunjang kesehatan (26,87%). Proporsi tenaga kesehatan terbanyak yaitu tenaga keperawatan sebanyak 29,23 % dari total tenaga kesehatan, sedangkan proporsi tenaga kesehatan yang paling sedikit yaitu tenaga kesehatan tradisional 0,06% dari total tenaga kesehatan. Sebagian besar SDM kesehatan terdistribusi di Pulau Jawa, secara khusus di Provinsi Jawa Timur sebanyak 158.128 tenaga (13,38%), Jawa tengah sebanyak 152.356 tenaga (12,89%) dan Jawa Barat sebanyak 122.558 tenaga (10,37%). Provinsi dengan jumlah SDM kesehatan paling sedikit yaitu Sulawesi Barat sebanyak 5.249 tenaga (0,44%), Kalimantan Utara sebanyak 6.020 tenaga (0,51%) dan Papua Barat sebanyak 6.252 tenaga (0,53%). Rincian lengkap mengenai rekapitulasi SDMK di Indonesia dapat dilihat di Lampiran 11-15.

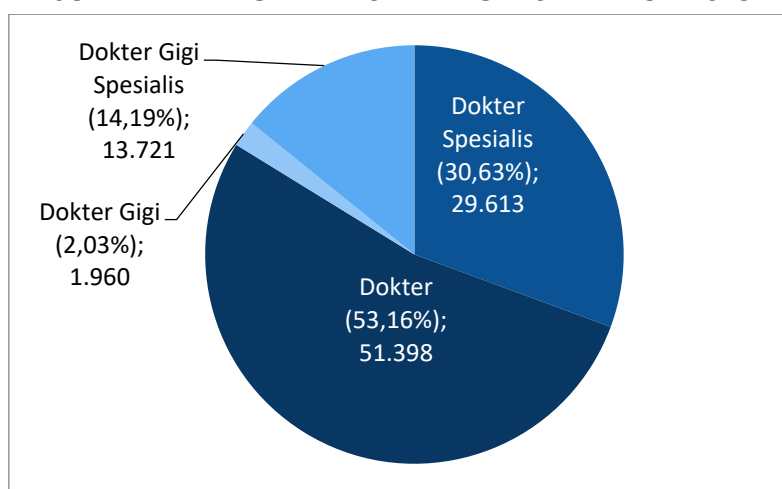
GAMBAR 3.1
REKAPITULASI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI INDONESIA
TAHUN 2019



Sumber: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>)

Tenaga medis yang dijabarkan pada bagian ini adalah tenaga yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai fungsinya. Proporsi tenaga medis terbanyak yaitu dokter sebanyak 53,16%. Sebanyak 57,2% tenaga medis berada di Pulau Jawa dengan jumlah terbanyak berada di Provinsi DKI Jakarta (13.887 orang), Jawa Timur (13.034 orang), dan Jawa Tengah (11.305 orang). Provinsi dengan tenaga medis paling sedikit adalah Papua Barat (342 orang), Maluku Utara (376 orang), dan Kalimantan Utara (400 orang).

GAMBAR 3.2
JUMLAH TENAGA MEDIS DI INDONESIA TAHUN 2019

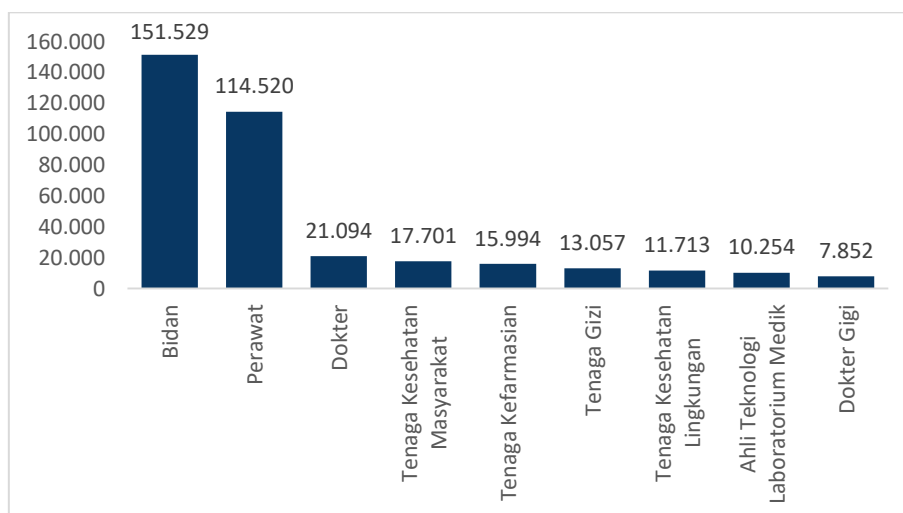


Sumber: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>)

1. Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Dengan demikian, untuk mendukung fungsi dan tujuan Puskesmas diperlukan sumber daya manusia kesehatan baik tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang kesehatan.

GAMBAR 3.3
JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2019



Sumber: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>)

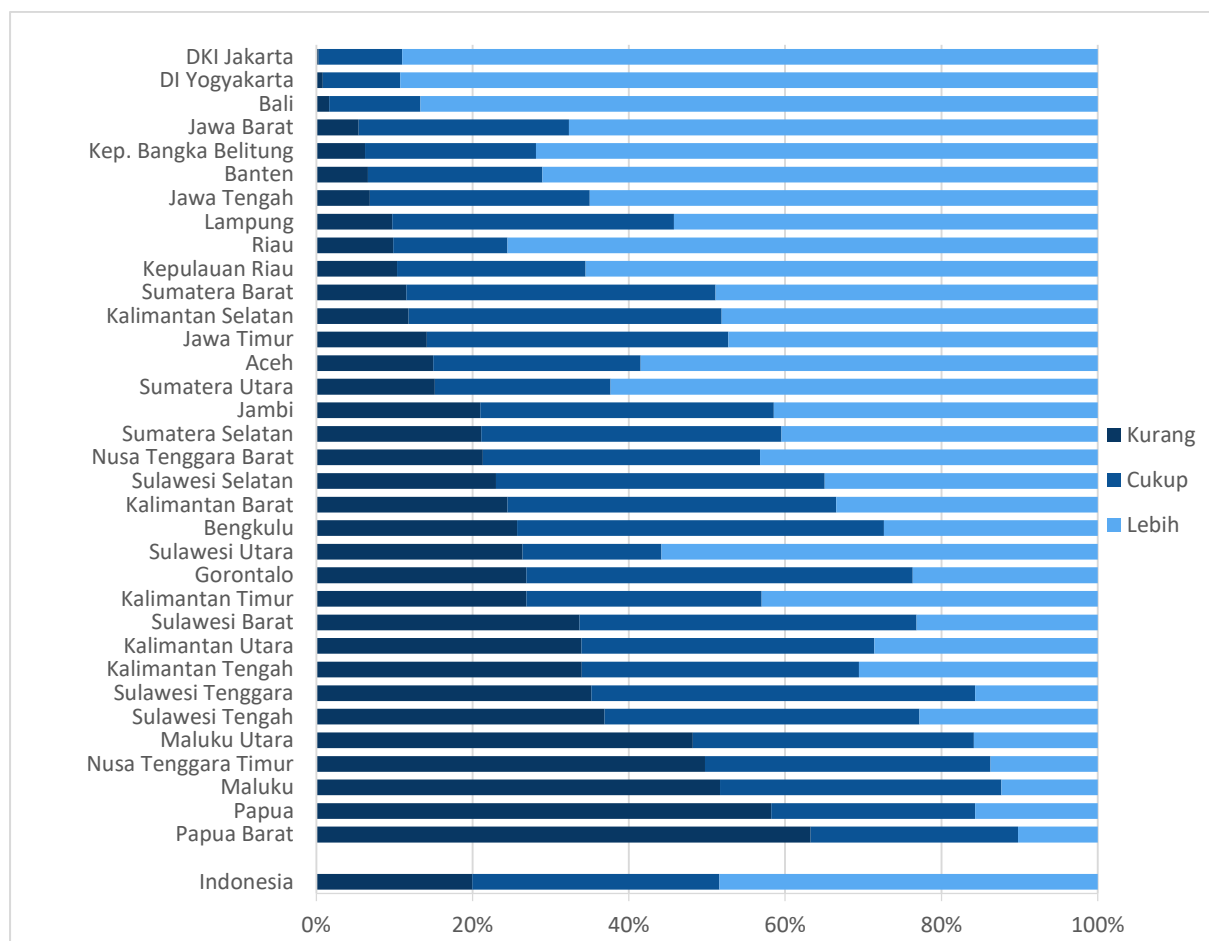
Jumlah Tenaga Kesehatan yang bertugas di puskesmas di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 363.714 orang. Proporsi tenaga kesehatan di puskesmas terbanyak yaitu bidan sebesar 41,66% (151.529 orang), sedangkan proporsi tenaga kesehatan di puskesmas yang paling sedikit yaitu dokter gigi sebesar 2,16% (7.852 orang).

Jumlah dan jenis tenaga kesehatan puskesmas dihitung berdasarkan analisis beban kerja dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerjanya, dan pembagian waktu kerja.

a. Kecukupan Dokter di Puskesmas

Kecukupan tenaga kesehatan di puskesmas juga diatur pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014. Permenkes membedakan antara puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap, yaitu minimal satu orang dokter pada puskesmas non rawat inap, dan minimal dua orang dokter pada puskesmas rawat inap, baik pada wilayah perkotaan, perdesaan, maupun kawasan terpencil dan sangat terpencil. Secara nasional terdapat 19,97% puskesmas yang kekurangan dokter, 31,61% puskesmas dengan status jumlah dokter cukup, dan 48,42% puskesmas yang memiliki jumlah dokter melebihi standar kebutuhan minimal.

GAMBAR 3.4
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER MENURUT PROVINSI
DI INDONESIA TAHUN 2019



Sumber: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020 (<http://bppsdkm.kemkes.go.id>). Diolah oleh Pusat Data dan Informasi.

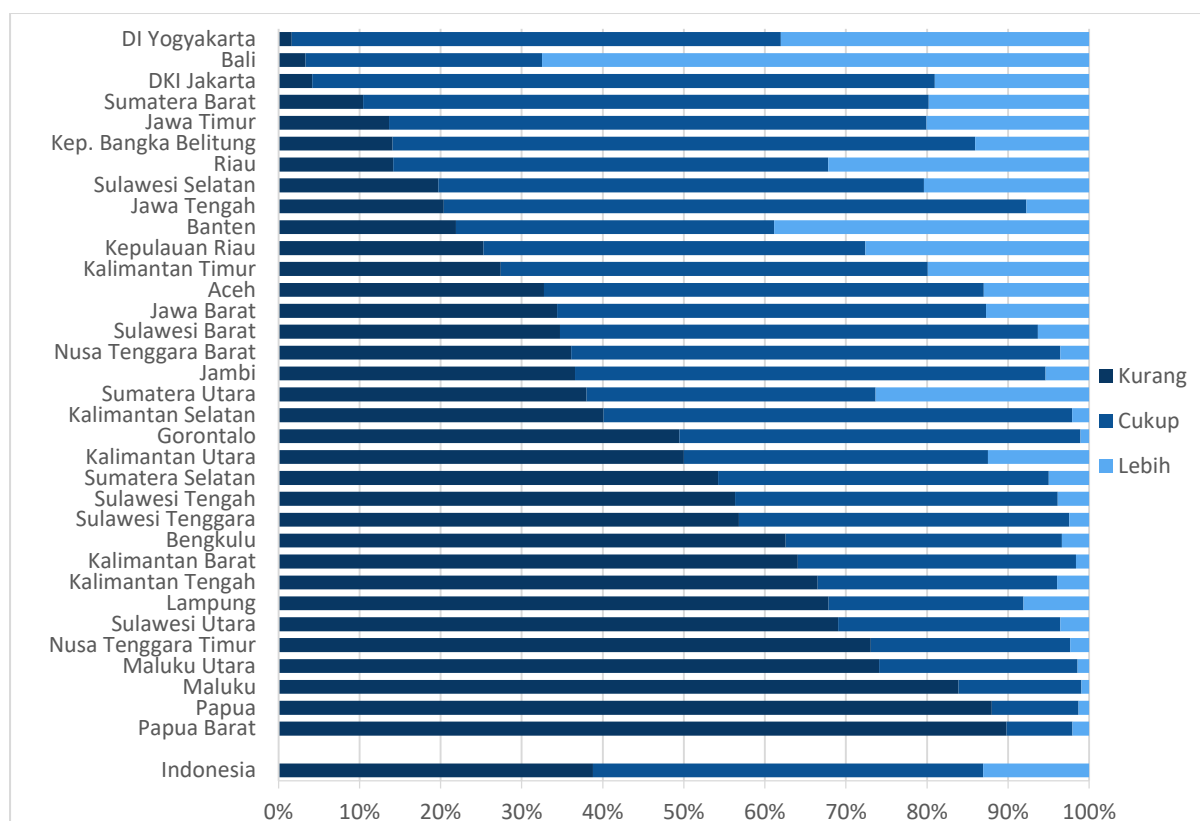
Dilihat dari proporsi puskesmas dengan kekurangan dokter terhadap puskesmas dengan status cukup dan lebih, sebagian besar provinsi memiliki persentase puskesmas dengan kekurangan dokter di bawah 50%. Hanya tiga provinsi yang memiliki persentase kekurangan dokter di atas 50%, yaitu Papua Barat (63,27%), Papua (58,22%), dan Maluku (51,66%). Sebaliknya, terdapat 13 provinsi dengan persentase puskesmas yang memiliki jumlah dokter berlebih terhadap total puskesmas di atas 50%, yaitu DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Bali, Riau, Kep. Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Kep. Riau, Jawa tengah, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi utara, dan Lampung. Jika melihat angka nasional, proporsi puskesmas dengan jumlah dokter melebihi standar kebutuhan masih lebih tinggi dibandingkan proporsi puskesmas dengan jumlah dokter kurang dari standar.

Rincian lengkap mengenai persentase Puskesmas dengan kecukupan dokter dapat dilihat di Lampiran 11.e.

b. Kecukupan Dokter Gigi di Puskesmas

Standar kecukupan dokter gigi di puskesmas adalah minimal satu orang, baik di puskesmas rawat inap dan non rawat inap dan di wilayah perkotaan, perdesaan, maupun di kawasan terpencil dan sangat terpencil. Pada tingkat nasional, terdapat 38,80% puskesmas memiliki dokter gigi dibawah standar minimal. Sedangkan proporsi sisanya yaitu 48,11% puskesmas dengan status jumlah dokter gigi cukup dan 13,09% puskesmas dengan jumlah dokter gigi melebihi standar minimal.

GAMBAR 3.5
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER GIGI DI INDONESIA
TAHUN 2019



Sumber: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>). Diolah oleh Pusat Data dan Informasi.

Gambaran kecukupan di tingkat provinsi menunjukkan bahwa terdapat 14 provinsi dengan persentase puskesmas lebih dari 50% memiliki dokter gigi kurang dari standar. Provinsi dengan persentase puskesmas memiliki dokter gigi kurang dari standar tertinggi adalah Papua Barat (89,80%), Papua (87,99%), dan Maluku (83,89%). Terdapat hanya satu provinsi dengan persentase di atas 50% puskesmas yang memiliki dokter gigi lebih dari standar minimal, yaitu Bali (67,50%). Secara nasional, provinsi dengan puskesmas memiliki dokter gigi kurang dari standar lebih tinggi dibandingkan puskesmas dengan dokter gigi cukup atau lebih dari standar.

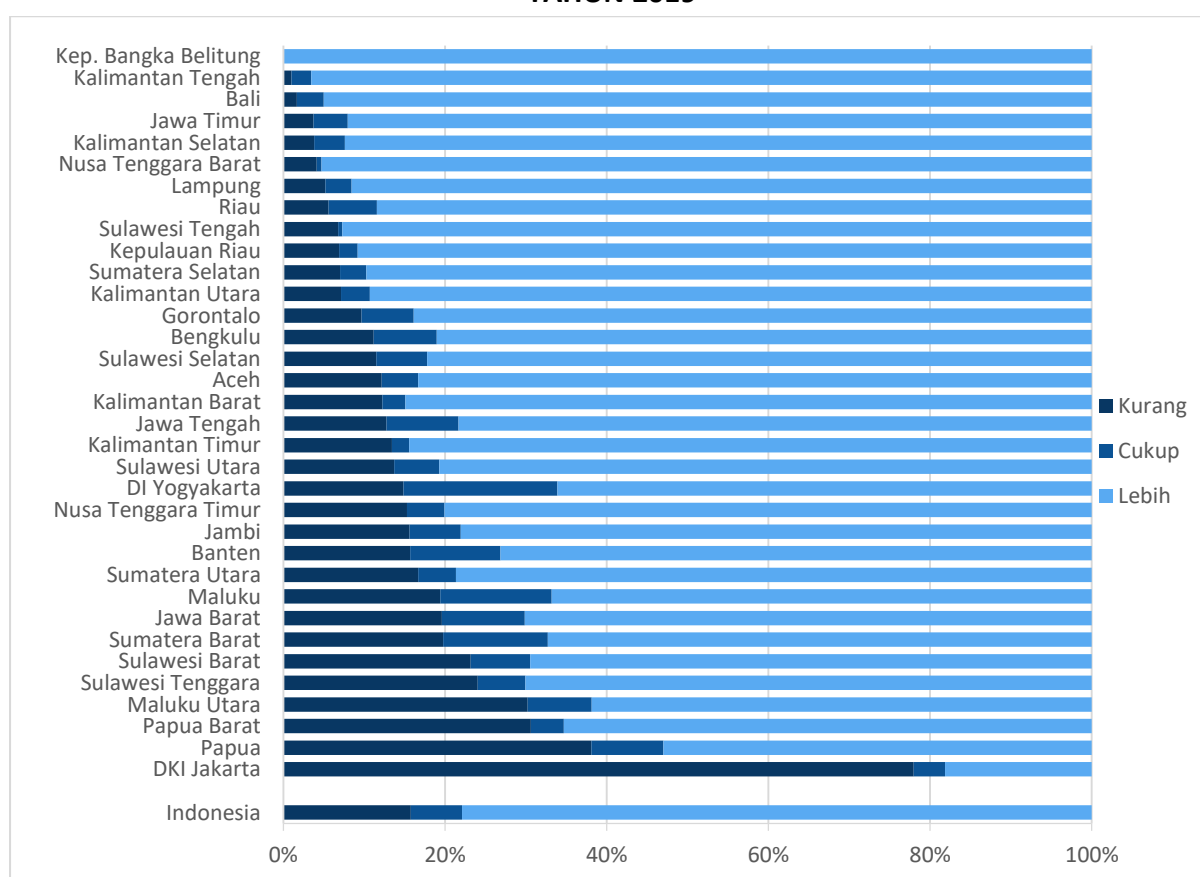
Rincian lengkap mengenai persentase Puskesmas dengan kecukupan dokter gigi dapat dilihat di Lampiran 11.e.

c. Kecukupan Perawat di Puskesmas

Suatu puskesmas dianggap memiliki perawat yang cukup apabila memiliki minimal lima perawat pada puskesmas non rawat inap dan minimal delapan perawat pada Puskesmas rawat inap. Kondisi ini merupakan standar minimal di wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat terpencil.

Secara nasional pada tahun 2019, terdapat 77,90% Puskesmas memiliki jumlah perawat melebihi dari standar yang ditetapkan. Hanya 15,79% puskesmas dengan kategori kurang, dan 6,32% puskesmas dengan kategori cukup.

GAMBAR 3.6
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN PERAWAT DI INDONESIA
TAHUN 2019



Sumber: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>). Diolah oleh Pusat Data dan Informasi.

Sebagian besar provinsi memiliki persentase puskesmas dengan kecukupan perawat berlebih. Provinsi DKI Jakarta memiliki persentase puskesmas dengan kekurangan perawat yang tinggi (77,98%). Hal ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta kekurangan perawat di puskesmas. Kekurangan ini dapat disebabkan karena sebagian besar puskesmas di Provinsi DKI Jakarta adalah “puskesmas kelurahan” yang setara dengan Puskesmas Pembantu (Pustu) di provinsi lain, sehingga puskesmas-puskesmas tersebut tidak terlalu memperhatikan kecukupan jumlah tenaga perawat.

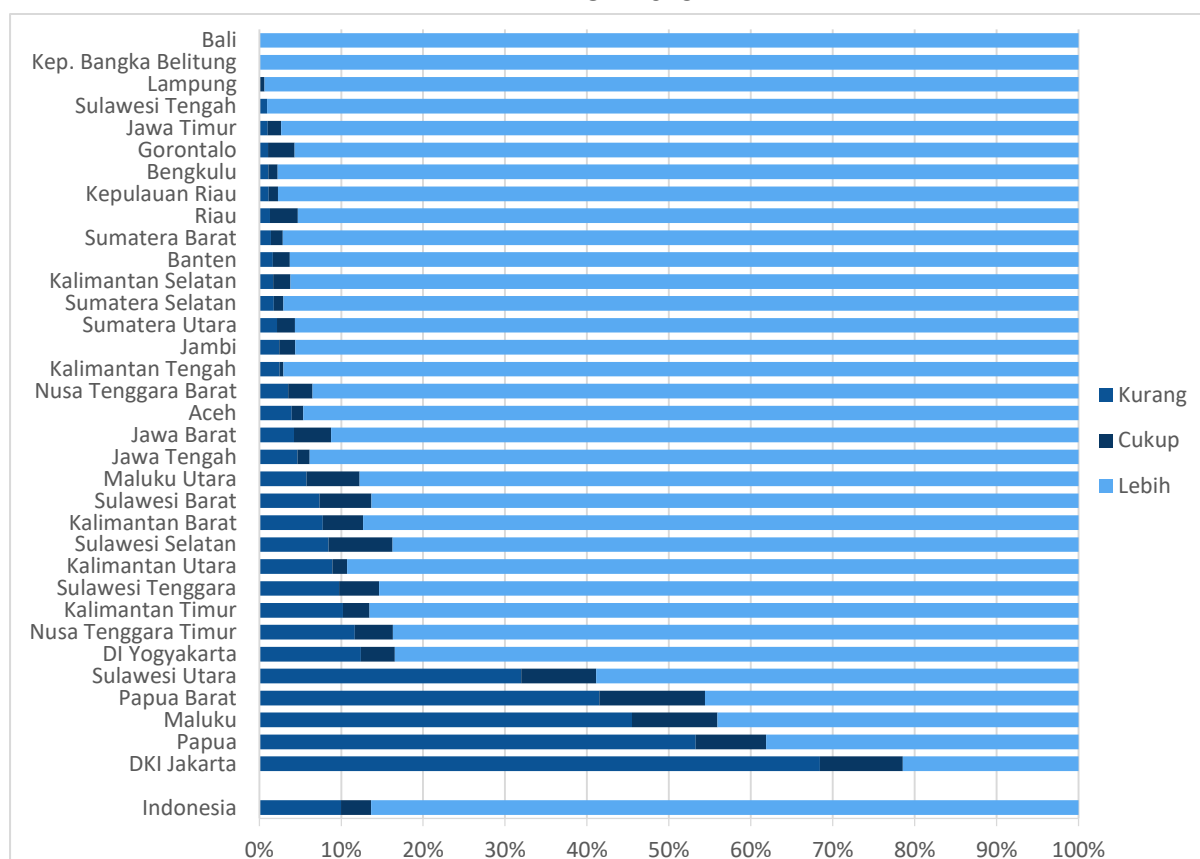
Jika dilihat pada tingkat provinsi dengan puskesmas memiliki perawat lebih dari standar, semua provinsi menunjukkan persentase di atas 50%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu permasalahan distribusi perawat di Indonesia adalah berlebihnya jumlah perawat di sebagian besar puskesmas. Rincian lengkap mengenai persentase Puskesmas dengan kecukupan perawat dapat dilihat di Lampiran 11.e.

d. Kecukupan Bidan di Puskesmas

Jumlah bidan di Puskesmas non rawat inap minimal empat orang dan di Puskesmas rawat inap minimal tujuh orang. Kondisi ini merupakan standar minimal di wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat terpencil.

Pada tingkat nasional, terdapat 83,53% Puskesmas memiliki jumlah bidan lebih dari standar yang ditetapkan. Hanya 12,91% puskesmas dengan kategori kurang, dan 3,56% puskesmas dengan kategori cukup.

GAMBAR 3.7
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN BIDAN DI INDONESIA
TAHUN 2019



Sumber: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>). Diolah oleh Pusat Data dan Informasi.

Pada kategori puskesmas yang memiliki jumlah bidan kurang dari standar minimal, sebagian besar provinsi memiliki persentase yang rendah (< 50%). Hanya dua provinsi memiliki persentase di atas 50%, yaitu DKI Jakarta sebesar 68,45% dan Papua sebesar 53,26%. DKI memiliki persentase

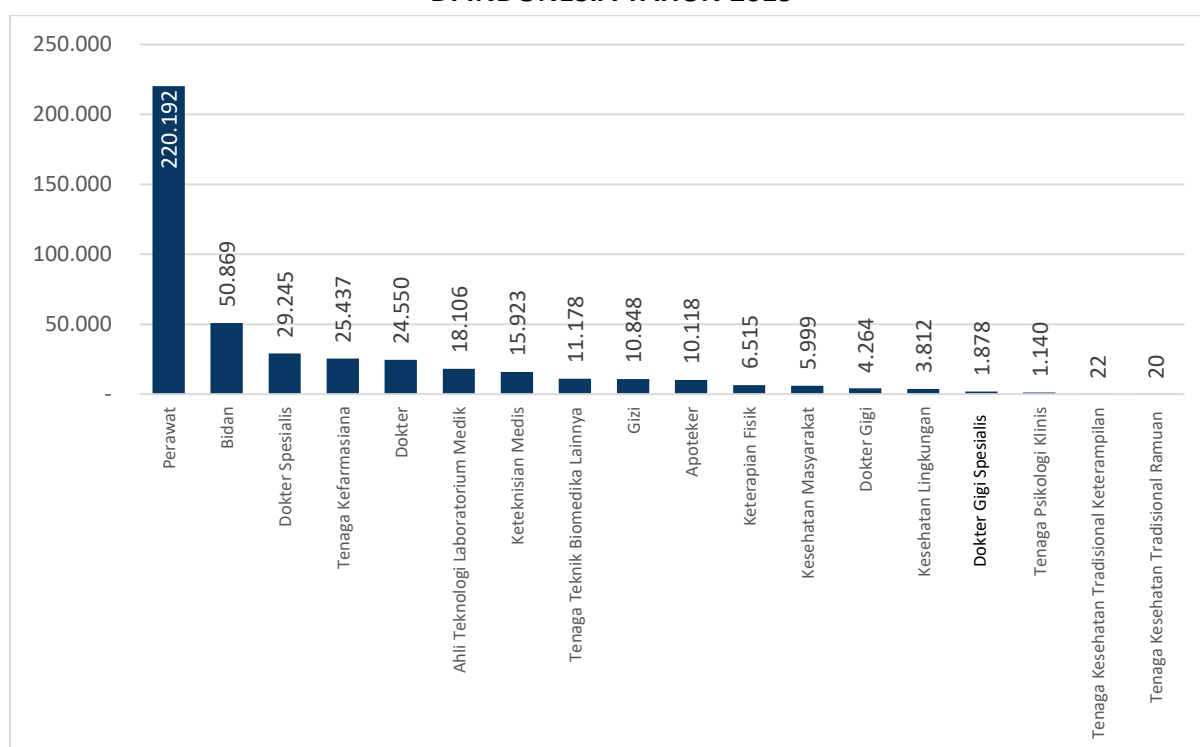
rendah karena sebagian besar puskesmas di Provinsi DKI Jakarta adalah “puskesmas kelurahan” yang setara dengan Puskesmas Pembantu (Pustu) di provinsi lain, sehingga puskesmas-puskesmas tersebut tidak terlalu memperhatikan kecukupan bidan.

Secara nasional, sebagian besar puskesmas memiliki bidan lebih dari standar minimal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu permasalahan distribusi bidan di Indonesia adalah berlebihnya jumlah bidan di sebagian besar puskesmas. Rincian lengkap mengenai persentase Puskesmas dengan kecukupan bidan dapat dilihat di Lampiran 11.e.

2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit). Rumah sakit dapat didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. Sedangkan menurut pelayanan yang diberikan, rumah sakit terdiri dari rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.

GAMBAR 3.8
JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA TAHUN 2019



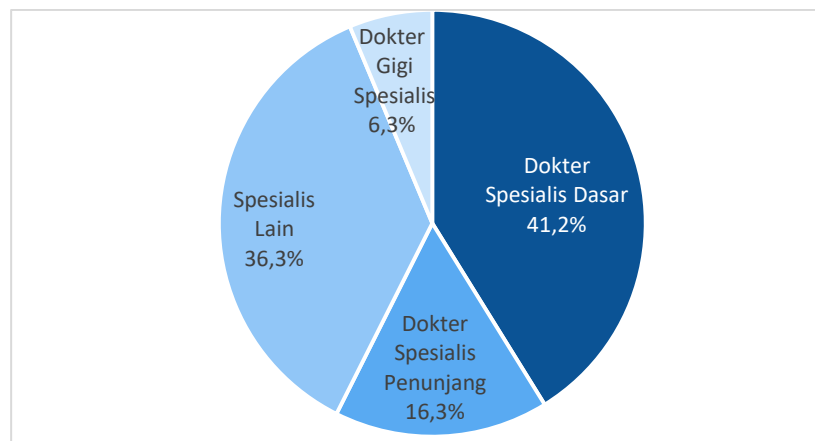
Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>)

Terdapat 440.116 SDM di rumah sakit. Proporsi tenaga kesehatan terbesar adalah perawat sebesar 50% sedangkan proporsi tenaga kesehatan paling rendah adalah tenaga kesehatan

tradisional keterampilan dan tenaga Kesehatan tradisional ramuan. Rincian lengkap mengenai jumlah sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit dapat dilihat di Lampiran 11-16.

Pelayanan spesialis yang ada di rumah sakit di antaranya pelayanan spesialis dasar, spesialis penunjang, spesialis lain, subspesialis, dan spesialis gigi dan mulut. Pelayanan spesialis dasar meliputi pelayanan penyakit dalam, obstetri dan ginekologi, anak, dan bedah. Pelayanan spesialis penunjang meliputi pelayanan radiologi, anesthesiologi, patologi klinik, patologi anatomi, dan rehabilitasi medik.

GAMBAR 3.9
JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA



Sumber: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>)

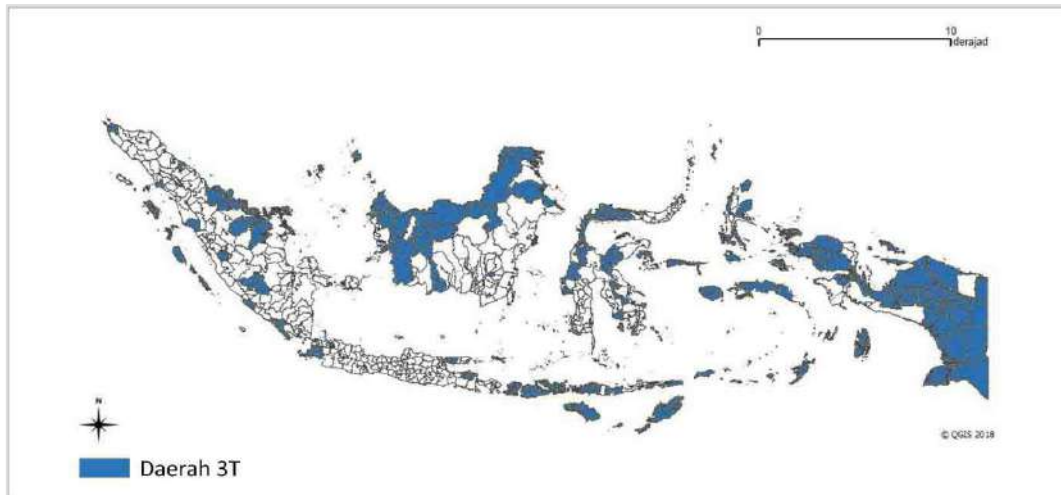
Jumlah dokter spesialis di rumah sakit di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 34.064 orang dengan proporsi terbanyak yaitu dokter spesialis dasar (41,2%) dan proporsi paling sedikit yaitu dokter gigi spesialis (6,3%). Menurut jenis spesialisasinya, dokter spesialis terbanyak yaitu dokter spesialis penyakit dalam dengan jumlah 4.227 orang (12,4%).

Provinsi dengan jumlah dokter spesialis terbanyak adalah DKI Jakarta, yaitu 6.174 orang dan Jawa Timur sebanyak 5.156 orang. Sedangkan provinsi dengan jumlah dokter spesialis paling sedikit adalah Sulawesi Barat (93 orang) dan Maluku (96 orang). Rincian lengkap mengenai jumlah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis di rumah sakit dapat dilihat di Lampiran 11.d.

3. Tenaga Kesehatan di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)

Sebagai upaya percepatan pembangunan daerah, pemerintah pusat telah menetapkan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai sasaran utama pembangunan. Penetapan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 dan Surat Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Nomor 2421/Dt.7.2/04/2015.

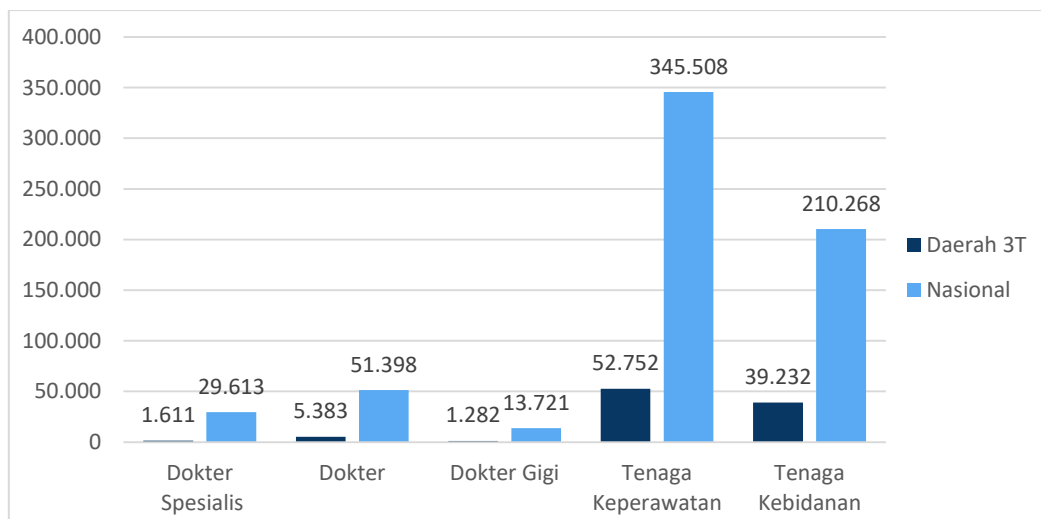
GAMBAR 3.10
KABUPATEN/KOTA DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR (3T)



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 dan Surat Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS No 2421/Dt.7.2/04/2015

Daerah 3T mencakup 143 kabupaten/kota yang berada di 27 provinsi. Pemenuhan SDM di daerah 3T tidak hanya membutuhkan peran pusat tetapi juga peran dinas kesehatan provinsi dan dinas Kesehatan kabupaten/kota dengan menganalisis kebutuhan wilayahnya dan mengajukannya kepada pemerintah pusat.

GAMBAR 3.11
PERBANDINGAN JUMLAH TENAGA KESEHATAN
(DOKTER, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI, PERAWAT, DAN BIDAN) DI DAERAH 3T
TERHADAP JUMLAH NASIONAL TAHUN 2019



Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>)

Proporsi kabupaten/kota dengan kategori 3T adalah 27,8% dari total kabupaten/kota. SDM di daerah 3T tersebut sebesar 13,9% terhadap total SDM secara nasional. Proporsi berdasarkan jenis tenaga kesehatan di daerah 3T terhadap total SDM di Indonesia, yaitu dokter spesialis sebesar 5,4%, dokter sebesar 10,5%, dokter gigi sebesar 9,3%, perawat sebesar 15,3%, dan bidan sebesar 58

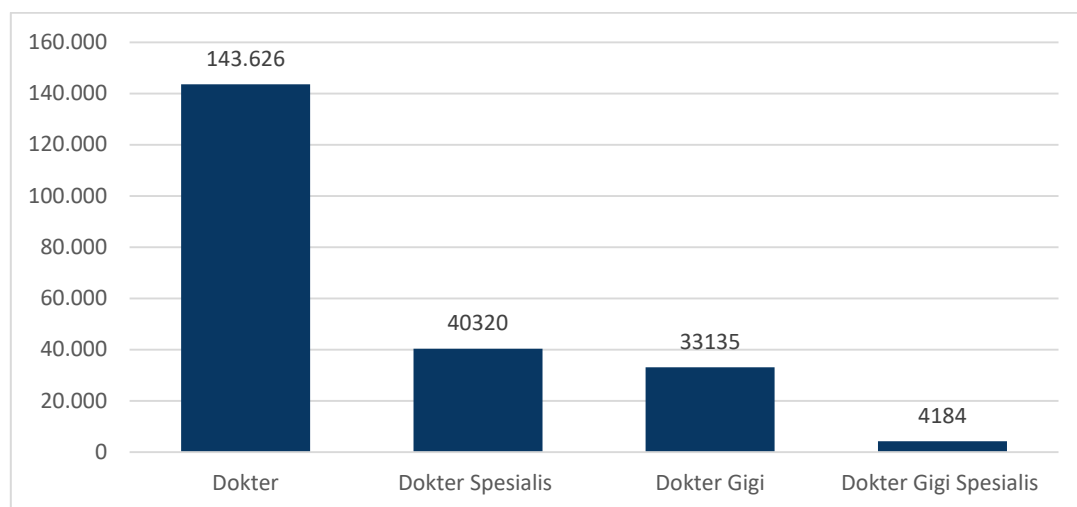
18,7%. Provinsi dengan jumlah SDM di daerah 3T terbanyak yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 19 jumlah kabupaten/kota 3T dan total SDM sebanyak 19.986 orang. Rincian lengkap mengenai jumlah SDM di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar tahun 2019 dapat dilihat di Lampiran 11.f.

B. REGISTRASI TENAGA KESEHATAN

Amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 44 mengatur bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku selama lima tahun dan dapat diregistrasi ulang. STR diterbitkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan setelah tenaga kesehatan yang mengajukan dianggap telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) bertanggung jawab terhadap registrasi dokter dan dokter gigi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi. Registrasi dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi. Selain itu dengan adanya registrasi, KKI memiliki pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi dokter/dokter gigi.

GAMBAR 3.12
JUMLAH DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SPESIALIS YANG MEMILIKI STR PER 31 DESEMBER 2019



Sumber: Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, 2019

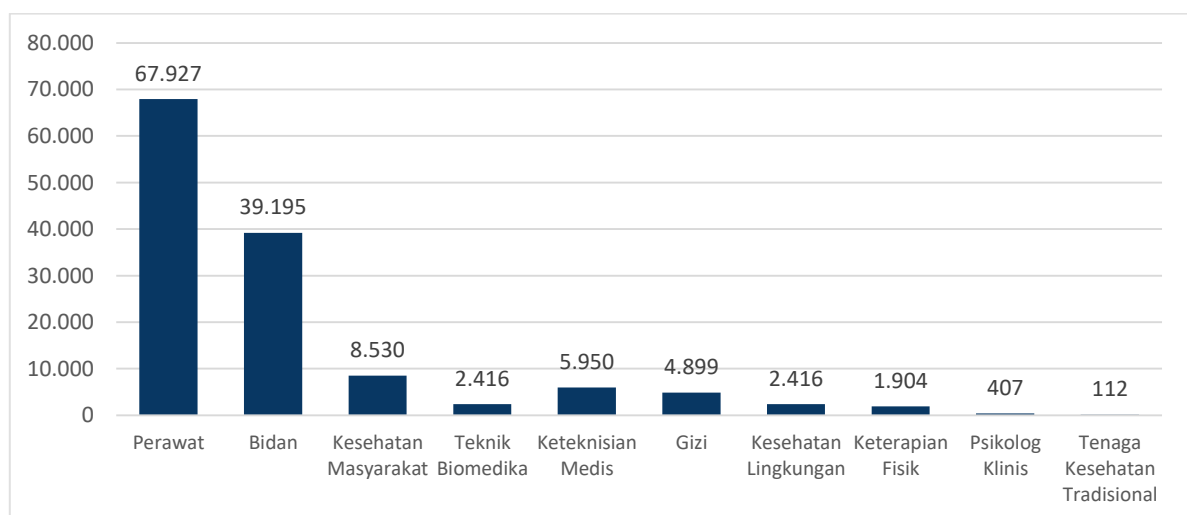
Jumlah tenaga medis yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) aktif sampai dengan 31 Desember 2019 sebanyak 221.265 orang. Tenaga dokter merupakan tenaga medis yang paling banyak memiliki STR, yaitu sejumlah 143.626 orang. Sementara itu, tenaga dokter gigi yang memiliki STR sebanyak 4.184 orang. Walaupun jumlah dokter yang memiliki STR banyak, namun tidak semua tenaga ini bekerja sesuai fungsinya, yaitu di pelayanan medis. Hal ini dapat merupakan salah satu penyebab distribusi dokter yang kurang merata dan adanya kekurangan dokter di fasilitas pelayanan kesehatan di beberapa provinsi. Rincian lengkap mengenai jumlah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang memiliki STR dapat dilihat di Lampiran 11.g.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan mengatur kewenangan lembaga Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) untuk mengelola registrasi tenaga kesehatan selain tenaga dokter/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis. Dalam pasal 2 peraturan tersebut mengatur agar setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki izin dari pemerintah. Untuk memperoleh izin dari pemerintah diperlukan Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) dan berlaku secara nasional selama lima tahun. Setelah lima tahun, setiap tenaga Kesehatan harus melakukan registrasi ulang (re-registrasi) setelah memenuhi syarat.

KTKI menerbitkan STR bagi 26 jenis profesi kesehatan yang terdiri dari: Tenaga Keperawatan, Tenaga Kebidanan, Ahli Kesehatan Masyarakat, Promotor Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Pembimbing Kesehatan Kerja, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Gizi, Fisioterapi, Okupasi Terapis, Terapis Wicara, Akupunktur Terapis, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Teknisi Kardiovaskuler, Teknisi Pelayanan Darah, Refraksionis Optisien, Teknisi Gigi, Penata Anastesi, Terapis Gigi dan Mulut, Audiologis, Radiografer, Elektromedis, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Fisikawan Medis, Ortotis Prostetik, Tradisional Komplementer, dan Tenaga Psikolog Klinis.

Penerbitan STR terdiri dari pengajuan baru dan registrasi ulang bagi pemilik STR yang masa berlakunya telah habis. STR baru yang diterbitkan pada tahun 2019 adalah sebanyak 140.301 surat. Proporsi terbanyak STR yang diterbitkan adalah untuk jenis tenaga perawat (50,8%) dan bidan (29,3%).

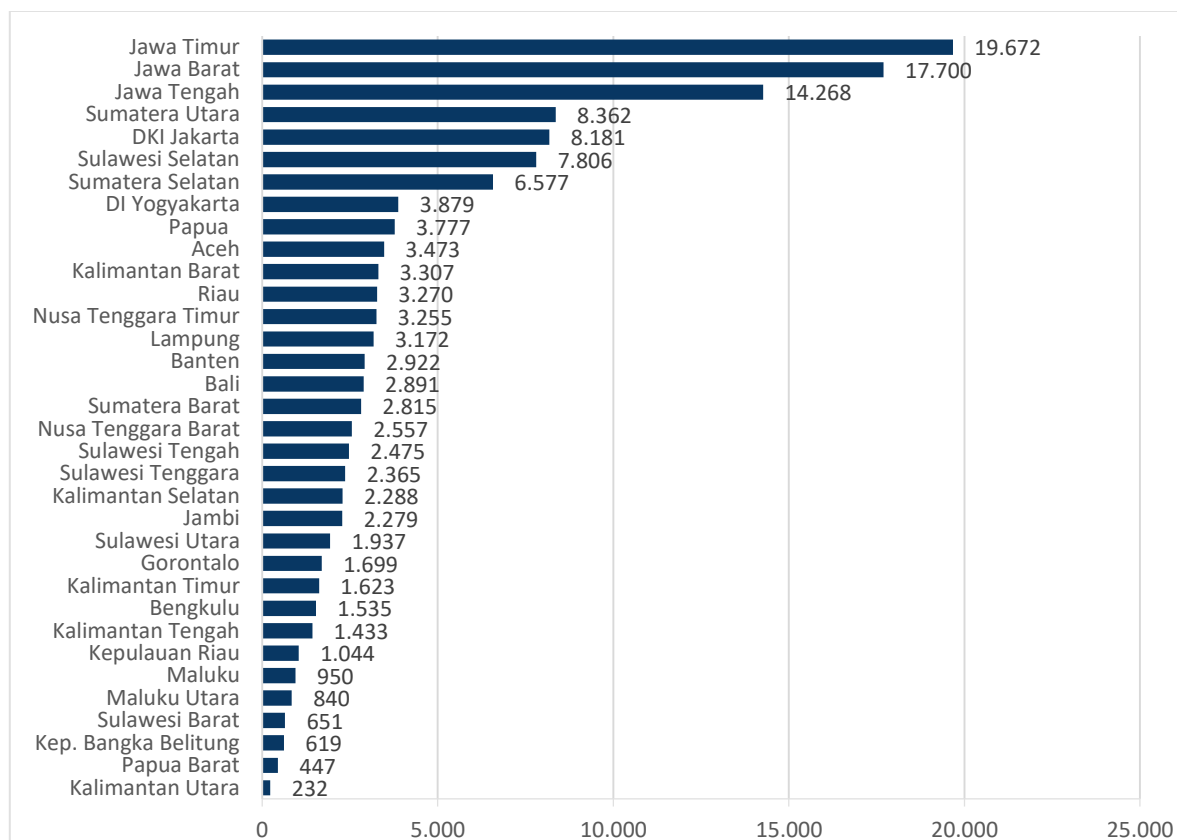
GAMBAR 3.13
JUMLAH PENERBITAN STR BARU MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN
TAHUN 2019



Sumber: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2020

Jika dilihat distribusi penerbitan STR tenaga Kesehatan berdasarkan wilayah. Provinsi dengan tenaga kesehatan terbanyak yang melakukan registrasi baru adalah Jawa Timur sebanyak 19.672 orang, Jawa Barat sebanyak 17.700 orang, dan Jawa Tengah sebanyak 14.268 orang. Secara umum provinsi-provinsi tersebut memiliki lulusan tenaga kesehatan terbanyak, oleh karena itu jumlah tenaga kesehatan yang melakukan registrasi baru lebih banyak dibandingkan provinsi lainnya.

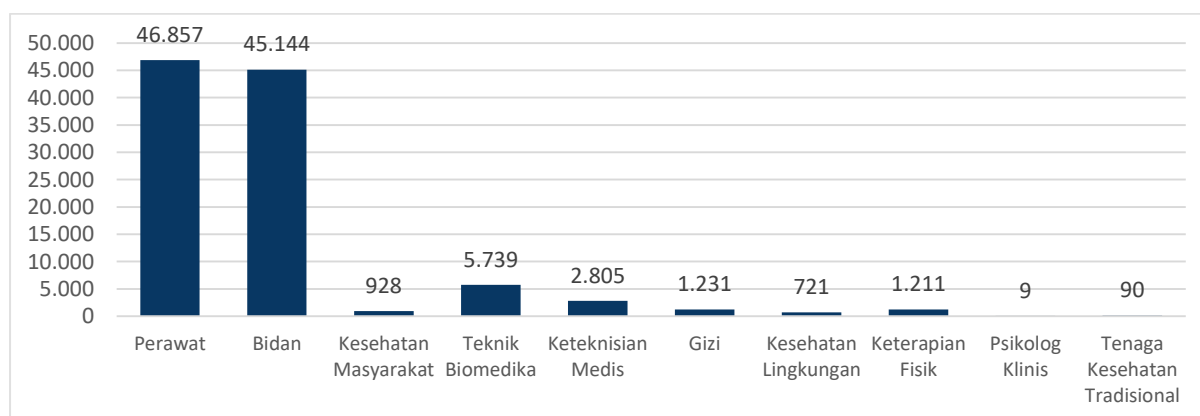
GAMBAR 3.14
JUMLAH PENERBITAN STR BARU MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



Sumber: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2019

Registrasi ulang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan surat tanda registrasi yang telah habis masa berlaku. Jumlah tenaga Kesehatan yang melakukan registrasi ulang tahun 2019 sebanyak 104.735 orang. Jumlah tenaga perawat dan bidan yang melakukan registrasi ulang hampir berimbang, yaitu perawat sebanyak 46.857 orang dan bidan sebanyak 45.144 orang. Sedangkan, tenaga psikologi klinis hanya sedikit yang melakukan registrasi ulang, yaitu sebanyak 9 orang.

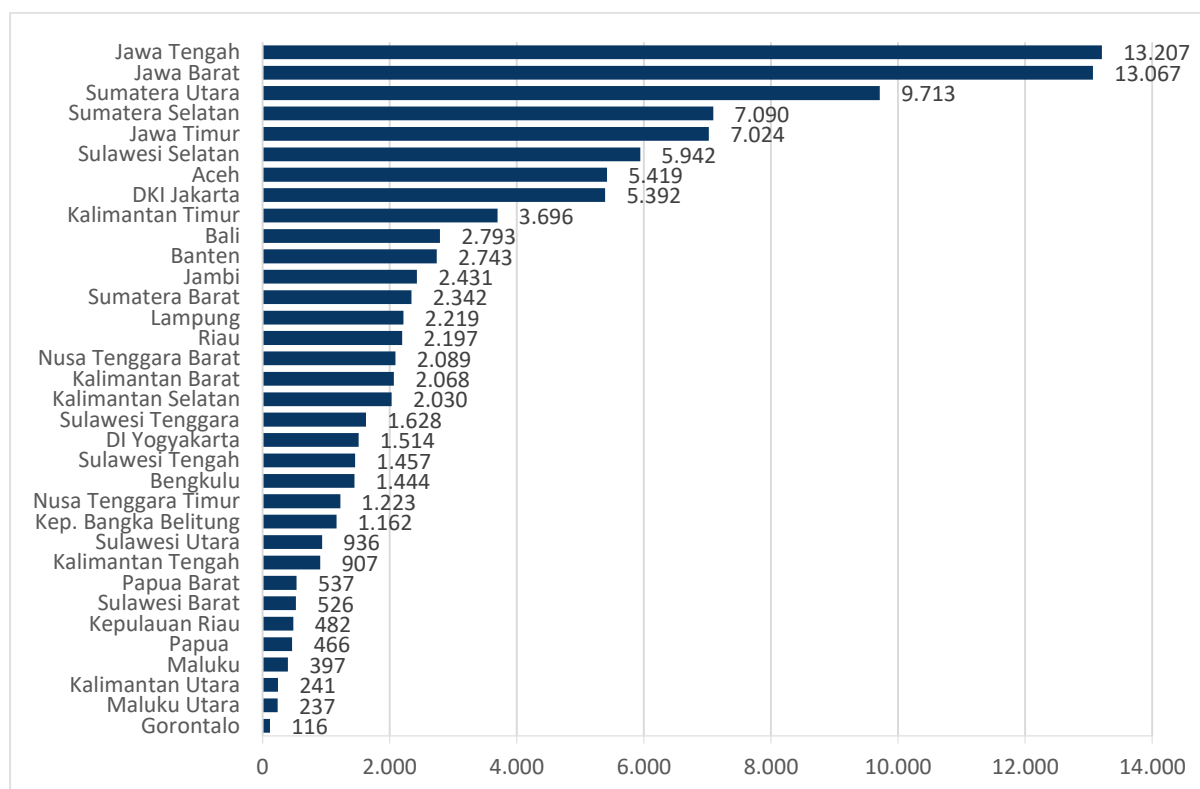
GAMBAR 3.15
JUMLAH PENERBITAN STR ULANG MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2019



Sumber: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2020

Berdasarkan wilayah, provinsi dengan tenaga kesehatan terbanyak yang melakukan registrasi adalah Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebanyak 13.207 tenaga kesehatan dan Provinsi Jawa Barat sebanyak 13.067 tenaga Kesehatan. Jawa Timur yang merupakan provinsi dengan jumlah tenaga Kesehatan terbanyak yang melakukan registrasi baru, berada pada urutan ke-5 terbanyak pada registrasi ulang tenaga Kesehatan. Rincian lengkap mengenai jumlah penerbitan STR baru dan STR ulang tenaga kesehatan dapat dilihat di Lampiran 12.b dan 12.c.

GAMBAR 3.16
JUMLAH PENERBITAN STR ULANG MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



Sumber: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2019

C. PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

1. Tenaga Kesehatan dengan Status Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Pengangkatan PTT dalam waktu tertentu bertujuan untuk mendukung tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap). Pengangkatan dan penempatan dokter dan bidan sebagai PTT dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan, dan dapat dilaksanakan pula oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pengangkatan dan penempatan PTT dilakukan untuk dokter dan bidan. Tenaga dokter yang dimaksud adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis lulusan Pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah

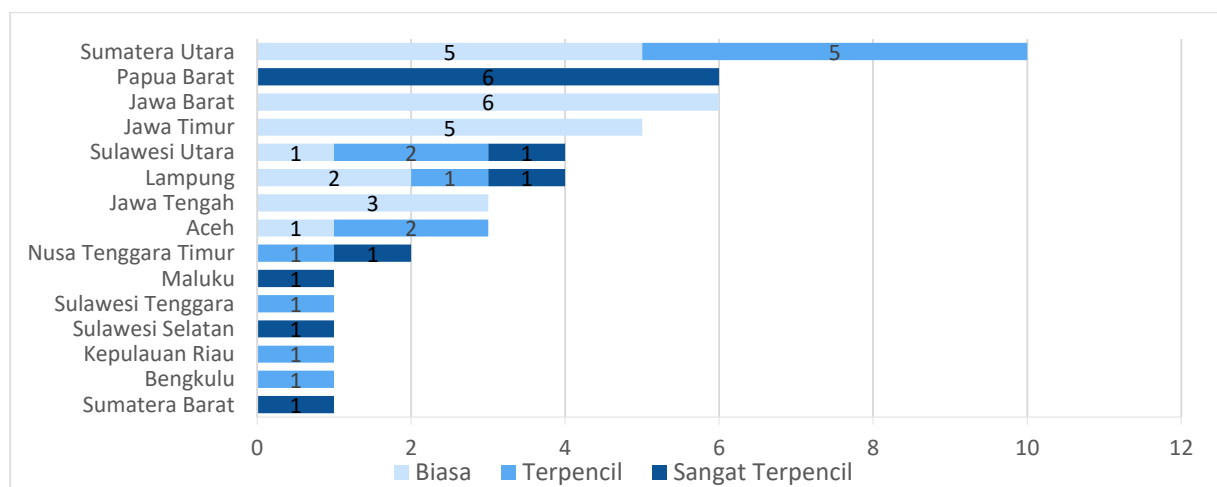
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan dokter PTT dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, daerah bermasalah kesehatan, daerah rawan konflik; rumah sakit provinsi sebagai dokter brigade siaga bencana; dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) pada wilayah terpencil dan sangat terpencil. Masa penugasan dokter PTT adalah satu tahun untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil; dua tahun untuk dokter atau dokter gigi yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil; dan tiga tahun untuk dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria biasa. Dokter PTT dapat diangkat kembali atau diperpanjang paling banyak untuk satu kali masa penugasan.

Penempatan bidan PTT hanya dapat dilakukan untuk ditempatkan sebagai bidan di desa dengan kriteria biasa, terpencil, atau sangat terpencil. Bidan PTT ditugaskan selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali atau diperpanjang paling banyak dua kali masa penugasan.

Sesuai dengan kebijakan Menteri Kesehatan, tidak ada lagi pengangkatan baru tenaga kesehatan dengan status PTT sejak tahun 2016. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah, Kementerian Kesehatan melakukan terobosan berupa program Nusantara Sehat berbasis tim dan individu yang diselenggarakan mulai tahun 2015.

Tenaga dokter yang masih bertugas PTT per 31 Desember 2019 berjumlah 4 orang dengan rincian lokasi penempatan (Kriteria Biasa: 2 orang, dan Kriteria Sangat Terpencil: 2 orang), dan dokter gigi berjumlah 2 orang dengan lokasi penempatan (Kriteria Terpencil: 1 orang, dan Kriteria Sangat Terpencil: 1 orang). Sementara itu, bidan yang bertugas per 31 Desember 2019 berjumlah 49 orang yang tersebar di 15 provinsi dengan lokasi penempatan (Kriteria Biasa: 23 orang, Kriteria Terpencil: 14 orang dan Kriteria Sangat Terpencil: 12 orang).

GAMBAR 3.17
JUMLAH BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP AKTIF
MENURUT KRITERIA WILAYAH DI INDONESIA
PER 31 DESEMBER 2019



Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2020.

Ket: Sebanyak 19 provinsi sudah tidak ada PTT

2. Tenaga Kesehatan dengan Status Penugasan Khusus

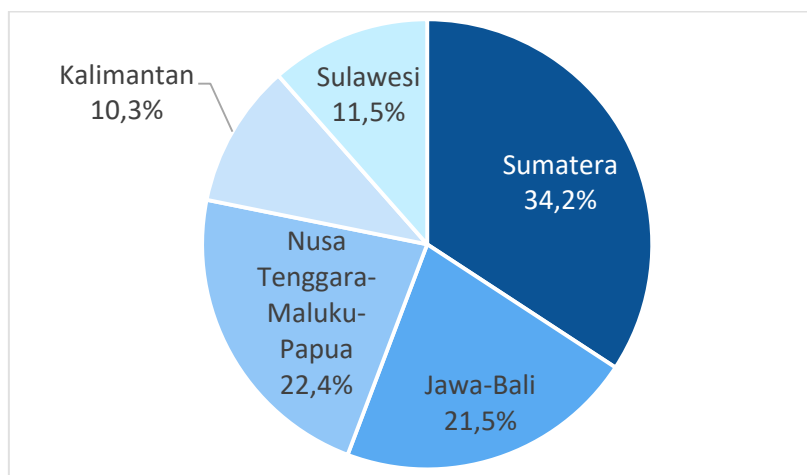
a. Penugasan Khusus Tenaga Residen

Penugasan khusus merupakan pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), serta rumah sakit kelas C dan rumah sakit kelas D di kabupaten yang memerlukan pelayanan medik spesialistik. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan. Jenis tenaga kesehatan yang diangkat dalam penugasan khusus adalah residen.

Residen adalah dokter/dokter gigi yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis. Residen dalam penugasan khusus terdiri dari residen senior (pembiayaan pendidikan secara mandiri) dan residen pasca jenjang I (pembiayaan pendidikan dari Kementerian Kesehatan). Residen senior ditugaskan antara tiga sampai dengan enam bulan, sedangkan residen pasca jenjang I ditugaskan selama enam bulan.

Sebanyak 339 orang residen dokter spesialis dalam penugasan khusus di Indonesia tahun 2020. Selama tiga tahun terakhir jumlah ini terus menurun dimana pada tahun 2017 sebanyak 619 orang, dan 2018 sebanyak 490 orang. Proporsi penugasan khusus residen dokter spesialis terbesar di regional Sumatera sebesar 34,2%, diikuti oleh regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua sebesar 22,4%, dan Jawa-Bali sebesar 21,5%. Residen dokter spesialis terbanyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara (34 orang), sedangkan di DKI Jakarta tidak terdapat residen dokter spesialis pada tahun 2020. Rincian lengkap mengenai jumlah peserta penugasan khusus residen dokter spesialis dapat dilihat di Lampiran 11.h.

GAMBAR 3.18
PROPORSI RESIDEN DOKTER SPESIALIS BERDASARKAN REGIONAL WILAYAH
PADA TAHUN 2019



Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2020.

b. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat

Pada tahun 2015, Kementerian Kesehatan meluncurkan program penugasan khusus tenaga kesehatan Nusantara Sehat. Penugasan khusus ini meliputi penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (team based) dan individu. Landasan hukum program ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat. Program Nusantara Sehat dilaksanakan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan maupun daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Program penugasan khusus ini bertujuan untuk: menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan, menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerah, meningkatkan retensi tenaga kesehatan yang bertugas, memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, menggerakkan pemberdayaan masyarakat, mewujudkan pelayanan kesehatan terintegrasi, serta meningkatkan dan melakukan pemerataan pelayanan kesehatan.

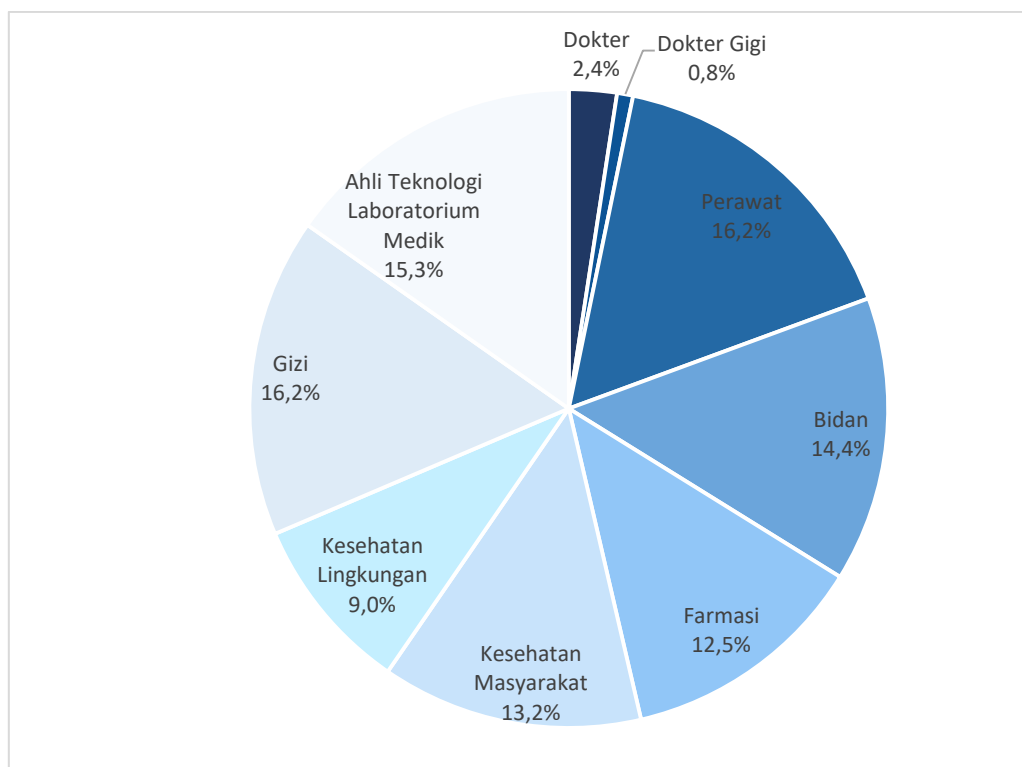
3. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Nusantara Sehat Tim)

Penugasan Tenaga kesehatan Nusantara Sehat berbasis tim (tim NS) minimal terdiri dari lima jenis tenaga kesehatan dari sembilan jenis tenaga di puskesmas, yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat. Tim NS akan ditempatkan di puskesmas daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan maupun daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan masa tugas selama 2 tahun.

Penempatan Nusantara Sehat berbasis tim sampai dengan tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak 14 batch. Batch I-II dilaksanakan pada tahun 2015, dengan penempatan di 120 puskesmas. Batch III-V dilaksanakan pada tahun 2016, dengan penempatan di 131 puskesmas. Batch VI-VIII dilaksanakan pada tahun 2017 dengan penempatan di 188 puskesmas. Batch IX-XI dilaksanakan pada tahun 2018 dengan penempatan di 156 puskesmas. Batch XII-XIV dilaksanakan tahun 2019 dengan penempatan tim NS yang masih aktif pada 173 puskesmas, 87 kabupaten/kota, dan 25 provinsi. Rincian lengkap mengenai penempatan Tim Nusantara Sehat dapat dilihat di Lampiran 11.i.

Jenis tenaga yang paling banyak ditempatkan di tahun 2019 adalah perawat dan tenaga gizi, masing-masing sebanyak 160 orang (16,2%) dan tenaga yang paling sedikit adalah dokter sebanyak 24 orang (2,4%) dan dokter gigi sebanyak 8 orang (0,8%). Tim NS terbanyak ditempatkan di Aceh (119 orang) dan Sulawesi Tenggara (109 orang), sedangkan di Sumatera Barat hanya terdapat 5 tim NS. Sebanyak 9 provinsi lainnya (Sumatera Selatan, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Gorontalo) tidak mendapatkan penempatan tim NS pada tahun 2019. Rincian lengkap mengenai jumlah penempatan tenaga kesehatan pada Tim Nusantara Sehat dapat dilihat di Lampiran 11.j.

GAMBAR 3.19
PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA TIM NUSANTARA SEHAT
HINGGA TAHUN 2019



Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2020.

4. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Individu (Nusantara Sehat Individu)

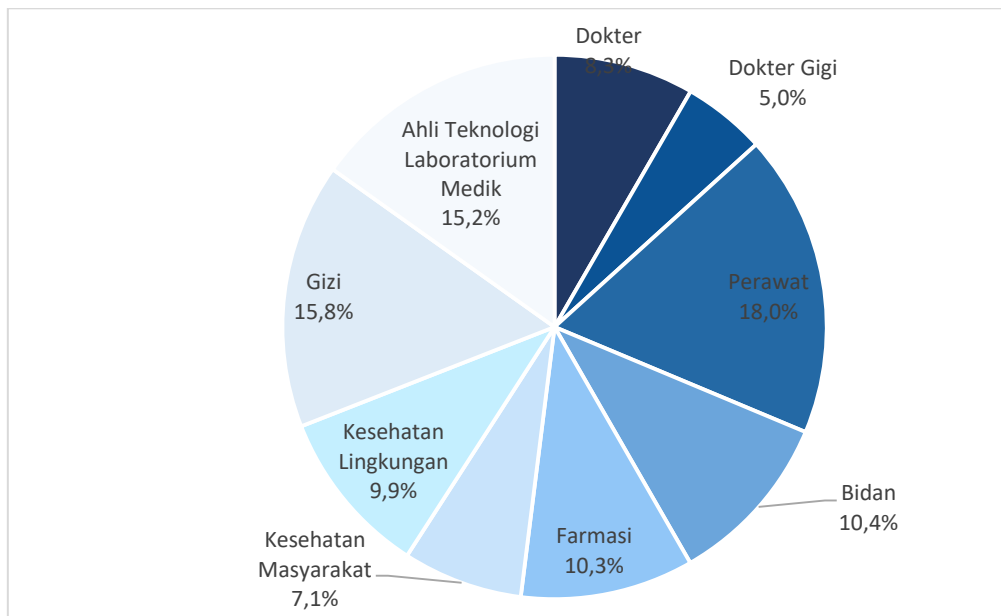
Penugasan Tenaga kesehatan Nusantara Sehat Individu (NS Individu) adalah penugasan khusus yang penempatannya berbentuk individu yang disesuaikan dengan pemetaan ketenagaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mendukung Nusantara Sehat. Penugasan ini terdiri atas dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat. NS Individu akan ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan maupun daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama 2 tahun dengan evaluasi pada 1 tahun pertama penugasan.

Penempatan NS Individu sampai dengan tahun 2019 sebanyak 20 periode. Sampai dengan tahun 2019 terdapat NS individu sebanyak 3.574 orang, dengan penempatan di 2.179 puskesmas, 514 kabupaten/kota pada 34 provinsi. Rincian lengkap mengenai penempatan Nusantara Sehat Individu dapat dilihat di Lampiran 11.k.

Perawat merupakan jenis tenaga NS individu yang paling banyak ditempatkan selama tahun 2019, yaitu sebanyak 644 orang (18,0%), diikuti oleh tenaga gizi sebanyak 564 orang (15,8%) dan ahli teknologi laboratorium medik sebanyak 542 orang (15,2%), sedangkan dokter gigi merupakan tenaga NS paling sedikit, yaitu sebanyak 117 orang (5,0%). Sulawesi Tenggara merupakan provinsi dengan penempatan tenaga NS individu terbanyak, yaitu 505 orang, dan Kep. Bangka Belitung dengan

tenaga NS individu paling sedikit, yaitu sebanyak 21 orang. Rincian lengkap mengenai jumlah penempatan tenaga kesehatan pada NS individu dapat dilihat di Lampiran 11.I.

GAMBAR 3.20
PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA NUSANTARA SEHAT INDIVIDU HINGGA
TAHUN 2019



Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2020.

Pemerintah daerah dapat memberdayakan tenaga kesehatan pasca Nusantara Sehat berdasarkan kompetensi, standar ketenagaan, dan kebutuhan daerah sehingga tercapai kemandirian pemenuhan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Program Internsip Dokter

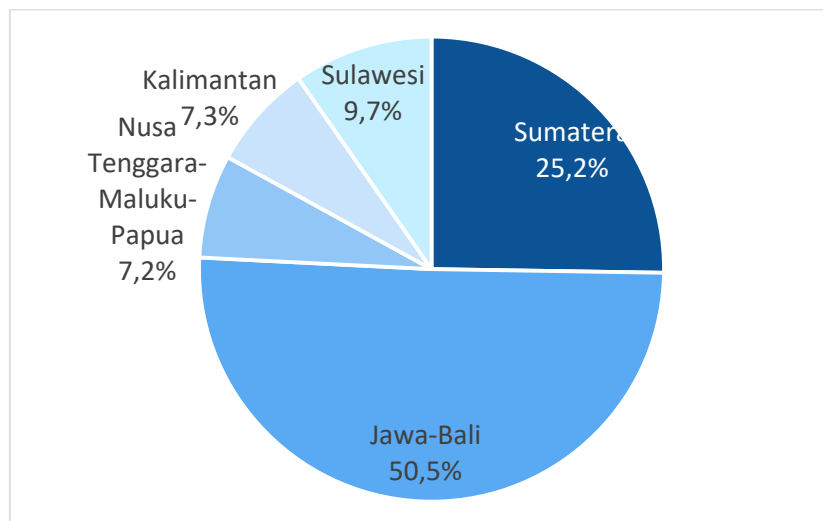
Program Internsip adalah proses pemantapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan. Penempatan dokter program internsip di fasilitas pelayanan kesehatan perlu disinergikan dengan program pemerintah dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan.

Peserta program internsip adalah dokter yang baru lulus program studi pendidikan dokter berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik kedokteran dan/atau mengikuti pendidikan dokter spesialis. Dokter peserta program internsip harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) untuk kewenangan internsip yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Surat Izin Praktek (SIP) Internsip yang dikeluarkan oleh kepala dinas kabupaten/kota. STR untuk kewenangan internsip dan SIP internsip hanya berlaku selama menjalani internsip.

Dokter peserta program internsip ikatan dinas ditempatkan selama satu tahun dan wajib melaksanakan tugas pasca internsip di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk Kementerian Kesehatan.

Pemberangkatan dokter peserta intersip dilakukan sebanyak empat kali dalam satu tahun. Jumlah dokter peserta intersip yang diberangkatkan pada bulan Februari 2019 sebanyak 3.211 orang, bulan Mei-Juni sebanyak 2.057 orang, bulan September-Oktober sebanyak 3.207 orang, dan bulan November-Desember sebanyak 3.644 orang. Secara regional, proporsi terbesar dokter peserta intersip yaitu regional Jawa-Bali (50,5%) dengan jumlah dokter peserta intersip terbanyak adalah Jawa Timur (1.817 orang). Sulawesi Barat memiliki jumlah dokter peserta internship paling sedikit, yaitu 55 orang. Rincian lengkap mengenai jumlah dokter peserta intersip tahun 2019 dapat dilihat di Lampiran 11.m.

GAMBAR 3.21
JUMLAH DOKTER PESERTA INTERNSIP TAHUN 2019



Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan,
Kemenkes RI, 2020.

6. Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS)

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 28 Ayat (1) disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga kesehatan di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pelayanan Kesehatan spesialistik, meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia, pemerataan distribusi dokter spesialis, dan memastikan keberadaan dan ketersediaan dokter spesialis di rumah sakit memenuhi standar minimal yang diterapkan maka ditetapkan Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).

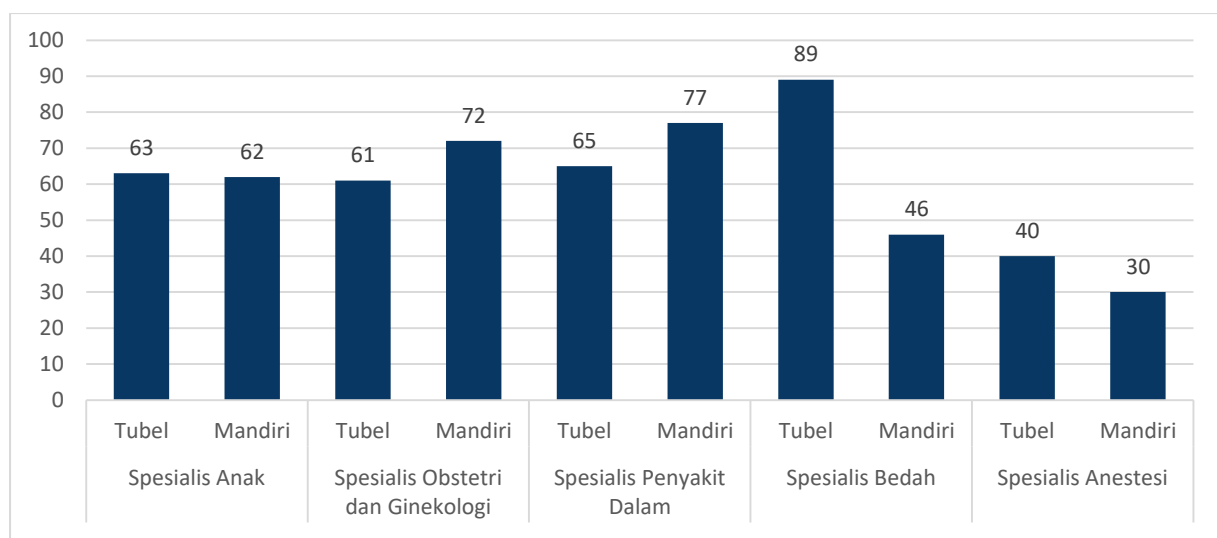
Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis, maka Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Peraturan tersebut juga mencantumkan bahwa Peserta PGDS menerima bantuan biaya Pendidikan.

Dalam menyelenggarakan program PGDS, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan kolegium, organisasi profesi, dan institusi Pendidikan. Peran institusi dalam PDGS adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Kesehatan, bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan PGDS; mulai dari proses rekrutmen hingga penempatan peserta (memberikan tunjangan, mengatur penempatan, pembinaan dan pengawasan dan, menyusun regulasi agar terlaksananya program PGDS secara optimal).
2. Pemerintah Daerah, bertanggungjawab memastikan kesiapan infrastruktur, sarana dan prasarana, peralatan, obat-obatan, tempat tinggal/ rumah dinas, insentif daerah sesuai kemampuan daerah, dan jasa medik/jasa pelayanan sebagai hak dokter sesuai kinerja.
3. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), bertanggungjawab menerbitkan Surat Tanda Registrasi (STR) peserta PGDS.
4. Fakultas Kedokteran, bertanggungjawab membuat mekanisme yang mensyaratkan calon PGDS menandatangani surat pernyataan bersedia mengikuti program PGDS.
5. Ikatan Dokter Indonesia (ID), bertanggungjawab dalam mendukung kebijakan perhimpunan masing-masing demi terlaksananya program PGDS, mendorong MPPK dan MKKI untuk membahas lebih rinci peran masing-masing.

Sebanyak 605 dokter spesialis ditempatkan di RS milik pemerintah di 34 provinsi, termasuk juga RS milik institusi TNI/POLRI yang mengikuti program PGDS pada tahun 2019. Peserta PGDS terbagi menjadi peserta Tubel (tugas belajar) dan peserta mandiri. Sekitar setengah dari peserta PGDS merupakan peserta Tubel, yaitu sebanyak 318 orang, dan peserta mandiri sebanyak 287 orang. Jawa Timur dan Jawa Barat merupakan provinsi dengan penempatan tenaga kesehatan pada PGDS terbanyak, yaitu sebanyak 44 orang dan 43 orang. Sementara itu, DKI Jakarta memiliki penempatan paling sedikit, yaitu sebanyak 3 orang. Rincian lengkap mengenai jumlah penempatan tenaga kesehatan pada PGDS tahun 2019 dapat dilihat di Lampiran 11.n.

GAMBAR 3.22
PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA
PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS TAHUN 2019



Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2020.

D. INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengamanatkan bahwa tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimal Diploma III kecuali tenaga medis. Pengadaan tenaga kesehatan ini dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu, sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan profesi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan upaya kesehatan dan dinamika kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar negeri, keseimbangan antara kemampuan produksi tenaga kesehatan dan sumber daya yang tersedia, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kesehatan melalui penjaminan mutu dan kompetensi lulusan institusi pendidikan tenaga kesehatan, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 507/E/O/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012. Dengan demikian, pembinaan akademik Politeknik Kesehatan menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun pengaturan di luar akademik, yaitu pembinaan teknis tetap menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan.

Institusi pendidikan tenaga kesehatan selain tenaga medis terdiri dari Politeknik Kesehatan (Poltekkes) dan Non Politeknik Kesehatan (Non Poltekkes). Kementerian Kesehatan bertanggung jawab terhadap pembinaan teknis institusi Poltekkes. Sebanyak 38 Poltekkes Kementerian Kesehatan tersebar di 34 provinsi. Poltekkes, diantaranya, memiliki jenjang pendidikan Diploma III, Diploma IV, dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), yang terdiri dari 270 program studi strata Diploma III (266 program studi reguler dan 4 program studi PJJ) dan 139 program studi strata Diploma IV. Kelompok jurusan di Poltekkes terdiri dari:

1. Keperawatan, yang terdiri dari Keperawatan dan Keperawatan Gigi;
2. Kebidanan;
3. Kefarmasian, yang terdiri dari Analisis Farmasi dan Makanan dan Farmasi,
4. Kesehatan Tradisional;
5. Kesehatan Lingkungan;
6. Gizi;
7. Kesehatan Masyarakat, yang terdiri dari Promosi Kesehatan;
8. Keterampilan Fisik, yang terdiri dari Fisioterapi, Okupasi Terapi, Terapi Wicara, dan Akupunktur;
9. Keteknisan Medis, yang terdiri dari Teknik Gigi, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Teknologi Bank Darah;
10. Teknik Biomedika, yang terdiri dari Analisis Kesehatan, Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Teknik Elektromedik, dan Ortotik Prostetik.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 9, Kementerian Kesehatan mengadakan program percepatan pendidikan tenaga kesehatan. Melalui program ini diharapkan pada tahun 2020 seluruh tenaga kesehatan yang ada

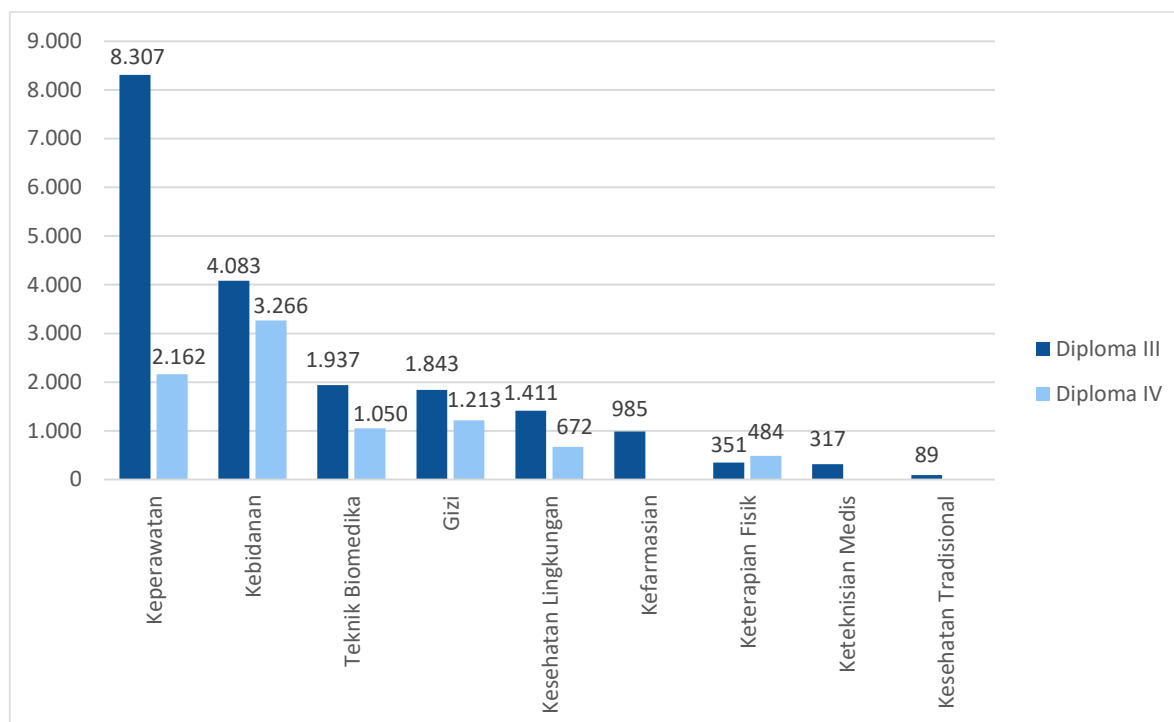
dapat memenuhi kualifikasi pendidikan minimal Diploma III. Salah satu cara yang diterapkan dalam program ini adalah dengan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja. Pengakuan ini bertujuan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi tertentu sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Jenis pendidikan dalam Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan terdiri dari 9 jenis pendidikan Diploma III bidang kesehatan yaitu Keperawatan, Kebidanan, Farmasi, Keperawatan Gigi, Kesehatan Lingkungan, Analisis Kesehatan, Gizi, Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Teknologi Bank Darah. Penyelenggara RPL adalah perguruan tinggi kesehatan yang ditunjuk oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2018 sesuai dengan Kepmenristekdikti Nomor 181/M/KPT/2018 baik Poltekkes Kemenkes maupun perguruan tinggi kesehatan milik swasta dengan jumlah total 496 program studi yang pelaksanaannya dilakukan di seluruh Poltekkes Kemenkes dan 50 PTN/PTS lainnya. Masa studi RPL terdiri dari 2- 3 semester.

Program studi PJJ dibuka di Poltekkes Kupang dan Kalimantan Timur. Selain itu, Poltekkes juga membuka program studi Magister Terapan dan Profesi Terapan. Program studi Magister Terapan dibuka di Poltekkes Semarang dengan program studi Magister Terapan Teknik Biomedika (*Imaging Diagnostic*). Sementara itu, program studi Profesi dibuka di Poltekkes Semarang, Surakarta, dan Palu.

1. Jumlah Lulusan Poltekkes

Jumlah lulusan Poltekkes pada tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu terdiri dari 19.323 orang lulusan Diploma III dan 8.847 orang lulusan Diploma IV. Program studi Keperawatan memiliki lulusan terbanyak, yaitu 8.307 orang lulusan Diploma III dan 2.162 orang lulusan Diploma IV. Sementara itu, Kesehatan Tradisional merupakan program studi dengan lulusan paling sedikit, yaitu sebanyak 89 orang. Secara umum, hampir semua program studi memiliki lulusan lebih banyak untuk Diploma III dibandingkan dengan Diploma IV, kecuali pada program studi Keterampilan Fisik dengan jumlah lulusan 484 orang lulusan Diploma III dan 351 orang lulusan Diploma IV. Rincian lebih lengkap mengenai jumlah lulusan program Diploma III dan Diploma IV Poltekkes dapat dilihat pada Lampiran 16.e dan Lampiran 16.g.

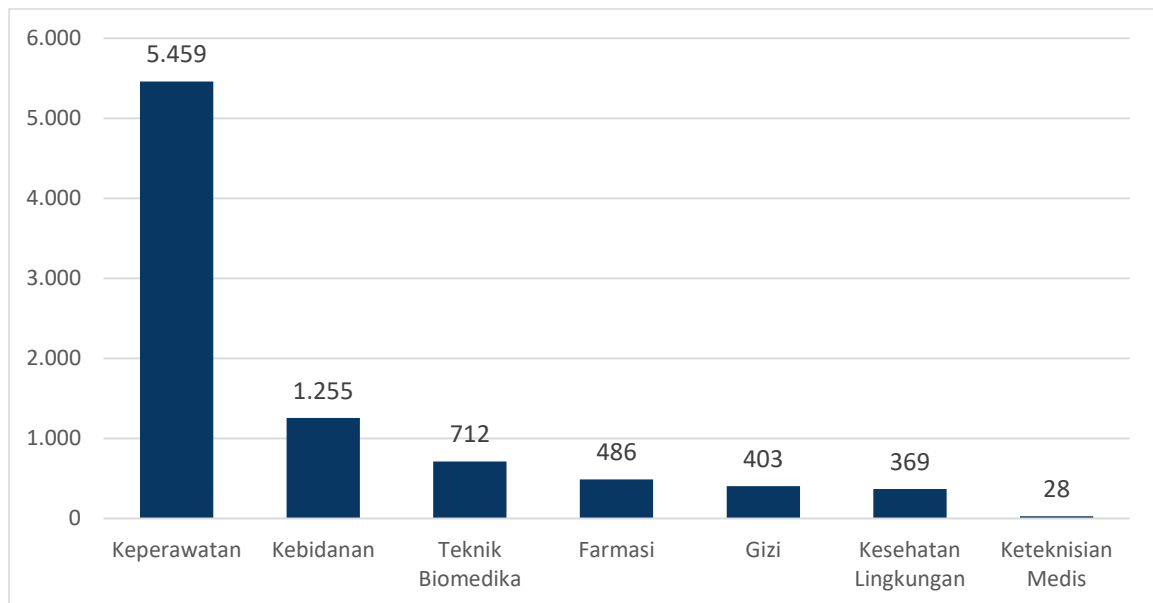
GAMBAR 3.23
JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV POLITEKNIK KESEHATAN
MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2019



Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2020.

Poltekkes telah menghasilkan lulusan program studi Diploma III RPL sebanyak 8.709 orang pada tahun 2019. Lulusan terbanyak adalah dari program studi Keperawatan, yaitu 5.459 orang, sedangkan program studi keteknisian medis (perekam dan informasi Kesehatan) sejumlah 28 orang. Rincian lebih lengkap mengenai jumlah lulusan program Diploma III RPL Poltekkes dapat dilihat pada Lampiran 16.f.

GAMBAR 3.24
JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III RPL
MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2019



Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2020.

Selain jenjang Diploma, pada tahun 2019 Poltekkes juga menghasilkan lulusan program studi PJJ di Poltekkes Kupang sebanyak 397 orang dan Poltekkes Kalimantan Timur sebanyak 88 orang. Program studi Magister Terapan di Poltekkes Semarang dengan program studi Magister Terapan Teknik Biomedika (*Imaging Diagnostic*) memiliki lulusan sebanyak 17 orang. Sedangkan, program studi Profesi memiliki lulusan sebanyak 165 orang di Poltekkes Semarang, 92 orang di Poltekkes Surakarta, dan 56 orang di Poltekkes Palu.

2. Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi

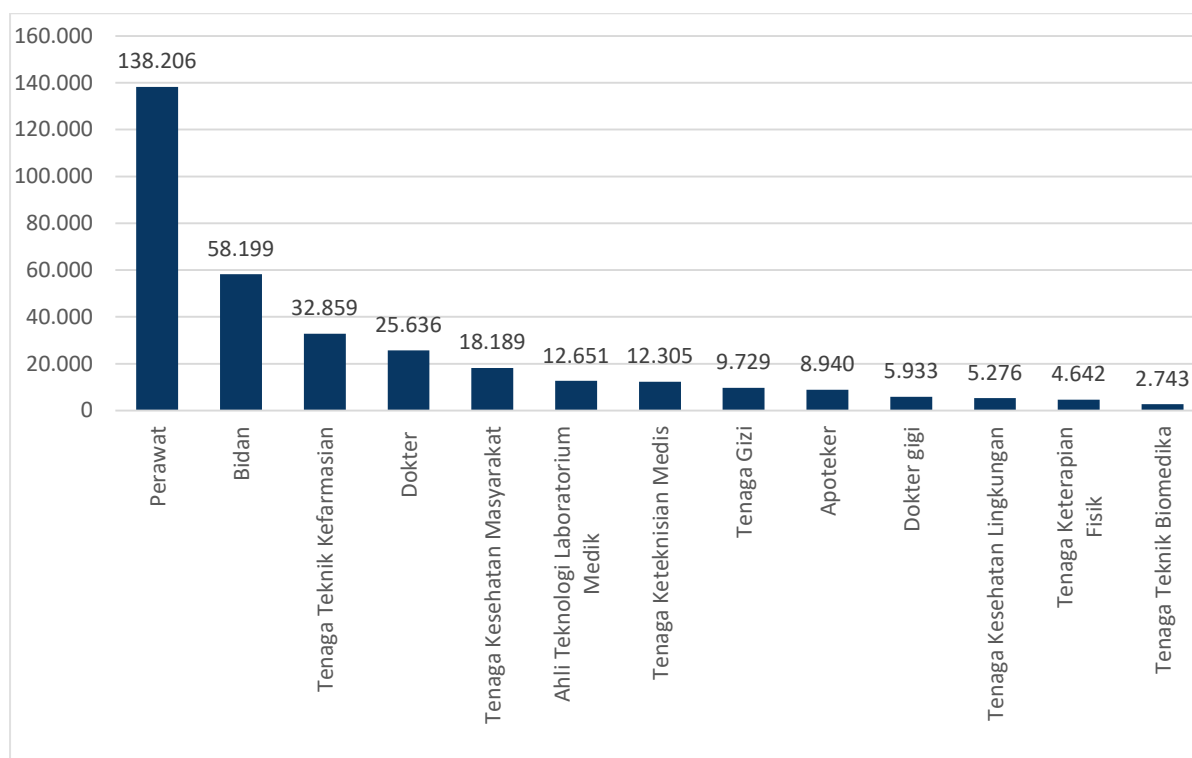
Lulusan tenaga Kesehatan selain berasal dari Poltekkes Kementerian Kesehatan, juga banyak dihasilkan oleh perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan fungsinya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019. Pendidikan tinggi akan selalu menjadi modal penting lahirnya generasi penerus yang memiliki keunggulan di dalam berbagai bidang. Karenanya, Ditjen Dikti akan terus memberikan pelayanan terbaik dalam ruang lingkup pendidikan tinggi, sehingga cita-cita untuk menjadikan Sumber Daya Manusia yang unggul dapat tercapai dengan baik.

Sampai dengan 31 Desember 2019, terdapat sebanyak 4.670 lembaga perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan 27.779 program studi, 1.732.308 mahasiswa baru, 8.043.480 mahasiswa terdaftar, 1.247.116 lulusan dan 294.820 dosen. Perguruan tinggi terdiri dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Agama (PTA), dan Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTK/L). Jenjang pendidikan yang ada di perguruan tinggi terdiri dari D1, D2, D3, D4, S1, Profesi, S2, S2 Terapan, Spesialis 1, Spesialis 2, dan S3. Perguruan tinggi,

khususnya di bidang kesehatan diharapkan dapat mencetak lulusan sumber daya manusia Kesehatan yang mampu dan siap bekerja sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan kompeten.

Berdasarkan perguruan tinggi pada kelompok bidang kesehatan, jumlah lulusan tenaga kesehatan pada tahun 2019 sebanyak 335.308 orang. Menurut jenis tenaga kesehatan, jumlah lulusan perguruan tinggi terbanyak adalah perawat, yaitu sejumlah 138.206 orang, diikuti oleh bidan (58.199 orang), tenaga teknik kefarmasian (32.859 orang) dan dokter (25.636 orang). Sementara itu, lulusan perguruan tinggi untuk tenaga teknik biomedika paling sedikit, yaitu sejumlah 2.743 orang.

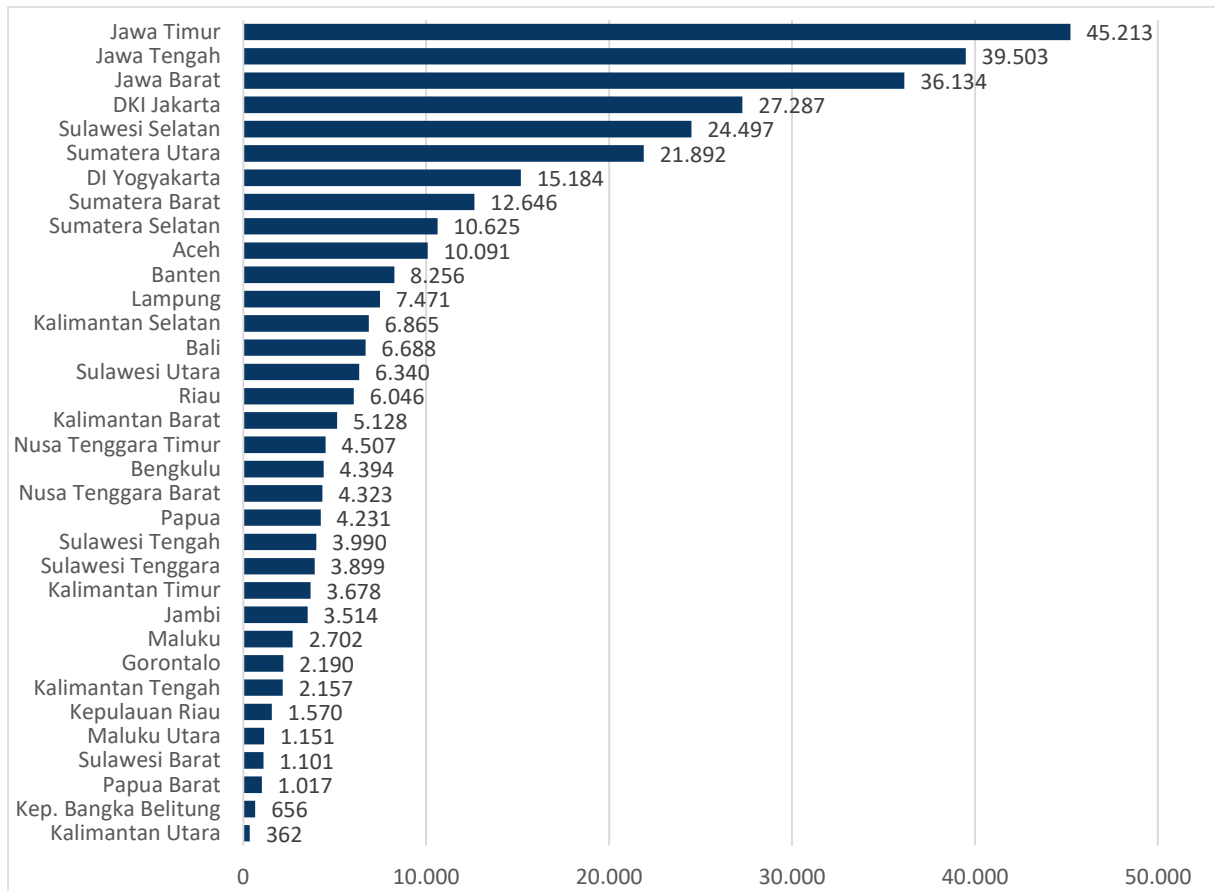
GAMBAR 3.25
JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI
MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2019



Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.

Berdasarkan provinsi, dapat dilihat bahwa lulusan perguruan tinggi bidang kesehatan terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur sejumlah 45.213 orang, diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah sejumlah 39.503 orang, dan Jawa Barat sejumlah 36.134 orang. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Kep. Bangka Belitung jumlah lulusan perguruan tinggi bidang Kesehatan tidak mencapai 1.000 orang, yaitu Kalimantan Utara sebanyak 362 orang, dan Kep. Bangka Belitung sebanyak 656 orang. Rincian lebih lengkap mengenai jumlah lulusan perguruan tinggi menurut jenis tenaga kesehatan dan provinsi tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 16.h.

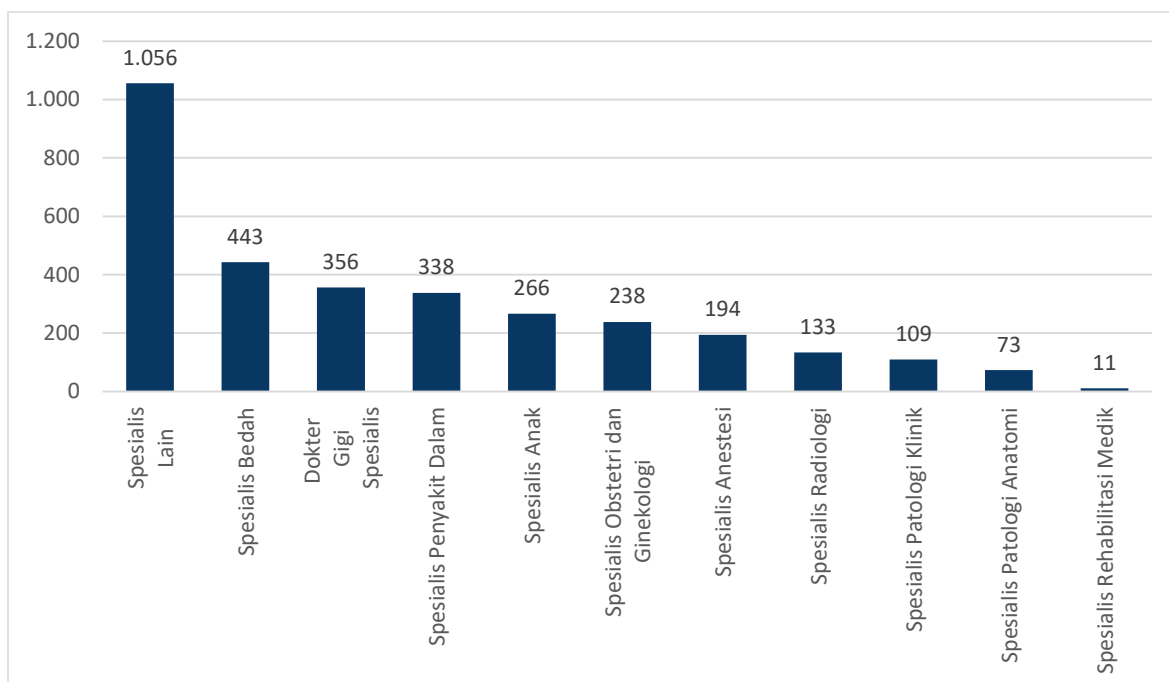
GAMBAR 3.26
JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.

Jumlah lulusan perguruan tinggi untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis tahun 2019 sebanyak 3.217 orang yang tersebar di 12 provinsi di Indonesia. Lulusan dokter spesialis terbanyak adalah dokter spesialis bedah sejumlah 443 orang, diikuti oleh dokter spesialis penyakit dalam sejumlah 338 orang. Sementara itu, dokter spesialis lain, diluar yang disebutkan bidang spesialisasi secara spesifik berjumlah 1.056 orang, dan dokter gigi spesialis berjumlah 356 orang. Dokter spesialis lulusan tahun 2019 yang paling sedikit adalah dokter spesialis rehabilitasi medik sejumlah 11 orang.

GAMBAR 3.27
JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI
DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS TAHUN 2019



Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.

Rincian lebih lengkap mengenai jumlah lulusan perguruan tinggi dokter spesialis dan dokter spesialis gigi menurut provinsi tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 16.i.



+ Bab IV
**PEMBIAYAAN
KESEHATAN**

+

IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

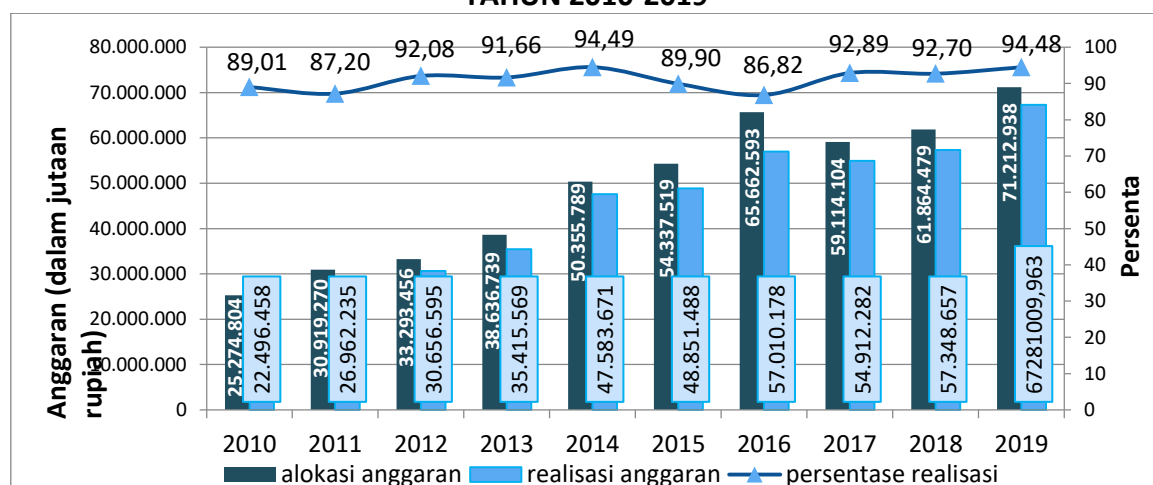
Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan. Pembiayaan kesehatan merupakan besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Secara umum, sumber biaya kesehatan dapat dibedakan menjadi pembiayaan yang bersumber dari anggaran pemerintah dan pembiayaan yang bersumber dari anggaran masyarakat. Di dalam bab ini akan dibahas mengenai alokasi dan realisasi anggaran kesehatan baik di pusat maupun di daerah, anggaran kesehatan adalah anggaran kesehatan yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pemerintah. Selain itu, juga dijelaskan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta Dana Desa.

A. ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Alokasi anggaran kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 yaitu sebesar 71,12 triliun rupiah dengan realisasi sebesar 67,28 trilyun rupiah. Alokasi anggaran tahun 2019 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu alokasi sebesar 61,86 triliun rupiah dengan realisasi sebesar 57,35 triliun rupiah. Dilihat dari persentase realisasi tahun sebelumnya, tahun 2019 mengalami kenaikan, dimana persentase realisasi anggaran Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 sebesar 94,60%, naik dari tahun 2018 sebesar 92,70%.

GAMBAR 4.1
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2010-2019

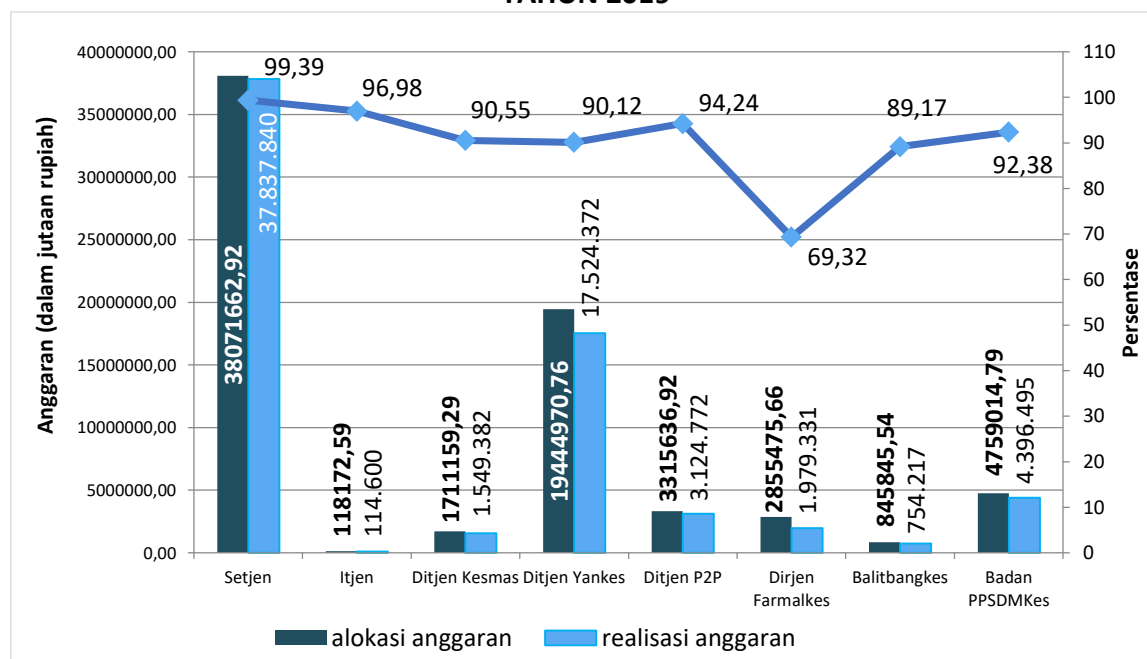


Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2020

Gambar 4.1 menunjukkan peningkatan alokasi anggaran Kementerian Kesehatan dari tahun 2010-2019, alokasi tertinggi pada tahun 2019.

Distribusi anggaran berdasarkan alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut unit Eselon I (Gambar 4.2) menunjukkan bahwa alokasi terbesar terdapat pada Sekretariat Jenderal (Setjen) sebesar 38,07 triliun rupiah, sedangkan alokasi terendah pada Inspektorat Jenderal sebesar 118,17 miliar rupiah. Unit Eselon I dengan persentase realisasi anggaran tertinggi adalah Sekretariat Jenderal sebesar 99,39%, sedangkan realisasi terendah adalah Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Ditjen Farmalkes) dengan persentase realisasi sebesar 69,32%. Data dan informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut eselon I pada tahun 2019 terdapat pada Lampiran 19.b.

GAMBAR 4.2
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENURUT UNIT ESELON I
TAHUN 2019

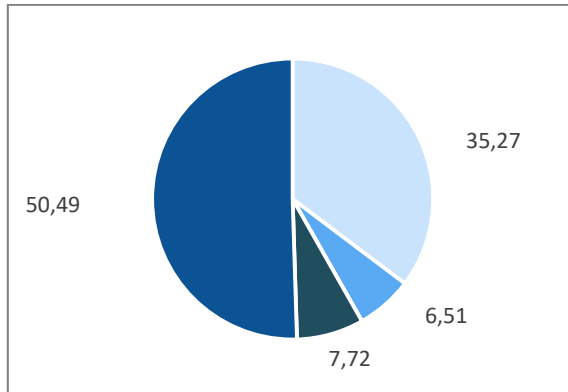


Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2020

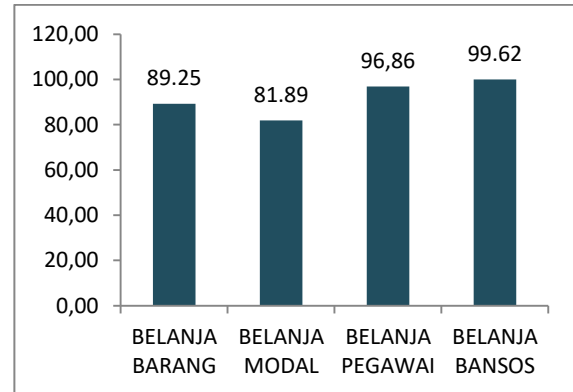
Dari keseluruhan alokasi anggaran Kementerian Kesehatan sebesar 71,12 triliun rupiah, sebanyak 35,91 triliun rupiah atau sebesar 50,49% merupakan dana untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimasukkan dalam alokasi anggaran Sekretariat Jenderal. Dana tersebut diwujudkan melalui anggaran belanja bantuan sosial (bansos) Kementerian Kesehatan. Pada anggaran Kementerian Kesehatan lainnya dialokasikan untuk belanja barang, 35,27%, belanja pegawai sebesar 7,72%, dan belanja modal sebesar 6,51%. Untuk persentase realisasi anggaran Kementerian Kesehatan berdasarkan jenis belanja yang paling tinggi adalah belanja bansos sebesar 99,62% dan yang paling rendah adalah belanja modal sebesar 81,89% (Gambar 4.3 dan 4.4). Rincian alokasi dan realisasi anggaran

Kementerian Kesehatan RI menurut jenis belanja tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada Lampiran 19.C.

GAMBAR 4.3
PERSENTASE ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BERDASARKAN JENIS BELANJA
TAHUN 2019



GAMBAR 4.4
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN
KESEHATAN RIBERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN
2019



Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2020

B. DANA DEKONSENTRASI DAN DANA ALOKASI KHUSUS

BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018

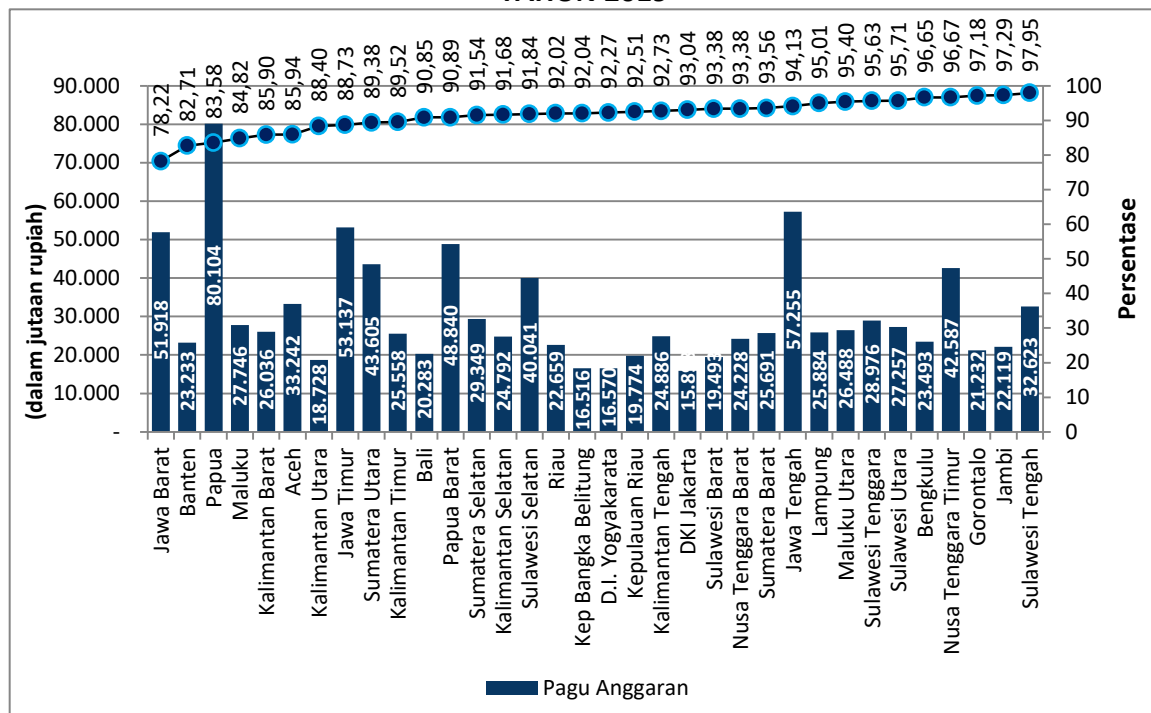
Sesuai ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan PMK Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 248/PMK.07/2010 untuk mendukung pencapaian pembangunan yang menjadi fokus/prioritas nasional, serta meningkatkan peran provinsi dalam kerangka *good governance* dalam mengawal pelaksanaan program kementerian/lembaga (K/L) di daerah dan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan pelimpahan wewenang tersebut, pemerintah melalui K/L mengatur pemberian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan.

Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Prinsip pendanaan dekonsentrasi adalah untuk mendanai pelaksanaan tugas dan kewenangan gubernur selaku wakil pemerintah di daerah. Sifat kegiatan yang didanai ialah kegiatan non-fisik seperti sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian. Proses penganggaran dana dekonsentrasi ini melalui beberapa tahap/mekanisme, di antaranya adalah: penetapan pagu alokasi dana dekonsentrasi pada masing-masing pemerintah daerah (dalam hal ini dinas kesehatan provinsi) oleh satuan kerja (satker) pengampu program di tingkat pusat; pengajuan usulan kegiatan oleh dinas kesehatan provinsi dengan mengacu pada menu dekonsentrasi yang telah ditetapkan sebelumnya; dan pemeriksaan terhadap usulan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa unit pusat terkait. Dana

dekonsentrasi Kementerian Kesehatan hanya bisa dialokasikan kepada dinas kesehatan provinsi, yang selanjutnya dikelola untuk membiayai kegiatan non fisik yang dimungkinkan melibatkan dinas kesehatan kabupaten/kota. Data dan informasi lebih rinci alokasi dan realisasi anggaran dekonsentrasi Kementerian Kesehatan RI menurut provinsi tahun anggaran pada tahun 2019 disajikan pada Lampiran 19.e.

Pagu dan realisasi dana dekonsentrasi kesehatan menurut provinsi tahun 2019 disajikan pada Gambar 4.5. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi dana dekonsentrasi paling tinggi Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 97,95%, sedangkan realisasi terendah adalah Provinsi Jawa Barat sebesar 78,22%. Masih perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terutama mengenai penyebab rendahnya penyerapan anggaran dekonsentrasi pada beberapa provinsi, termasuk di dalamnya analisis mengenai kecukupan alokasi anggaran dekonsentrasi pada setiap program di tiap provinsi itu sendiri.

GAMBAR 4.5
REALISASI DANA DEKONSENTRASI KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2019



Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2020

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dibagi kedalam DAK Fisik dan DAK Nonfisik. DAK fisik untuk membiayai kegiatan bersifat fisik, sedangkan DAK nonfisik khusus untuk membiayai kegiatan yang bersifat operasional.

DAK bidang kesehatan tahun 2019 diatur dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan TA 2019 dan Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan TA 2019. Dana ini diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai

kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2019

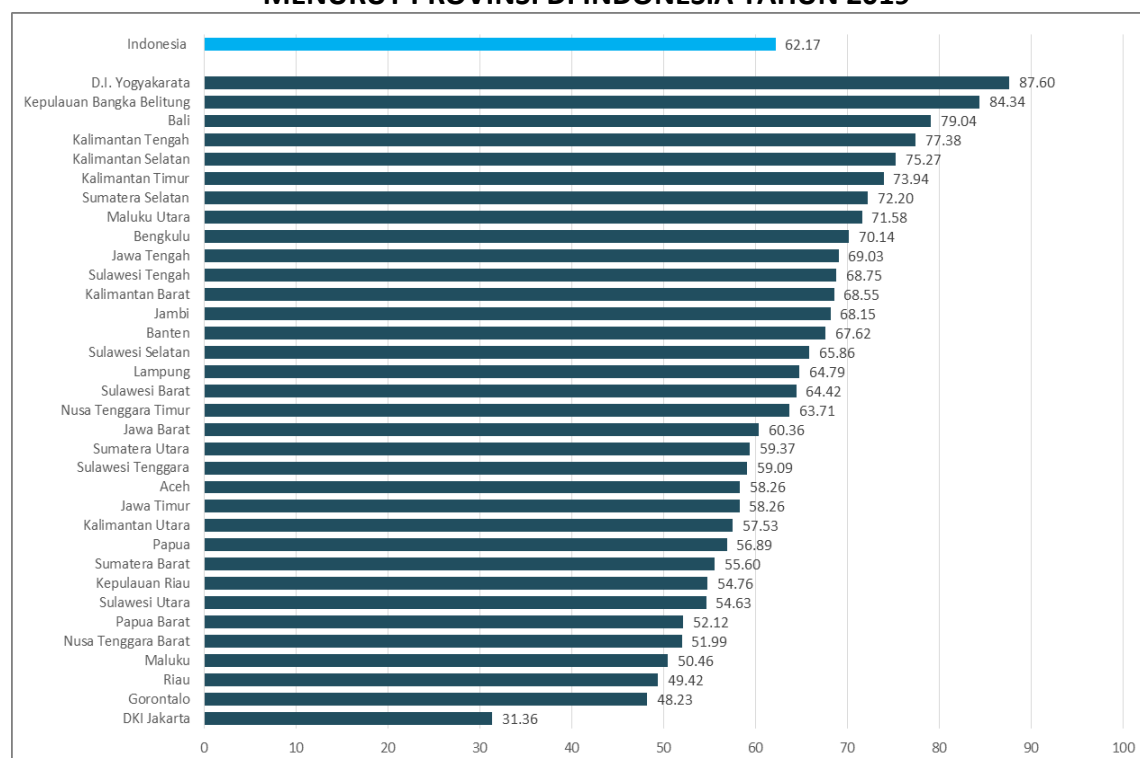
DAK Bidang Kesehatan Tahun 2019 terdiri atas:

- a. DAK Fisik bidang kesehatan meliputi:
 - DAK Fisik Regular Bidang Kesehatan
 - DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan
 - DAK Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan
- b. DAK Non Fisik bidang kesehatan meliputi :
 - Bantuan Operasional Kesehatan
 - Jampersal
 - Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan

Pelaporan DAK bidang kesehatan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri secara berkala (triwulan) serta laporan tahunan. Sedangkan untuk data realisasi penggunaan anggaran dilaporkan melalui mekanisme yang berbeda yaitu DAK Fisik menggunakan aplikasi OMSPAN dan DAK Non Fisik menggunakan aplikasi e-renggar.

Pada tahun 2019, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2019 secara nasional sebesar 62,17% dengan realisasi tertinggi adalah Provinsi DI. Yogyakarta (87.60%) dan terendah adalah Provinsi DKI Jakarta (31,36%), seperti tampak pada Gambar 4.6 berikut.

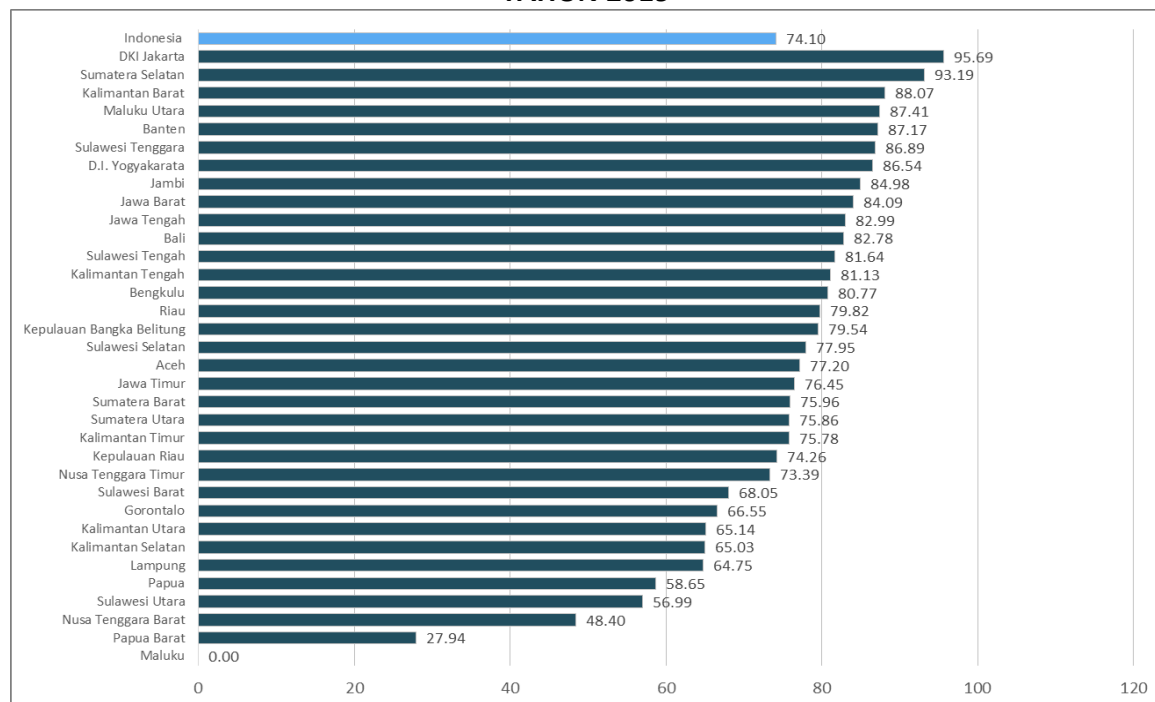
GAMBAR 4.6
REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG KESEHATAN DAN KB
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019



Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran . Kemenkes RI, 2020 (Data Kemenkeu per 2 Januari 2020)

Untuk realisasi DAK Non Fisik Tahun 2019 secara nasional adalah 74,10% dengan realisasi tertinggi adalah Provinsi Sumatera Selatan (93,19%) dan terendah adalah Provinsi Maluku (0,00%) seperti tampak pada Gambar 4.7.

GAMBAR 4.7
REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BIDANG KESEHATAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2019



Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2020 (Data e Renggar per 7 Februari 2020)

Penyebab utama rendahnya penyerapan DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2019 adalah:

1. Regulasi

- Keterlambatan penetapan Peraturan Daerah Tentang APBD sehingga berpengaruh pada proses pelaksanaan kegiatan DAK.
- Kurangnya pemahaman daerah terkait Permenkes tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik dan Petunjuk Teknis DAK Non Fisik bidang kesehatan Tahun 2019.
- Adanya peraturan yang membatasi penggunaan uang transportasi dalam biaya operasional DAK Nonfisik oleh petugas di daerah

2. SDM

- Keterlambatan penetapan tim pengelola keuangan seperti PPK dan KPA di daerah.
- Tim pengadaan yang kurang berkompeten sehingga berpengaruh pada proses pengadaan yang terlambat atau gagal kontrak.
- Keterlambatan penetapan Tim Pokja dan Tim ULP daerah.
- Ketersediaan SDM daerah yang terbatas untuk melaksanakan kegiatan di lapangan
- Mutasi pejabat atau rotasi pegawai pada OPD yang sering terjadi di daerah

3. Proses Pengadaan

- Adanya gagal kontrak yang sering terjadi di daerah sehingga proses realisasi terhambat

- Penyedia (Pihak Ketiga) khususnya obat-obatan terlambat menyediakan produknya karena adanya kebijakan penyedia untuk memenuhi kebutuhan produk pada pihak lain yang terlebih dulu membayar.
- Kesulitan mendapatkan penyedia atau distributor di beberapa daerah
- Kenaikan harga barang yang berbeda dari harga pada proses perencanaan.
-

4. Pelaksanaan

- Mayoritas masyarakat sudah menjadi peserta JKN sehingga pelayanan bersumber Jampersal rendah.
- Terdapat permasalahan manajemen kas keuangan daerah di beberapa daerah yang mengakibatkan adanya keterlambatan penyaluran keuangan ke OPD
- Adanya sumber anggaran lain seperti NGO yang perlu dilaksanakan sehingga pelaksanaan kegiatan DAK terhambat.

C. BELANJA KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN

Kementerian Kesehatan memiliki komitmen untuk secara rutin mempublikasikan belanja kesehatan Indonesia yang digambarkan dalam National Health Accounts (NHA), saat ini sampai pada tahun 2017. Ada banyak tantangan yang dihadapi dalam proses produksi NHA terutama mengenai ketersediaan data yang masih terfragmentasi. Indonesia telah memproduksi NHA menggunakan metode *System of Health Accounts* (SHA) 2011 yang merupakan metode standar internasional, sehingga dapat melihat posisi Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara. Data NHA juga telah didistribusikan global dalam World Health Report yang setiap tahunnya dipublikasi oleh WHO.

Berbagai institusi telah memanfaatkan hasil estimasi NHA sebagai dasar informasi berbasis bukti dalam penyusunan atau penyempurnaan perencanaan dan kebijakan, antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, DPR, dan akademisi. Sebagai negara dengan kebijakan single payer (hanya ada satu pengumpul premi dan sekaligus berfungsi sebagai badan penyelenggara) terbesar di dunia, banyak negara menaruh perhatian pada pembiayaan kesehatan di Indonesia untuk penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka menuju Cakupan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*).

Dari hasil NHA seri sebelumnya, diketahui bahwa perlindungan risiko finansial penduduk Indonesia masih relatif rendah. Peningkatan kesadaran secara eksplisit menjadi penting untuk memberikan nilai tambah bagi para pengambil kebijakan dalam menentukan arah kebijakan yang tujuan akhirnya adalah tersedianya dana kesehatan dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, merata, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna, serta tersalurkan sesuai peruntukannya.

1. Total Belanja Kesehatan Indonesia/*Total Health Expenditure* (THE)

Total belanja kesehatan Indonesia adalah penggabungan antara *Current Health Expenditure* (CHE) dan *Gross Capital Formation* (Belanja Modal) dimana di dalamnya termasuk biaya pendidikan dan biaya penelitian dan pengembangan kesehatan. Akan tetapi, belanja modal yang dapat dihitung hanya data dari sektor publik (meliputi Kementerian Kesehatan, K/L

lainnya, dan sub nasional). Indikator umum yang digunakan pada skala internasional saat ini adalah CHE karena menggambarkan konsumsi akhir yang dapat dinikmati dalam setahun. Namun, dalam publikasi ini akan menggunakan THE untuk mengakomodasi belanja kesehatan pemerintah yang juga dibelanjakan untuk investasi di bidang kesehatan.

THE Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana belanja kesehatan menjadi Rp 436,5 triliun di tahun 2017 (kenaikan 106% dibanding 2010), dengan belanja kesehatan senilai Rp1,6 juta/kapita/tahun (Tabel 4.1). Selama 5 tahun ini, proporsi belanja kesehatan terhadap PDB hanya mengalami fluktuasi kenaikan sebesar 0,1% yaitu dari 3,1% di tahun 2010 menjadi 3,2% di tahun 2017.

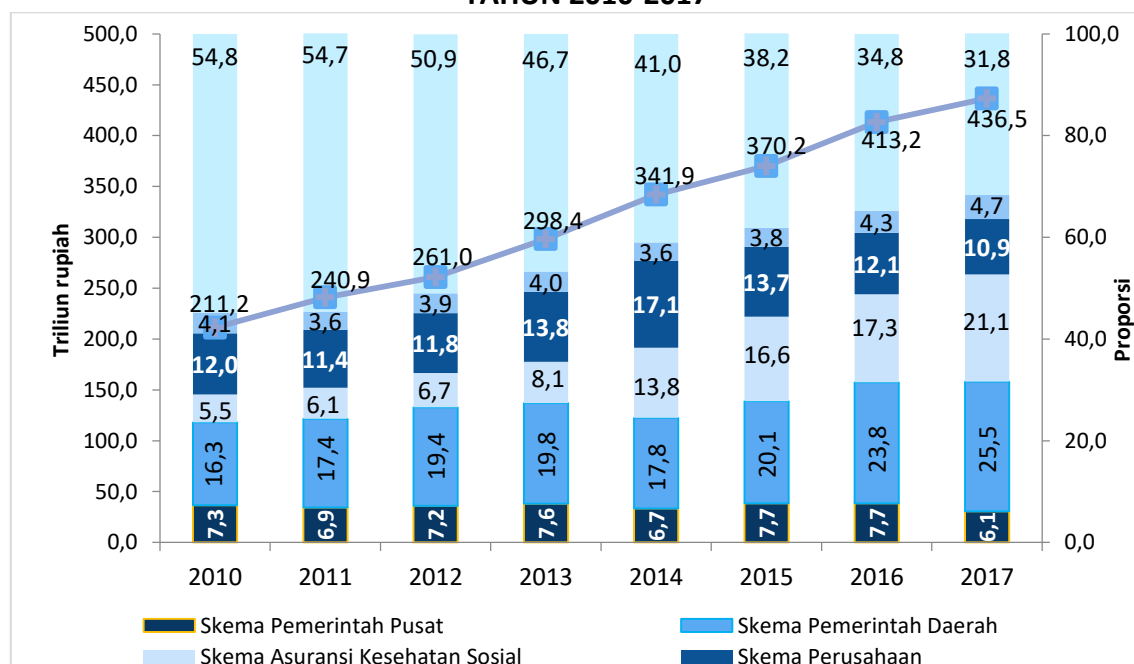
TABEL 4.1
TOTAL BELANJA KESEHATAN INDONESIA
TAHUN 2010 – 2017

Tahun	Total Belanja Kesehatan (Triliun Rp)	Belanja Kesehatan per Kapita (Rp)	Belanja Kesehatan per Kapita (US \$)	% THE terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
2010	211,2	885.571	97	3,1
2011	240,9	995.403	113	3,1
2012	261,0	1.063.490	113	3,0
2013	298,4	1.199.106	115	3,1
2014	341,9	1.355.852	114	3,2
2015	370,2	1.449.066	108	3,2
2016	413,2	1.597.106	120	3,3
2017	436,5	1.666.770	125	3,2

Sumber: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan , Kemenkes RI, 2020

Klasifikasi menurut skema pembiayaan kesehatan memberikan informasi secara komprehensif mengenai pengaturan dan pengelolaan pembiayaan sehingga masyarakat mendapat pelayanan kesehatan (SHA 2011). Skema pembiayaan kesehatan menggambarkan mekanisme pembiayaan yang menunjukkan aliran pendanaan dari sumber pembiayaan sampai pada agen pembiayaan. Sebagai contoh, dana BOK yang dialokasikan dari APBN (anggaran Kemenkes) diklasifikasikan dalam skema pemerintah pusat walaupun dana BOK tersebut dikelola oleh pemerintah kab/kota.

GAMBAR 4.8
GAMBARAN SKEMA PROPORSI DAN TOTAL PEMBIAYAAN BELANJA KESEHATAN
TAHUN 2010-2017



Sumber: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan , Kemenkes RI, 2020

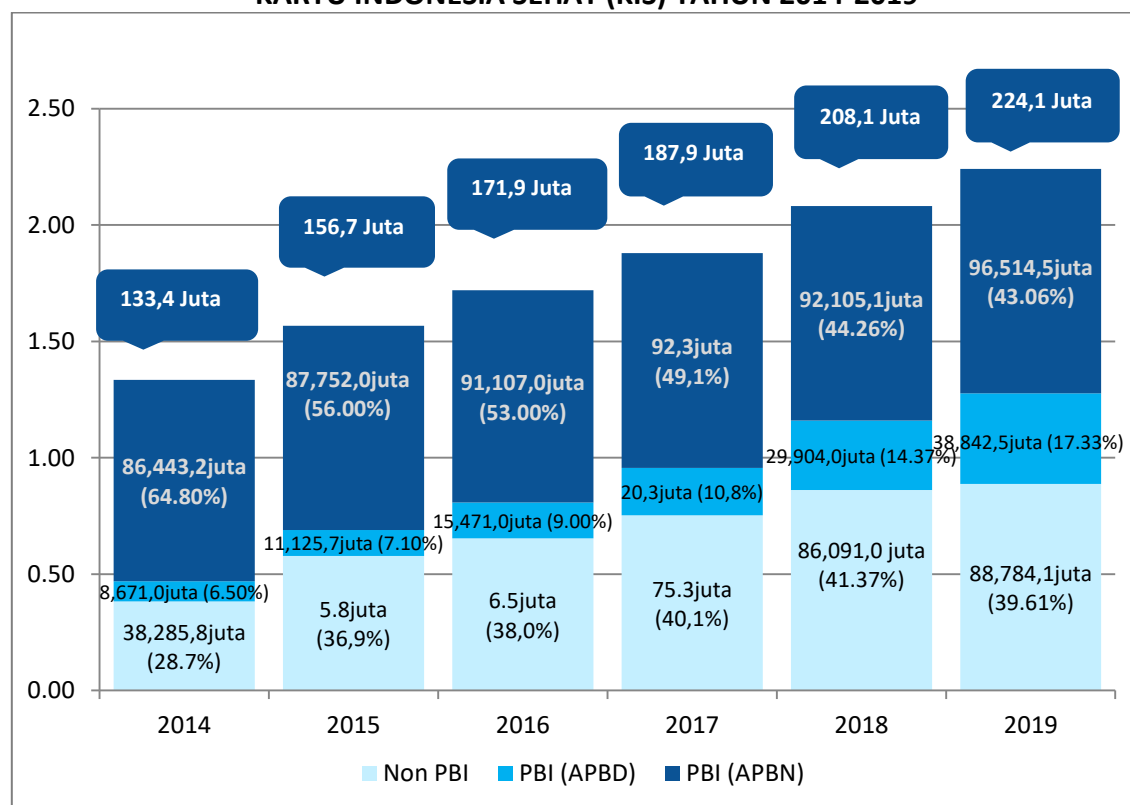
Gambar di atas menunjukkan proporsi belanja kesehatan yang mengalir melalui berbagai skema pembiayaan kesehatan, seperti skema pemerintah pusat, skema pemerintah daerah, skema asuransi kesehatan sosial, skema perusahaan, skema swasta lainnya dan skema pembiayaan dari kantong rumah tangga. Porsi belanja skema asuransi kesehatan sosial terhadap total belanja kesehatan menunjukkan peran dan komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat di negara tersebut. Selain itu menunjukkan bahwa peningkatan porsi belanja pada skema asuransi kesehatan sosial seiring dengan penurunan pada porsi skema pembiayaan dari kantong rumah tangga. Tren belanja kesehatan pada skema pembiayaan dari kantong rumah tangga yang cenderung menurun secara proporsi sejak tahun 2010 hingga tahun 2017 harus dimonitor terus menerus. Meskipun secara proporsi skema pembiayaan dari kantong rumah tangga menurun (dari 54,8% pada tahun 2010 menjadi 31,8% pada tahun 2017), namun secara nominal mengalami kenaikan dari tahun 2010 – 2017 (dari 211,2 triliun pada tahun 2010 menjadi 436,5 triliun pada tahun 2017). Hal ini merupakan dampak langsung dari pertumbuhan pasar di sektor kesehatan.

2. Jaminan Kesehatan

Pada tahun 2019, pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia telah memasuki tahun keenam. Harus diakui bahwa reformasi pembiayaan kesehatan dan pelayanan kesehatan ini telah banyak memberi manfaat kepada berbagai komponen yang terlibat di dalamnya, terutama masyarakat sebagai penerima manfaat. Hal ini sesuai dengan tujuan diselenggarakannya Program JKN, yakni mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan finansial, seperti pada kasus penyakit katastropis yang membutuhkan biaya yang sangat tinggi.

Akan tetapi, sebagaimana pengalaman berbagai negara yang telah mencapai Jaminan Semesta (*Universal Health Coverage/ UHC*), pelaksanaan JKN di Indonesia pada masa awal juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain adalah adaptasi peserta dan pemberi pelayanan terhadap sistem baru, keseimbangan sisi suplai pemberi pelayanan kesehatan, adaptasi terhadap strukturisasi pelayanan kesehatan berjenjang, penyesuaian pengelolaan program publik oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-Kesehatan), dan kesinambungan finansial dari program JKN. Beberapa isu yang sering mengemuka antara lain adalah ketidakakuratan sasaran kelompok PBI, peningkatan cakupan kepesertaan kelompok Pekerja Buka Penerima Upah (PBPU) yang mempunyai risiko kesehatan yang besar tetapi dengan kesinambungan pembayaran iuran kepesertaan yang rendah, luasnya cakupan manfaat dibandingkan dengan besaran iuran, pertanyaan tentang besaran tarif INA-CBG untuk RS swasta, dan pentingnya penguatan pelayanan kesehatan primer serta isu mengenai *fraud/kecurangan*.

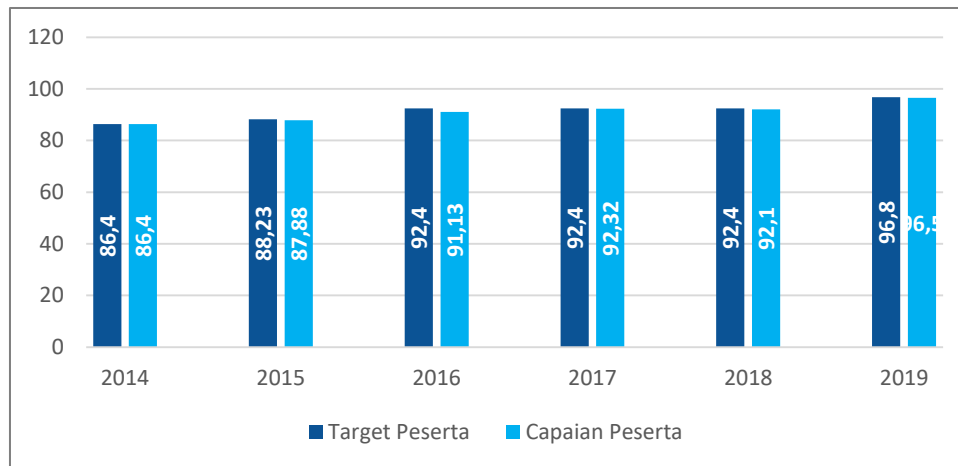
GAMBAR 4.9
PERKEMBANGAN CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) TAHUN 2014-2019



Sumber: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Sejak awal diluncurkan program JKN-KIS pada tahun 2014, cakupan kepesertaan program terus meningkat. Pada Tahun 2019, proporsi kepesertaan terbanyak berasal dari segmen PBI (APBN) sebesar 43,06%. Akan tetapi, pertumbuhan peserta paling signifikan dari tahun ke tahun terjadi pada segmen non-PBI. Sampai dengan akhir tahun 2019, jumlah cakupan kepesertaan JKN/KIS sudah mencapai 224,1 juta jiwa.

GAMBAR 4.10
PERKEMBANGAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2014-2019

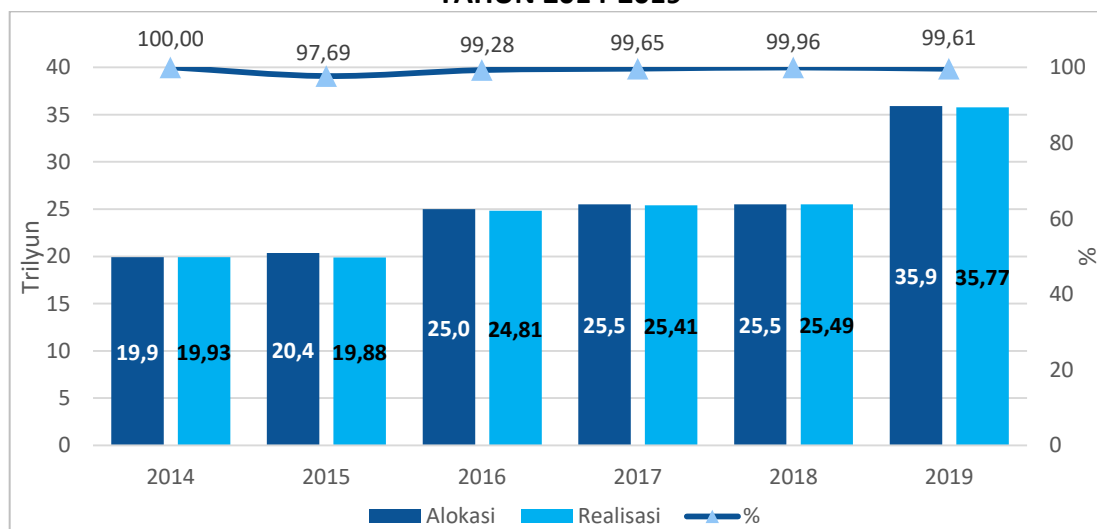


Sumber: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Pada Tahun 2019, Menteri Sosial menetapkan fakir miskin dan orang tidak mampu berdasarkan basis data terpadu sebanyak 96,8 juta jiwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/2019. Penetapan ini termasuk bayi dari PBI Jaminan Kesehatan yang dilahirkan pada tahun 2019.

Sejak pertengahan tahun 2018, Menteri Sosial menetapkan hasil verifikasi dan validasi perubahan data PBI Jaminan Kesehatan setiap bulannya. Hal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

GAMBAR 4.11
ALOKASI DAN REALISASI PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2014-2019

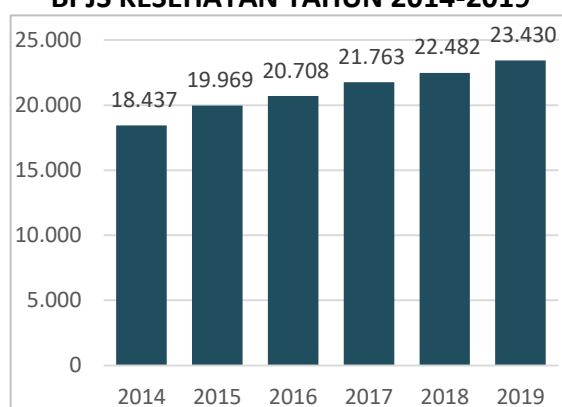


Sumber: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

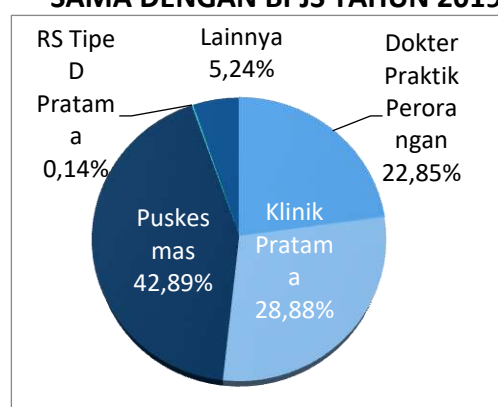
Alokasi anggaran untuk iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) disesuaikan dengan regulasi yang ada. Telah terjadi perubahan besaran iuran peserta PBI dari tahun 2014 sampai dengan 2019 sehingga alokasi anggaran untuk iuran PBI telah mengalami peningkatan. Untuk tahun 2014-2015, besaran iuran sebesar Rp 19.225 sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Pada tahun 2016, besaran iuran mengalami kenaikan menjadi Rp 23.000 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Pada tahun 2018, terbit Peraturan Presiden Nomor 82 tentang Jaminan Kesehatan yang memutuskan iuran PBI masih sebesar Rp 23.000. Kemudian, pada tahun 2019, besaran iuran PBI kembali mengalami kenaikan menjadi Rp 42.000 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan .

Realisasi pembayaran iuran PBI Jaminan Kesehatan pada tahun 2014 sebesar 19,93 trilyun atau 100% dari alokasi yang dianggarkan. Pada tahun 2015, realisasi menjadi 97,69% mengalami penurunan, namun kembali meningkat pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Pada tahun 2019, realisasi pembayaran iuran PBI Jaminan Kesehatan mencapai 99,61% dari alokasi yang dianggarkan.

GAMBAR 4.12
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2014-2019



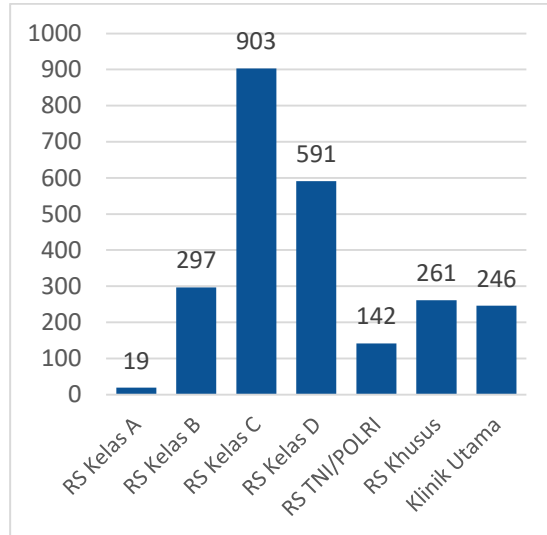
GAMBAR 4.13
PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) BEKERJA SAMA DENGAN BPJS TAHUN 2019



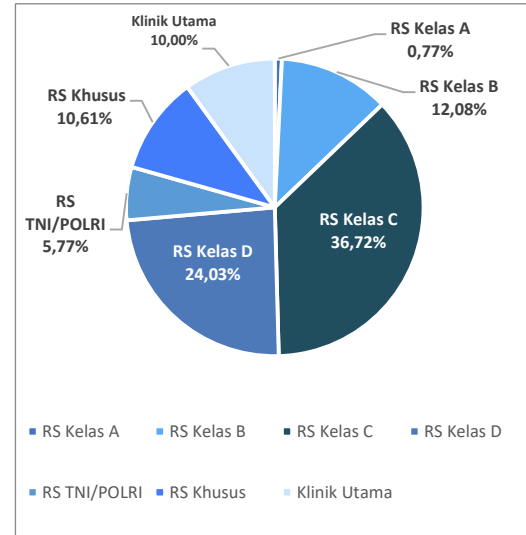
Sumber: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Perkembangan fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerjasama untuk FKTP terjadi peningkatan dari sebanyak 18.437 faskes pada tahun 2014 menjadi 23.430 faskes pada tahun 2019. Jenis FKTP terbanyak adalah Puskesmas sebesar 10.050 atau 42,89%, kemudian Klinik Pratama sebesar 6.766 atau 28,88% dari FKTP yang ada. Pada tahun 2019 Apotek sudah tidak menjadi bagian FKTP lagi, akan tetapi merupakan fasilitas penunjang. Data dan informasi lebih rinci mengenai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pada tahun 2019 yang disajikan pada Lampiran 19.a.

GAMBAR 4.14
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN
TINGKAT LANJUT (FKRTL) BEKERJASAMA
DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2019



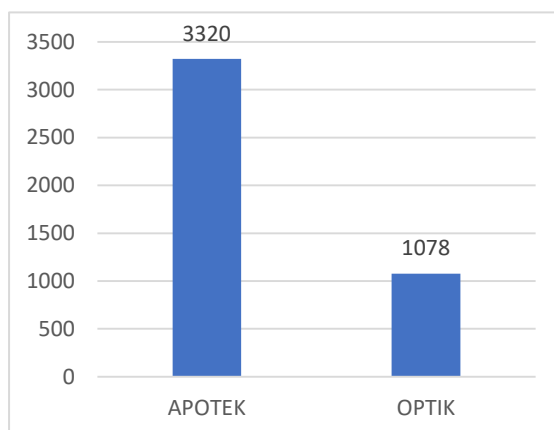
GAMBAR 4.15
PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN
RUJUKAN TINGKAT LANJUT (FKRTL)
BEKERJA SAMA DENGAN BPJS
KESEHATAN TAHUN 2019



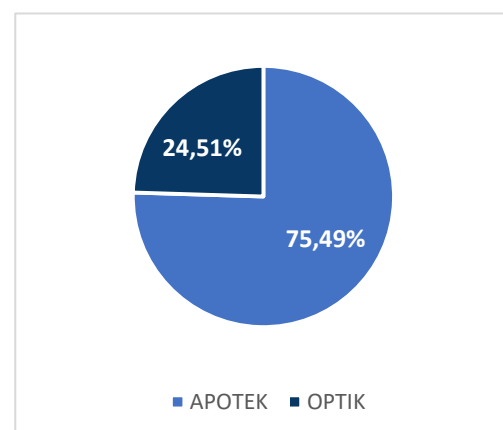
Sumber: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Tahun 2019 terdapat 903 RS Kelas C yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan atau sebesar 36,72% diikuti RS Kelas D sebanyak 591 atau sebesar 24,03%.

GAMBAR 4.16
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN
PENUNJANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS
KESEHATAN TAHUN 2019



GAMBAR 4.17
PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN
PENUNJANG BEKERJASAMA DENGAN
BPJS KESEHATAN TAHUN 2019



Sumber: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Tahun 2019 terdapat 3320 Apotek (75,49%) dan 1078 Optik (24,51%) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

3. Dana Desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh-tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

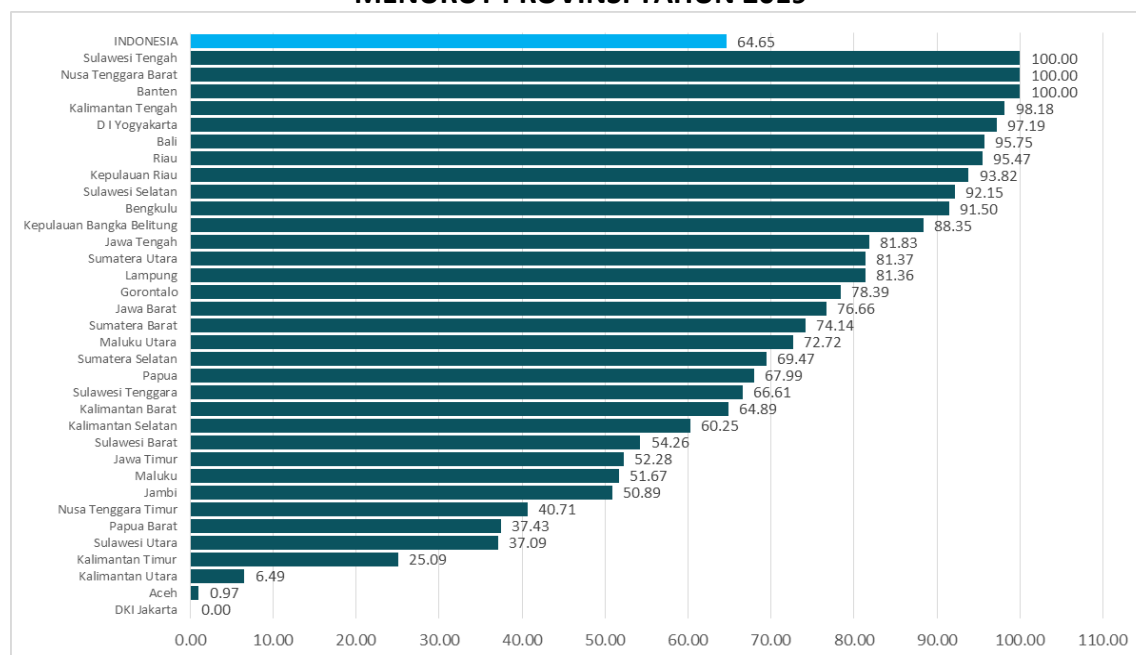
Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain 14.957 unit PAUD, 4.004 unit Polindes, 19.485 unit sumur, 10.964 unit Posyandu dll dalam periode 2015-2016.

Adapun persentase desa yang memanfaatkan Dana Desa terdapat pada gambar dibawah ini

GAMBAR 4.18
PERSENTASE DESA YANG MEMANFAATKAN DANA DESA UNTUK KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



Sumber: Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2020

: Kementerian Dalam Negeri, 2020 (Permendagri 72 Tahun 2019),

Berdasarkan gambar diatas persentase desa yang memanfaatkan dana desa terbesar pada tahun 2019 adalah Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Barat (100.0%). Dan secara lebih rinci bisa dilihat di lampiran 18.



Bab V
**KESEHATAN
KELUARGA**

+



V. KESEHATAN KELUARGA

Pembangunan keluarga dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Selain lingkungan yang sehat, kondisi kesehatan dari tiap anggota keluarga sendiri juga merupakan salah satu syarat dari keluarga yang berkualitas. Keluarga berperan terhadap optimalisasi pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas seluruh anggotanya melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan menjamin kesehatan anggota keluarga. Di dalam komponen keluarga, ibu dan anak merupakan kelompok rentan. Hal ini terkait dengan fase kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu dan fase tumbuh kembang pada anak. Hal ini yang menjadi alasan pentingnya upaya kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia.

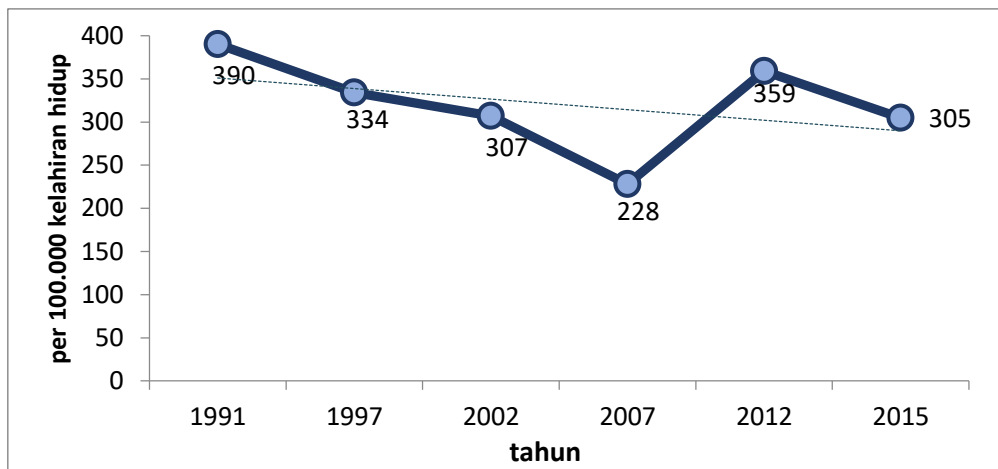
Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, karena ibu dan anak merupakan kelompok rentan terhadap keadaan keluarga dan sekitarnya secara umum. Sehingga penilaian terhadap status kesehatan dan kinerja upaya kesehatan ibu dan anak penting untuk dilakukan.

A. KESEHATAN IBU

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau insidental di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Secara umum terjadi penurunan kematian ibu selama periode 1991-2015 dari 390 menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup. Walaupun terjadi kecenderungan penurunan angka kematian ibu, namun tidak berhasil mencapai target MDGs yang harus dicapai yaitu sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Hasil supas tahun 2015 memperlihatkan angka kematian ibu tiga kali lipat dibandingkan target MDGs. Gambaran AKI di Indonesia dari tahun 1991 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 5.1 berikut ini.

GAMBAR 5.1
ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP
TAHUN 1991 – 2015

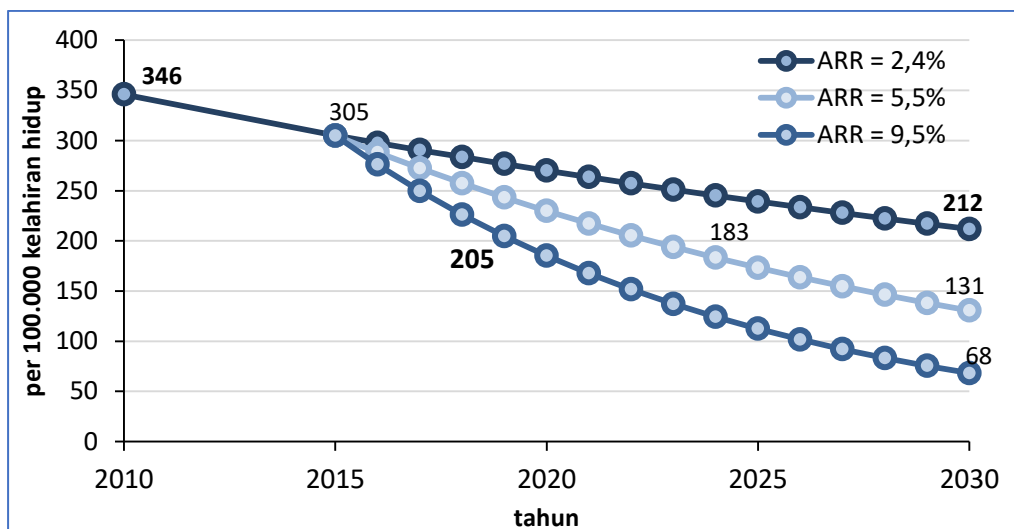


Sumber: BPS, SDKI 1991-2012

*AKI tahun 2015 merupakan hasil SUPAS 2015

Target penurunan AKI ditentukan melalui tiga model *Annual Average Reduction Rate* (ARR) atau angka penurunan rata-rata kematian ibu pertahun seperti Gambar 5.2 berikut ini. Dari ketiga model tersebut, Kementerian Kesehatan menggunakan model kedua dengan rata-rata penurunan 5,5% pertahun sebagai target kinerja. Berdasarkan model tersebut diperkirakan pada tahun 2024 AKI di Indonesia turun menjadi 183/100.000 kelahiran hidup dan di tahun 2030 turun menjadi 131 per 100.000 kelahiran hidup.

GAMBAR 5.2
TARGET PENURUNAN AKI DI INDONESIA



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2019

Jumlah kematian ibu menurut provinsi tahun 2018-2019 dapat dilihat pada Lampiran 21 dimana terdapat penurunan dari 4.226 menjadi 4.221 kematian ibu di Indonesia berdasarkan laporan. Pada tahun 2019 penyebab kematian ibu terbanyak adalah perdarahan (1.280 kasus), hipertensi dalam kehamilan (1.066 kasus), infeksi (207 kasus) rincian per provinsi dapat dilihat di Lampiran 22.

Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan.

Pada bagian berikut, gambaran upaya kesehatan ibu yang disajikan terdiri dari: (1) pelayanan kesehatan ibu hamil, (2) pelayanan imunisasi Tetanus bagi wanita usia subur dan ibu hamil, (3) pemberian tablet tambah darah, (4) pelayanan kesehatan ibu bersalin, (5) pelayanan kesehatan ibu nifas, (6) Puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), (7) pelayanan kontrasepsi/KB dan (8) pemeriksaan HIV dan Hepatitis B.

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Ibu hamil mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang jenis pelayanannya dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan harus memenuhi jenis pelayanan sebagai berikut.

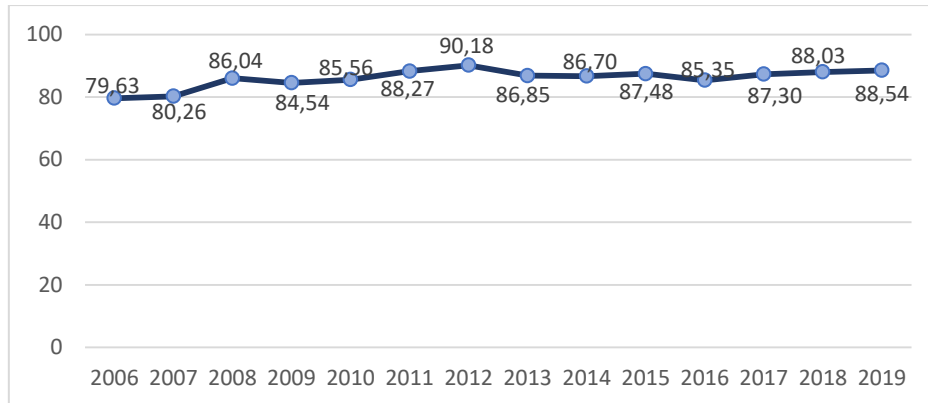
1. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.
2. Pengukuran tekanan darah.
3. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA).
4. Pengukuran tinggi puncak rahim (*fundus uteri*).
5. Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus sesuai status imunisasi.
6. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan.
7. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ).
8. Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk KB pasca persalinan).
9. Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya).
10. Tatalaksana kasus sesuai indikasi.

Pelayanan kesehatan ibu hamil harus memenuhi frekuensi minimal di tiap trimester, yaitu minimal satu kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), minimal satu kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan minimal dua kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai menjelang persalinan). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.

Capaian K4 tahun 2006 sampai dengan tahun 2018 disajikan pada gambar berikut ini.

GAMBAR 5.3
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 DI INDONESIA
TAHUN 2006 – 2019

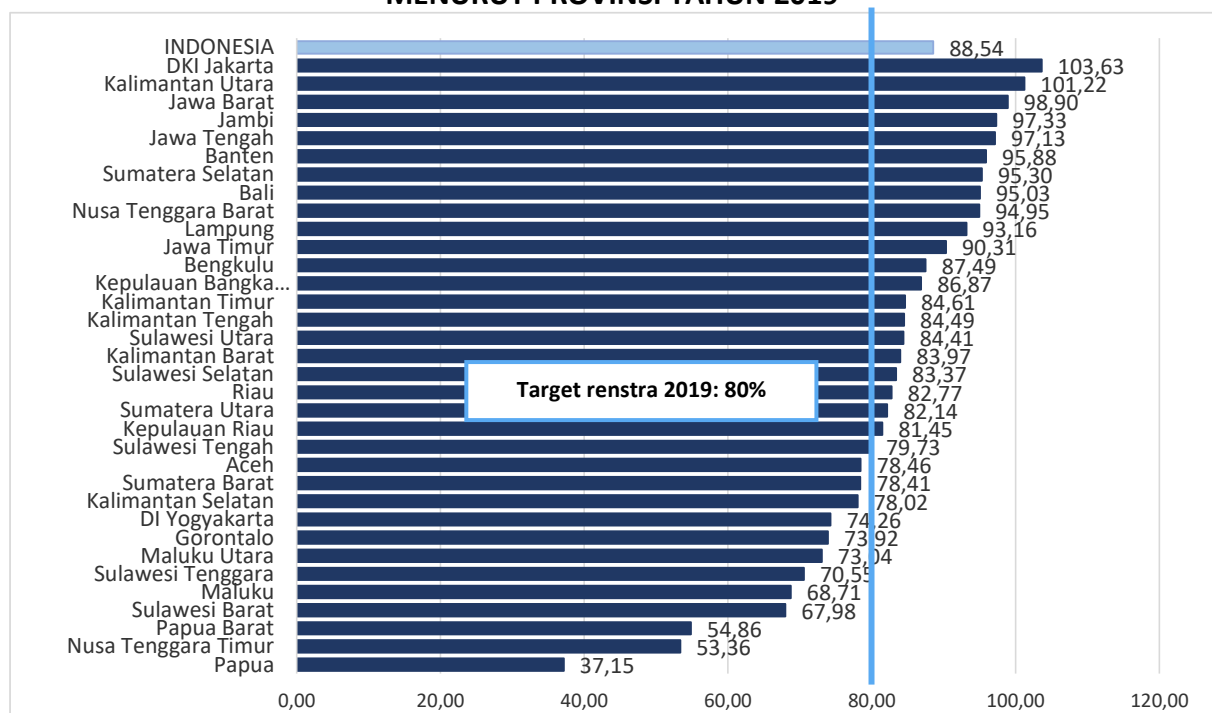


Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Selama tahun 2006 sampai tahun 2019 cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 cenderung meningkat. Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2019 yang sebesar 80%, capaian tahun 2019 telah mencapai target yaitu sebesar 88,54%.

Gambaran capaian kunjungan ibu hamil K4 pada tahun 2019 menurut provinsi disajikan pada gambar berikut ini.

GAMBAR 5.4
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2018

Selain akses ke fasilitas pelayanan kesehatan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil adalah kualitas pelayanan yang harus ditingkatkan, di antaranya pemenuhan semua komponen pelayanan kesehatan ibu hamil harus diberikan saat kunjungan. Dalam hal ketersediaan sarana kesehatan, hingga bulan Desember 2019, terdapat 10.134 puskesmas. Keberadaan puskesmas secara ideal harus didukung dengan aksesibilitas yang baik. Hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan aspek geografis dan kemudahan sarana dan prasarana transportasi.

Dalam mendukung penjangkauan terhadap masyarakat di wilayah kerjanya, Puskesmas juga memiliki jaringan dengan menyediakan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Bidan di Desa. Data dan informasi lebih rinci menurut provinsi mengenai pelayanan kesehatan ibu hamil K1 dan K4 terdapat pada Lampiran 23.a.

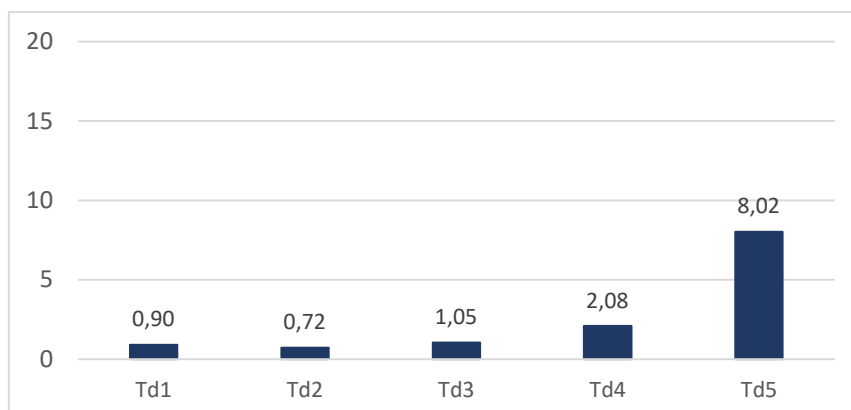
2. Pelayanan Imunisasi Tetanus Toksoid Difteri bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil

Infeksi tetanus merupakan salah satu penyebab kematian ibu dan kematian bayi. Kematian karena infeksi tetanus ini merupakan akibat dari proses persalinan yang tidak aman/steril atau berasal dari luka yang diperoleh ibu hamil sebelum melahirkan. Sebagai upaya mengendalikan infeksi tetanus yang merupakan salah satu faktor risiko kematian ibu dan kematian bayi, maka dilaksanakan program imunisasi Tetanus Toksoid Difteri (Td) bagi Wanita Usia Subur (WUS) dan ibu hamil. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi mengamanatkan bahwa wanita usia subur dan ibu hamil merupakan salah satu kelompok populasi yang menjadi sasaran imunisasi lanjutan. Imunisasi lanjutan merupakan ulangan imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang usia perlindungan.

Wanita usia subur yang menjadi sasaran imunisasi Td berada pada kelompok usia 15-39 tahun yang terdiri dari WUS hamil (ibu hamil) dan tidak hamil. Imunisasi lanjutan pada WUS salah satunya dilaksanakan pada waktu melakukan pelayanan antenatal. Imunisasi Td pada WUS diberikan sebanyak 5 dosis dengan interval tertentu, berdasarkan hasil *screening* mulai saat imunisasi dasar bayi, lanjutan baduta, lanjutan BIAS serta calon pengantin atau pemberian vaksin mengandung “T” pada kegiatan imunisasi lainnya. Pemberian dapat dimulai sebelum dan atau saat hamil yang berguna bagi kekebalan seumur hidup.

Screening status imunisasi Td harus dilakukan sebelum pemberian vaksin. Pemberian imunisasi Td tidak perlu dilakukan bila hasil *screening* menunjukkan wanita usia subur telah mendapatkan imunisasi Td5 yang harus dibuktikan dengan buku KIA, rekam medis, dan atau kohort. Kelompok ibu hamil yang sudah mendapatkan Td2 sampai dengan Td5 dikatakan mendapatkan imunisasi Td2+. Gambar 5.5 memperlihatkan cakupan imunisasi Td5 pada wanita usia subur dan cakupan imunisasi Td2+ pada ibu hamil.

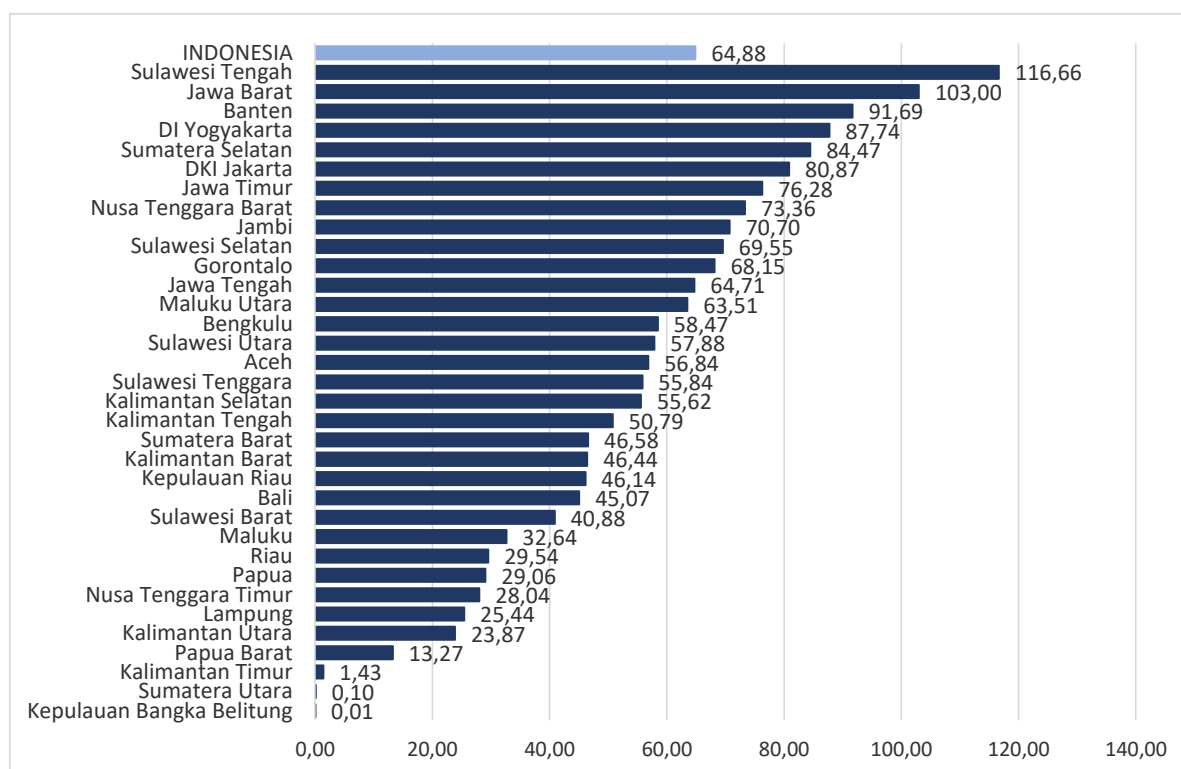
GAMBAR 5.5
CAKUPAN IMUNISASI Td1-Td5 PADA WANITA USIA SUBUR
DI INDONESIA TAHUN 2019



Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2019

Pada gambar di atas diketahui cakupan imunisasi Td pada status Td1 sampai Td5 pada wanita usia subur tahun 2019 masih sangat rendah yaitu kurang dari 10% jumlah seluruh WUS. Cakupan Td5 sebesar 8,02% dengan cakupan tertinggi di Provinsi Jawa Timur sebesar 51,61% dan terendah di Sumatera Utara sebesar 0,002%. Terdapat 4 provinsi yang belum melaporkan yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Utara.

GAMBAR 5.6
CAKUPAN IMUNISASI Td2+ PADA IBU HAMIL DI INDONESIA
TAHUN 2019



Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2019

Cakupan imunisasi Td2+ pada ibu hamil tahun 2019 sebesar 64,88%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 51,76%, juga lebih rendah sekitar 23,66% dibandingkan dengan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 yang sebesar 88,54%, sementara Td2+ merupakan syarat pelayanan kesehatan ibu hamil K4.

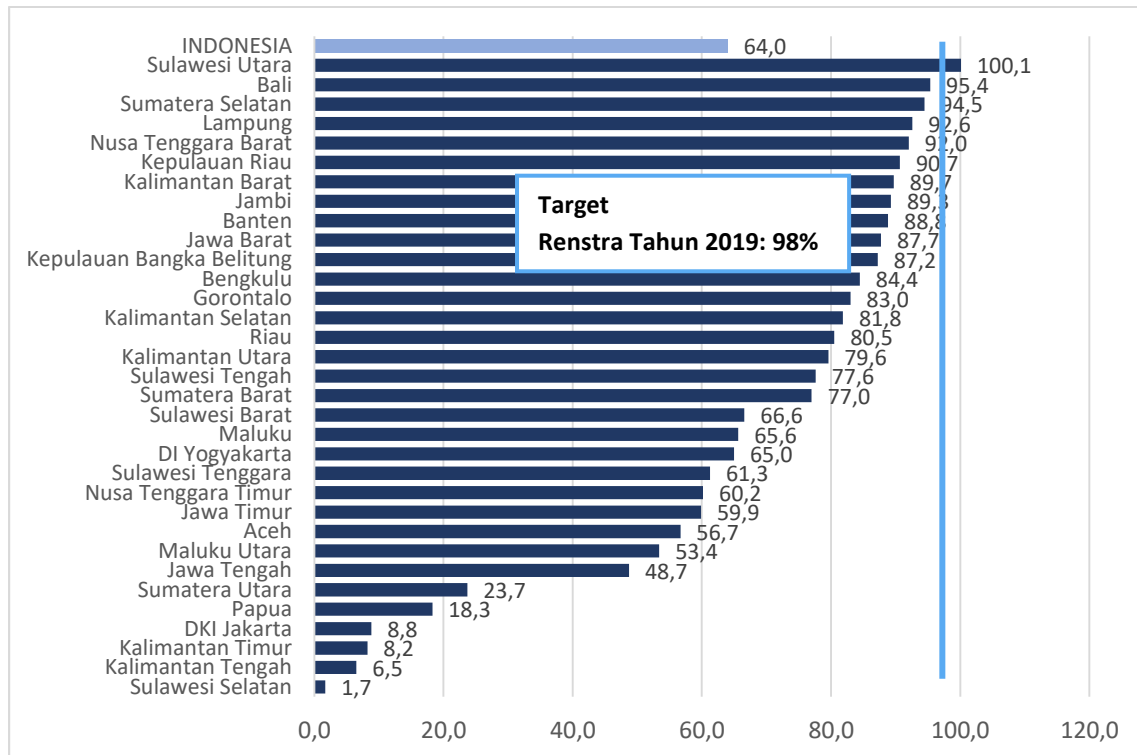
Provinsi Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Banten, dan DI Yogyakarta memiliki capaian imunisasi Td2+ pada ibu hamil tertinggi di Indonesia. Sedangkan provinsi dengan capaian terendah yaitu Kepulauan Bangka Belitung (0,01%), Sumatera Utara (0,10%), Kalimantan Timur (1,43%), dan Papua Barat (13,27%). Informasi lebih rinci mengenai imunisasi Td pada wanita usia subur dan ibu hamil dapat dilihat pada Lampiran 24 - 25.

3. Pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil

Anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, kematian ibu dan anak, serta penyakit infeksi. Anemia defisiensi besi pada ibu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin/bayi saat kehamilan maupun setelahnya. Hasil Riskesdas 2018 menyatakan bahwa di Indonesia sebesar 48,9% ibu hamil mengalami anemia. Sebanyak 84,6% anemia pada ibu hamil terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun. Untuk mencegah anemia setiap ibu hamil diharapkan mendapatkan tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan.

Cakupan pemberian TTD pada ibu hamil di Indonesia tahun 2019 adalah 64,0%. Angka ini belum mencapai target Renstra tahun 2019 yaitu 98%. Provinsi dengan cakupan tertinggi pemberian TTD pada ibu hamil adalah Sulawesi Utara (100,1%), sedangkan provinsi dengan cakupan terendah adalah Sulawesi Selatan (1,7%). Terdapat satu provinsi yang sudah melampaui target Renstra tahun 2019 dan satu Provinsi tidak melaporkan data cakupan pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil (Papua Barat). Cakupan pemberian TTD pada ibu hamil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 27.a.

GAMBAR 5.7
CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) PADA IBU HAMIL
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI 2020

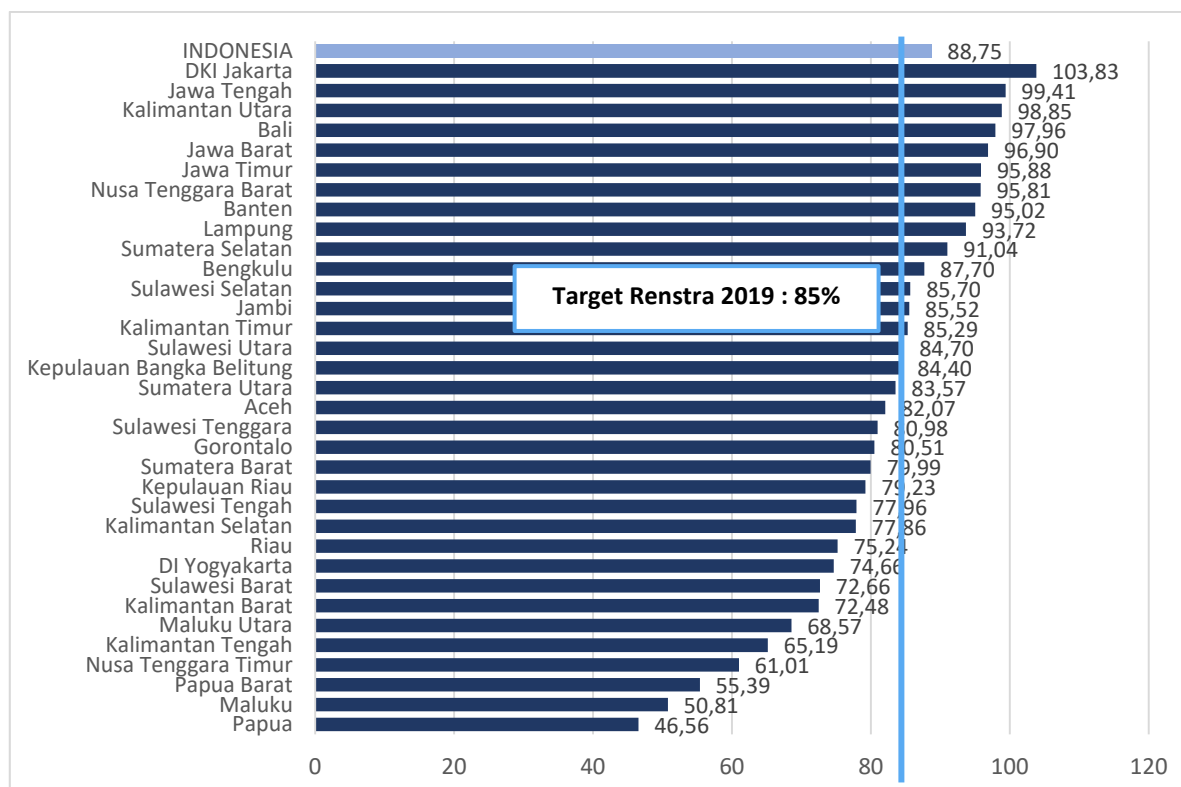
4. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Selain pada masa kehamilan, upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan, dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam rangka menjamin ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sejak tahun 2015 setiap ibu bersalin diharapkan melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 menetapkan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) sebagai salah satu indikator upaya kesehatan keluarga, menggantikan indikator pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN).

Gambar 5.8 menyajikan cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di 34 provinsi di Indonesia tahun 2019.

GAMBAR 5.8
CAKUPAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



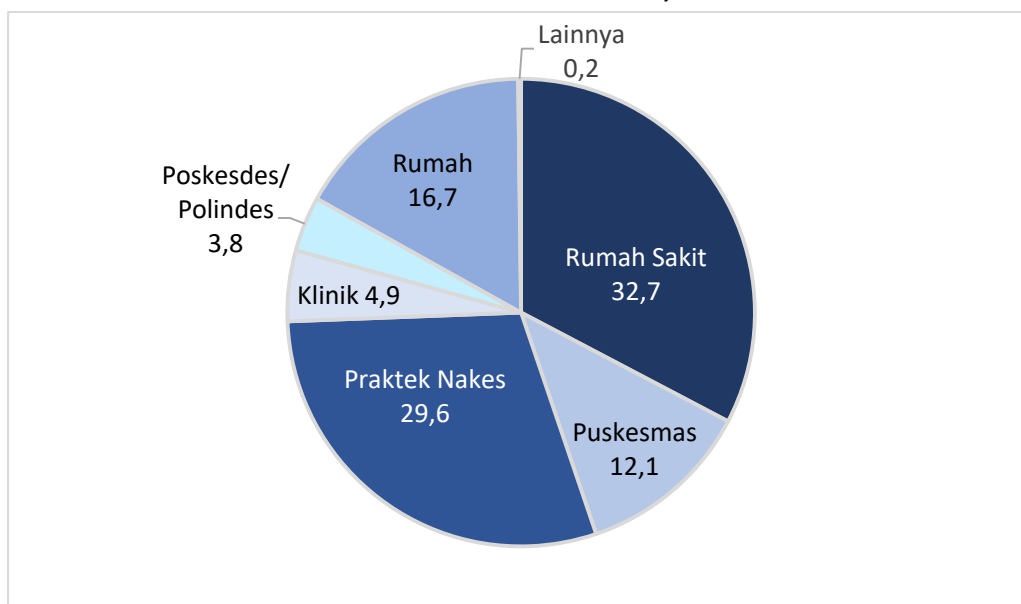
Sumber : Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Pada tahun 2019 terdapat 90,95% persalinan yang ditolong tenaga kesehatan. Sementara ibu hamil yang menjalani persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 88,75%. Dengan demikian masih terdapat sekitar 2,2% persalinan yang ditolong tenaga kesehatan namun tidak dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Secara nasional, indikator PF telah memenuhi target Renstra yang sebesar 85%. Terdapat kesenjangan yang cukup jauh antara provinsi dengan capaian tertinggi dan terendah yaitu DKI Jakarta (103,83%) dan Papua (46,56%). Analisis kematian ibu pada tahun 2010 membuktikan bahwa kematian ibu terkait erat dengan penolong persalinan dan tempat/fasilitas persalinan. Persalinan yang ditolong tenaga kesehatan terbukti berkontribusi terhadap turunnya risiko kematian ibu. Demikian pula jika persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, juga akan semakin menekan risiko kematian ibu.

Hasil Riskesdas 2018 memperlihatkan tempat persalinan paling banyak digunakan yaitu rumah sakit (baik pemerintah maupun swasta) dan praktek tenaga kesehatan (nakes). Namun penggunaan rumah masih cukup tinggi sebesar 16,7%, yang menempati urutan ketiga tertinggi tempat bersalin.

GAMBAR 5.9
PROPORSI TEMPAT PERSALINAN YANG DIMANFAATKAN
OLEH PEREMPUAN UMUR 10-54 TAHUN, RISKESDAS 2018



Sumber : Riset Kesehatan Dasar 2018, Balitbangkes, Kemenkes RI, 2019

Hasil Riskesdas 2018 juga memperlihatkan bahwa 62,5% rumah tangga mengetahui bahwa akses ke rumah sakit sulit. Begitu juga pengetahuan rumah tangga terhadap akses ke puskesmas/pustu/pusling/ bidan sebesar 60,8% dan akses ke klinik/praktek dokter/praktek dokter gigi/praktek bidan mandiri sebesar 62,6% dengan akses sulit.

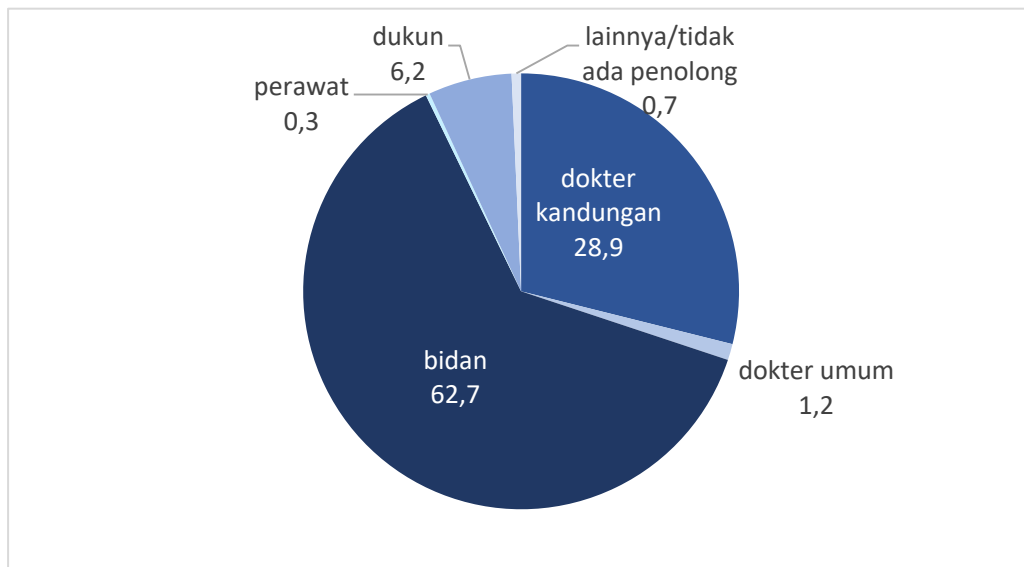
Secara konsisten terlihat bahwa provinsi dengan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan rendah memiliki akses ke fasilitas pelayanan kesehatan yang relatif sulit. Oleh karena itu untuk daerah dengan akses sulit, Kementerian Kesehatan mengembangkan program Kemitraan Bidan dan Dukun serta Rumah Tunggu Kelahiran. Para dukun diupayakan bermitra dengan bidan dengan hak dan kewajiban yang jelas. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan tidak lagi dikerjakan oleh dukun, namun dirujuk ke bidan.

Ibu hamil yang di daerah tempat tinggalnya tidak ada bidan atau jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan, menjelang hari taksiran persalinan diupayakan sudah berada di dekat fasilitas pelayanan kesehatan yaitu di Rumah Tunggu Kelahiran. Rumah Tunggu Kelahiran adalah suatu tempat atau ruangan yang berada dekat fasilitas kesehatan (RS, Puskesmas), yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara ibu hamil dan pendampingnya (suami/kader/dukun atau keluarga) selama beberapa hari, saat menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin.

Dari 34 provinsi, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan jumlah rumah tunggu kelahiran tertinggi, yaitu masing-masing sebanyak 397 dan 236. Provinsi lain memiliki jumlah Rumah Tunggu Kelahiran di bawah 90. Sebanyak 6 provinsi tidak memiliki Rumah Tunggu Kelahiran yaitu Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara.

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan menurut hasil Riskesdas 2018 sebesar 93,1% yang berarti hampir sama dengan hasil pencatatan rutin program kesehatan keluarga yang sebesar 90,32%. Berikut ini proporsi persalinan dengan kualifikasi tertinggi pada perempuan umur 10-54 tahun.

GAMBAR 5.10
PROPORSI PERSALINAN DENGAN KUALIFIKASI TERTINGGI
PADA PEREMPUAN UMUR 10-54 TAHUN, RISKESDAS 2018



Sumber : Riset Kesehatan Dasar 2018, Balitbangkes, Kemenkes RI, 2019

Proporsi terbesar penolong persalinan tertinggi yaitu bidan sebesar 62,7% dan dokter kandungan sebesar 28,9%. Berdasarkan karakteristik demografi, semakin tinggi pendidikan ibu bersalin semakin tinggi persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Sedangkan berdasarkan tempat tinggal, proporsi persalinan oleh tenaga kesehatan di perkotaan lebih tinggi (96,7%) dibandingkan di perdesaan (88,9%). Provinsi Maluku (33,4%), Maluku Utara (26,1%) dan, Nusa Tenggara Timur (16,1%) merupakan provinsi tertinggi dengan proporsi persalinan oleh dukun.

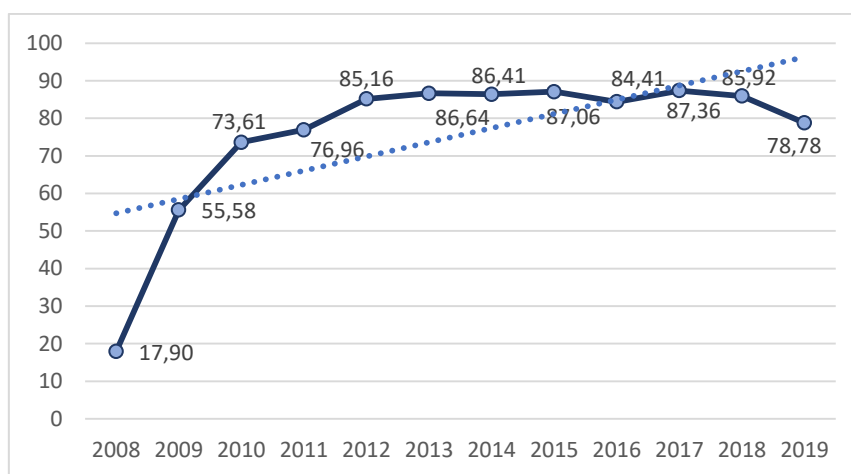
5. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas harus dilakukan minimal tiga kali sesuai jadwal yang dianjurkan, yaitu pada enam jam sampai dengan tiga hari pasca persalinan, pada hari ke empat sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan. Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan terdiri dari:

- a) pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, nafas, dan suhu);
- b) pemeriksaan tinggi puncak rahim (*fundus uteri*);
- c) pemeriksaan lochia dan cairan *per vaginam* lain;
- d) pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif;
- e) pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana pasca persalinan;
- f) pelayanan keluarga berencana pasca persalinan.

Gambar 5.11 menyajikan cakupan kunjungan nifas di Indonesia sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2018.

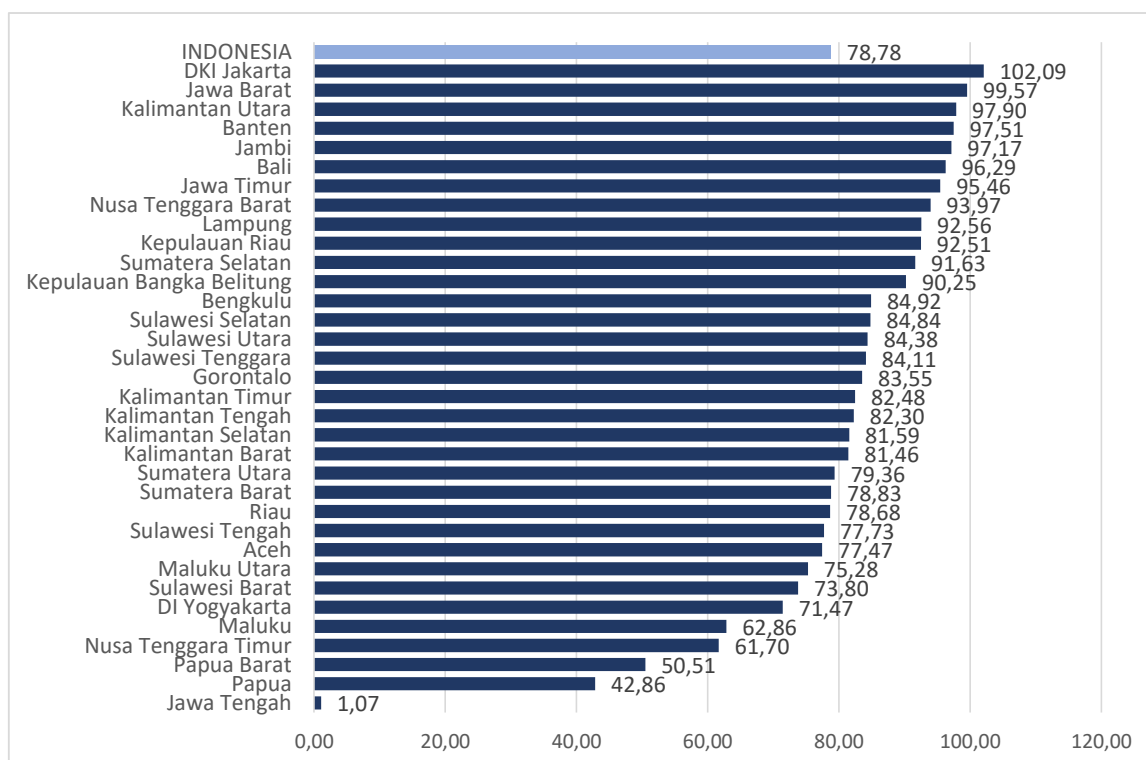
GAMBAR 5.11
CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS (KF3) DI INDONESIA
TAHUN 2008 – 2019



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Cakupan kunjungan nifas (KF3) di Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2019, garis tren menunjukkan ada penurunan cakupan sejak 2 tahun terakhir. Capaian kunjungan nifas menurut provinsi di Indonesia terdapat pada Gambar 5.12 berikut ini.

GAMBAR 5.12
CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS (KF3) DI INDONESIA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Gambar di atas menggambarkan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki capaian kunjungan nifas lengkap (KF3) tertinggi yang diikuti oleh Jawa Barat dan Kalimantan Utara. Sedangkan provinsi dengan cakupan kunjungan nifas terendah yaitu Jawa Tengah, Papua, dan Papua Barat. Dari 34 provinsi yang melaporkan data kunjungan nifas, mencapai 62% provinsi di Indonesia telah mencapai KF3 80%. Kondisi pada tahun 2019 tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2018 (60%).

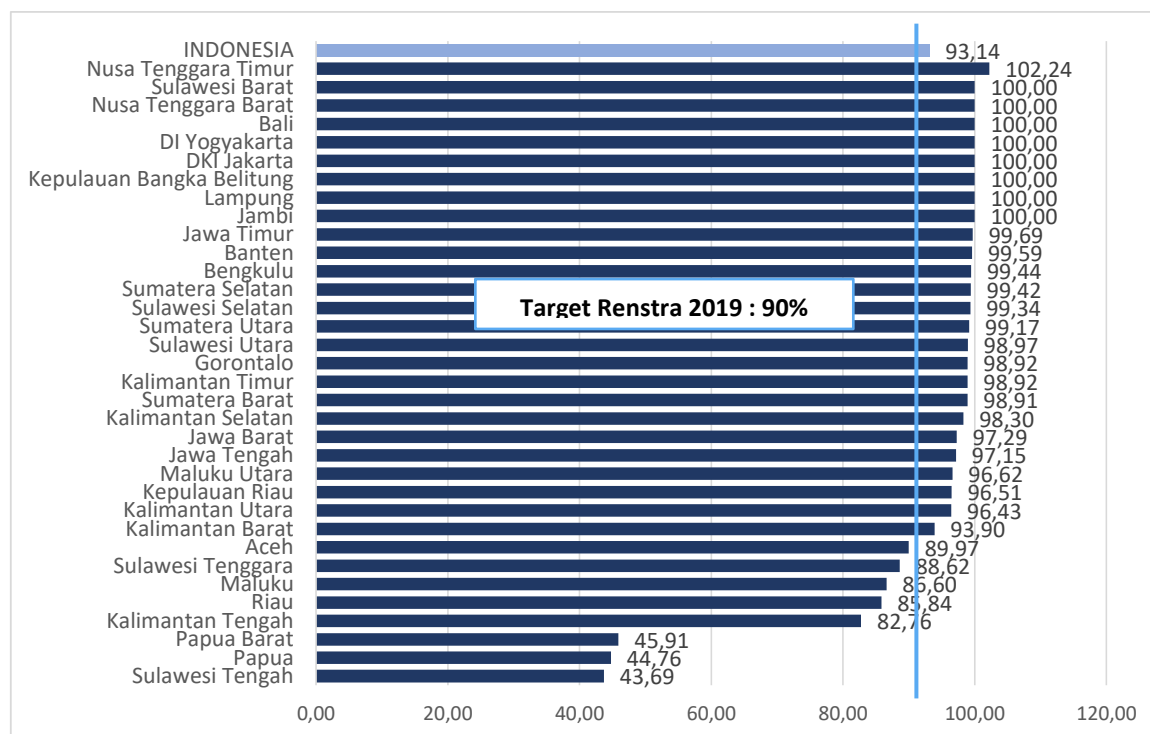
6. Puskesmas Melaksanakan Kelas Ibu Hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)

Penurunan kematian ibu dan anak tidak dapat lepas dari peran pemberdayaan masyarakat, yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan kelas ibu hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Kementerian Kesehatan menetapkan indikator persentase puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil dan persentase Puskesmas melaksanakan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) sebagai upaya menurunkan kematian ibu dan kematian anak.

Kelas ibu hamil merupakan sarana bagi ibu hamil dan keluarga untuk belajar bersama tentang kesehatan ibu hamil yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dalam kelompok. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dan keluarga mengenai kehamilan, persalinan, nifas, KB pasca persalinan, pencegahan komplikasi, perawatan bayi baru lahir dan aktivitas fisik atau senam ibu hamil.

Cakupan Puskesmas Melaksanakan Kelas Ibu Hamil didapatkan dengan menghitung puskesmas yang telah melaksanakan kelas ibu hamil dibandingkan dengan jumlah seluruh Puskesmas di wilayah kabupaten/kota. Puskesmas dikatakan telah melaksanakan kelas ibu hamil apabila telah melakukan kelas ibu hamil minimal sebanyak 4 kali.

GAMBAR 5.13
PUSKESMAS MELAKSANAKAN KELAS IBU HAMIL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019



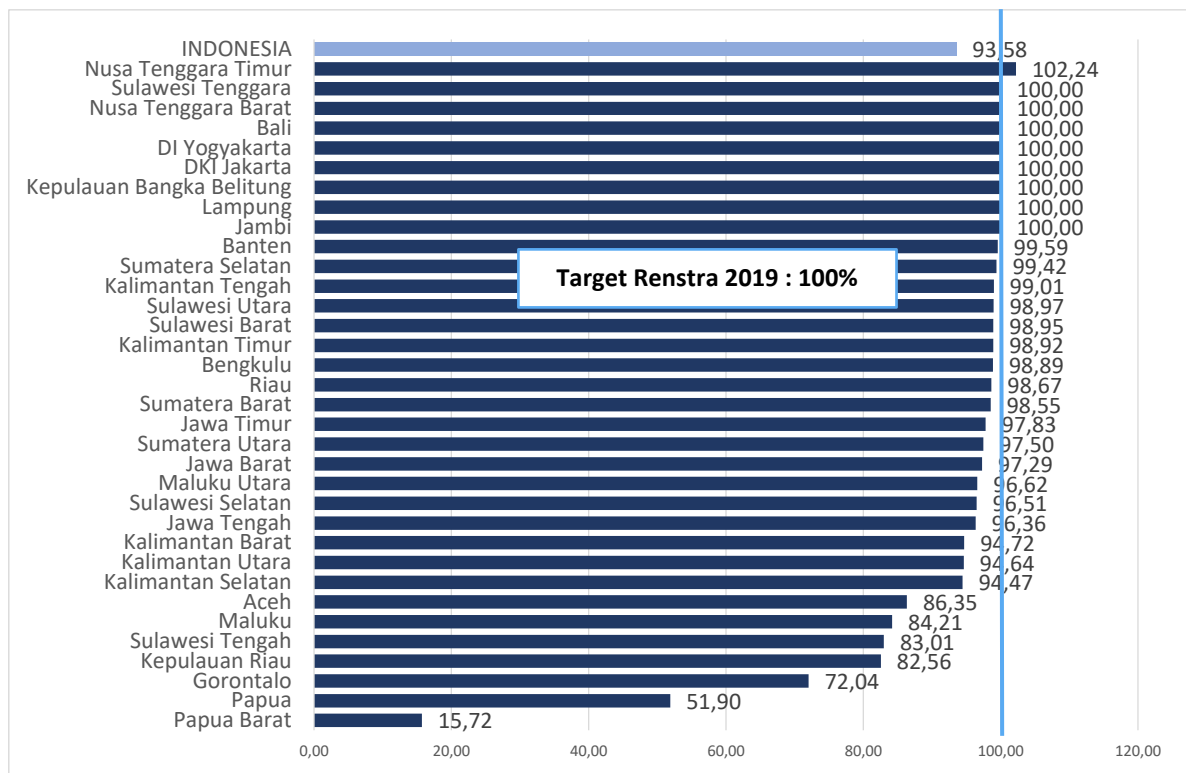
Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Sebanyak 93,14% puskesmas di Indonesia telah melaksanakan kelas ibu hamil yang berarti telah mencapai target renstra Kementerian Kesehatan tahun 2019 yang sebesar 90%. Sebagian besar provinsi yang telah mencapai target renstra tersebut. Terdapat 8 (delapan) provinsi belum mencapai target renstra yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Riau, Maluku, Sulawesi Tenggara dan Aceh.

Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) merupakan suatu program yang dijalankan untuk mencapai target penurunan AKI. Program ini menitikberatkan pemberdayaan masyarakat dalam monitoring terhadap ibu hamil, bersalin, dan nifas.

Indikator Puskesmas melaksanakan orientasi P4K menghitung persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi P4K. Adapun yang dimaksud orientasi tersebut adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh puskesmas dengan mengundang kader dan/atau bidan desa dari seluruh desa yang ada di wilayahnya dalam rangka memberikan pembekalan untuk meningkatkan peran aktif suami, keluarga, ibu hamil serta masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas.

GAMBAR 5.14
PUSKESMAS MELAKSANAKAN ORIENTASI PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN
DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K) MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Pada tahun 2019 sebanyak 93,58% puskesmas teregistrasi telah melaksanakan orientasi P4K yang berarti belum mencapai target renstra Kementerian Kesehatan tahun 2019 yang sebesar 100%. Sebanyak 9 (sembilan) provinsi telah mencapai target renstra melaksanakan orientasi P4K. Namun masih terdapat 25 provinsi yang belum mencapai target adapun provinsi dengan capaian dibawah 50% yaitu Papua Barat.

7. Pelayanan Kontrasepsi

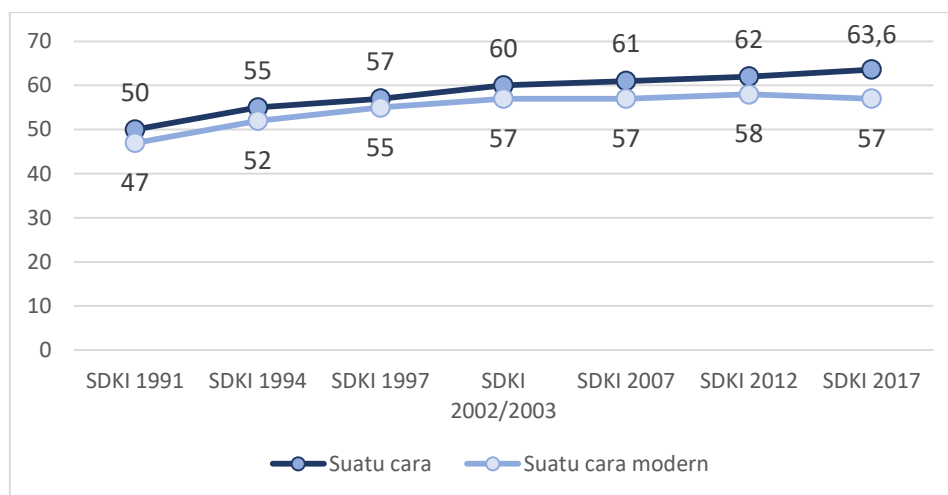
Pelayanan Kontrasepsi adalah serangkaian kegiatan meliputi pemberian KIE, konseling, penapisan kelayakan medis, pemberian kontrasepsi, pemasangan atau pencabutan, dan penanganan efek samping atau komplikasi dalam upaya mencegah kehamilan. Pelayanan kontrasepsi yang diberikan meliputi kondom, pil, suntik, pemasangan atau pencabutan implan, pemasangan atau pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim, pelayanan tubektomi, dan pelayanan vasektomi. KB Pascapersalinan (KBPP) adalah pelayanan KB yang diberikan kepada PUS setelah persalinan sampai kurun waktu 42 hari, dengan tujuan untuk menjarangkan kehamilan, atau mengakhiri kesuburan. Beberapa studi menunjukkan pelayanan KB (termasuk KBPP) yang efektif dapat mengurangi kematian ibu dengan cara mengurangi kehamilan dan mengurangi kelahiran risiko tinggi.

Salah satu faktor memberikan dampak pada peningkatan Angka Kematian Ibu adalah risiko 4 Terlalu (Terlalu muda melahirkan dibawah usia 21 tahun, Terlalu tua melahirkan diatas 35 tahun, Terlalu dekat jarak kelahiran kurang dari 3 tahun dan Terlalu banyak jumlah anak lebih dari 2). Persentase ibu meninggal yang melahirkan berusia dibawah 20 tahun dan diatas 35 tahun adalah

33% dari seluruh kematian ibu, sehingga apabila program KB dapat dilaksanakan dengan baik lagi, kemungkinan 33% kematian ibu dapat dicegah melalui pemakaian kontrasepsi.

Gambar 5.17 menunjukkan tren penggunaan kontrasepsi pada wanita kawin sejak tahun 1991 sampai 2017. Terlihat adanya peningkatan prevalensi kontrasepsi dari 50 persen pada tahun 1991 menjadi 64 persen pada tahun 2017. Namun, ada perlambatan peningkatan sejak tahun 2002-2003 di mana selama lima belas tahun terakhir penggunaan kontrasepsi modern cenderung stagnan.

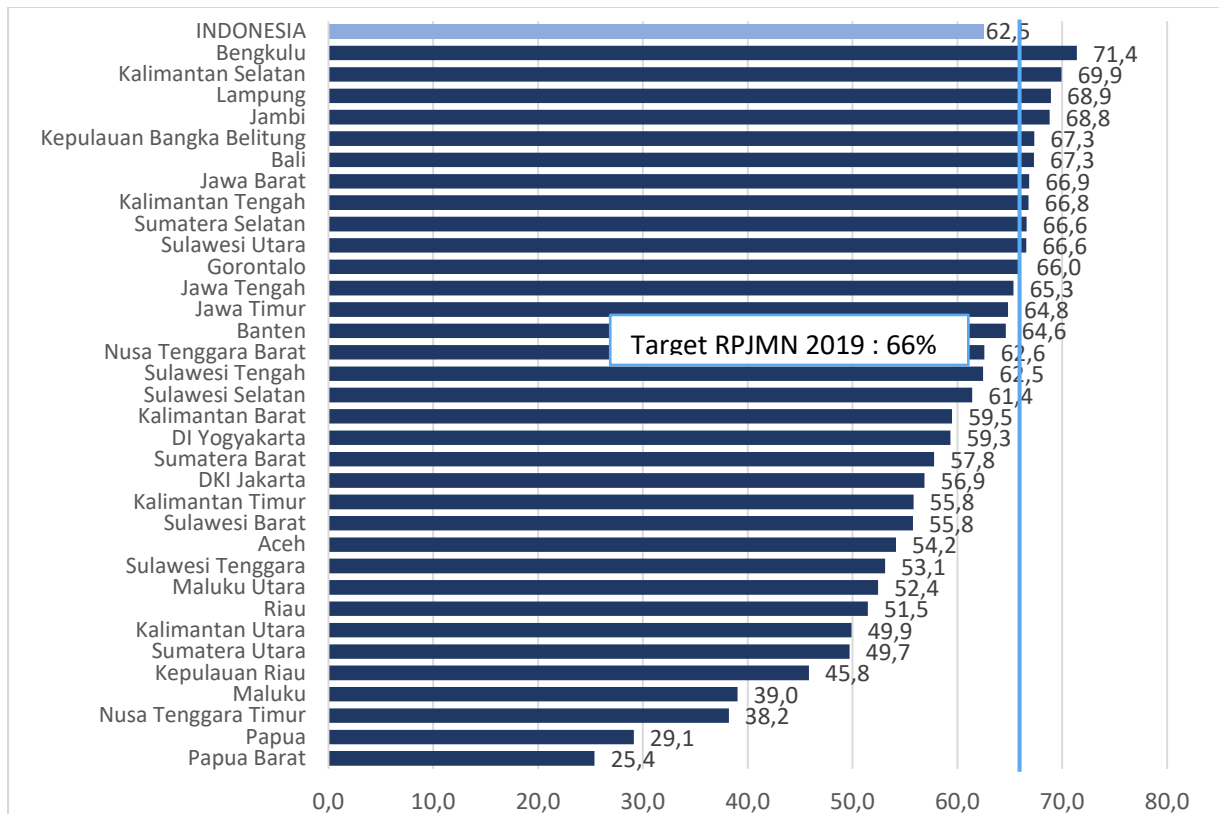
GAMBAR 5.15
TREN PEMAKAIAN KONTRASEPSI PADA WANITA KAWIN
SDKI 1991-2017



Menurut BKKBN, KB aktif di antara PUS tahun 2019 sebesar 62,5%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 63,27%. Sementara target RPJMN yang ingin dicapai tahun 2019 sebesar 66%. Hasil SDKI tahun 2017 juga menunjukkan angka yang lebih tinggi pada KB aktif yaitu sebesar 63,6%.

KB aktif tertinggi terdapat di Bengkulu yaitu sebesar 71,4% dan yang terendah di Papua Barat sebesar 25,4%. Terdapat 11 (sebelas) provinsi dengan cakupan KB aktif mencapai target RPJMN 66% yaitu Provinsi Bengkulu, Kalimantan Selatan, Lampung, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara dan Gorontalo seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.16.

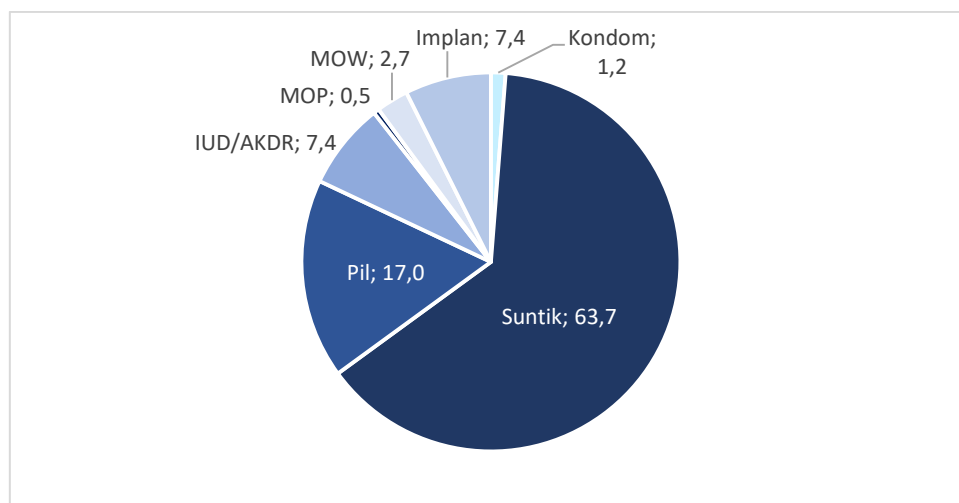
GAMBAR 5.16
CAKUPAN PESERTA KB AKTIF DI INDONESIA TAHUN 2019



Sumber: Profil Keluarga Indonesia Tahun 2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2019

Berdasarkan pola dalam pemilihan jenis alat kontrasepsi seperti yang disajikan pada Gambar 5.17, sebagian besar peserta KB Aktif memilih suntikan dan pil sebagai alat kontrasepsi bahkan sangat dominan (lebih dari 80%) dibanding metode lainnya; suntikan (63,7%) dan pil (17,0%). Padahal suntikan dan pil termasuk dalam metode kontrasepsi jangka pendek sehingga tingkat efektifitas suntikan dan pil dalam pengendalian kehamilan lebih rendah dibandingkan jenis kontrasepsi lainnya.

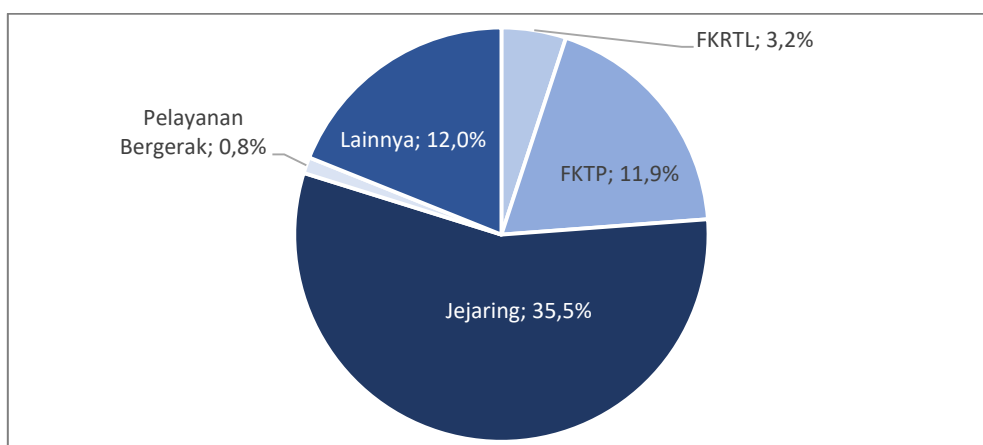
GAMBAR 5.17
CAKUPAN PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI MODERN
TAHUN 2019



Sumber: Profil Keluarga Indonesia Tahun 2019,
 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2019
 Keterangan: MOW = Metode Operasi Wanita
 MOW = Metode Operasi Pria

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana. Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. Pasangan Usia Subur bisa mendapatkan pelayanan kontrasepsi di tempat-tempat yang melayani program KB. Gambaran mengenai tempat pelayanan KB di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 5.18 berikut ini.

GAMBAR 5.18
PERSENTASE TEMPAT PELAYANAN KB DI INDONESIA
TAHUN 2019

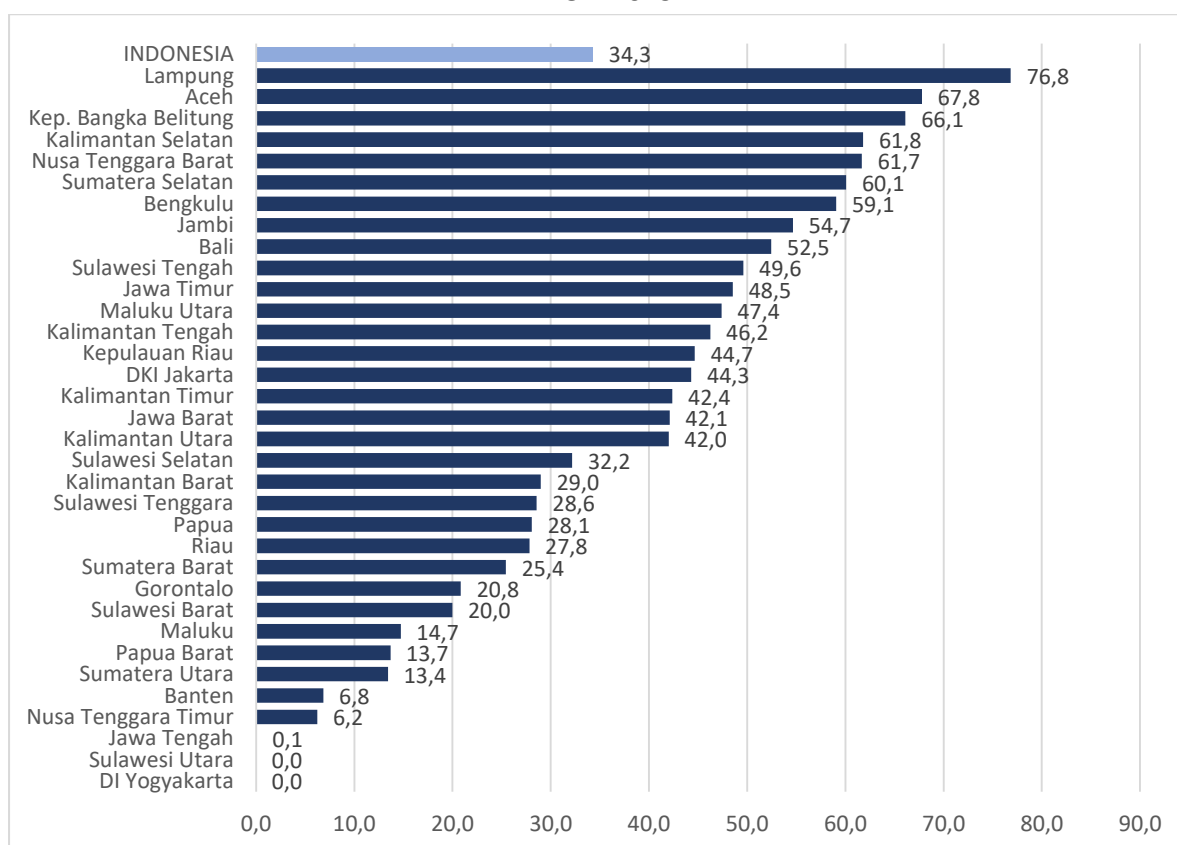


Sumber : Profil Keluarga Indonesia Tahun 2019,
 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2019
 Keterangan: FKRTL = Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut
 FKTP = Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Terdapat lima jenis tempat pelayanan KB yaitu FKRTL, FKTP, Jejaring, Pelayanan Bergerak, dan jenis tempat pelayanan KB Lainnya. Berdasarkan tempat pelayanan tersebut PUS paling banyak dilayani oleh Jejaring yaitu sebesar 35,5%. Jejaring tersebut terdiri atas Pustu/Pusling/Bidan Desa, Poskesdes/Polindes dan Praktek Bidan. Praktek Bidan memberikan pelayanan paling banyak yaitu sebesar 60,7% dari jumlah PUS yang dilayani oleh Jejaring. Provinsi dengan pengguna FKTP (puskesmas, klinik pratama, praktek dokter dan RS pratama) tertinggi sebagai tempat pelayanan KB yaitu Gorontalo, Papua, dan Sulawesi Utara.

Gambar 5.19 menyajikan cakupan peserta KB pasca persalinan menurut provinsi tahun 2019. KB Pasca Persalinan merupakan upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari/ 6 minggu setelah melahirkan. Cakupan KB pasca persalinan baru mencapai 35,1% tahun 2019 dengan jenis kontrasepsi suntik yang terbanyak yaitu 62,3%.

GAMBAR 5.19
CAKUPAN PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

KB pasca persalinan tertinggi terdapat di Provinsi Lampung yaitu sebesar 76,8% dan yang terendah di Jawa Tengah sebesar 0,1%. Terdapat dua provinsi yang belum melaporkan cakupan KB pasca persalinan yaitu Provinsi DI Yogyakarta dan Sulawesi Utara. Rincian data dapat dilihat pada Lampiran 29.

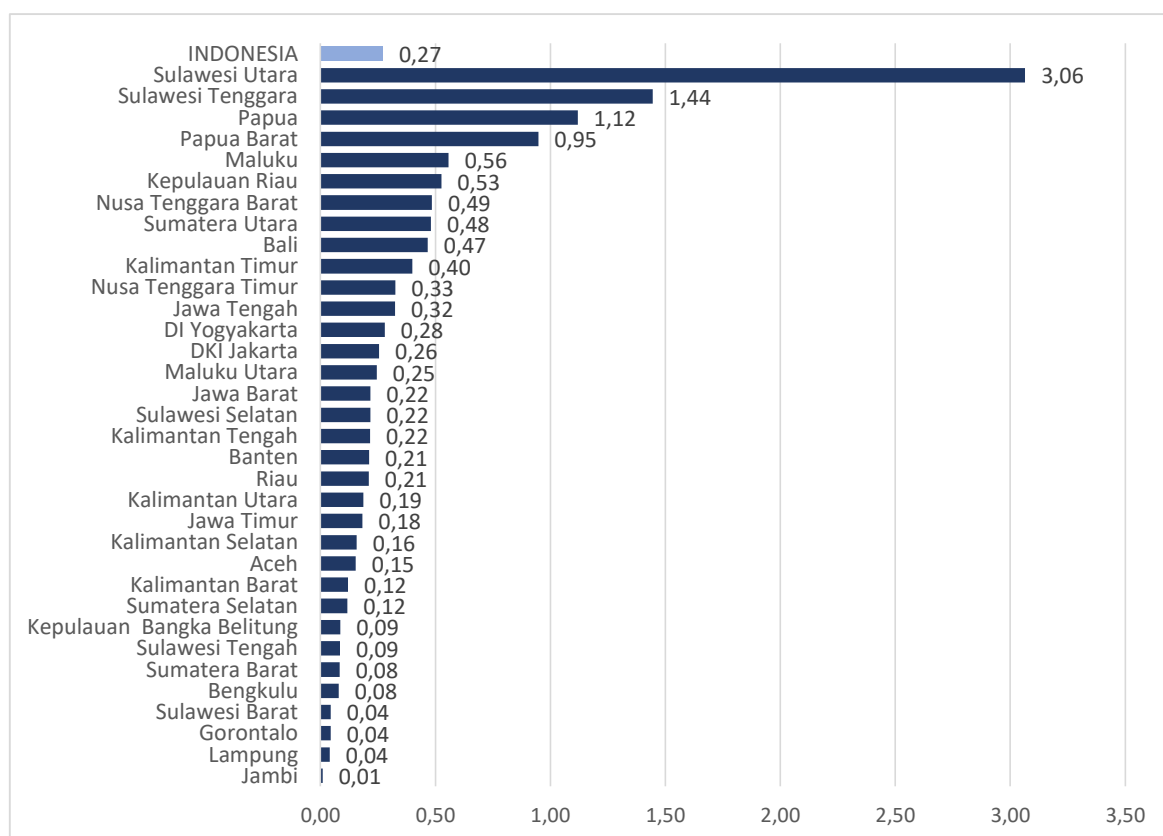
8. Pemeriksaan HIV dan Hepatitis B pada Ibu Hamil

a. HIV

Tujuan pemeriksaan HIV pada ibu hamil adalah untuk mencegah terjadinya kasus HIV pada bayi yang di lahirkan oleh ibu dengan HIV. Penularan HIV dari ibu ke bayi dapat terjadi selama masa kehamilan, saat persalinan dan selama menyusui. Infeksi HIV pada bayi dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan dan kematian sehingga berdampak buruk pada kelangsungan dan kualitas hidup anak.

Selama tahun 2019 terdapat 2.370.473 ibu hamil yang di periksa HIV. Dari pemeriksaan tersebut di dapatkan 6.439 (0,27%) ibu hamil yang positif HIV. Provinsi dengan persentase ibu hamil yang positif HIV tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Utara (3,06), Sulawesi Tenggara (1,44) dan Papua (1,12). Data selengkapnya dapat di lihat pada Lampiran 30.b

GAMBAR 5.20
PERSENTASE IBU HAMIL YANG POSITIF HIV MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

b. Hepatitis B

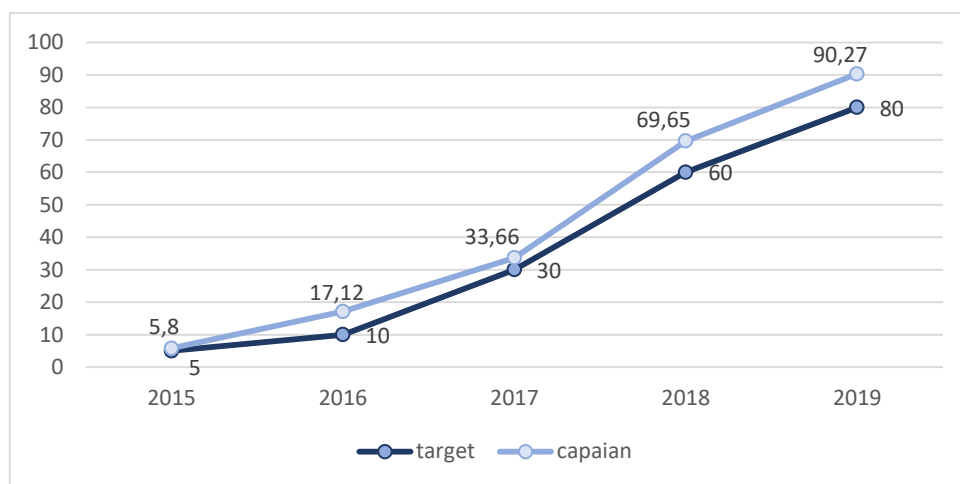
Program Nasional dalam Pencegahan dan Pengendalian Virus Hepatitis B saat ini fokus pada pencegahan Penularan Ibu ke Anak (PPIA) karena 95% penularan Hepatitis B adalah secara vertikal yaitu dari Ibu yang Positif Hepatitis B ke bayi yang dilahirkannya. Sejak tahun 2015 telah dilakukan

Kegiatan Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) pada ibu hamil dilayanan Kesehatan dasar (Puskesmas) dan Jaringannya.

Pemeriksaan Hepatitis B pada ibu hamil dilakukan melalui pemeriksaan darah dengan menggunakan tes cepat/Rapid Diagnostic Test (RDT) HBsAg. HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen) merupakan antigen permukaan yang ditemukan pada virus hepatitis B yang memberikan arti adanya infeksi hepatitis B. Bayi yang lahir dari ibu yang terdeteksi Hepatitis B (HBsAg Reaktif) diberi vaksin pasif yaitu HBIg (Hepatitis B Imunoglobulin) sebelum 24 jam kelahiran disamping imunisasi aktif sesuai program Nasional (HB0, HB1, HB2 dan HB3). HBIg merupakan serum antibodi spesifik Hepatitis B yang memberikan perlindungan langsung kepada bayi.

Pelaksanaan Deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko/ibu hamil telah dilakukan sejak tahun 2015. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa tiap tahun terdapat kenaikan target yang diikuti dengan kenaikan capaian target indikator dapat tercapai setiap tahunnya.

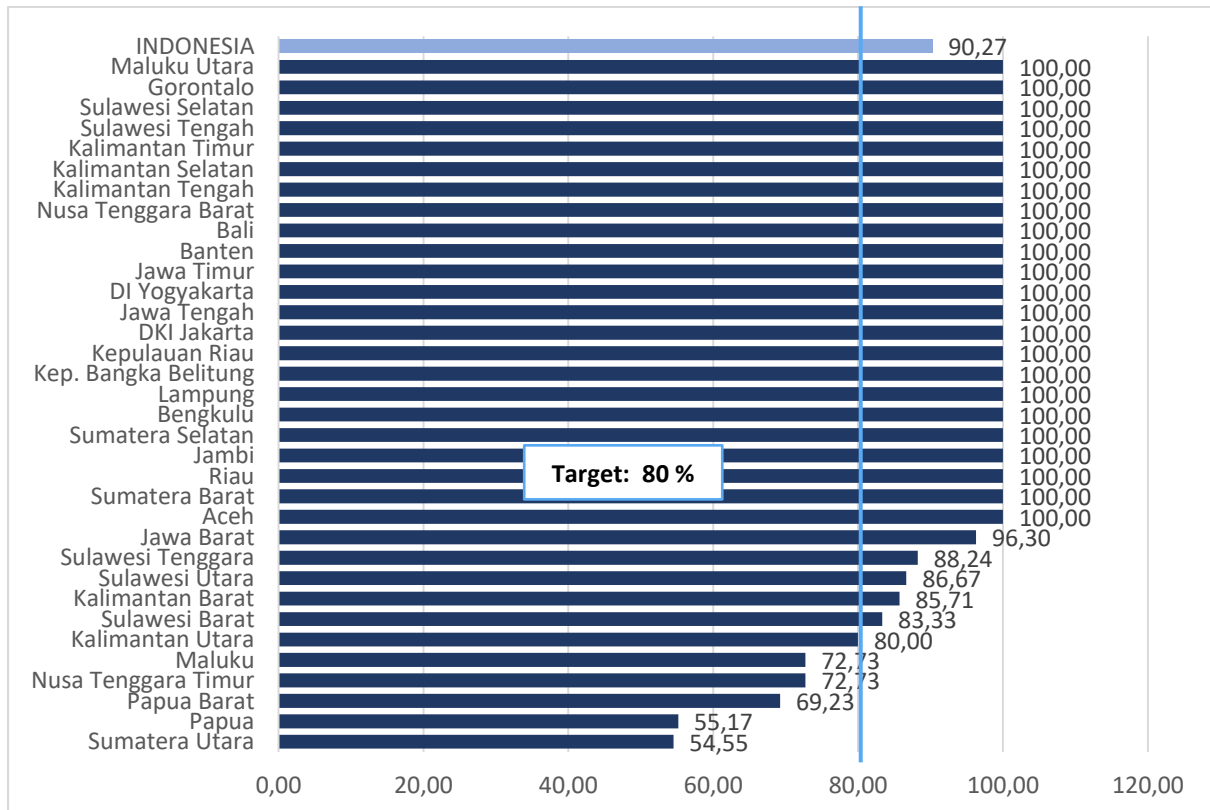
GAMBAR 5.21
TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG
MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB)
TAHUN 2015-2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Target Kabupaten/kota yang melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B tahun 2019 sebanyak 80% (411 Kabupaten/kota). Tahun 2019 deteksi dini Hepatitis B pada ibu hamil/kelompok berisiko telah dilaksanakan di 464 kabupaten/kota atau sebesar 90,27% yang tersebar di 34 Provinsi.

GAMBAR 5.22
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

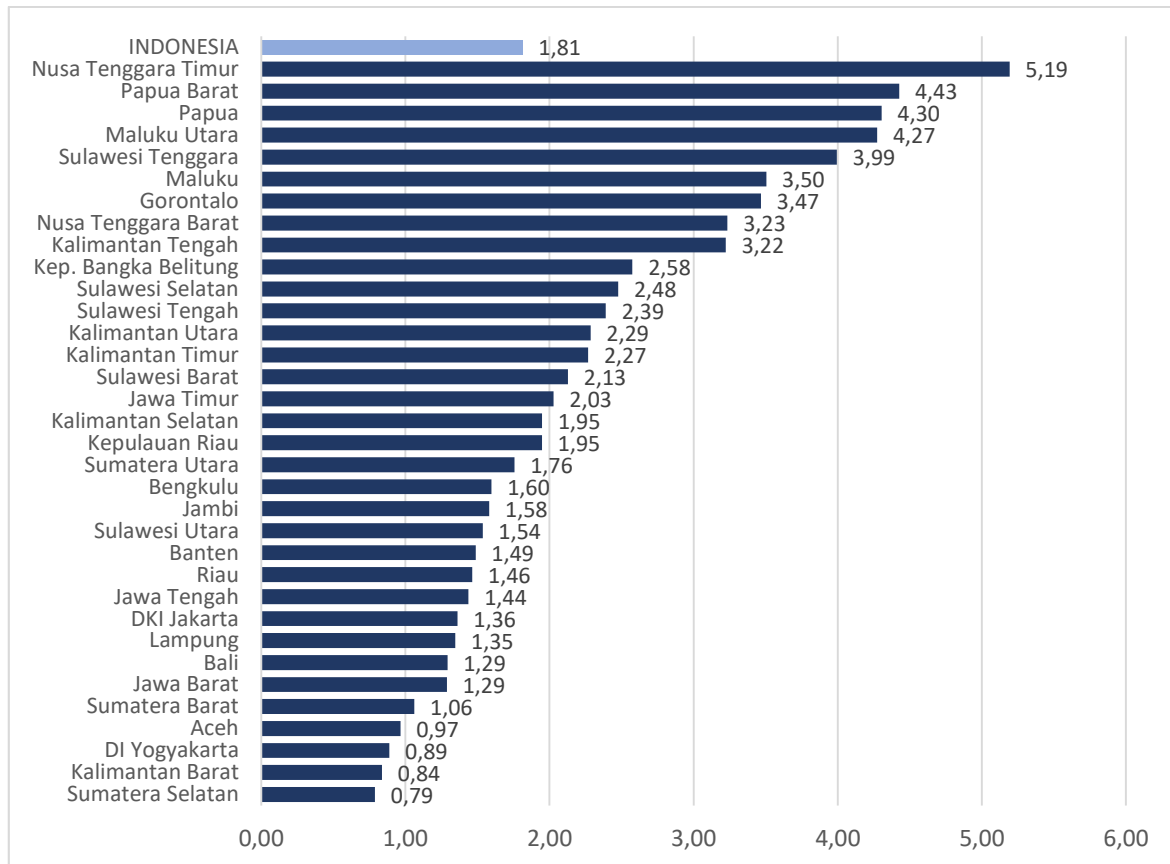


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan DDHB tampak pada gambar 5.22. Pada tahun 2019 terdapat 29 Provinsi yang sudah mencapai target. Provinsi dengan capaian tertinggi (100%) sebesar 23 provinsi sedangkan provinsi dengan capaian terendah yaitu Provinsi Sumatera Utara (54,55%), dan Papua (55,17%).

Jumlah Ibu hamil yang diperiksa Hepatitis B dengan menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT) HbsAg tahun 2019 yaitu sebanyak 2.540.158 orang atau sebanyak 48,25% dari target ibu hamil. Hasil pemeriksaan RDT HbsAg menemukan bahwa sebanyak 46.064 (1,81%) ibu hamil terdeteksi HBsAg Reaktif (Positif).

GAMBAR 5.23
PERSENTASE IBU HAMIL HBSAG REAKTIF
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

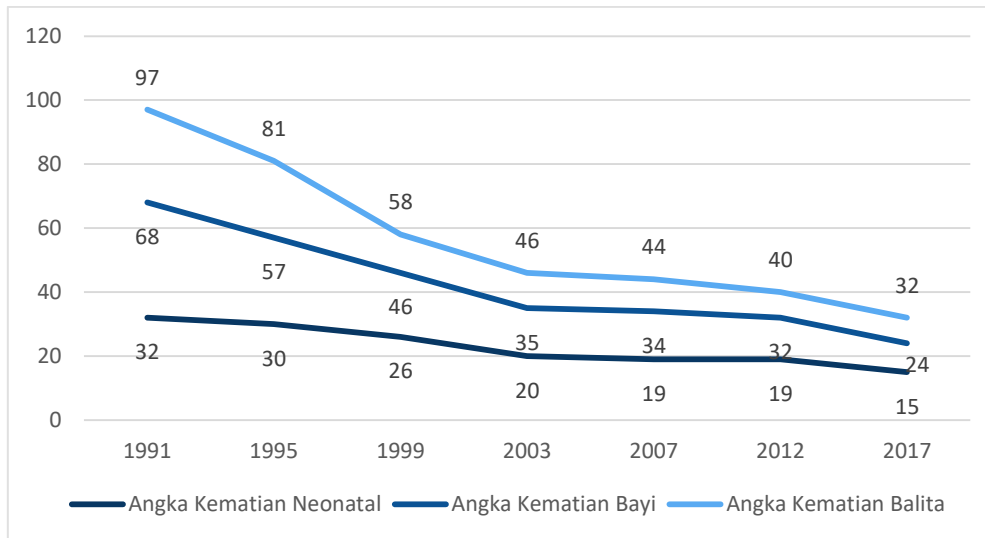
Gambar 5.23 menunjukkan bahwa persentase ibu hamil HBsAg reaktif tertinggi yaitu Provinsi Nusa tenggara Timur (5,19%), Papua Barat (4,43%) dan Papua (4,30%). Data/informasi terkait penyakit Hepatitis B menurut provinsi terdapat pada Lampiran 30.c.

B. KESEHATAN ANAK

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan anak dilakukan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Salah satu tujuan upaya kesehatan anak adalah menjamin kelangsungan hidup anak melalui upaya menurunkan angka kematian bayi baru lahir, bayi dan balita. Tren angka kematian anak dari tahun ke tahun sudah menunjukkan penurunan.

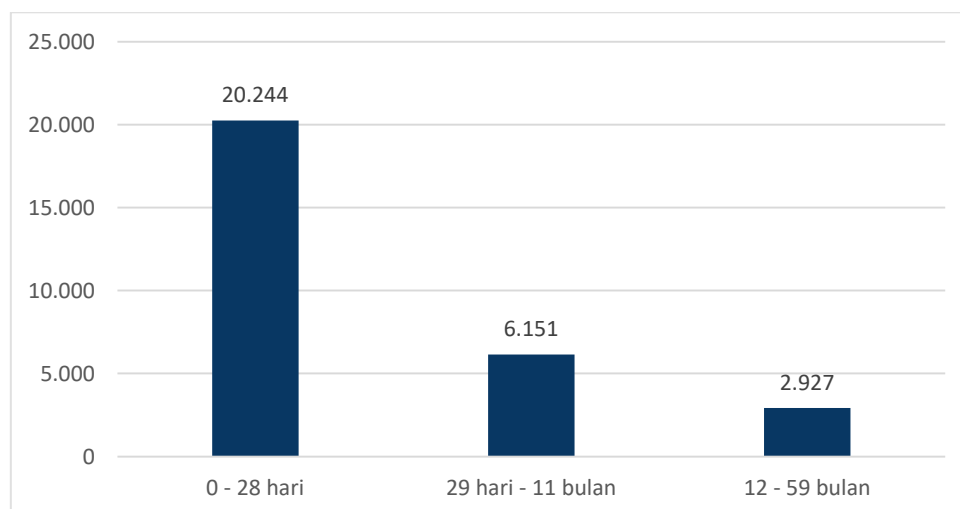
GAMBAR 5.24
TREN ANGKA KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA
TAHUN 1991 – 2017



Sumber: SDKI tahun 1991-2017

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 menunjukkan AKN sebesar 15 per 1.000 kelahiran hidup, AKB 24 per 1.000 kelahiran hidup, dan AKABA 32 per 1.000 kelahiran hidup (Gambar 5.22). Meskipun demikian, angka kematian neonatus, bayi, dan balita diharapkan akan terus mengalami penurunan. Intervensi-intervensi yang dapat mendukung kelangsungan hidup anak ditujukan untuk dapat menurunkan AKN menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup dan AKB menjadi 16 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2024. Sementara, sesuai dengan Target Pembangunan Berkelanjutan, AKABA diharapkan dapat mencapai angka 18,8 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2030.

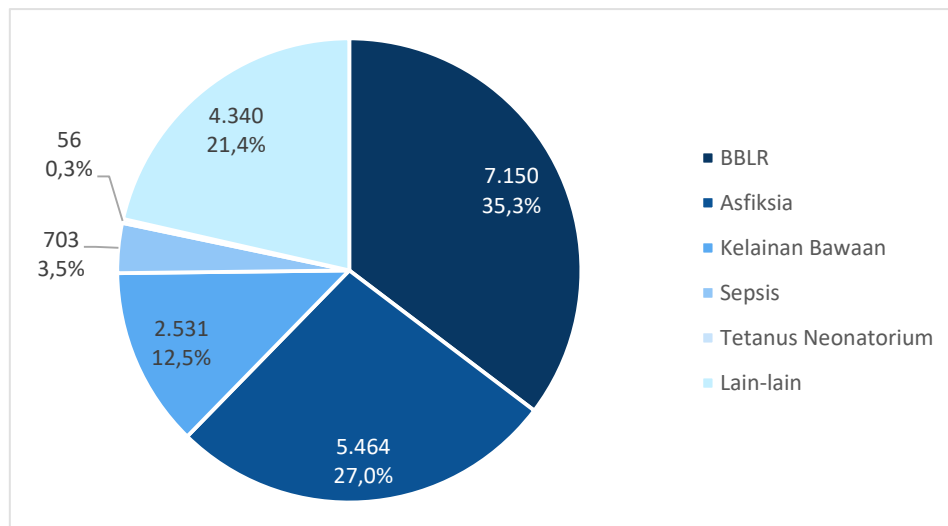
GAMBAR 5.25
JUMLAH KEMATIAN BALITA (0 – 59 BULAN) DI INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR
TAHUN 2019



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Berdasarkan data yang dilaporkan kepada Direktorat Kesehatan Keluarga melalui komdat.kesga.kemkes.go.id, pada tahun 2019, dari 29.322 kematian balita, 69% (20.244 kematian) diantaranya terjadi pada masa neonatus (Gambar 5.25). Dari seluruh kematian neonatus yang dilaporkan, 80% (16.156 kematian) terjadi pada periode enam hari pertama kehidupan. Sementara, 21% (6.151 kematian) terjadi pada usia 29 hari – 11 bulan dan 10% (2.927 kematian) terjadi pada usia 12 – 59 bulan.

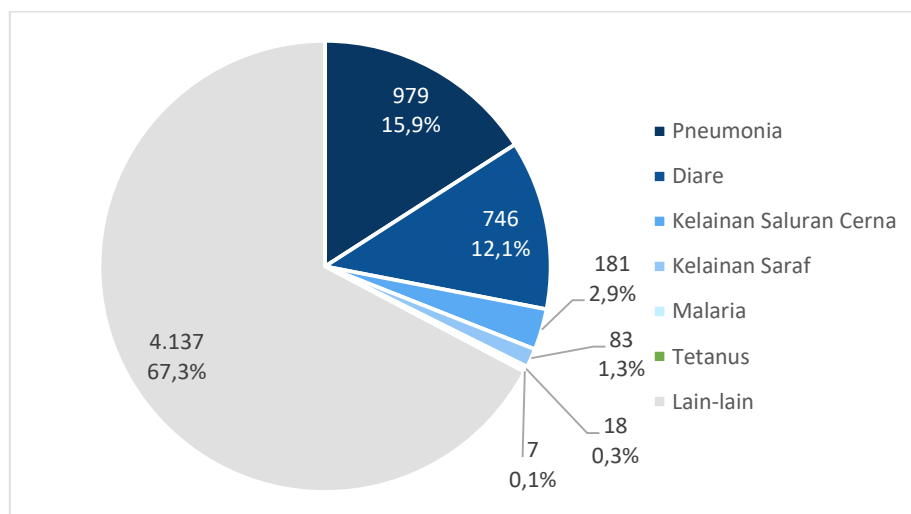
GAMBAR 5.26
PROPORSI PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0-28 HARI) DI INDONESIA
TAHUN 2019



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Pada tahun 2019, penyebab kematian neonatal terbanyak adalah kondisi berat badan lahir rendah (BBLR). Penyebab kematian lainnya di antaranya asfiksia, kelainan bawaan, sepsis, tetanus neonatorium, dan lainnya.

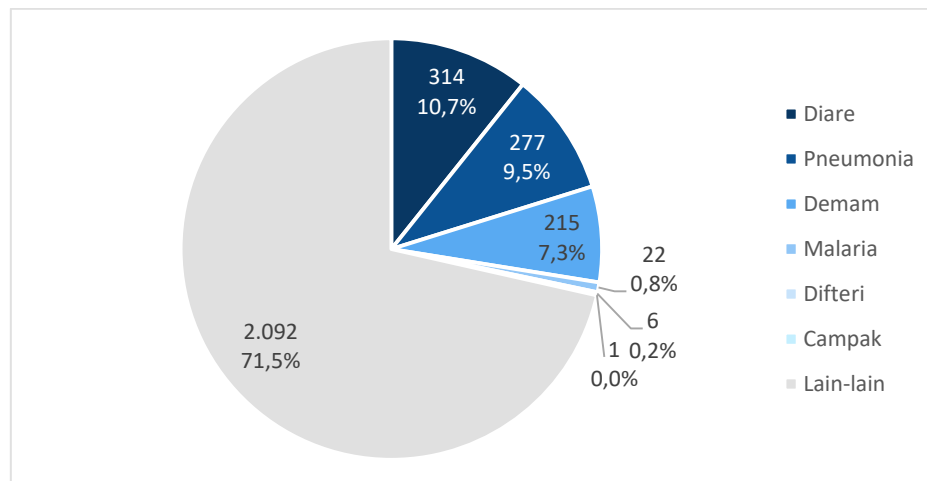
GAMBAR 5.27
PROPORSI PENYEBAB KEMATIAN POST NEONATAL (29 HARI-11 BULAN) DI INDONESIA
TAHUN 2019



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Penyakit infeksi menjadi penyumbang kematian pada kelompok anak usia 29 hari - 11 bulan. Berdasarkan data tahun 2019, pneumonia dan diare masih menjadi masalah utama yang menyebabkan 979 kematian (pneumonia) dan 746 kematian (diare). Penyebab kematian lain di antaranya adalah kelainan saluran cerna, kelainan saraf, malaria, tetanus, dan lainnya.

GAMBAR 5.28
PROPORSI PENYEBAB KEMATIAN ANAK BALITA (12-59 BULAN) DI INDONESIA
TAHUN 2019



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Pada kelompok anak balita (12 – 59 balita) penyebab kematian terbanyak adalah diare. Penyebab kematian lain di antaranya pneumonia, demam, malaria, difteri, campak, dan lainnya.

Upaya kesehatan anak yang dimaksud dalam Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 dilakukan melalui pelayanan kesehatan janin dalam kandungan, kesehatan bayi baru lahir, kesehatan bayi, anak balita, dan prasekolah, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, dan perlindungan kesehatan anak. Dalam Profil Kesehatan Indonesia ini data dan informasi mengenai upaya kesehatan anak disajikan dalam indikator kesehatan anak yang meliputi: pelayanan kesehatan neonatal, imunisasi rutin pada anak, pelayanan kesehatan pada anak sekolah, dan pelayanan kesehatan peduli remaja.

1. Pelayanan Kesehatan Neonatal

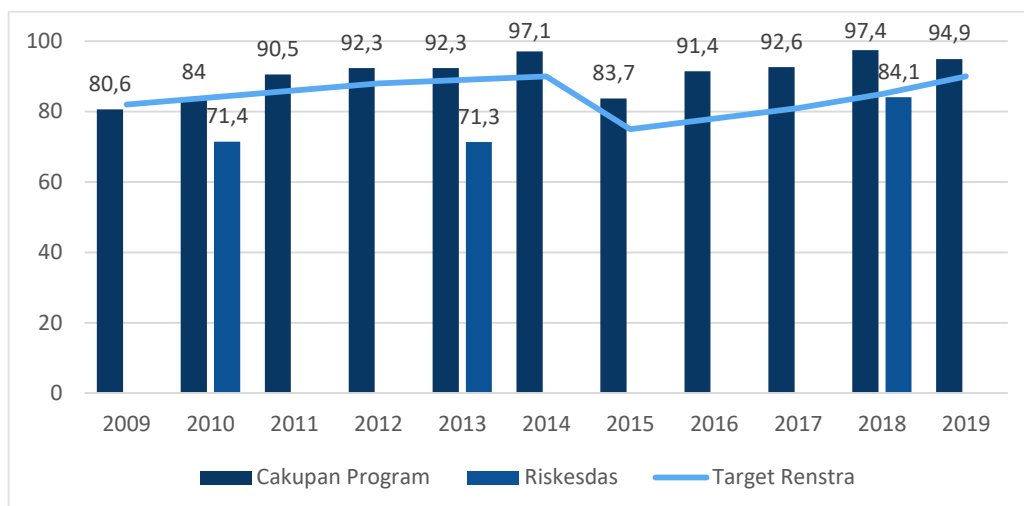
Pada masa neonatal (0-28 hari) terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul, sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini di antaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir. Kunjungan neonatal idealnya dilakukan 3 kali yaitu pada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari, dan umur 8-28 hari.

Salah satu pelayanan yang dilakukan pada bayi baru lahir adalah penimbangan. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh 25 provinsi kepada Direktorat Gizi Masyarakat, dari tahun 2019 bayi baru lahir yang dilaporkan ditimbang berat badannya, didapatkan sebanyak 111.827 bayi (3,4%) memiliki

berat badan lahir rendah (BBLR). Sedangkan menurut hasil Riskesdas tahun 2018, dari 56,6% balita yang memiliki catatan berat lahir, sebanyak 6,2% lahir dengan kondisi BBLR. Kondisi bayi BBLR diantara disebabkan karena kondisi ibu saat hamil (kehamilan remaja, malnutrisi, dan komplikasi kehamilan), bayi kembar, janin memiliki kelainan atau kondisi bawaan, dan gangguan pada plasenta yang menghambat pertumbuhan bayi (*intrauterine growth restriction*). Bayi BBLR tanpa komplikasi dapat mengejar ketertinggalan berat badan seiring dengan penambahan usia. Namun, bayi BBLR memiliki risiko lebih besar untuk stunting dan mengidap penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung saat dewasa. Rincian data mengenai bayi berat badan lahir rendah (BBLR) dapat dilihat pada Lampiran 33.

Indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu 6-48 jam setelah lahir adalah cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau KN1. Pelayanan dalam kunjungan ini (Manajemen Terpadu Balita Muda) antara lain meliputi termasuk konseling perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, pemberian vitamin K1 injeksi dan Hepatitis B0 injeksi (bila belum diberikan).

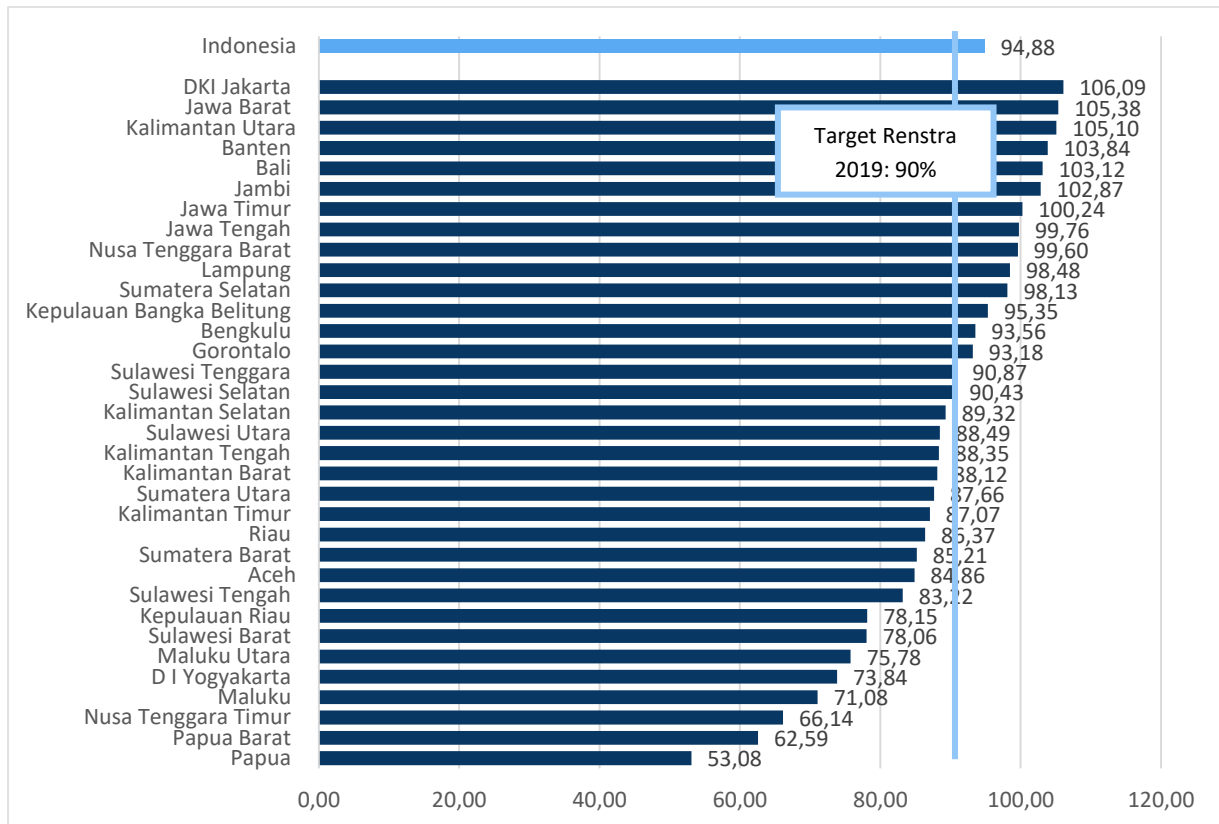
GAMBAR 5.29
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1)
TAHUN 2009-2019



Sumber : Ditjen Kesehatan Masyarakat, Riskesdas, Kemenkes RI

Capaian KN1 Indonesia pada tahun 2019 sebesar 94,9%, lebih kecil dari tahun 2018 yaitu sebesar 97,4% (Gambar 5.29). Namun capaian ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2019 yaitu sebesar 90%. Sejumlah 16 provinsi (47,1%) telah memenuhi target tersebut. Cakupan indikator kunjungan neonatal pertama menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 5.30.

GAMBAR 5.30
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



Sumber : Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Hasil capaian nasional per provinsi masih terdapat disparitas cakupan KN1 antar provinsi yang berkisar antara 53,08% di Papua dan 106,09% di DKI Jakarta. Beberapa provinsi mendapatkan cakupan lebih dari 100% dikarenakan data sasaran yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan data sasaran riil yang didapatkan.

Sedangkan cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN lengkap), yaitu cakupan pelayanan Kunjungan Neonatal minimal tiga kali sesuai standar, pada tahun 2019 sebesar 87,1%. Empat provinsi cakupannya mencapai 100% yaitu Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Bali. Sedangkan provinsi dengan cakupan terendah di Sulawesi Utara (8,53%), Papua (43,78%) dan Jawa Tengah (54,22%). Rincian data cakupan KN1 dan KN lengkap dapat dilihat di Lampiran 34.

2. Imunisasi

Undang - Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan. Imunisasi dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Penyelenggaraan imunisasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 yang diundangkan tanggal 11 April 2017.

Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) antara lain TBC, difteri, tetanus, hepatitis B, pertusis, campak, rubella, polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru. Anak yang telah diberi imunisasi akan terlindungi dari berbagai

penyakit berbahaya tersebut, yang dapat menimbulkan kecacatan atau kematian. Imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan yang terbukti paling *cost-effective* (murah), karena dapat mencegah dan mengurangi kejadian kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat PD3I yang diperkirakan 2 hingga 3 juta kematian tiap tahunnya.

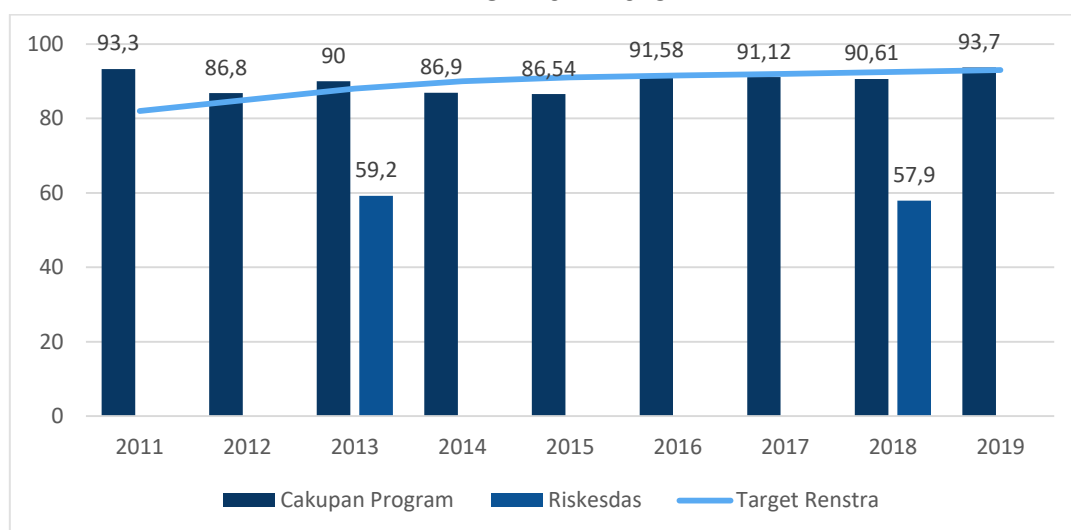
Imunisasi dikelompokkan menjadi imunisasi program dan imunisasi pilihan. Imunisasi program adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sedangkan imunisasi pilihan adalah imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu.

Imunisasi program terdiri atas imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Imunisasi rutin terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar diberikan pada bayi sebelum berusia satu tahun, sedangkan imunisasi lanjutan diberikan pada anak usia bawah dua tahun (*baduta*), anak usia sekolah dasar dan wanita usia subur (*WUS*). Imunisasi tambahan merupakan jenis Imunisasi tertentu yang diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai dengan kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu. Imunisasi khusus dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu seperti persiapan keberangkatan calon jemaah haji/umroh, persiapan perjalanan menuju atau dari negara endemis penyakit tertentu, dan kondisi kejadian luar biasa/wabah penyakit tertentu.

a. Imunisasi Dasar pada Bayi

Di Indonesia, setiap bayi (usia 0-11 bulan) diwajibkan mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-HiB, 4 dosis polio tetes, dan 1 dosis campak/MR. Penentuan jenis imunisasi didasarkan atas kajian ahli dan analisis epidemiologi atas penyakit-penyakit yang timbul.

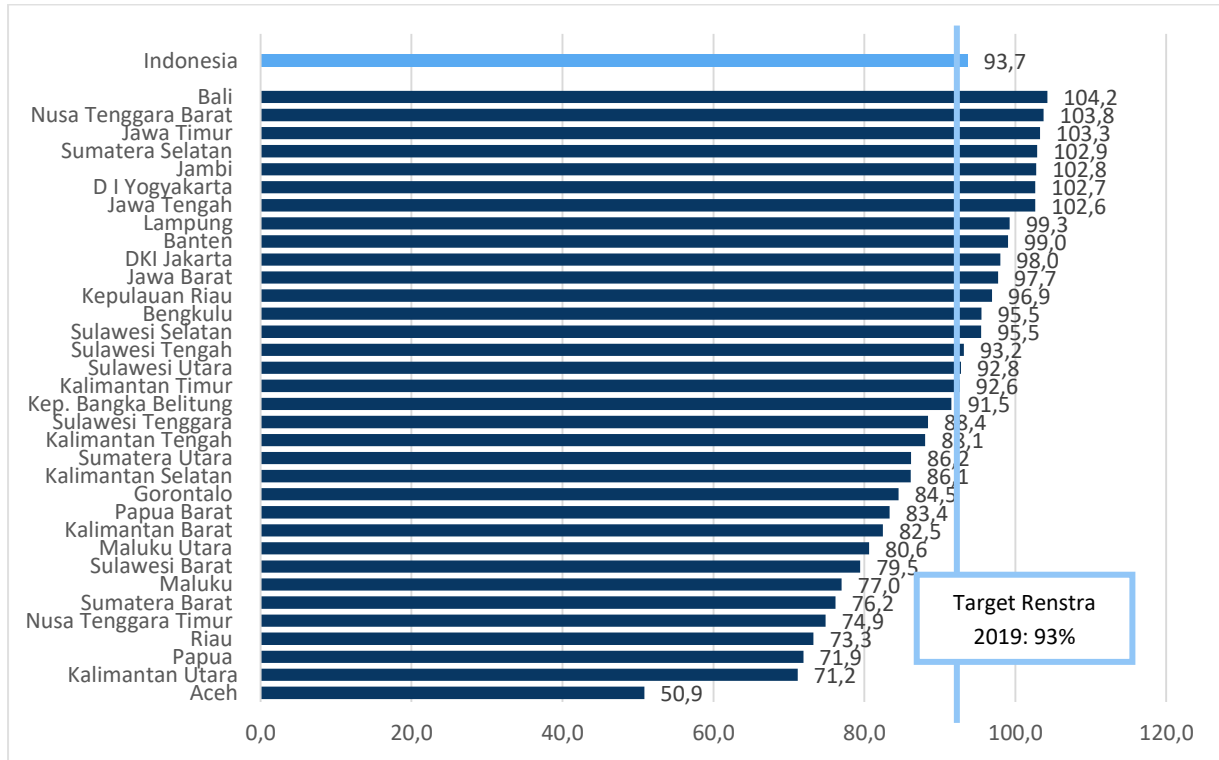
GAMBAR 5.31
CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI
TAHUN 2011-2019



Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Riskesdas, Kemenkes RI

Pada tahun 2019 imunisasi dasar lengkap di Indonesia sebesar 93,7% (Gambar 5.31). Angka ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2019 yaitu sebesar 93%. Sedangkan menurut provinsi, terdapat 15 provinsi yang mencapai target Renstra tahun 2019.

GAMBAR 5.32
CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

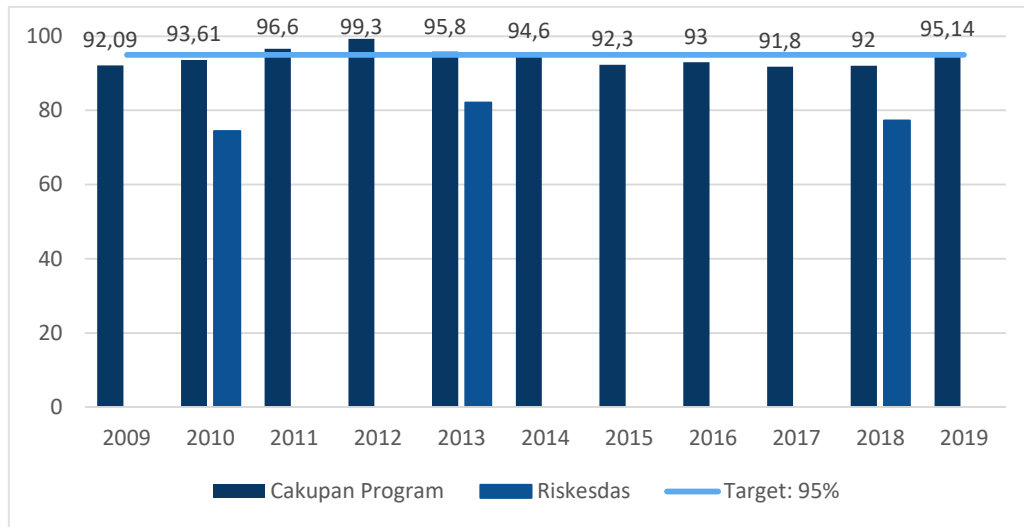


Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020

Pada Gambar 5.32 di atas, diketahui bahwa seluruh bayi di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Jambi, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Sedangkan provinsi dengan capaian terendah yaitu Aceh (50,9%). Rincian data mengenai imunisasi dasar pada bayi tahun 2019 terdapat pada Lampiran 39.a.

Dari imunisasi dasar yang diwajibkan tersebut, campak/MR menjadi salah satu jenis imunisasi yang mendapat perhatian lebih, hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia pada global untuk turut serta dalam eliminasi campak dan pengendalian rubela pada tahun 2020 dengan mencapai cakupan campak minimal 95% di semua wilayah secara merata. Hal ini terkait dengan realita bahwa campak menjadi salah satu penyebab utama kematian pada balita dan infeksi rubela menyebabkan cacat bawaan pada bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang terinfeksi rubela. Dengan demikian pencegahan campak dan rubela memiliki peran signifikan dalam penurunan angka kecacatan dan kematian pada balita.

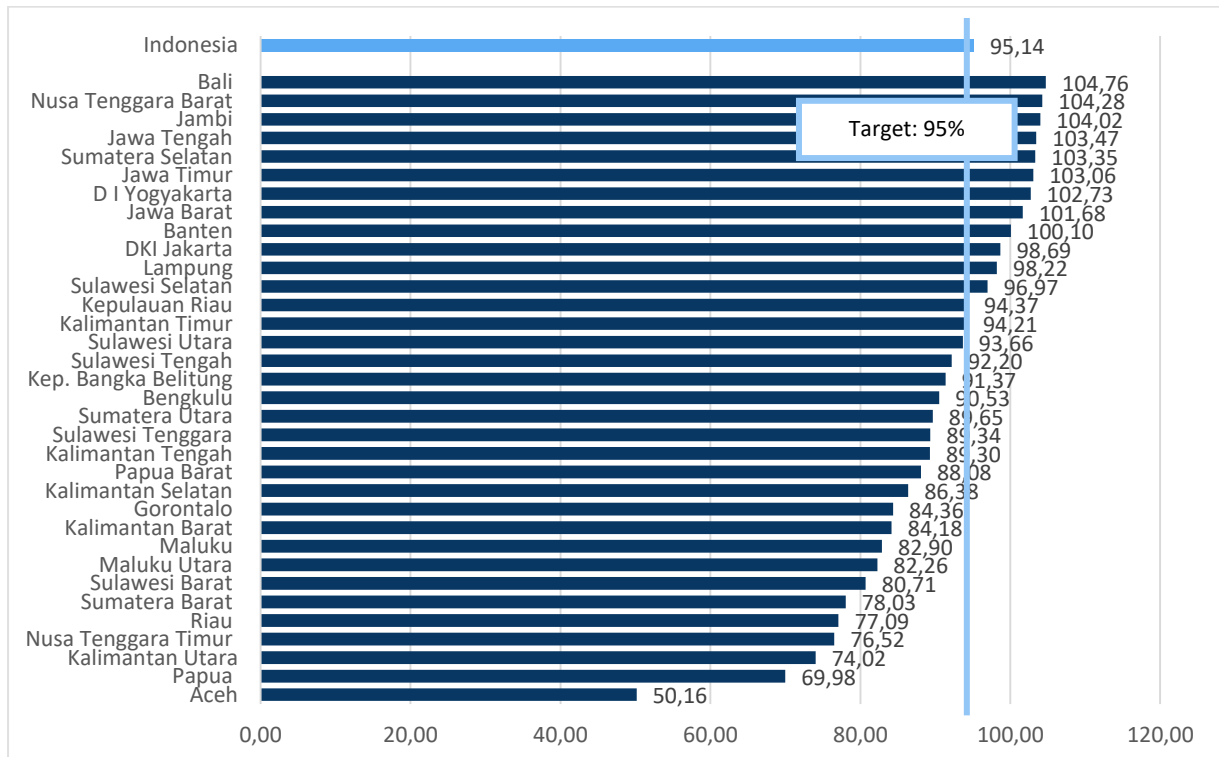
GAMBAR 5.33
CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK PADA BAYI
DI INDONESIA TAHUN 2009-2019



Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Riskesdas, Kemenkes RI

Cakupan imunisasi campak program di Indonesia pada tahun 2019 adalah 95,14%. Angka ini sudah memenuhi target 95% (Gambar 5.33). Tren cakupan imunisasi campak pada 10 tahun terakhir selalu di atas 90%. Namun jika dibandingkan dengan hasil Riskesdas 2018 terdapat perbedaan yaitu proporsi anak 12-23 bulan yang mendapat imunisasi campak yaitu hanya sebesar 77,3%.

GAMBAR 5.34
CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK PADA BAYI MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019



Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020

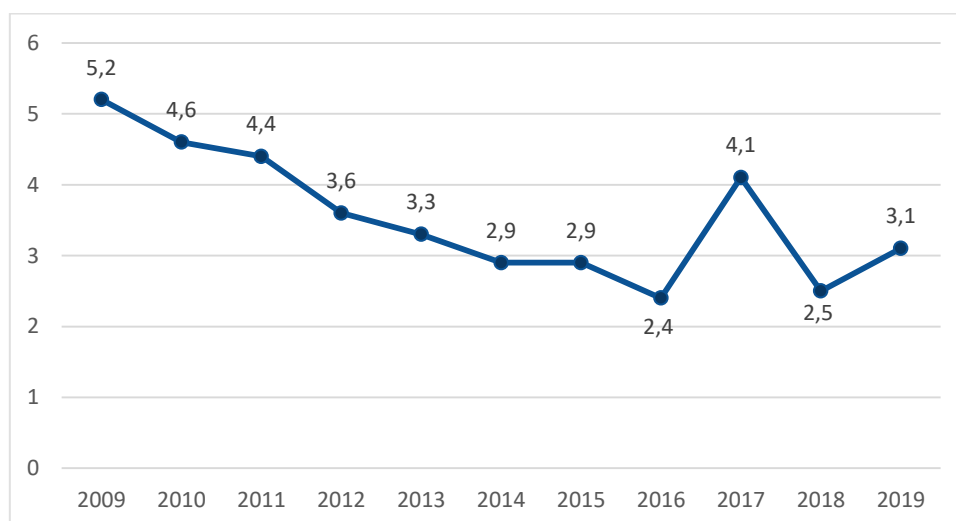
Dua belas provinsi telah berhasil mencapai target cakupan imunisasi campak sebesar 95% dan 9 provinsi di antaranya telah mencakup seluruh bayi di wilayah masing-masing yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, Jambi, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jawa Barat dan Banten (Gambar 5.34). Sedangkan provinsi dengan cakupan terendah yaitu Aceh (50,16%) dan Papua (69,98%).

b. Angka *Drop Out* Cakupan Imunisasi DPT/HB/HiB1-Campak

Sebelum anak berusia satu tahun, imunisasi dasar pada bayi seharusnya diberikan sesuai dengan umurnya. Pada kondisi ini, diharapkan sistem kekebalan tubuh dapat bekerja secara optimal. Meskipun demikian, pada kondisi tertentu beberapa bayi tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Kelompok inilah yang disebut dengan *drop out (DO)* imunisasi. Bayi yang mendapatkan imunisasi DPT/HB1 pada awal pemberian imunisasi, namun tidak mendapatkan imunisasi campak, disebut angka *drop out* imunisasi DPT/HB1-Campak. Indikator ini diperoleh dengan menghitung selisih penurunan cakupan imunisasi Campak terhadap cakupan imunisasi DPT/HB1.

Drop out rate DPT/HB1-Campak diharapkan tidak melebihi 5%. Batas maksimal tersebut telah berhasil dipenuhi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2018. Angka *drop out* imunisasi DPT/HB1-Campak menunjukkan kecenderungan penurunan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 yang asumsinya semakin banyak bayi yang mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Namun pada tahun 2017 terjadi peningkatan DO rate menjadi 4,1% akibat semakin banyaknya kelompok anti vaksin yang menolak mengimunisasikan anaknya sehingga cakupan imunisasi menurun hampir di semua antigen. Angka *drop out* imunisasi DPT/HB1-Campak pada tahun 2018 kembali dapat ditekan sehingga menurun menjadi 2,5%. Pada tahun 2019, angka *drop out* kembali meningkat menjadi 3,1%. Hal ini disebabkan karena vaksin Campak-MR merupakan vaksin yang baru masuk ke dalam imunisasi rutin sehingga masih ada keraguan dari orangtua untuk memberikan vaksin MR kepada anaknya. Namun demikian angka *drop out* ini masih termasuk *drop out* kecil karena masih di bawah angka 5%. Tren dalam 10 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.

GAMBAR 5.35
ANGKA *DROP OUT* IMUNISASI DPT/HB/HiB1-CAMPAN PADA BAYI
TAHUN 2009-2019



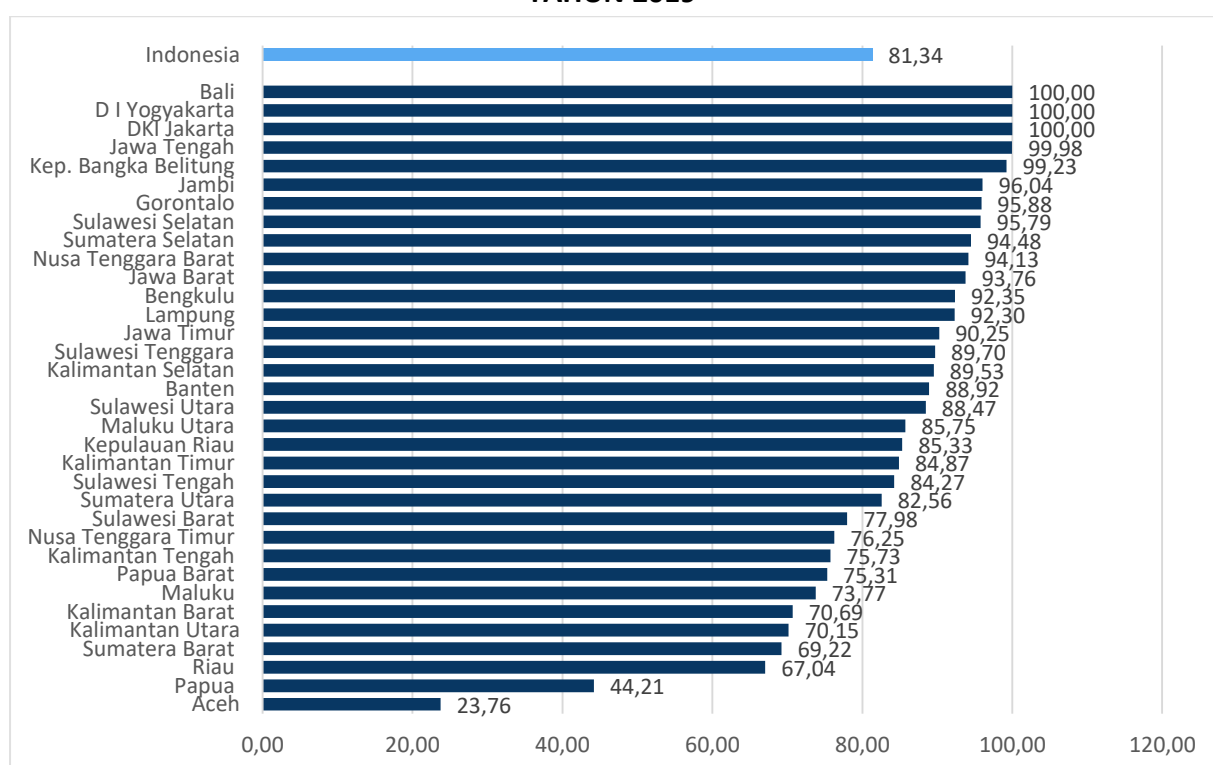
Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020

Rincian data lengkap mengenai angka *drop out* cakupan imunisasi DPT/HB1-Campak dan DPT/HB(1)-DPT/HB(3) pada tahun 2017-2019 dapat dilihat di Lampiran 39.b.

c. Desa/Kelurahan UCI (*Universal Child Immunization*)

Pada tahun 2019 cakupan desa UCI di Indonesia sebesar 81,34%. Ada tiga provinsi yang telah mencapai 100% cakupan desa/kelurahan UCI yaitu Bali, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Sedangkan provinsi dengan capaian terendah yaitu Aceh (23,76%) dan Papua (44,21%). Rincian lengkap mengenai cakupan desa/kelurahan UCI pada tahun 2019 menurut provinsi terdapat pada Lampiran 37.

GAMBAR 5.36
CAKUPAN DESA/KELURAHAN UCI MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019

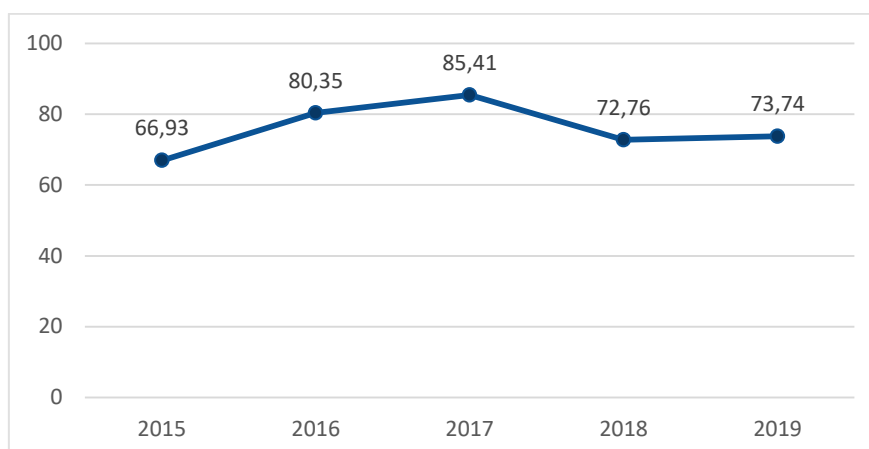


Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2019

d. Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi

Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi merupakan salah satu indikator pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, dengan target 95% pada tahun 2019.

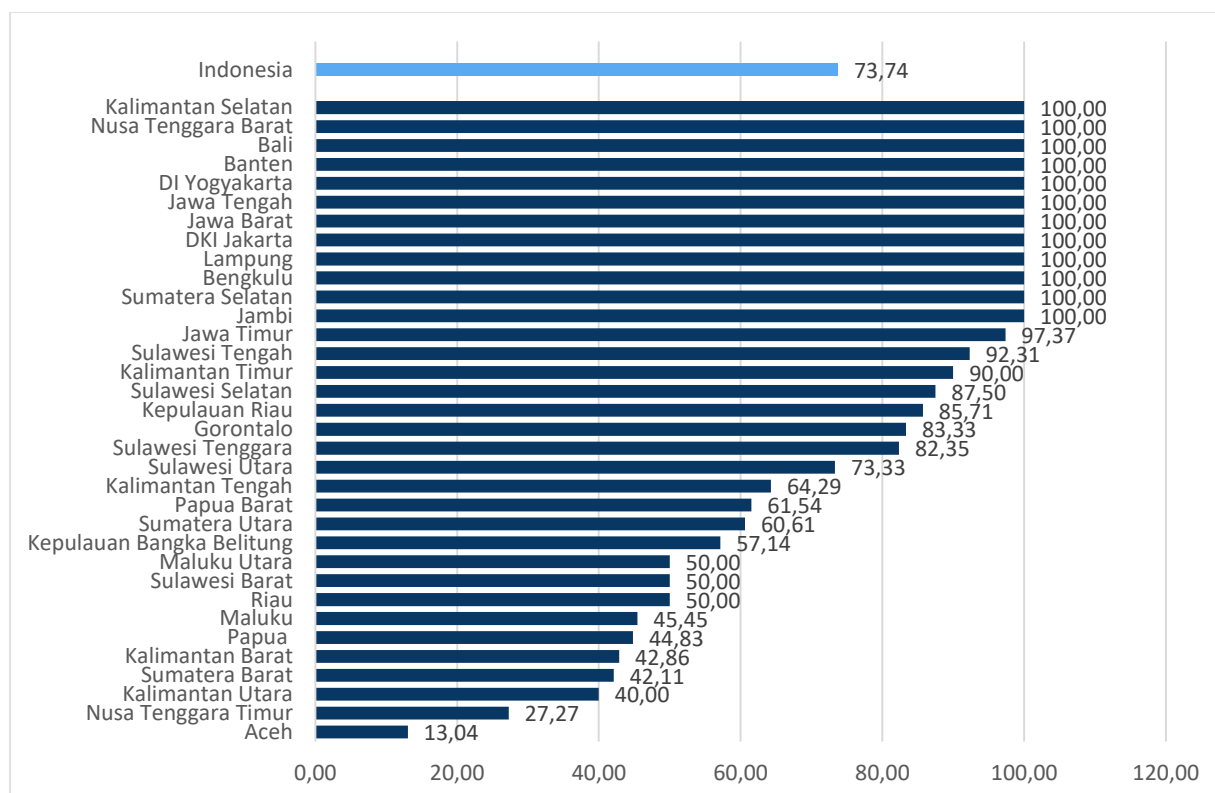
GAMBAR 5.37
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG
MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI
TAHUN 2015-2019



Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2019

Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi sampai dengan tahun 2017 cenderung meningkat, namun pada tahun 2018 menurun menjadi 72,76%. Pada tahun 2019, terdapat 73,74% kabupaten/kota yang telah mencapai 80% imunisasi dasar lengkap, tetapi angka ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 95% (Gambar 5.37).

GAMBAR 5.38
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP
PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



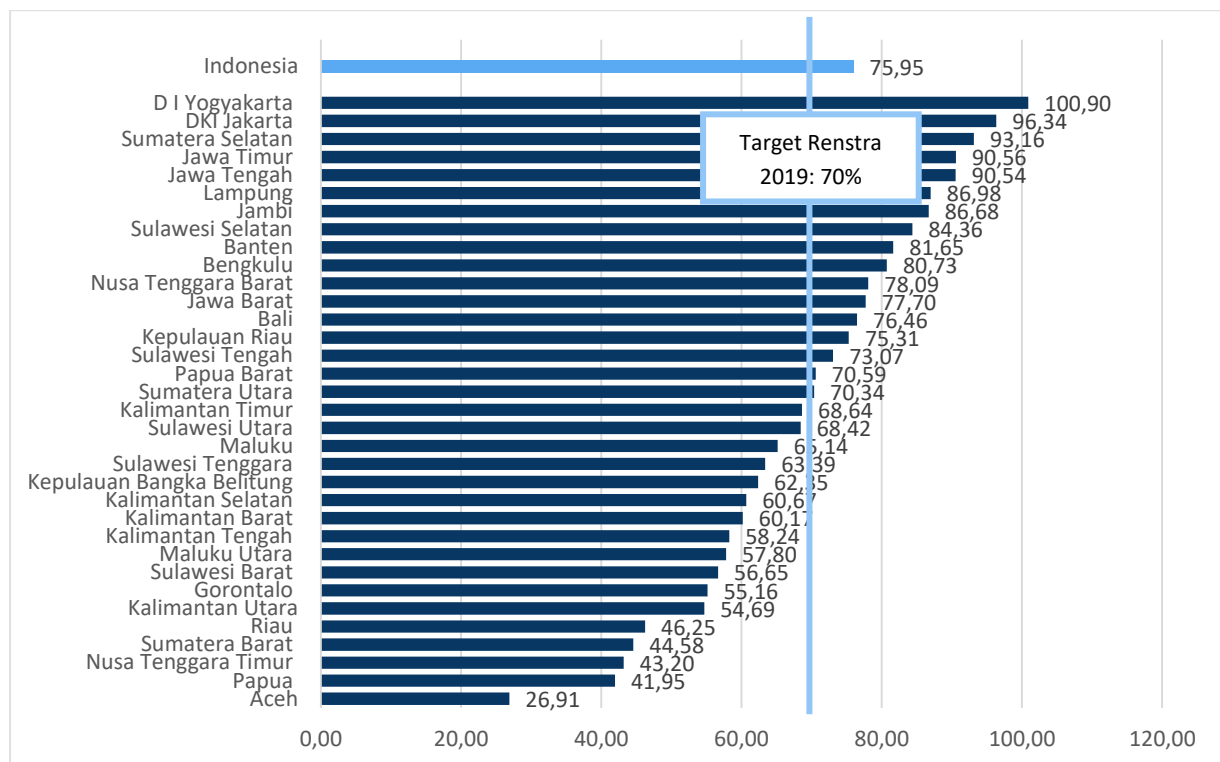
Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020

Pada Gambar 5.35 diketahui bahwa ada dua belas provinsi yang 100% kabupaten/kotanya telah mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Aceh (13,04%) dan Nusa Tenggara Timur (27,27%). Rincian lengkap mengenai persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Lampiran 39.c.

e. Imunisasi Lanjutan pada Anak Baduta

Imunisasi lanjutan pada anak baduta diperlukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan agar tetap tinggi sehingga dapat memberikan perlindungan dengan optimal. Pemberian imunisasi pada anak perlu ditambah dengan dosis lanjutan (*booster*) untuk meningkatkan kekebalannya yang diberikan pada usia 18 bulan. Perlindungan optimal dari pemberian imunisasi lanjutan ini hanya didapat apabila anak tersebut telah mendapat imunisasi dasar secara lengkap. Karena itu, sejak tahun 2014, secara nasional program imunisasi lanjutan masuk ke dalam program imunisasi rutin dengan memberikan 1 dosis DPT-HB-HiB(4) dan campak/MR(2) kepada anak usia 18-24 bulan.

GAMBAR 5.39
CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-HIB (4) PADA ANAK BADUTA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020

Cakupan anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-HiB(4) pada tahun 2019 adalah 75,95%. Angka ini telah memenuhi target Renstra tahun 2019 yaitu 70%. Namun 50% provinsi masih belum dapat mencapai target. Provinsi dengan cakupan terendah adalah Aceh (26,91%), Papua (41,95%) dan Nusa Tenggara Timur (43,2%). Rincian lengkap mengenai cakupan imunisasi lanjutan DPT-HB-HIB (4) dan campak/MR (2) pada anak baduta dapat dilihat pada Lampiran 40.a.

f. Imunisasi Anak Sekolah

Pada kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), imunisasi lanjutan diberikan pada anak usia sekolah dasar dan diberikan secara terintegrasi dengan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Imunisasi yang diberikan adalah imunisasi campak, tetanus dan difteri. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, pemberian imunisasi pada BIAS yang sebelumnya diberikan pada anak kelas 1, 2 dan 3 SD berubah menjadi diberikan pada kelas 1 (campak dan DT), 2 (Td) dan 5 SD (Td). Pada tahun 2017-2018, pemberian imunisasi pada BIAS hanya dilakukan pada kelas 1 dan 2 saja, sedangkan kelas 5 SD akan dilakukan mulai tahun 2019.

Cakupan imunisasi campak pada anak kelas 1 SD tahun 2019 sebesar 89,4%, imunisasi DT pada anak kelas 1 SD sebesar 90,07%, dan imunisasi Td anak kelas 2 SD sebesar 90,71%. Rincian cakupan imunisasi anak sekolah menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 40.b.

3. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

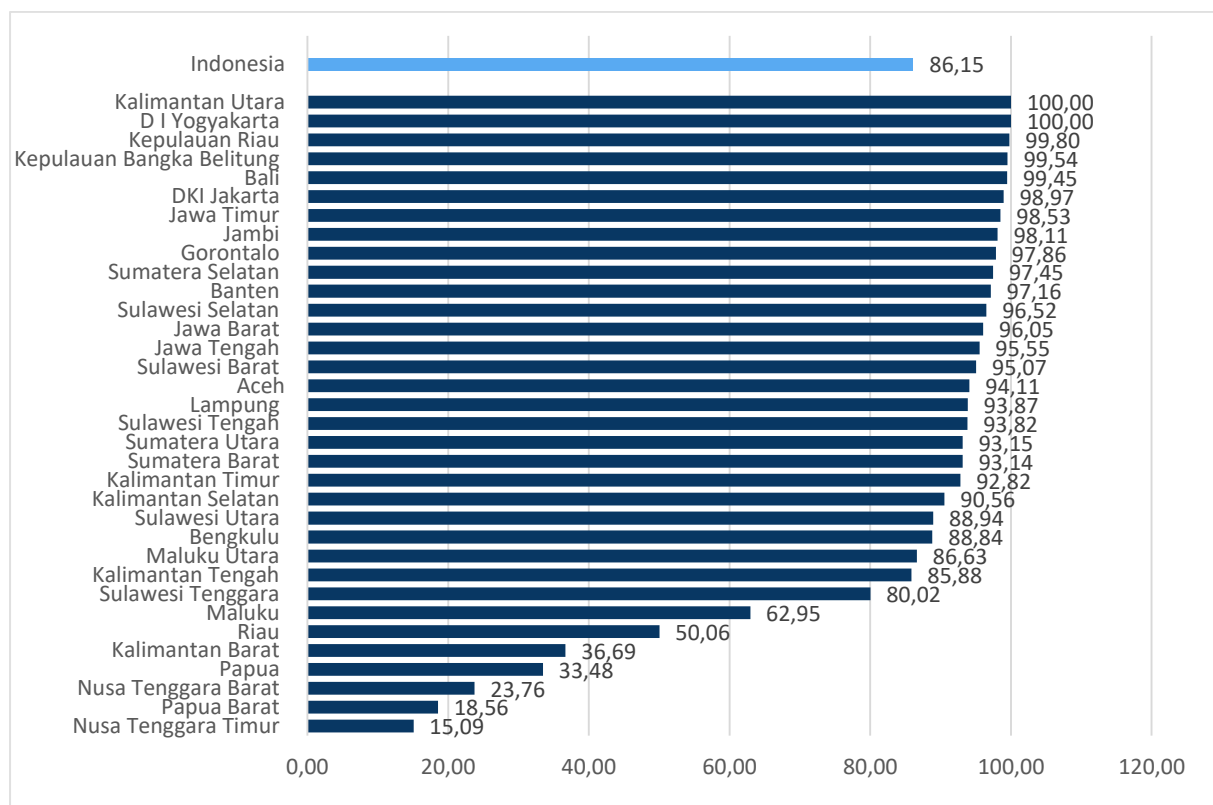
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak pasal 28, pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja dilakukan melalui usaha kesehatan sekolah dan pelayanan kesehatan peduli remaja. Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan kegiatan lintas sektor, yang meliputi berbagai upaya antara lain penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pembinaan kantin sekolah sehat, imunisasi, dan pembinaan kader kesehatan sekolah.

Kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di sekolah dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama dengan kader kesehatan sekolah dengan minimal dilakukan pemeriksaan status gizi (tinggi badan dan berat badan), pemeriksaan gigi, tajam penglihatan, dan tajam pendengaran.

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah bertujuan untuk mendeteksi dini risiko penyakit pada anak sekolah agar dapat ditindaklanjuti secara dini, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, sehingga dapat menunjang proses belajar mereka dan pada akhirnya menciptakan anak usia sekolah yang sehat dan berprestasi.

Hasil dari pelayanan kesehatan di sekolah juga dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi UKS bagi puskesmas, sekolah dan Tim Pembina UKS (TP UKS) agar pelaksanaan peningkatan kesehatan anak sekolah dapat lebih tepat sasaran dan tujuan.

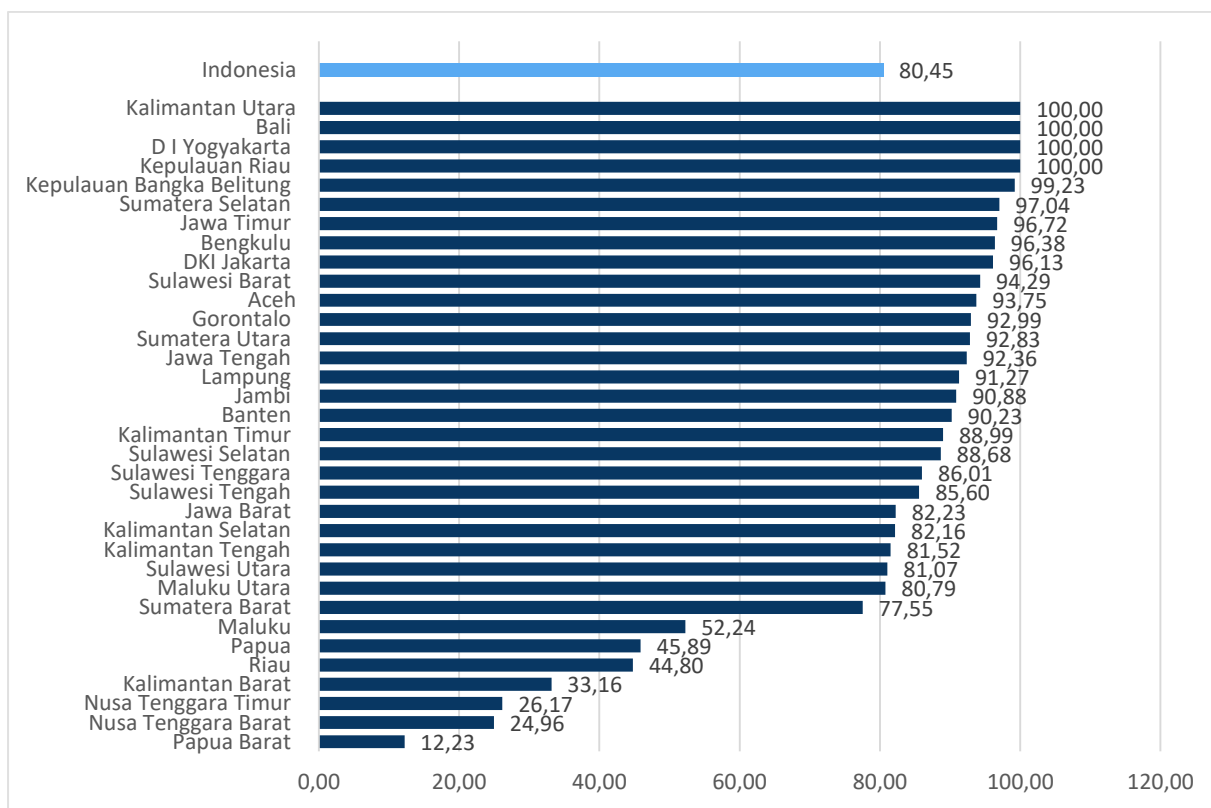
GAMBAR 5.40
CAKUPAN SEKOLAH SD/MI YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Cakupan sekolah SD/MI yang melakukan pelayanan kesehatan di Indonesia pada tahun 2019 adalah 86,15% (Gambar 5.40). Ada dua provinsi yang seluruh sekolah SD/MI telah melakukan pelayanan kesehatan yaitu Kalimantan Utara dan DI Yogyakarta. Provinsi dengan cakupan terendah sekolah SD/MI yang melakukan pelayanan kesehatan adalah Nusa Tenggara Timur (15,09%), Papua Barat (18,56%), dan Nusa Tenggara Barat (23,76%).

GAMBAR 5.41
CAKUPAN SEKOLAH SMP/MTS YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

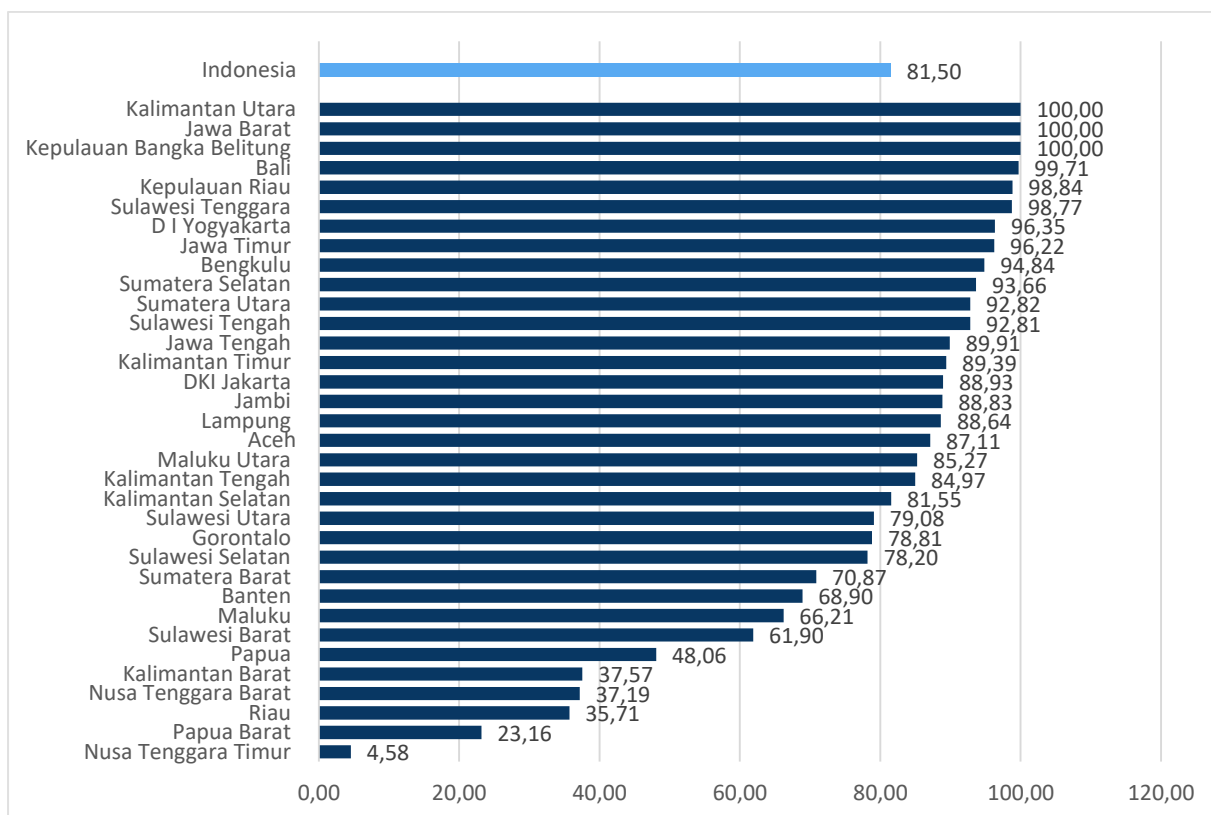


Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Cakupan sekolah SMP/MTs yang melakukan pelayanan kesehatan di Indonesia pada tahun 2019 adalah 80,45% (Gambar 5.41). Ada empat provinsi yang seluruh sekolah SMP/MTs telah melakukan pelayanan kesehatan yaitu Kalimantan Utara, Bali, DI Yogyakarta, dan Kepulauan Riau. Provinsi dengan cakupan terendah sekolah SMP/MTs yang melakukan pelayanan kesehatan adalah Papua Barat (12,23%), Nusa Tenggara Barat (24,96%), dan Nusa Tenggara Timur (26,17%).

GAMBAR 5.42

**CAKUPAN SEKOLAH SMA/MA YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019**



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Cakupan sekolah SMA/MA yang melakukan pelayanan kesehatan di Indonesia pada tahun 2019 adalah 81,5% (Gambar 5.41). Ada empat provinsi yang seluruh sekolah SMA/MA telah melakukan pelayanan kesehatan yaitu Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi dengan cakupan terendah sekolah SMA/MA yang melakukan pelayanan kesehatan adalah Nusa Tenggara Timur (4,58%), Papua Barat (23,16%), dan Riau (35,71%). Rincian lengkap mengenai cakupan pelayanan kesehatan peserta didik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA dapat dilihat pada Lampiran 45.

C. GIZI

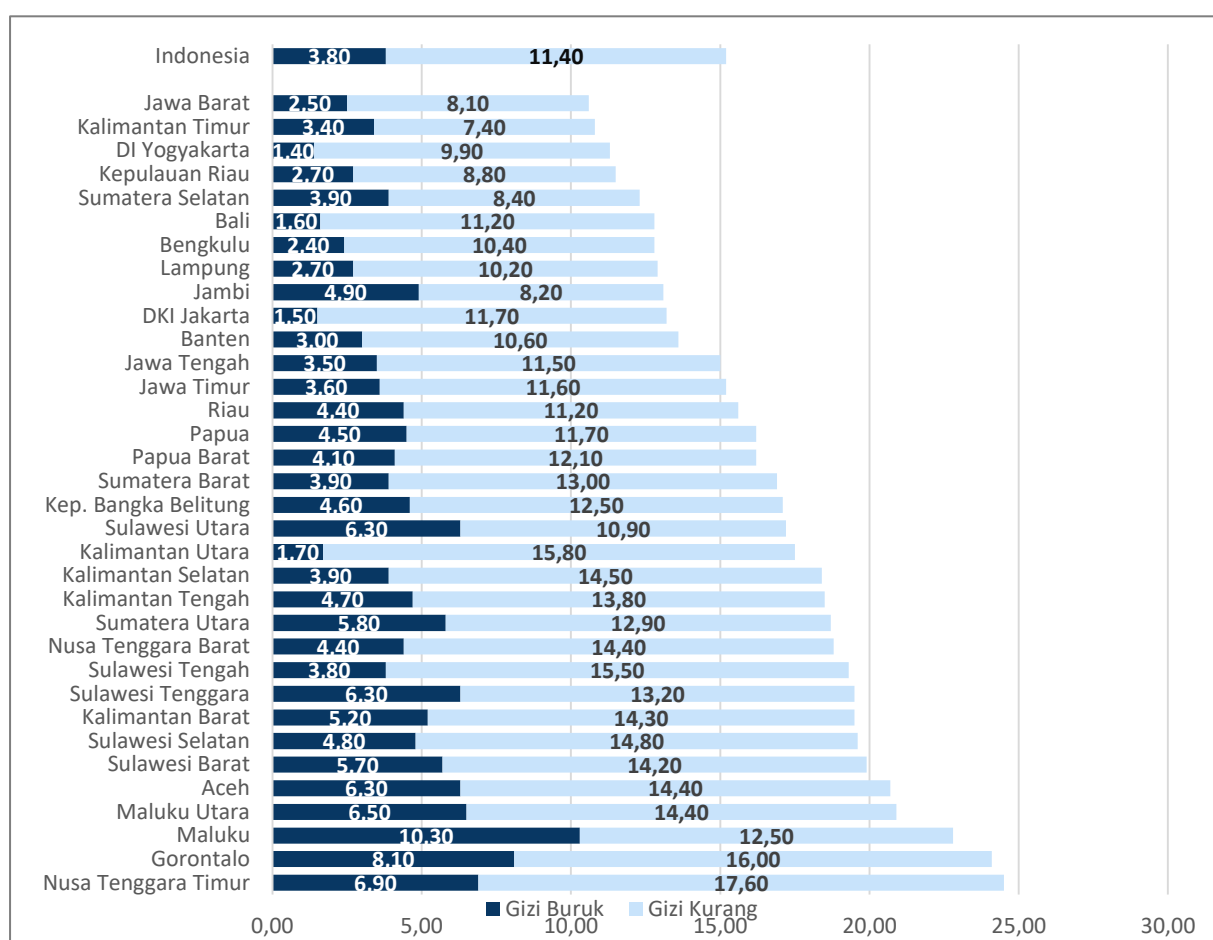
Pada sub bab gizi ini akan dibahas terkait status gizi balita dan upaya pencegahan serta penanganan masalah gizi yaitu pemberian ASI eksklusif pada bayi usia sampai dengan 6 bulan, pemberian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, pemberian tablet tambah darah (TTD) pada remaja putri, serta pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK dan balita kurus.

1. Status Gizi Balita

Pengukuran status gizi didasarkan atas Standar *World Health Organization* (WHO, 2005) yang telah ditetapkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak. Menurut standar tersebut, status gizi balita dapat diukur berdasarkan tiga indeks, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB).

Gizi kurang dan gizi buruk merupakan status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa persentase gizi buruk pada balita usia 0-23 bulan di Indonesia adalah 3,8%, sedangkan persentase gizi kurang adalah 11,4%. Hal tersebut tidak berbeda jauh dengan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2017, yaitu persentase gizi buruk pada balita usia 0-23 bulan sebesar 3,5% dan persentase gizi kurang sebesar 11,3%. Provinsi dengan persentase tertinggi gizi buruk dan gizi kurang pada balita usia 0-23 bulan tahun 2018 adalah Nusa Tenggara Timur, sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Jawa Barat.

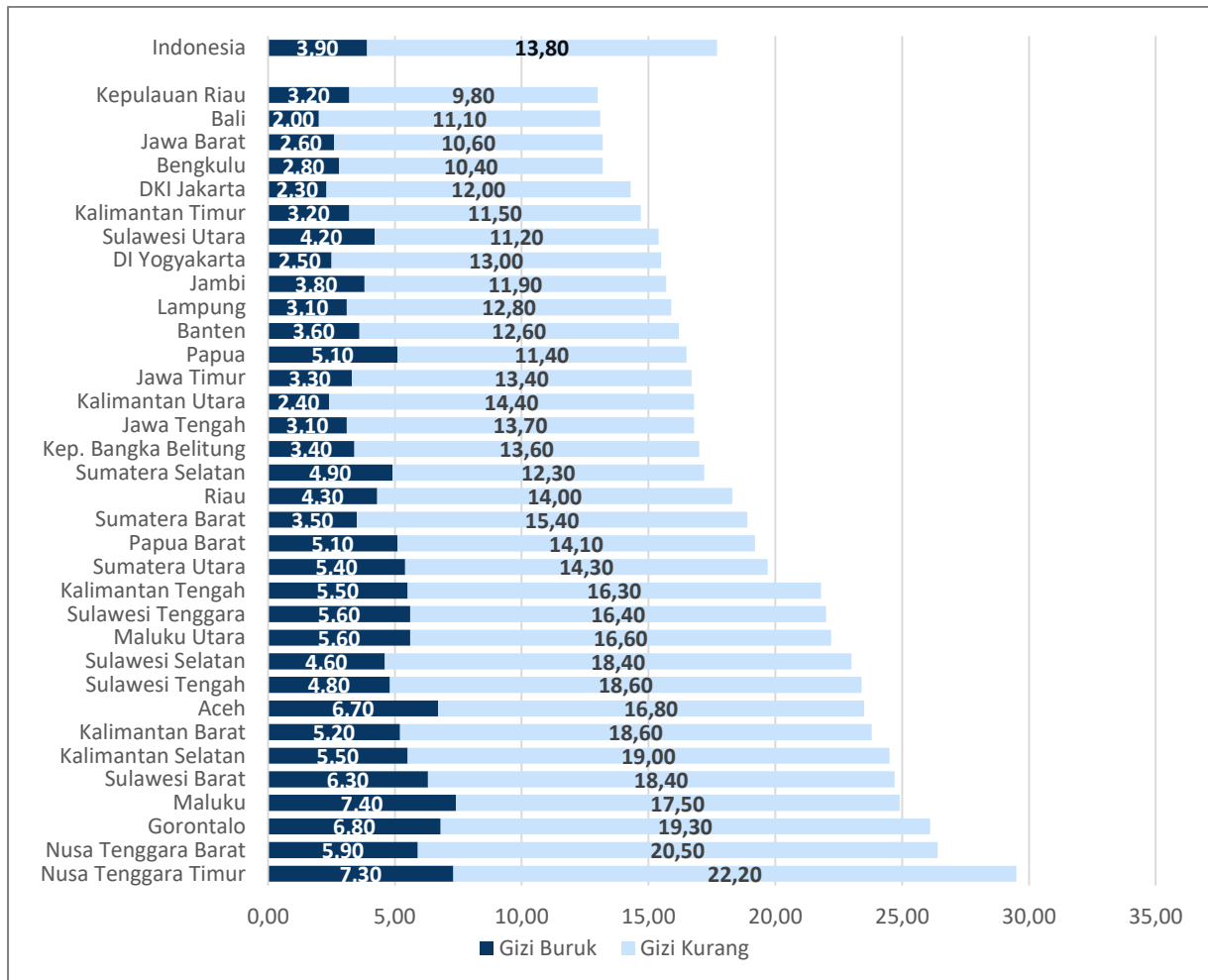
GAMBAR 5.43
PERSENTASE GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA 0-23 BULAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018



Sumber: Riskesdas 2018, Balitbangkes Kemenkes RI 2019

Pada balita usia 0-59 bulan, hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menyatakan bahwa persentase gizi buruk di Indonesia adalah 3,9%, sedangkan persentase gizi kurang adalah 13,8%. Hal tersebut tidak berbeda jauh dengan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2017, yaitu persentase gizi buruk pada balita usia 0-59 bulan sebesar 3,8% dan persentase gizi kurang sebesar 14,0%. Provinsi dengan persentase tertinggi gizi buruk dan gizi kurang pada balita usia 0-59 bulan tahun 2018 adalah Nusa Tenggara Timur, sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Kepulauan Riau.

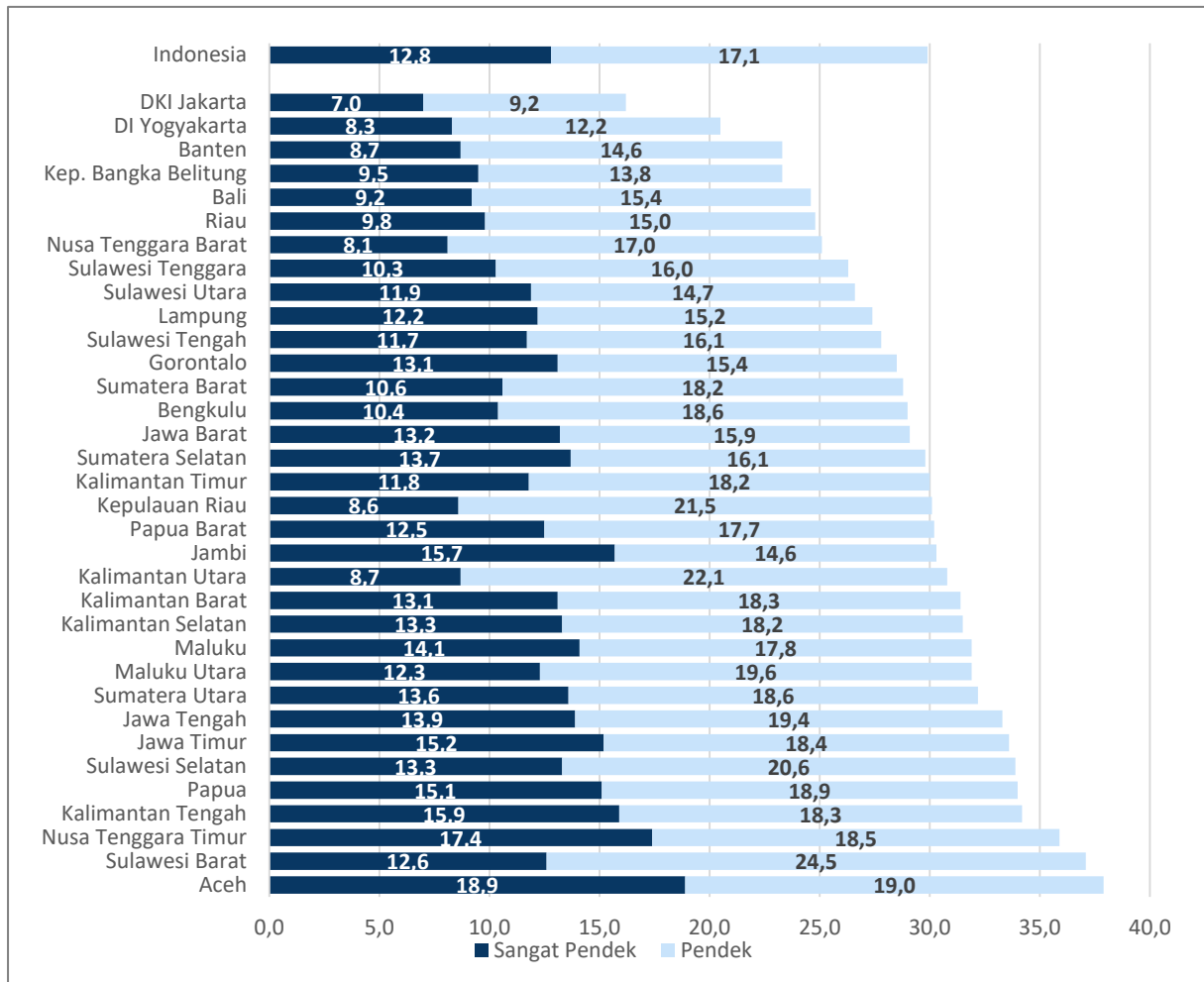
GAMBAR 5.44
PERSENTASE GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018



Sumber: Riskesdas 2018, Balitbangkes Kemenkes RI 2019

Pendek dan sangat pendek atau yang sering disebut sebagai *stunting* merupakan status gizi yang berdasarkan pada indeks tinggi badan menurut umur. Persentase balita sangat pendek dan pendek usia 0-23 bulan di Indonesia tahun 2018 yaitu 12,8% dan 17,1%. Kondisi ini meningkat dari tahun sebelumnya dimana persentase balita sangat pendek yaitu sebesar 6,9% dan balita pendek sebesar 13,2%. Pada tahun 2018, Provinsi Aceh memiliki persentase tertinggi balita sangat pendek dan pendek usia 0-23 bulan, sedangkan Provinsi DKI Jakarta memiliki persentase terendah untuk kategori tersebut.

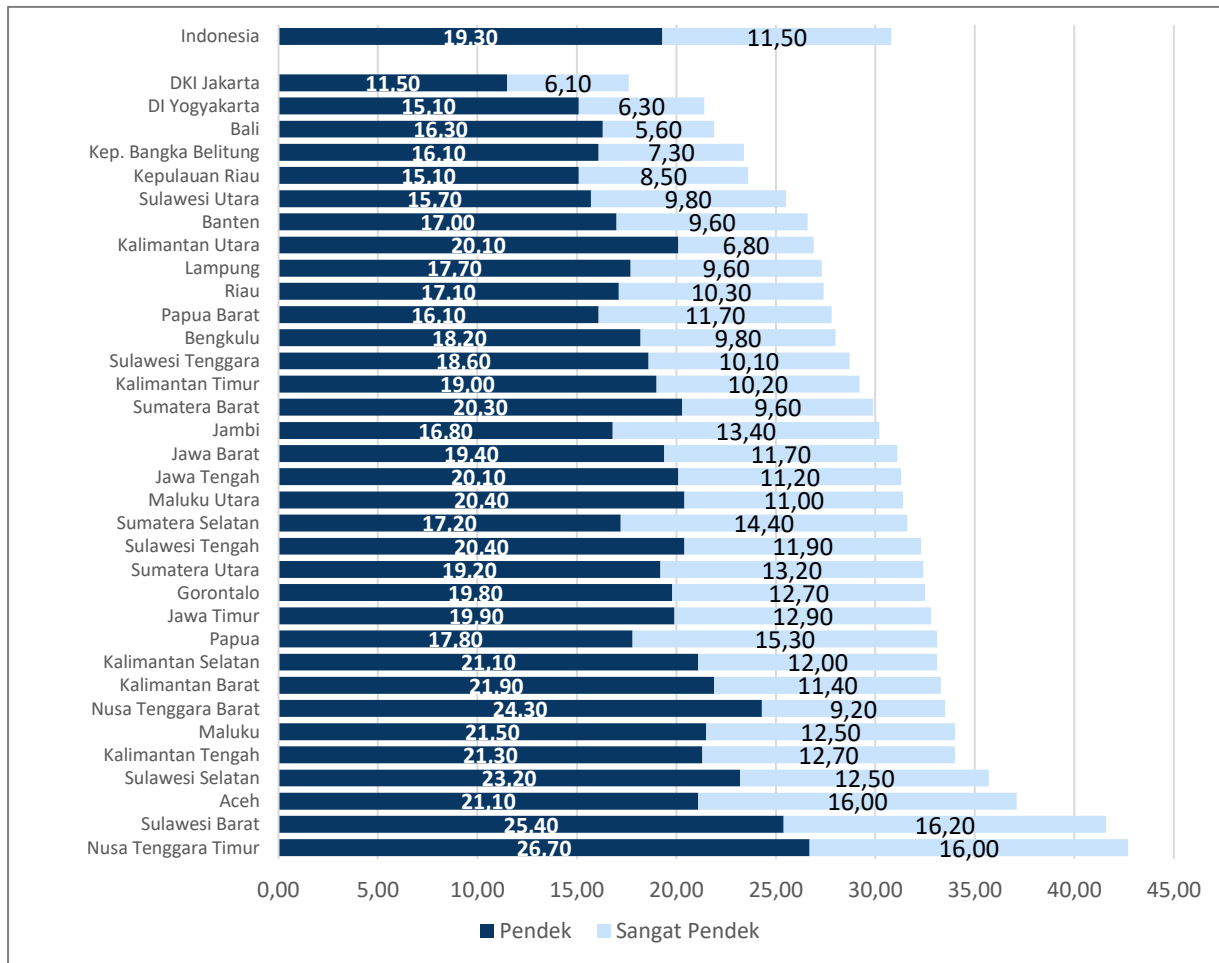
GAMBAR 5.45
PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK PADA BALITA 0-23 BULAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018



Sumber: Riskesdas 2018, Balitbangkes Kemenkes RI 2019

Persentase balita sangat pendek dan pendek usia 0-59 bulan di Indonesia tahun 2018 adalah 11,5% dan 19,3%. Kondisi ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu persentase balita usia 0-59 bulan sangat pendek sebesar 9,8% dan balita pendek sebesar 19,8%. Provinsi dengan persentase tertinggi balita sangat pendek dan pendek pada usia 0-59 bulan tahun 2018 adalah Nusa Tenggara Timur, sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah DKI Jakarta.

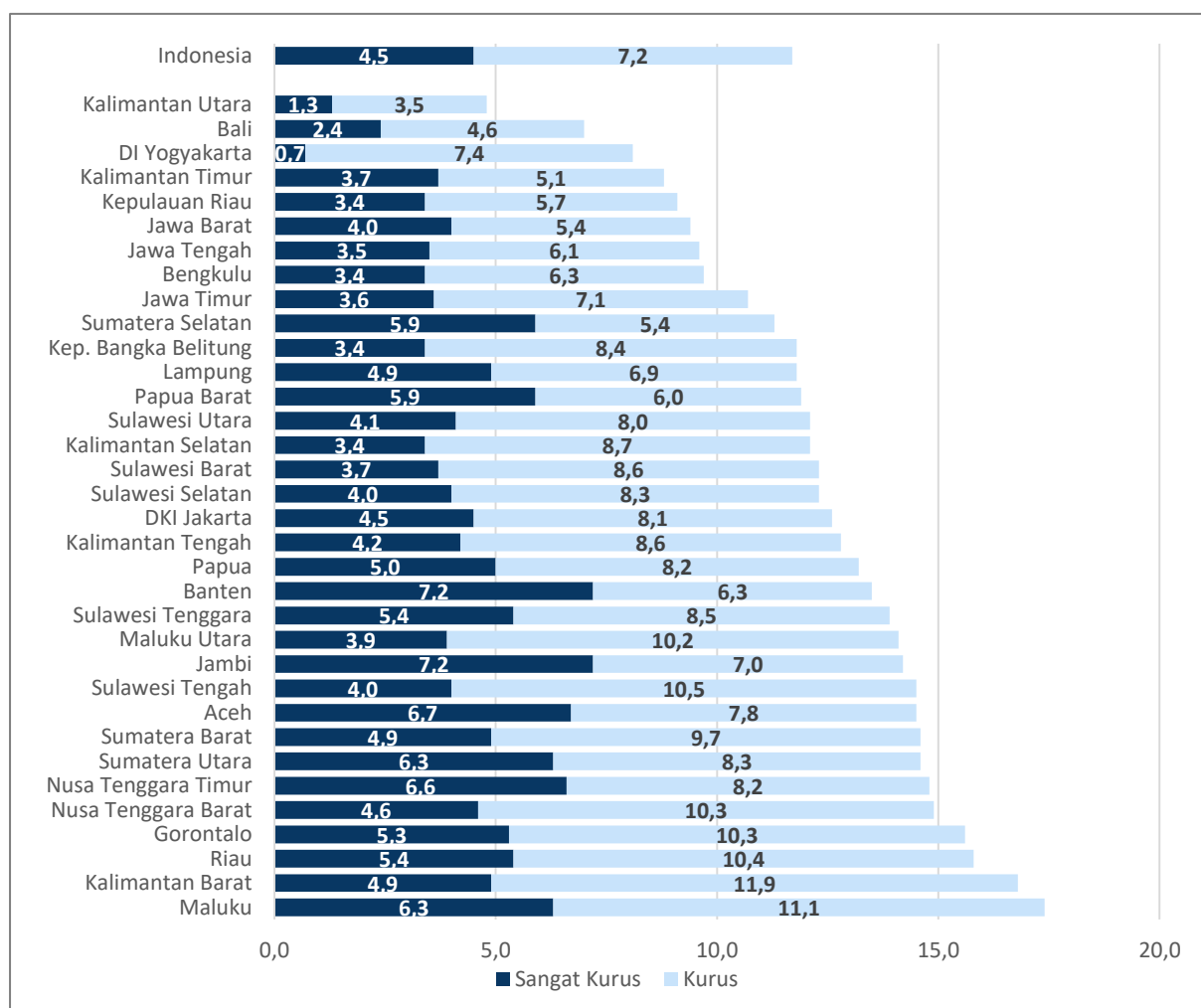
GAMBAR 5.46
PERSENTASE PENDEK DAN SANGAT PENDEK PADA BALITA 0-59 BULAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018



Sumber: Riskesdas 2018, Balitbangkes Kemenkes RI 2019

Kategori balita kurus dan sangat kurus merupakan status gizi yang berdasarkan pada indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Persentase balita sangat kurus dan kurus usia 0-23 bulan di Indonesia pada tahun 2018 adalah 4,5% dan 7,2%. Bila dijumlahkan, persentase ini cenderung turun jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2017 dimana persentase balita sangat kurus dan kurus sebesar 3,9% dan 8,9%. Meski demikian, persentase balita sangat kurus usia 0-23 bulan tahun 2018 mengalami kenaikan. Provinsi Maluku memiliki persentase tertinggi balita sangat kurus dan kurus usia 0-23 bulan tahun 2018, sedangkan Provinsi Kalimantan Utara memiliki persentase terendah balita usia 0-23 bulan sangat kurus dan kurus.

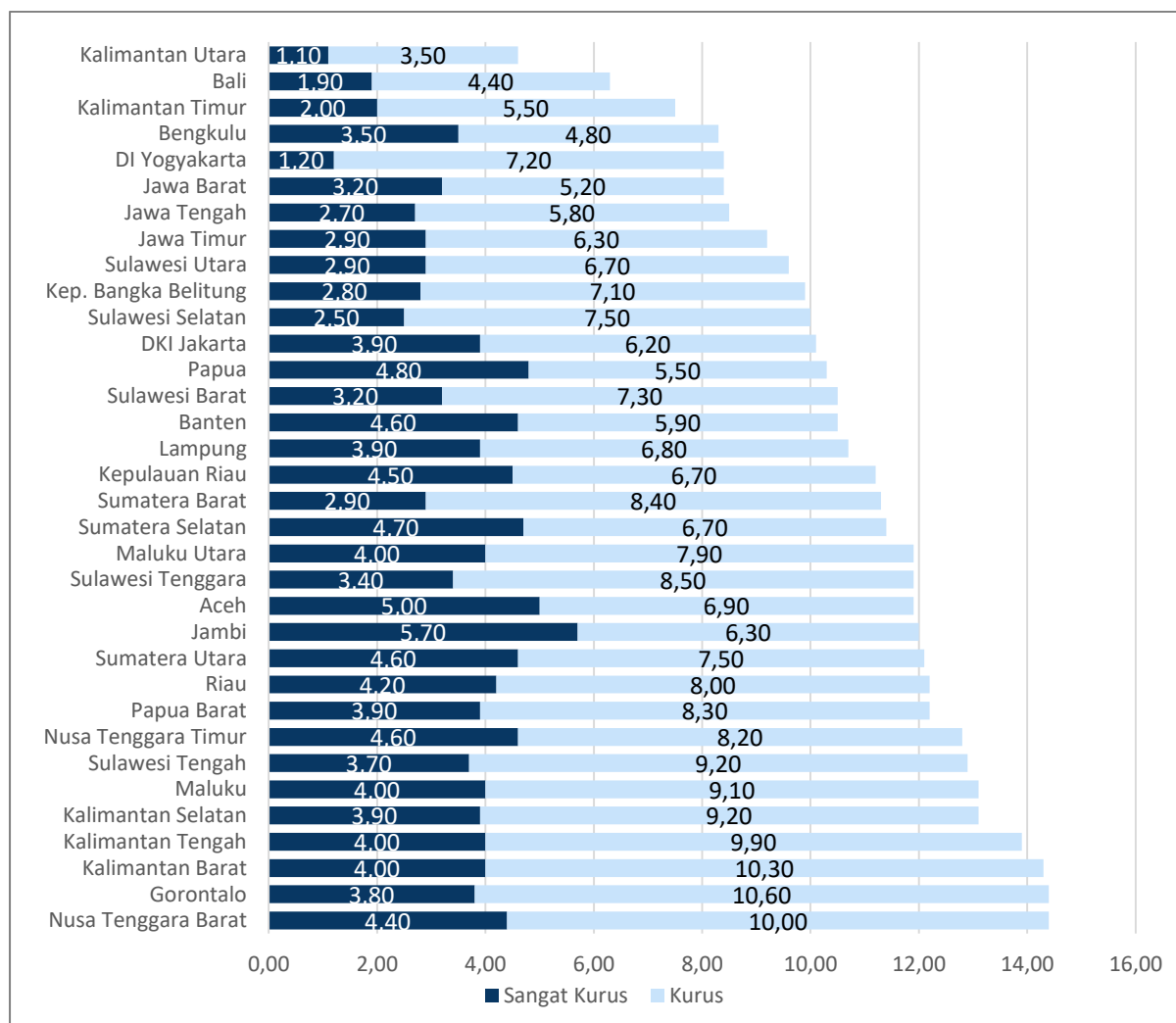
GAMBAR 5.47
PERSENTASE KURUS DAN SANGAT KURUS PADA BALITA 0-23 BULAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018



Sumber: Riskesdas 2018, Balitbangkes Kemenkes RI 2019

Persentase balita usia 0-59 bulan di Indonesia pada tahun 2018 sangat kurus yaitu sebesar 3,5% dan kurus sebesar 6,7%. Kondisi ini cenderung mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2017, dimana persentase balita sangat kurus sebesar 2,8% dan kurus sebesar 6,7%. Provinsi dengan persentase tertinggi balita sangat kurus dan kurus usia 0-59 bulan tahun 2018 adalah Nusa Tenggara Barat, sedangkan provinsi dengan persentase terendah balita sangat kurus dan kurus adalah Kalimantan Utara. Data mengenai status gizi balita selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5.22-5.27.

GAMBAR 5.48
PERSENTASE KURUS DAN SANGAT KURUS PADA BALITA 0-59 BULAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018

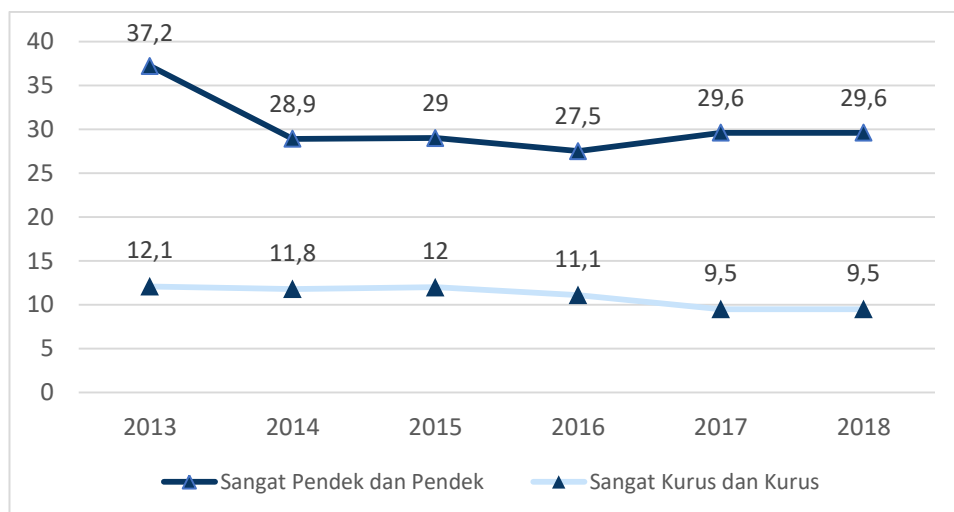


Sumber: Riskesdas 2018, Balitbangkes Kemenkes RI 2019

Tren persentase pada balita usia 0-59 bulan sangat pendek dan pendek di Indonesia sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 cenderung tidak mengalami perubahan yang berarti, dimana pada tahun 2014 persentasenya sebesar 28,9%, sedangkan pada tahun 2018 persentasenya sebesar 29,6%. Meski demikian, persentase pada tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu dari 37,2% menjadi 28,9% pada tahun 2014.

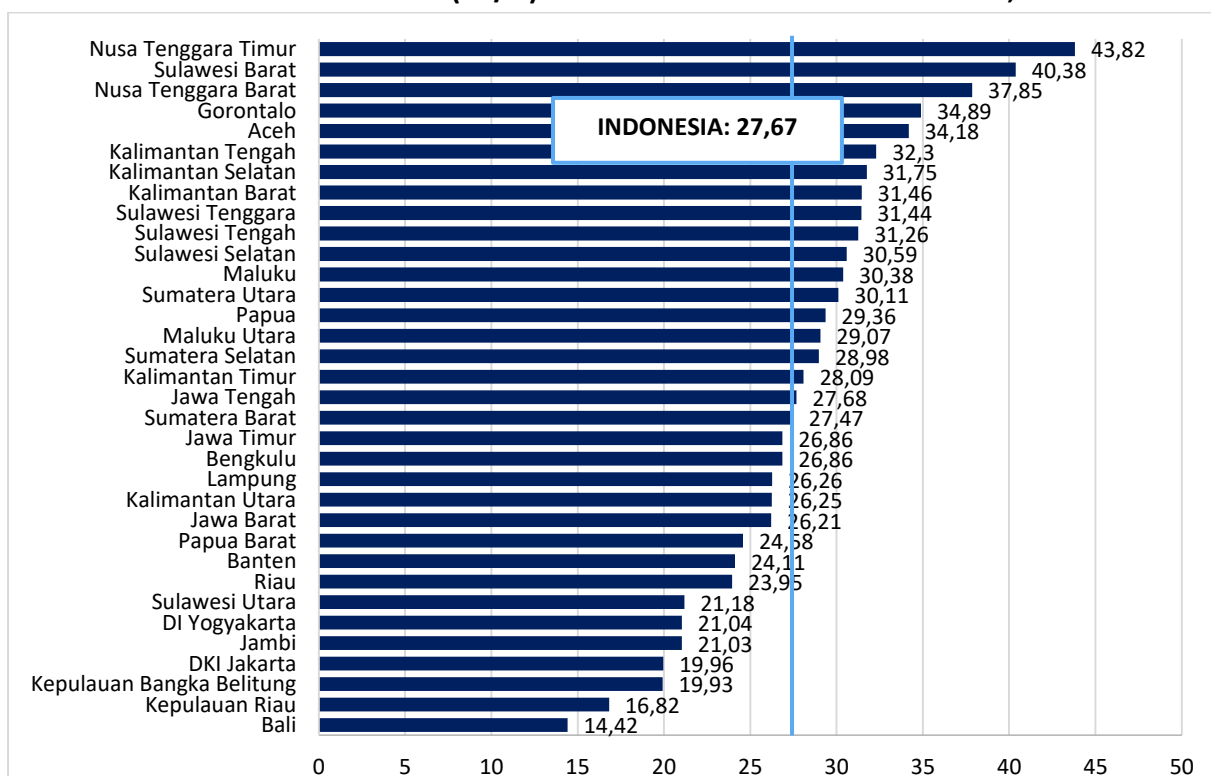
Tren persentase sangat kurus dan kurus pada balita usia 0-59 bulan di Indonesia sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 secara umum mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dimana pada tahun 2013 persentase balita sangat kurus dan kurus usia 0-59 bulan yaitu 12,1% menjadi 9,5% pada tahun 2018.

GAMBAR 5.49
PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK DAN SANGAT KURUS DAN KURUS
PADA BALITA 0-59 BULAN DI INDONESIA TAHUN 2013-2018



Sumber: Riskesdas (tahun 2013 dan 2018), Balitbangkes Kemenkes RI
 PSG (tahun 2014-2017), Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI

GAMBAR 5.50
GRAFIK PROPORSI STUNTING (TB/U) PADA BALITA MENURUT PROVINSI,SSGBI 2019



Sumber: Balitbangkes Kemenkes RI, 2020

Berdasarkan gambar 5.50 hasil Survei Status Gizi Balita Terintegrasi (SSGBI) oleh Balitbangkes Kemenkes Republik Indonesia tahun 2019, diketahui bahwa proporsi stunting tertinggi terdapat di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Hasil ini hampir sama dengan Riskesdas tahun 2018, dimana proporsi stunting tertinggi ada di Nusa Tenggara Timur,

Sulawesi Barat, dan Aceh. Sedangkan untuk proporsi stunting terendah menurut SSGBI 2019 ada di Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bali, menurut Riskesdas 2018 terdapat di Bali, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta.

2. Upaya Pencegahan dan Penanganan Masalah Gizi

Dalam rangka menerapkan upaya gizi seimbang, setiap keluarga harus mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi setiap anggota keluarganya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi yaitu dengan cara menimbang berat badan secara teratur, memberikan ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai umur 6 bulan, menu makanan yang bervariasi, menggunakan garam beryodium, dan pemberian suplemen gizi sesuai anjuran petugas kesehatan. Suplemen gizi yang diberikan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi, meliputi kapsul vitamin A, tablet tambah darah (TTD), makanan tambahan untuk ibu hamil, anak balita, dan anak usia sekolah, makanan pendamping ASI, dan bubuk multi vitamin dan mineral.

a. Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif

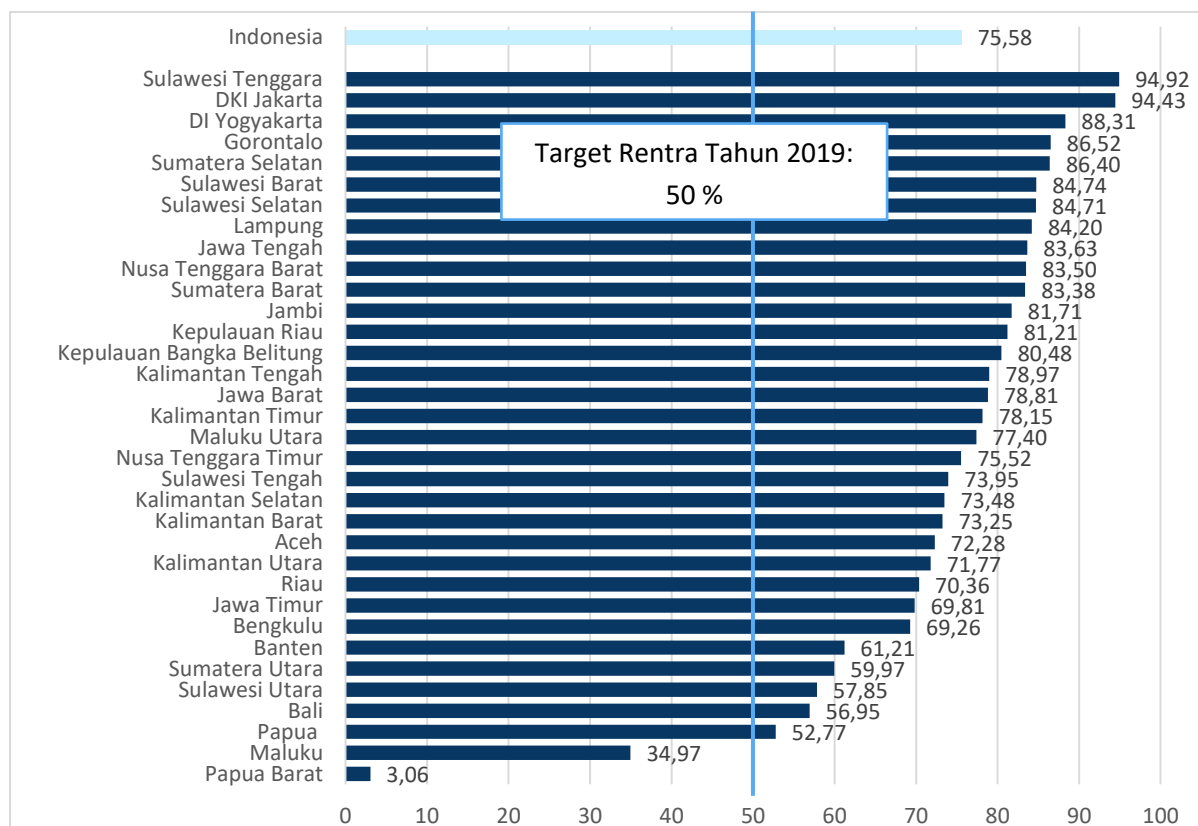
Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi bersentuhan pada kulit ibu yang dilakukan sekurang-kurangnya satu jam segera setelah lahir. Jika kontak tersebut terhalang oleh kain atau dilakukan kurang dari satu jam maka dianggap belum sempurna dan tidak melakukan IMD.

Air Susu Ibu (ASI) eksklusif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin, dan mineral).

ASI mengandung kolostrum yang kaya akan antibodi karena mengandung protein untuk daya tahan tubuh dan bermanfaat untuk mematikan kuman dalam jumlah tinggi sehingga pemberian ASI eksklusif dapat mengurangi risiko kematian pada bayi. Kolostrum berwarna kekuningan yang dihasilkan pada hari pertama sampai dengan hari ketiga. Hari keempat sampai hari kesepuluh ASI mengandung *immunoglobulin*, protein, dan laktosa lebih sedikit dibandingkan kolostrum tetapi lemak dan kalornya lebih tinggi dengan warna susu yang lebih putih. Selain mengandung zat makanan, ASI juga mengandung enzim tertentu yang berfungsi sebagai zat penyerap yang tidak akan mengganggu enzim lain di usus. Susu formula tidak mengandung enzim tersebut sehingga penyerapan makanan sepenuhnya bergantung pada enzim yang terdapat di usus bayi.

Pada tahun 2019, secara nasional persentase bayi baru lahir yang mendapat IMD yaitu sebesar 75,58%. Angka ini telah melampaui target Renstra tahun 2019 yaitu sebesar 50,0%. Provinsi dengan persentase tertinggi bayi baru lahir mendapat IMD adalah Sulawesi Tenggara (94,92%) sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Papua Barat (3,06%). Terdapat dua provinsi yang belum mencapai target Renstra tahun 2019 yaitu Maluku dan Papua Barat.

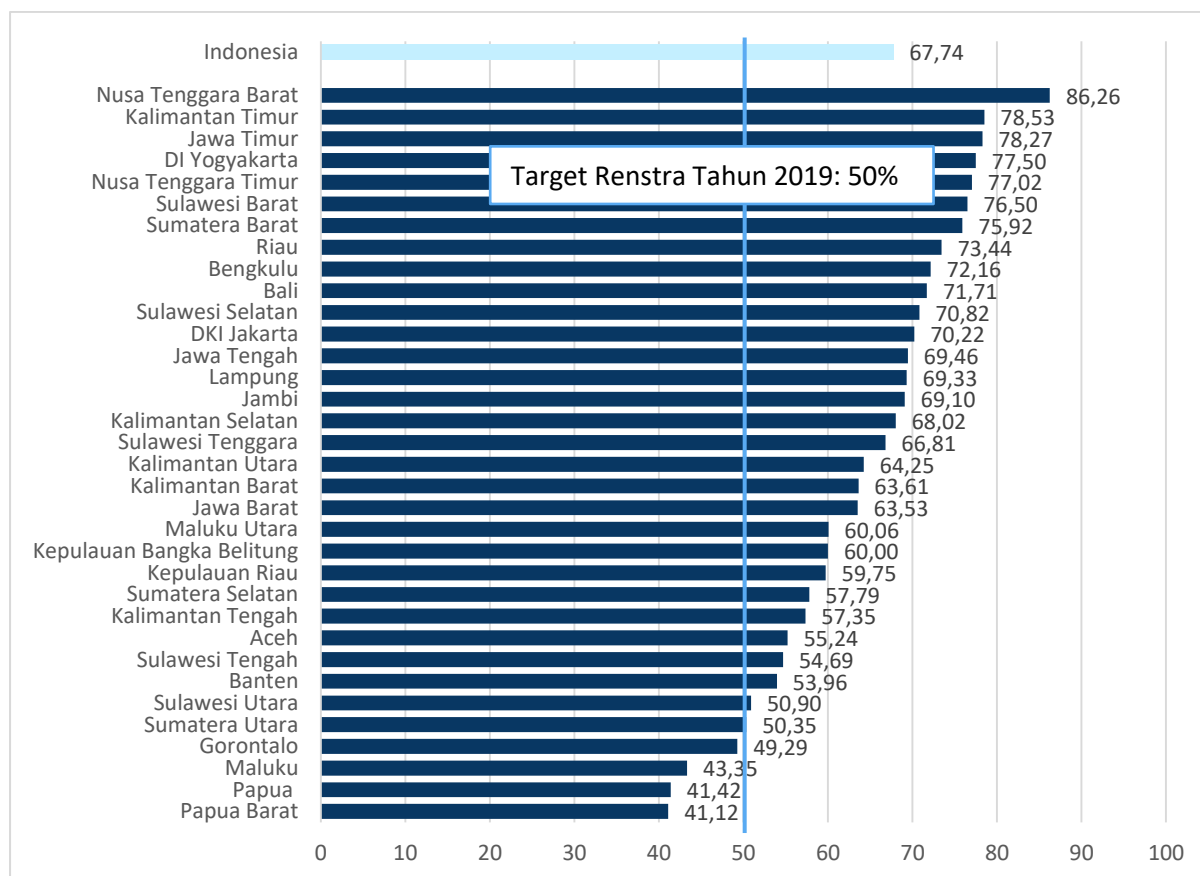
GAMBAR 5.51
CAKUPAN BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI (IMD)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI 2020

Secara nasional, cakupan bayi mendapat ASI eksklusif tahun 2019 yaitu sebesar 67,74%. Angka tersebut sudah melampaui target Renstra tahun 2019 yaitu 50%. Persentase tertinggi cakupan pemberian ASI eksklusif terdapat pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (86,26%), sedangkan persentase terendah terdapat di Provinsi Papua Barat (41,12%). Terdapat empat provinsi yang belum mencapai target Renstra tahun 2019, yaitu Gorontalo, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Cakupan bayi baru lahir mendapatkan IMD dan cakupan bayi mendapat ASI eksklusif selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.28.

GAMBAR 5.52
CAKUPAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



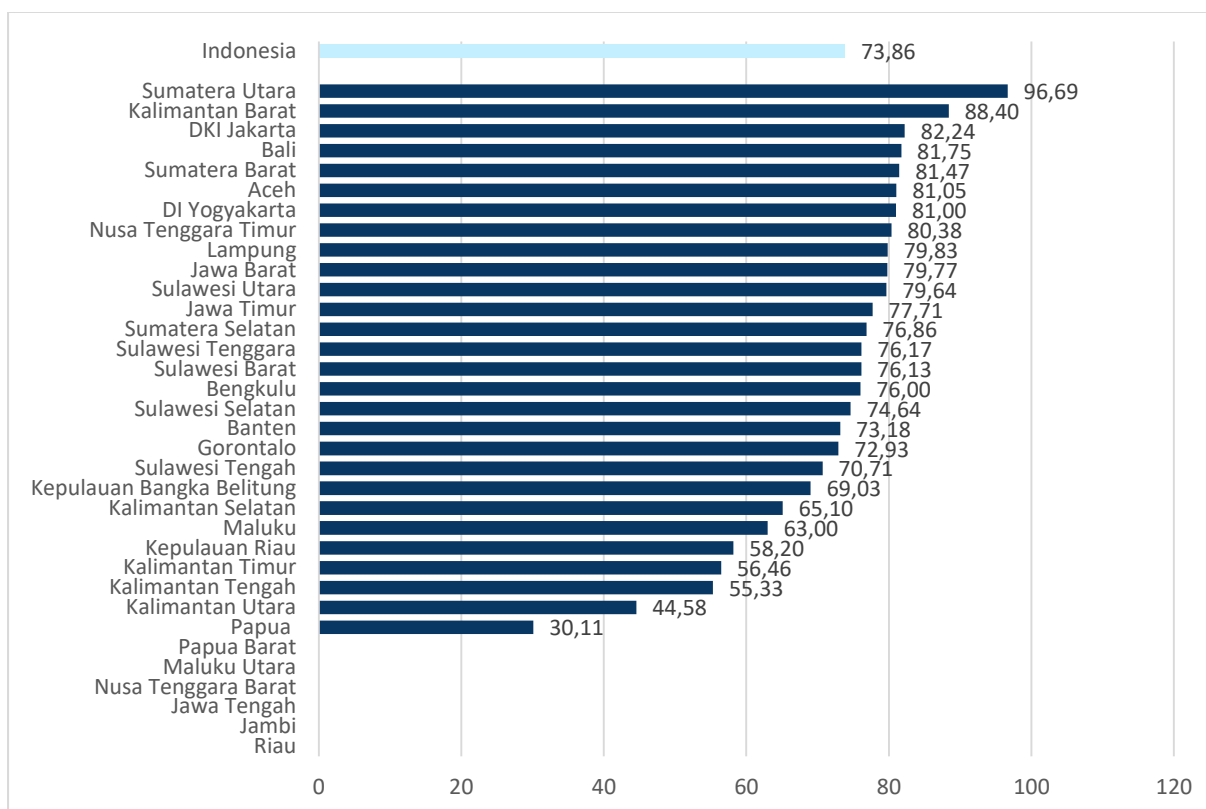
Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI 2020

b. Penimbangan Balita

Penimbangan balita merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pemantauan pertumbuhan. Pemantauan pertumbuhan setiap bulan bertujuan sebagai deteksi dini untuk mencegah terjadinya gagal tumbuh kembang pada balita. Dengan rutin menimbang balita, maka pertumbuhan balita dapat dipantau secara intensif. Jika diketahui berat badan anak tidak naik atau jika ditemukan anak menderita suatu penyakit, dapat segera dilakukan upaya pemulihan dan pencegahan, agar tidak menjadi gizi kurang atau gizi buruk. Semakin cepat ditemukan, kasus gizi kurang atau gizi buruk akan semakin cepat ditangani. Penanganan yang cepat dan tepat sesuai tata laksana kasus anak gizi kurang atau gizi buruk akan mengurangi risiko kematian sehingga angka kematian akibat gizi buruk dapat ditekan.

Persentase rata-rata balita umur 6-59 bulan yang ditimbang di Indonesia pada tahun 2019 adalah 73,86% anak per bulan. Persentase tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 96,69%, sedangkan persentase terendah terdapat di Provinsi Papua yaitu sebesar 30,11%. Masih ada enam provinsi yang belum melaporkan datanya, yaitu Provinsi Riau, Jambi, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat. Data lebih lengkap mengenai rata-rata balita umur 6-59 bulan yang ditimbang per bulan dapat dilihat di lampiran 5.29.

GAMBAR 5.53
PERSENTASE RERATA BALITA UMUR 6-59 BULAN DITIMBANG PER BULAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI 2020

c. Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A Balita Usia 6–59 Bulan

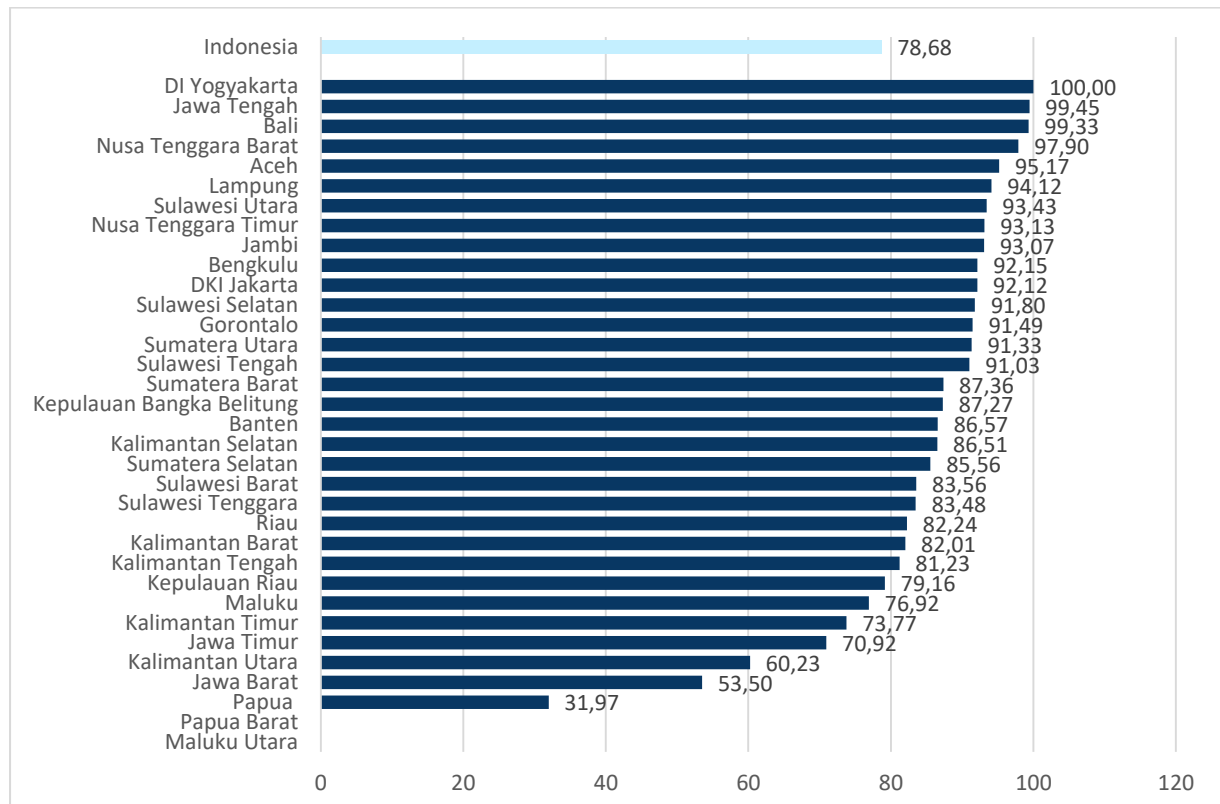
Vitamin A merupakan zat gizi penting yang sangat diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan kebutaan pada anak serta meningkatkan risiko kesakitan dan kematian. Asupan vitamin A dari makanan sehari-hari masih cukup rendah sehingga diperlukan asupan gizi tambahan berupa kapsul vitamin A.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, anak Balita, dan Ibu Nifas, kapsul vitamin A merupakan kapsul lunak dengan ujung (*nipple*) yang dapat digunting, tidak transparan (*opaque*), dan mudah untuk dikonsumsi, termasuk dapat masuk ke dalam mulut balita. Kapsul vitamin A diberikan kepada bayi, anak balita, dan ibu nifas. Kapsul vitamin A bagi bayi usia 6–11 bulan berwarna biru dan mengandung retinol (palmitat/asetat) 100.000 IU, sedangkan kapsul vitamin A untuk anak balita usia 12-59 bulan dan ibu nifas berwarna merah dan mengandung retinol (palmitat/asetat) 200.000 IU.

Sesuai dengan Panduan Manajemen Suplementasi Vitamin A waktu pemberian kapsul vitamin A pada bayi dan anak balita dilaksanakan serentak setiap bulan Februari dan Agustus. Frekuensi pemberian vitamin A pada bayi 6-11 bulan adalah 1 kali sedangkan pada anak balita 12-59 bulan sebanyak 2 kali. Pemberian kapsul vitamin A pada ibu nifas dilakukan sebanyak 2 kali yaitu satu kapsul segera setelah saat persalinan dan satu kapsul lagi pada 24 jam setelah pemberian kapsul pertama.

Cakupan pemberian vitamin A pada balita di Indonesia tahun 2019 yaitu sebesar 76,68%. Provinsi dengan persentase tertinggi cakupan pemberian vitamin A adalah DI Yogyakarta (100,00%), sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Papua (31,97%). Terdapat dua provinsi belum mengumpulkan datanya, yaitu Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat. Capaian pemberian Vitamin A pada balita 6-59 bulan menurut provinsi selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.29.

GAMBAR 5.54
CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BALITA (6-59 BULAN)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI 2020

d. Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri

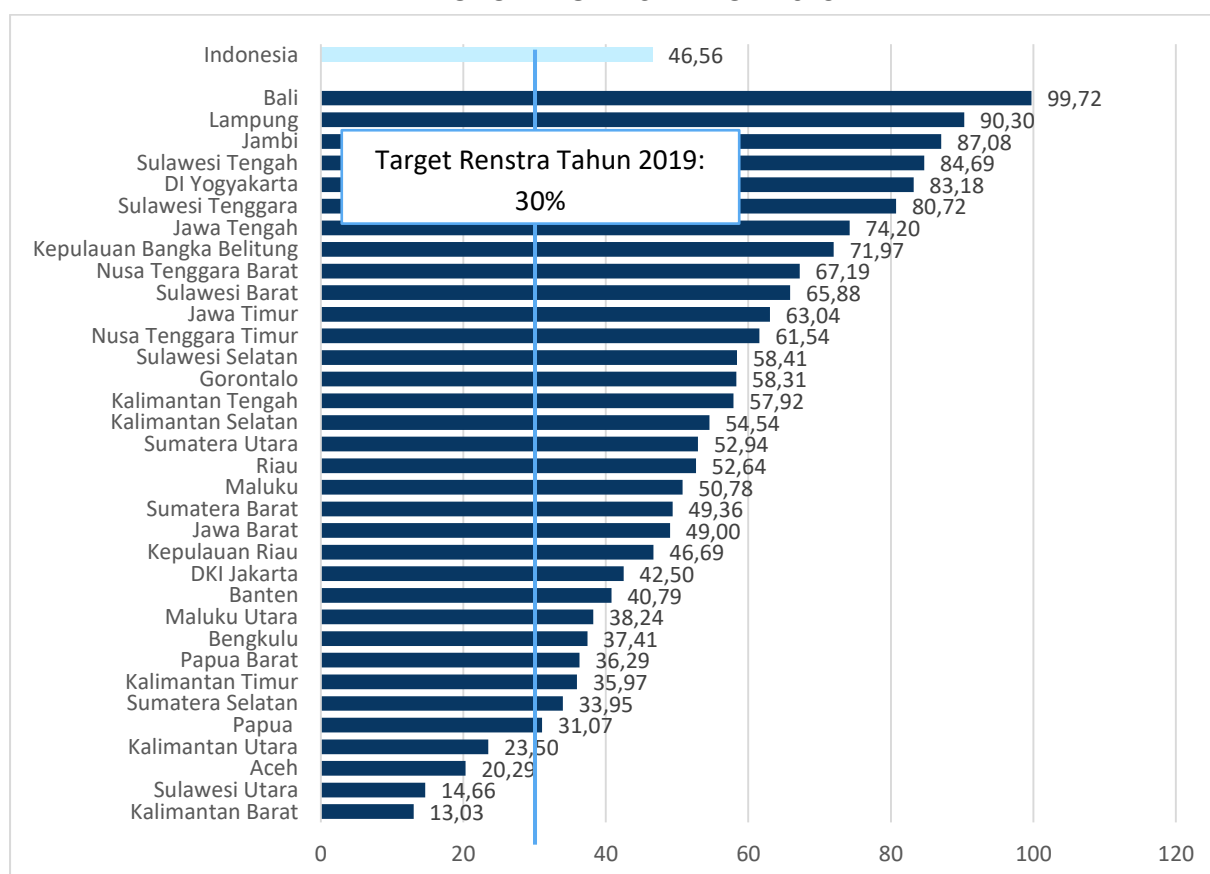
Anemia sering diderita pada wanita usia subur. Hal ini disebabkan karena terjadinya siklus menstruasi pada wanita setiap bulannya. Kekurangan zat besi dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga dapat menyebabkan produktivitas menurun. Asupan zat besi dapat diperoleh melalui makanan bersumber protein hewani seperti hati, ikan, dan daging. Namun tidak semua masyarakat dapat mengonsumsi makanan tersebut, sehingga diperlukan asupan zat besi tambahan yang diperoleh dari tablet tambah darah (TTD).

Pemberian TTD pada remaja putri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan zat besi bagi para remaja putri yang akan menjadi ibu di masa yang akan datang. Dengan cukupnya asupan zat besi sejak dini, diharapkan angka kejadian anemia ibu hamil, pendarahan saat persalinan, BBLR, dan balita pendek dapat menurun.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Nomor HK.03.03/V/0595/2016 tentang Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur, pemberian TTD pada remaja putri dilakukan melalui UKS/M di institusi Pendidikan (SMP dan SMA atau yang sederajat) dengan menentukan hari minum TTD bersama. Dosis yang diberikan adalah satu tablet setiap minggu selama sepanjang tahun.

Cakupan pemberian TTD pada remaja putri di Indonesia pada tahun 2018 adalah 46,56%. Hal ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2019 yaitu 30%. Provinsi dengan persentase tertinggi cakupan pemberian TTD pada remaja putri adalah Bali (99,72%), sedangkan persentase terendah adalah Kalimantan Barat (13,03%). Masih ada empat provinsi belum memenuhi target Renstra tahun 2019 yaitu Aceh, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara. Cakupan pemberian TTD pada remaja putri selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.30.

GAMBAR 5.55
CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) PADA REMAJA PUTRI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI 2020

e. Pemberian Makanan Tambahan pada Ibu Hamil KEK dan Balita Kurus

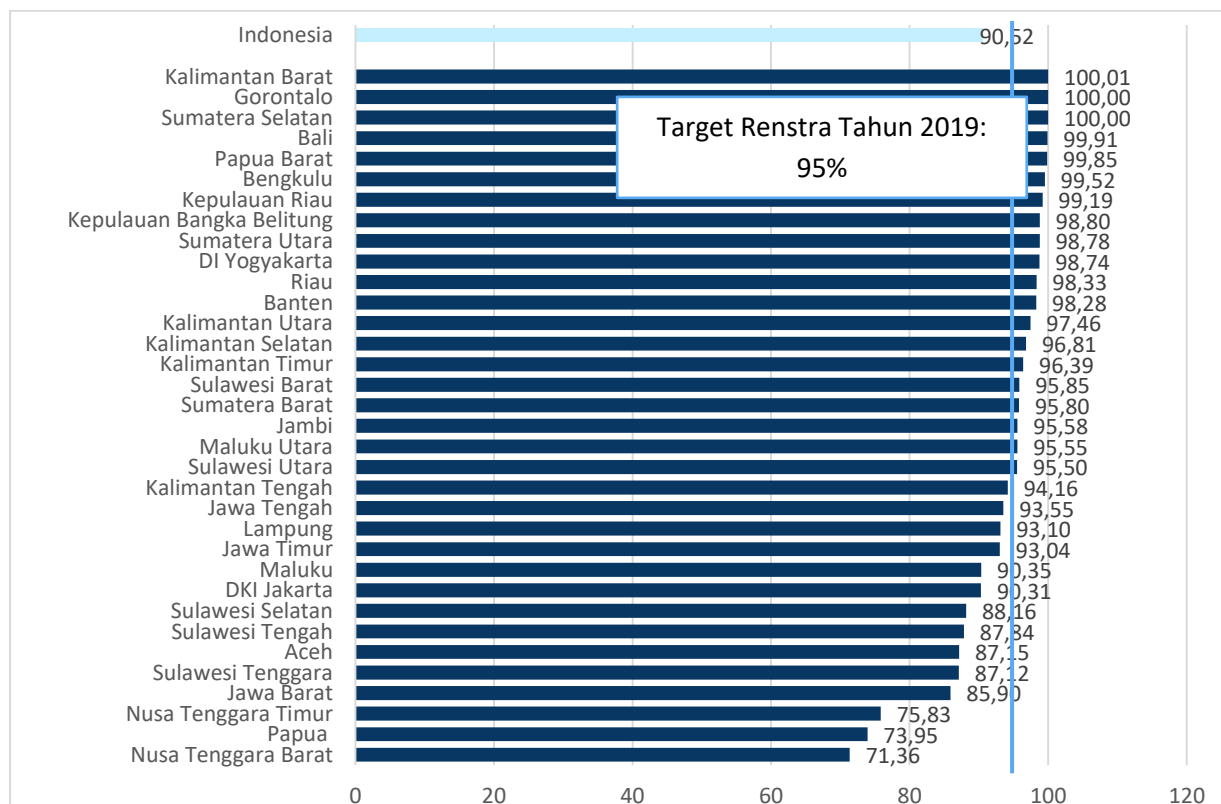
Masa kehamilan memerlukan perhatian khusus karena merupakan periode penting pada 1.000 hari kehidupan. Ibu hamil termasuk salah satu kelompok yang rawan gizi. Asupan gizi ibu hamil sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan janin. Status gizi yang baik pada ibu hamil dapat mencegah terjadinya Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan *stunting* (pendek).

Asupan energi dan protein yang tidak mencukupi pada ibu hamil dapat menyebabkan Kurang Energi Kronis (KEK). Berdasarkan PSG tahun 2016, 53,9% ibu hamil mengalami defisit energi (<70% AKE) dan 13,1% mengalami defisit ringan (70-90% AKE). Untuk kecukupan protein, 51,9% ibu hamil mengalami defisit protein (<80% AKP) dan 18,8% mengalami defisit ringan (80-99% AKP). Salah satu identifikasi ibu hamil KEK adalah memiliki ukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) <23,5cm.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki gizi pada ibu hamil KEK adalah dengan pemberian makanan tambahan. Bentuk makanan tambahan untuk ibu hamil KEK menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi adalah biskuit yang mengandung protein, asam linoleat, karbohidrat, dan diperkaya dengan 11 vitamin dan 7 mineral.

Secara nasional, cakupan ibu hamil KEK mendapat PMT tahun 2019 adalah 90,52%. Namun angka tersebut belum memenuhi target Renstra tahun 2019 sebesar 95%. Provinsi dengan persentase tertinggi ibu hamil KEK mendapat PMT adalah Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Gorontalo, sedangkan persentase terendah adalah Nusa Tenggara Barat (71,36%). Terdapat empat belas provinsi belum memenuhi target Renstra tahun 2019. Cakupan ibu hamil KEK mendapat PMT selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.31.

GAMBAR 5.56
CAKUPAN IBU HAMIL KEK MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN (PMT)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



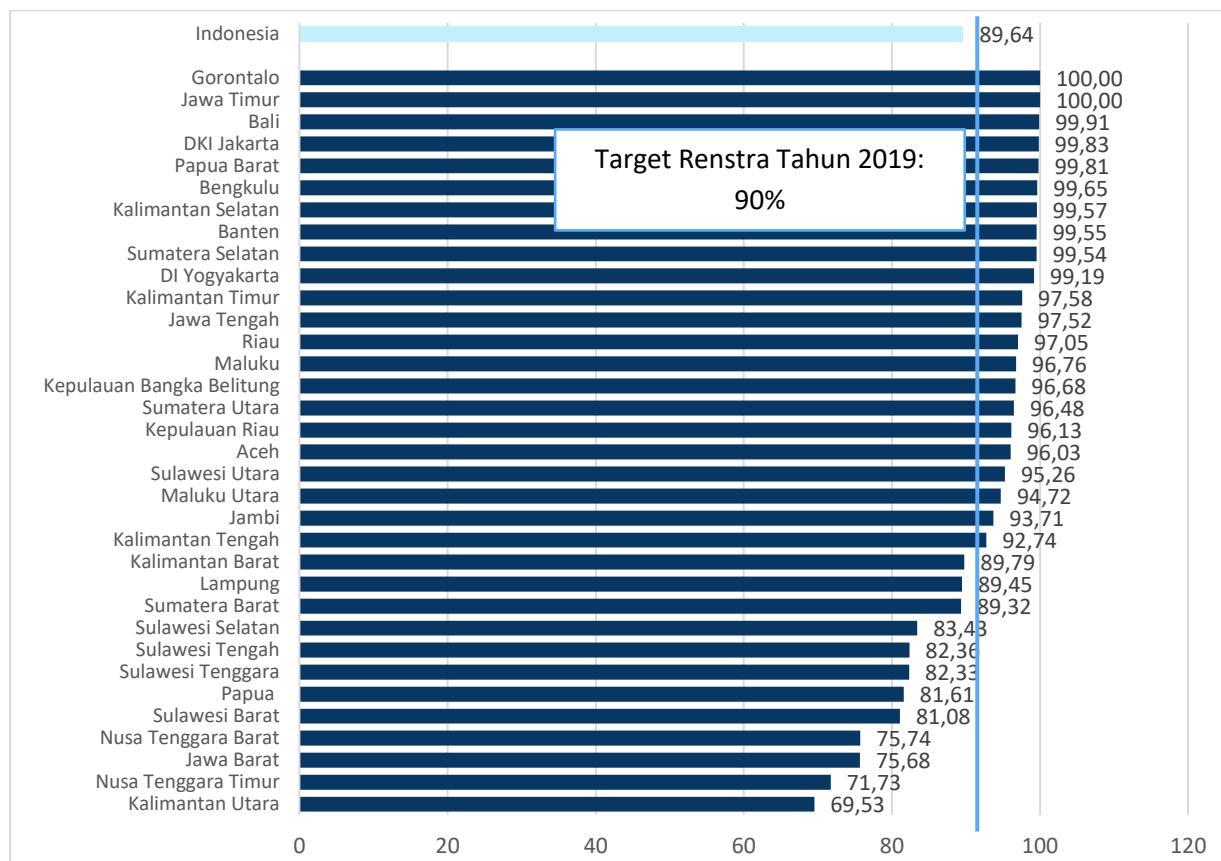
Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI 2019

Balita kurus diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan sebesar minus 3 standar deviasi (-3SD) sampai dengan kurang dari minus 2 standar deviasi (<-2SD). Balita kurus

termasuk dalam kelompok rawan gizi yang membutuhkan suplementasi gizi dalam bentuk pemberian makanan tambahan. Pemberian makanan tambahan diberikan pada balita usia 6 bulan 0 hari sampai dengan 23 bulan 29 hari selama 90 hari berturut-turut. Pemberian makanan tambahan (PMT) pada balita kurus dapat diberikan berupa PMT lokal maupun PMT pabrikan seperti biskuit. Bila perbandingan berat badan terhadap tinggi badan telah mencapai minus 2 standar deviasi (-2 SD) atau lebih atau sesuai dengan perhitungan, maka MT balita kurus dihentikan. Selanjutnya balita tersebut dapat mengkonsumsi makanan keluarga yang memenuhi gizi seimbang serta dilakukan pemantauan berat badan secara rutin agar status gizi balita tidak kembali menjadi kurus.

Persentase balita kurus mendapat PMT di Indonesia tahun 2019 adalah 89,64%. Angka ini belum memenuhi target Renstra tahun 2019 yaitu sebesar 90%. Provinsi dengan persentase tertinggi balita kurus mendapat PMT adalah Gorontalo dan Jawa Timur dengan capaian 100%, sedangkan persentase terendah adalah Kalimantan Utara dengan capaian 69,53%. Terdapat 22 provinsi yang sudah memenuhi target Renstra tahun 2019. Cakupan balita kurus mendapat PMT selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.31.

GAMBAR 5.57
CAKUPAN BALITA KURUS MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN (PMT)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI 2019



Bab VI
**PENGENDALIAN
PENYAKIT**



VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

Pengendalian penyakit yang akan dibahas pada bab ini yaitu pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Pengendalian penyakit sebagai upaya penurunan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit mempunyai peranan penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat.

Penyakit menular meliputi penyakit menular langsung, penyakit yang dapat dikendalikan dengan imunisasi dan penyakit yang ditularkan melalui binatang. Sedangkan penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu.

A. PENYAKIT MENULAR LANGSUNG

1. Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat baik di Indonesia maupun internasional sehingga menjadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs). Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Indonesia merupakan negara ke-2 tertinggi penderita tuberkulosis. Hal tersebut mendorong pengendalian tuberkulosis nasional terus dilakukan dengan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program.

Menurut *Global Tuberculosis Report 2019* yang dirilis oleh WHO pada 17 Oktober 2019, dunia tidak berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan Strategi END TB tahun 2020 yaitu mengurangi TB sebesar 20 persen dari jumlah kasus tahun 2015-2018. Namun, antara 2015 dan 2018, penurunan kumulatif kasus TB hanya sebesar 6,3%.

Begitu juga dengan penurunan jumlah total kematian akibat TB antara tahun 2015 dan 2018 secara global sebesar 11%, yang berarti kurang dari sepertiga target yang sebesar 35 persen pada tahun 2020. Kasus baru tuberkulosis secara global sebesar 6,4 juta, setara dengan 64% dari insiden tuberkulosis (10 juta). Tuberkulosis tetap menjadi 10 penyebab kematian tertinggi di dunia yang menyebabkan kematian sekitar 1,3 juta pasien (*WHO, Global Tuberculosis Report, 2018*).

Beban penyakit yang disebabkan oleh tuberkulosis dapat diukur dengan insiden, prevalensi, dan mortalitas/kematian.

a. Insiden Tuberkulosis

Angka insiden tuberkulosis Indonesia pada tahun 2018 sebesar 316 per 100.000 penduduk dan angka kematian penderita tuberkulosis sebesar 40 per 100.000 penduduk. (*Global Tuberculosis Report WHO, 2018*). Indikator yang digunakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun 2015-2019 merupakan prevalensi berbasis mikroskopis saja. Hal ini mengakibatkan angkanya lebih rendah dari hasil survei prevalensi tuberkulosis tahun 2013-2014

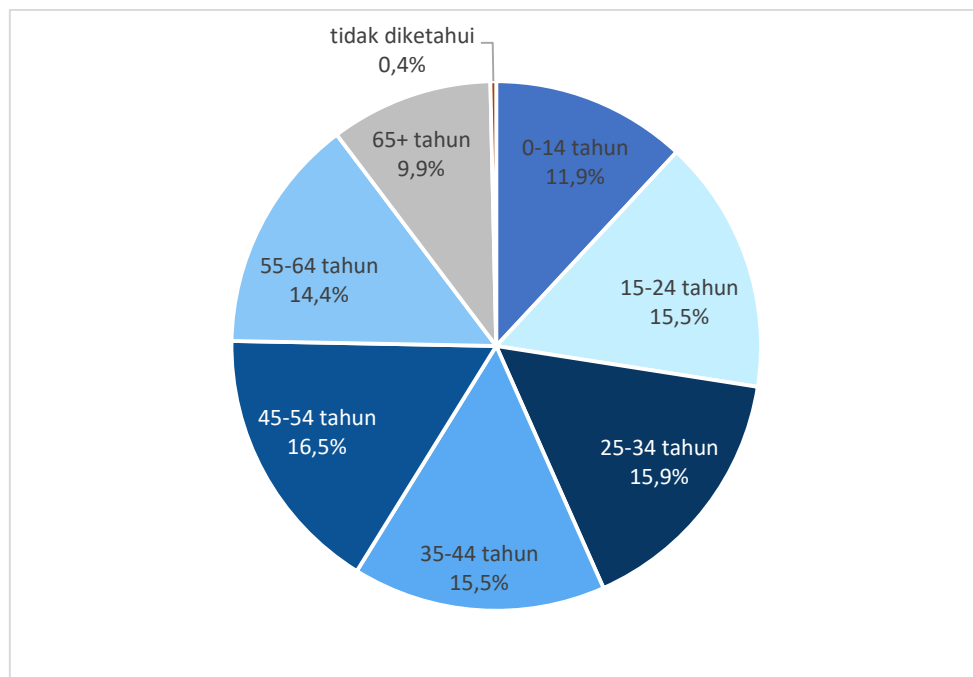
yang telah menggunakan metode yang lebih sensitif yaitu konfirmasi bakteriologis yang mencakup pemeriksaan mikroskopis, molekuler dan kultur. Target prevalensi tuberkulosis tahun 2019 pada RPJMN sebesar ≤ 245 per 100.000 penduduk, dengan capaian yang dihasilkan dari pemodelan sebesar 254 per 100.000 penduduk maka target RPJMN telah tercapai.

b. Kasus Tuberkulosis Ditemukan

Pada tahun 2019 jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan sebanyak 543.874 kasus, menurun bila dibandingkan semua kasus tuberkulosis yang ditemukan pada tahun 2018 yang sebesar 566.623 kasus. Jumlah kasus tertinggi dilaporkan dari provinsi dengan jumlah penduduk yang besar yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kasus tuberkulosis di ketiga provinsi tersebut hampir mencapai setengah dari jumlah seluruh kasus tuberkulosis di Indonesia (45%).

Dibandingkan dengan perempuan, jumlah kasus tuberkulosis pada laki-laki lebih tinggi 1,4 kali yang terjadi di seluruh provinsi. Bahkan di Aceh dan Sumatera Utara kasus pada laki-laki hampir dua kali lipat dibandingkan perempuan.

GAMBAR 6.1
PROPORSI KASUS TUBERKULOSIS MENURUT KELOMPOK UMUR
TAHUN 2019

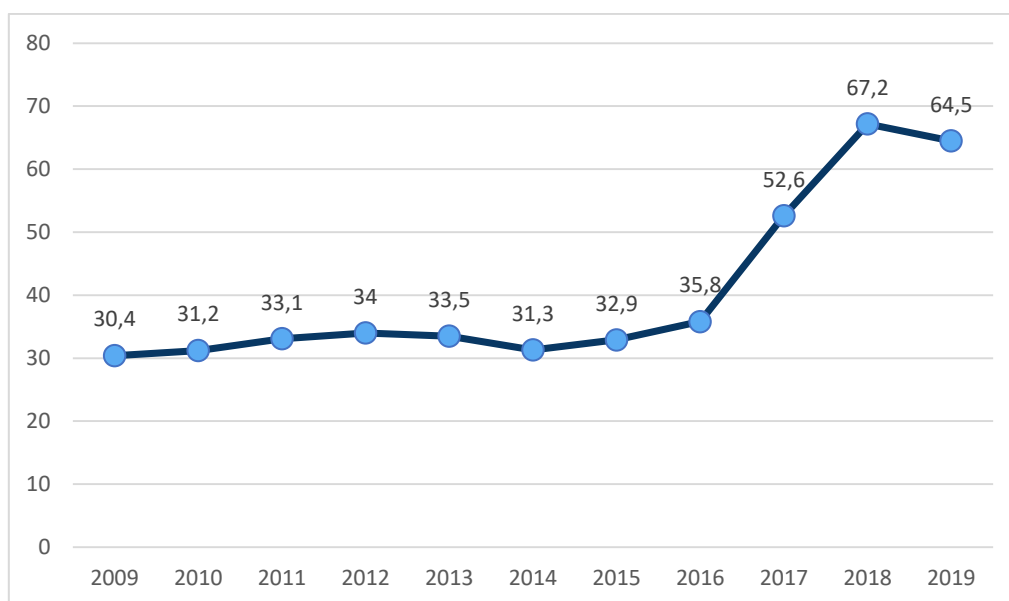


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

c. Cakupan Pengobatan Semua Kasus Tuberkulosis (Case Detection Rate/CDR) Yang Diobati

Case Detection Rate (CDR) adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan di antara perkiraan jumlah semua kasus baru tuberkulosis. *CDR* menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang terjangkau oleh program.

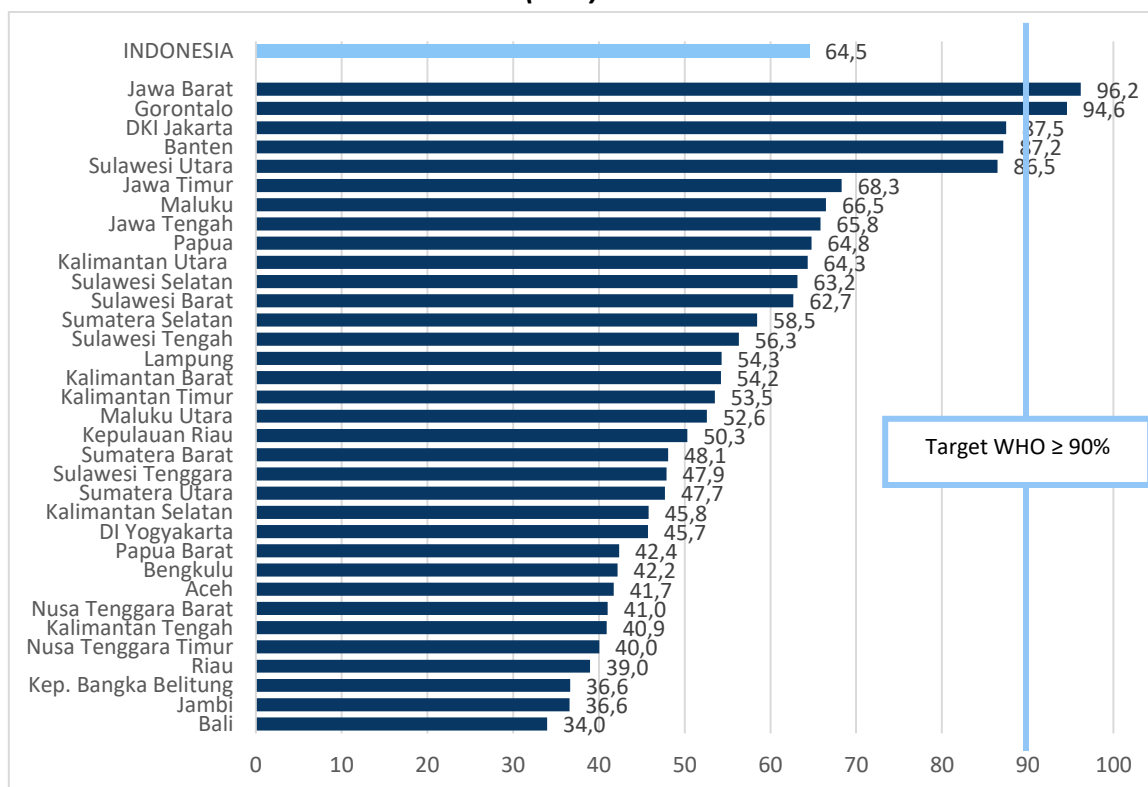
GAMBAR 6.2
CASE DETECTION RATE (CDR)
TAHUN 2009-2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Gambar 6.2. menunjukkan bahwa *Case Detection Rate* kasus tuberkulosis pada tahun 2019 sebesar 64,5% yang relatif meningkat jika dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya. Namun masih jauh dari angka CDR yang direkomendasikan oleh WHO yang sebesar $\geq 90\%$.

GAMBAR 6.3
CASE DETECTION RATE (CDR) MENURUT PROVINSI 2019



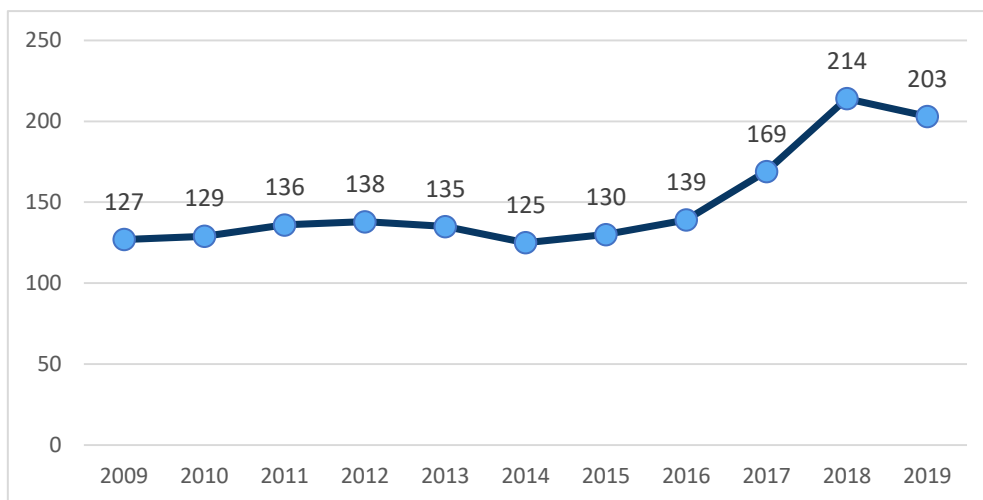
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Menurut provinsi, hanya Jawa Barat dan Gorontalo yang telah mencapai angka CDR $\geq 90\%$. Kisaran CDR di Indonesia antara 96,2% (Jawa Barat) dan 34% (Bali).

d. Angka Notifikasi Semua Kasus Tuberkulosis atau Case Notification Rate (CNR)

CNR adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan di antara 100.000 penduduk yang ada di suatu wilayah tertentu. Angka ini apabila dikumpulkan serial, akan menggambarkan kecenderungan (tren) meningkat atau menurunnya penemuan kasus dari tahun ke tahun di suatu wilayah. Gambar 6.4 menunjukkan angka notifikasi semua kasus tuberkulosis per 100.000 penduduk dari tahun 2009-2019 yang secara nasional memperlihatkan kecenderungan peningkatan CNR.

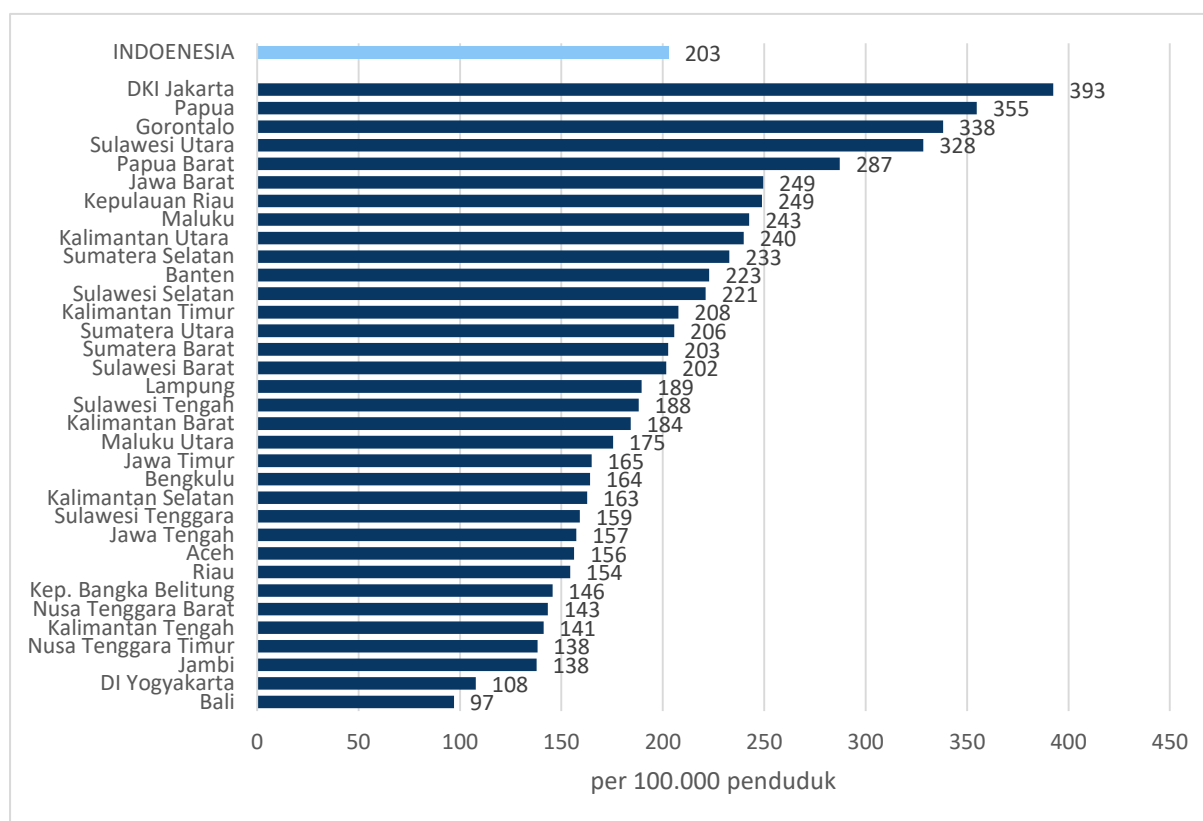
GAMBAR 6.4
ANGKA NOTIFIKASI SEMUA KASUS TUBERKULOSIS
PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2009-2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

CNR semua kasus tuberkulosis menurut provinsi tahun 2019 bervariasi antara 393(DKI Jakarta) dan 97 (Bali) per 100.000 penduduk.

GAMBAR 6.5
ANGKA NOTIFIKASI SEMUA KASUS TUBERKULOSIS PER 100.000 PENDUDUK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

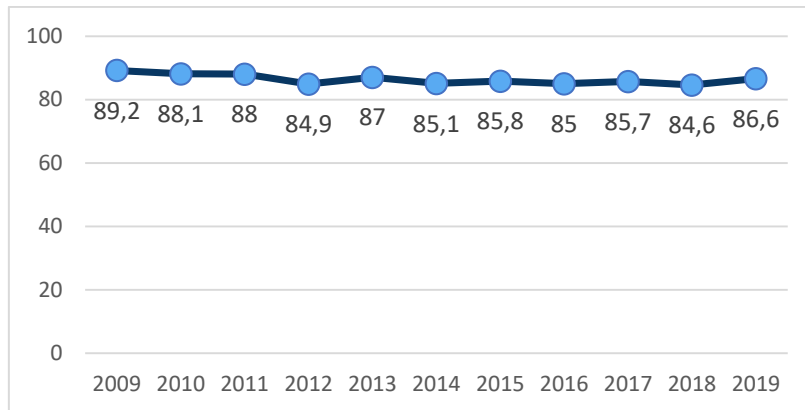


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

e. Angka Keberhasilan Pengobatan

Angka keberhasilan pengobatan (*Success Rate*) merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengobatan tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan yaitu jumlah semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan yang mendapat pengobatan lengkap di antara semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.

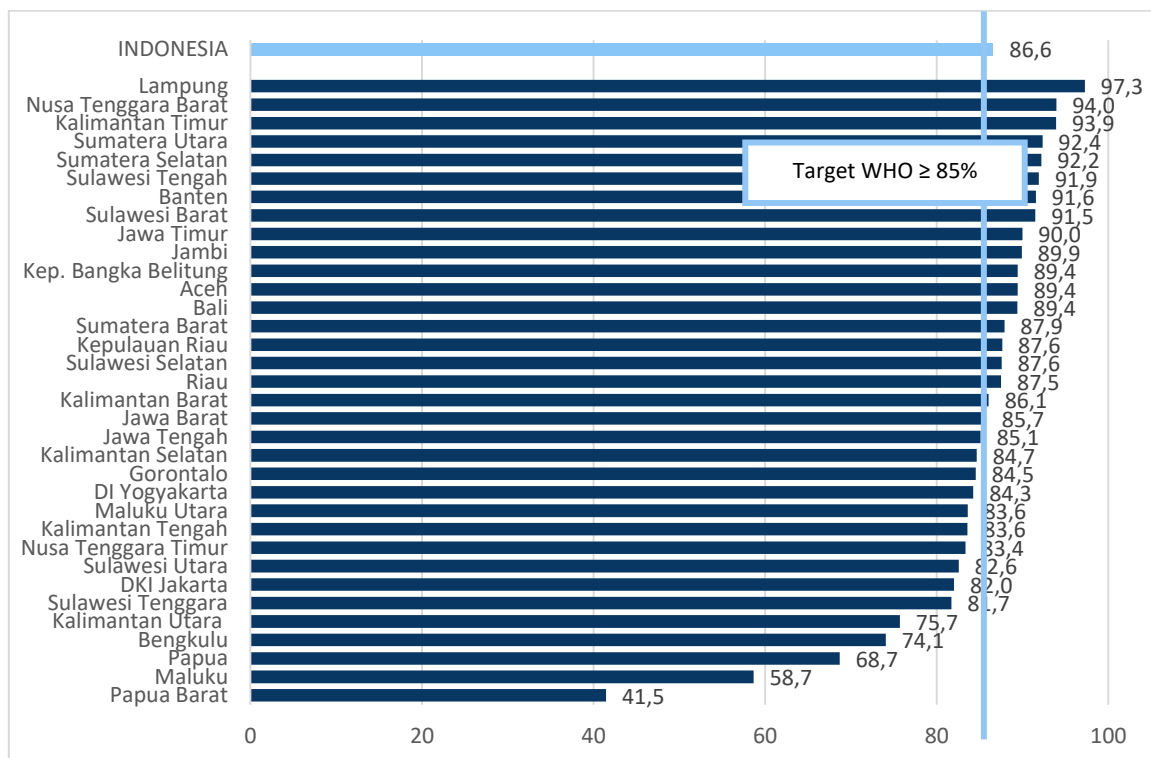
GAMBAR 6.6
ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS
DI INDONESIA TAHUN 2009-2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Jika merujuk pada target yang ditetapkan rentra Kementerian Kesehatan untuk indikator ini yang sebesar 85%, maka secara nasional angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis telah tercapai termasuk pada tahun 2019 yang sebesar 86,6%. Sedangkan indikator pengobatan khusus untuk pasien tuberkulosis paru terkonfirmasi bakteriologis yaitu angka kesembuhan (*cure rate*) pada tahun 2019 sebesar 73,2%.

GAMBAR 6.7
ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Provinsi yang mencapai angka keberhasilan pengobatan semua kasus tuberkulosis minimal 85% pada tahun 2019 sebanyak 20 provinsi (58,8%). Informasi mengenai tuberkulosis menurut indikator, jenis kelamin, dan provinsi secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 51-52.

2. HIV dan AIDS

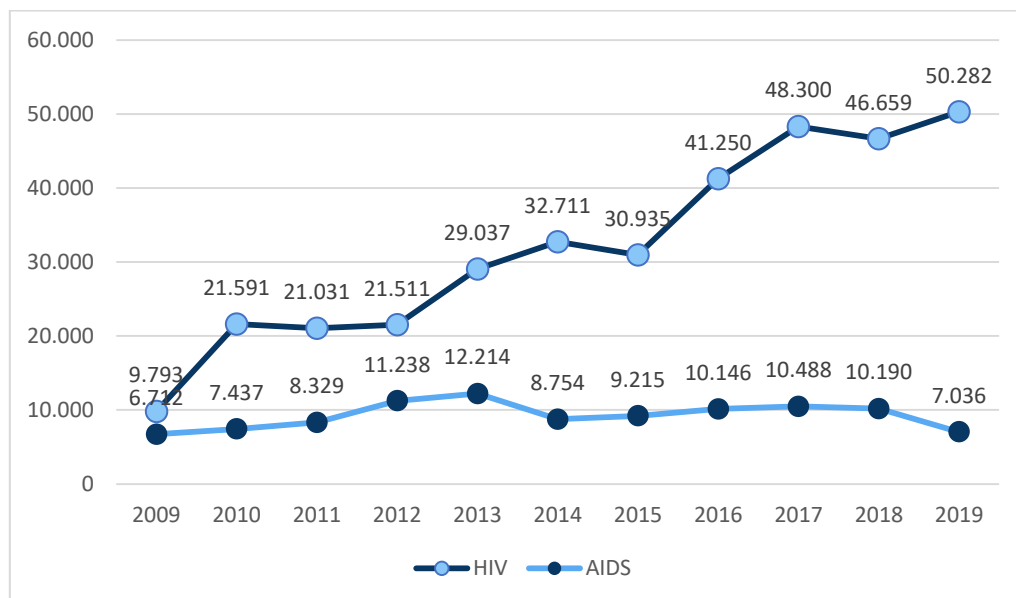
HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan kekebalan sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sedangkan AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) yaitu sekumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV.

Program pengendalian HIV di Indonesia bertujuan untuk: 1) Menurunkan hingga meniadakan infeksi baru; 2) Menurunkan hingga meniadakan kematian terkait AIDS; dan 3) Menurunkan stigma dan diskriminasi.

Estimasi jumlah orang dengan HIV di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 641.675 orang dengan jumlah infeksi baru sebanyak 46.372 orang dan kematian sebanyak 38.734 orang (Hasil Pemodelan Spectrum 2016).

Dari Gambar 6.8 terlihat jumlah kasus HIV positif yang dilaporkan dari tahun ketahun cenderung meningkat. Pada tahun 2018 dilaporkan sebanyak 50.282 kasus. Sebaliknya, dibandingkan rata-rata 8 tahun sebelumnya, jumlah kasus baru AIDS cenderung menurun, pada tahun 2019 dilaporkan sebanyak 7.036 kasus.

GAMBAR 6.8
JUMLAH KASUS HIV POSITIF DAN AIDS YANG DILAPORKAN DI INDONESIA
SAMPAI TAHUN 2009-2019

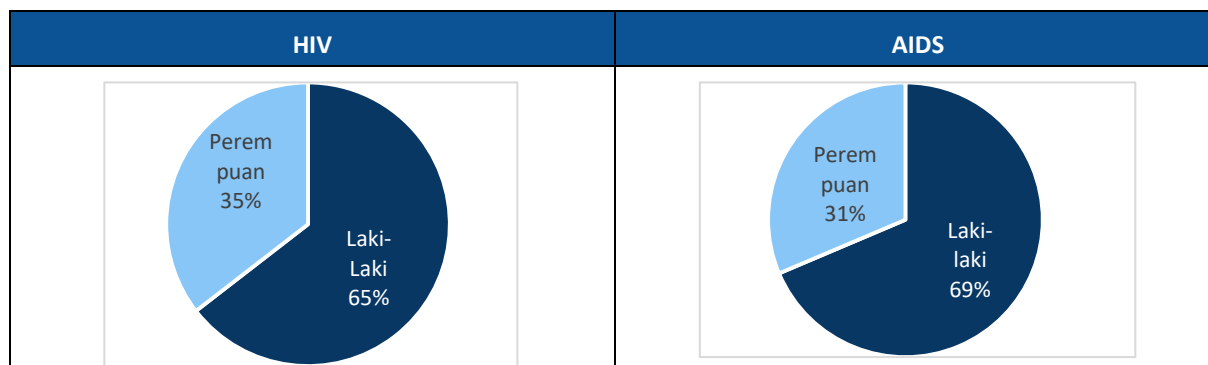


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Terdapat sebanyak 6 provinsi yang tidak melaporkan data AIDS pada tahun 2019 yang diduga menjadi penyebab penurunan kasus AIDS pada tahun 2019. Keenam provinsi tersebut yaitu Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

Baik pada HIV maupun AIDS, proporsi pada kelompok laki-laki lebih tinggi sekitar dua kali lipat dibandingkan pada kelompok perempuan seperti digambarkan pada Gambar 6.9 berikut ini.

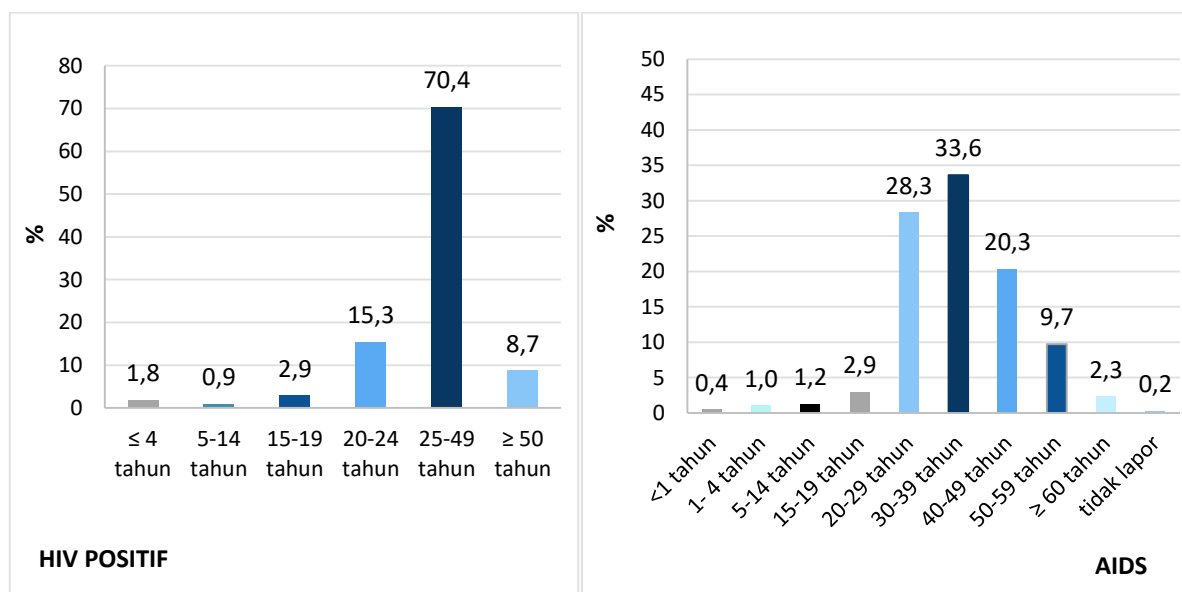
GAMBAR 6.9
PROPORSI KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT JENIS KELAMIN
DI INDONESIA TAHUN 2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Persentase kasus HIV positif dan AIDS tahun 2019 menurut kelompok umur seperti digambarkan berikut ini.

GAMBAR 6.10
PERSENTASE KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT KELOMPOK UMUR
TAHUN 2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Kelompok umur tertinggi pada kasus HIV dan AIDS yaitu kelompok umur produktif. Sementara itu masih ditemukan penularan HIV dari ibu ke anak yang di tunjukkan dengan adanya penemuan kasus HIV dan AIDS pada kelompok usia di bawah 4 tahun. Untuk mencapai tujuan nasional dan global dalam rangka *triple elimination* (eliminasi HIV, hepatitis B, dan sifilis) pada bayi, penularan HIV dari ibu ke anak diharapkan akan terus menurun di tahun selanjutnya.

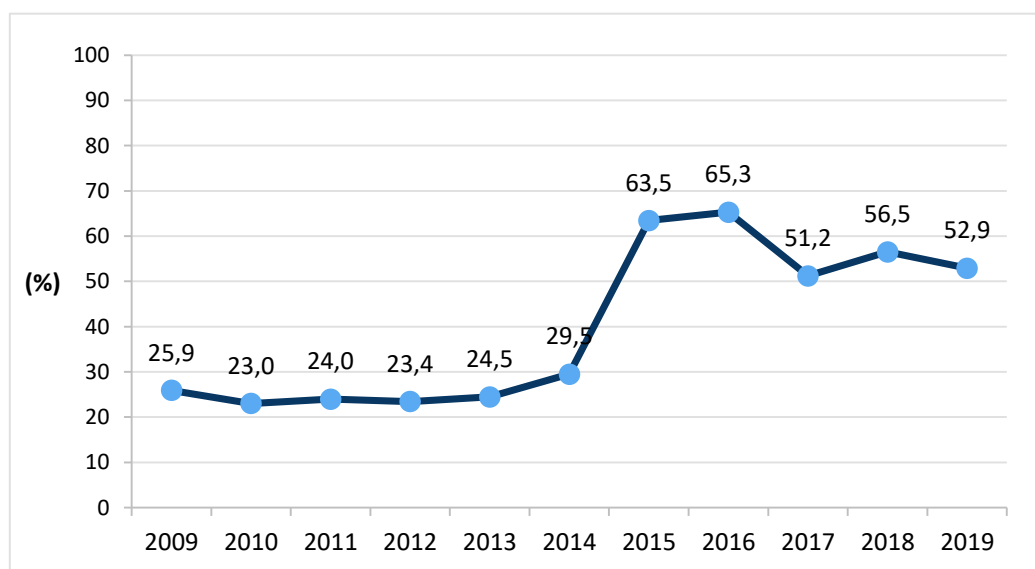
3. Pneumonia

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti virus, jamur dan bakteri. Sampai saat ini program dalam pengendalian pneumonia lebih diprioritaskan pada pengendalian pneumonia balita. Pneumonia pada balita ditandai dengan batuk dan atau tanda kesulitan bernapas yaitu adanya nafas cepat, kadang disertai tarikan dinding dada bagian bawah kedalam (TDDK), dengan frekuensi nafas berdasarkan usia penderita:

- < 2 bulan : ≤ 60 /menit,
- 2 - < 12 bulan : ≤ 50 /menit,
- 1 - < 5 tahun : ≤ 40 /menit.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini yaitu dengan meningkatkan penemuan pneumonia pada balita. Berikut cakupan penemuan kasus pneumonia pada balita di Indonesia pada tahun 2009-2019 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

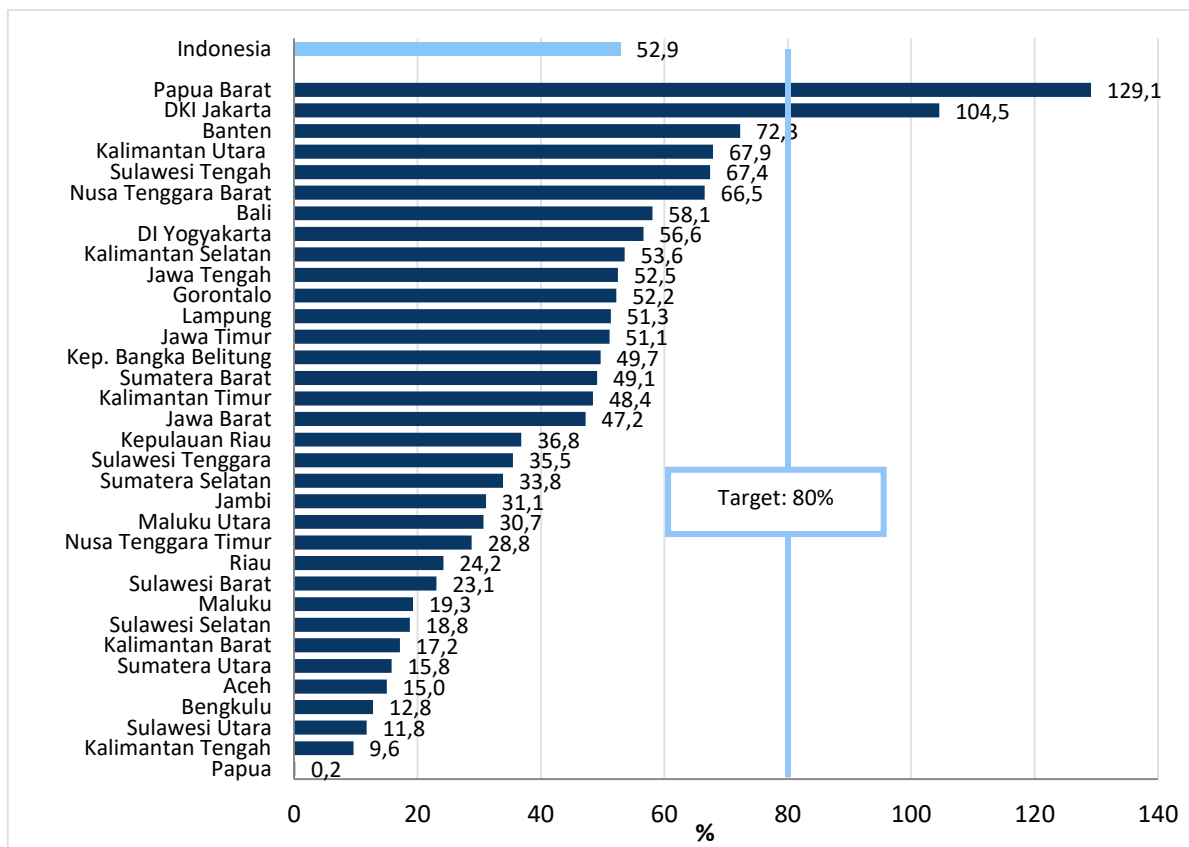
GAMBAR 6.11
CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA
DI INDONESIA TAHUN 2009-2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Selama kurun waktu yang panjang, angka cakupan penemuan pneumonia balita tidak mengalami perkembangan berarti yaitu berkisar antara 20%-30%. Namun sejak tahun 2015 hingga saat ini terjadi peningkatan cakupan dikarenakan adanya perubahan angka perkiraan kasus dari 10% menjadi 3,55%. Selain itu terdapat peningkatan kelengkapan pelaporan dari 94,12% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2019.

GAMBAR 6.12
CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Pada tahun 2019 hanya Provinsi Papua Barat dan DKI telah mencapai target penemuan sebesar 80, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan program. Sedangkan Papua hanya mencapai 0,2% penemuan pneumonia dari target yang telah ditetapkan.

Indikator Renstra yang digunakan sejak tahun 2015 yaitu persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana standar pneumonia baik melalui pendekatan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit), maupun program P2 ISPA. Pada tahun 2019 Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melakukan tatalaksana standar pneumonia sebesar 57,2% yang berarti hampir mencapai target renstra tahun 2019 yang sebesar 60%.

Namun dari 34 provinsi terdapat empat provinsi yang puskesmas di seluruh kabupaten/kotanya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana standar pneumonia yaitu Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, dan Nusa Tenggara Barat.

Pada tahun 2019 angka kematian akibat pneumonia pada balita sebesar 0,12%. Angka kematian akibat Pneumonia pada kelompok bayi lebih tinggi hampir dua kali lipat dibandingkan pada kelompok anak umur 1 – 4 tahun. Cakupan penemuan pneumonia dan kematiannya menurut provinsi dan kelompok umur pada tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 53a dan 53b.

4. Hepatitis

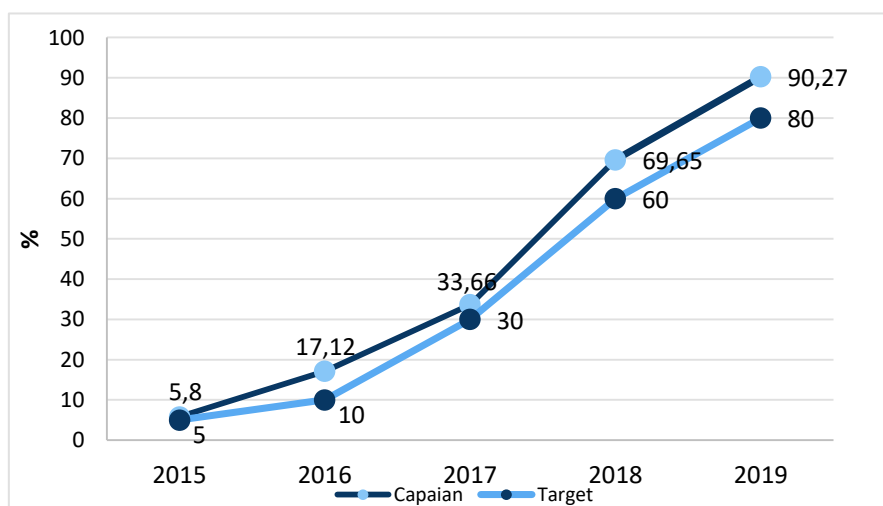
Hepatitis yang merupakan peradangan hati yang dapat berkembang menjadi fibrosis, sirosis atau kanker hati, disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi virus, zat beracun, dan penyakit autoimun. Penyebab paling umum Hepatitis adalah yang disebabkan oleh Virus Hepatitis A, B, C, D dan E. Untuk Hepatitis A dan Hepatitis E, besaran masalah tidak diketahui dengan pasti. Namun mengingat kondisi sanitasi lingkungan, higiene dan sanitasi pangan, serta perilaku hidup bersih dan sehat yang belum optimal, maka masyarakat Indonesia merupakan kelompok berisiko untuk tertular Hepatitis A dan Hepatitis E. Laporan yang diterima oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa setiap tahun selalu terjadi KLB Hepatitis A, sedangkan untuk Hepatitis E jarang dilaporkan di Indonesia.

Menurut hasil Riskesdas tahun 2018, prevalensi hepatitis berdasarkan Riwayat diagnosis dokter sebesar 0,39% dengan disparitas antar provinsi sebesar 0,18% (Kep. Bangka Belitung) dan 0,66% (Papua). Berdasarkan kelompok umur, hepatitis menyebar hampir merata pada seluruh kelompok umur. Begitu juga dengan jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal.

Hepatitis B

Program Nasional dalam Pencegahan dan Pengendalian Virus Hepatitis B saat ini fokus pada pencegahan Penularan Ibu ke Anak (PPIA) karena 95% penularan Hepatitis B adalah secara vertikal yaitu dari Ibu yang Positif Hepatitis B ke bayi yang dilahirkannya.

GAMBAR 6.13
TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG
MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB)
TAHUN 2015-2019

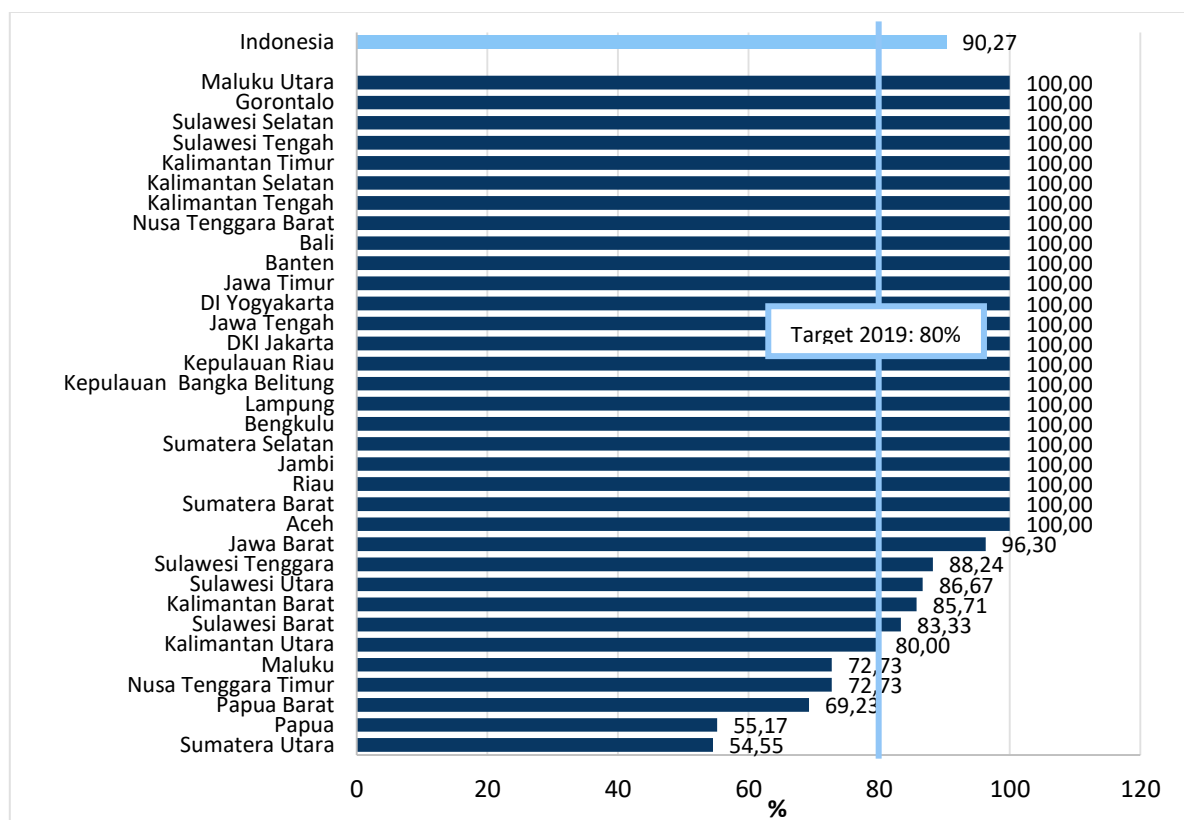


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Pelaksanaan Deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko/ibu hamil telah dilakukan sejak tahun 2015. Gambar 6.13 menunjukkan kenaikan target per tahun yang diikuti dengan kenaikan capaian target indikator. Pada tahun 2019 capaian indikator sebesar 90,27% yang berarti telah mencapai target renstra tahun 2019 yang sebesar 80%. Selama lima tahun berturut-turut indikator renstra ini dilaksanakan selalu mencapai target.

Sebanyak 23 dari 34 provinsi telah 100% kabupaten/kotanya melaksanakan deteksi dini hepatitis B.

GAMBAR 6.14
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

5. Diare

Penyakit Diare merupakan penyakit endemis potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) yang sering disertai dengan kematian di Indonesia.

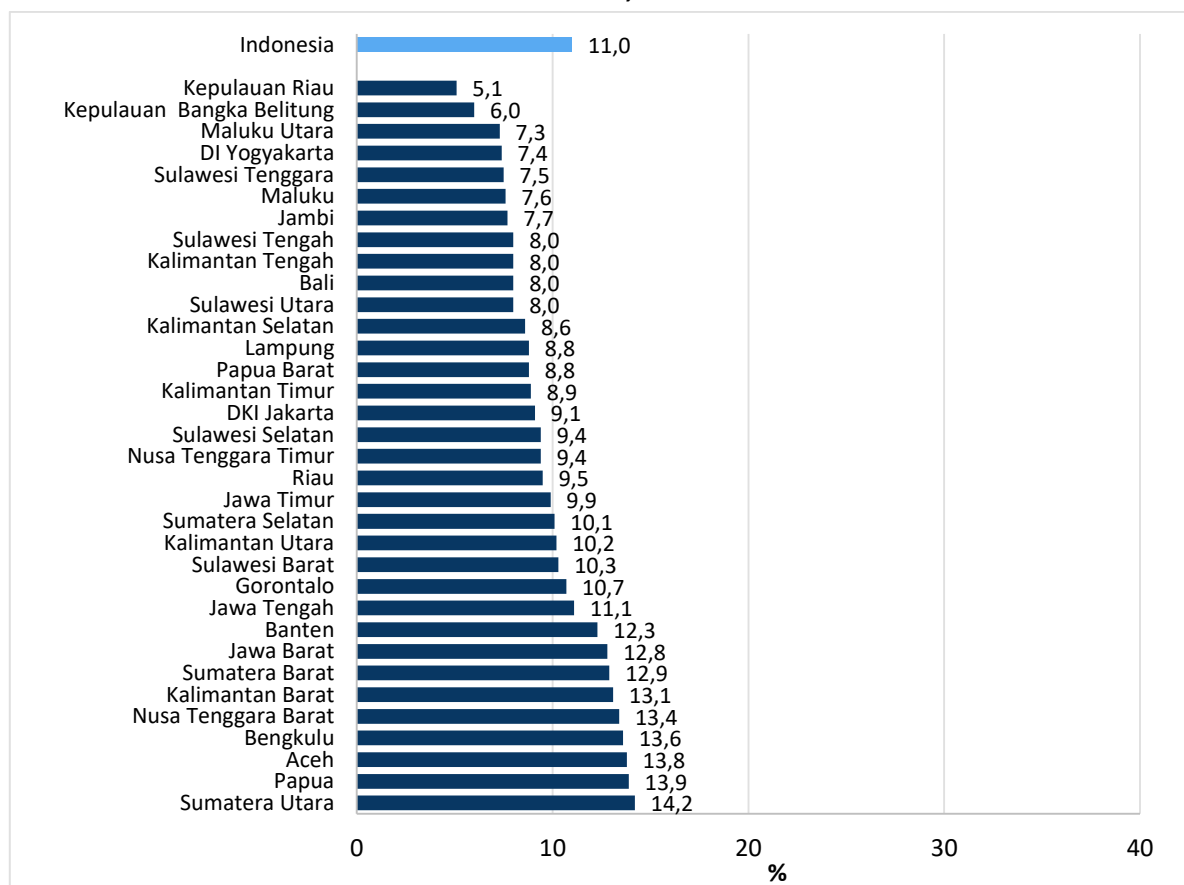
a. Prevalensi Diare

Menurut Riskesdas 2018, prevalensi diare berdasarkan diagnosis tenaga Kesehatan sebesar 6,8% dan berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan atau gejala yang pernah dialami sebesar 8%.

Kelompok umur dengan prevalensi diare (berdasarkan diagnosis tenaga Kesehatan) tertinggi yaitu pada kelompok umur 1-4 tahun sebesar 11,5% dan pada bayi sebesar 9%. Kelompok umur 75 tahun ke atas juga merupakan kelompok umur dengan prevalensi tinggi (7,2%). Prevalensi pada perempuan, daerah perdesaan, pendidikan rendah, dan nelayan relatif lebih tinggi dibandingkan pada kelompok lainnya.

Prevalensi diare pada balita (berdasarkan diagnosis tenaga Kesehatan) sebesar 11% dengan disparitas antar provinsi antara 5,1% (Kepulauan Riau) dan 14,2% (Sumatera Utara).

GAMBAR 6.15
PREVALENSI DIARE PADA BALITA BERDASARKAN DIAGNOSIS TENAGA KESEHATAN
MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2018

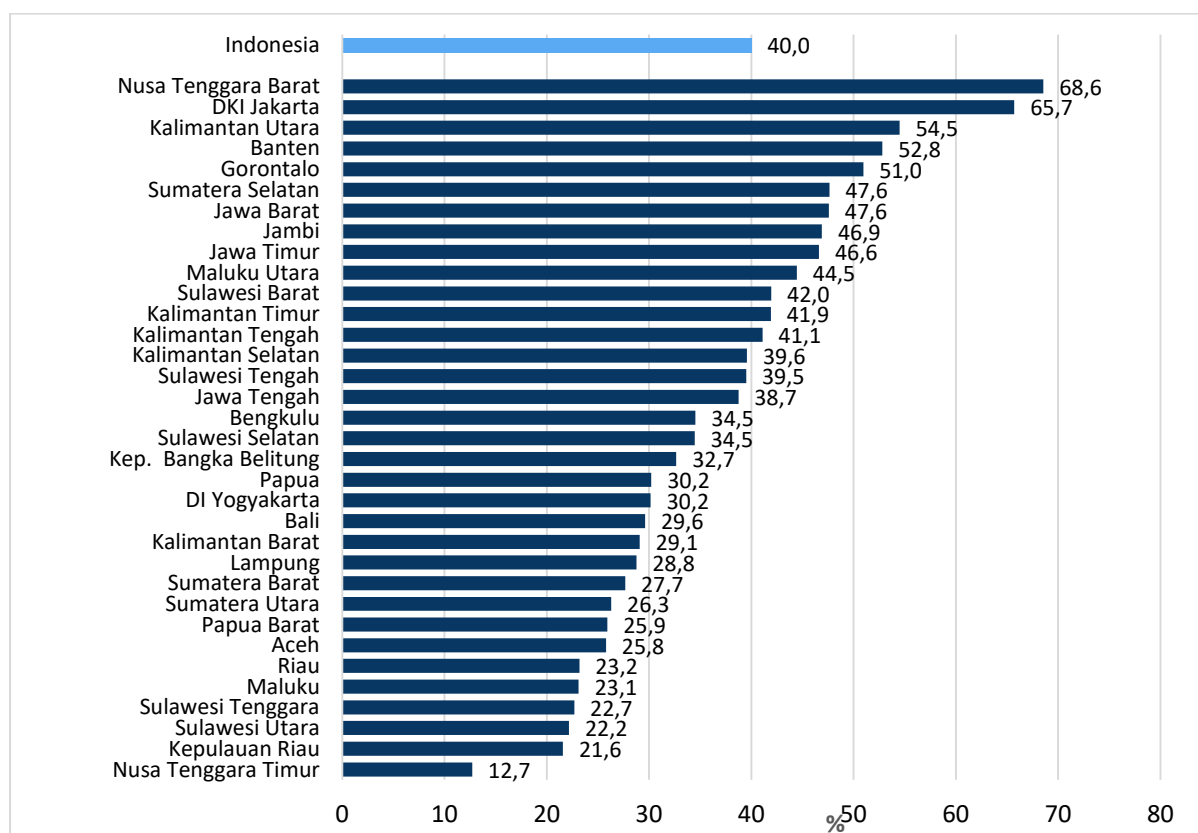


Sumber: Riskesdas 2018, Balitbangkes, Kementerian Kesehatan RI

b. Cakupan Pelayanan Penderita Diare

Sasaran pelayanan penderita diare pada balita yang datang ke sarana kesehatan ditargetkan oleh program sebesar 20% dari perkiraan jumlah penderita diare pada balita. Sedangkan sasaran pelayanan penderita diare semua umur sebesar 10% dari perkiraan jumlah penderita diare semua umur.

GAMBAR 6.16
CAKUPAN PELAYANAN PENDERITA DIARE BALITA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Pada tahun 2019 cakupan pelayanan penderita diare pada semua umur sebesar 61,7% dan pada balita sebesar 40% dari sasaran yang ditetapkan. Disparitas antar provinsi antara 12,7% (Nusa Tenggara Timur) dan Nusa Tenggara Barat (68,6%).

c. Penggunaan Oralit dan Zink

LINTAS DIARE (Lima Langkah Tuntaskan Diare) menganjurkan bahwa semua penderita diare harus mendapatkan oralit maka target penggunaan oralit adalah 100% dari semua kasus diare yang mendapatkan pelayanan di puskesmas dan kader. Tahun 2019 secara nasional penggunaan oralit semua umur belum mencapai target yaitu sebesar 89,3%. Pemberian oralit pada balita relatif lebih tinggi yaitu sebesar 94,5%.

Tidak tercapainya target tersebut karena pemberi layanan di Puskesmas dan kader belum memberikan oralit sesuai dengan standar tata laksana yaitu sebanyak 6 bungkus/penderita diare. Selain itu, masyarakat masih belum mengetahui tentang manfaat oralit sebagai cairan yang harus diberikan pada setiap penderita diare untuk mencegah terjadinya dehidrasi.

Selain oralit, balita juga diberikan zink yang merupakan mikronutrien yang berfungsi untuk mengurangi lama dan tingkat keparahan diare, mengurangi frekuensi buang air besar, mengurangi volume tinja serta menurunkan kekambuhan kejadian diare pada tiga bulan berikutnya. Penggunaan zink selama 10 hari berturut-turut pada saat balita diare merupakan terapi diare balita. Pada tahun 2019 cakupan pemberian zink pada balita diare sebesar 94,7%.

6. Kusta

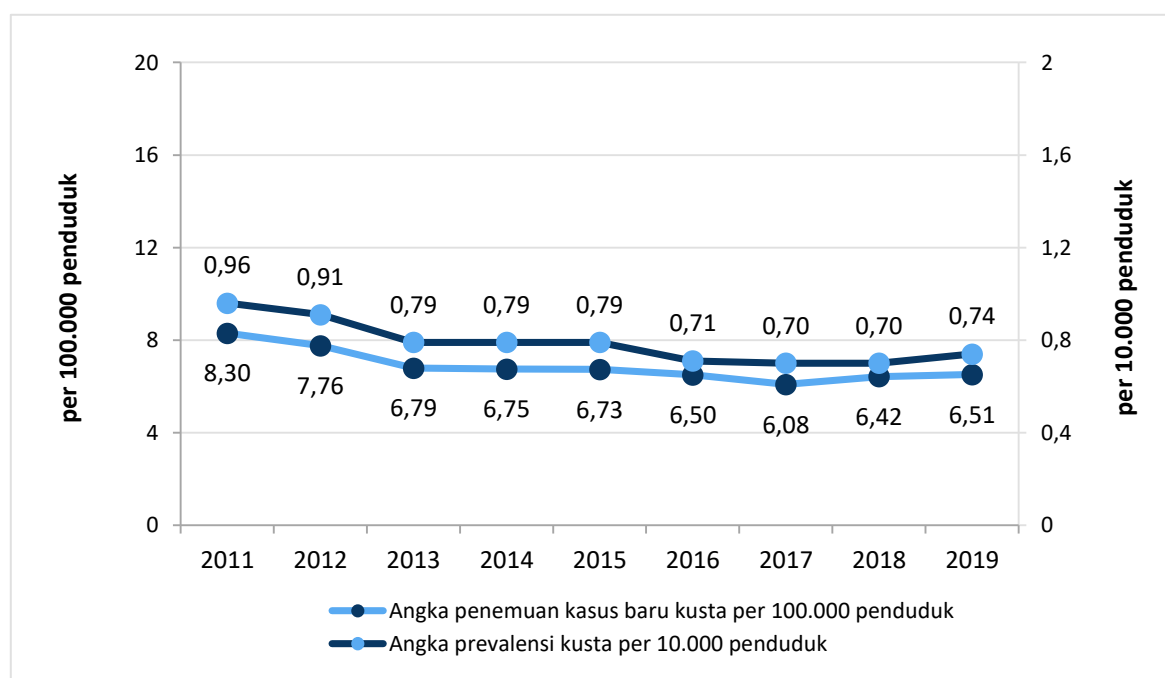
Mycobacterium leprae merupakan bakteri penyebab penyakit kusta. Penyakit infeksi kronis ini menyerang kulit, saraf tepi, mukosa saluran pernafasan atas dan mata. Penatalaksanaan kasus kusta yang buruk dapat menyebabkan kusta menjadi progresif, menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, saraf, anggota gerak, dan mata.

a. Angka Prevalensi dan Angka Penemuan Kasus Baru

Pada tahun 2000 Indonesia telah mencapai status eliminasi kusta (prevalensi kusta <1 per 10.000 penduduk). Angka prevalensi kusta di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 0,74 kasus/10.000 penduduk dan angka penemuan kasus baru sebesar 6,51 kasus per 100.000 penduduk. Tren Angka kejadian dapat dilihat pada Gambar 6.17. Selama sembilan tahun terakhir terlihat tren penurunan baik pada angka prevalensi maupun angka penemuan kasus baru kusta.

Pada tahun 2019 dilaporkan 17.439 kasus baru kusta yang 85% di antaranya merupakan kusta tipe *Multi Basiler* (MB).

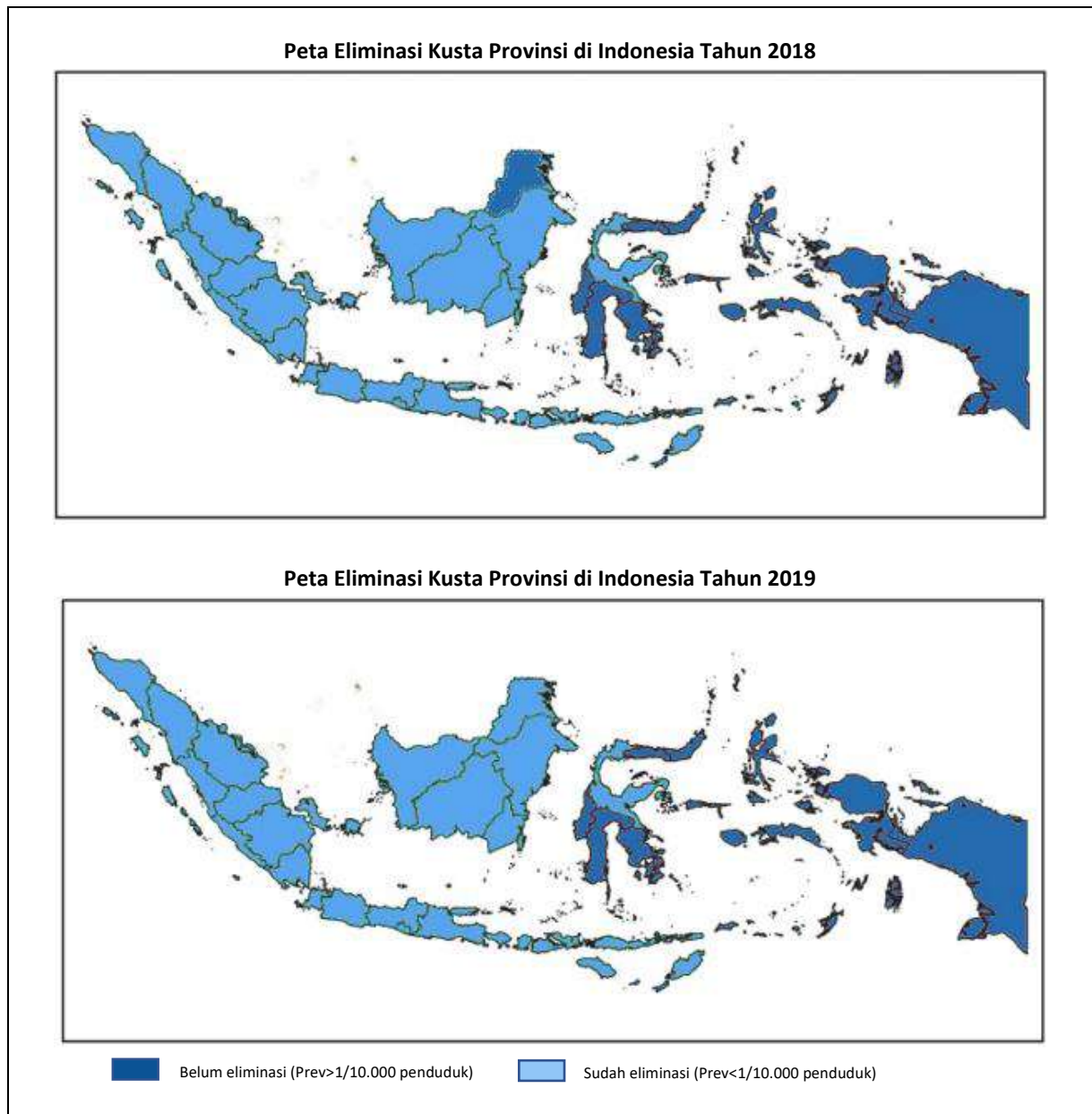
GAMBAR 6.17
ANGKA PREVALENSI DAN ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA (NCDR)
TAHUN 2011-2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Provinsi dinyatakan telah mencapai eliminasi jika angka prevalensi <1 per 10.000 penduduk. Berikut perubahan peta eliminasi tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2019 sebanyak dua puluh enam provinsi telah mencapai eliminasi kusta, bertambah satu provinsi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Kalimantan Utara. Provinsi yang belum mencapai eliminasi yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

GAMBAR 6.18
PETA ELIMINASI KUSTA PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2018 DAN 2019



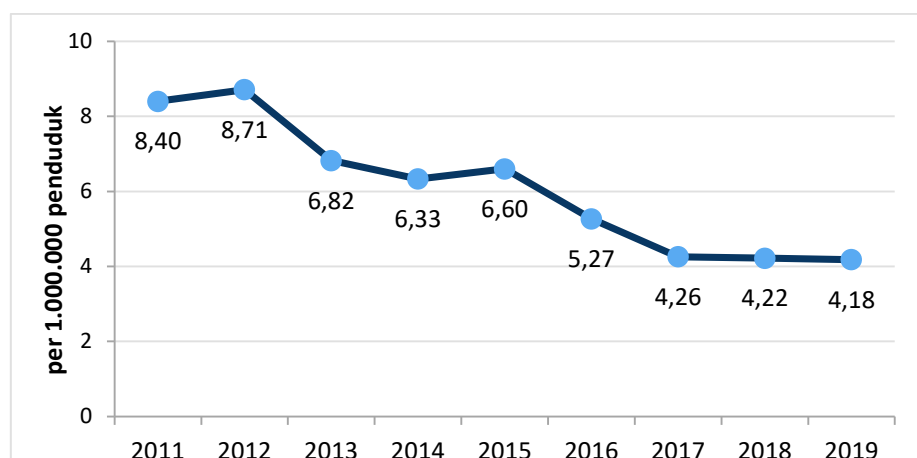
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Dapat terlihat pada Gambar 6.19 bahwa provinsi yang belum mencapai eliminasi kusta terdapat di seluruh provinsi Indonesia bagian timur dan sebagian Indonesia bagian tengah.

b. Angka cacat tingkat 2

Peningkatan deteksi kasus sejak dini diperlukan dalam pengendalian kasus kusta. Salah satu indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan dalam mendeteksi kasus baru kusta secara dini adalah angka cacat tingkat 2. Pada tahun 2019 angka cacat tingkat 2 sebesar 4,18 per 1.000.000 penduduk, cenderung menurun dibandingkan 7 tahun sebelumnya. Hal tersebut menggambarkan kegiatan penemuan kasus semakin ke arah dini dan keterlambatan kasus dapat dicegah.

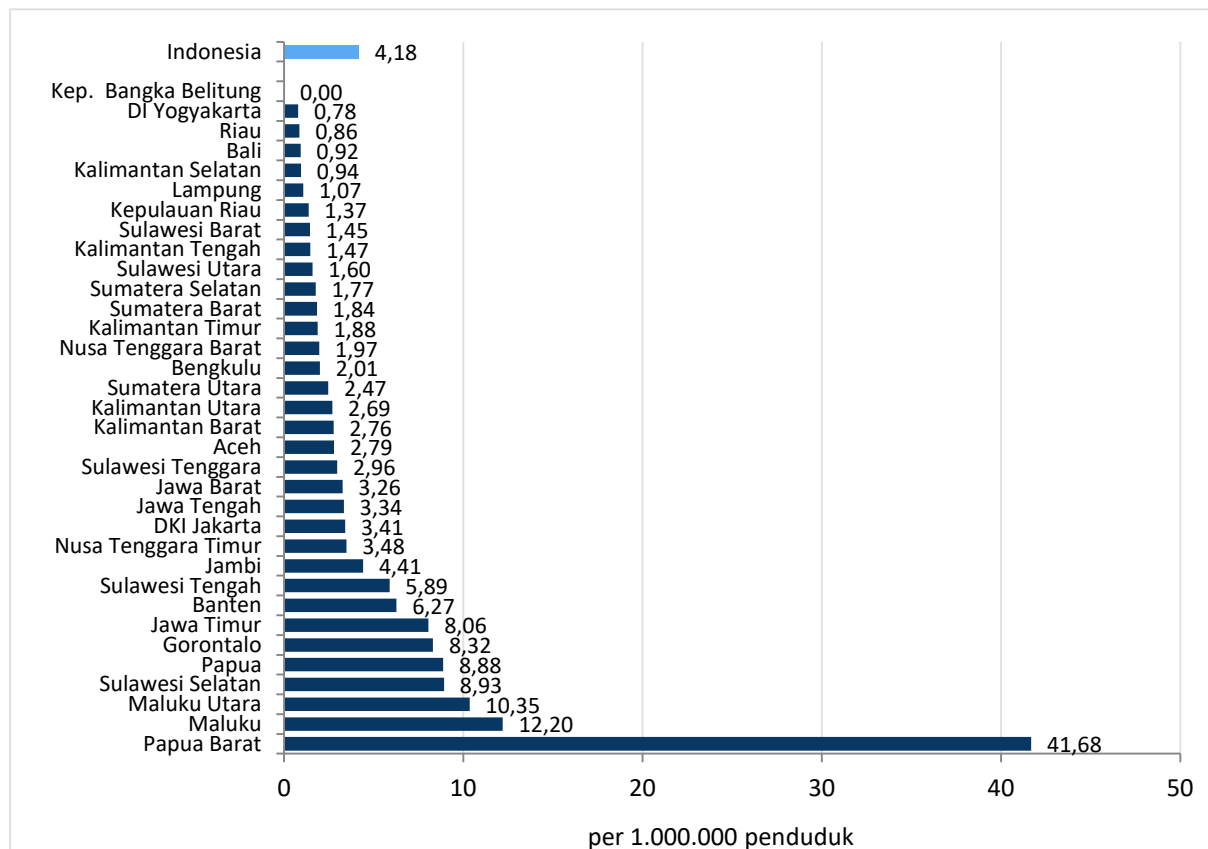
GAMBAR 6.19
ANGKA CACAT TINGKAT 2 PENDERITA KUSTA BARU PER 1.000.000 PENDUDUK
TAHUN 2011-2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Tidak ditemukan cacat tingkat 2 pada kasus baru tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebaliknya di Provinsi Papua Barat jauh melebihi provinsi yang lain yaitu mencapai 41,68 per satu juta penduduk.

GAMBAR 6.20
ANGKA CACAT TINGKAT 2 KUSTA PER 1.000.000 PENDUDUK
PER PROVINSI TAHUN 2019

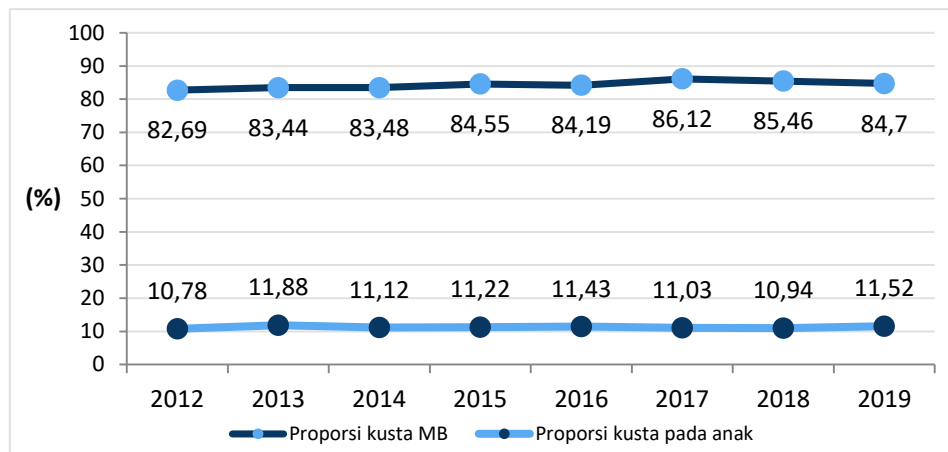


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

c. Proporsi kusta Multibasiler (MB) dan proporsi penderita kusta pada anak

Proporsi kusta MB dan proporsi penderita kusta pada anak (0-14 tahun) di antara penderita baru memperlihatkan adanya sumber penularan tersembunyi serta tingginya tingkat penularan di masyarakat.

GAMBAR 6.21
PROPORSI KUSTA MB DAN PROPORSI KUSTA PADA ANAK
TAHUN 2012-2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Tidak banyak terjadi perubahan proporsi kusta MB selama periode 2012-2019. Kasus kusta tipe MB masih mendominasi di Indonesia menunjukkan banyaknya sumber penularan di masyarakat. Provinsi dengan proporsi kusta MB tertinggi pada tahun 2019 yaitu Gorontalo, Sumatera Utara, dan Lampung.

Begitu juga dengan proporsi kusta anak pada periode yang sama tidak banyak mengalami perubahan. Provinsi dengan proporsi kusta pada anak tertinggi yaitu Papua Barat (29,21%), Papua (27,66%), dan Kepulauan Riau (20,83%). Data/informasi terkait penyakit kusta menurut provinsi terdapat pada Lampiran 57 sampai Lampiran 59.b.

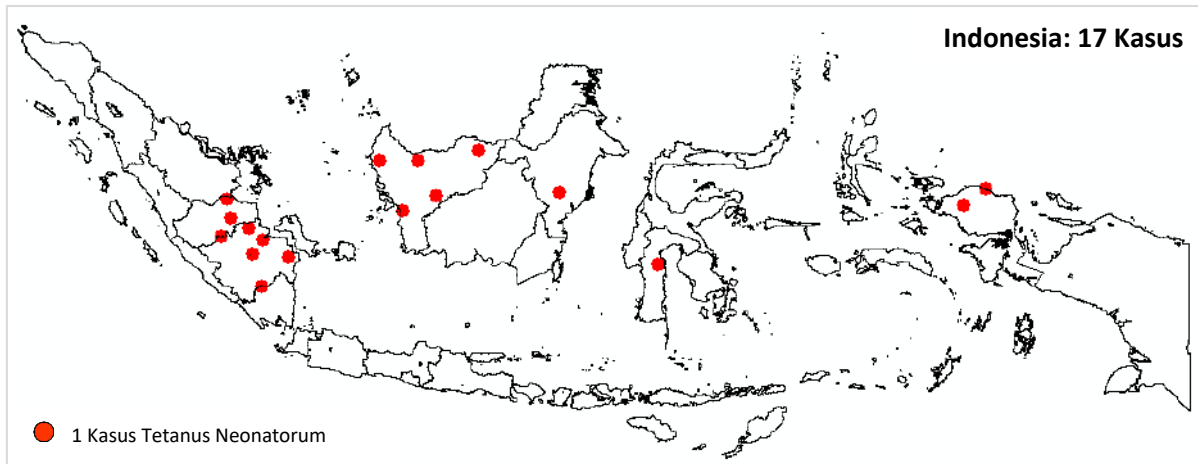
B. PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I)

1. Tetanus Neonatorum

Tetanus neonatorum merupakan penyakit tetanus yang menyerang bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir dapat terkena penyakit tetanus apabila Basil *Clostridium tetani* masuk ke dalam tubuhnya melalui luka. Infeksi ini dapat terjadi akibat pemotongan tali pusat dilakukan dengan alat yang tidak steril. Pada negara berkembang masih banyak ditemukan kasus tetanus neonatorum (TN), khususnya negara dengan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang rendah.

Jumlah kasus TN meningkat pada tahun 2019, yaitu sebesar 17 kasus, dimana sebelumnya terdapat 10 kasus pada tahun 2018. Meski demikian, tahun 2019 jumlah kasus meninggal akibat TN menurun menjadi 2 kasus meninggal, dengan CFR sebesar 11,76%. Dari 7 provinsi yang terdapat kasus TN, 2 provinsi yang terdapat kasus meninggal yaitu Jambi dan Sumatera Selatan. Jumlah kasus TN terbanyak terdapat di Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat yaitu sebanyak 5 kasus, dengan CFR sebesar 20% (Sumatera Selatan). Penyebaran kasus TN dapat dilihat pada Gambar 6.22.

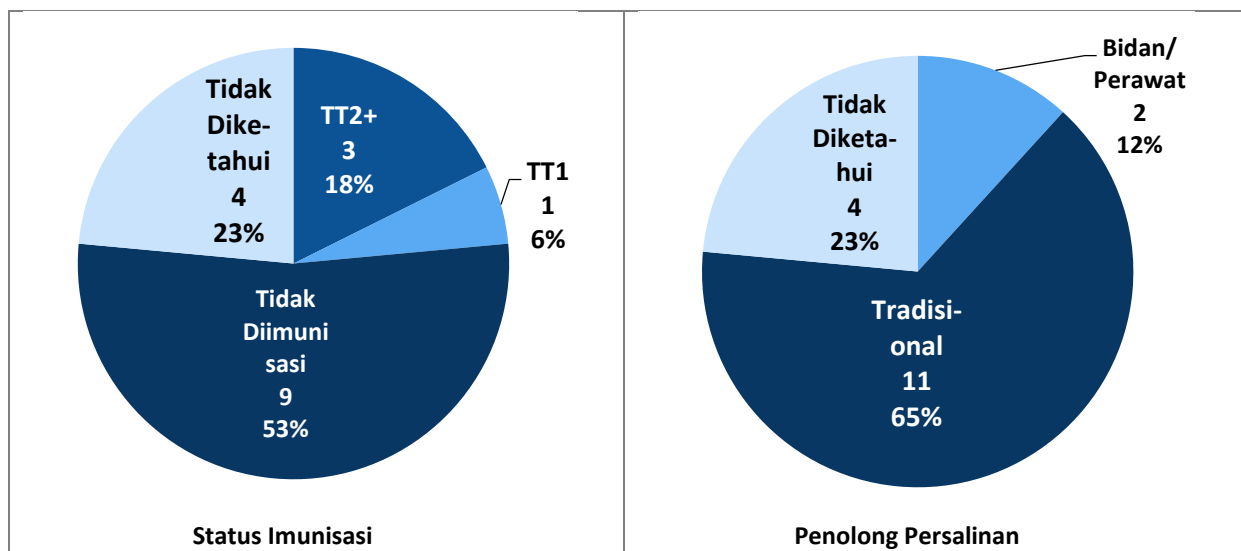
GAMBAR 6.22
DISTRIBUSI KASUS TETANUS NEONATORUM PER PROVINSI
TAHUN 2019

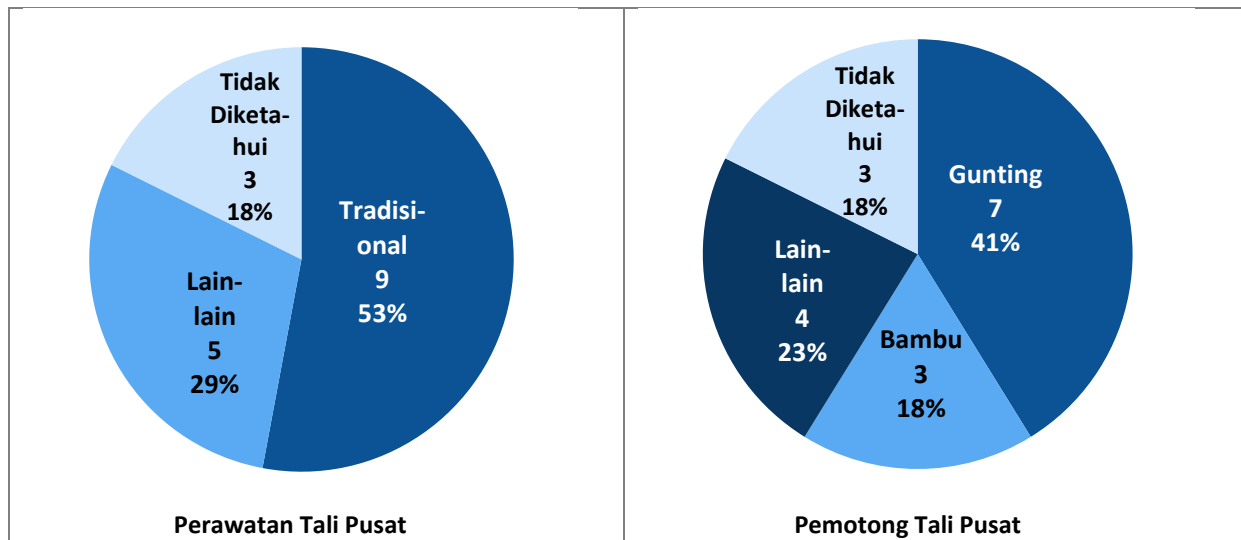


Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Berdasarkan faktor risiko penolong persalinan, sebanyak 9 kasus TN terjadi pada kelompok yang tidak diimunisasi, imunisasi TT2+ sebanyak 3 kasus, TT1 sebanyak 1 kasus, dan 4 kasus tidak diketahui status imunisasinya. Menurut penolong persalinan, terdapat 11 dari 17 kasus TN ditolong oleh penolong persalinan tradisional (misalnya dukun), 4 kasus tidak diketahui, dan 2 kasus yang persalinannya ditolong oleh bidan/perawat. Tetanus Neonatorum juga mungkin disebabkan oleh cara perawatan tali pusat dan/atau alat pemotong tali pusat yang tidak benar. Pada 2019, terdapat 9 kasus yang mendapatkan perawatan tali pusat dengan cara tradisional, 5 kasus dengan perawatan lain-lain, dan 3 kasus tidak diketahui. Sementara itu, berdasarkan alat yang digunakan untuk pemotongan tali pusat, terdapat 7 kasus TN yang tali pusatnya dipotong dengan menggunakan gunting, sedangkan 3 kasus menggunakan bambu, 4 kasus menggunakan alat lain, dan 3 kasus tidak diketahui alat yang digunakan.

GAMBAR 6.23
PROPORSI KASUS TETANUS NENONATORUM MENURUT FAKTOR RISIKO
TAHUN 2019





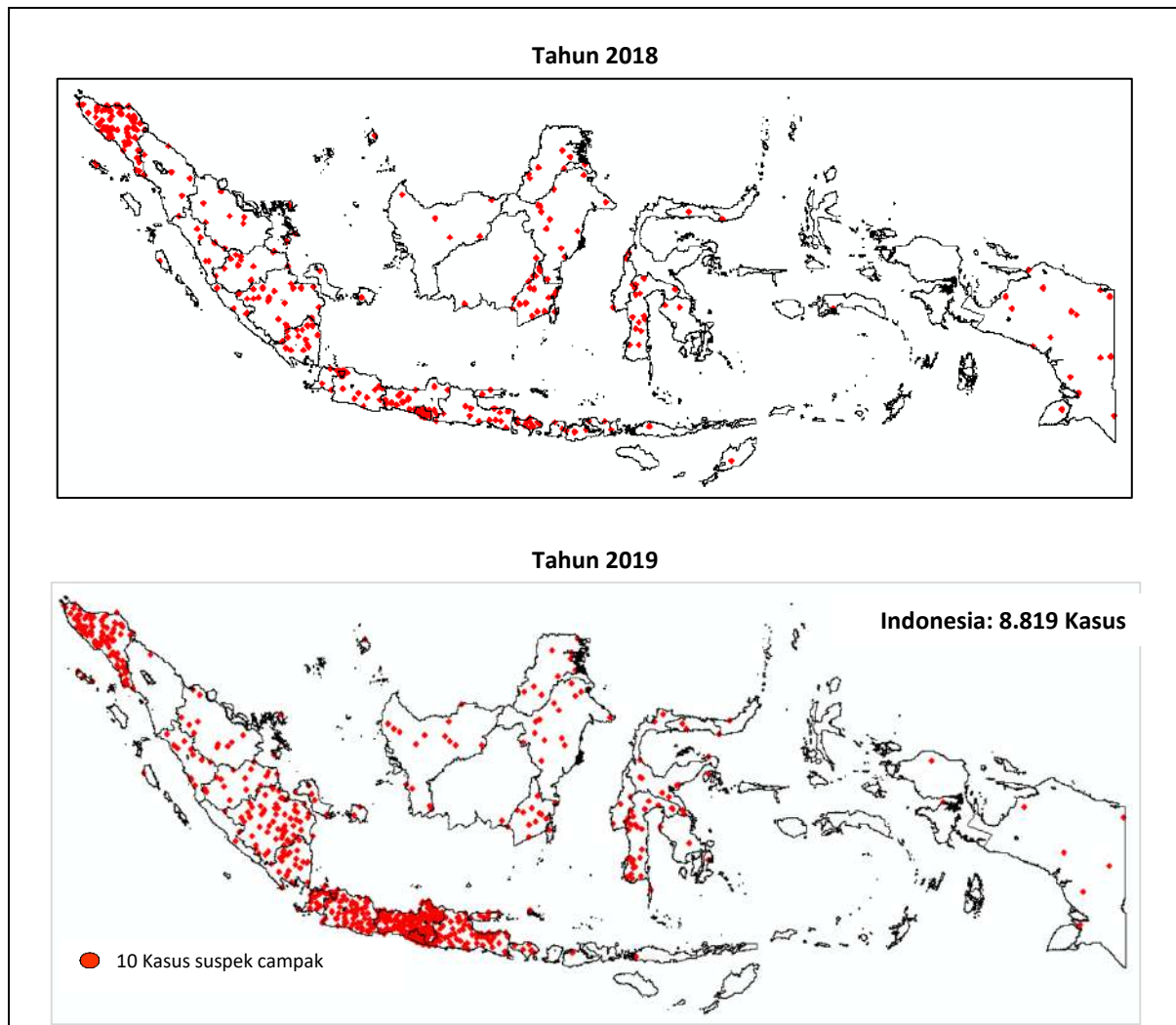
Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

2. Campak

Penyakit campak merupakan penyakit yang sangat menular. Campak menjadi penyebab penting kematian anak-anak di seluruh dunia. Kelompok anak usia pra sekolah dan usia SD merupakan kelompok rentan tertular penyakit campak. Penyakit campak disebabkan oleh virus dari genus Morbillivirus dan termasuk golongan *Paramyxovirus*. Campak disebut juga *morbili* atau *measles*. Campak ditularkan melalui udara yang terkontaminasi droplet dari hidung, mulut, atau tenggorokan orang yang terinfeksi. Gejala awal biasanya muncul 10-12 hari setelah infeksi, termasuk demam tinggi, pilek, mata merah, dan bintik-bintik putih kecil di bagian dalam mulut. Beberapa hari kemudian, ruam berkembang, mulai pada wajah dan leher bagian atas dan secara bertahap menyebar ke bawah. Campak berat mungkin terjadi pada anak-anak yang menderita kurang gizi, terutama pada mereka yang kekurangan vitamin A, atau yang sistem kekebalan tubuhnya telah dilemahkan oleh penyakit lain. Komplikasi yang paling serius termasuk kebutaan, ensefalitis (infeksi yang menyebabkan pembengkakan otak), diare berat dan dehidrasi, serta infeksi pernafasan berat seperti pneumonia. Seseorang yang pernah menderita campak akan mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tersebut seumur hidupnya.

Penyebaran kasus suspek campak hampir terdapat di seluruh provinsi Indonesia, hanya 1 provinsi yang tidak terdapat kasus suspek campak. Pada tahun 2019, terdapat 8.819 kasus suspek campak, meningkat jika dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 8.429 kasus. Kasus suspek campak terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah (1.562 kasus), DKI Jakarta (1.374 kasus), dan Aceh (972 kasus).

GAMBAR 6.24
SEBARAN KASUS SUSPEK CAMPAK DI INDONESIA
TAHUN 2018 DAN 2019

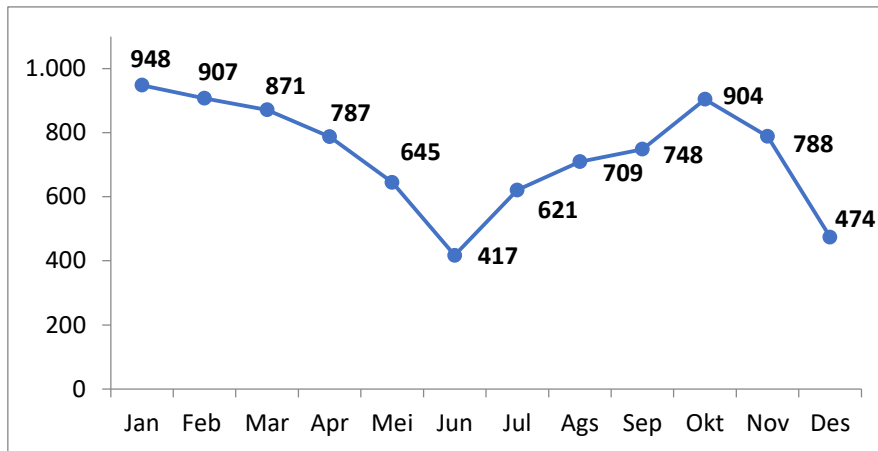


Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Suspek campak pada tahun 2019 tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, *dengan Incidence Rate (IR)* sebesar 3,29 per 100.000 penduduk. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 3,18 per 100.000 penduduk. Walaupun jumlah kasus suspek campak meningkat pada tahun 2019, namun provinsi yang melaporkan tidak ada kasus suspek campak menurun menjadi 1 provinsi, yaitu Maluku Utara, dimana pada tahun 2018 terdapat 2 provinsi melaporkan tidak ada kasus suspek campak.

Jika dilihat distribusi kasus suspek campak per bulan pada tahun 2019 (Gambar 6.25), dapat diketahui bahwa tren kasus suspek campak cenderung tinggi pada awal tahun dan menurun pada pertengahan dan akhir tahun. Jumlah kasus suspek campak tertinggi pada bulan Januari (948 kasus), sedangkan jumlah terendah terdapat pada bulan Juni (417 kasus). Penurunan jumlah kasus ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya komitmen dan dukungan pemangku program surveilans PD3I di daerah, meningkatnya penemuan kasus campak berbasis masyarakat atau *Case Base Measles Surveillance (CBMS)* dengan mengikutsertakan pelayanan swasta dalam menemukan dan melaporkan kasus campak, serta penguatan surveilans PD3I berbasis laboratorium.

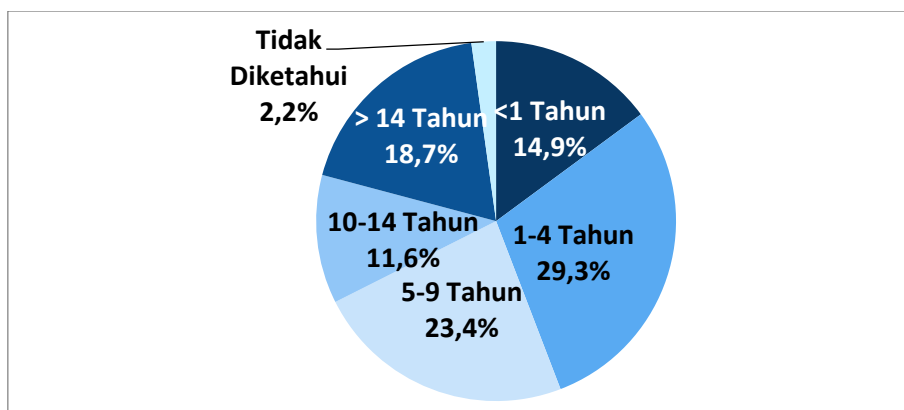
GAMBAR 6.25
JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK PER BULAN
DI INDONESIA TAHUN 2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Proporsi kasus suspek campak terbesar terdapat pada kelompok umur 1-4 tahun (29,3%), sedangkan proporsi kasus suspek terendah terdapat pada kelompok umur 10-14 tahun dan suspek dengan umur yang tidak diketahui, dengan persentase masing-masing sebesar 11,6% dan 2,2%. Suspek campak yang divaksinasi (menerima minimal satu dosis imunisasi campak) tahun 2019 sebanyak 3.962 orang, dengan proporsi sebesar 44,9%. Proporsi kasus suspek yang divaksinasi terhadap kasus suspek terbesar terjadi pada kelompok umur <1 tahun (93,1%). Gambar 6.26 memperlihatkan proporsi kasus suspek campak per kelompok umur. Rincian kasus suspek campak per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 62.a, 62.c, dan 62.d.

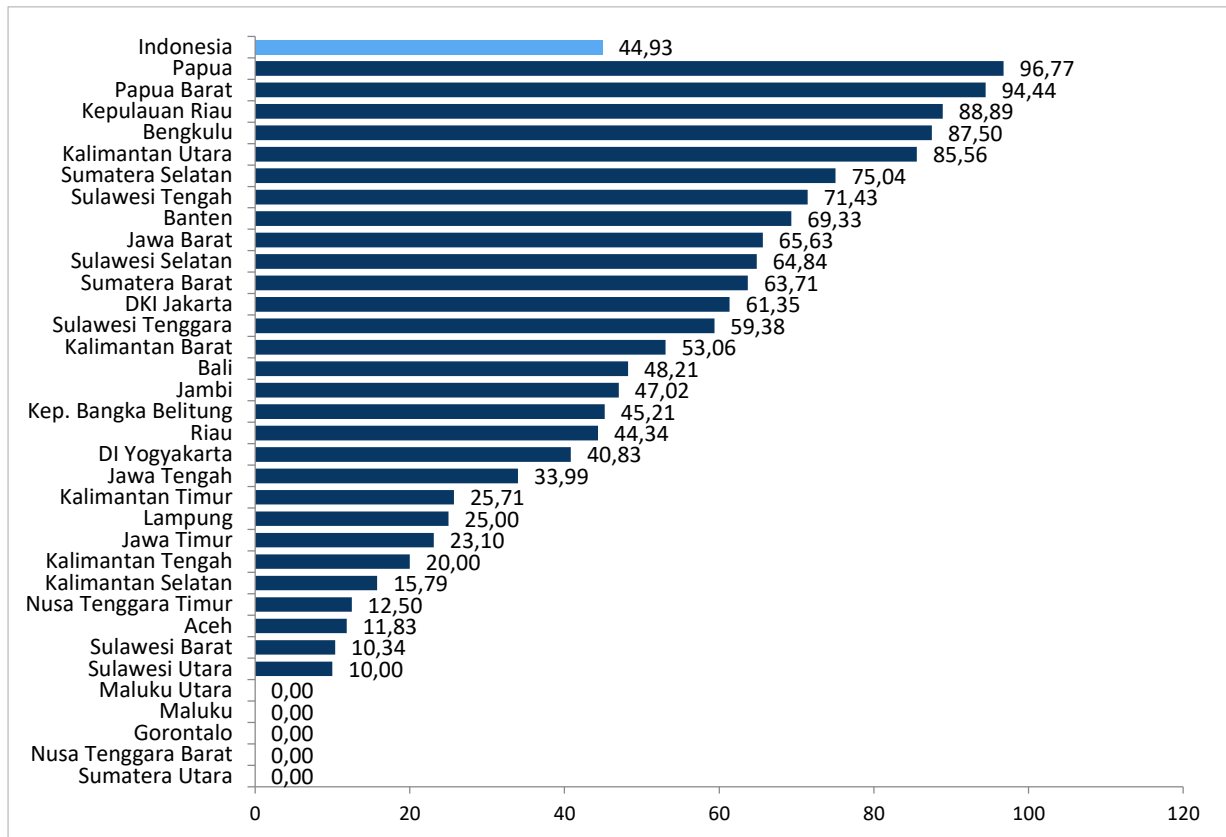
GAMBAR 6.26
PROPORSI SUSPEK CAMPAK BERDASARKAN UMUR DI INDONESIA
TAHUN 2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Provinsi dengan proporsi suspek divaksinasi terhadap total kasus suspek tertinggi yaitu Papua, Papua Barat, Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Kalimantan Utara. Sedangkan provinsi dengan proporsi terendah yaitu Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara. Gambar 6.27 memperlihatkan proporsi kasus suspek campak terhadap suspek yang divaksinasi menurut provinsi.

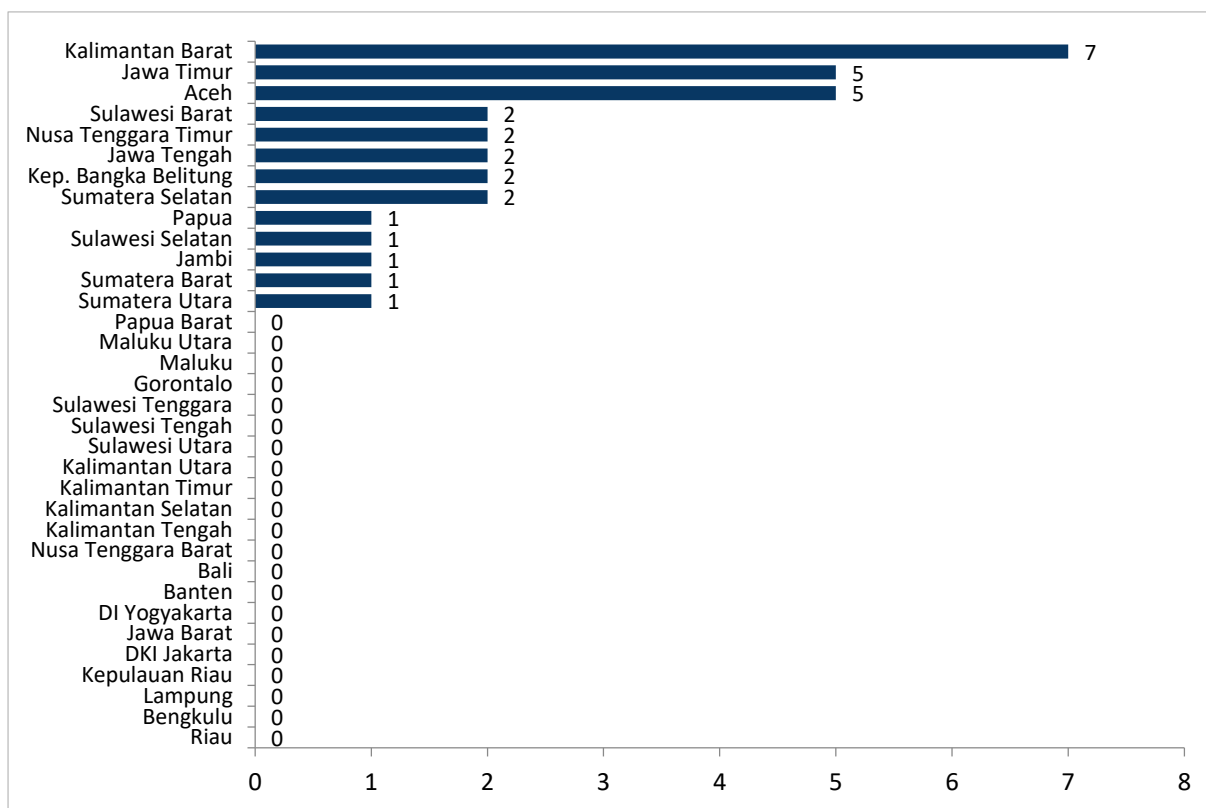
GAMBAR 6.27
PROPORSI SUSPEK CAMPAK YANG DIVAKSINASI
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Apabila terjadi 5 atau lebih kasus suspek campak dalam waktu 4 minggu berturut-turut yang terjadi secara mengelompok, dan telah dibuktikan adanya hubungan epidemiologis di suatu daerah, maka daerah tersebut dinyatakan KLB suspek campak. Pada tahun 2019, dari 8.819 kasus suspek campak terdapat 32 kasus KLB suspek campak. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018 yang terjadi sebanyak 85 KLB.

GAMBAR 6.28
FREKUENSI KLB SUSPEK CAMPAK
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

KLB suspek campak terbanyak terdapat pada Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 7 KLB dengan 147 kasus suspek. Diikuti oleh Provinsi Aceh dan Jawa Timur sebanyak 5 KLB dengan 972 dan 723 kasus. Sementara itu, walaupun di Provinsi Jawa Tengah terjadi 1.562 kasus suspek, namun hanya terdapat 2 kasus KLB suspek campak. Semua KLB suspek campak yang terjadi pada tahun 2019 dilaporkan tidak ada kematian. Frekuensi dan jumlah kasus pada KLB suspek campak menurut provinsi secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 62.e.

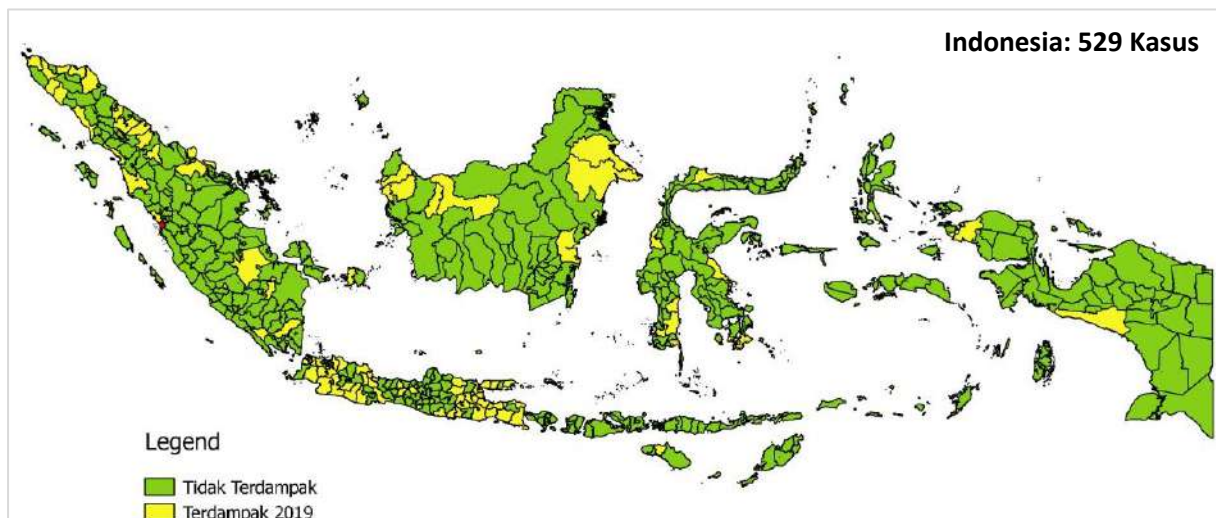
Sebaran KLB suspek campak berdasarkan konfirmasi laboratorium dari 184 total darah (serum) sampel tahun 2019, terdapat 54 kasus campak, 27 kasus rubella, 19 kasus gabungan (campak dan rubella), 82 kasus negatif, dan 48 kasus yang masih menunggu konfirmasi laboratorium.

3. Difteri

Penyakit difteri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Corynebacterium diphtheriae* yang terutama menginfeksi tenggorokan dan saluran udara bagian atas, dan menghasilkan racun yang mempengaruhi organ lain. Penyakit ini menyebar melalui kontak fisik langsung, atau melalui pernafasan di udara yang mengandung sekresi dari penderita yang batuk atau bersin. Penyakit difteri dapat menyerang orang yang tidak mempunyai kekebalan, terutama pada anak-anak (1-10 tahun).

Kasus difteri pada tahun 2019 menyebar di hampir semua wilayah di Indonesia. Jumlah kasus difteri pada tahun 2019 sebanyak 529 kasus, jumlah kematian sebanyak 23 kasus, dengan *CFR* sebesar 4,35%. Jumlah kasus difteri tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun 2018 (1.386 kasus). Jumlah kematian akibat difteri juga mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya (29 kasus). Tetapi, *CFR* pada tahun 2019 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 (2,09%). Berdasarkan provinsi, jumlah kasus terbanyak terdapat di Jawa Timur yakni sebanyak 178 kasus. Sementara itu, pada tahun 2019 terdapat 12 provinsi tidak ditemukan kasus difteri.

GAMBAR 6.29
SEBARAN KASUS DIFTERI MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019



Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Tatalaksana upaya penanggulangan dan pencegahan KLB difteri pada tahun 2019 meliputi:

- tatalaksana kasus termasuk pemberian Anti Difteri Serum (ADS) yang dikoordinasikan dengan komite ahli penanggulangan difteri baik pusat maupun daerah (komite ahli di provinsi masing-masing),
- penyelidikan epidemiologi pada setiap kasus suspek Difteri untuk mencari kasus tambahan dan mengidentifikasi kontak,
- memberikan kemoprofilaksis kepada kontak erat selama 7 hari. Namun, hal ini mempunyai hambatan dan tantangan karena kemoprofilaksis yang diberikan dengan frekuensi minum obat sehari 4 kali mempunyai efek samping mual, menyebabkan kurangnya kepatuhan dalam mengonsumsi kemoprofilaksis (obat),
- sudah melakukan *Outbreak Response Immunization (ORI) Cluster I – IV*. *ORI* dilaksanakan sebanyak 3 putaran di 4 cluster pada tahun 2017 – 2018 dengan tujuan untuk memutuskan rantai penularan penyakit Difteri dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Cluster I: Putaran I sebesar 86,3 %, Putaran II sebesar 83,6 % dan Putaran III sebesar 59,3 % pada Provinsi DKI Jakarta (Kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara), Provinsi Jawa Barat (Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kab. Tangerang), dan Provinsi Banten (Kab/Kota Serang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan).

- b. Cluster II: Putaran I sebesar 41,6%, Putaran II sebesar 38,0% sedangkan Putaran III 2.7% pada Provinsi Aceh (Kab. Pidie, Kab. Aceh Utara, Kota Banda Aceh, dan Kota Lhokseumawe), Provinsi Sumatera Barat (Kota Padang dan Kota Payukumbuh), Provinsi Sumatera Selatan (Kota Palembang), Provinsi Lampung (Kab. Lampung Utara, Kab. Lampung Tengah, dan Kota Bandar Lampung), Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Bandung Barat), Provinsi Kalimantan Barat (Kab. Sintang dan Kota Pontianak), Provinsi Kalimantan Selatan (Kota Bajar Baru), dan Provinsi Kalimantan Timur (Kab. Kutai Kertanegara, Kab. Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang).
- c. Cluster III: Putaran I sebesar 70,2%, Putaran II sebesar 72,4 % dan Putaran III sebesar 12.8% di Provinsi DKI Jakarta (Kota Jakarta Selatan dan Kota Jakarta Pusat) dan Provinsi Banten (Kab. Lebak).
- d. Cluster Jawa Timur (38 Kab/Kota): Putaran I sebesar 381%, Putaran II sebesar 95.6%, dan Putaran III sebesar 96.2%

4. Polio dan AFP (*Acute Flaccid Paralysis/Lumpuh Layu Akut*)

Polio merupakan penyakit yang sangat menular dan disebabkan oleh virus. Penyakit ini menyerang sistem syaraf, dan dapat menyebabkan kelumpuhan total hanya dalam hitungan jam. Virus ini terutama ditularkan dari orang ke orang melalui fekal-oral. Gejala awal yang terjadi adalah demam, kelelahan, sakit kepala, muntah, kekakuan pada leher, dan nyeri pada tungkai. 1 dari 200 infeksi menyebabkan kelumpuhan permanen (biasanya di bagian tungkai). Diantara mereka yang lumpuh, 5% hingga 10% akan berakhir pada kematian karena kelumpuhan terjadi pada otot-otot pernapasan mereka.

Pada pertemuan tahunan bulan Mei 1988, the World Health Assembly (WHA), suatu forum sidang tertinggi yang diselenggarakan oleh organisasi kesehatan dunia (World Health Organization/WHO), telah mengeluarkan resolusi untuk membasmi penyakit polio dari dunia ini. Pada 27 Maret 2014, Indonesia telah berhasil mendapatkan sertifikasi bebas polio bersama negara-negara *South East Asia Region (SEARO)* lainnya. Namun, masih ada 2 negara, yaitu Afghanistan dan Pakistan yang masih endemik polio.

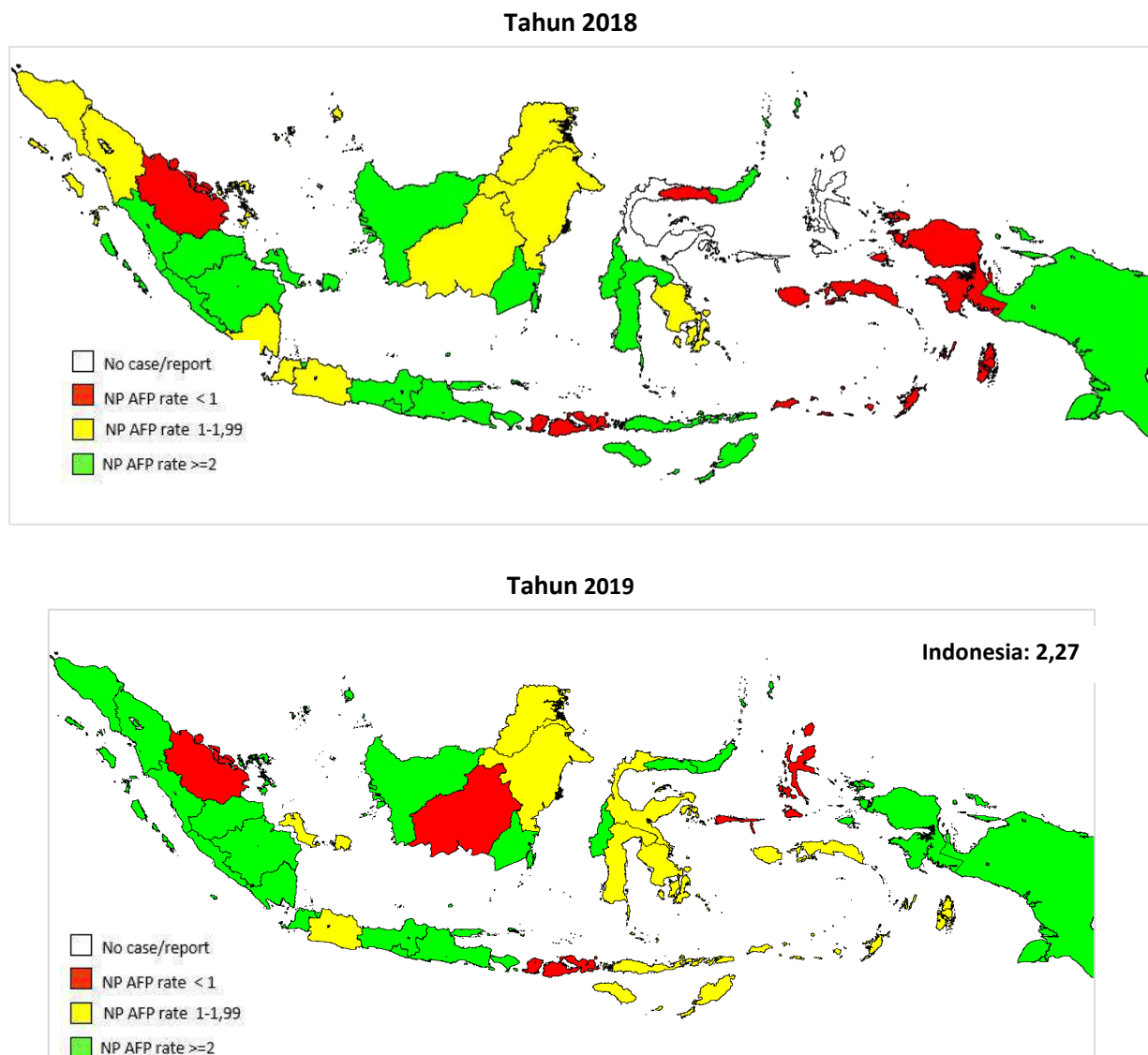
Pada bulan November 2018, dilaporkan satu kasus polio akibat VDPV tipe 1 di Yahukimo, Papua. Penyelidikan yang dilakukan selanjutnya menemukan bahwa dua spesimen tinja dari anak sehat di sekitar kasus juga positif untuk jenis virus yang sama, yang membuktikan bahwa virus tersebut bersirkulasi sehingga kondisi ini dinyatakan sebagai KLB. Sebagai respon, dilakukan sub PIN di Papua dan Papua Barat dengan menggunakan bOPV. KLB polio akibat VDPV bisa terjadi di mana saja bila cakupan imunisasi polio rendah selama bertahun-tahun. Untuk menghindari kasus serupa, imunisasi polio harus dijaga tetap tinggi (lebih dari 95% anak diimunisasi) dan merata, dan semua kasus lumpuh layu mendadak (AFP) harus ditemukan secara dini dan dilaporkan.

Penemuan adanya transmisi virus polio liar dapat dilakukan melalui surveilans AFP, dimana semua kasus lumpuh layu akut pada anak usia <15 tahun (yang merupakan kelompok rentan terhadap penyakit polio) diamati. Surveilans AFP merupakan indikator sensitivitas deteksi virus polio liar. Surveilans AFP juga penting untuk dokumentasi mengenai tidak adanya virus polio liar sebagai syarat sertifikasi bebas polio.

Kasus lumpuh layuh akut yang diduga kasus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio adalah definisi dari *nonpolio AFP*. Kementerian Kesehatan menetapkan *non polio AFP rate* minimal 2/100.000 populasi penduduk usia <15 tahun. Pada tahun 2019, secara nasional *non polio AFP rate* sebesar 2,27/100.000 populasi penduduk <15 tahun. Hal itu berarti angka ini sudah mencapai standar minimal penemuan. *Non polio AFP rate* tahun 2019 lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2018, yaitu sebesar 2,17/100.000 populasi penduduk <15 tahun.

Pada tahun 2019 ditemukan kasus NonPolio AFP di seluruh provinsi di Indonesia. Sebanyak 21 provinsi sudah mencapai standar minimal penemuan *non polio AFP rate* sebesar ≥ 2 per 100.000 penduduk berusia kurang dari 15 tahun, namun masih terdapat 13 provinsi dengan *non polio AFP rate* yang belum mencapai standar minimal penemuan.

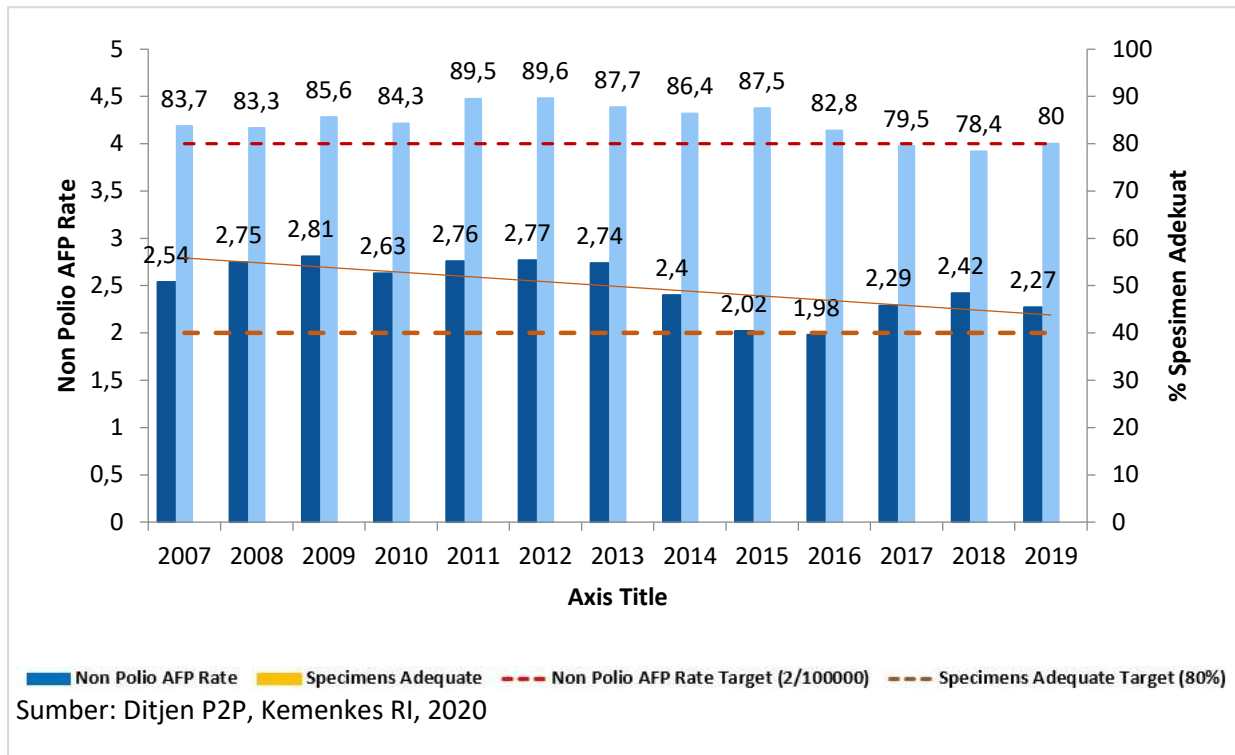
GAMBAR 6.30
PENCAPAIAN NON POLIO AFP RATE PER 100.000 PENDUDUK UMUR < 15 TAHUN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2018 DAN 2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

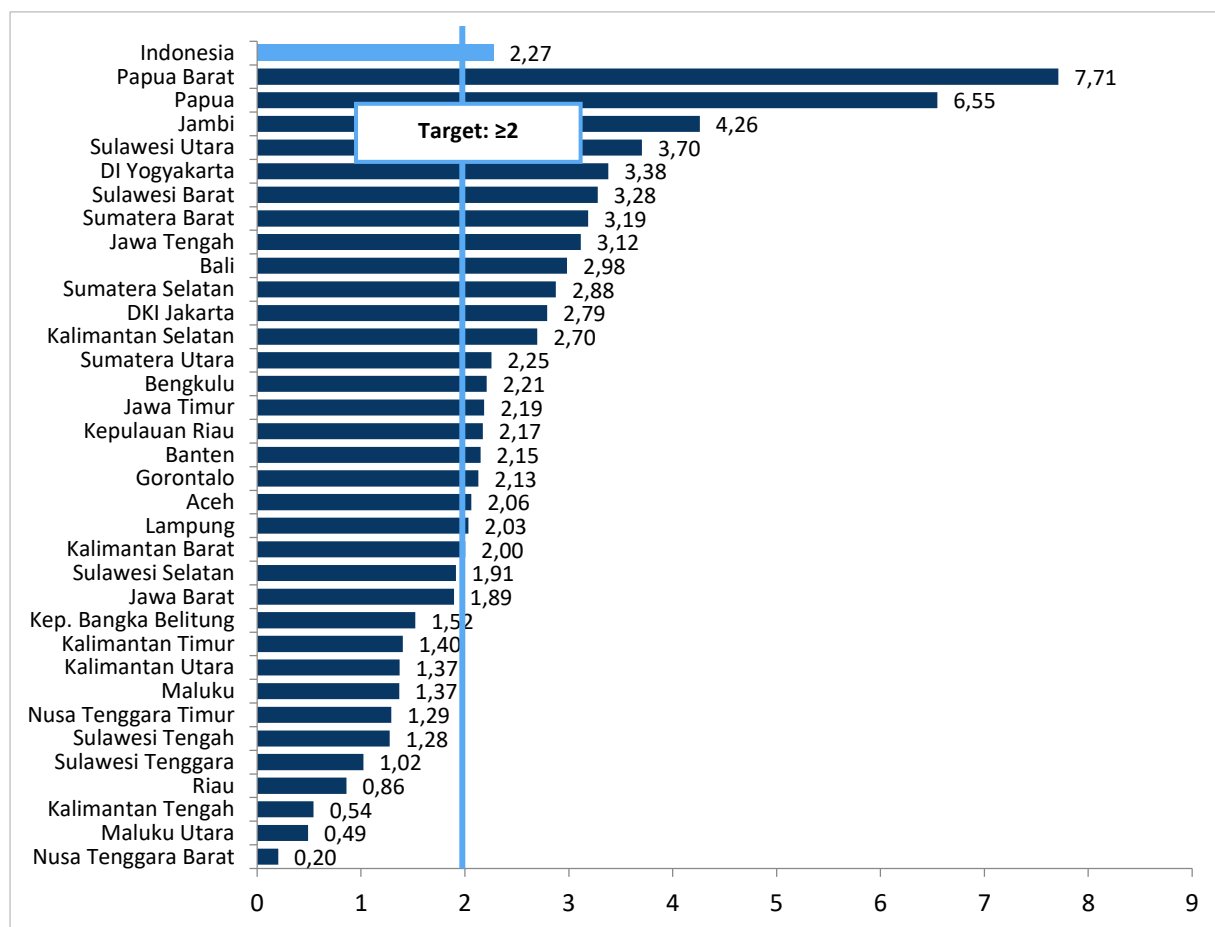
Sejak tahun 2007 hingga 2019, secara umum target Non Polio AFP rate sebesar 2 per 100.000 penduduk berusia <15 tahun telah tercapai. Hanya pada tahun 2016 saja kinerja capaian tidak mencapai target. Selanjutnya pada tahun 2017 – 2019 standar minimal Non Polio AFP Rate sebesar ≥ 2 telah dapat dipenuhi. Begitu juga dengan persentase spesimen adekuat yang secara umum sejak tahun 2007 telah mencapai target sebesar 80%. Hanya pada tahun 2017 dan 2018 saja capaian kinerja berada sedikit di bawah target (79,5% dan 78,4%). Selanjutnya pada tahun 2019 standar minimal spesimen adekuat sebesar $\geq 80\%$ telah dapat dipenuhi.

GAMBAR 6.31
CAPAIAN SURVEILANS AFP DI INDONESIA TAHUN 2007 - 2019



Provinsi Papua Barat dan Papua merupakan provinsi dengan *non polio AFP rate* per 100.000 penduduk umur <15 tahun tertinggi, yaitu sebesar 7,71 dan 6,5 per 100.000 penduduk, sedangkan provinsi terendah yaitu Nusa Tenggara Barat dan Maluku Utara yaitu sebesar 0,20 dan 0,49 per 100.000 penduduk.

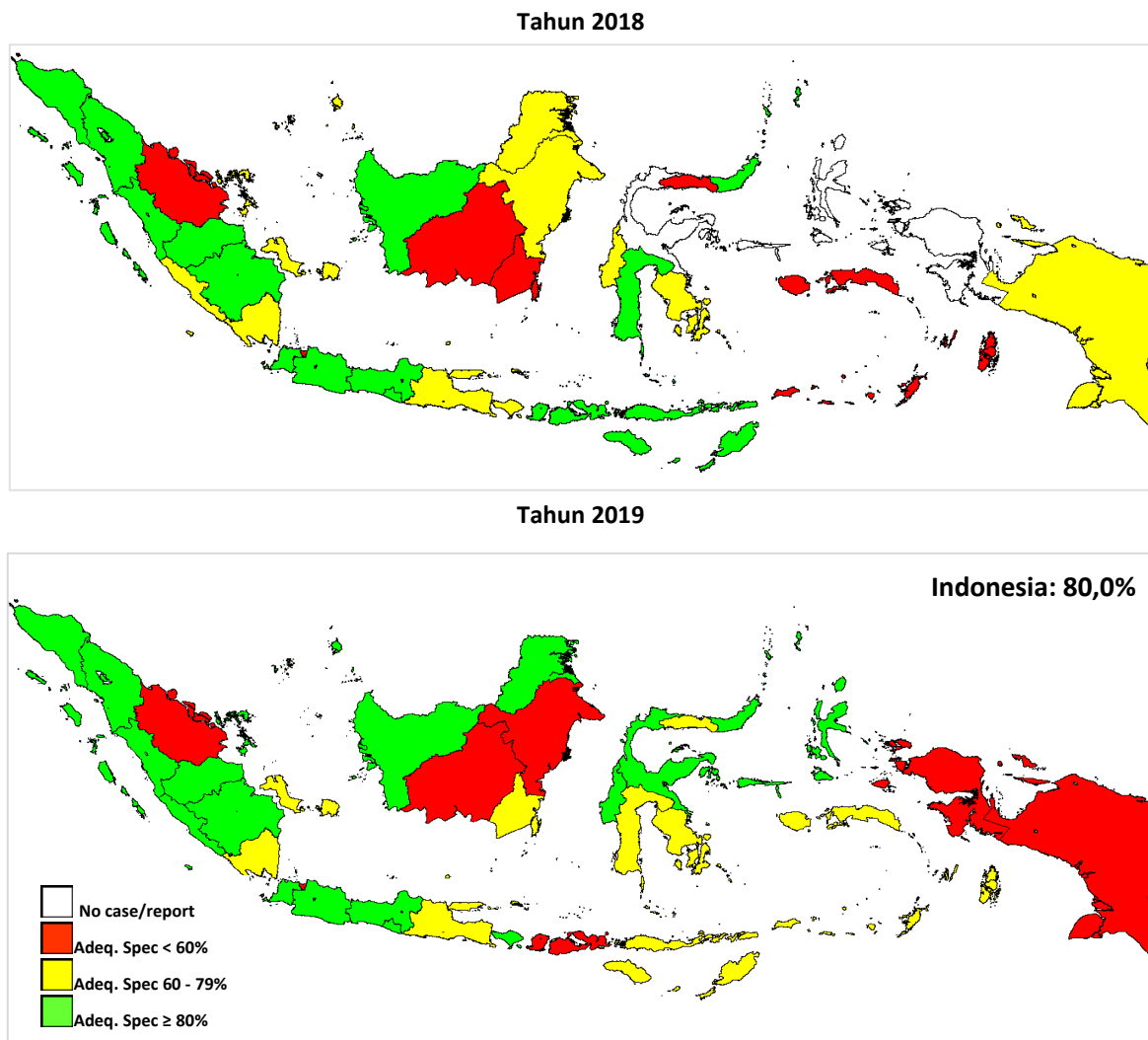
GAMBAR 6.32
NON POLIO AFP RATE PER 100.000 PENDUDUK < 15 TAHUN
DI INDONESIA TAHUN 2019



Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2020

Pemeriksaan spesimen tinja dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya virus polio liar pada kasus *AFP* yang ditemukan dalam kegiatan intensifikasi surveilans. Namun, tidak semua kasus *AFP* yang dilacak harus dikumpulkan spesimen tinjanya. Pengumpulan spesimen tinja tergantung dari lamanya kelumpuhan kasus *AFP*. Oleh karena itu, diperlukan spesimen adekuat yang sesuai dengan persyaratan, yaitu diambil dalam kurun waktu 14 hari pertama setelah kelumpuhan dan suhu spesimen harus berada diantara 2°C - 8°C ketika sampai di laboratorium.

GAMBAR 6.33
PENCAPAIAN SPESIMEN ADEKUAT MENURUT PROVINSI
TAHUN 2018 DAN 2019



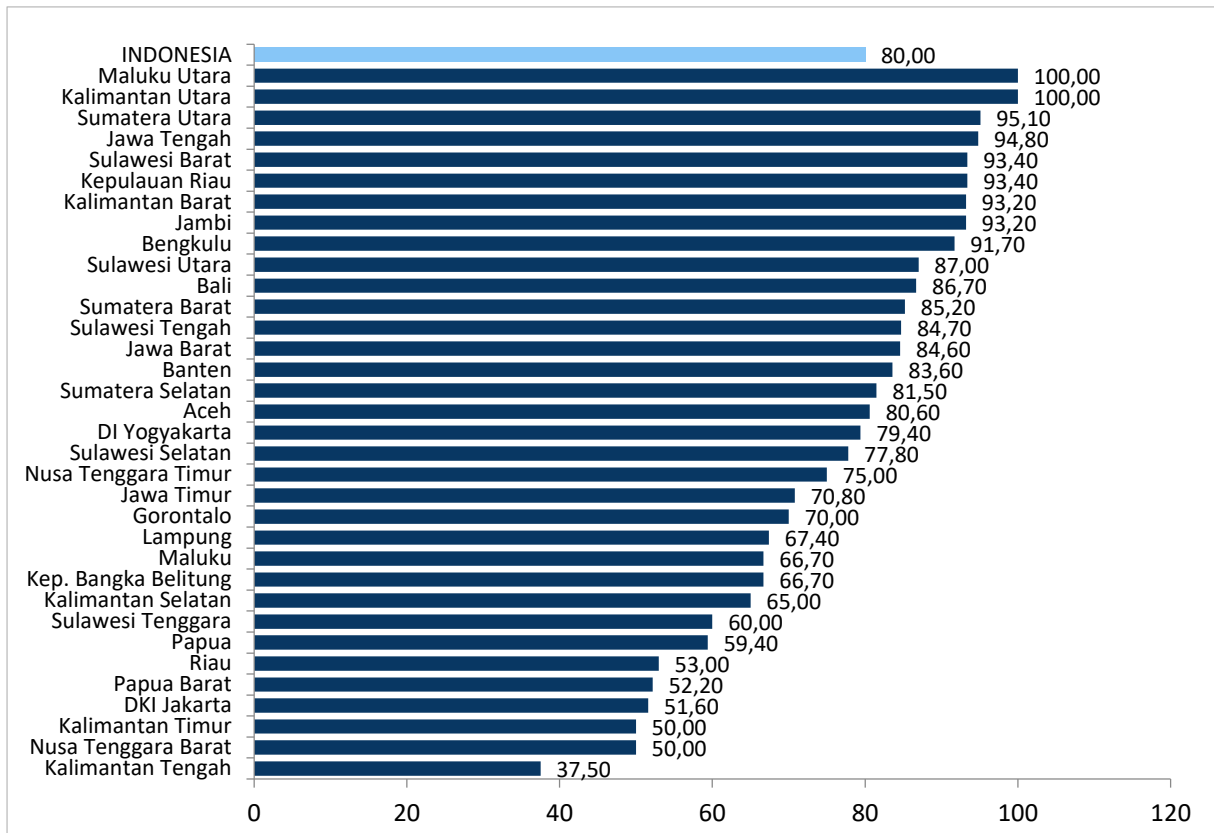
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Semua kasus *AFP* seharusnya dilakukan pemeriksaan klinis dan investigasi virologi, dan setidaknya 80% kasus *AFP* harus memenuhi standar spesimen adekuat. Spesimen dinyatakan adekuat jika dua spesimen tinja diperiksa dengan kuantitas yang mencukupi untuk analisis laboratorium, setidaknya pengumpulan spesimen tinja 1 dan tinja 2 dengan rentang waktu 24 jam, dalam 14 hari pertama setelah kelumpuhan, dan dibawa ke laboratorium dengan menggunakan proses *cold chain* dan dokumen yang sesuai.

Spesimen adekuat di Indonesia pada tahun 2019 telah sesuai dengan standar, yaitu sebesar 80%. Meskipun demikian, sebanyak 17 provinsi belum mencapai standar spesimen adekuat pada tahun 2019, sedangkan 17 provinsi lainnya telah mencapai standar. Persentase spesimen adekuat *AFP* menurut provinsi tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 6.34

Informasi lebih rinci mengenai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi menurut provinsi dan kelompok umur dapat dilihat pada Lampiran 61-63.

GAMBAR 6.34
PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT AFP
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Pada tahun 2019 pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan mengendalikan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). upaya-upaya tersebut yaitu sebagai berikut.

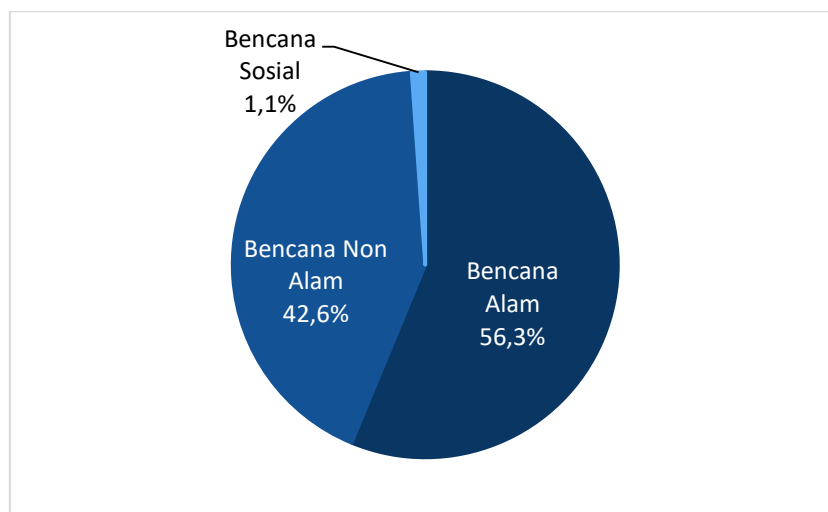
1. Meningkatkan cakupan imunisasi dasar dan lanjutan, karena imunisasi merupakan pencegahan spesifik dari PD3I;
2. Melakukan bimbingan teknis dan supervisi program surveilans dan Imunisasi;
3. Melaksanakan peningkatan kapasitas PD3I dalam rangka meningkatkan cakupan surveilans AFP dan Campak-Rubella serta pengendalian Difteri;
4. Menyusun, menyediakan, dan mendistribusikan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk program surveilans PD3I;
5. Menyediakan dan mendistribusikan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) program surveilans PD3I;
6. Melaksanakan pertemuan rutin dengan Komisi Ahli (Komli) Difteri, Komli Campak-Rubella/CRS, Komli surveilans AFP dan Komli Eradikasi Polio (ERAPO), untuk membahas hal-hal penting dan mendesak dalam rangka pengendalian PD3I;
7. Melaksanakan pertemuan jejaring laboratorium Difteri, Campak-Rubella/CRS, dan Polio;
8. Membentuk Posko Pendampingan Masalah Kesehatan di Papua dengan tugas utamanya adalah komando penanggulangan KLB Polio di Papua; dan
9. Melakukan pendampingan Penyelidikan Epidemiologi penyakit potensial KLB termasuk PD3I ke daerah-daerah.

C. DAMPAK KESEHATAN AKIBAT BENCANA

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana dikategorikan menjadi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Di Indonesia terjadi 448 krisis kesehatan selama tahun 2019. Jumlah kejadian krisis kesehatan tahun 2019 meningkat jika dibandingkan dengan kejadian tahun 2018, yaitu sebanyak 358 bencana. Pada tahun 2017 terdapat definisi baru untuk krisis kesehatan pada Sistem Informasi Penanggulangan Krisis kesehatan, yaitu harus ada pernyataan kedaruratan oleh kepala daerah atau jumlah populasi terdampak minimal 50 orang dan terdapat korban/pengungsi/fasilitas kesehatan rusak.

GAMBAR 6.35
PERSENTASE KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI BENCANA
DI INDONESIA TAHUN 2019

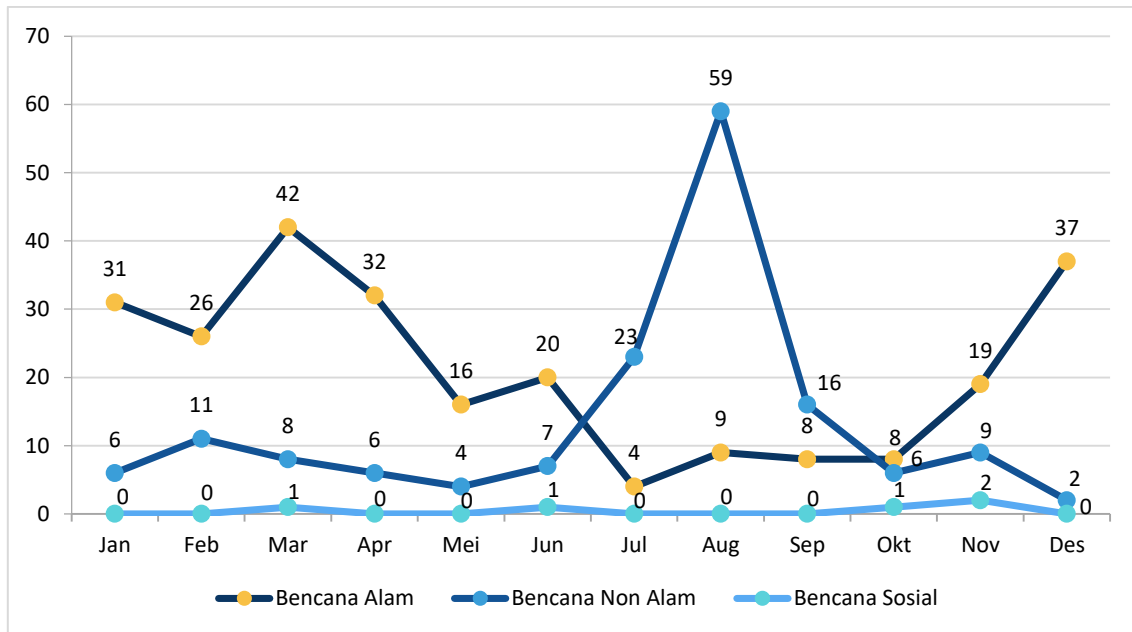


Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2020

Di Indonesia kejadian krisis kesehatan akibat bencana alam merupakan yang paling sering terjadi pada tahun 2019 dengan persentase 56,3%. Sisanya, sebanyak 42,6% bencana non alam dan 1,1% bencana sosial.

Pada tahun 2019, banjir merupakan krisis kesehatan yang sering terjadi seperti tahun sebelumnya. Frekuensi banjir sebanyak 97 kejadian (22%) dan meliputi 27 dari 34 provinsi di Indonesia. Kejadian terbesar kedua selama tahun 2019 adalah kebakaran hutan dan lahan sebanyak 89 kejadian (20%) yang meliputi 7 provinsi.

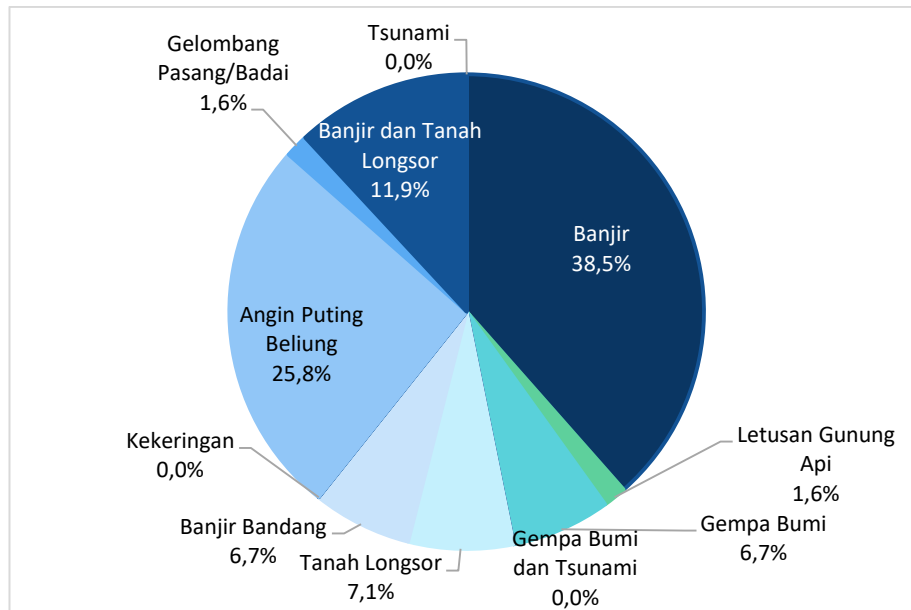
GAMBAR 6.36
JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI DAN WAKTU KEJADIAN
DI INDONESIA TAHUN 2019



Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2020

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah krisis kesehatan akibat bencana alam tertinggi terjadi pada bulan Maret yang sebagian besarnya adalah banjir. Sedangkan jumlah bencana non alam tertinggi di bulan Agustus yang sebagian besarnya adalah kebakaran hutan dan lahan, hal ini terjadi karena cuaca panas dan kering di musim kemarau pada bulan Agustus. Selain itu, bencana sosial tertinggi terjadi pada bulan November. Secara keseluruhan, jumlah bencana terbanyak terjadi di bulan Agustus dan terendah di bulan Oktober.

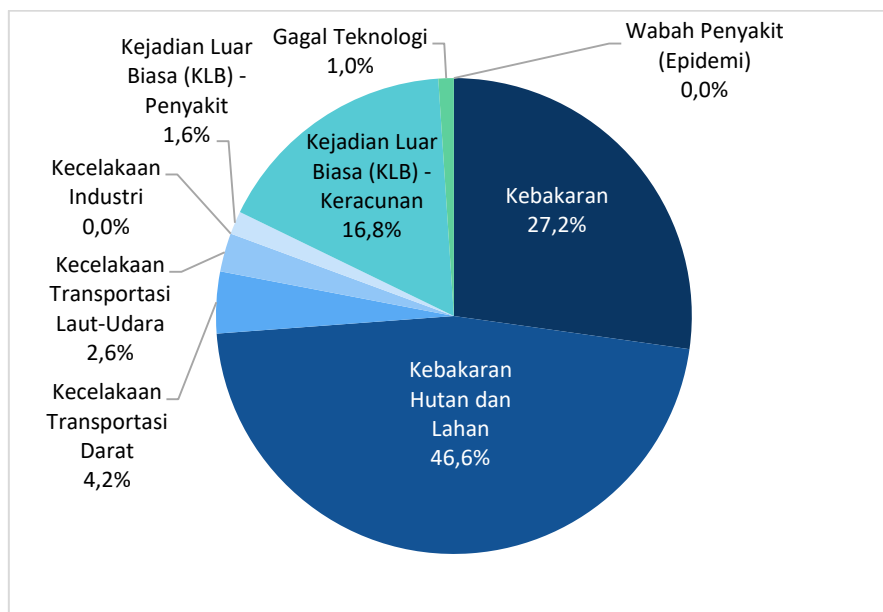
GAMBAR 6.37
PERSENTASE KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA ALAM DI INDONESIA
TAHUN 2019



Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2020

Bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia pada tahun 2019 yaitu bencana banjir (38,5%) diikuti angin puting beliung (25,8%), dan banjir dan tanah longsor (11,9%).

GAMBAR 6.38
PERSENTASE KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA NON ALAM DI INDONESIA
TAHUN 2019

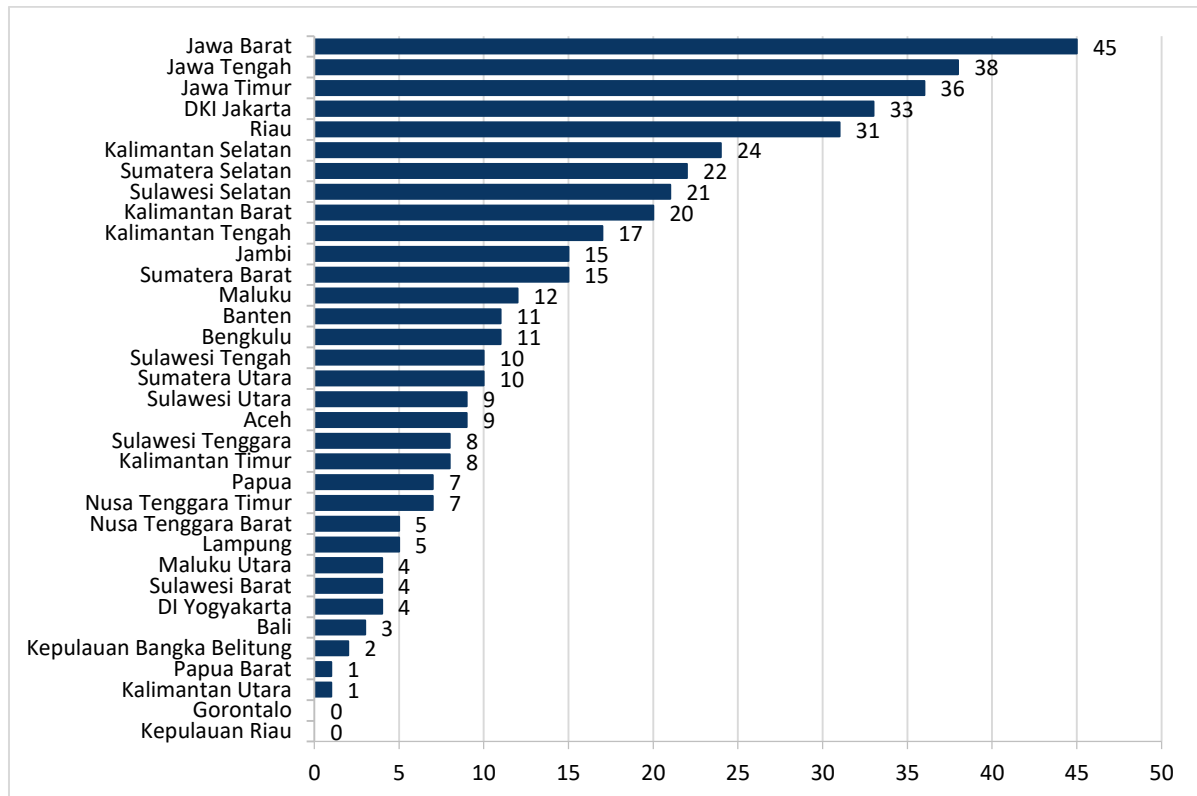


Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2020

Bencana non alam yang paling sering terjadi di Indonesia pada tahun 2019 yaitu kebakaran hutan dan lahan sebesar 46,6% dari total bencana non alam dan diikuti oleh kebakaran (27,2%) dan kejadian luar biasa (KLB) keracunan (16,8%).

Di antara ketiga jenis bencana, bencana sosial termasuk paling jarang terjadi dibandingkan dengan jenis bencana lainnya. Pada tahun 2019 terjadi 5 bencana sosial yang terdiri dari 3 konflik atau kerusuhan sosial dan 2 aksi teror dan sabotase.

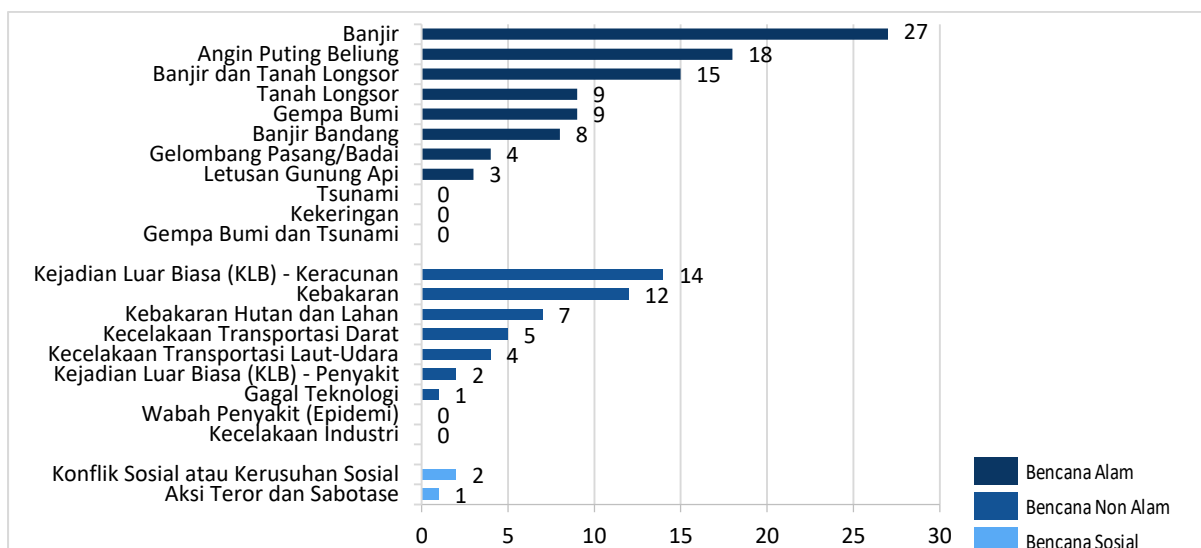
GAMBAR 6.39
JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2020

Dari 34 provinsi di Indonesia, Jawa Barat merupakan provinsi yang terbanyak mengalami kejadian bencana di tahun 2019 yaitu sebanyak 45 kejadian, diikuti Jawa Tengah dengan 38 kejadian dan Jawa Timur dengan 36 kejadian bencana. Pada tahun sebelumnya ketiga provinsi tersebut juga termasuk tiga provinsi tertinggi dengan kejadian bencana terbanyak di tahun 2018. Di Provinsi Gorontalo dan Kepulauan Riau tidak ada kejadian bencana yang terjadi di tahun 2019.

GAMBAR 6.40
JUMLAH PROVINSI TERKENA KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA
TAHUN 2019



Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2020

Krisis kesehatan akibat bencana alam dengan jumlah provinsi paling banyak yaitu bencana banjir sebanyak 27 provinsi. Bencana non alam terbanyak yaitu kejadian luar biasa (KLB) keracunan yang terjadi di 14 provinsi, sedangkan bencana sosial yang terjadi di 2 provinsi yaitu konflik atau kerusuhan sosial.

TABEL 6.1
JUMLAH KEJADIAN BENCANA DAN JUMLAH KORBAN YANG DITIMBULKAN TAHUN 2019

No	Jenis Bencana	Frekuensi	Jumlah Provinsi	Meninggal	Luka Berat/ Rawat Inap	Luka Ringan/Rawat Jalan	Hilang	Pengungsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Banjir	97	27	43	183	19.661	5	104.821
2	Letusan Gunung Api	4	3	0	0	713	0	286
3	Gempa Bumi	17	9	64	147	7.732	0	306.412
4	Gempa Bumi dan Tsunami	0	0	0	0	0	0	0
5	Tanah Longsor	18	9	34	20	2	20	1.513
6	Banjir Bandang	17	8	109	157	11.921	92	19.164
7	Kekeringan	0	0	0	0	0	0	0
8	Angin Puting Beliung	65	18	4	36	146	0	6.238
9	Gelombang Pasang/Badai	4	4	0	0	31	0	402
10	Banjir dan Tanah Longsor	30	15	98	87	3.648	6	8.316
11	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Alam		252		352	630	43.854	123	447.152
1	Kebakaran	52	12	3	14	3.085	0	10.800
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	89	7	0	0	1.184.968	0	132
3	Kecelakaan Transportasi Darat	8	5	69	54	184	6	0
4	Kecelakaan Transportasi Laut-Udara	5	4	34	56	147	6	0
5	Kecelakaan Industri	0	0	0	0	0	0	0
6	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Penyakit	3	2	8	7	846	0	0
7	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Keracunan	32	14	10	1.158	1.959	0	0
8	Gagal Teknologi	2	1	1	0	118	0	0
9	Wabah Penyakit (Epidemi)	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Non Alam		191		125	1.289	1.191.307	12	10.932
1	Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial	3	2	4	10	2	0	4.536
2	Aksi Teror dan Sabotase	2	1	3	8	0	0	0
Jumlah Bencana Sosial		5		7	18	2	0	4.536
Indonesia		448		484	1.937	1.235.163	135	462.620

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2020

Pada tahun 2019 kejadian bencana yang paling banyak menyebabkan korban meninggal adalah bencana alam sebanyak 352 orang, dari bencana alam tersebut, banjir bandang menyebabkan kematian terbanyak sebesar 109 orang. Sedangkan, bencana yang paling banyak menimbulkan luka berat/rawat inap yaitu bencana non alam sebanyak 1.289 dan luka ringan sebanyak 1.191.307 orang. Dari bencana non alam tersebut KLB keracunan menyebabkan luka berat terbanyak sebesar 1.158 orang, kebakaran hutan dan lahan menyebabkan luka ringan terbanyak sebesar 1.184.968 orang. Bencana alam juga menyebabkan jumlah orang hilang dan pengungsi paling banyak sebesar 123 orang dan 447.152 pengungsi. Banjir bandang menyebabkan orang hilang terbanyak sebesar 92 orang dan gempa bumi menyebabkan pengungsi terbanyak sebesar 306.412 pengungsi.

D. PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZONOSIS

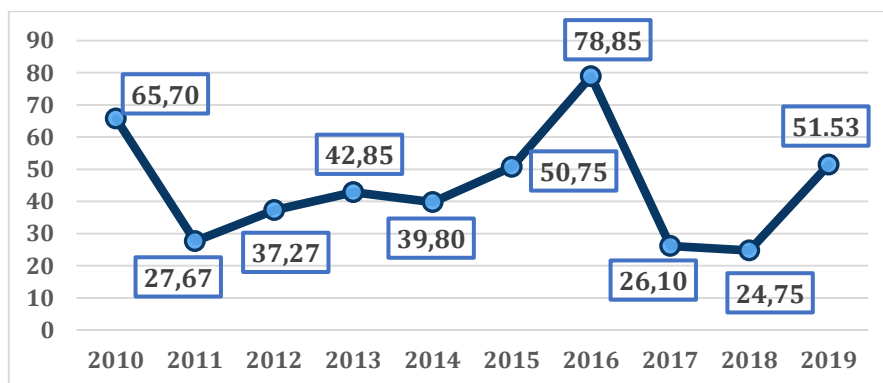
1. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus *Dengue* dan ditularkan melalui vektor nyamuk dari spesie *Aedes aegypti* atau *Aedes albopictus*. Peran vektor dalam penyebaran penyakit menyebabkan kasus banyak ditemukan pada musim hujan ketika munculnya banyak genangan air yang menjadi tempat perindukan nyamuk. Selain iklim dan kondisi lingkungan, beberapa studi menunjukkan bahwa DBD berhubungan dengan mobilitas dan kepadatan penduduk, dan perilaku masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut menjadi landasan dalam upaya pencegahan dan pengendalian DBD.

a. Kesakitan dan Kematian Akibat DBD

Kasus DBD ditegakkan dengan diagnosa yang terdiri dari gejala klinis dan hasil laboratorium yang megindikasikan penurunan trombosit $\leq 100.000/\text{mm}^3$ dan adanya kebocoran plasma yang ditandai dengan peningkatan hematokrit $\geq 20\%$. Kasus DBD yang dilaporkan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 138.127 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 65.602 kasus. Kematian karena DBD pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yaitu dari 467 menjadi 919 kematian. Kesakitan dan kematian dapat digambarkan dengan menggunakan indicator incidence rate (IR) per 100.000 penduduk dan case fatality rate (CFR) dalam bentuk persentase.

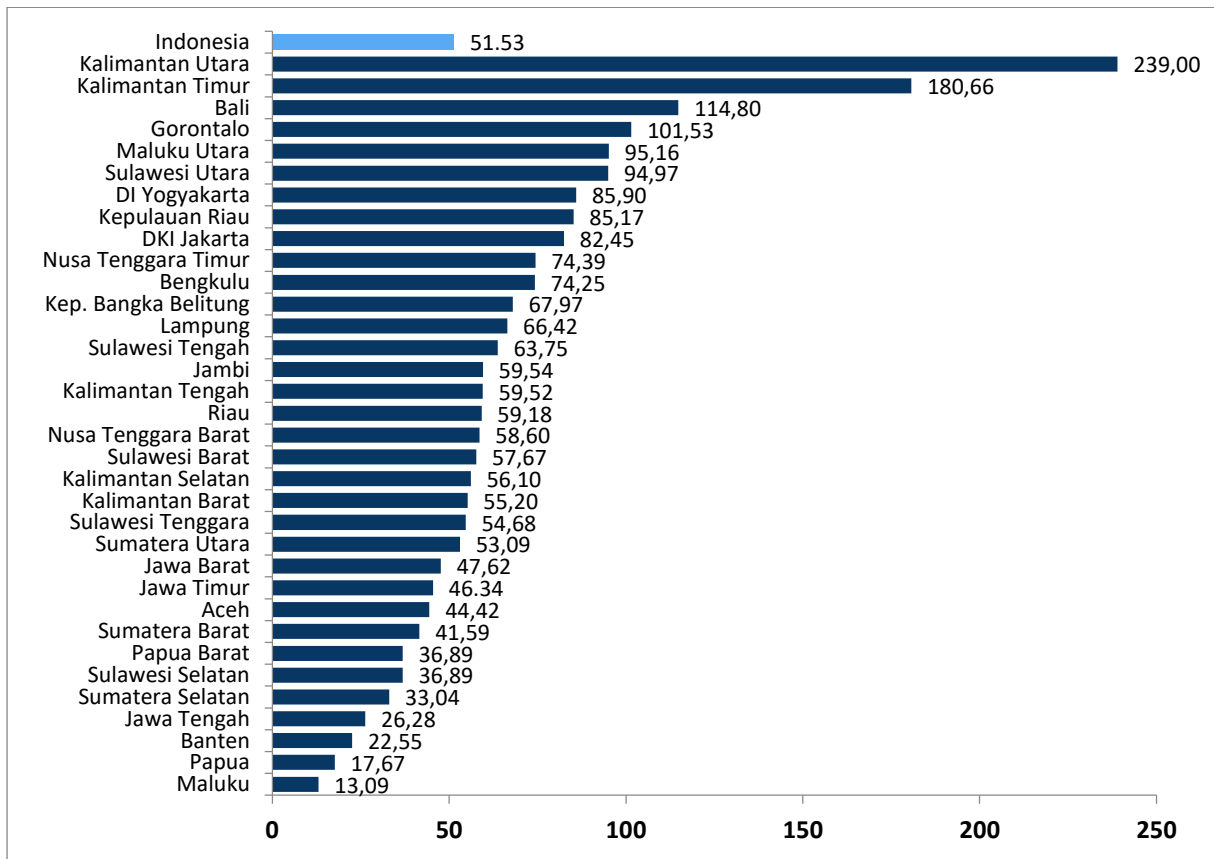
GAMBAR 6.41
INCIDENCE RATE PER 100.000 PENDUDUK
DEMAM BERDARAH DENGUE TAHUN 2010-2018



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2019

Incidence Rate DBD pada tahun 2019 sebesar 51,53 per 100.000 penduduk. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 dan 2018 ketika Incidence Rate DBD sebesar 26,1 dan 24,75 per 100.000 penduduk. Pada gambar tren IR DBD tahun 2010-2019 juga diketahui adanya tiga puncak IR DBD, yaitu pada tahun 2010, 2016, dan 2019.

GAMBAR 6.42
ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE PER 100.000 PENDUDUK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



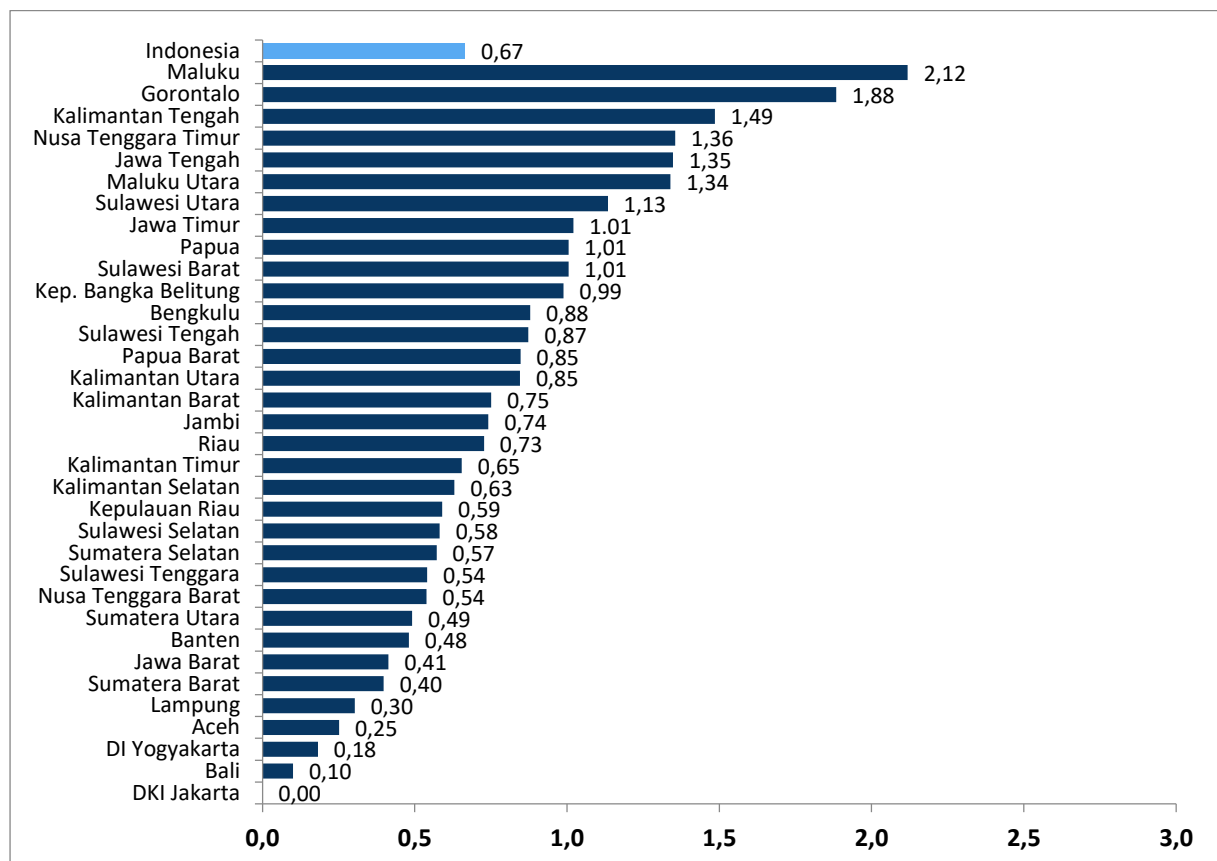
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Bali memiliki IR tertinggi di antara 34 provinsi lainnya, yaitu masing-masing sebesar 239, 180,66, dan 114,8 per 100.000 penduduk. Sedangkan provinsi dengan IR DBD terendah yaitu Maluku sebesar 13,09, Papua sebesar 17,67, dan Banten sebesar 22,55 per 100.000 penduduk. Perbandingan IR DBD tahun 2018-2019 menunjukkan sebagian besar provinsi mengalami peningkatan. Provinsi Kalimantan Utara dan Maluku Utara mengalami peningkatan signifikan sebanyak 10 kali lipat yaitu masing-masing dari 24,01 dan 8,92 pada tahun 2018 menjadi 239 dan 95,16 per 100.000 penduduk pada tahun 2019. Pada tahun 2019, hanya tiga provinsi yang mengalami penurunan IR DBD, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Maluku.

Selain angka kesakitan, besaran masalah DDB juga dapat diketahui dari angka kematian atau CFR yang diperoleh dari proporsi kematian terhadap seluruh kasus yang dilaporkan. Secara nasional, CFR menunjukkan sedikit penurunan dari 0,71% pada tahun 2018 menjadi 0,67% pada tahun 2019. Provinsi dikatakan memiliki CFR tinggi jika telah melebihi 1%. Pada tahun 2019 terdapat 10 provinsi dengan CFR di atas 1%, yaitu Maluku, Gorontalo, Kalimantan Tengah, NTT, Jawa Tengah, Maluku

Utara, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Papua, dan Sulawesi Barat. Tingginya CFR memerlukan langkah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Upaya edukasi kepada masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat agar segera memeriksakan diri ke sarana kesehatan jika ada anggota keluarganya yang memiliki gejala DBD. Hal ini menjadi penting sebagai pertolongan segera untuk mencegah keparahan dan komplikasi yang berujung pada fatalitas.

GAMBAR 6.43
CASE FATALITY RATE DEMAM BERDARAH DENGUE
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

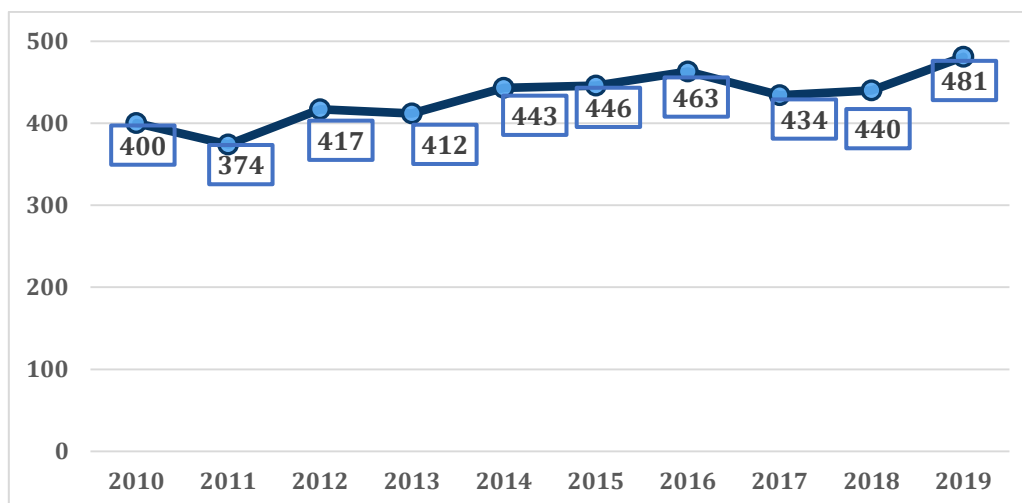


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

b. Kabupaten/Kota Terjangkit DBD

Penyebaran penyakit DBD dapat diindikasikan dengan jumlah kabupaten/kota terjangkit. Jumlah kabupaten/kota pada tahun 2018 sebanyak 481 atau 93,58% dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Jumlah kabupaten/kota terjangkit DBD menunjukkan kecenderungan peningkatan sejak tahun 2010 sampai dengan 2019.

GAMBAR 6.44
JUMLAH KABUPATEN/KOTA TERJANGKIT DBD
DI INDONESIA TAHUN 2010-2019

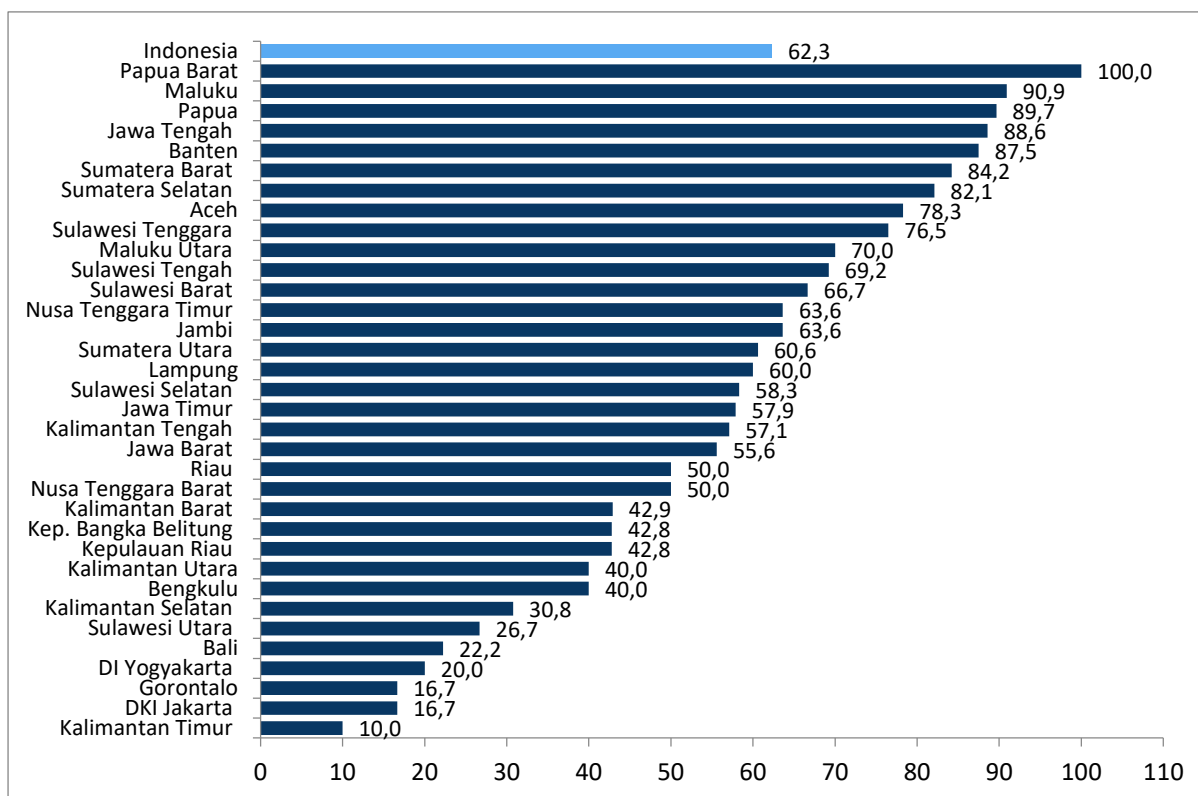


Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2020

Kementerian Kesehatan menetapkan salah satu indikator pada Rencana Strategis tahun 2015-2019, yaitu persentase kabupaten/kota yang memiliki IR DBD < 49 per 100.000 penduduk.

Dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, terdapat 320 kabupaten/kota (62,26%) yang sudah mencapai IR DBD < 49/100.000 penduduk. Target program tahun 2019 adalah sebesar 68% kabupaten/kota dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk. Pada gambar di bawah ini dapat diketahui bahwa terdapat 23 provinsi pada tahun 2019 yang tidak memenuhi target IR DBD < 49 per 100.000 penduduk. Provinsi-provinsi tersebut yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.

GAMBAR 6.45
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN IR DBD < 49 PER 100.000 PENDUDUK
DI INDONESIA TAHUN 2019

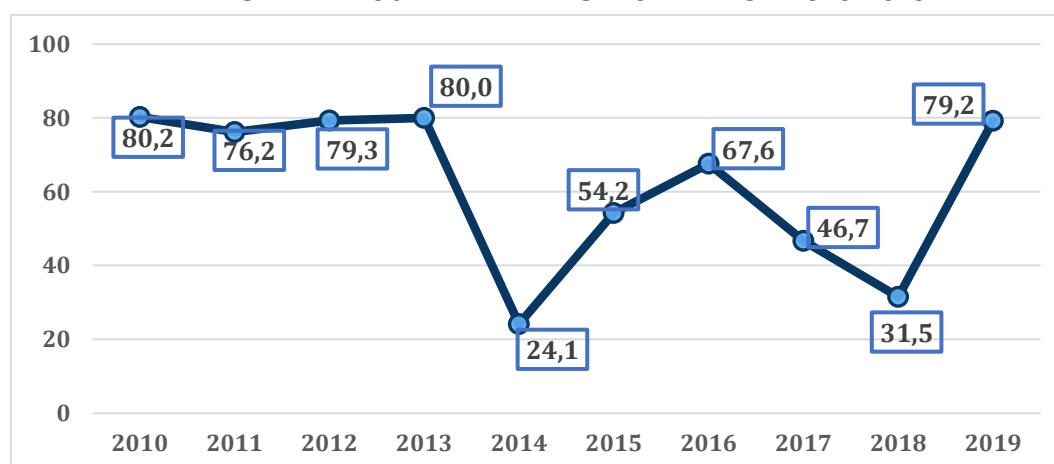


Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2020

c. Angka Bebas Jentik

Angka Bebas Jentik (ABJ) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai upaya pengendalian DBD. Capaian indikator ini secara nasional pada tahun 2019 belum mencapai target program sebesar > 95%.

GAMBAR 6.46
ANGKA BEBAS JENTIK DI INDONESIA TAHUN 2010-2019



Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2020

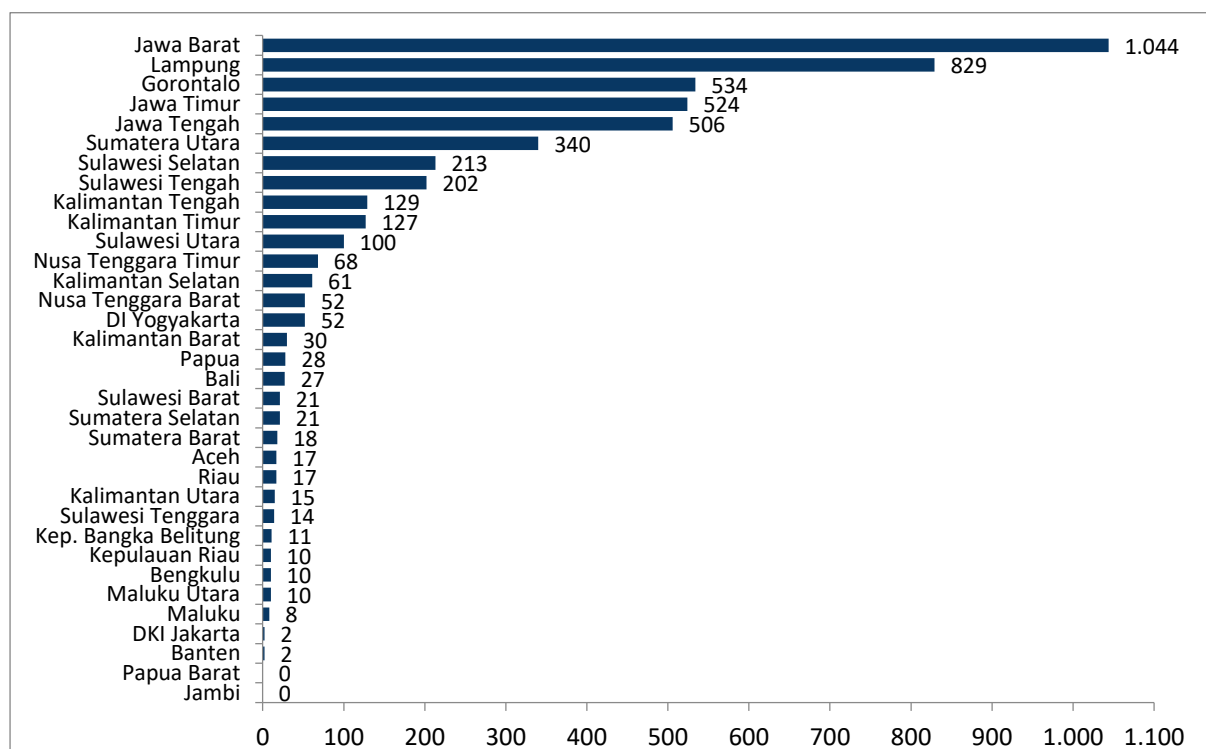
ABJ tahun 2019 sebesar 79,2%, meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 31,5%. Indikator ini merupakan output yang diharapkan dari kegiatan “Gerakan 1 Rumah 1 Jumentik (G1R1J)”. Dengan demikian diperlukan optimalisasi kegiatan tersebut dari seluruh kabupaten/kota, optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pemenuhan kebutuhan logistik yang mendukung pengendalian DBD, serta monitoring dan pembinaan kepada dinas Kesehatan provinsi dalam manajemen sistem pelaporan. Informasi lebih rinci mengenai penyakit DBD terdapat pada Lampiran 65.a dan 65.b.

2. Chikungunya

Gejala utama demam Chikungunya (demam chik) adalah demam mendadak, nyeri pada persendian, terutama pada sendi lutut, pergelangan, jari kaki, tangan, tulang belakang, serta ruam pada kulit. Demam chik ini ditularkan oleh nyamuk *Aedes albopictus* dan *Aedes aegypti* yang juga merupakan nyamuk penular penyakit DBD. Demam chik ini terutama dijumpai di daerah tropis/subtropis dan sering menimbulkan epidemi. Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya demam chik yaitu rendahnya status kekebalan kelompok masyarakat dan kepadatan populasi nyamuk penular karena banyaknya tempat perindukan nyamuk yang biasanya terjadi pada musim penghujan. Pada tahun 2019 ditemukan kasus demam Chikungunya sebanyak 5.042 kasus.

GAMBAR 6.47

JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA TAHUN 2019



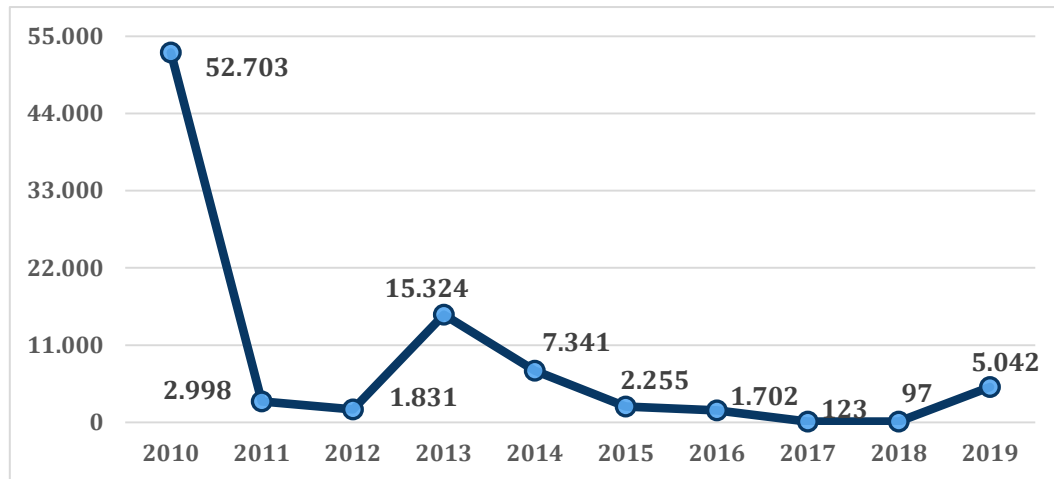
Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2020

Kasus demam Chikungunya paling banyak dilaporkan terjadi di Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.044 kasus, Lampung sebanyak 829 kasus, dan Gorontalo sebanyak 534 kasus.

Kejadian demam chikungunya mengalami penurunan kasus yang sangat signifikan pada tahun 2010-2012, namun kembali meningkat cukup tinggi pada tahun 2013 dan turun kembali cukup

signifikan mulai tahun 2014 sampai tahun 2018. Tetapi pada tahun 2019 terjadi peningkatan kasus kembali. Kecenderungan kasus Chikungunya pada tahun 2010-2019 disajikan pada gambar berikut.

GAMBAR 6.48
JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA TAHUN 2010-2019



Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2020

Sampai dengan saat ini belum pernah dilaporkan adanya kematian akibat chikungunya. Faktor penyebab meningkatnya kasus antara lain kondisi cuaca yang relatif lembab dengan curah hujan yang tinggi dan periode waktu hujan yang panjang, adanya imunitas pada daerah yang pernah terjangkit. Sebagian daerah tidak melaporkan kasus chikungunya.

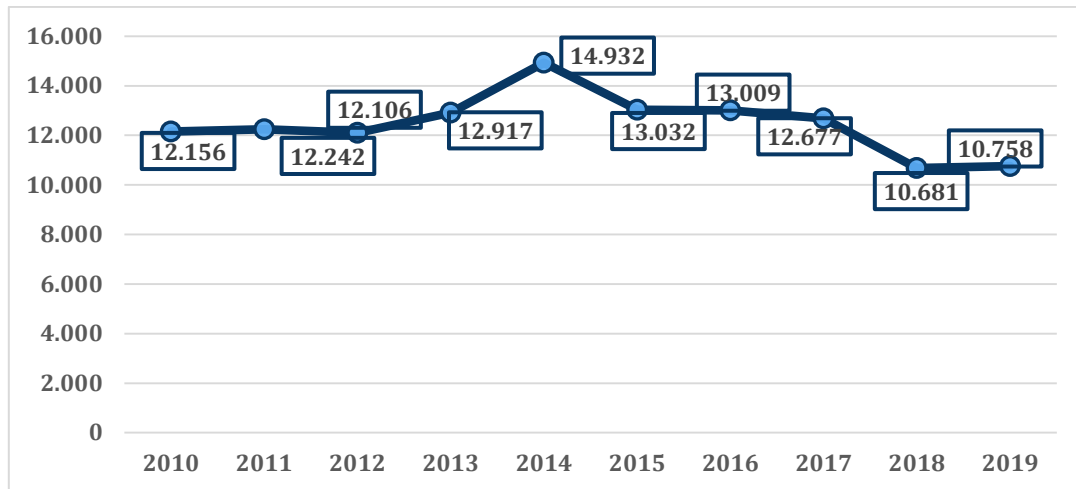
3. Filariasis

Filariasis adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan melalui nyamuk. Di Indonesia, cacing filaria terdiri dari tiga spesies yaitu *Wuchereria bancrofti*, *Brugia malayi* dan *Brugia timori*. Penyakit ini menginfeksi jaringan limfe (getah bening). Filariasis menular melalui gigitan nyamuk yang mengandung cacing filaria dalam tubuhnya. Dalam tubuh manusia, cacing tersebut tumbuh menjadi cacing dewasa dan menetap di jaringan limfe sehingga menyebabkan pembengkakan di kaki, tungkai, payudara, lengan dan organ genital.

WHO menetapkan kesepakatan global sebagai upaya untuk mengeliminasi filariasis pada tahun 2020 (*The Global Goal of Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health problem by The Year 2020*). Saat ini di dunia terdapat 1,3 miliar penduduk yang berisiko tertular penyakit filariasis atau yang dikenal juga dengan penyakit kaki gajah yang berada pada lebih dari 83 negara dan 60% kasus berada di Asia Tenggara.

Di Indonesia, pada tahun 2019 terdapat 10.758 kasus filariasis yang tersebar di 34 Provinsi. Angka ini terlihat menurun dari data tahun sebelumnya karena dilaporkan beberapa kasus meninggal dunia dan adanya perubahan diagnosis sesudah dilakukan konfirmasi kasus klinis kronis yang dilaporkan tahun sebelumnya. Grafik berikut menggambarkan peningkatan dan penurunan kasus filariasis di Indonesia sejak tahun 2010.

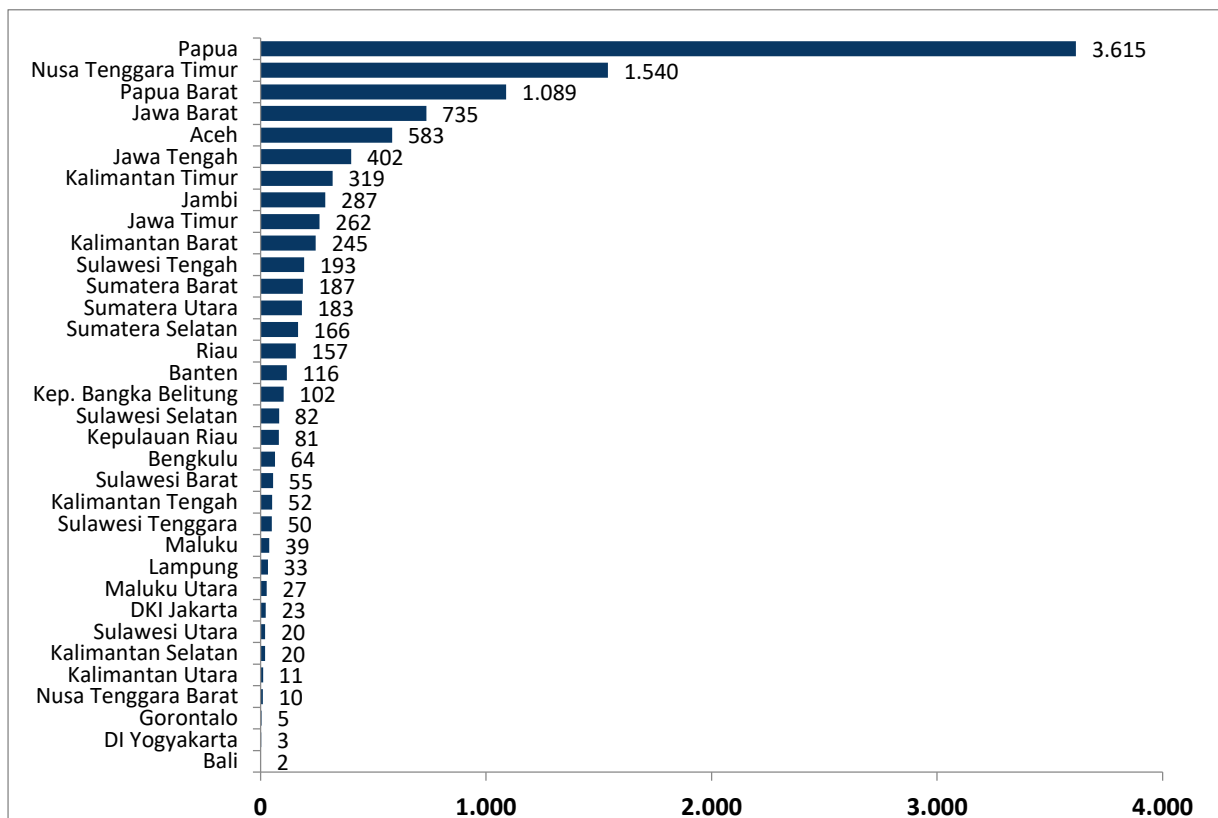
GAMBAR 6.49
JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS DI INDONESIA
TAHUN 2010 – 2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Filariasis merupakan penyakit yang termasuk ke dalam neglected diseases. Provinsi dengan kasus tertinggi terdapat di wilayah timur Indonesia, yaitu Papua sebanyak 3.615, Nusa Tenggara Timur 1.540 kasus, dan Papua Barat sebesar 1.089. Provinsi dengan kasus terendah antara lain Bali sebanyak 2 kasus, DI Yogyakarta sebanyak 3 kasus, Gorontalo sebanyak 5 kasus.

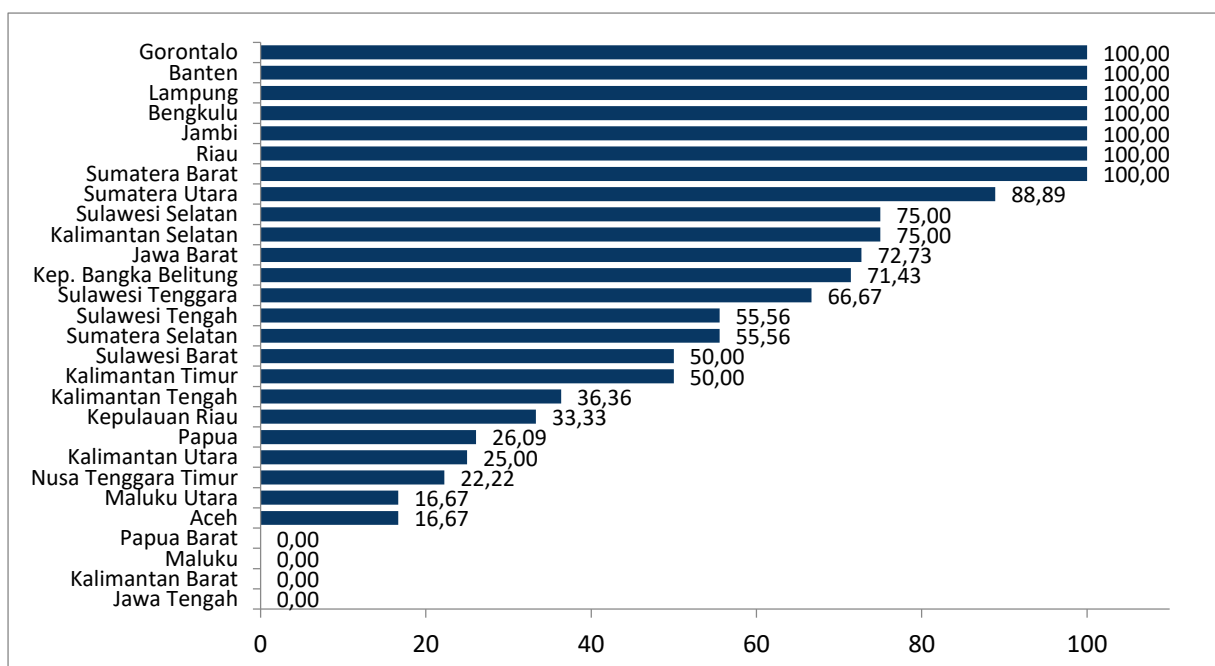
GAMBAR 6.50
JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Keberhasilan program pengendalian filariasis di antaranya dapat diketahui dengan jumlah kabupaten/kota yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1%. Terdapat 236 kabupaten/kota yang merupakan wilayah endemis filariasis yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia pada tahun 2019. Dengan demikian, terdapat 6 provinsi yang tidak memiliki kabupaten/kota endemis sehingga provinsi tersebut ditetapkan sebagai provinsi non-endemis filariasis. Keenam provinsi tersebut yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara. Secara nasional, jumlah kabupaten/kota non-endemis sebanyak 278 kabupaten/kota (54,1%).

GAMBAR 6.51
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA
YANG BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI <1%
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

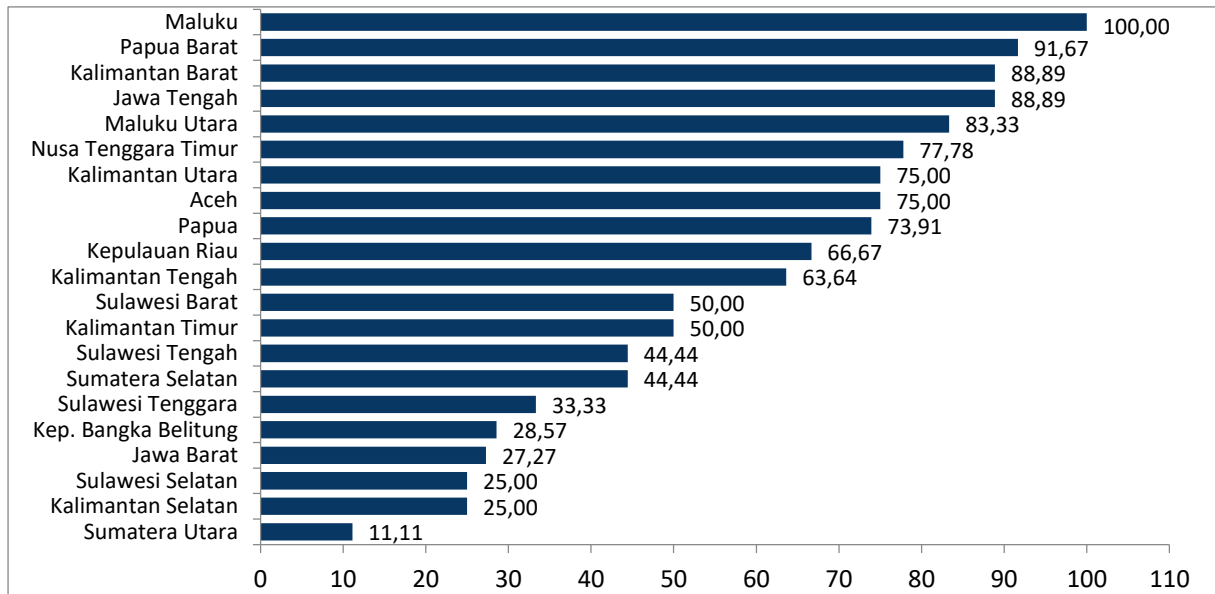


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Kementerian Kesehatan telah menetapkan indikator keberhasilan pengendalian filariasis yaitu jumlah kabupaten/kota endemis yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1%. Jumlah kabupaten/kota endemis yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1% sebanyak 114 kabupaten/kota pada tahun 2019. Dengan demikian indikator renstra tersebut telah memenuhi target Renstra 2019 sebesar 75 kabupaten/kota. Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa terdapat 8 provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya telah menurunkan angka mikrofilaria < 1%, yaitu Gorontalo, Banten, Lampung, Bengkulu, Jambi, Riau, dan Sumatera Barat.

Upaya lain dari pengendalian penyakit filariasis adalah Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis. Pada tahun 2019 tidak semua provinsi melaksanakan POPM filariasis karena termasuk daerah non-endemis atau seluruh kabupaten/kota endemis di provinsi tersebut sedang berada pada fase surveilans pasca POPM filariasis. Sebanyak enam provinsi merupakan daerah non-endemis seperti yang sudah disebutkan pada bagian sebelumnya, dan 7 provinsi seluruh kabupaten/kota endemisnya sedang menjalani surveilans pasca POPM filariasis, yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, Gorontalo.

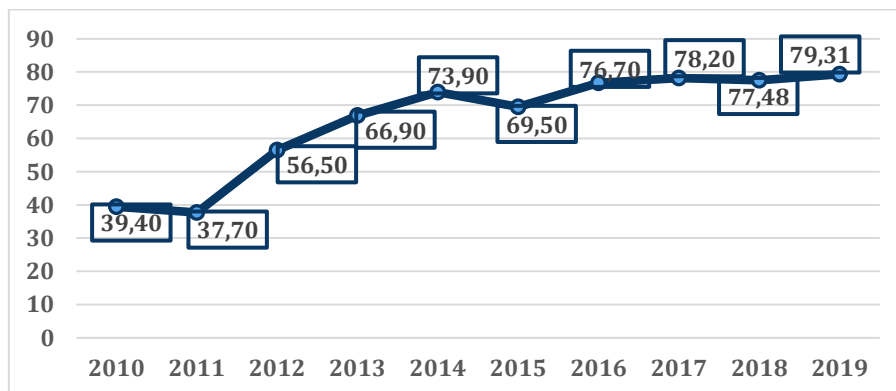
GAMBAR 6.52
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN POPM FILARIASIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Terdapat 118 kabupaten/kota yang melaksanakan POPM Filariasis. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang sebanyak 131 kabupaten/kota. Penurunan ini disebabkan beberapa kabupaten/kota endemis filariasis menyelesaikan putaran POPM Filariasis dan masuk pada masa surveilans pasca POPM Filariasis. Dari 21 provinsi yang masih melaksanakan POPM Filariasis, Provinsi Maluku memiliki persentase jumlah kabupaten melaksanakan POPM Filariasis tertinggi sebesar 100%, sedangkan Sumatera Utara memiliki persentase terendah sebesar 11,11%.

GAMBAR 6.53
CAKUPAN POPM FILARIASIS TAHUN 2010-2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Cakupan POPM Filariasis mencerminkan tingginya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi memutus rantai penularan filariasis melalui pemberian obat pencegahan massal. Meskipun pada tahun 2019, hanya 50% jumlah kabupaten/kota endemis yang masih melaksanakan POPM Filariasis, namun tren cakupan POPM Filariasis dalam 10 tahun terakhir tetap menunjukkan peningkatan, persentase pada tahun 2010 hanya 39,4% dan

pada tahun 2019 persentase cakupan POPM Filariasis 79,31% Informasi lebih rinci mengenai penyakit Filariasis terdapat pada Lampiran 67.a dan 67.b.

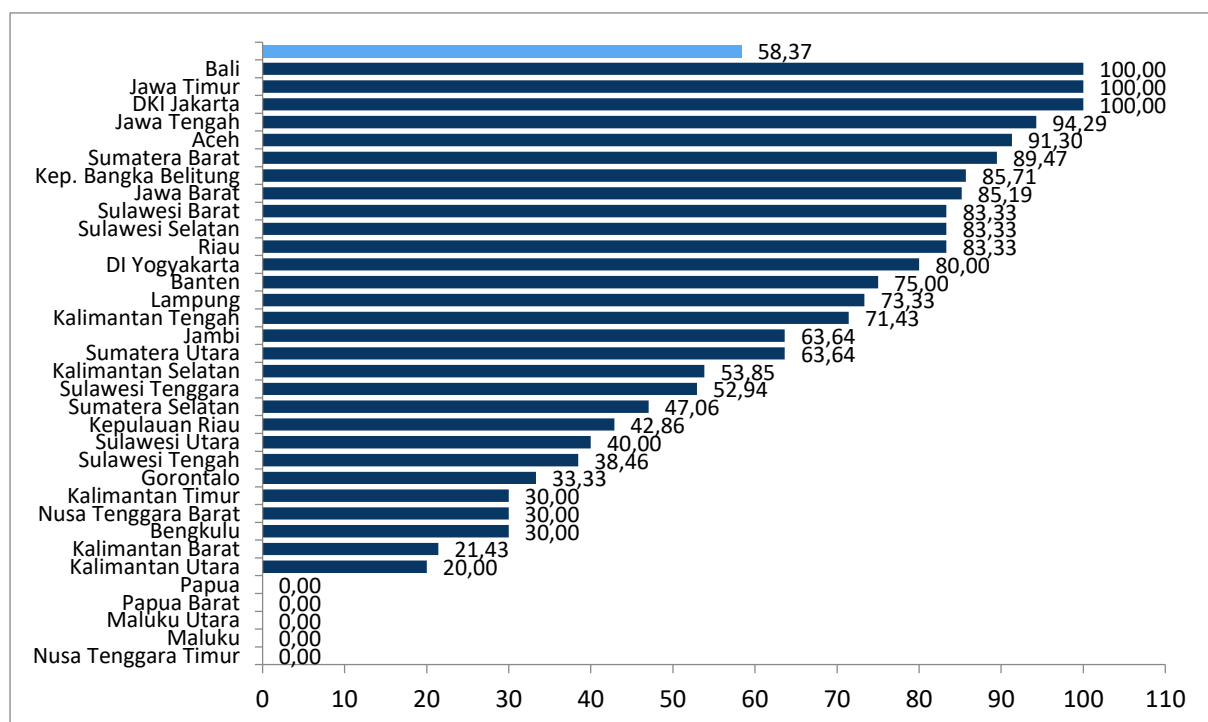
4. Malaria

Malaria merupakan penyakit menular yang disebabkan Plasmodium yang terdiri dari banyak spesies, namun yang pada umumnya menyebabkan malaria adalah *Plasmodium vivax*, *Plasmodium falciparum*, *Plasmodium malariae*, dan *Plasmodium ovale*. Penyakit malaria ditularkan oleh nyamuk *Anopheles* yang di dalam tubuhnya mengandung *Plasmodium*. Penyebaran dan endemisitas Malaria sangat dipengaruhi oleh keberadaan tempat perindukan nyamuk *Anopheles* sebagai vektor penular.

Malaria menjadi salah satu penyakit menular selain HIV AIDS dan Tuberkulosis yang pengendaliannya menjadi bagian dari tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai komitmen global yang harus dicapai pada akhir tahun 2030. Pada tingkat nasional program eliminasi malaria ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 tentang “Eliminasi Malaria di Indonesia”. Target program eliminasi malaria adalah seluruh wilayah di Indonesia bebas dari malaria selambat-lambatnya tahun 2030.

Penilaian eliminasi malaria diawali dari tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2019 terdapat tiga provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya telah dinyatakan bebas malaria, yaitu DKI Jakarta, Bali, dan Jawa Timur. Lima provinsi di Indonesia bagian timur belum memiliki kabupaten/kota yang berstatus eliminasi malaria, yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Meskipun belum ada kabupaten/kota yang eliminasi di 5 provinsi tersebut namun sudah ada beberapa kabupaten yang mencapai endemis rendah dan bersiap menuju eliminasi malaria.

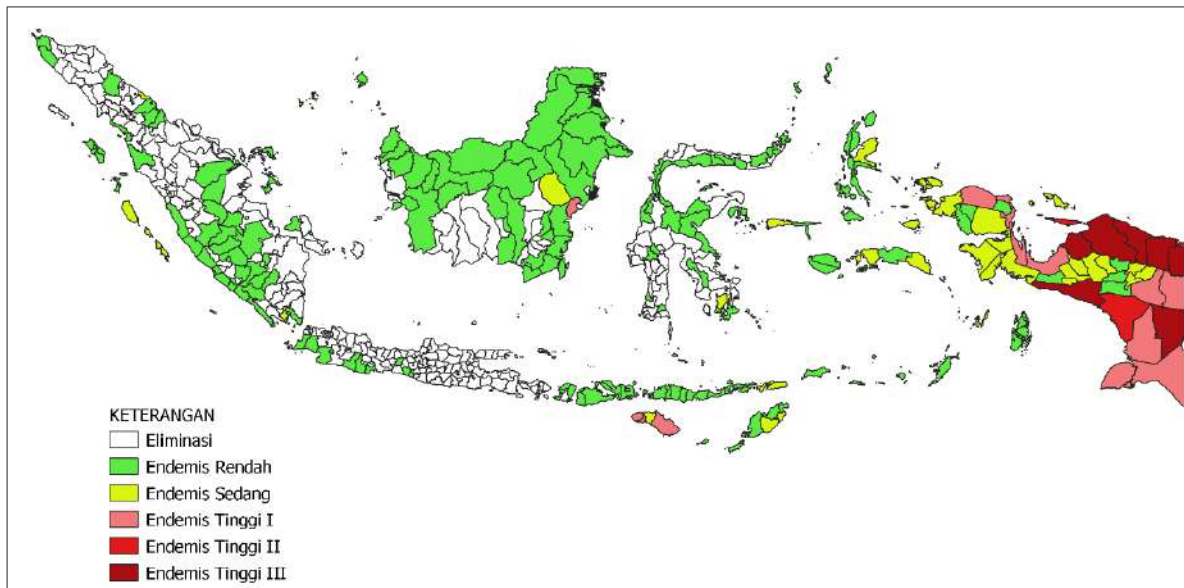
GAMBAR 6.54
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Secara nasional, terdapat 300 kabupaten/kota yang telah dinyatakan bebas malaria pada tahun 2019. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2018 ketika 285 kabupaten/kota telah berstatus eliminasi malaria. Capaian indikator lain seperti persentase konfirmasi kesediaan darah dan persentase pengobatan standar merupakan beberapa upaya yang berkontribusi terhadap peningkatan capaian eliminasi malaria.

GAMBAR 6.55
PETA ENDEMISITAS MALARIA
TAHUN 2019



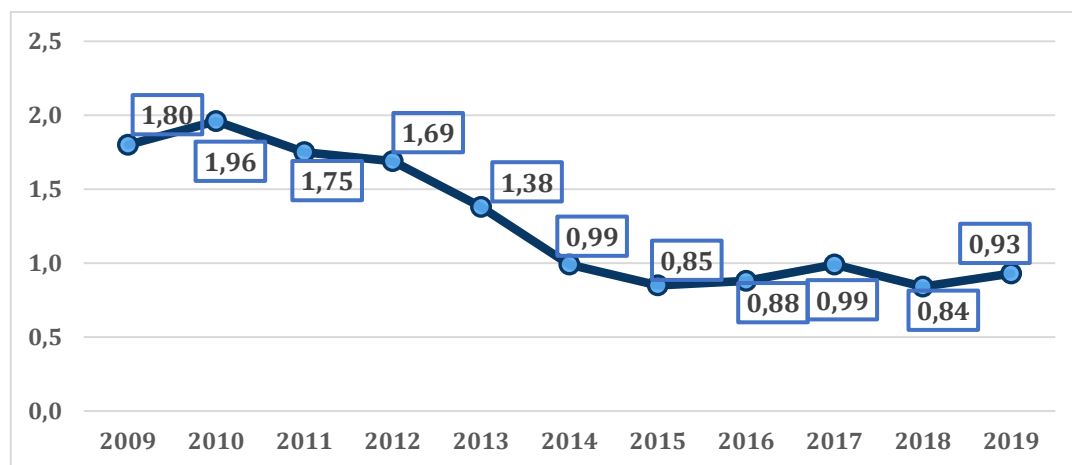
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2019

Gambar di atas menunjukkan persebaran kabupaten/kota endemis malaria pada tahun 2019 di seluruh Indonesia. Warna putih menunjukkan kabupaten/kota eliminasi. Tingkat endemisitas digambarkan dengan warna hijau, kuning dan gradasi merah.

a. Angka Kesakitan Malaria

Angka kesakitan malaria digambarkan dengan indikator Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk, yaitu proporsi antara pasien positif malaria terhadap penduduk berisiko di wilayah tersebut dengan konstanta 1.000. API malaria di Indonesia pada tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018, yaitu dari 0,84 menjadi sebesar 0,93 per 1.000 penduduk. Namun demikian, API malaria di Indonesia menunjukkan kecenderungan penurunan sejak tahun 2009.

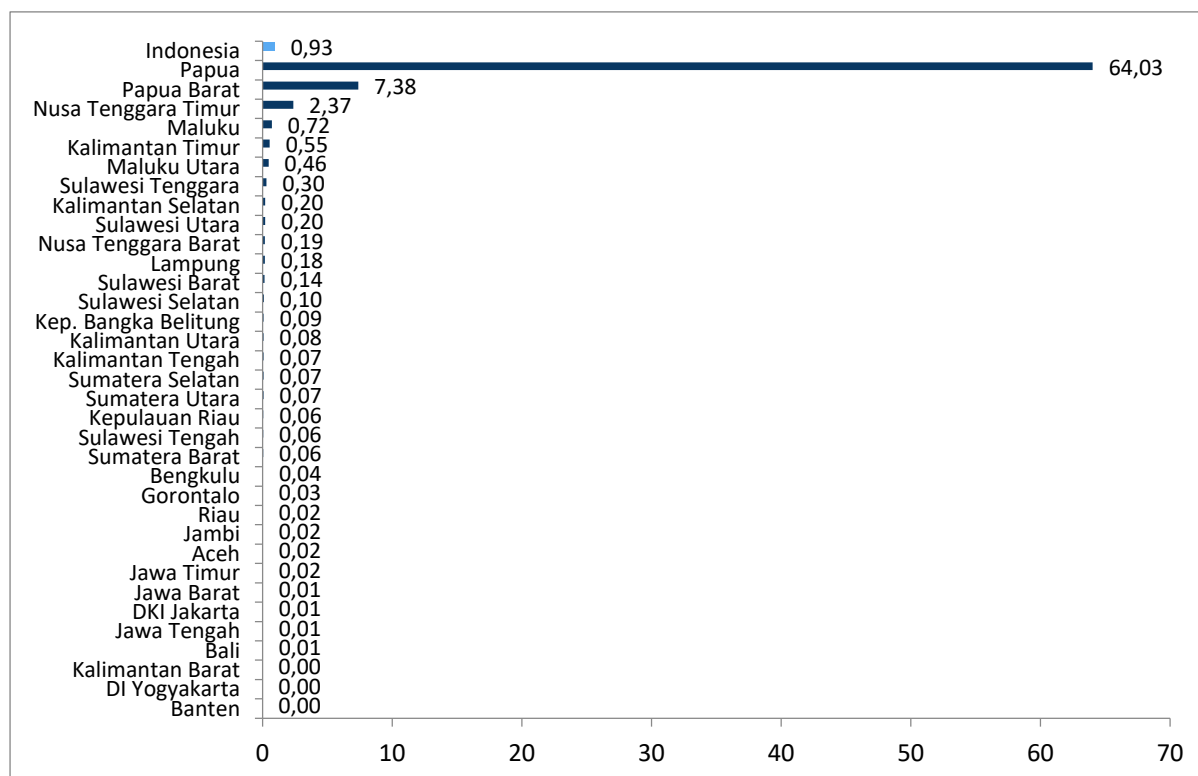
GAMBAR 6.56
ANGKA KESAKITAN MALARIA (ANNUAL PARACITE INCIDENCE /API)
PER 1.000 PENDUDUK TAHUN 2009-2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa API malaria pada tahun 2009 sebesar 1,8 per 1.000 penduduk menurun hingga angka terendah pada tahun 2018 sebesar 0,84 per 1.000 penduduk. Pada tingkat provinsi, Provinsi Papua, NTT dan Papua Barat menjadi penyumbang kasus terbanyak dan memiliki API malaria yang tinggi dibandingkan provinsi lainnya, seperti yang ditampilkan pada gambar berikut.

GAMBAR 6.57
ANGKA KESAKITAN MALARIA (ANNUAL PARACITE INCIDENCE/API)
PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

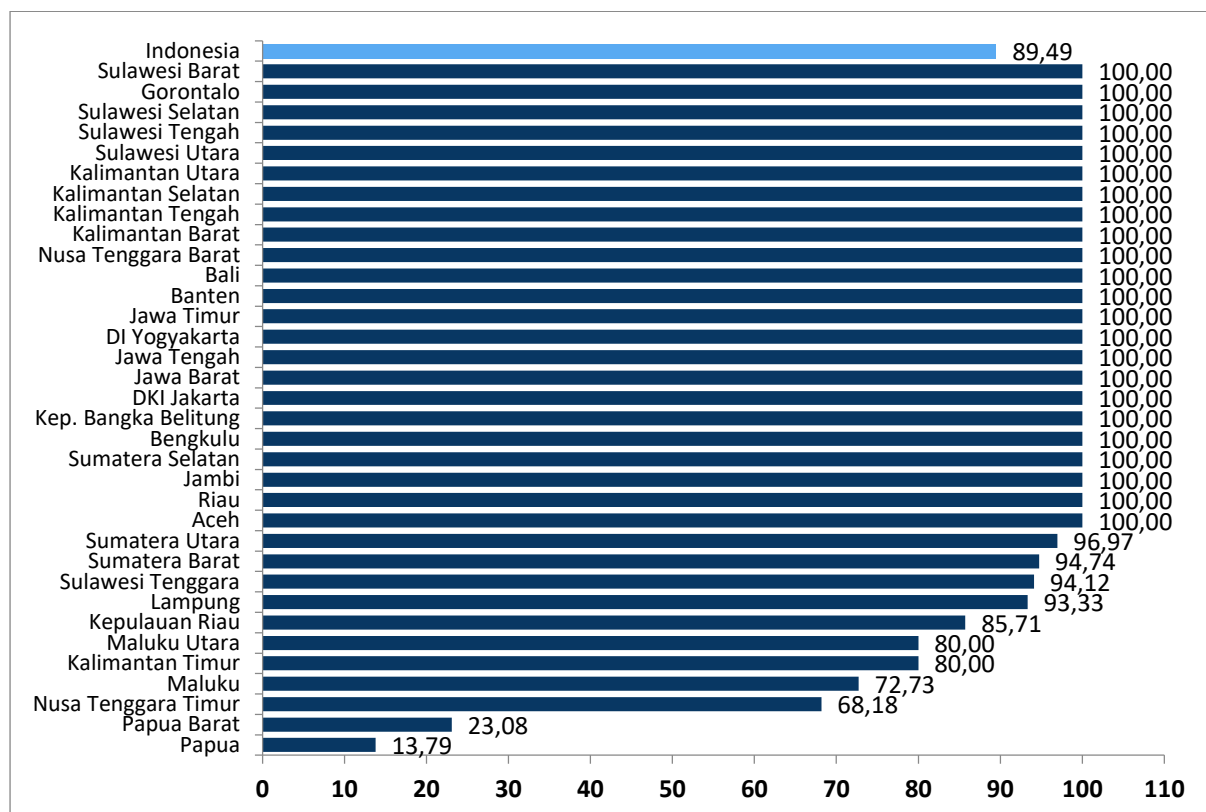


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Provinsi Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur memiliki API malaria yang sangat tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia, yaitu sebesar 64,03, 7,38, dan 2,37 per 1.000 penduduk. Sebagian besar provinsi, yaitu 31 provinsi (91,2%) memiliki API malaria < 1 per 1.000 penduduk.

API malaria per 1.000 penduduk juga menjadi landasan tingkat endemisitas malaria menjadi rendah (< 1), sedang (1-5), dan tinggi (> 5). Pada tahun 2019 terdapat 160 kabupaten/kota (31,9%) endemis rendah, 31 kabupaten/kota (5,4%) endemis sedang, dan 23 kabupaten/kota (4,3%) endemis tinggi. Persentase kabupaten/kota berstatus endemis rendah menurut provinsi, disajikan pada gambar berikut.

GAMBAR 6.58
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN API<1 PER 1.000 PENDUDUK
ATAU BEBAS MALARIA DI INDONESIA TAHUN 2019



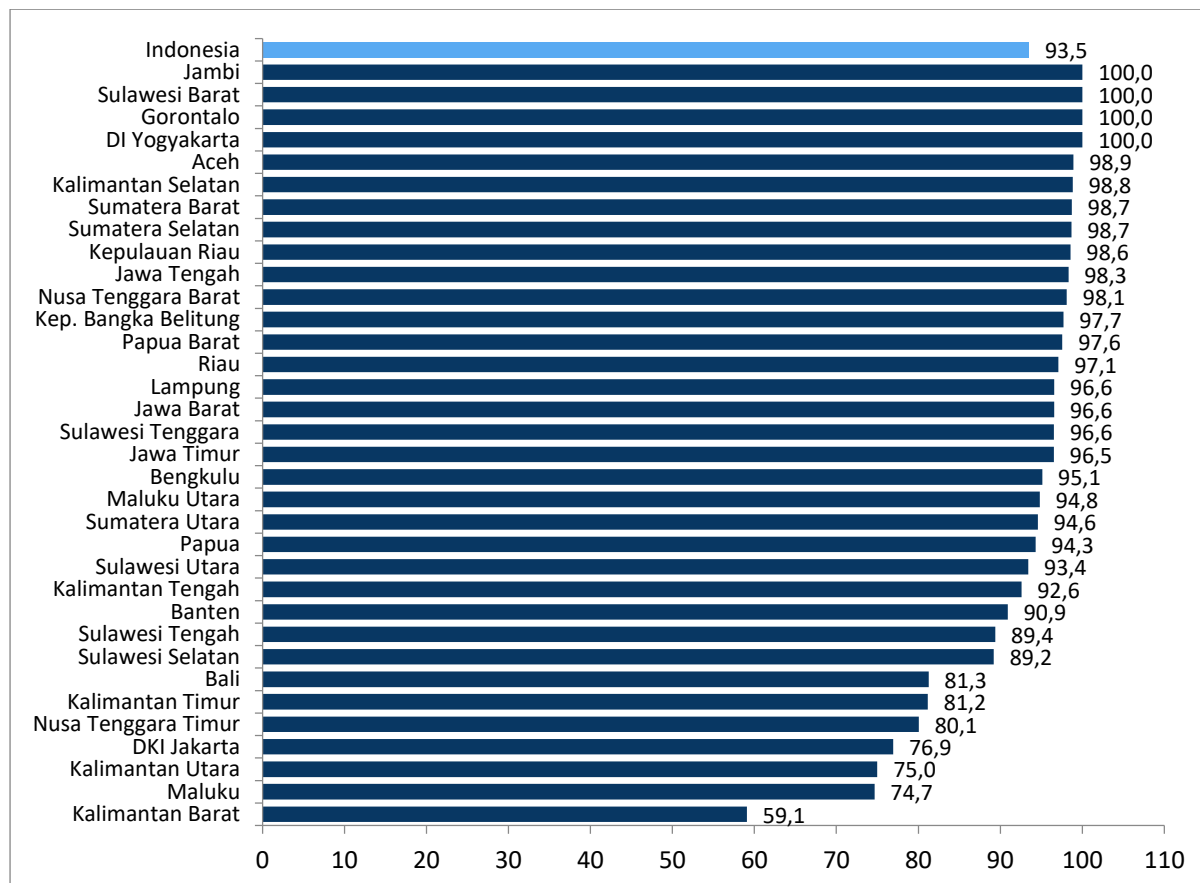
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia telah berstatus bebas malaria ataupun memiliki API < 1 per 1.000 penduduk. Hanya 11 provinsi yang belum memenuhi dua kriteria tersebut, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Lampung, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Kalimantan Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua.

b. Pengobatan Malaria

Pengobatan malaria secara efektif dilakukan dengan pemberian *ACT (Artemicin-based Combination Therapy)* pada 24 jam pertama pasien panas dan obat harus diminum habis. Persentase pengobatan *ACT* masuk dalam indikator prioritas yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden dengan target 90%.

GAMBAR 6.59
PERSENTASE PENGOBATAN ACT ARTEMICIN-BASED COMBINATION THERAPY (ART)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

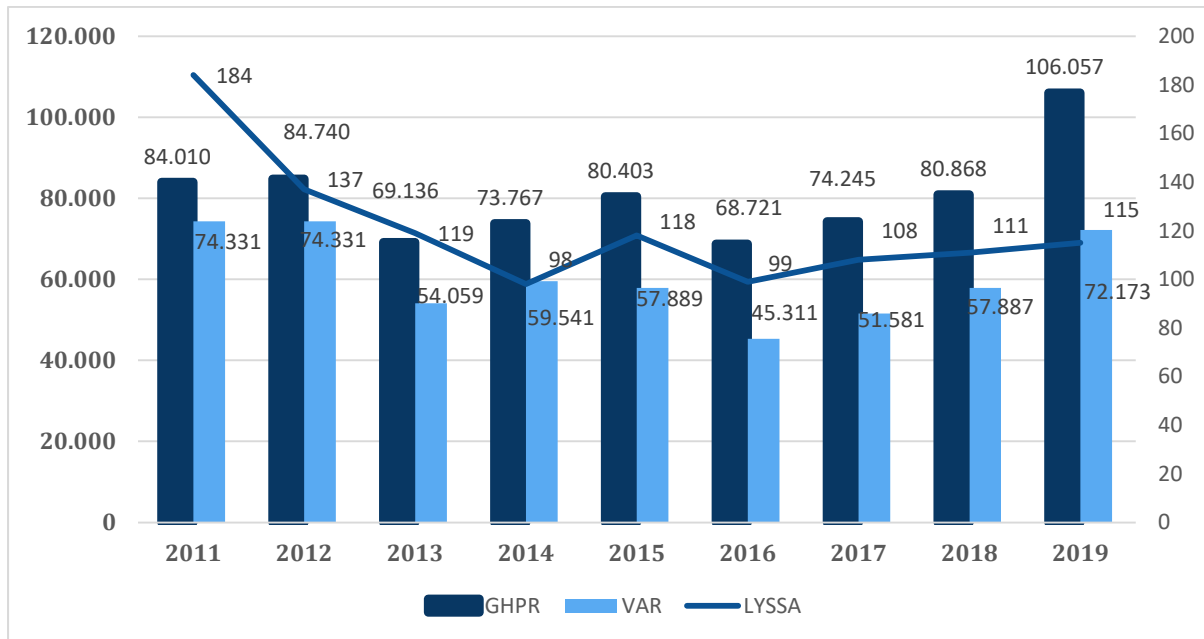
Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa 25 provinsi (73,5%) memiliki persentase di atas 90% yang artinya telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Data dan informasi lebih detail tentang penyakit Malaria, dapat dilihat pada Lampiran 66.a, 66.b, dan 66.c.

5. Rabies

Rabies adalah penyakit menular disebabkan oleh virus golongan Rhabdovirus yang ditularkan melalui gigitan hewan penular dan mematikan bagi hewan maupun manusia. Hewan penular rabies terdiri dari anjing, kucing, kelelawar, kera, musang dan serigala.

Pada tahun 2019 kasus Rabies dilaporkan di 27 provinsi, dan 7 provinsi berstatus bebas Rabies, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Papua Barat, dan Papua.

GAMBAR 6.60
SITUASI RABIES DI INDONESIA
TAHUN 2011 – 2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) menunjukkan peningkatan dari 84.010 pada tahun 2011 menjadi 106.057 pada tahun 2019. Kasus kematian karena rabies (Lyssa) menunjukkan pola yang sedikit berbeda. Provinsi yang melaporkan kasus GHPR tertinggi sepanjang tahun 2019 adalah Bali sebanyak 38.187 kasus, diikuti oleh Nusa Tenggara Timur sebanyak 13.599 kasus, dan Sulawesi Utara sebanyak 8.163 kasus.

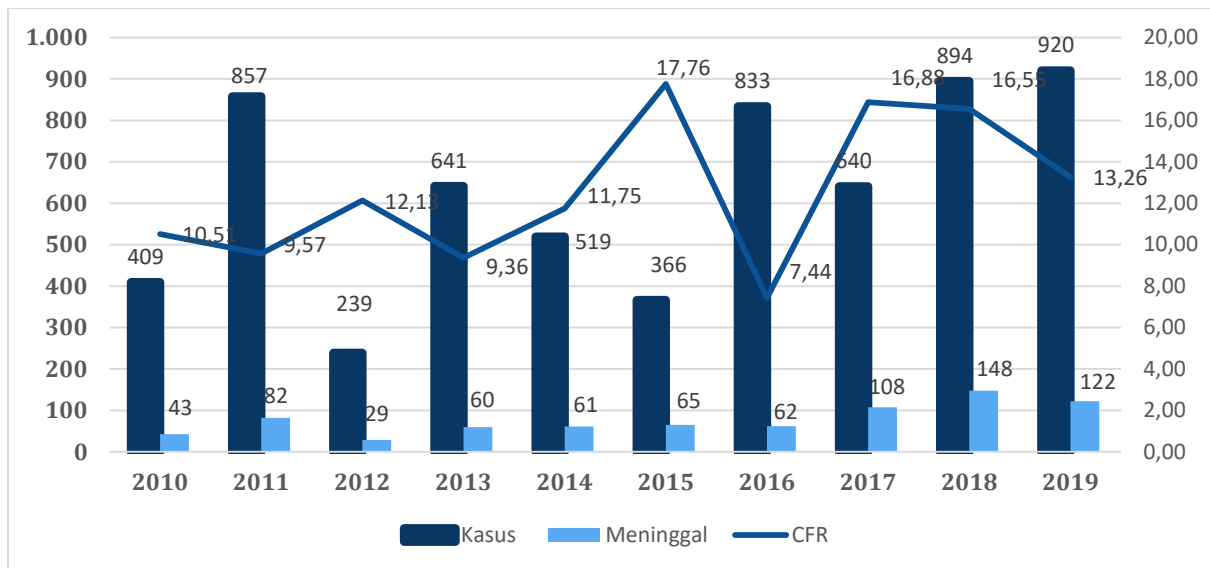
Kasus Lyssa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 cenderung menurun, namun meningkat kembali pada tahun 2015 menjadi 118 kematian, lalu mengalami penurunan menjadi 115 kematian pada tahun 2019. Kematian akibat rabies (Lyssa) paling banyak dilaporkan terjadi di Sulawesi Utara sebanyak 17 kasus, diikuti oleh Nusa Tenggara Timur sebanyak 15 kasus, dan Kalimantan Barat sebanyak 14 kasus. Informasi lebih rinci mengenai penyakit Rabies terdapat pada Lampiran 67.c.

6. Leptospirosis

Leptospirosis merupakan penyakit yang disebabkan bakteri *Leptospira sp.* Sumber infeksi pada manusia biasanya akibat kontak secara langsung atau tidak langsung dengan *urine* hewan yang terinfeksi. Banyak kasus leptospirosis yang tidak dilaporkan karena sulitnya diagnosa klinis dan mahalnya biaya pemeriksaan laboratorium.

Terdapat 9 provinsi yang melaporkan kasus leptospirosis pada tahun 2019, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Jumlah provinsi meningkat dibandingkan tahun 2018 ketika hanya 7 provinsi yang melaporkan kasus Leptospirosis. Secara nasional kasus Leptospirosis di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 920 kasus yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 sebesar 894 kasus.

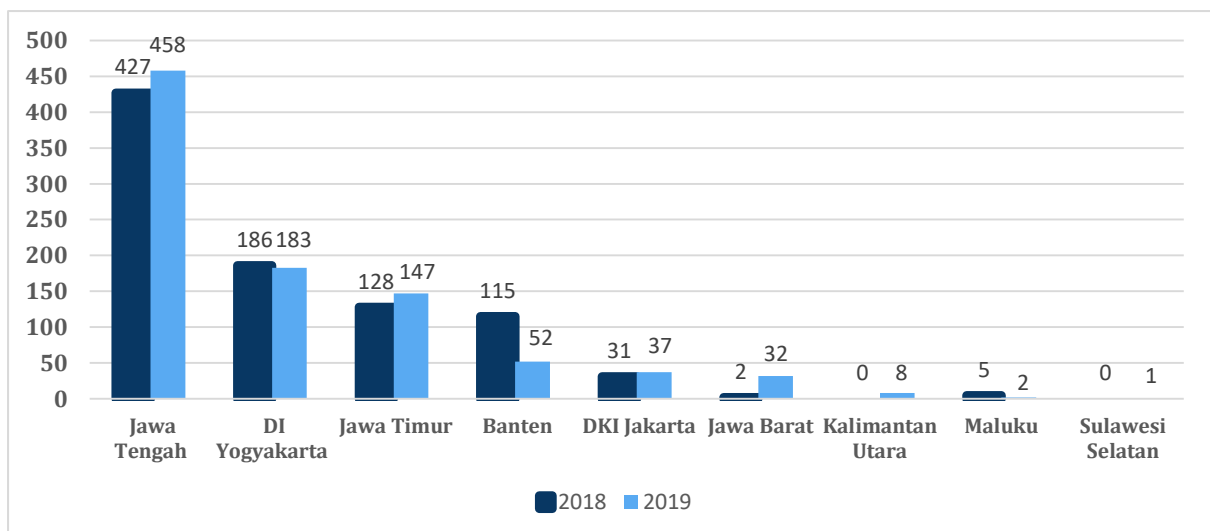
GAMBAR 6.61
SITUASI LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA
TAHUN 2010 – 2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Meskipun jumlah kasus meningkat, jumlah kematian dan CFR menunjukkan penurunan yaitu dari 148 dan 16,5% pada tahun 2018 menjadi 122 kematian dan 13,26% pada tahun 2019. Dalam kurun waktu 2010-2019, kasus Leptospirosis memiliki titik puncak pada tahun 2011, 2013, 2016, 2018, dan 2019, dan CFR tertinggi pada tahun 2012, 2015, dan 2017.

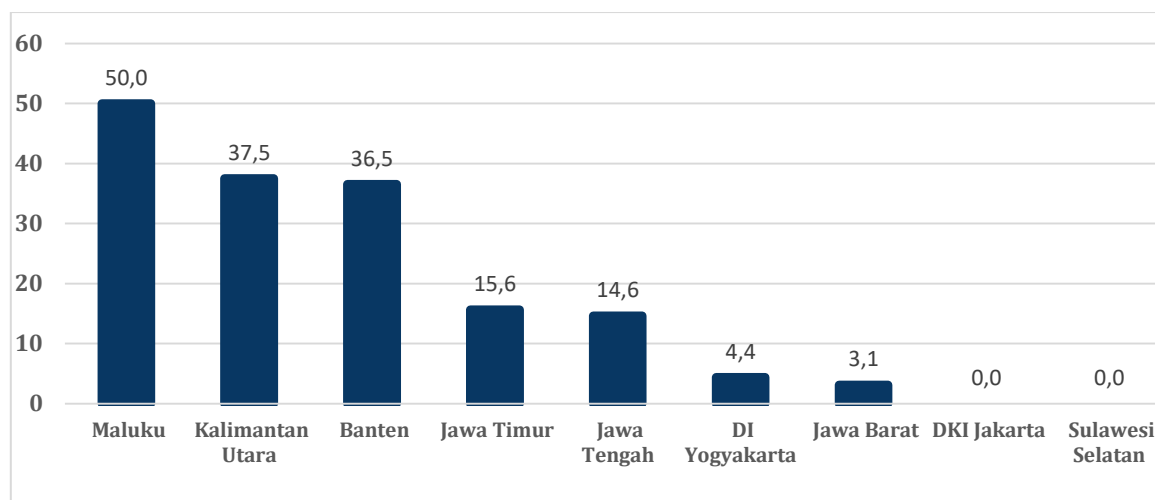
GAMBAR 6.62
JUMLAH KASUS LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2018 – 2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Provinsi Jawa Tengah melaporkan kasus tertinggi pada tahun 2019 sebesar 458 kasus. Terdapat dua provinsi yang tahun sebelumnya tidak melaporkan kasus menjadi melaporkan kasus, yaitu Kalimantan Utara sebanyak 8 kasus dan Sulawesi Selatan sebanyak 1 kasus. Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan kasus signifikan dari 2 kasus menjadi 32 kasus. Sedangkan Provinsi Banten menunjukkan penurunan signifikan dari 115 kasus menjadi 52 kasus. Dari seluruh provinsi yang melaporkan kasus, hanya Banten dan Maluku yang melaporkan penurunan kasus.

GAMBAR 6.63
CASE FATALITY RATE LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa dari seluruh kasus yang dilaporkan, Provinsi Maluku memiliki CFR tertinggi sebesar 50% yang diikuti oleh Kalimantan Utara sebesar 37,5%, dan Banten sebesar 36,5%. DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan melaporkan tidak adanya kasus kematian akibat Leptospirosis.

Upaya yang telah dilaksanakan dalam pengendalian leptospirosis antara lain surat edaran kewaspadaan leptospirosis setiap tahunnya; pengadaan *Rapid Test Diagnostic (RTD)* sebagai *buffer stock*; mendistribusikan media KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) seperti buku petunjuk teknis, *leaflet*, poster, *roll banner*, dan lain-lain.

E. PENYAKIT TIDAK MENULAR

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan penyakit yang tidak disebabkan oleh infeksi mikroorganisme seperti protozoa, bakteri, jamur, maupun virus. Penyakit jenis ini bertanggungjawab terhadap sedikitnya 70% kematian di dunia. Meskipun tidak dapat ditularkan dari orang ke orang maupun dari binatang ke orang, lemahnya pengendalian faktor risiko dapat berpengaruh terhadap peningkatan kasus setiap tahun. Hal ini sejalan dengan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, 2013, dan 2018 yang menunjukkan kecenderungan peningkatan prevalensi PTM seperti diabetes, hipertensi, *stroke*, dan penyakit sendi/rematik/encok.

Secara nasional hasil Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa prevalensi penduduk dengan tekanan darah tinggi sebesar 34,11%. Prevalensi tekanan darah tinggi pada perempuan (36,85%) lebih tinggi dibanding dengan laki-laki (31,34%). Prevalensi di perkotaan sedikit lebih tinggi (34,43%) dibandingkan dengan perdesaan (33,72%). Prevalensi semakin meningkat seiring dengan pertambahan umur.

Prevalensi obesitas (Indeks Massa Tubuh atau IMT ≥ 25 – 27 dan IMT ≥ 27) pada penduduk usia ≥ 15 tahun sebesar 35,4%, sedangkan penduduk *obese* dengan IMT ≥ 27 saja sebesar 21,8%. Pada penduduk usia ≥ 15 tahun yang obesitas, prevalensi lebih tinggi pada perempuan (29,3%) dibandingkan pada laki-laki (14,5%). Prevelansi lebih tinggi di perkotaan (25,1%) daripada perdesaan (17,8%). Sedangkan menurut kelompok umur, obesitas tertinggi pada kelompok umur 40-44 tahun (29,6%).

Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dilakukan untuk mengendalikan faktor risiko PTM, melalui perilaku CERDIK, yaitu Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat seimbang, Istirahat yang cukup, dan Kelola stres. Cek kesehatan secara berkala yaitu pemeriksaan faktor risiko PTM dapat dilakukan melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM yang ada di desa/ kelurahan, dan di Puskesmas.

Upaya pengendalian PTM juga dilakukan melalui implementasi Kawasan Tanpa Rokok di sekolah-sekolah, hal ini sebagai upaya penurunan prevalensi perokok ≤ 18 tahun. Upaya pengendalian PTM tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tanpa dukungan seluruh jajaran lintas sektor, baik pemerintah, swasta, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, bahkan seluruh lapisan masyarakat.

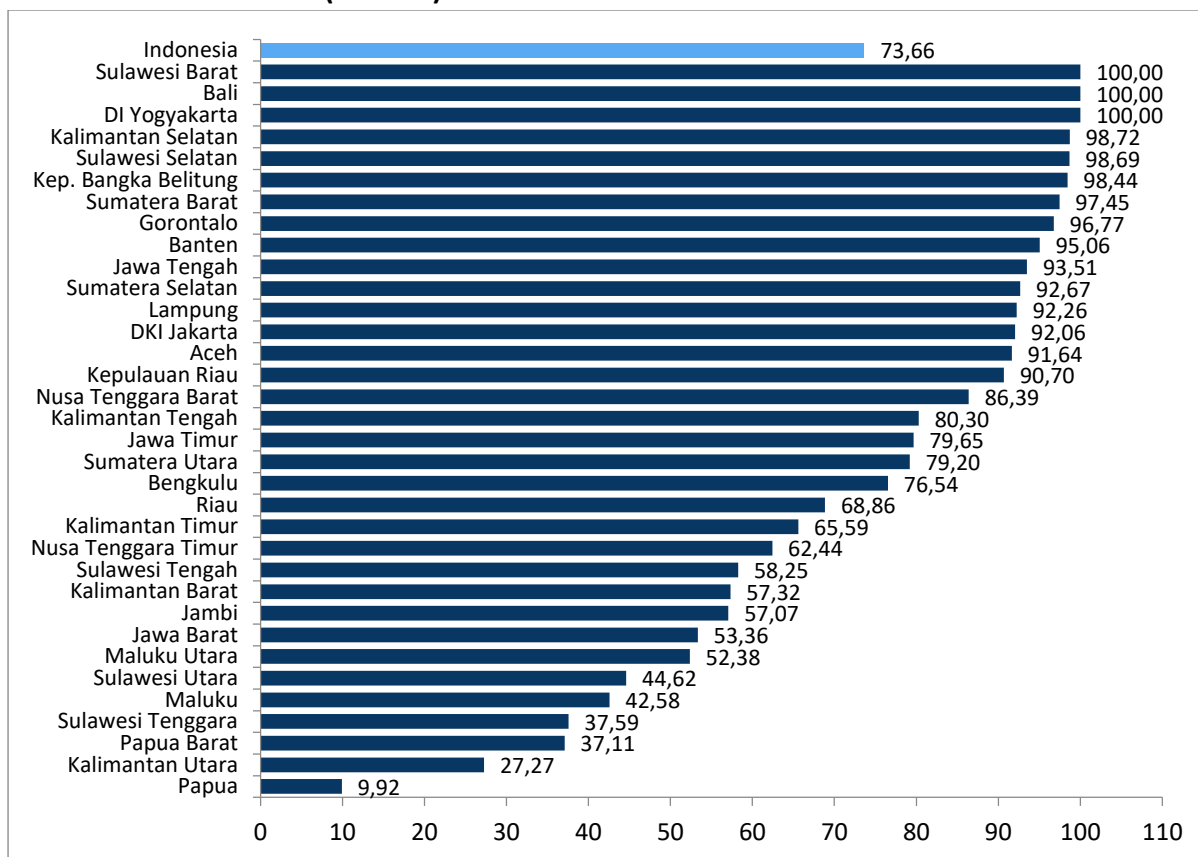
Untuk menurunkan kecenderungan peningkatan kasus PTM tersebut, tentu saja dibutuhkan program pengendalian yang dalam hal ini telah dan terus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.

1. Meningkatkan Upaya Pengendalian PTM di Puskesmas

Puskesmas berada di garda terdepan dalam penyediaan upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang di dalamnya mencakup pengendalian PTM. Upaya Pengendalian PTM di Puskesmas dilakukan dengan membentuk Puskesmas Pandu PTM. Puskesmas Pandu PTM adalah Puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian PTM secara komprehensif dan terintegrasi melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

Sampai dengan tahun 2019, terdapat 7.465 puskesmas atau 73,66% dari total 10.134 puskesmas yang ada di Indonesia melaksanakan PTM secara terpadu melalui program Puskesmas Pandu PTM. Terdapat 3 provinsi yang seluruh puskesmasnya telah melaksanakan Pandu PTM, yaitu Sulawesi Barat, Bali, dan DI Yogyakarta. Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Papua sebesar 9,92% diikuti oleh Kalimantan Utara sebesar 27,27%, dan Papua Barat sebesar 37,11%.

GAMBAR 6.64
PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PENGENDALIAN
TERPADU (PANDU) PTM MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

2. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM)

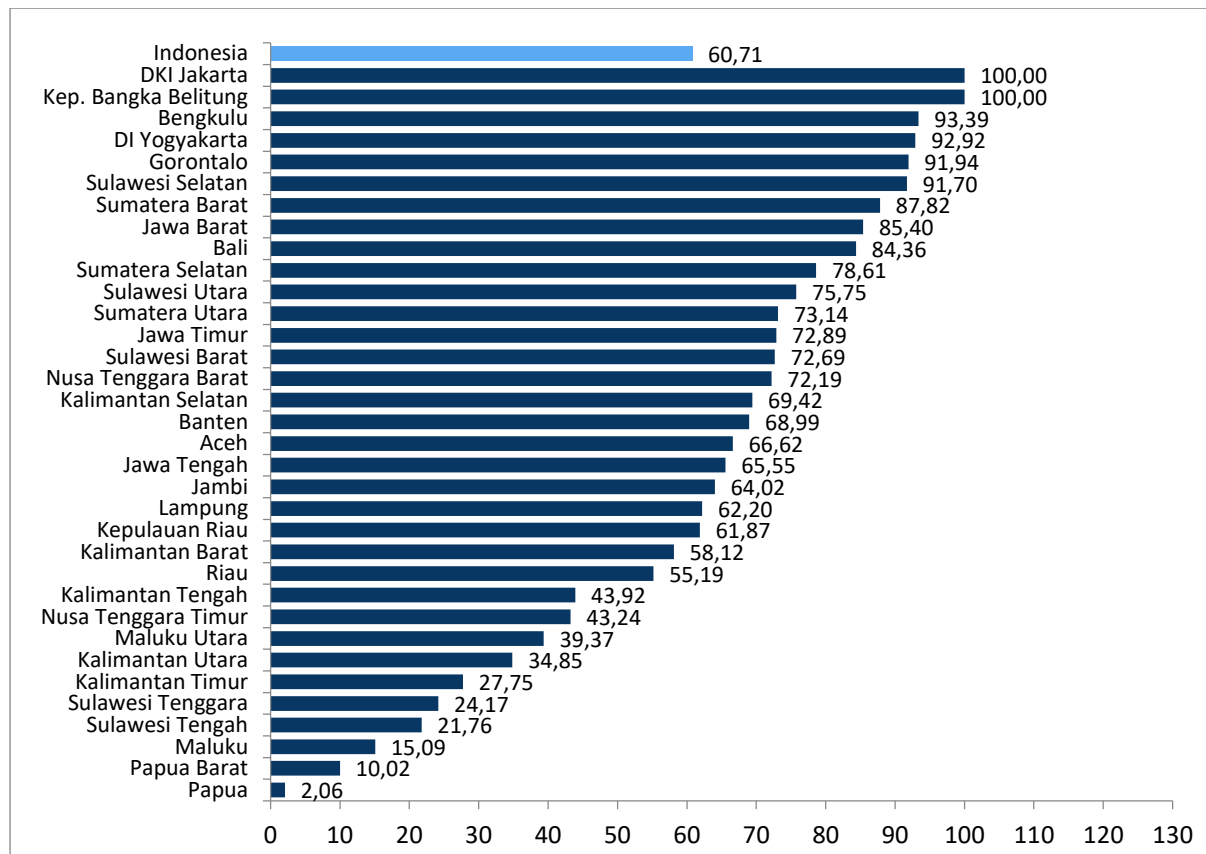
Salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) adalah Pos Pembinaan Terpadu PTM (Posbindu PTM). Posbindu PTM memberdayakan masyarakat aktif melakukan upaya deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM. Ini berarti kegiatan posbindu merupakan kegiatan dari, oleh dan untuk masyarakat. Utamanya kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Kegiatan Posbindu PTM menyasar kelompok masyarakat sehat, berisiko dan penyandang PTM berusia 15 tahun ke atas. Keterlibatan masyarakat pada Posbindu PTM dilakukan secara terintegrasi dan rutin di lingkungan tempat tinggal dalam wadah desa/kelurahan siaga aktif, di lingkungan tempat kerja ataupun di organisasi/ lembaga lainnya.

Gambar 6.65 menunjukkan jumlah desa/kelurahan di setiap Provinsi yang melaksanakan Posbindu PTM. Secara nasional desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM sebesar 60,71% (sejumlah 50.657 desa/kelurahan). Persentase ini sudah mencapai target pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2019 yaitu sebesar 50%. Terjadi peningkatan persentase pencapaian jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM dibandingkan tahun 2018 yaitu sebanyak 43,9% (sejumlah 35.749 desa/kelurahan).

Terdapat dua (2) Provinsi yang seluruh desa/kelurahannya sudah melaksanakan Posbindu PTM, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kep. Bangka Belitung. Provinsi dengan desa/kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM terbanyak lainnya (cakupan desa berposbindu $\geq 90\%$) adalah

Bengkulu, DI Yogyakarta, Gorontalo dan Sulawesi Selatan. Sementara Provinsi dengan desa/kelurahan melakukan Posbindu yang paling sedikit adalah Papua (2,06%).

GAMBAR 6.65
PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN POSBINDU PTM
MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

3. Pengendalian Konsumsi Hasil Tembakau

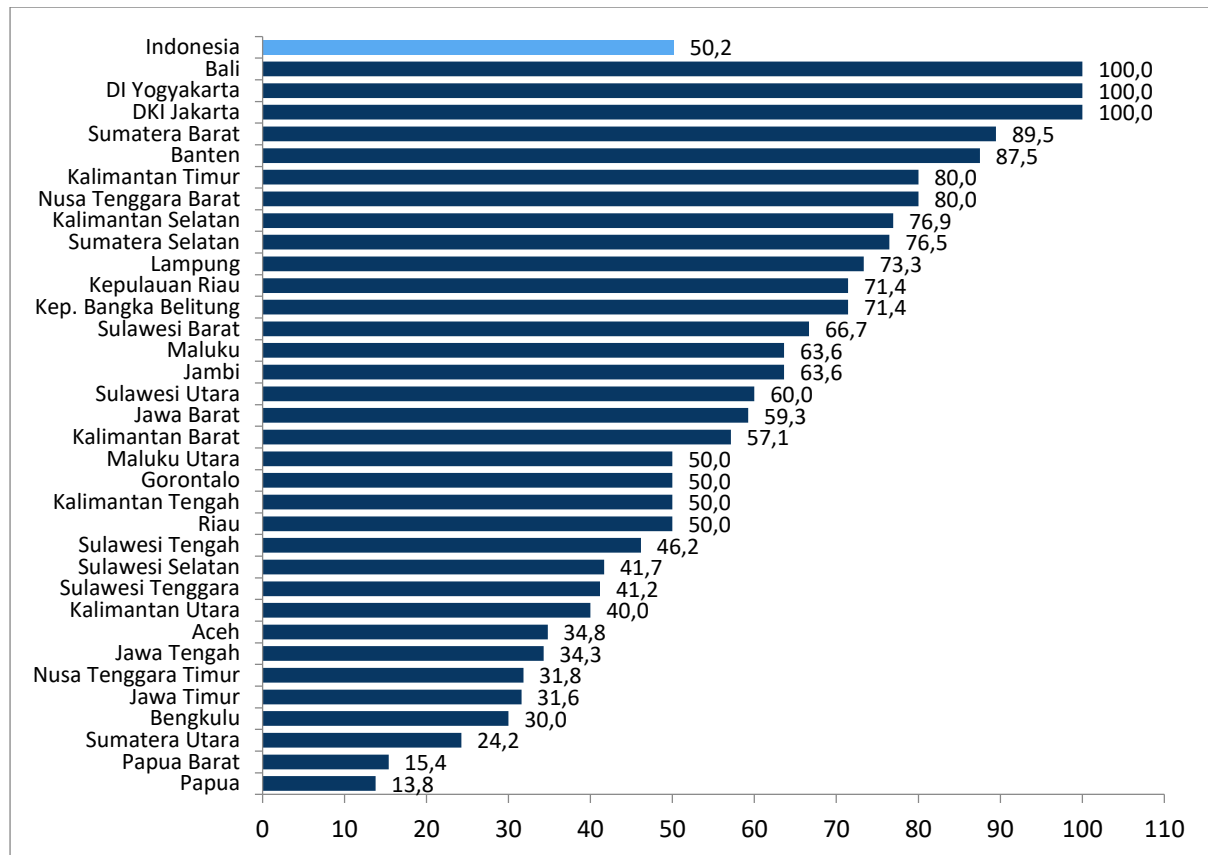
Beberapa upaya pengendalian konsumsi hasil tembakau yang telah dikembangkan adalah sebagai berikut.

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk hidup sehat tanpa rokok termasuk akibat merokok melalui iklan layanan masyarakat serta promosi kesehatan.
- b. Menyediakan layanan upaya berhenti rokok di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) baik primer dan sekunder maupun tersier. Selain itu juga, bagi masyarakat yang tidak sempat dan tidak dapat datang ke Fasyankes, disiapkan layanan konseling upaya berhenti merokok melalui telepon tanpa bayar.
- c. Melakukan monitoring dan implementasi kebijakan pengendalian konsumsi hasil tembakau.
- d. Perlindungan masyarakat terhadap paparan asap rokok melalui pengembangan kawasan tanpa rokok dengan mendorong terbentuknya peraturan dan kebijakan daerah serta implementasinya.

Sebagian besar provinsi di Indonesia sudah memiliki peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DIY, Bali, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara,

Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, namun belum semua kabupaten/kota menerapkan peraturan KTR pada minimal 50% di sekolah.

GAMBAR 6.66
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN
KEBIJAKAN KTR MINIMAL PADA 50% SEKOLAH
MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2019



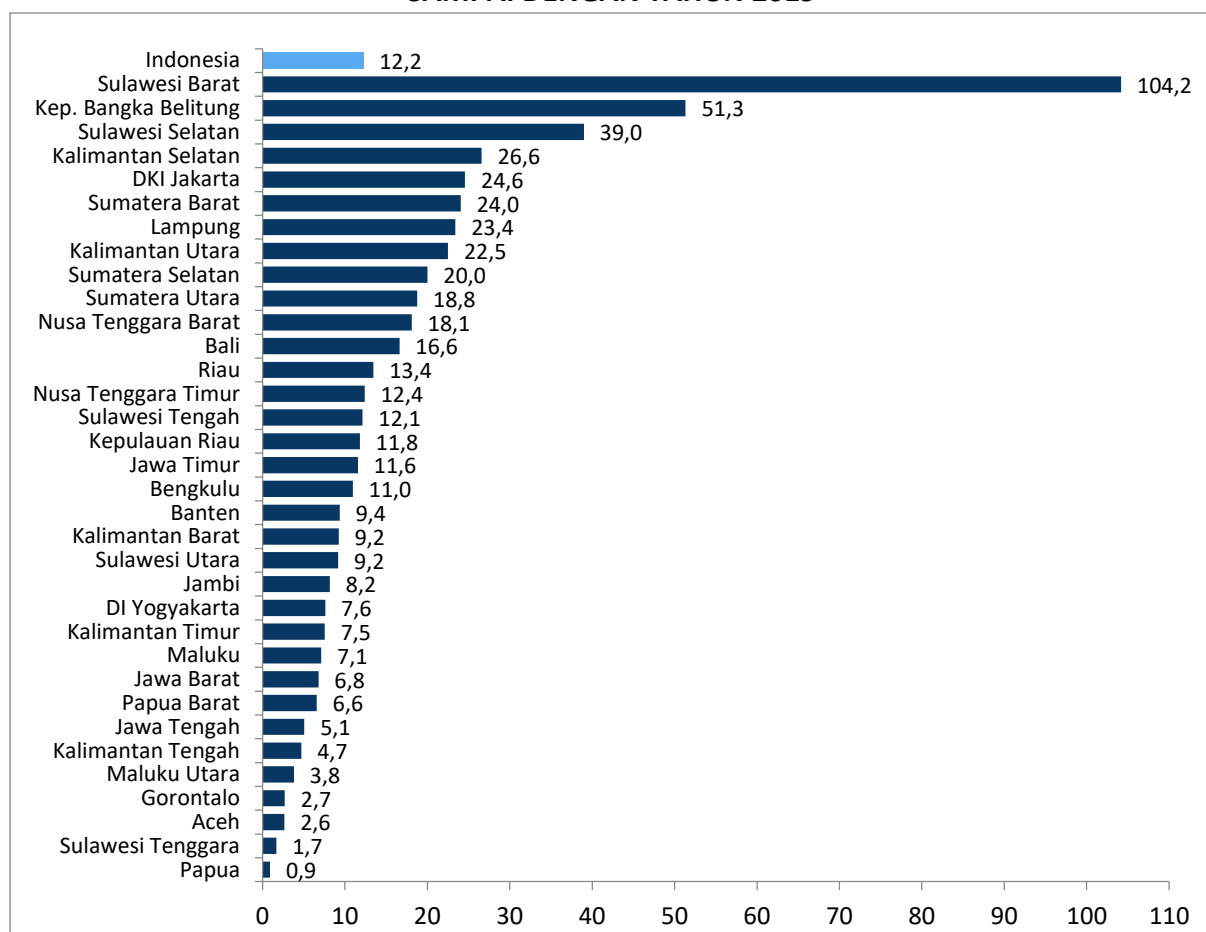
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa sampai dengan tahun 2019 terdapat 50,2% kabupaten/kota yang melaksanakan KTR pada sedikitnya 50% sekolah di wilayah tersebut. Sampai dengan tahun 2019 terdapat 3 provinsi dengan persentase kabupaten/kota menerapkan KTR di 50% sekolah sebesar 100%, yaitu Bali, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Papua sebesar 13,8%, Papua Barat sebesar 15,4%, dan Sumatera Utara sebesar 24,2%.

4. Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara

Kanker payudara dan kanker leher rahim merupakan jenis kanker yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap prevalensi kanker pada perempuan di Indonesia. Kedua jenis kanker ini memiliki angka kematian yang tinggi yang disebabkan terlambatnya deteksi dini. Penyintas kanker payudara dan leher rahim pada umumnya terdeteksi pada stadium lanjut. Kanker leher rahim dapat ditemukan pada tahap sebelum kanker (lesi prakanker) dengan metoda IVA dan papsmear. Deteksi dini dapat menekan angka kematian dan pembiayaan kesehatan.

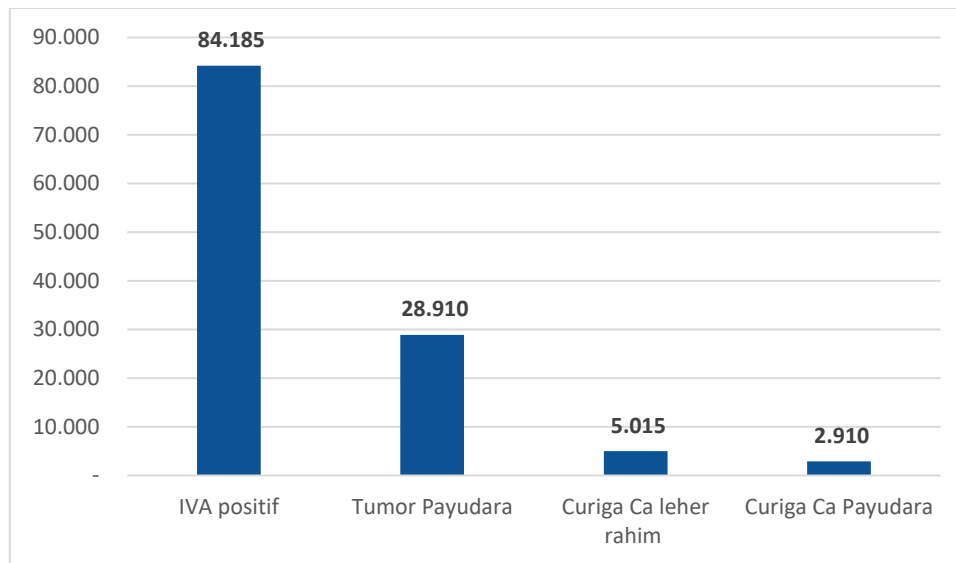
GAMBAR 6.67
PERSENTASE PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM
MELALUI METODE INSPEKSI VISUAL ASAM (IVA) DI INDONESIA
SAMPAI DENGAN TAHUN 2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Secara nasional, sebanyak 12,2% perempuan usia 30-50 tahun telah menjalani deteksi dini kanker leher rahim melalui metode IVA. Provinsi dengan cakupan deteksi dini tertinggi adalah Sulawesi Barat sebesar 104,2%, diikuti oleh Kep. Bangka Belitung sebesar 51,3%, dan Sulawesi Selatan sebanyak 39%. Sedangkan provinsi dengan cakupan deteksi dini terendah adalah Papua sebesar 0,9%, Sulawesi Tenggara sebesar 1,7%, dan Aceh sebesar 2,6%.

GAMBAR 6.68
HASIL PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DAN KANKER PAYUDARA
PADA PEREMPUAN USIA 30-50 DI INDONESIA TAHUN 2019



Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

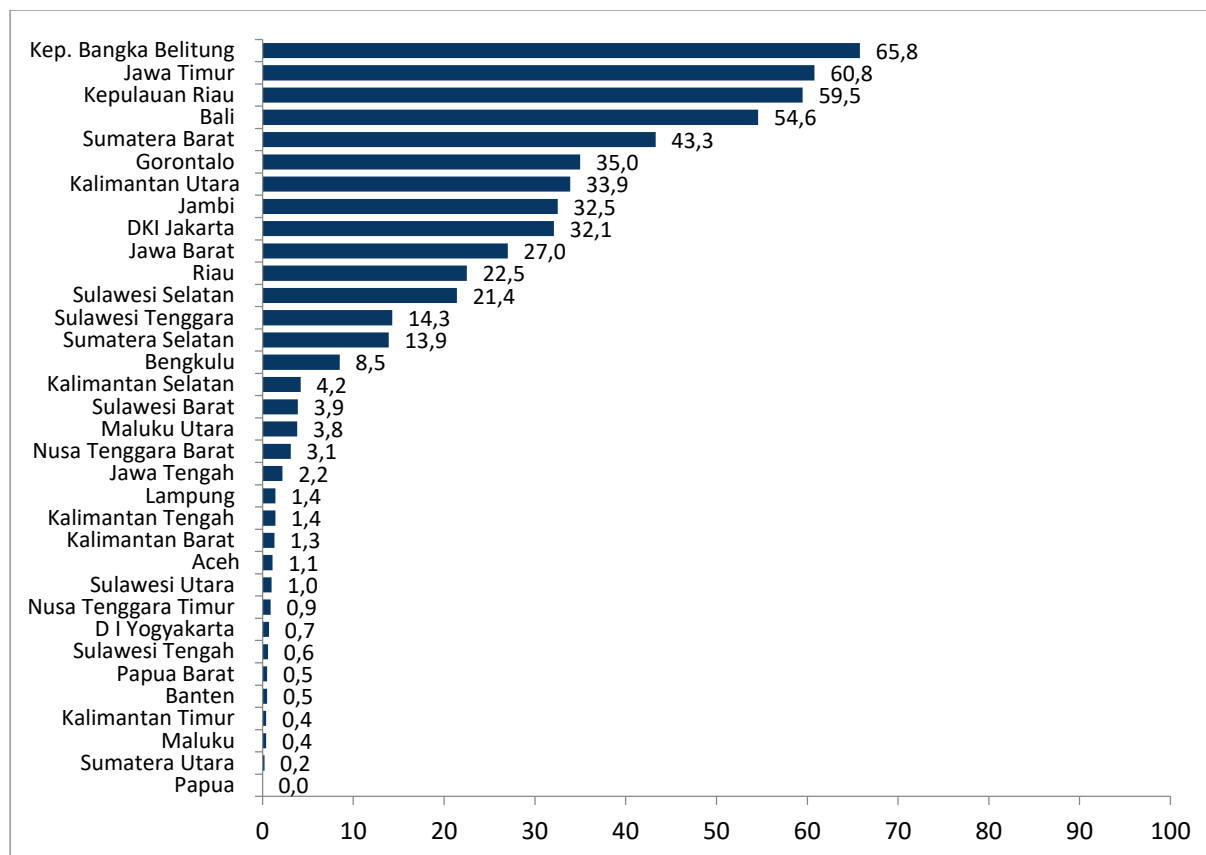
Gambar menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2019 telah ditemukan 84.185 IVA positif, 28.910 tumor payudara, 5.015 curiga kanker leher rahim, dan 2.910 curiga kanker payudara. Informasi lebih rinci mengenai pengendalian penyakit tidak menular, dapat dilihat pada Lampiran 69-Lampiran 70.

5. Pelayanan Skrining Usia Produktif

Pelayanan skrining usia produktif merupakan Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, dan anamnesa perilaku berisiko. Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM. Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Gambar 6.69 menunjukkan persentase penduduk usia produktif yang telah diberikan pelayanan skrining usia produktif. Secara nasional data menunjukkan bahwa sebanyak 38.835.530 orang telah dilakukan skrining di Indonesia. Target pelayanan skrining usia produktif di setiap kabupaten/kota adalah 100%. Dari gambar terlihat bahwa provinsi dengan capaian skrining tertinggi dicapai oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (65,8%) dan yang kedua adalah Provinsi Jawa Timur (60,8%). Sedangkan Provinsi dengan capaian terendah berada di Provinsi Papua (0,0) dan Provinsi Sumatera Utara (0,2%).

GAMBAR 6.69
PERSENTASE PELAYANAN SKRINING USIA PRODUKTIF
DI INDONESIA TAHUN 2019



Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

6. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

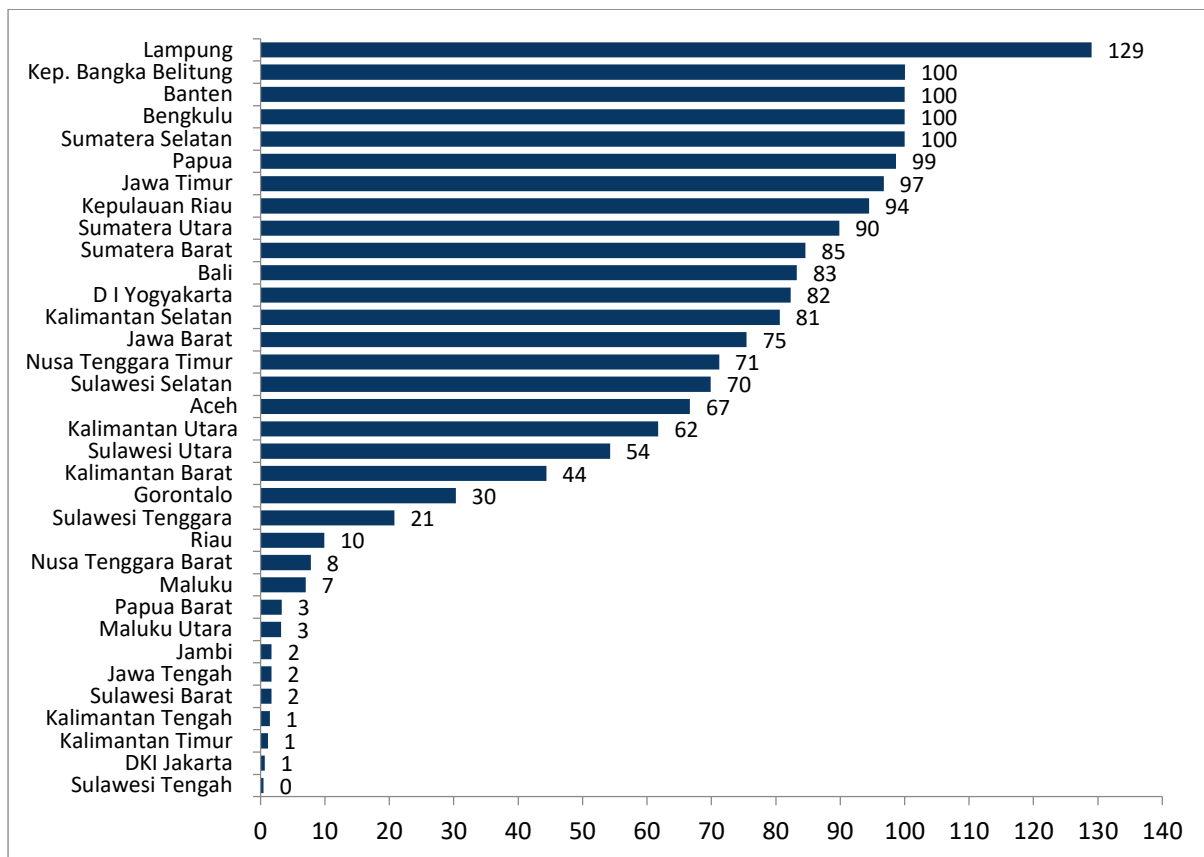
Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi: 1) Pengukuran gula darah; 2) Edukasi 3) Terapi farmakologi.

Gambar di bawah ini persentase penderita Diabetes Melitus yang telah diberikan pelayanan sesuai dengan standar. Secara nasional data menunjukkan bahwa sebanyak 2.687.994 orang telah diberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar. Target capaian pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus ditetapkan berdasarkan prevalensi Diabetes Mellitus yang telah ditetapkan oleh Pusdatin Kementerian Kesehatan / BPS.

Perhitungan capaian pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yaitu Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikalikan dengan 100%.

Provinsi dengan capaian tertinggi untuk pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus adalah dengan capaian 100% yaitu Provinsi Sumatera barat, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Banten. Provinsi dengan capaian lebih dari 100% dilakukan oleh Provinsi Lampung (129%). Hal ini dapat disebabkan oleh karena saat penetapan target jumlah penderita diabetes mellitus masih sedikit namun setelah dilakukan skrining didapatkan jumlah penderita Diabetes Mellitus yang lebih dari target sehingga jumlah orang yang dilayani juga lebih dari 100%. Provinsi dengan capaian pelayanan penderita Diabetes Mellitus sesuai dengan standar yang masih sangat rendah dilaksanakan oleh Provinsi Sulawesi Tengah (0%).

GAMBAR 6.70
PERSENTASE PENDERITA DIABETES MELLITUS MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2019



Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

F. KESEHATAN JIWA DAN NAPZA

1. Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Penyalahgunaan NAPZA Di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

Dasar hukum wajib lapor dan IPWL adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Permenkes Nomor 2415 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, penyalahguna dan Korban penyalahgunaan Narkotika, Permenkes Nomor 50 Tahun 2015 tentang Juknis Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis yang telah di revisi menjadi Permenkes Nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan institusi penerima wajib lapor.

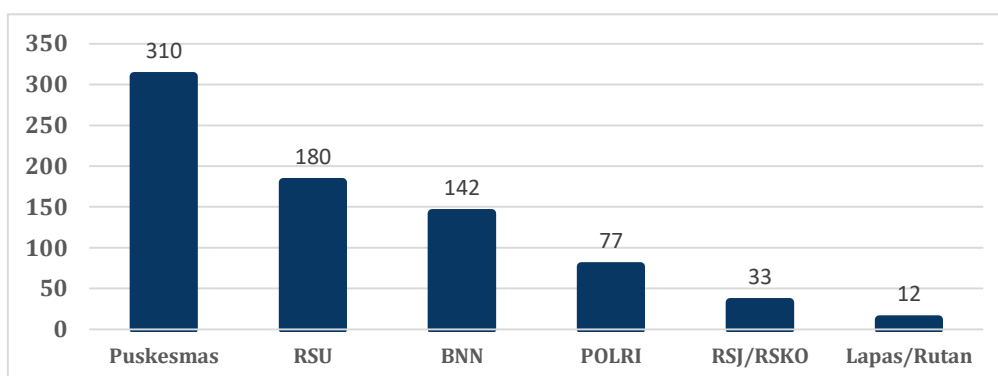
Tujuan dibentuknya IPWL adalah :

- Untuk memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,
- Untuk mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya, dan
- Untuk memberikan bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran narkotika.

Institusi penerima wajib lapor (IPWL) merupakan fasilitas kesehatan yang terdiri dari puskesmas, rumah sakit umum, BNN, POLRI, RSJ/RSKO, dan LAPAS/RUTAN yang memberikan pelayanan rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika dengan cara melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan / atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis.

Kementerian Kesehatan telah menetapkan 754 IPWL yang tersebar di 34 provinsi dan tersebar di beberapa fasilitas Kesehatan, berdasarkan Kepmenkes No.HK.01.07/Menkes.701 tahun 2018.

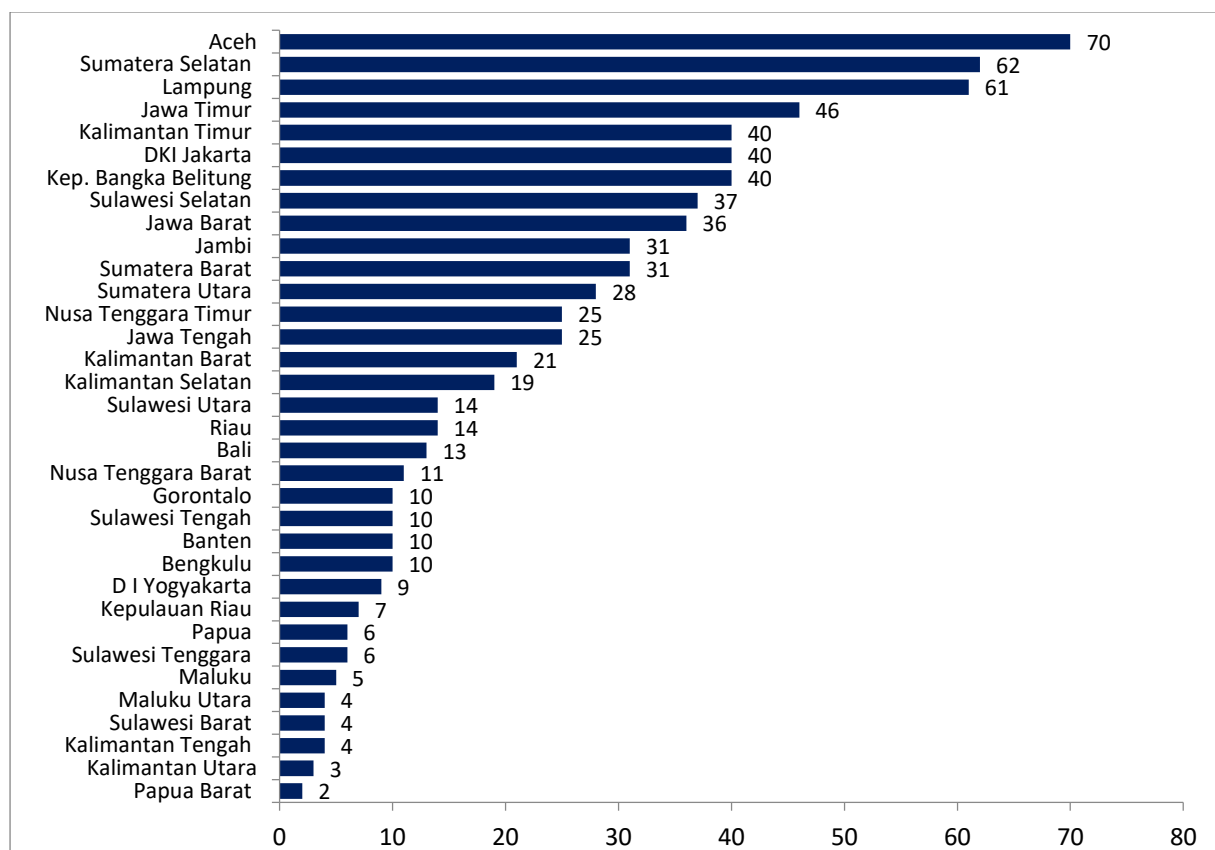
GAMBAR 6.71
JUMLAH INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR DI INDONESIA
TAHUN 2019



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

IPWL paling banyak adalah puskesmas, rumah sakit umum, dan unit yang dikelola oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

GAMBAR 6.72
JUMLAH INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019

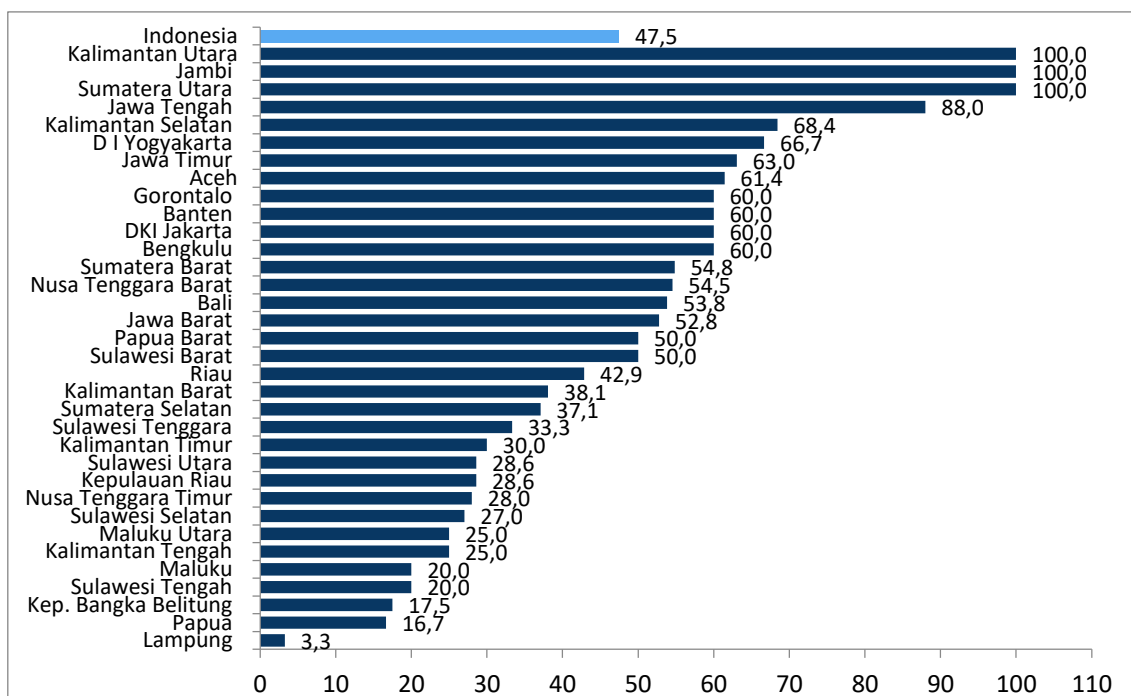


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Dalam hal jumlah fasilitas, Provinsi Aceh memiliki jumlah IPWL terbanyak yaitu sebesar 70, diikuti oleh Sumatera Selatan sebesar 62, dan Lampung sebesar 61. Sedangkan Provinsi Papua Barat memiliki jumlah IPWL terendah sebanyak 2 institusi.

Dari 754 IPWL yang telah ditetapkan, hanya 43,76% atau 330 IPWL yang aktif melakukan pelayanan, hal ini disebabkan banyaknya pasien penyalahguna Napza yang mengakses pelayanan di IPWL, tersedianya SDM terlatih bidang Napza, dukungan yang cukup dari pemerintah daerah, serta keaktifan IPWL dalam pengajuan klaim IPWL.

GAMBAR 6.73
PERSENTASE IPWL AKTIF MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2019

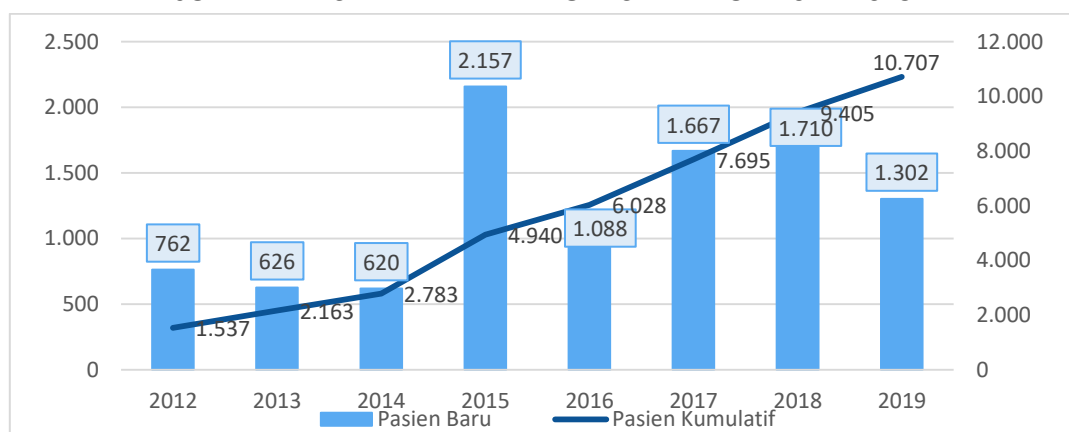


Sumber : Direktorat Jenderal P2P, 2020

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa terdapat 3 provinsi dengan persentase IPWL aktif sebanyak 100% yang artinya seluruh IPWL yang ada merupakan IPWL aktif. Provinsi dengan IPWL aktif terendah antara lain Lampung sebesar 3,3%, Papua sebesar 16,7%, dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar 17,5%.

Untuk jumlah pasien yang melakukan rehabilitasi medis, setiap tahunnya mengalami kenaikan atau peningkatan, hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penyalahguna yang sadar akan kesehatannya, baik secara sukarela, anjuran orang tua maupun akibat putusan pengadilan untuk melakukan rehabilitasi medis yang meliputi rawat jalan, rawat inap, terapi rumatan dan terapi bufermorfin.

GAMBAR 6.74
JUMLAH PASIEN IPWL DI INDONESIA TAHUN 2011-2019

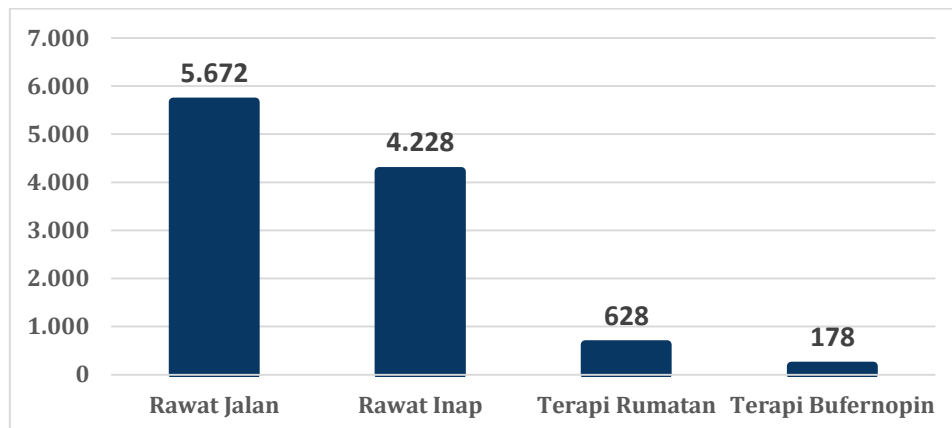


Sumber : Direktorat Jenderal P2P, 2020

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah pasien kumulatif pada IPWL sampai dengan tahun 2019 sebesar 10.707 pasien dengan jumlah pasien baru terbanyak terjadi pada tahun 2015 sebesar 2.157 pasien.

Berdasarkan jenis layanan, sebagian besar pasien mengakses layanan rawat jalan dengan jumlah kumulatif sampai dengan tahun 2019 sebesar 5.672 pasien.

GAMBAR 6.75
JUMLAH PASIEN IPWL DI INDONESIA BERDASARKAN JENIS LAYANAN
SAMPAI DENGAN TAHUN 2019



Sumber : Direktorat Jenderal P2P, 2020

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin, pasien laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, dengan perbandingan 8.138 pasien terhadap 2.573 pasien

2. Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan menjadi unit terdepan dalam upaya pencapaian target-target PIS-PK dan SPM, sehingga diharapkan tenaga kesehatan di puskesmas dapat melakukan deteksi dini terkait masalah kejiwaan, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa, adalah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 puskesmas di wilayahnya dengan kriteria:

1. Memiliki minimal 2 (dua) tenaga kesehatan terlatih kesehatan jiwa (dokter dan perawat),
2. Melaksanakan upaya promotif kesehatan jiwa dan preventif terkait kesehatan jiwa yang terintegrasi dengan program kesehatan puskesmas lainnya,
3. Melaksanakan deteksi dini, penegakkan diagnosis, penatalaksanaan awal dan pengelolaan rujukan balik kasus gangguan jiwa.

Dalam sistem informasi puskesmas ada beberapa penyakit terkait gangguan jiwa seperti demensia, gangguan anxietas, gangguan depresi, gangguan psikotik, gangguan penggunaan napza, gangguan perkembangan dan perilaku pada anak dan remaja, insomnia. Selain itu dalam PIS-PK dan SPM terdapat indikator “Gangguan jiwa berat di obati dan tidak ditelantarkan”, dan “Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat”.

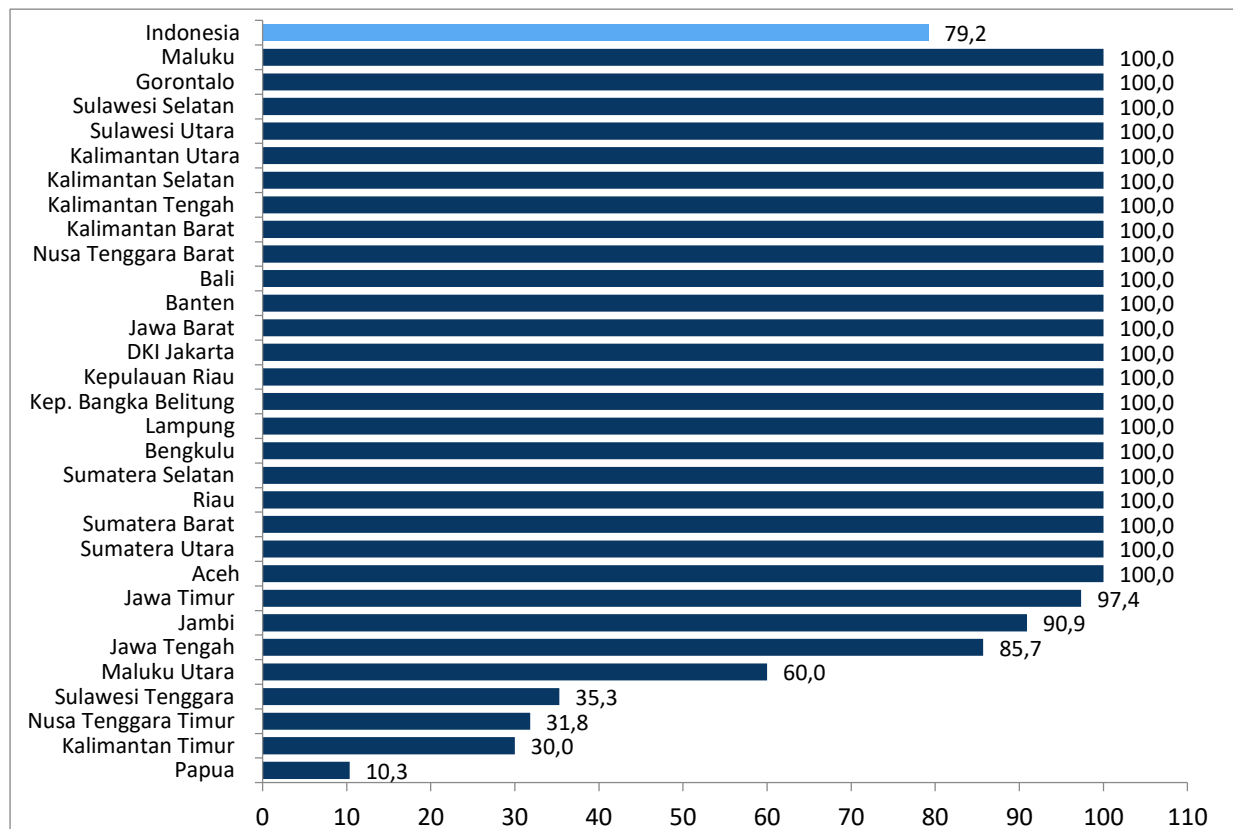
Data WHO pada tahun 2016, secara global, terdapat sekitar 35 juta orang yang mengalami depresi, 60 juta orang dengan gangguan bipolar, 21 juta orang dengan Skizofrenia, dan 47,5 juta orang dengan demensia.

Dalam Pendekatan Indikator Sehat keluarga Sehat (PIS-PK) terdapat indikator Gangguan jiwa berat di obati dan tidak ditelantarkan. Berdasarkan data aplikasi keluarga sehat per Februari 2020 persentase keluarga yang memiliki penderita gangguan jiwa berat diobati dan tidak ditelantarkan sebesar 36,75%. Angka tersebut diperoleh melalui kunjungan rumah yang berhasil mendata lengkap sebanyak 44.436.918 keluarga atau 51,9% terhadap total keluarga.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 7,1 ‰ rumah tangga yang memiliki penderita gangguan jiwa. Angka ini mengindikasikan terdapat 7 rumah tangga dengan penderita ODGJ di tiap 1.000 rumah tangga, sehingga jumlahnya diperkirakan sekitar 450 ribu ODGJ berat. Dampak dari gangguan jiwa akan menimbulkan disabilitas dan bisa menurunkan produktivitas masyarakat dan beban biaya cukup besar. Secara nasional terdapat 5.218 ODGJ berat yang di pasung pada tahun 2019.

Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdapat 407 kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa yang tersebar di 34 provinsi, yang dapat di lihat pada grafik di bawah ini . Jumlah tersebut merupakan jumlah komulatif

GAMBAR 6.76
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA
MEMILIKI PUSKESMAS MENYELENGGARAKAN UPAYA KESEHATAN JIWA
SAMPAI DENGAN TAHUN 2019



Sumber : Direktorat Jenderal P2P, 2020

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar provinsi memiliki persentase 100%, yang artinya seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut telah memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. Hanya delapan provinsi dengan persentase kurang dari 100%. Terdapat empat provinsi yang belum melaporkan data, yaitu DI Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

3. Jumlah Provinsi yang Menyelenggarakan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang Sederajat

Dunia remaja rentan mengalami depresi. Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa dimana seseorang akan mengalami banyak perubahan secara biologis, psikologis, maupun sosial. Masa ini terdiri dari dua fase, yakni masa remaja awal berkisar 10 sampai 14 tahun, dan remaja akhir di usia 14 sampai 17 tahun, pematangan fisik terjadi lebih cepat dibandingkan pematangan kejiwaan (psikososial). Kondisi inilah yang membuat remaja gampang mengalami depresi dan sedih berlebih.

Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan prevalensi gangguan jiwa yang ditunjukkan dengan gejala depresi pada usia 15 tahun ke atas mencapai 6,1%. Prevalensi rumah tangga dengan ART Gangguan Jiwa Skizofrenia/Psikosis pada Riskesdas 2018 adalah 6,7% atau sekitar 282 ribu orang. Sementara itu, sekitar 10% penderita gangguan mental emosional ada pada rentang usia 15-24 tahun yang di dalamnya termasuk usia remaja.

Berdasarkan survei kesehatan sekolah terakhir yang dilakukan Kemenkes mengenai kesehatan jiwa remaja pada tahun 2006, didapati fakta kekerasan menjadi salah satu faktor remaja mengalami gangguan mental. Dari survei tersebut menunjukkan kekerasan fisik terjadi di lingkungan sekolah. Sebanyak 40% siswa usia 13-15 tahun pernah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh teman sebaya. Kaum lelaki menjadi korban kekerasan fisik tertinggi dengan jumlah 84%. Sedangkan perempuan yang mengalami kekerasan fisik mencapai 75%. Faktor lainnya adalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru dan petugas sekolah. Sebanyak 45% siswa laki-laki dan 22% siswa perempuan pernah mendapatkan kekerasan dari guru dan petugas sekolah.

Sebenarnya, kekerasan bukan satu-satunya faktor yang membuat remaja rentan mengalami gangguan kesehatan jiwa. Masih ada faktor lain yang menjadi pemicu, seperti penggunaan napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) pada remaja yang rentan mengganggu mentalnya. Hal tersebut tergambar dari 24% pelajar melakukan penyalahgunaan napza. Faktor kesendirian atau yang dikenal dengan bahasa remajanya 'jomblo' juga menjadi salah satu penyumbang remaja rentan mengalami gangguan kesehatan jiwa. Di mana faktor kesepian pada laki-laki sebanyak 19,6% sedangkan untuk perempuan sebesar 11,4%.

Di antara faktor tersebut terdapat fakta yang mencengangkan di mana sebesar 50% remaja dengan usia 13-15 tahun mengalami gangguan kesehatan jiwa karena disebabkan perundungan atau *bullying* di sekolah yang dilakukan teman-teman sebaya. Karena masih kuatnya stigma. Di remaja sendiri, gangguan kejiwaan justru sering menjadi bahan olok-olok atau *bullying*.

Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat adalah 30% dari jumlah sekolah yang ada di provinsi menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza dengan kriteria adanya guru BP yang telah dilatih bidang kesehatan jiwa, adanya media KIE terkait kesehatan jiwa dan napza, dan melakukan konseling dan deteksi dini terhadap siswa yang mengalami masalah kesehatan jiwa dan NAPZA. Sampai dengan tahun 2019, seluruh provinsi di Indonesia berhasil memenuhi target 30% tersebut dengan jumlah 10.317 sekolah.

G. PELAYANAN KESEHATAN HAJI

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada Jemaah haji agar dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran Agama Islam. Pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang diberikan kepada jemaah haji, bukan saja dari aspek umum dan ibadah, tetapi juga dari aspek kesehatan jamaah haji itu sendiri.

Penyelenggaraan ibadah haji melibatkan jutaan manusia yang berpindah dari satu negara ke negara lain dengan melakukan berbagai ritual ibadah fisik dan spiritual. Pada proses ini terjadi kerentanan terhadap kejadian morbiditas maupun mortalitas. Jumlah jemaah haji Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 205.908 jamaah.

Dalam rangka menjamin kesiapan Jemaah sebelum keberangkatan, diperlukan adanya kesiapan baik fisik, mental maupun spiritual. Sejak tahun 2018, penyelenggaraan kesehatan haji Indonesia mulai menerapkan konsep *Istithaah* yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang *Istithaah* Kesehatan Jamaah Haji. Permenkes ini membawa konsekuensi bahwa penyelenggaraan kesehatan haji mengedepankan pembinaan kesehatan untuk memperkuat pelayanan dan perlindungan kesehatan haji. Untuk itu upaya pembinaan sudah harus dilakukan sedini mungkin yang diawali dengan pemeriksaan kesehatan awal. Berbagai faktor risiko kesehatan dikendalikan melalui pembinaan kesehatan yang berjenjang sampai pada tahap penetapan *istithaah* kesehatan jamaah haji di tingkat kabupaten.

Kuota jamaah haji Indonesia Tahun 2019 M/1440 H terjadi peningkatan dari 221.000 pada tahun 2018 menjadi 231.000 orang pada tahun 2019. Pada pemeriksaan kesehatan tahap kedua, jumlah Jemaah memenuhi syarat *Istithaah* berjumlah 127.528, Memenuhi syarat *Istithaah* dengan pendampingan berjumlah 99.541, Tidak memenuhi syarat sementara 552, Tidak memenuhi syarat *istithaah* 447

Penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi dilaksanakan oleh Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Bidang Kesehatan yang terdiri dari Tim Asistensi, Tim Manajerial, Tim Kuratif Rehabilitatif (TKR), Tim Promotif Preventif (TPP), Tim Gerak Cepat (TGC), serta Tim Pendukung Kesehatan (TPK).

Penyelenggaraan kesehatan haji oleh PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dengan paradigma penguatan promotif dan preventif tanpa mengesampingkan pelayanan kesehatan (kuratif) serta pola pendekatan deteksi dini kasus kesehatan dan pelayanan *emergency* respon. Penyelenggaraan

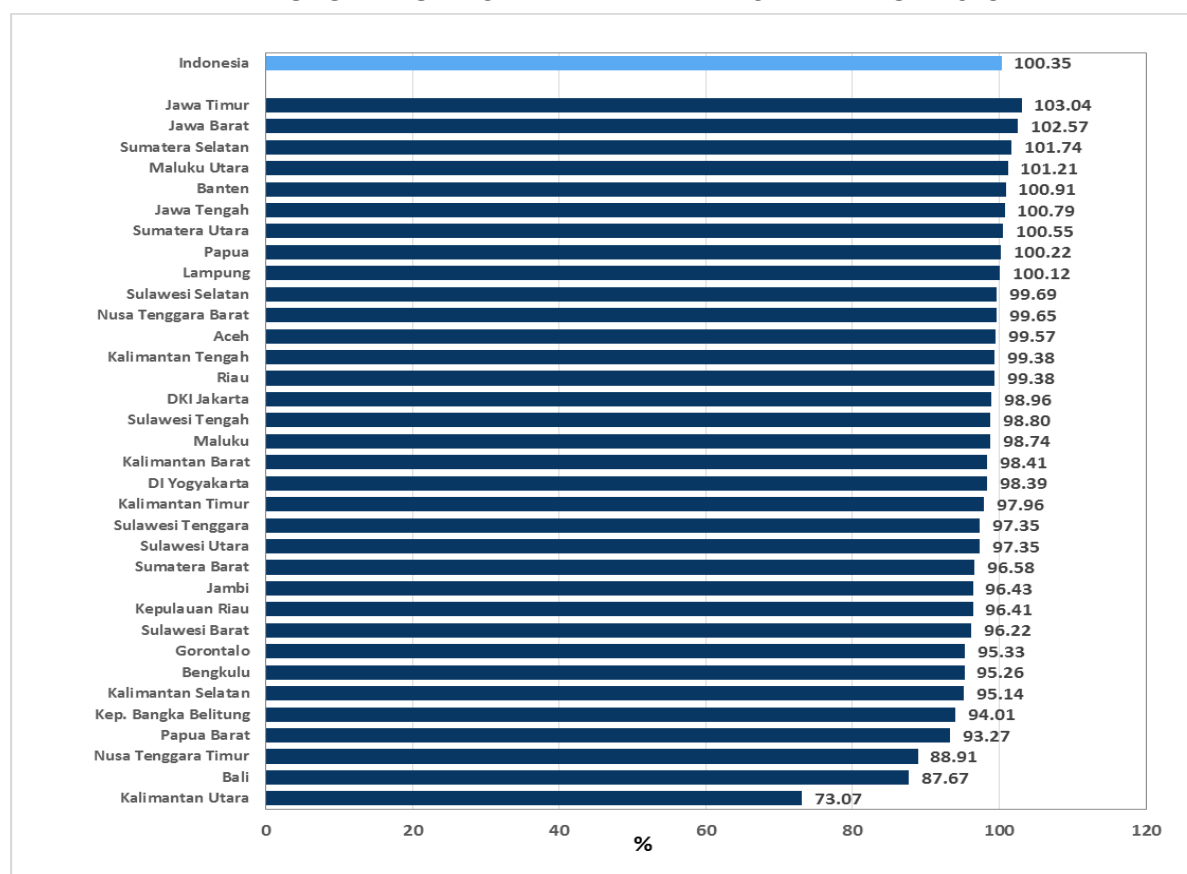
kesehatan haji dengan konsep tersebut merupakan tindak lanjut dari konsep operasional kesehatan haji tahun 2016, 2017 dan 2018.

1. Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji

Pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji telah dimulai pada awal tahun 2019. Indikator penyelenggaraan kesehatan haji adalah cakupan hasil pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji yang diinput kedalam Siskohatkes 1 bulan sebelum operasional haji.

Pada tahun 2019 Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap 214.756 calon Jemaah dengan capaian pemeriksaan 100,35%. Cakupan ini telah berhasil memenuhi target pemeriksaan tahun 2019 sebesar 85%. Provinsi dengan capaian tertinggi adalah Jawa Timur sebesar 103,04% dan terendah adalah Kalimantan Utara sebesar 73,07%. Capaian hasil pemeriksaan pertama jemaah haji berdasarkan tempat pemeriksaan adalah sebagai berikut.

GAMBAR 6.77
CAPAIAN PEMERIKSAAN JEMAAH HAJI
MENURUT PROVINSI TEMPAT PEMERIKSAAN TAHUN 2019



Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2020

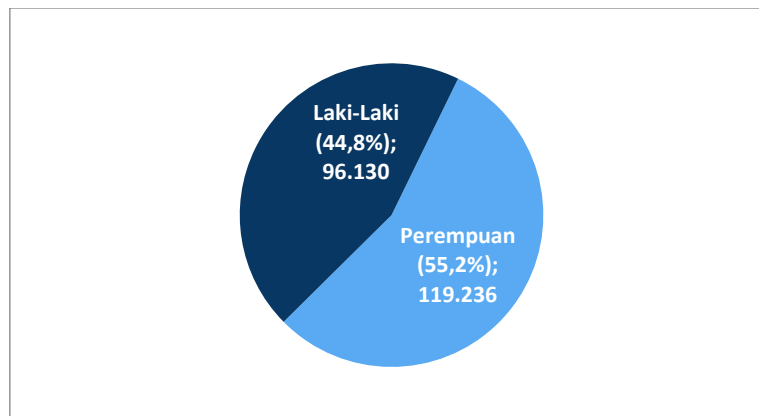
Pemeriksaan terhadap calon Jamaah haji tahun 2019 dilakukan sejak enam sampai satu bulan sebelum keberangkatan. Dalam proses penghitungan cakupan pemeriksaan beberapa provinsi memiliki capaian di atas 100%. Hal ini disebabkan karena numerator yang digunakan adalah seluruh calon jamaah yang menjalani pemeriksaan, sedangkan denominatornya adalah kuota yang ditetapkan Kementerian Agama, sehingga jumlahnya lebih rendah dibandingkan calon Jamaah haji

yang diperiksa. Data dan informasi lebih rinci mengenai pemeriksaan Jemaah haji terdapat pada Lampiran 64.f.

2. Kondisi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi

Jemaah haji Indonesia pada tahun 2019 (selama operasional haji di Arab Saudi) sebanyak 215.377 jemaah yang terdiri dari laki-laki sebanyak 96.130 jemaah (44,64%), dan perempuan sebanyak 119.236 jemaah (55,36%).

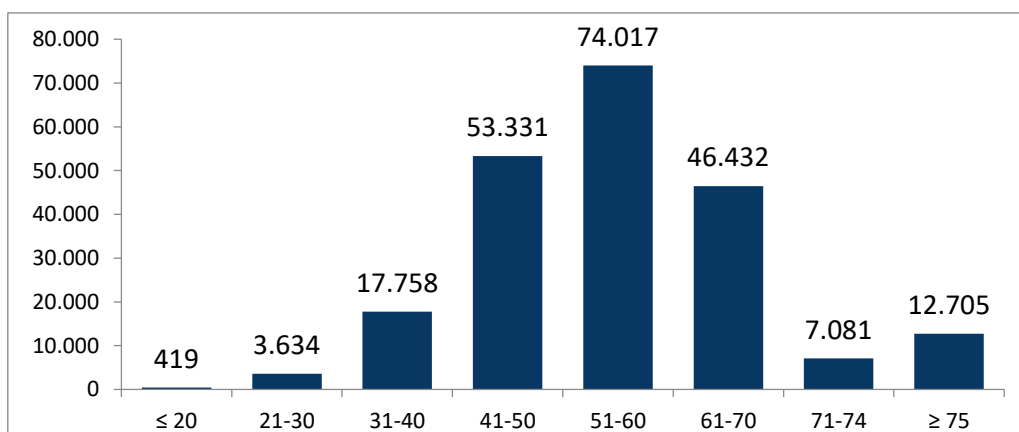
GAMBAR 6.78
JAMAAH HAJI INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN
(SELAMA OPERASIONAL HAJI DI ARAB SAUDI) TAHUN 2019



Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2020

Sedangkan menurut kelompok umur, sebagian besar jemaah berada pada kelompok umur 51-60 tahun sebanyak 74.017 jemaah (34,37%).

GAMBAR 6.79
JAMAAH HAJI INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2019



Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2020

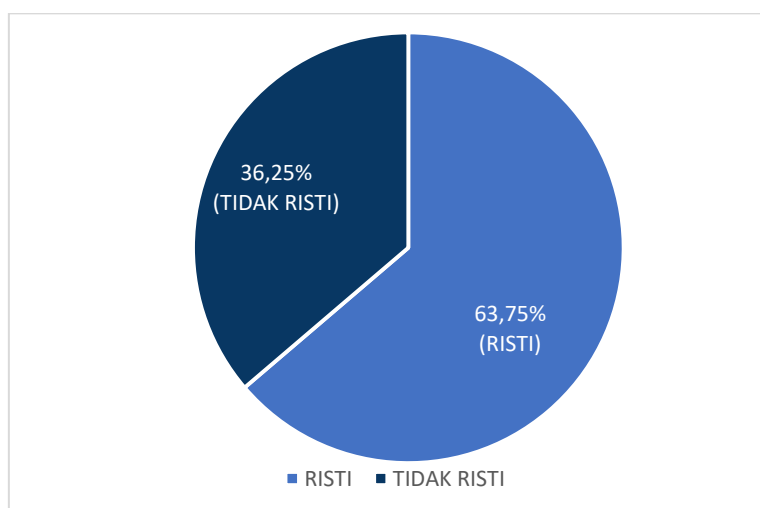
Gambaran jemaah haji menurut karakteristik umur menunjukkan bahwa persentase terbanyak jemaah di usia 51-60 tahun (34,37%), 41-50 tahun (24,76%), dan 61-70 tahun (21,56%). Kelompok populasi pra-usila dan usila merupakan kelompok rentan terhadap kejadian kesakitan dan kematian selama penyelenggaraan ibadah haji.

3. Pola Morbiditas dan Mortalitas Jamaah Haji

Isthithaah Kesehatan Jamaah Haji adalah kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jamaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam. Pemerintah bertanggungjawab terhadap pembinaan *isthithaah* kesehatan haji yang merupakan kegiatan terpadu, terencana, terstruktur, dan terukur, diawali dengan pemeriksaan kesehatan pada saat mendaftar jamaah haji sampai masa keberangkatan ke Arab Saudi.

Melalui implementasi *istithaah*, faktor risiko kesehatan dapat diketahui sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan sejak dini. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, Jamaah haji tergolong risiko tinggi (risti) jika memenuhi tiga kriteria, yaitu berusia > 60 tahun dengan penyakit, berusia < 60 tahun dengan penyakit, dan berusia > 60 tahun tanpa penyakit.

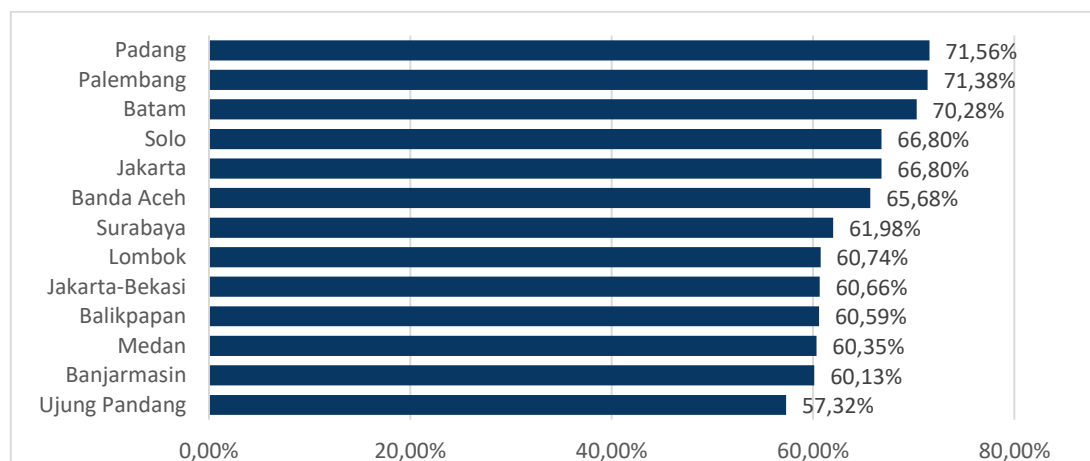
GAMBAR 6.80
PERSENTASE JAMAAH HAJI MENURUT STATUS RISTI



Sumber : Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2020

Secara umum Jamaah haji dengan kategori risti lebih banyak dibandingkan dengan jamaah tidak risti.

GAMBAR 6.81
PERSENTASE JAMAAH HAJI RISTI MENURUT EMBARKASI TAHUN 2019



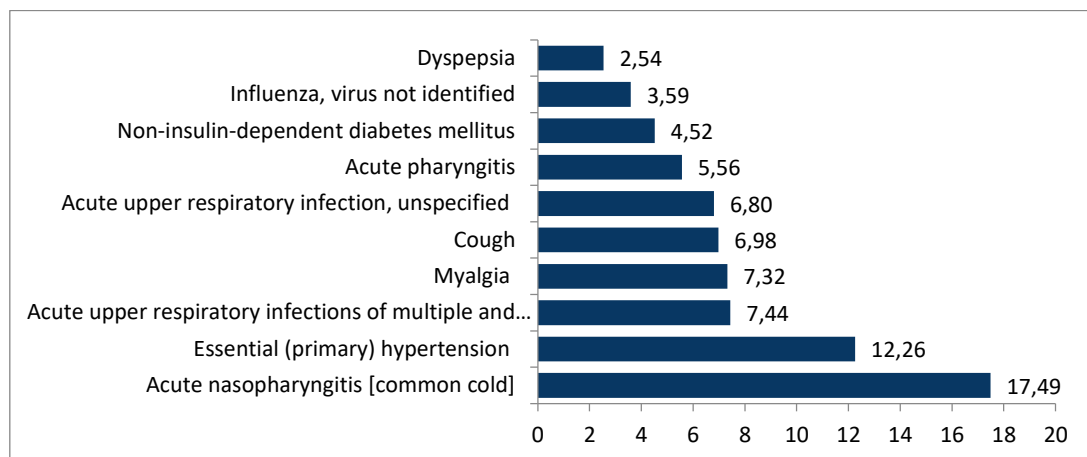
Sumber : Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2020

Keberadaan Jamaah risti menjadi hal yang harus diperhatikan tidak hanya oleh petugas kesehatan yang mendampingi di tiap kloter, namun juga oleh dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota yang menjadi asal daerah jamaah tersebut. Berdasarkan pembagian embarkasi, proporsi Jamaah risti terbanyak berasal dari embarkasi Padang (PDG sebesar 71,56%), disusul oleh Embarkasi Palembang (PLM) sebesar 71,38% dan Embarkasi Batam (BTH) sebesar 70,28%.

Faktor risiko yang telah dimiliki oleh Jamaah sejak keberangkatan dan kondisi cuaca di tanah suci berkontribusi terhadap tingkat kesakitan Jamaah selama proses penyelenggaraan ibadah haji.

Jamaah haji yang mendapatkan rawat jalan kloter sejumlah 475.464 kunjungan. Kunjungan penyakit terbanyak adalah *acute nasopharyngitis (common cold)* sebesar 17,49%, diikuti oleh *essential (primary) hypertension* sebesar 12,26%, dan 7,4%. Data penyakit terbanyak rawat jalan dapat dilihat pada lampiran 64.g.

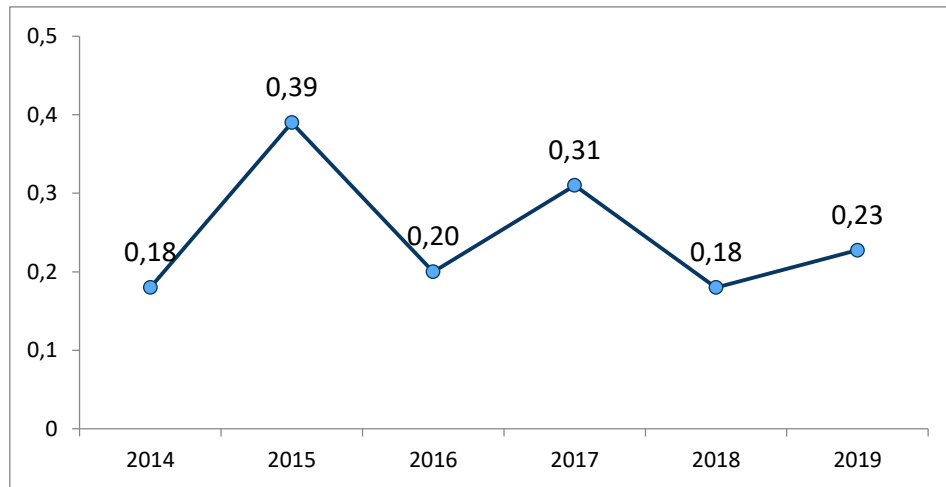
GAMBAR 6.82
PROPORSI 10 PENYAKIT TERBANYAK PADA PASIEN RAWAT JALAN
JAMAAH HAJI TAHUN 2019



Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2020

Selain berupaya untuk menekan angka kesakitan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan juga berupaya untuk menurunkan angka kematian jamaah haji. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2019, terdapat 493 jamaah haji yang wafat atau 0,23% terhadap total jamaah.

GAMBAR 6.83
PROPORSI JEMAAH HAJI WAFAT TAHUN 2014-2019



Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2018

Proporsi jemaah haji wafat terhadap total jemaah dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan tiap dua tahun sekali, yaitu pada tahun 2015 dan 2017. Sedangkan pada tahun 2014, 2016 dan 2018, proporsi jemaah wafat berada pada kisaran 0,18%-0,2%. Peningkatan tersebut terjadi karena insiden di Mina dan robohnya *crane* di Mekkah pada tahun 2015 dan peningkatan suhu ekstrem pada tahun 2017.

Data dan informasi lebih rinci terkait penyelenggaraan ibadah haji dapat dilihat pada lampiran 64.f-64.j.



Bab VII
**KESEHATAN
LINGKUNGAN**

+



VII KESEHATAN LINGKUNGAN

—Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan sehat mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum, harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan, diantaranya limbah (cair, padat, dan gas), sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan, vektor penyakit, zat kimia berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi, air yang tercemar, udara yang tercemar, dan makanan yang terkontaminasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan menyatakan bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Sedangkan menurut WHO, kesehatan lingkungan meliputi seluruh faktor fisik, kimia, dan biologi dari luar tubuh manusia dan segala faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Kondisi dan kontrol dari kesehatan lingkungan berpotensi untuk mempengaruhi kesehatan.

Program Lingkungan Sehat bertujuan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui pengembangan sistem kesehatan kewilayahan dalam menggerakkan pembangunan lintas sektor berwawasan kesehatan. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit. Pencapaian tujuan penyehatan lingkungan merupakan akumulasi berbagai pelaksanaan kegiatan dari berbagai lintas sektor, peran swasta dan masyarakat dimana pengelolaan kesehatan lingkungan merupakan penanganan yang paling kompleks, kegiatan tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu dari hulu yang berasal dari kebijakan dan pembangunan fisik dari berbagai lintas sektor ikut serta berperan (Perindustrian, Lingkungan Hidup, Pertanian, Pekerjaan Umum- Perumahan Rakyat dan lainnya) hingga ke hilir yaitu dampak kesehatan. Kementerian Kesehatan sendiri fokus kepada pengelolaan dampak kesehatan.

A. AIR MINUM

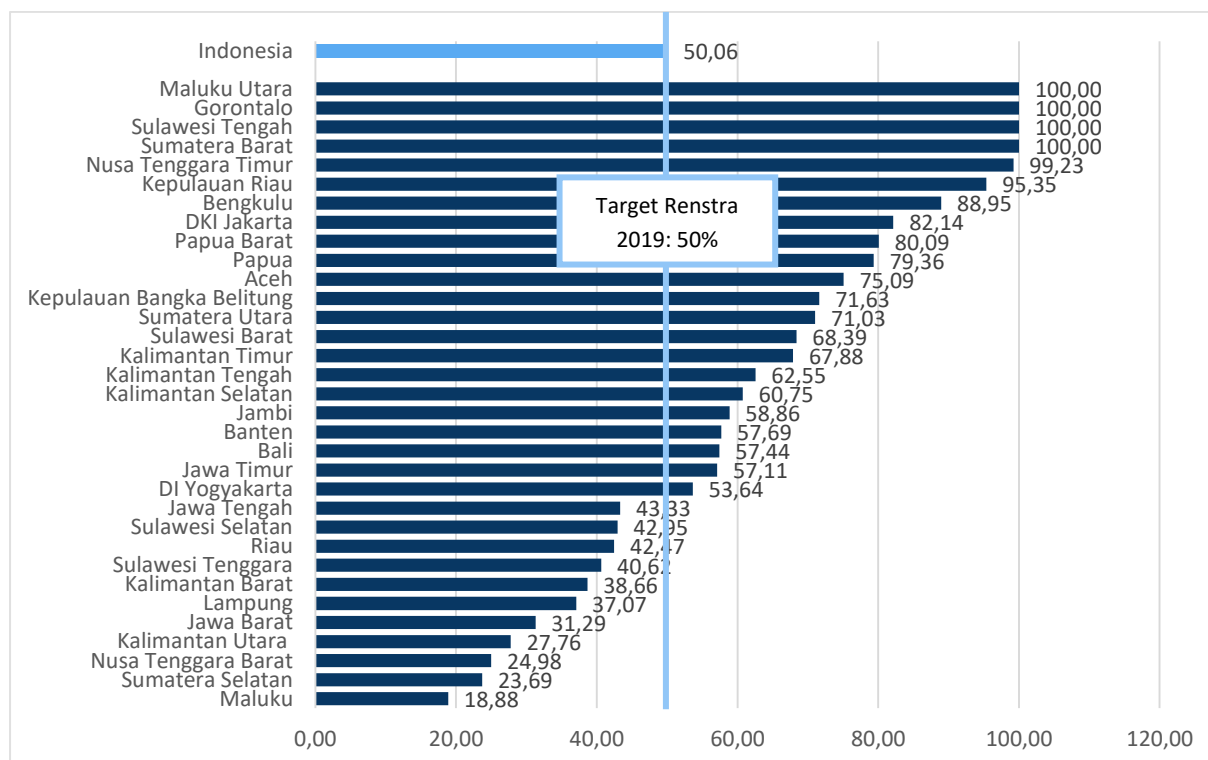
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum yang dikonsumsi masyarakat perlu ditetapkan persyaratan kualitas air minum sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan.

Air minum yang aman (layak) bagi kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 adalah air minum yang memenuhi persyaratan secara fisik, mikrobiologis, kimia, dan radioaktif. Secara fisik, air minum yang sehat adalah tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna serta memiliki total zat padat terlarut, kekeruhan, dan suhu sesuai ambang batas yang ditetapkan. Secara mikrobiologis, air minum yang sehat harus bebas dari bakteri *E.Coli* dan total bakteri koliform. Secara kimiawi, zat kimia yang terkandung dalam air minum seperti besi, aluminium, klor, arsen, dan lainnya harus di bawah ambang batas yang ditentukan. Secara radioaktif, kadar *gross alpha activity* tidak boleh melebihi 0,1 becquerel per liter (Bq/l) dan kadar *gross beta activity* tidak boleh melebihi 1 Bq/l.

Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat, diperlukan pengawasan kualitas air minum baik secara eksternal maupun internal. Pengawasan kualitas air minum secara eksternal dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota atau kantor kesehatan pelabuhan (KKP) khusus untuk wilayah kerja KKP. Pengawasan secara internal dilakukan oleh penyedia air minum yaitu badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang melakukan kegiatan penyediaan air minum.

Kegiatan pengawasan kualitas air minum menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 pasal 4 ayat 4 meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi, dan tindak lanjut. Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dalam pengawasan kualitas air minum adalah Inspeksi Kesehatan Lingkungan atau IKL. Pelaksanaan IKL dilakukan oleh tenaga sanitarian puskesmas, kader kesehatan lingkungan, atau kader lain di desa yang telah mendapatkan pelatihan praktis pemantauan kualitas sarana air minum.

GAMBAR 7.1
PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DILAKUKAN INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN
TAHUN 2019



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Pada tahun 2019, sebanyak 55.546 sarana air minum dilakukan IKL. Dari jumlah tersebut, 50.787 sarana air minum beresiko rendah dan sedang. 6.221 sampel diambil untuk diperiksa dan hanya 3,97% yang memenuhi syarat kesehatan. Persentase sarana air minum yang dilakukan IKL di Indonesia sebesar 50,06% dan sudah memenuhi target Renstra pada tahun 2019 yaitu 50% (Gambar 7.1). Ada empat provinsi yang memiliki persentase IKL sebesar 100% yaitu Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Barat. Provinsi dengan persentase IKL terendah adalah Maluku (18,88%), Sumatera Selatan (23,69%) dan Nusa Tenggara Barat (24,98%). Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2019 tidak melakukan pemeriksaan. Rincian lebih lengkap mengenai persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan dapat dilihat di Lampiran 72.a.

Rumah tangga harus memiliki akses air minum layak dan bersih dalam mendukung kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kebutuhan air minum, tidak hanya dilihat dari kuantitasnya tetapi juga dari kualitas air minum. Pemenuhan kebutuhan air minum di rumah tangga dapat diukur dari akses air minum layak.

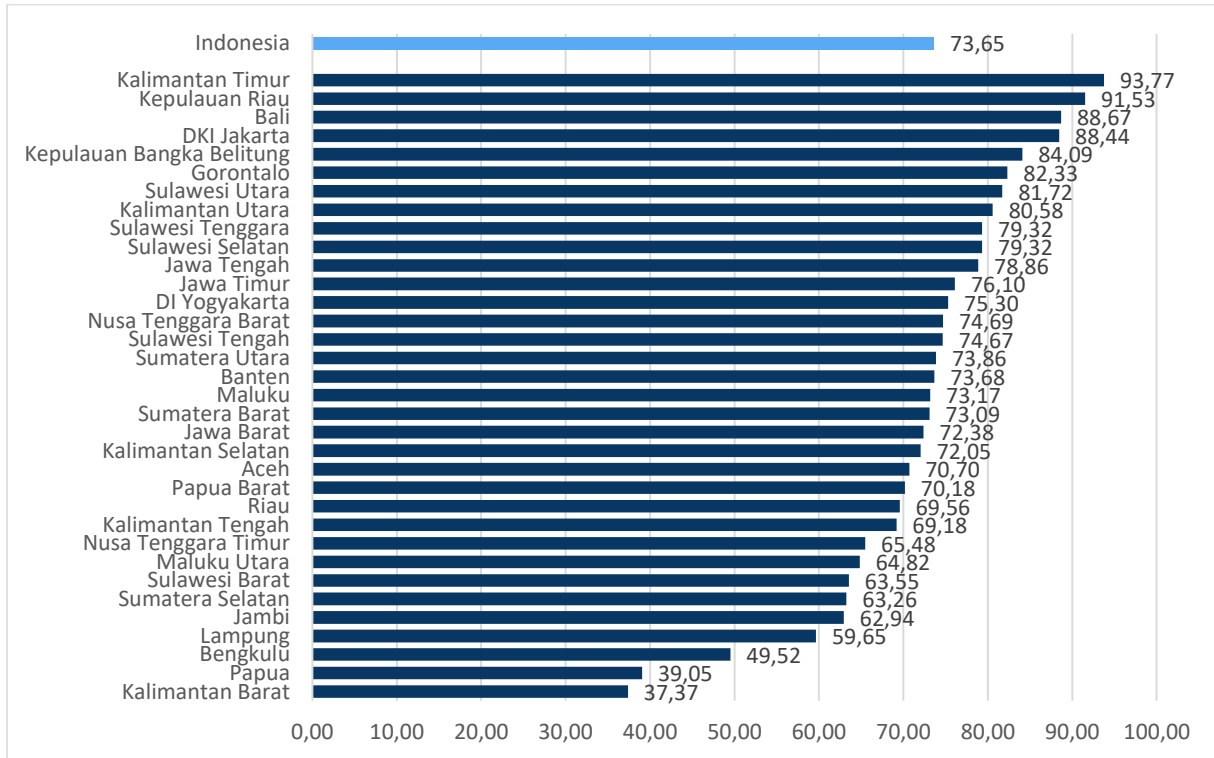
Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap akses air minum layak diantaranya adalah:

1. jenis sumber air utama yang digunakan untuk diminum;
2. jenis sumber air utama yang digunakan untuk memasak, mandi, dan mencuci;
3. jarak sumber air ke penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat ≥ 10 meter.

Akses air minum yang layak dan bersih diperoleh dari sumber air minum yang terlindungi meliputi air ledeng (keran), hydrant umum, keran umum, terminal air, penampungan air hujan atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor/pompa yang memiliki jarak minimal 10 meter dari sarana

pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan tempat penampungan atau pembuangan sampah. Air kemasan, air yang diperoleh dari penjual keliling, serta air dari sumur atau mata air tak terlindung bukan termasuk dalam kriteria akses air minum layak dan bersih.

GAMBAR 7.2
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SUMBER AIR MINUM LAYAK TAHUN 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Secara nasional persentase rumah tangga dengan akses air minum layak sebesar 73,65% (Gambar 7.2). Provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga dengan akses air minum layak yaitu Kalimantan Timur (93,77%), Kepulauan Riau (91,53%) dan Bali (88,67%). Sedangkan provinsi dengan persentase rumah tangga terendah adalah Kalimantan Barat (37,37%), Papua (39,05%), dan Bengkulu (49,52%). Rincian lengkap tentang persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 72.b.

B. AKSES SANITASI LAYAK

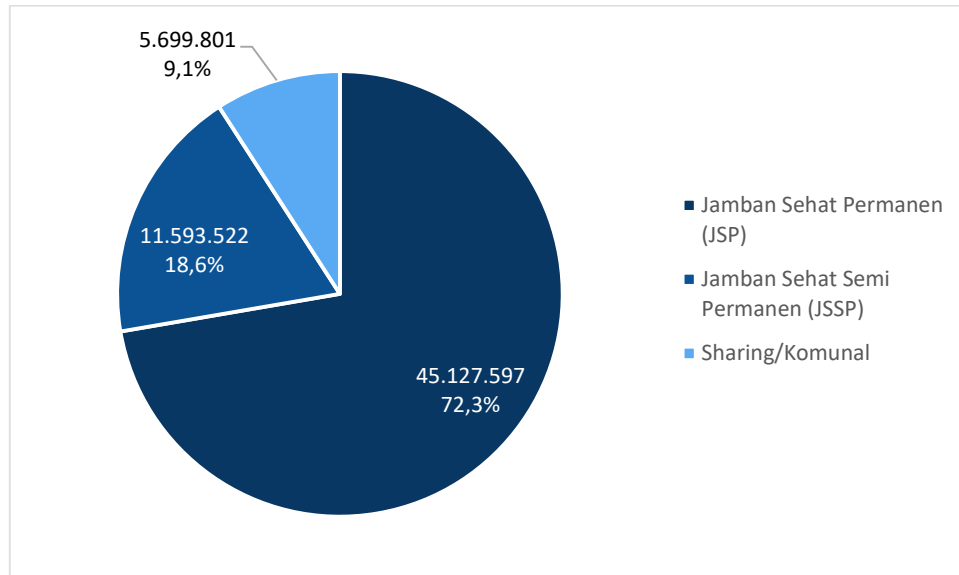
Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Definisi sanitasi dari WHO merujuk kepada penyediaan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia seperti *urine* dan *faeces*. Istilah sanitasi juga mengacu kepada pemeliharaan kondisi higienis melalui upaya pengelolaan sampah dan pengolahan limbah cair. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit.

Menurut Panduan 5 Pilar STBM untuk Masyarakat, jamban sehat adalah jamban yang memenuhi kriteria bangunan dan persyaratan kesehatan. Persyaratan kesehatan yang dimaksud adalah tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia dan dapat mencegah vektor pembawa untuk menyebarkan penyakit pada pemakai dan lingkungan sekitarnya.

Bangunan jamban disebut sehat apabila memenuhi kriteria bangunan jamban sehat yang terdiri dari:

- a. Bangunan atas jamban (dinding dan/atau atap)
Bangunan atas jamban berfungsi untuk melindungi pengguna dari gangguan cuaca dan gangguan lainnya.
- b. Bangunan tengah jamban
Lubang pembuangan kotoran berbentuk leher angsa. Pada daerah sulit air, lubang dapat dibuat tanpa konstruksi leher angsa tetapi harus diberi tutup. Lantai jamban terbuat dari bahan kedap air, tidak licin, dan memiliki saluran pembuangan air bekas ke sistem pembuangan air limbah (SPAL).
- c. Bangunan bawah
Bangunan bawah sebagai penampung, pengolah, dan pengurai kotoran/tinja. Bangunan bawah dapat berupa tangki septik dan cubluk. Cubluk hanya boleh digunakan di pedesaan dengan kepadatan penduduk rendah dan sulit air.

GAMBAR 7.3
PROPORSI PENGGUNAAN JENIS JAMBAN SEHAT DI INDONESIA TAHUN 2019

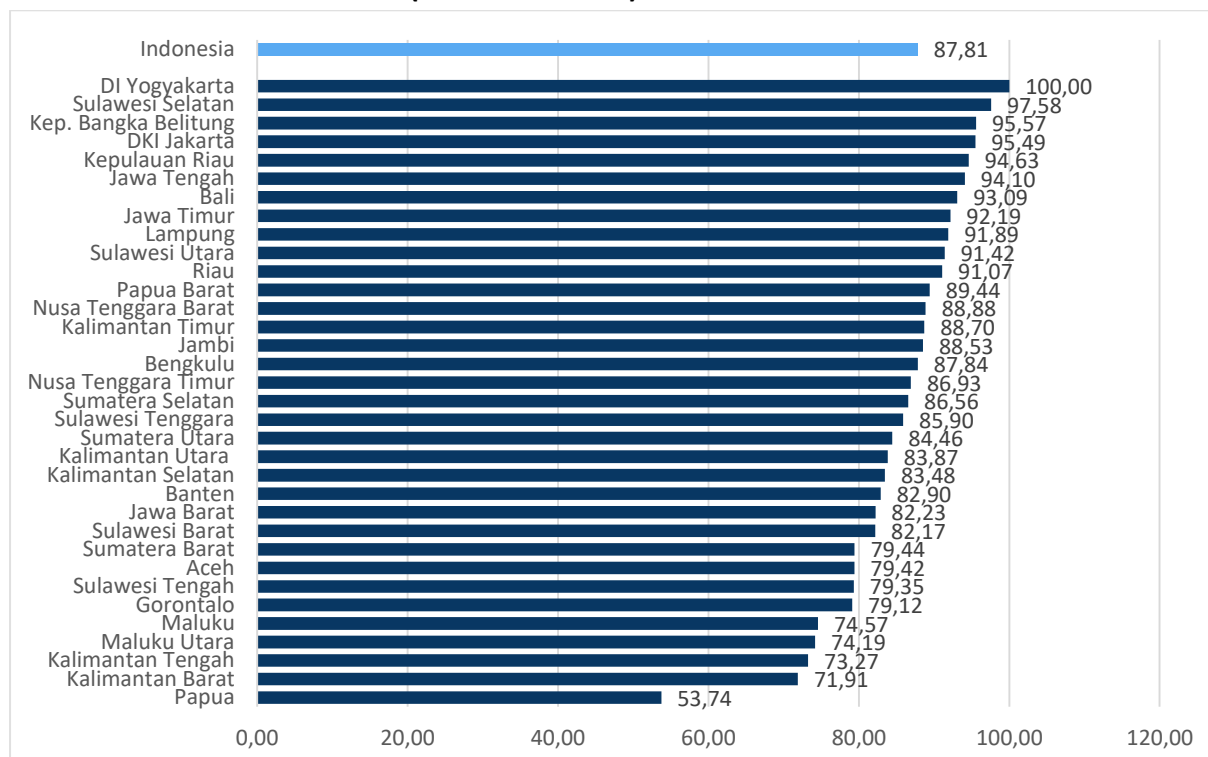


Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Sarana jamban sehat dapat diklasifikasi menjadi jamban *sharing*/komunal, jamban sehat semi permanen (JSSP), dan jamban sehat permanen. Jamban *sharing*/komunal merupakan jamban yang digunakan Bersama dalam masyarakat (pengguna lebih dari satu keluarga). Jamban sehat semi permanen belum menggunakan konstruksi leher angsa tetapi memiliki tutup dan terletak di dalam rumah. Jamban sehat permanen adalah jamban yang sudah menggunakan konstruksi leher angsa dan terletak di dalam rumah. Pada tahun 2019, 72,3% keluarga di Indonesia sudah menggunakan

jamban sehat permanen (Gambar 7.3). Sisanya 18,6% menggunakan jamban sehat semi permanen dan 9,1% menggunakan jamban *sharing*/komunal.

GAMBAR 7.4
PERSENTASE KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK
(JAMBAN SEHAT) TAHUN 2019



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Persentase keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) di Indonesia pada tahun 2019 adalah 87,81%. Provinsi dengan persentase tertinggi keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) adalah DI Yogyakarta (100%), Sulawesi Selatan (97,58%), dan Kepulauan Bangka Belitung (95,57%). Provinsi dengan persentase terendah adalah Papua (53,74%), Kalimantan Barat (71,81%), dan Kalimantan Tengah (73,27%). Rincian lengkap mengenai keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) dapat dilihat pada Lampiran 73.

C. SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menyatakan bahwa STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Sejak tahun 2006, pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya peningkatan akses sanitasi. Salah satu upaya Kementerian Kesehatan adalah melakukan perubahan arah kebijakan pendekatan sanitasi dari yang sebelumnya memberikan subsidi (*project driven*) menjadi

pemberdayaan masyarakat yang fokus pada perubahan perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan menggunakan metode *CLTS (Community Led Total Sanitation)*. Belajar dari pengalaman implementasi *CLTS* melalui berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah bersama NGO (*Non-Governmental Organization*), maka pendekatan *CLTS* selanjutnya dikembangkan dengan menambahkan 4 (empat) pilar perubahan perilaku lainnya yang dinamakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), selanjutnya Pemerintah menetapkan STBM menjadi kebijakan nasional pada tahun 2008, yang kemudian diperbarui dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2014 tentang STBM. Pendekatan ini telah berkontribusi pada percepatan perubahan perilaku masyarakat dan penyediaan layanan sanitasi yang memenuhi standar kesehatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, peningkatan rata-rata akses sanitasi dari tahun 1993-2006 mencapai 0,78% per tahun. Sejak penerapan *CLTS (Community Lead Total Sanitation)* pada tahun 2006 yang kemudian menjadi kebijakan nasional STBM pada tahun 2008 rata-rata peningkatan akses sanitasi per tahun mencapai 3,53%, dan berdasarkan penghitungan Pusat Data dan Informasi dari data BPS 2009-2017 rata-rata peningkatan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak adalah 2,23% per tahun. STBM diharapkan mampu untuk berkontribusi secara nyata dalam pencapaian akses universal sanitasi di Indonesia pada tahun 2019 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN 2015-2019).

Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM yang bertujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan. Pilar STBM terdiri atas perilaku:

- a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
- b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
- c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
- d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
- e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

Masyarakat yang didukung oleh pemerintah dan berbagai pihak seperti LSM, swasta, perguruan tinggi, media, dan organisasi sosial lainnya merupakan pelaku utama STBM. Dukungan yang diberikan meliputi pengembangan kapasitas, pengembangan pilihan teknologi, memfasilitasi pengembangan mekanisme jejaring pemasaran, pengembangan media, fasilitasi pemucuan, dan pertemuan-pertemuan pembelajaran antar pihak. Berbagai dukungan tersebut telah terbukti mampu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam membangun sarana sanitasi sesuai kemampuan. STBM digunakan sebagai sarana pemerintah dalam pencapaian akses sanitasi menuju *universal access* pada akhir tahun 2019.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014, strategi penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) meliputi 3 (tiga) komponen yang saling mendukung satu dengan yang lain, yang disebut dengan 3 Komponen Sanitasi Total adalah sebagai berikut.

1. Penciptaan lingkungan yang kondusif (*enabling environment*)

Tujuan: menciptakan lingkungan yang mendukung melalui sinergi lintas sektor dan lintas program, penguatan-penguatan melalui regulasi yang mendukung pelaksanaan STBM, dan membangun mekanisme pembelajaran antar daerah.

2. Peningkatan kebutuhan sanitasi (*demand creation*)

Tujuan: meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap sarana sanitasi yang dilakukan melalui kegiatan pemucuan, monitoring, dan penggunaan media komunikasi perubahan perilaku.

3. Peningkatan penyediaan akses sanitasi (*supply improvement*)

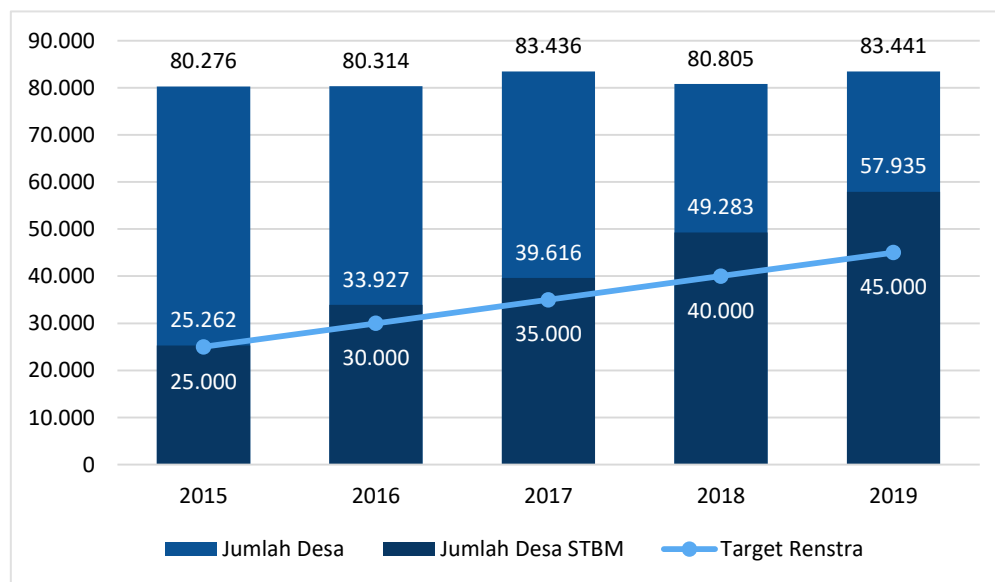
Tujuan: meningkatkan penyediaan sarana sanitasi dengan pilihan yang bervariasi dan terjangkau masyarakat secara luas.

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah jumlah kumulatif desa/kelurahan yang terverifikasi melaksanakan STBM. Akumulasi jumlah desa/kelurahan yang terverifikasi sebagai desa/kelurahan melaksanakan STBM adalah desa/kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Telah dilakukan pemucuan STBM (upaya untuk menuju perubahan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode partisipatori berprinsip pada pendekatan *CLTS (Community-Led Total Sanitation)*).
2. Telah memiliki *natural leader* (anggota masyarakat baik individu maupun kelompok masyarakat yang memotori gerakan STBM di masyarakat tersebut).
3. Telah memiliki Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

Data dari Profil Nasional STBM per tanggal 8 Mei 2020 yang diakses melalui situs <http://monev.stbm.kemkes.go.id/>, memperlihatkan hasil bahwa dari 10.134 puskesmas per Desember 2019, 8.653 (85,39%) puskesmas sudah menjalankan program STBM, dan memiliki sumber daya manusia kesehatan khususnya sanitarian sebanyak 8.647 orang dan 2.070 orang (23,93%) diantaranya adalah sanitarian terlatih, dengan 77% fasilitator aktif.

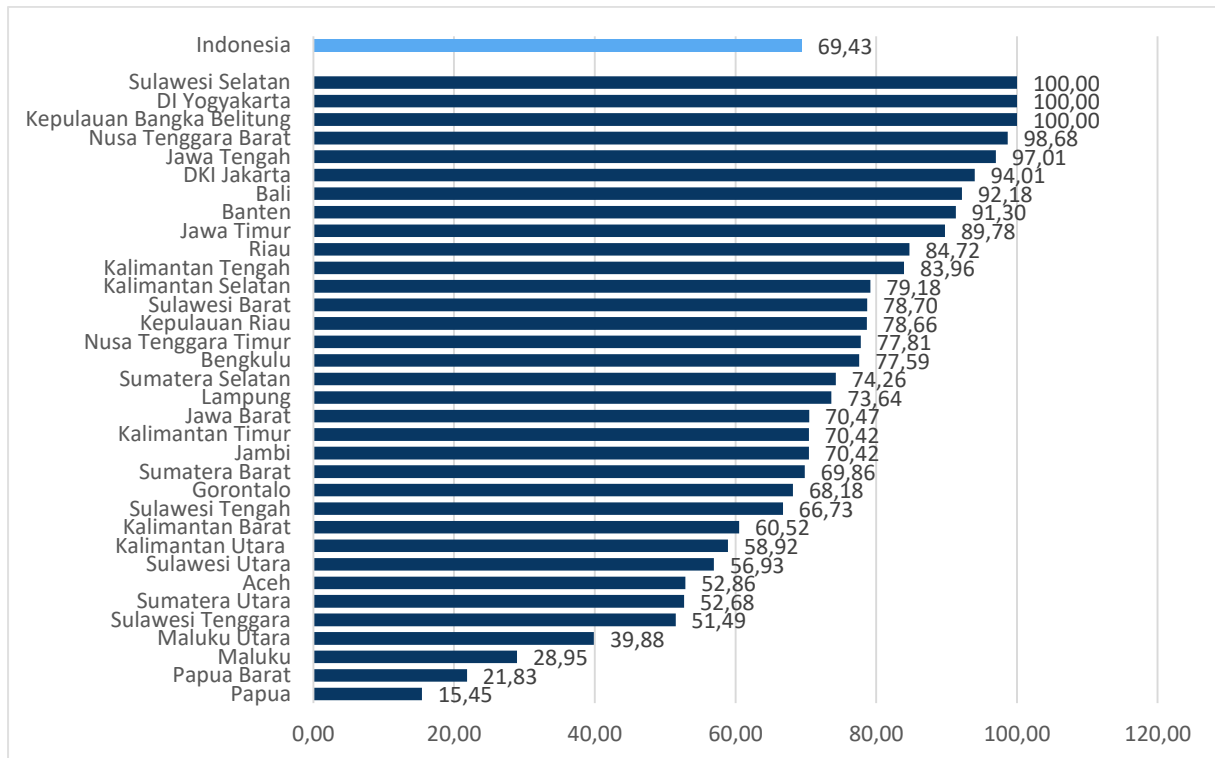
GAMBAR 7.5
CAPAIAN DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2015-2019



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Pada tahun 2019, jumlah desa/kelurahan yang telah melaksanakan STBM sudah mencapai 57.935 dari total 83.441 desa/kelurahan di Indonesia. Hasil ini telah memenuhi target Renstra pada tahun 2019 yaitu sebanyak 45.000 desa/kelurahan yang melaksanakan STBM. Tren capaian total desa/kelurahan yang melaksanakan STBM periode dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 selalu melebihi target Renstra yang ditetapkan setiap tahunnya (Gambar 7.5).

GAMBAR 7.6
PERSENTASE DESA MELAKSANAKAN STBM MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

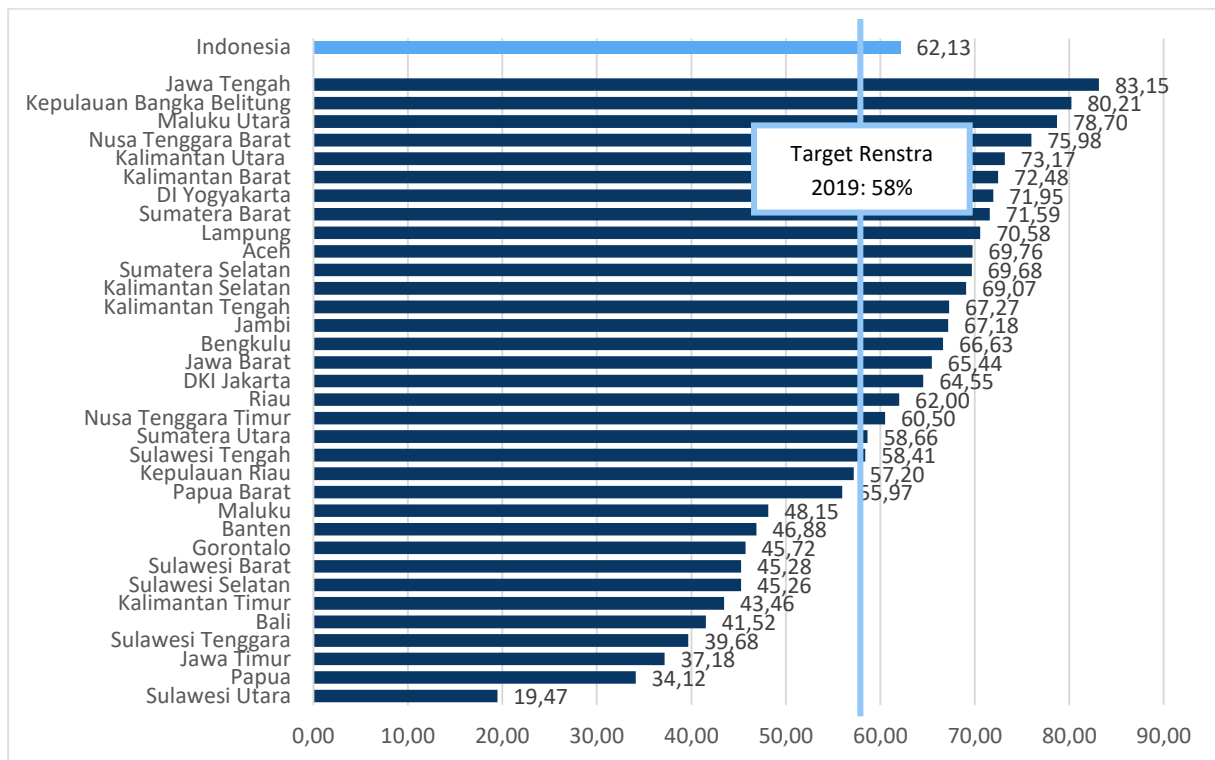
Secara nasional persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM tahun 2019 adalah 69,43%, meningkat dari capaian tahun 2018 yaitu 60,99% (Gambar 7.6). Ada tiga provinsi yang telah mencapai 100% desa/kelurahan yang telah melaksanakan STBM yaitu Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, dan Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan provinsi dengan persentase terendah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM adalah Papua (15,45%), Papua Barat (21,83%) dan Maluku (28,95%). Lima provinsi dengan realisasi desa/kelurahan yang melaksanakan STBM tertinggi yaitu Jawa Tengah (8.306 desa/kelurahan), Jawa Timur (7.632 desa/kelurahan), Jawa Barat (4.198 desa/kelurahan). Rincian lengkap mengenai desa yang melaksanakan STBM tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 74.

D. TEMPAT-TEMPAT UMUM (TTU) YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN

Tempat-Tempat Umum (TTU) adalah tempat atau sarana umum yang digunakan untuk kegiatan masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah/swasta atau perorangan, antara lain pasar rakyat, sekolah, fasyankes, terminal, bandara, stasiun, pelabuhan, bioskop, hotel dan tempat umum lainnya. TTU yang memenuhi syarat kesehatan adalah tempat dan fasilitas umum minimal sarana pendidikan dan pasar rakyat yang memenuhi syarat kesehatan. TTU dinyatakan sehat apabila memenuhi persyaratan fisiologis, psikologis, dan dapat mencegah penularan penyakit antar pengguna, penghuni, dan masyarakat sekitarnya serta memenuhi persyaratan dalam pencegahan terjadinya masalah kesehatan. Pemerintah Daerah minimal wajib mengelola 2 tempat-tempat umum, yaitu:

1. Sarana pendidikan dasar yang dimaksud adalah Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) dan yang sederajat milik pemerintah dan swasta yang terintegrasi.
2. Pasar rakyat yang dimaksud adalah pasar yang berlokasi permanen, ada pengelola, adanya proses tawar menawar di pasar, sebagian besar barang yang diperjual belikan yaitu kebutuhan dasar sehari-hari dengan fasilitas infrastruktur sederhana, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

GAMBAR 7.7
PERSENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN
TAHUN 2019



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kesmenkes RI, 2020

Secara nasional persentase TTU yang telah memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2019 adalah 62,13%. Angka ini telah mencapai target Renstra tahun 2019 yaitu 58%. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Jawa Tengah (83,15%), Kepulauan Bangka Belitung (80,21%), dan Maluku Utara (78,70%). Provinsi dengan capaian terendah diantaranya Sulawesi Utara (19,47%), Papua (34,12%), dan Jawa Timur (37,18%). Pada provinsi Maluku data TTU yang dilaporkan hanya data pasar. Rincian lengkap tentang persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 75.

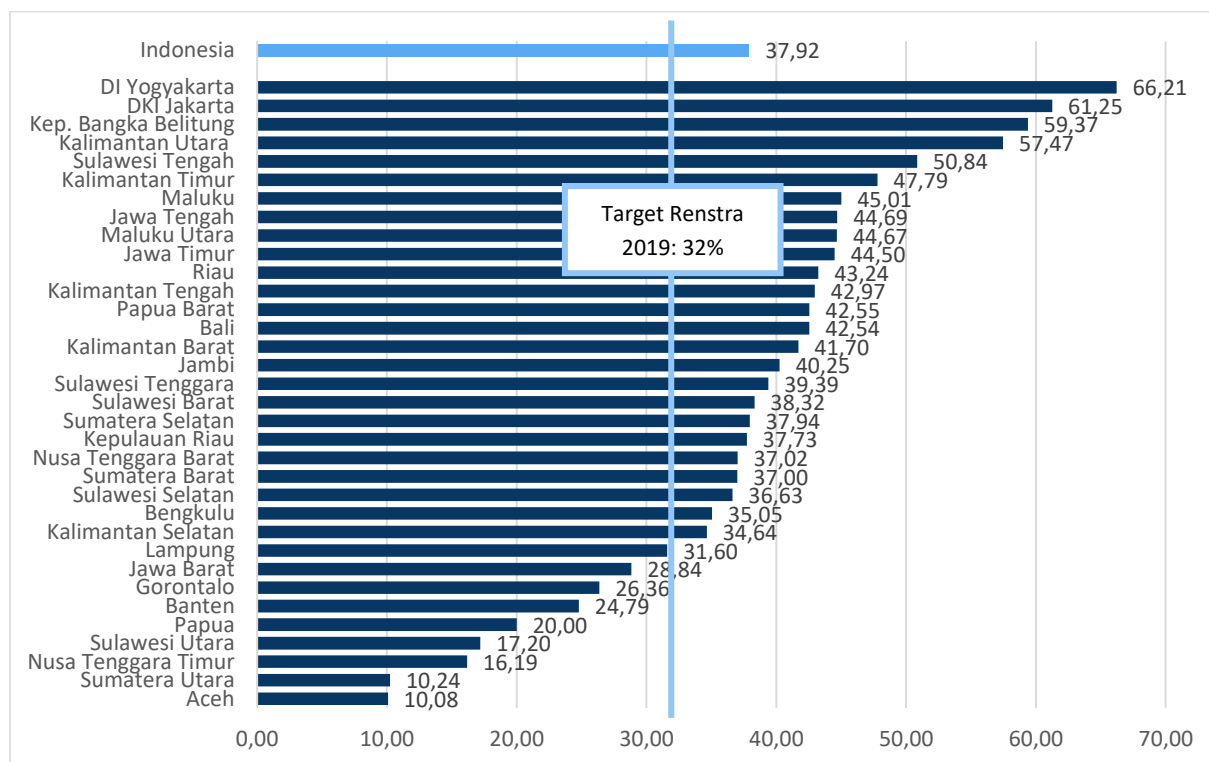
E. TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM)

Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memiliki potensi yang cukup besar untuk menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit bahkan keracunan akibat dari makanan yang dihasilkannya. TPM adalah usaha pengelolaan makanan yang meliputi jasaboga atau catering, rumah makan dan restoran, depot air minum, kantin, dan makanan jajanan. Berdasarkan Kepmenkes Nomor 1098 Tahun 2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran. Persyaratan higiene sanitasi yang harus dipenuhi meliputi:

1. persyaratan lokasi dan bangunan,
2. persyaratan fasilitas sanitasi,
3. persyaratan dapur, rumah makan, dan gudang makanan,
4. persyaratan bahan makanan dan makanan jadi,
5. persyaratan pengolahan makanan,
6. persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi,
7. persyaratan penyajian makanan jadi,
8. persyaratan peralatan yang digunakan.

TPM yang dilakukan penilaian untuk memenuhi syarat kesehatan adalah TPM siap saji di antaranya Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, Depot Air Minum, dan Makanan Jajanan/Kantin/Sentra Makanan Jajanan yang dibuktikan dengan sertifikat layak higiene sanitasi.

GAMBAR 7.8
PERSENTASE TEMPAT PENGOLAHAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN
TAHUN 2019



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan secara nasional pada tahun 2019 adalah 37,92%. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 26,41 pada tahun 2018. Capaian ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2018 untuk TPM yang memenuhi syarat kesehatan yaitu sebesar 32%.

Provinsi dengan persentase tertinggi TPM yang memenuhi syarat kesehatan adalah DI Yogyakarta (66,21%), DKI Jakarta (61,25%), dan Kepulauan Bangka Belitung (59,37%). Sedangkan provinsi dengan persentase terendah TPM yang memenuhi syarat kesehatan adalah Aceh (10,08%), Sumatera Utara (10,24%), dan NTT (16,19). Rincian lengkap tentang persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 76.a.

F. TATANAN KAWASAN SEHAT

Pengertian Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat, melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat, kelompok usaha, dan pemerintah daerah. Tatanan Kawasan Sehat merupakan salah satu indikator pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan dalam Renstra 2015-2019. Mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, Kabupaten/Kota Sehat (KKS) adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.

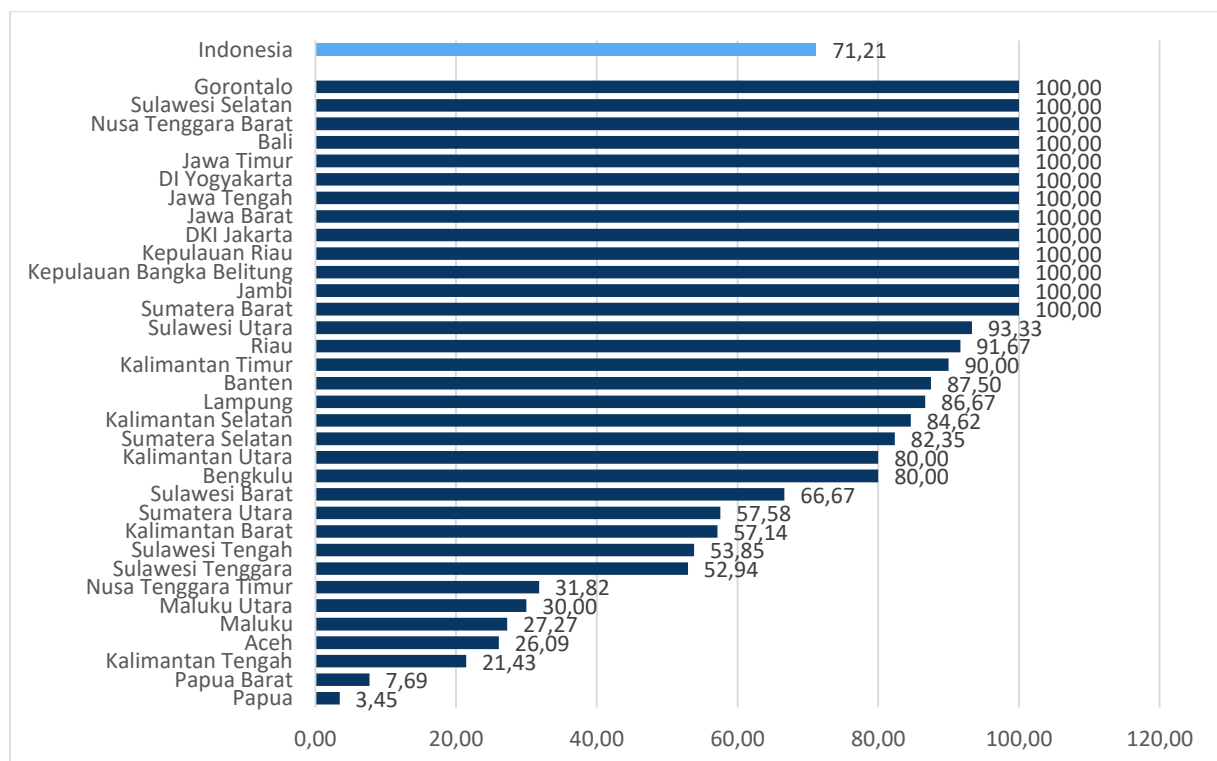
Berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus, Tatanan Kabupaten/kota Sehat dikelompokkan menjadi:

1. kawasan permukiman, sarana, dan prasarana umum,
2. kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi,
3. kawasan pertambangan sehat,
4. kawasan hutan sehat,
5. kawasan industri dan perkantoran sehat,
6. kawasan pariwisata sehat,
7. ketahanan pangan dan gizi,
8. kehidupan masyarakat yang mandiri,
9. kehidupan sosial yang sehat.

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Sehat. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dilaksanakan melalui forum dan atau memfungsikan lembaga masyarakat yang ada. Forum di kabupaten/kota disebut forum Kabupaten/Kota Sehat atau sebutan lainnya, tingkat kecamatan disebut forum komunikasi Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan tingkat desa/kelurahan disebut kelompok kerja atau sebutan lain. Kabupaten/Kota Sehat diselenggarakan dengan membentuk Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah. Tim pembina diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggota dari instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Kabupaten/kota sehat yang memenuhi kriteria akan diberikan Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat (Swasti Saba) dalam periode dua tahun sekali. Seleksi penghargaan ini dilakukan oleh Gubernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pembina Provinsi. Penilaian Kabupaten/kota sehat dapat dievaluasi oleh Tim Pembina pusat, sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan Kabupaten/kota sehat. Penghargaan ini terdiri dari 3 kategori, yaitu penghargaan Padapa diberikan kepada kabupaten/kota untuk taraf pematapan, Wiwerda untuk taraf pembinaan, dan Wistara untuk taraf pengembangan.

GAMBAR 7.9
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN
TATANAN KAWASAN SEHAT
TAHUN 2019



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat pada tahun 2019 sebanyak 366 kabupaten/kota (71,21%) (Gambar 7.9). Jumlah ini belum memenuhi target Renstra tahun 2016 yaitu 386 kabupaten/kota atau 75,1%. Ada 13 (tiga belas) provinsi yang mencapai 100% dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat yaitu Gorontalo, Sulawesi Selatan, NTB, Bali, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, dan Sumatera Barat. Provinsi dengan persentase penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat yang masih rendah adalah Papua (3,45%) dan Papua Barat (7,69%) Rincian lengkap mengenai kabupaten/kota yang menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 76.b.

Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan KKS diantaranya (1) indikator perlu di update mengikuti perkembangan dalam pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat, (2) masih sulitnya koordinasi Lintas Sektor Kementerian/Lembaga terkait dalam merespon kerja sama dengan

Kemenkes untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Sehat, (3) kurangnya sosialisasi dan komitmen pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan akibat seringnya mutasi kepegawaian di daerah, (4) kurang optimalnya fungsi tim pembina, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, serta (5) masih kurangnya advokasi kegiatan Kab Kota Sehat di provinsi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mengembangkan jejaring dengan lintas sektor dan lintas program yang terkait dengan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.

G. PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

Definisi limbah medis adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan medis dalam bentuk padat, cair, dan gas. Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat tinggi. Limbah cair adalah semua buangan air termasuk tinja yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radiaktif yang berbahaya bagi kesehatan. Limbah gas adalah semua limbah yang berbentuk gas yang berasal dari kegiatan pembakaran seperti insinerator, dapur, perlengkapan generator, anestesi, dan pembuatan obat sitotoksik.

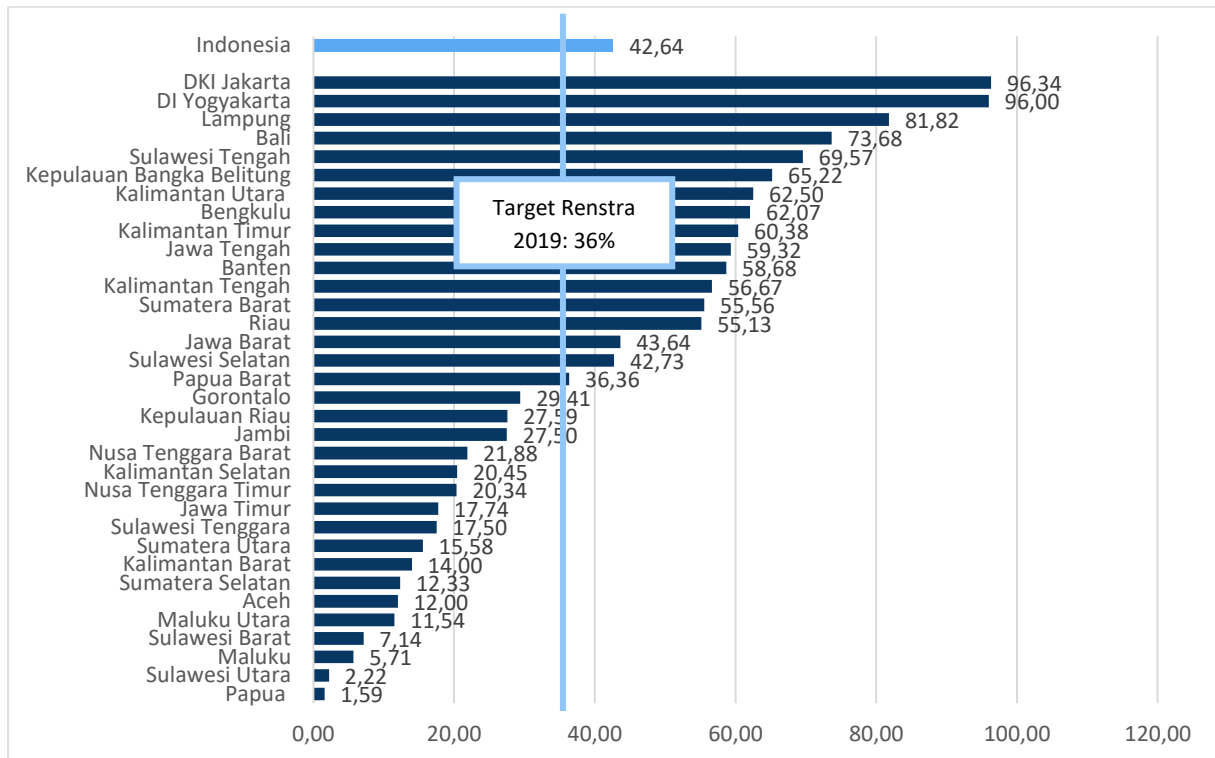
Pengelolaan limbah medis berbeda dengan limbah domestik atau limbah rumah tangga. Penempatan limbah medis dilakukan pada wadah yang sesuai dengan karakteristik bahan kimia, radioaktif, dan volumenya. Limbah medis yang telah terkumpul tidak diperbolehkan untuk langsung dibuang ke tempat pembuangan limbah domestik tetapi harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Untuk limbah medis yang berbentuk gas dilengkapi alat pereduksi emisi gas dan debu pada proses pembuangannya. Selain itu perlu dilakukan pula upaya minimalisasi limbah yaitu dengan mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dengan cara mengurangi bahan (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*). Penghijauan juga baik dilakukan untuk mengurangi polusi dari limbah yang berbentuk gas dan untuk menyerap debu.

Tata laksana pengelolaan limbah medis sesuai standar tertuang dalam pedoman pelaksanaan penyehatan lingkungan rumah sakit yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204 Tahun 2004 mengenai Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yang diantaranya terdiri dari beberapa upaya disesuaikan dengan jenis limbah, upaya tersebut diantaranya:

1. upaya minimisasi limbah;
2. pemilahan, pewadahan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang;
3. tempat penampungan sementara;
4. transportasi (pengangkutan);
5. pengolahan, pemusnahan, dan pembuangan akhir limbah cair dan limbah padat.

Indikator yang mendukung pengamanan limbah medis adalah persentase rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar. Rumah sakit melakukan pengelolaan limbah medis jika melakukan pemilahan dan pengolahan limbah medis sesuai standar.

GAMBAR 7.10
PERSENTASE RUMAH SAKIT YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS
SESUAI STANDAR TAHUN 2019



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020;
 Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Secara nasional persentase rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah sesuai standar pada tahun 2019 adalah 42,64% (Gambar 7.10). Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 33,63% dan sudah memenuhi target Renstra tahun 2019 yaitu 36%. Provinsi dengan presentase tertinggi adalah DKI Jakarta (96,34%), DI Yogyakarta (96%), dan Lampung (81,82%). Provinsi dengan persentase terendah adalah Papua (1,59%), Sulawesi Utara (2,22%), dan Maluku (5,71%). Rincian lengkap mengenai persentase rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 76.d.

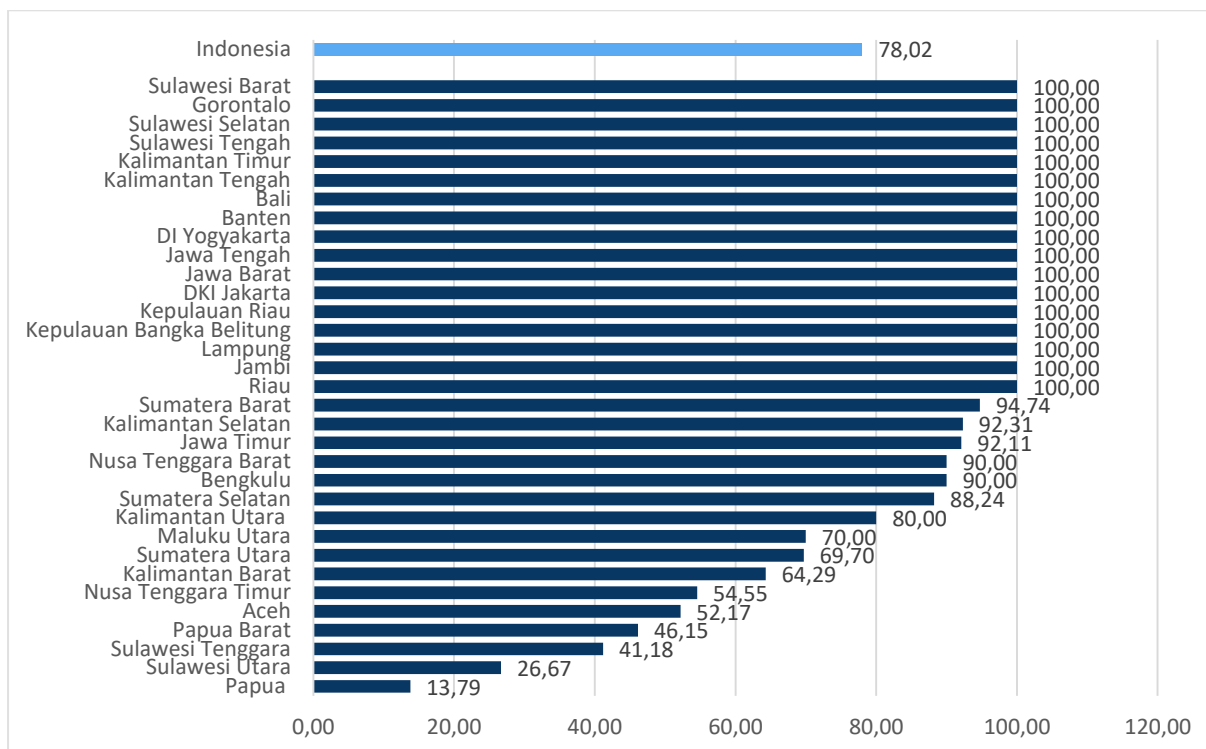
H. PEMENUHAN KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN

Pengertian kesehatan lingkungan yang adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Indikator kualitas kesehatan lingkungan menjadi indikator utama di Direktorat Kesehatan Lingkungan pada tahun 2016, indikator kualitas kesehatan lingkungan merupakan komposit dari 6 indikator pelaksana kesehatan lingkungan lainnya. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan pada kabupaten/kota tercapai dengan terpenuhinya minimal 4 dari 6 kriteria yang meliputi:

1. memiliki desa/kelurahan melaksanakan STBM minimal 20%;
2. menyelenggarakan tatanan kabupaten/kota sehat;
3. melakukan pengawasan kualitas air minum minimal 30%;
4. Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan minimal 8 %;

5. Tempat Tempat Umum (TTU) memenuhi syarat kesehatan minimal 30%;
6. rumah sakit melaksanakan pengelolaan limbah medis minimal 10%.

GAMBAR 7.11
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN
TAHUN 2019



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan di Indonesia pada tahun 2019 adalah 78,02% (Gambar 7.11). Angka ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2019 yaitu 40%. Ada 17 (tujuh belas) provinsi yang sudah mencapai 100% kabupaten/kota yang telah memenuhi kualitas kesehatan lingkungan. Masih ada satu provinsi yang belum masuk penilaian dalam pemenuhan kualitas kesehatan lingkungan yaitu Maluku karena provinsi tersebut belum memenuhi standar minimal 4 dari 6 kriteria kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan. Rincian lengkap mengenai jumlah kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan dilihat di lampiran 76.c.

I. KEBIJAKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)

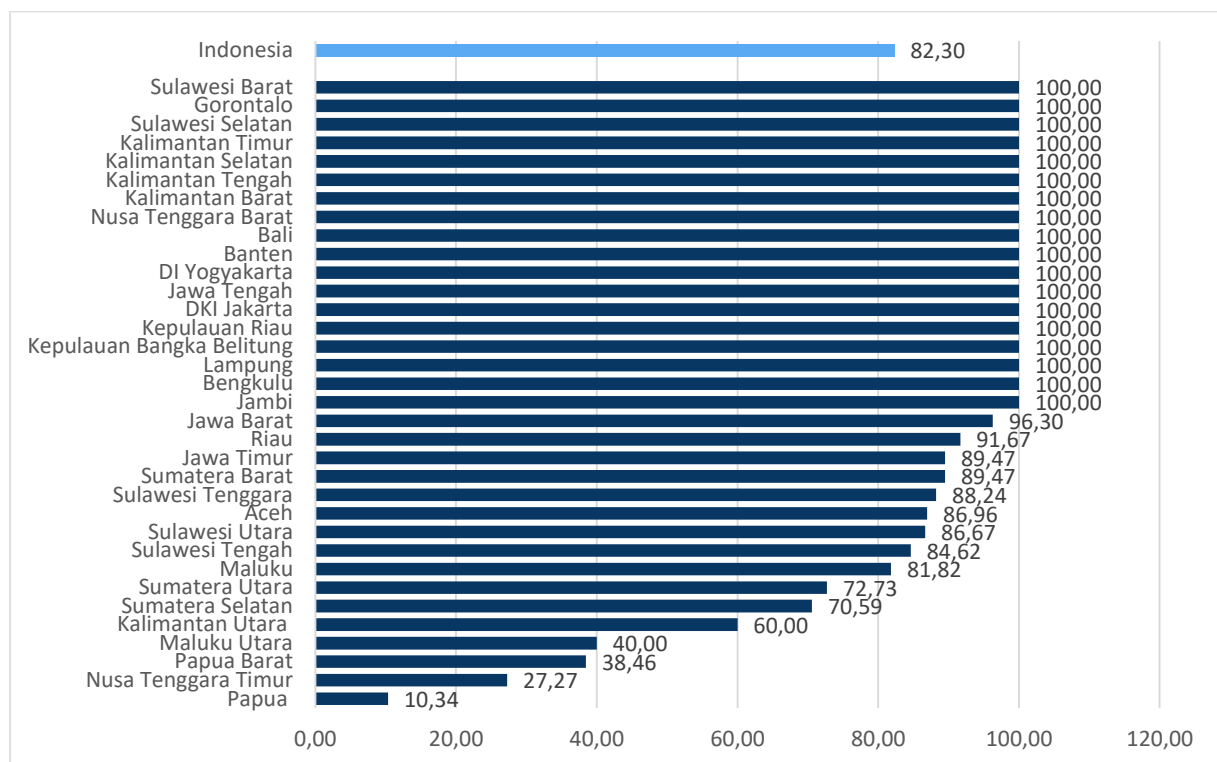
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran individu untuk mencegah permasalahan kesehatan. PHBS dipraktikkan atas kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.

Kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitarnya masih rendah. Berdasarkan Riskesdas Tahun 2013 persentase rumah tangga di Indonesia yang memenuhi kriteria Perilaku Hidup Bersih dan Sehat baru mencapai 32,3%. Dalam rangka mendorong

peningkatan penerapan perilaku hidup sehat oleh masyarakat, diperlukan dukungan regulasi melalui kebijakan yang mendukung PHBS di daerah.

Kebijakan PHBS menjadi komponen penting suatu daerah sebagai indikator suatu keberhasilan daerah untuk menurunkan kejadian penyakit yang disebabkan oleh perilaku yang tidak sehat. Kebijakan yang mendukung kesehatan/PHBS/perilaku sehat adalah kebijakan mendukung kesehatan/PHBS/perilaku sehat dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, Instruksi Bupati/Walikota, Surat Keputusan Bupati/Walikota, Surat Edaran/Himbauan Bupati/Walikota.

GAMBAR 7.12
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI KEBIJAKAN PHBS
TAHUN 2019



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS secara nasional pada tahun 2019 adalah 82,30% (Gambar 7.12), dimana angka ini sudah melampaui target Renstra 2019 sebesar 80% . Sebanyak 18 Provinsi sudah mencapai 100%. Provinsi dengan persentase terendah adalah Papua 10,34%, Nusa Tenggara Timur 27,27%, dan Papua Barat 38,46%. Rincian lengkap mengenai kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS dapat dilihat pada lampiran 76.e.

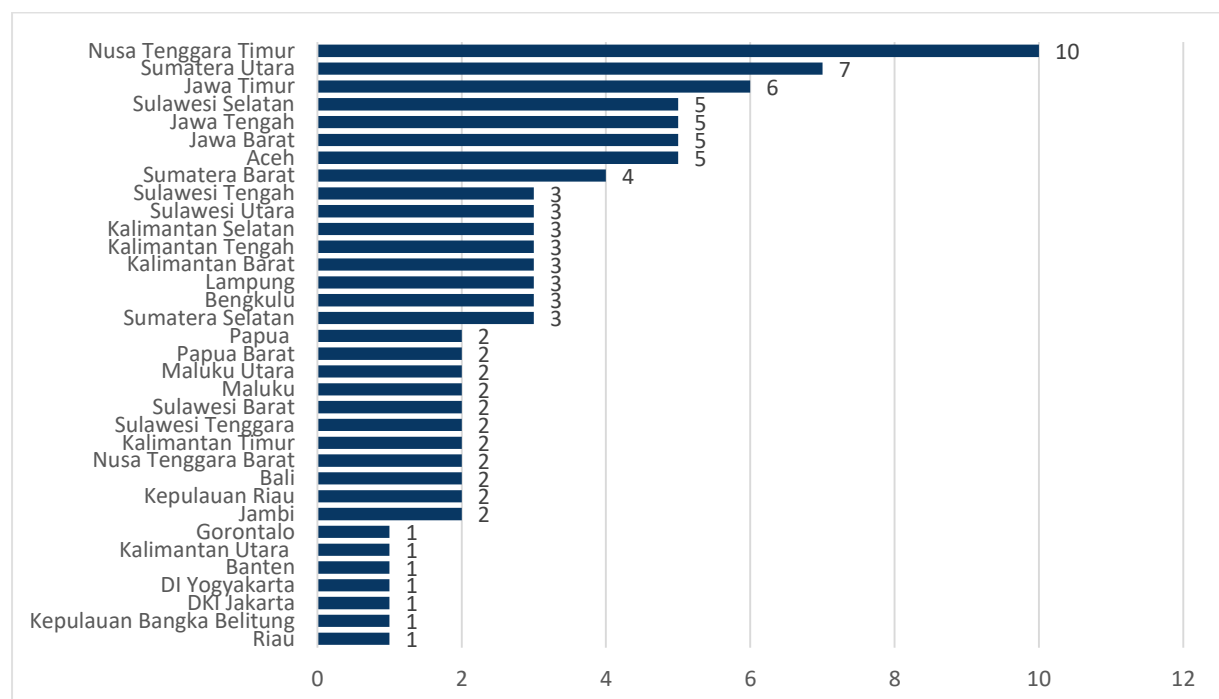
J. GERAKAN MASYARAKAT SEHAT

Pemerintah saat ini melakukan suatu gebrakan inovasi dengan mengeluarkan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang melibatkan pemangku kepentingan, swasta, akademisi, LSM dan sektor-sektor lainnya agar dapat berperan dalam pembangunan kesehatan dengan menekankan pada upaya promotif dan preventif. Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bertujuan antara lain 1) Menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan; 2) Menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk; 3) Menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit dan pengeluaran kesehatan serta; 4) Penguatan sistem kesehatan; pendekatan siklus hidup; Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan berfokus pada pemerataan layanan.

Inpres No. 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat merupakan bukti dukungan pemerintah untuk mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Dalam inpres ini terlihat peran dari setiap sektor untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan menggerakkan seluruh elemen dari sektor pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat lainnya. Salah satu ukuran kinerja dalam Inpres No. 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

GAMBAR 7.13
JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN MINIMAL 5 TEMA KAMPANYE
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
TAHUN 2019



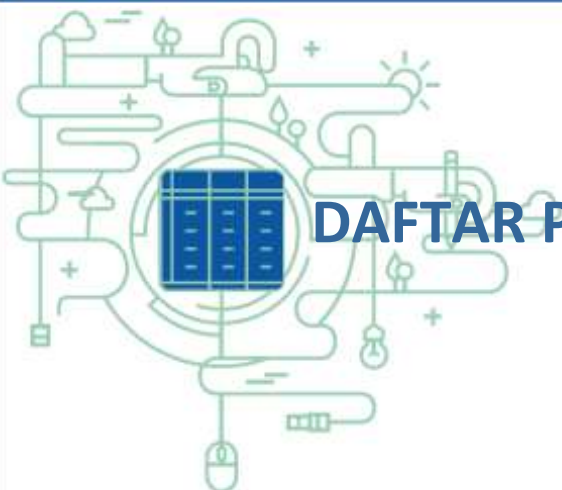
Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Pada tahun 2019, jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kampanye minimal 5 tema Germas adalah 100 kabupaten/kota. Provinsi dengan jumlah kabupaten/kota yang paling banyak melaksanakan kampanye minimal 5 tema Germas adalah Nusa Tenggara Timur yaitu 10 dari 22 kabupaten/kota. Sebanyak tujuh provinsi hanya melaksanakan kampanye minimal 5 Tema Germas di 1 Kabupaten/Kota, yaitu provinsi Gorontalo, Kalimantan Utara, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, dan Riau. Rincian lengkap mengenai jumlah kabupaten/kota dengan pelaksanaan minimal 5 tema kampanye Germas dapat dilihat pada Lampiran 76.f.



DAFTAR PUSTAKA

+



DAFTAR PUSTAKA

- Adioutomo, Sari Martiningsih dan Ghazy Mujahid. 2014. *Indonesia on The Threshold of Population Ageing*. UNFPA Indonesia.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2019. *Profil Keluarga Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: BKKBN.
- Badan Narkotika Nasional. 2017. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Badan Narkotika Nasional. 2017. *Indonesia: Narkoba dalam Angka Tahun 2017*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta: UNPF.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Statistik Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Februari 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian Kesehatan. 2018. *Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2017*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Kementerian Dalam Negeri. 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2003. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2004. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2007. *Pedoman Surveilans Acute Flaccid Paralysis (AFP)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan RI. 2010. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2010. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2011. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2012. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33/MENKES/PER/2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2012. *Petunjuk Teknis Surveilans Campak*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan bagi Bangsa Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Geriatri di Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/117/2015 tentang Data Penduduk Sasaran program Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019*. Jakarta: kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.03.03/V/0595/2016 tentang Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Rencana Aksi Kesehatan Olah Raga Tahun 2016-2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI, 2016. *Roadmap STBM 2015-2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 422 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019: Revisi I Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2016*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Pedoman Surveilans dan Penanggulangan Difteri*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Riset Kesehatan Dasar 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan. 2019. *Profil Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Tahun 2018*. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 507 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355 Tahun 2012*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2016. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 144*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2012. *Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan Nomor 355 Tahun 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 298*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 184*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2017. *Instruksi Presiden Republik I Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat*. Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- World Health Organization. 2008. *WHO-Recommended Standards for Surveillance of Selected Vaccine-Preventable Diseases*.

- World Health Organization. 2019. *Global Tuberculosis Report 2019*.
- World Health Organization . *Weekly Epidemiological Record*, 31 Agustus 2018.
- World Health Organization. 2018. *Best Practices in Active Surveillance for Polio Eradication*.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta : Kementerian Keuangan.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta :Kementerian Dalam Negeri.

* * *



LAMPIRAN

+

Lampiran 1

**LUAS WILAYAH, JUMLAH KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, KELURAHAN/DESA, JUMLAH PENDUDUK,
DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019**

No	Provinsi	Luas Wilayah	Jumlah						Jumlah Penduduk				Kepadatan Penduduk
			Kabupaten	Kota	Kabupaten + Kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa	L	P	L+P	Rasio Jenis Kelamin	
		(km ²)											per km ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)
1	Aceh	57.956,00	18	5	23	289		6.497	2.683.828	2.687.704	5.371.532	100	92,68
2	Sumatera Utara	72.981,23	25	8	33	450	693	5.417	7.266.207	7.296.342	14.562.549	100	199,54
3	Sumatera Barat	42.012,89	12	7	19	179	230	928	2.711.772	2.729.425	5.441.197	99	129,51
4	Riau	87.023,66	10	2	12	169	268	1.591	3.574.942	3.396.803	6.971.745	105	80,11
5	Jambi	50.058,16	9	2	11	141	163	1.399	1.848.854	1.775.725	3.624.579	104	72,41
6	Sumatera Selatan	91.592,43	13	4	17	241	387	2.853	4.303.327	4.167.356	8.470.683	103	92,48
7	Bengkulu	19.919,33	9	1	10	129	172	1.341	1.014.918	976.920	1.991.838	104	100,00
8	Lampung	34.623,80	13	2	15	228	205	2.435	4.324.285	4.123.452	8.447.737	105	243,99
9	Kep. Bangka Belitung	16.424,06	6	1	7	47	82	309	774.523	714.269	1.488.792	108	90,65
10	Kepulauan Riau	8.201,72	5	2	7	75	142	275	1.115.765	1.073.888	2.189.653	104	266,97
11	DKI Jakarta	664,01	1	5	6	44	267		5.285.321	5.272.489	10.557.810	100	15.900,08
12	Jawa Barat	35.377,76	18	9	27	627	645	5.312	24.962.701	24.354.011	49.316.712	102	1.394,00
13	Jawa Tengah	32.800,69	29	6	35	576	753	7.809	17.212.455	17.505.749	34.718.204	98	1.058,46
14	DI Yogyakarta	3.133,15	4	1	5	78	46	392	1.901.735	1.941.197	3.842.932	98	1.226,54
15	Jawa Timur	47.803,49	29	9	38	666	777	7.724	19.600.776	20.097.855	39.698.631	98	830,45
16	Banten	9.662,92	4	4	8	155	313	1.238	6.583.895	6.343.421	12.927.316	104	1.337,83
17	B a l i	5.780,06	8	1	9	57	80	636	2.184.114	2.152.809	4.336.923	101	750,32
18	Nusa Tenggara Barat	18.572,32	8	2	10	117	145	995	2.461.652	2.608.733	5.070.385	94	273,01
19	Nusa Tenggara Timur	48.718,10	21	1	22	309	327	3.026	2.702.264	2.753.939	5.456.203	98	112,00
20	Kalimantan Barat	147.307,00	12	2	14	174	99	2.031	2.578.128	2.490.999	5.069.127	103	34,41
21	Kalimantan Tengah	153.564,50	13	1	14	136	139	1.432	1.420.291	1.294.568	2.714.859	110	17,68
22	Kalimantan Selatan	38.744,23	11	2	13	153	144	1.864	2.153.738	2.090.358	4.244.096	103	109,54
23	Kalimantan Timur	129.066,64	7	3	10	103	197	841	1.950.883	1.770.506	3.721.389	110	28,83
24	Kalimantan Utara	75.467,70	4	1	5	53	35	447	393.395	348.850	742.245	113	9,84
25	Sulawesi Utara	13.892,47	11	4	15	171	332	1.507	1.278.820	1.228.161	2.506.981	104	180,46
26	Sulawesi Tengah	61.841,29	12	1	13	175	175	1.842	1.558.233	1.495.790	3.054.023	104	49,38
27	Sulawesi Selatan	46.717,48	21	3	24	311	792	2.255	4.326.409	4.524.831	8.851.240	96	189,46
28	Sulawesi Tenggara	38.067,70	15	2	17	219	377	1.911	1.360.713	1.344.024	2.704.737	101	71,05
29	Gorontalo	11.257,07	5	1	6	77	72	657	602.436	600.195	1.202.631	100	106,83
30	Sulawesi Barat	16.787,18	6	0	6	69	73	575	692.833	687.423	1.380.256	101	82,22
31	Maluku	46.914,03	9	2	11	118	35	1.198	908.736	894.134	1.802.870	102	38,43
32	Maluku Utara	31.982,50	8	2	10	116	118	1.063	640.192	615.579	1.255.771	104	39,26
33	Papua Barat	102.955,15	12	1	13	218	95	1.742	504.788	454.829	959.617	111	9,32
34	Papua	319.036,05	28	1	29	560	110	5.411	1.774.690	1.604.612	3.379.302	111	10,59
Indonesia		1.916.906,77	416	98	514	7.230	8.488	74.953	134.657.619	133.416.946	268.074.565	101	139,85

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2019 (Permendagri 72 Tahun 2019)
Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2019

Lampiran 2.a

JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2019

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk			
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	0 - 4	12.044.847	11.560.076	23.604.923	104,19
2	5 - 9	12.234.173	11.739.659	23.973.832	104,21
3	10 - 14	11.824.770	11.232.358	23.057.128	105,27
4	15 - 19	11.406.234	10.887.986	22.294.220	104,76
5	20 - 24	11.167.600	10.749.969	21.917.569	103,88
6	25 - 29	10.690.862	10.537.134	21.227.996	101,46
7	30 - 34	10.320.421	10.261.794	20.582.215	100,57
8	35 - 39	10.058.224	10.207.552	20.265.776	98,54
9	40 - 44	9.679.101	9.687.550	19.366.651	99,91
10	45 - 49	8.876.555	8.817.782	17.694.337	100,67
11	50 - 54	7.699.188	7.738.956	15.438.144	99,49
12	55 - 59	6.314.794	6.434.991	12.749.785	98,13
13	60 - 64	4.895.102	4.923.127	9.818.229	99,43
14	65 - 69	3.337.531	3.394.296	6.731.827	98,33
15	70 - 74	2.027.559	2.357.325	4.384.884	86,01
16	75+	2.080.658	2.886.391	4.967.049	72,09
Indonesia		134.657.619	133.416.946	268.074.565	100,93
Angka Beban Tanggungan (Dependency Ratio)				47,82	

Sumber : Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2019

Lampiran 2.b

ESTIMASI JUMLAH LAHIR HIDUP, JUMLAH BAYI (0 TAHUN), JUMLAH BATITA (0-2 TAHUN), JUMLAH ANAK BALITA (1 - 4 TAHUN), DAN JUMLAH BALITA (0 - 4 TAHUN)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Bayi (0 tahun)			Jumlah Batita (0-2 tahun)			Jumlah Anak Balita (1 - 4 tahun)			Jumlah Balita (0 - 4 tahun)		
			Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Aceh	115.422	58.069	55.712	113.781	174.000	167.189	341.189	231.454	222.676	454.130	289.523	278.388	567.911
2	Sumatera Utara	302.555	150.945	145.118	296.063	455.201	438.516	893.717	613.589	592.193	1.205.782	764.534	737.311	1.501.845
3	Sumatera Barat	109.431	54.723	52.524	107.247	164.021	157.727	321.748	218.969	210.926	429.895	273.692	263.450	537.142
4	Riau	154.878	77.345	74.136	151.481	229.883	220.611	450.494	302.140	290.299	592.439	379.485	364.435	743.920
5	Jambi	65.762	32.751	31.368	64.119	98.126	94.090	192.216	130.748	125.503	256.251	163.499	156.871	320.370
6	Sumatera Selatan	159.908	79.758	76.597	156.355	240.542	231.418	471.960	323.555	311.797	635.352	403.313	388.394	791.707
7	Bengkulu	37.103	18.435	17.705	36.140	55.405	53.309	108.714	74.186	71.502	145.688	92.621	89.207	181.828
8	Lampung	150.245	75.130	72.125	147.255	228.100	219.315	447.415	310.061	298.571	608.632	385.191	370.696	755.887
9	Kep. Bangka Belitung	27.429	13.727	13.162	26.889	41.140	39.503	80.643	54.775	52.669	107.444	68.502	65.831	134.333
10	Kep. Riau	41.058	20.977	20.169	41.146	64.388	62.030	126.418	88.585	85.513	174.098	109.562	105.682	215.244
11	DKI Jakarta	166.696	86.115	82.628	168.743	265.214	254.776	519.990	367.042	353.059	720.101	453.157	435.687	888.844
12	Jawa Barat	873.575	441.241	421.775	863.016	1.325.175	1.267.661	2.592.836	1.769.616	1.694.179	3.463.795	2.210.857	2.115.954	4.326.811
13	Jawa Tengah	527.433	266.555	253.393	519.948	803.216	762.565	1.565.781	1.081.200	1.025.504	2.106.704	1.347.755	1.278.897	2.626.652
14	DI Yogyakarta	54.127	27.828	26.597	54.425	84.403	80.716	165.119	114.131	109.223	223.354	141.959	135.820	277.779
15	Jawa Timur	566.300	285.035	273.222	558.257	857.908	823.406	1.681.314	1.152.198	1.107.203	2.259.401	1.437.233	1.380.425	2.817.658
16	Banten	240.174	120.893	116.122	237.015	366.373	352.538	718.911	496.082	478.149	974.231	616.975	594.271	1.211.246
17	Bali	64.541	32.537	31.195	63.732	98.094	94.170	192.264	131.907	126.806	258.713	164.444	158.001	322.445
18	Nusa Tenggara Barat	103.315	50.736	48.708	99.444	151.413	145.776	297.189	201.528	194.467	395.995	252.264	243.175	495.439
19	Nusa Tenggara Timur	139.136	67.936	65.294	133.230	199.732	192.488	392.220	260.143	251.274	511.417	328.079	316.568	644.647
20	Kalimantan Barat	100.232	49.908	47.843	97.751	150.026	144.023	294.049	200.773	192.989	393.762	250.681	240.832	491.513
21	Kalimantan Tengah	53.804	26.372	25.413	51.785	78.354	75.679	154.033	103.221	99.896	203.117	129.593	125.309	254.902
22	Kalimantan Selatan	80.440	39.822	38.228	78.050	120.126	115.560	235.686	162.068	156.203	318.271	201.890	194.431	396.321
23	Kalimantan Timur	74.937	36.108	34.513	70.621	107.842	103.136	210.978	142.659	136.523	279.182	178.767	171.036	349.803
24	Kalimantan Utara	12.139	7.823	7.455	15.278	23.365	22.278	45.643	30.909	29.489	60.398	38.732	36.944	75.676
25	Sulawesi Utara	40.802	20.512	19.652	40.164	61.930	59.409	121.339	83.506	80.204	163.710	104.018	99.856	203.874
26	Sulawesi Tengah	62.707	30.913	29.634	60.547	92.001	88.374	180.375	121.639	117.042	238.681	152.552	146.676	299.228
27	Sulawesi Selatan	168.185	83.855	80.354	164.209	251.799	241.636	493.435	336.836	323.670	660.506	420.691	404.024	824.715
28	Sulawesi Tenggara	62.566	31.035	29.691	60.726	92.467	88.570	181.037	122.244	117.212	239.456	153.279	146.903	300.182
29	Gorontalo	23.856	11.761	11.264	23.025	34.899	33.494	68.393	45.977	44.198	90.175	57.738	55.462	113.200
30	Sulawesi Barat	32.851	15.921	15.311	31.232	46.883	45.246	92.129	61.201	59.231	120.432	77.122	74.542	151.664
31	Maluku	44.630	21.681	20.837	42.518	63.917	61.615	125.532	83.584	80.761	164.345	105.265	101.598	206.863
32	Maluku Utara	29.195	14.367	13.789	28.156	42.744	41.116	83.860	56.561	54.506	111.067	70.928	68.295	139.223
33	Papua Barat	21.850	10.618	10.244	20.862	31.223	30.220	61.443	40.566	39.370	79.936	51.184	49.614	100.798
34	Papua	71.339	34.673	33.620	68.293	102.776	100.004	202.780	135.089	131.871	266.960	169.762	165.491	335.253
Indonesia		4.778.621	2.396.105	2.295.398	4.691.503	7.202.686	6.908.164	14.110.850	9.648.742	9.264.678	18.913.420	12.044.847	11.560.076	23.604.923

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2019

Lampiran 2.c

ESTIMASI JUMLAH ANAK PRA SEKOLAH, JUMLAH ANAK USIA KELAS 1 SD/SETINGKAT, DAN JUMLAH ANAK USIA SD/SETINGKAT
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Anak Prasekolah (5 - 6 tahun)			Jumlah Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat (7 Tahun)			Jumlah Anak Usia SD/Setingkat (7 - 12 Tahun)		
		Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	114.846	110.645	225.491	57.052	55.003	112.055	334.745	321.103	655.848
2	Sumatera Utara	314.365	304.081	618.446	158.842	153.793	312.635	934.119	896.379	1.830.498
3	Sumatera Barat	110.202	106.386	216.588	55.329	53.466	108.795	327.272	314.938	642.210
4	Riau	146.829	141.307	288.136	72.387	69.719	142.106	415.317	395.116	810.433
5	Jambi	65.587	63.047	128.634	32.867	31.621	64.488	195.205	188.889	384.094
6	Sumatera Selatan	164.179	158.536	322.715	82.371	79.610	161.981	485.099	462.085	947.184
7	Bengkulu	37.394	36.105	73.499	18.715	18.072	36.787	111.384	105.760	217.144
8	Lampung	161.171	155.547	316.718	81.978	79.222	161.200	482.702	459.857	942.559
9	Kep. Bangka Belitung	27.183	26.193	53.376	13.489	13.001	26.490	79.699	76.143	155.842
10	Kep. Riau	45.870	44.414	90.284	22.774	22.081	44.855	132.012	126.198	258.210
11	DKI Jakarta	193.547	186.634	380.181	97.238	93.926	191.164	535.667	512.395	1.048.062
12	Jawa Barat	888.340	851.790	1.740.130	445.322	427.426	872.748	2.619.920	2.488.473	5.108.393
13	Jawa Tengah	555.622	526.728	1.082.350	282.865	268.153	551.018	1.711.770	1.619.003	3.330.773
14	DI Yogyakarta	57.825	55.406	113.231	28.831	27.641	56.472	169.270	160.990	330.260
15	Jawa Timur	589.048	567.011	1.156.059	298.827	287.905	586.732	1.837.318	1.757.905	3.595.223
16	Banten	254.220	245.603	499.823	127.681	123.511	251.192	735.742	701.454	1.437.196
17	Bali	66.860	64.410	131.270	33.566	32.370	65.936	210.834	199.419	410.253
18	Nusa Tenggara Barat	101.541	98.232	199.773	51.013	49.414	100.427	304.049	291.402	595.451
19	Nusa Tenggara Timur	125.732	121.729	247.461	62.106	60.191	122.297	365.608	359.937	725.545
20	Kalimantan Barat	101.186	97.452	198.638	50.699	48.884	99.583	294.408	281.373	575.781
21	Kalimantan Tengah	50.573	49.038	99.611	25.004	24.268	49.272	146.958	139.945	286.903
22	Kalimantan Selatan	83.323	80.504	163.827	42.179	40.803	82.982	245.117	234.257	479.374
23	Kalimantan Timur	69.942	66.910	136.852	34.675	33.199	67.874	200.217	188.693	388.910
24	Kalimantan Utara	15.420	14.842	30.262	7.645	7.364	15.009	43.887	41.770	85.657
25	Sulawesi Utara	42.860	41.228	84.088	21.702	20.883	42.585	127.390	121.960	249.350
26	Sulawesi Tengah	60.398	58.246	118.644	30.207	29.168	59.375	173.144	164.855	337.999
27	Sulawesi Selatan	169.667	163.332	332.999	84.972	81.880	166.852	500.027	480.173	980.200
28	Sulawesi Tenggara	60.123	57.723	117.846	29.772	28.606	58.378	181.034	171.873	352.907
29	Gorontalo	22.525	21.678	44.203	11.136	10.724	21.860	66.068	62.962	129.030
30	Sulawesi Barat	29.494	28.622	58.116	14.463	14.053	28.516	84.593	80.589	165.182
31	Maluku	40.558	39.276	79.834	19.993	19.383	39.376	116.071	109.974	226.045
32	Maluku Utara	28.006	27.037	55.043	13.935	13.465	27.400	82.188	78.885	161.073
33	Papua Barat	19.455	18.937	38.392	9.558	9.319	18.877	56.458	53.609	110.067
34	Papua	66.088	64.745	130.833	32.680	32.059	64.739	195.914	189.480	385.394
Indonesia		4.879.979	4.693.374	9.573.353	2.451.873	2.360.183	4.812.056	14.501.206	13.837.844	28.339.050

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2019

Lampiran 2.d

ESTIMASI JUMLAH WANITA USIA SUBUR (15 - 49 TAHUN), WUS IMUNISASI (15 - 39 TAHUN),
IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Wanita Usia Subur (15 - 49 tahun)	Jumlah WUS Imunisasi (15 - 39 tahun)	Jumlah Ibu Hamil	Jumlah Ibu Bersalin/ Nifas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	1.454.182	1.125.723	126.964	121.193
2	Sumatera Utara	3.746.948	2.852.184	332.810	317.683
3	Sumatera Barat	1.383.316	1.045.079	120.374	114.903
4	Riau	1.898.448	1.450.292	170.366	162.622
5	Jambi	997.305	748.993	72.338	69.050
6	Sumatera Selatan	2.260.064	1.707.341	175.899	167.903
7	Bengkulu	544.306	409.871	40.813	38.958
8	Lampung	2.193.253	1.614.766	165.269	157.757
9	Kepulauan Bangka Belitung	396.958	299.728	30.172	28.800
10	Kepulauan Riau	632.423	473.130	45.164	43.111
11	DKI Jakarta	3.006.188	2.224.310	183.366	175.031
12	Jawa Barat	13.230.172	9.810.433	960.932	917.254
13	Jawa Tengah	8.831.527	6.361.650	580.176	553.805
14	DI Yogyakarta	987.725	719.279	59.540	56.833
15	Jawa Timur	10.387.785	7.390.956	622.930	594.615
16	Banten	3.603.869	2.697.183	264.191	252.183
17	Bali	1.142.170	814.105	70.995	67.768
18	Nusa Tenggara Barat	1.407.862	1.056.371	113.646	108.481
19	Nusa Tenggara Timur	1.369.982	1.058.227	153.050	146.093
20	Kalimantan Barat	1.353.424	1.030.839	110.255	105.244
21	Kalimantan Tengah	743.771	557.536	59.184	56.494
22	Kalimantan Selatan	1.132.620	831.874	88.484	84.462
23	Kalimantan Timur	1.008.458	754.457	82.431	78.684
24	Kalimantan Utara	189.577	145.420	13.353	12.746
25	Sulawesi Utara	636.742	465.472	44.882	42.842
26	Sulawesi Tengah	808.401	601.589	68.978	65.842
27	Sulawesi Selatan	2.387.210	1.787.313	185.004	176.594
28	Sulawesi Tenggara	707.129	544.053	68.823	65.694
29	Gorontalo	330.151	248.745	26.242	25.049
30	Sulawesi Barat	374.433	283.739	36.136	34.494
31	Maluku	466.964	364.521	49.093	46.861
32	Maluku Utara	328.873	253.166	32.115	30.655
33	Papua Barat	259.359	201.928	24.035	22.942
34	Papua	948.172	714.162	78.473	74.906
Indonesia		71.149.767	52.644.435	5.256.483	5.017.552

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2019

Lampiran 3.a

PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN IJAZAH TERTINGGI YANG DIMILIKI
TAHUN 2019

No	Variabel	Persentase		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas (Pembagi Adalah Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas)	49,94	50,06	100,00
	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas (Pembagi Adalah Jumlah Penduduk Total)	73,04	74,00	73,52
2	Persentase Penduduk Usia 5+ Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan:			
	Tidak pernah sekolah	5,33	7,47	6,40
	Tidak punya ijazah SD	22,11	23,77	22,94
	Paket A	0,09	0,10	0,10
	SDLB	0,02	0,01	0,02
	SD	22,63	23,14	22,89
	MI	0,62	0,74	0,68
	Paket B	0,14	0,10	0,12
	SMPLB	0,02	0,02	0,02
	SMP	16,71	16,24	16,48
	MTS	1,23	1,55	1,39
	Paket C	0,34	0,17	0,25
	SMLB	0,01	0,01	0,01
	SMA	16,58	13,84	15,21
	MA	1,11	1,14	1,13
	SMK	5,81	3,94	4,88
	MAK	0,03	0,03	0,03
	D1/D2	0,34	0,44	0,39
	D3	1,11	1,63	1,37
	D4	0,15	0,21	0,18
	S1	5,12	5,11	5,12
	Profesi	0,04	0,05	0,05
	S2	0,43	0,26	0,34
	S3	0,04	0,01	0,03
3	Persentase Penduduk Usia 15+ Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan:			
	Tidak pernah sekolah	2,51	5,40	3,96
	Tidak punya ijazah SD	11,30	14,01	12,66
	Paket A	0,11	0,12	0,12
	SDLB	0,02	0,01	0,02
	SD	24,13	24,49	24,31
	MI	0,63	0,75	0,69
	Paket B	0,18	0,12	0,15
	SMPLB	0,03	0,03	0,03
	SMP	20,80	20,01	20,40
	MTS	1,53	1,92	1,72
	Paket C	0,42	0,21	0,31
	SMLB	0,01	0,01	0,01
	SMA	20,67	17,09	18,88
	MA	1,38	1,41	1,40
	SMK	7,24	4,87	6,06
	MAK	0,04	0,04	0,04
	D1/D2	0,42	0,54	0,48
	D3	1,38	2,01	1,69
	D4	0,19	0,26	0,22
	S1	6,38	6,31	6,35
	Profesi	0,05	0,07	0,06
	S2	0,53	0,32	0,43
	S3	0,05	0,02	0,03

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 (Susenas KOR, 2019)

Lampiran 3.b

ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDUDUK USIA MUDA, USIA PRODUKTIF, DAN USIA NON PRODUKTIF
MENURUT DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Penduduk Usia Muda (<15 Tahun)			Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun)			Jumlah Penduduk Usia Non Produktif (65+ Tahun)			Angka Beban Ketergantungan (ABK)
		Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	841.661	807.943	1.649.604	1.739.634	1.754.146	3.493.780	102.533	125.615	228.148	53,75
2	Sumatera Utara	2.306.873	2.216.932	4.523.805	4.660.104	4.704.423	9.364.527	299.230	374.987	674.217	55,51
3	Sumatera Barat	816.102	785.073	1.601.175	1.750.792	1.763.418	3.514.210	144.878	180.934	325.812	54,83
4	Riau	1.071.624	1.024.039	2.095.663	2.390.329	2.257.489	4.647.818	112.989	115.275	228.264	50,00
5	Jambi	489.703	472.608	962.311	1.278.510	1.220.163	2.498.673	80.641	82.954	163.595	45,06
6	Sumatera Selatan	1.208.163	1.156.315	2.364.478	2.902.486	2.797.834	5.700.320	192.678	213.207	405.885	48,60
7	Bengkulu	277.891	265.512	543.403	694.170	666.917	1.361.087	42.857	44.491	87.348	46,34
8	Lampung	1.180.435	1.129.390	2.309.825	2.915.877	2.761.651	5.677.528	227.973	232.411	460.384	48,79
9	Kep. Bangka Belitung	201.370	192.857	394.227	540.004	486.457	1.026.461	33.149	34.955	68.104	45,04
10	Kep. Riau	328.846	315.451	644.297	758.116	728.254	1.486.370	28.803	30.183	58.986	47,32
11	DKI Jakarta	1.335.857	1.278.934	2.614.791	3.720.553	3.738.847	7.459.400	228.911	254.708	483.619	41,54
12	Jawa Barat	6.568.963	6.261.786	12.830.749	17.038.018	16.586.850	33.624.868	1.355.720	1.505.375	2.861.095	46,67
13	Jawa Tengah	4.184.539	3.966.466	8.151.005	11.637.275	11.878.835	23.516.110	1.390.641	1.660.448	3.051.089	47,64
14	DI Yogyakarta	424.080	404.216	828.296	1.314.784	1.331.254	2.646.038	162.871	205.727	368.598	45,23
15	Jawa Timur	4.484.410	4.298.309	8.782.719	13.637.793	13.991.990	27.629.783	1.478.573	1.807.556	3.286.129	43,68
16	Banten	1.828.961	1.751.842	3.580.803	4.529.669	4.349.613	8.879.282	225.265	241.966	467.231	45,59
17	Bali	515.116	490.444	1.005.560	1.524.391	1.491.828	3.016.219	144.607	170.537	315.144	43,79
18	Nusa Tenggara Barat	754.035	724.567	1.478.602	1.584.729	1.740.381	3.325.110	122.888	143.785	266.673	52,49
19	Nusa Tenggara Timur	941.827	914.550	1.856.377	1.633.440	1.691.518	3.324.958	126.997	147.871	274.868	64,10
20	Kalimantan Barat	739.600	708.597	1.448.197	1.720.867	1.659.389	3.380.256	117.661	123.013	240.674	49,96
21	Kalimantan Tengah	375.430	359.843	735.273	998.023	889.415	1.887.438	46.838	45.310	92.148	43,84
22	Kalimantan Selatan	606.035	580.742	1.186.777	1.461.761	1.407.318	2.869.079	85.942	102.298	188.240	47,93
23	Kalimantan Timur	512.830	486.395	999.225	1.367.416	1.220.210	2.587.626	70.637	63.901	134.538	43,81
24	Kalimantan Utara	111.962	106.755	218.717	266.141	229.544	495.685	15.292	12.551	27.843	49,74
25	Sulawesi Utara	317.349	303.562	620.911	881.296	832.452	1.713.748	80.175	92.147	172.322	46,29
26	Sulawesi Tengah	440.554	420.935	861.489	1.042.662	996.278	2.038.940	75.017	78.577	153.594	49,78
27	Sulawesi Selatan	1.253.792	1.203.224	2.457.016	2.836.853	3.003.654	5.840.507	235.764	317.953	553.717	51,55
28	Sulawesi Tenggara	450.526	429.506	880.032	855.344	851.131	1.706.475	54.843	63.387	118.230	58,50
29	Gorontalo	167.993	160.648	328.641	407.566	407.040	814.606	26.877	32.507	59.384	47,63
30	Sulawesi Barat	217.995	209.015	427.010	448.310	447.145	895.455	26.528	31.263	57.791	54,14
31	Maluku	299.069	285.885	584.954	572.332	566.519	1.138.851	37.335	41.730	79.065	58,31
32	Maluku Utara	207.552	199.522	407.074	409.337	392.529	801.866	23.303	23.528	46.831	56,61
33	Papua Barat	145.631	139.599	285.230	346.088	304.188	650.276	13.069	11.042	24.111	47,57
34	Papua	497.016	480.631	977.647	1.243.411	1.098.161	2.341.572	34.263	25.820	60.083	44,32
Indonesia		36.103.790	34.532.093	70.635.883	91.108.081	90.246.841	181.354.922	7.445.748	8.638.012	16.083.760	47,82

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2019

Lampiran 3.c

JUMLAH PENDUDUK MISKIN, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, DAN GARIS KEMISKINAN
TAHUN 2001 - 2019

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (dalam Juta Orang)			Persentase Penduduk Miskin			Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
		Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2001	8,60	29,27	37,87	9,79	24,84	18,41	100.011,00	80.382,00
2	2002	13,32	25,08	38,39	14,46	21,10	18,20	130.499,00	96.512,00
3	2003	12,26	25,08	37,34	13,57	20,23	17,42	138.803,00	105.888,00
4	2004	11,37	24,78	36,15	12,13	20,11	16,66	143.455,00	108.725,00
5	2005	12,40	22,70	35,10	11,68	19,98	15,97	165.565,00	117.365,00
6	2006	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75	174.290,00	130.584,00
7	2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58	187.942,00	146.837,00
8	2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42	204.895,99	161.830,79
9	2009	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15	222.123,10	179.834,57
10	2010	11,10	19,93	31,02	9,87	16,56	13,33	232.989,00	192.353,83
11	Maret 2011	11,05	18,97	30,02	9,23	15,72	12,49	253.015,51	213.394,51
12	September 2011	10,95	18,94	29,89	9,09	15,59	12,36	263.593,84	223.180,69
13	Maret 2012	10,65	18,49	29,13	8,78	15,12	11,96	267.407,53	229.225,78
14	September 2012	10,51	18,09	28,59	8,60	14,70	11,66	277.381,99	240.441,35
15	Maret 2013	10,33	17,74	28,07	8,39	14,32	11,37	289.042,00	253.273,00
16	September 2013	10,63	17,92	28,55	8,52	14,42	11,47	308.626,00	275.779,00
17	Maret 2014	10,51	17,77	28,28	8,34	14,17	11,25	318.514,00	286.097,00
18	September 2014	10,36	17,37	27,73	8,16	13,76	10,96	326.853,00	296.681,00
19	Maret 2015	10,65	17,94	28,59	8,29	14,21	11,22	342.541,00	317.881,00
20	September 2015	10,62	17,89	28,51	8,22	14,09	11,13	356.378,00	333.034,00
21	Maret 2016	10,34	17,67	28,01	7,79	14,11	10,86	364.527,00	343.647,00
22	September 2016	10,49	17,28	27,76	7,73	13,96	10,70	372.114,00	350.420,00
23	Maret 2017	10,67	17,10	27,77	7,72	13,93	10,64	385.621,00	361.496,00
24	September 2017	10,27	16,31	26,58	7,26	13,47	10,12	400.995,00	370.910,00
25	Maret 2018	10,14	15,80	25,95	7,02	13,20	9,82	415.614,00	383.908,00
26	September 2018	10,13	15,54	25,67	6,89	13,10	9,66	425.770,00	392.154,00
27	Maret 2019	9,99	15,15	25,14	6,69	12,85	9,41	442.063,00	404.398,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Lampiran 3.d

**GARIS KEMISKINAN, JUMLAH, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI DAN TIPE DAERAH
TAHUN 2019**

No	Provinsi	Semester I (Maret)								
		Perkotaan			Perdesaan			Total		
		Garis Kemiskinan (Rp/kapita/ bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/ bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/ bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	501.617	168,11	9,68	479.569	651,33	18,03	486.935	819,44	15,32
2	Sumatera Utara	483.667	675,74	8,56	445.815	606,30	9,14	466.122	1.282,04	8,83
3	Sumatera Barat	526.008	121,35	4,76	483.939	226,87	7,88	503.652	348,22	6,42
4	Riau	513.739	175,93	6,28	491.391	314,79	7,62	500.612	490,72	7,08
5	Jambi	511.654	115,08	9,81	418.821	159,24	6,53	448.509	274,32	7,60
6	Sumatera Selatan	446.706	384,53	12,19	389.786	689,22	13,02	410.532	1.073,74	12,71
7	Bengkulu	538.508	96,52	14,70	481.918	205,78	15,49	499.660	302,30	15,23
8	Lampung	463.654	231,86	8,92	398.937	831,80	14,27	418.309	1.063,66	12,62
9	Kep. Bangka Belitung	671.054	23,31	2,85	685.433	45,07	6,79	677.716	68,38	4,62
10	Kep. Riau	597.894	104,21	5,33	556.248	24,25	11,04	594.059	128,46	5,90
11	DKI Jakarta	637.260	365,55	3,47	-	-	-	637.260	365,55	3,47
12	Jawa Barat	388.979	2.268,75	6,03	376.860	1130,41	9,79	386.198	3.399,16	6,91
13	Jawa Tengah	372.882	1.633,96	9,20	365.607	2109,26	12,48	369.385	3.743,23	10,80
14	DI Yogyakarta	452.628	304,66	10,89	378.873	143,81	13,89	432.026	448,47	11,70
15	Jawa Timur	411.731	1.449,27	6,84	382.327	2662,98	14,43	397.687	4.112,25	10,37
16	Banten	484.618	378,73	4,12	412.007	275,73	7,49	462.726	654,46	5,09
17	Bali	408.795	97,98	3,29	383.118	65,87	4,88	400.624	163,85	3,79
18	Nusa Tenggara Barat	396.696	384,65	15,74	374.123	351,31	13,45	384.880	735,96	14,56
19	Nusa Tenggara Timur	441.625	114,12	8,84	353.684	1032,20	24,91	373.922	1.146,32	21,09
20	Kalimantan Barat	456.525	81,64	4,60	429.220	296,77	9,05	438.555	378,41	7,49
21	Kalimantan Tengah	418.029	48,56	4,47	449.184	86,04	5,33	438.248	134,59	4,98
22	Kalimantan Selatan	470.293	70,52	3,53	443.928	121,97	5,47	457.222	192,48	4,55
23	Kalimantan Timur	614.221	107,67	4,31	597.451	112,25	9,31	609.155	219,92	5,94
24	Kalimantan Utara	679.660	22,88	5,10	609.733	25,90	9,02	651.416	48,78	6,63
25	Sulawesi Utara	369.608	65,49	5,01	372.194	126,20	10,56	371.283	191,70	7,66
26	Sulawesi Tengah	457.193	84,74	9,32	433.870	325,62	15,26	441.036	410,36	13,48
27	Sulawesi Selatan	338.997	170,10	4,44	322.223	597,69	11,95	329.880	767,80	8,69
28	Sulawesi Tenggara	336.877	71,82	6,81	321.197	230,76	14,09	327.402	302,58	11,24
29	Gorontalo	339.000	21,27	4,21	328.597	164,76	23,79	333.070	186,03	15,52
30	Sulawesi Barat	328.806	31,28	9,63	328.014	120,12	11,45	328.144	151,40	11,02
31	Maluku	520.390	45,60	5,84	499.701	272,09	26,83	508.777	317,69	17,69
32	Maluku Utara	474.475	15,32	4,27	432.815	69,28	7,78	444.650	84,60	6,77
33	Papua Barat	597.406	22,61	5,63	555.072	188,88	34,19	573.313	211,50	22,17
34	Papua	588.744	41,01	4,26	520.117	885,35	36,84	540.099	926,36	27,53
Indonesia		442.063	9.994,80	6,69	404.398	15149,92	12,85	425.250	25.144,72	9,41

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Lampiran 3.e

INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Semester 1 (Maret)					
		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) *			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**		
		Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	1,59	3,15	2,64	0,38	0,80	0,66
2	Sumatera Utara	1,23	1,54	1,37	0,25	0,38	0,31
3	Sumatera Barat	0,77	1,09	0,94	0,20	0,22	0,21
4	Riau	0,91	1,27	1,13	0,19	0,33	0,27
5	Jambi	1,74	0,98	1,23	0,44	0,23	0,30
6	Sumatera Selatan	2,04	2,16	2,12	0,51	0,52	0,51
7	Bengkulu	2,44	2,50	2,48	0,53	0,61	0,58
8	Lampung	1,47	2,14	1,93	0,35	0,48	0,44
9	Kep. Bangka Belitung	0,33	0,74	0,51	0,06	0,15	0,10
10	Kep. Riau	0,59	1,58	0,69	0,10	0,34	0,12
11	DKI Jakarta	0,50	-	0,50	0,11	-	0,11
12	Jawa Barat	1,03	1,31	1,09	0,24	0,25	0,24
13	Jawa Tengah	1,32	1,75	1,53	0,27	0,33	0,30
14	DI Yogyakarta	1,73	1,78	1,74	0,41	0,32	0,38
15	Jawa Timur	1,15	2,55	1,80	0,28	0,65	0,45
16	Banten	0,63	1,10	0,76	0,15	0,25	0,18
17	Bali	0,49	0,64	0,53	0,11	0,13	0,11
18	Nusa Tenggara Barat	2,50	2,17	2,33	0,45	0,50	0,48
19	Nusa Tenggara Timur	1,16	5,09	4,15	0,21	1,41	1,13
20	Kalimantan Barat	0,76	1,35	1,14	0,17	0,30	0,26
21	Kalimantan Tengah	0,71	0,69	0,70	0,15	0,13	0,14
22	Kalimantan Selatan	0,60	0,79	0,70	0,14	0,16	0,15
23	Kalimantan Timur	0,61	1,53	0,91	0,13	0,38	0,21
24	Kalimantan Utara	0,85	1,63	1,16	0,24	0,42	0,31
25	Sulawesi Utara	0,77	1,62	1,18	0,16	0,35	0,25
26	Sulawesi Tengah	1,43	2,71	2,33	0,32	0,76	0,63
27	Sulawesi Selatan	0,63	2,07	1,45	0,13	0,51	0,34
28	Sulawesi Tenggara	1,35	2,79	2,23	0,34	0,74	0,59
29	Gorontalo	0,43	4,26	2,64	0,07	1,05	0,63
30	Sulawesi Barat	1,32	1,88	1,75	0,26	0,47	0,42
31	Maluku	0,72	5,33	3,32	0,12	1,47	0,88
32	Maluku Utara	0,53	1,03	0,89	0,09	0,24	0,20
33	Papua Barat	0,96	8,97	5,60	0,20	3,25	1,97
34	Papua	0,71	9,76	7,17	0,17	3,58	2,60
Indonesia		1,05	2,18	1,55	0,24	0,55	0,37

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Catatan :

*) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing - masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

**) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

***) DKI Jakarta tidak memiliki desa

Lampiran 3.f

INDEKS GINI MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 - 2019

No	Provinsi	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	0,34	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32
2	Sumatera Utara	0,31	0,33	0,31	0,34	0,31	0,32
3	Sumatera Barat	0,33	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31
4	Riau	0,38	0,37	0,35	0,33	0,35	0,33
5	Jambi	0,34	0,34	0,35	0,33	0,34	0,32
6	Sumatera Selatan	0,38	0,33	0,36	0,37	0,34	0,33
7	Bengkulu	0,36	0,37	0,35	0,35	0,36	0,34
8	Lampung	0,33	0,35	0,36	0,33	0,33	0,33
9	Kep. Bangka Belitung	0,30	0,28	0,29	0,28	0,27	0,27
10	Kep. Riau	0,44	0,34	0,35	0,36	0,34	0,34
11	DKI Jakarta	0,44	0,42	0,40	0,41	0,39	0,39
12	Jawa Barat	0,40	0,43	0,40	0,39	0,41	0,40
13	Jawa Tengah	0,39	0,38	0,36	0,37	0,36	0,36
14	DI Yogyakarta	0,44	0,42	0,43	0,44	0,42	0,42
15	Jawa Timur	0,40	0,40	0,40	0,42	0,37	0,37
16	Banten	0,42	0,39	0,39	0,38	0,37	0,37
17	Bali	0,44	0,40	0,37	0,38	0,36	0,37
18	Nusa Tenggara Barat	0,39	0,36	0,37	0,38	0,39	0,38
19	Nusa Tenggara Timur	0,36	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36
20	Kalimantan Barat	0,40	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
21	Kalimantan Tengah	0,37	0,30	0,35	0,33	0,34	0,34
22	Kalimantan Selatan	0,33	0,33	0,35	0,35	0,34	0,33
23	Kalimantan Timur	0,36	0,32	0,33	0,33	0,34	0,33
24	Kalimantan Utara	-	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30
25	Sulawesi Utara	0,44	0,37	0,38	0,39	0,37	0,37
26	Sulawesi Tengah	0,35	0,37	0,35	0,35	0,32	0,33
27	Sulawesi Selatan	0,45	0,40	0,40	0,43	0,39	0,39
28	Sulawesi Tenggara	0,40	0,38	0,39	0,40	0,39	0,40
29	Gorontalo	0,45	0,40	0,41	0,41	0,42	0,41
30	Sulawesi Barat	0,38	0,36	0,37	0,34	0,37	0,37
31	Maluku	0,33	0,34	0,34	0,32	0,33	0,32
32	Maluku Utara	0,32	0,29	0,31	0,33	0,34	0,31
33	Papua Barat	0,41	0,43	0,40	0,39	0,39	0,39
34	Papua	0,46	0,39	0,40	0,40	0,40	0,39
Indonesia		0,41	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Keterangan : Indeks Gini adalah suatu koefisien yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau pemerataan distribusi pendapatan, nilai koefisien adalah 0 - 1

Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata dan nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang

Lampiran 3.g

**PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN MENURUT KELOMPOK KOMODITAS DAN
TIPE DAERAH MARET 2019**

No	Kelompok Barang	Persentase (%)		
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Padi-padian	4,27	8,17	5,57
2	Umbi-umbian	0,37	0,77	0,51
3	Ikan/udang/cumi/kerang	3,51	4,63	3,89
4	Daging	2,14	2,11	2,13
5	Telur dan susu	2,81	2,73	2,78
6	Sayur-sayuran	2,76	4,23	3,25
7	Kacang-kacangan	0,86	1,17	0,97
8	Buah-buahan	2,30	2,46	2,36
9	Minyak dan kelapa	0,94	1,52	1,13
10	Bahan minuman	1,18	1,97	1,44
11	Bumbu-bumbuan	0,80	1,18	0,93
12	Bahan Makanan Lainnya	0,77	1,04	0,86
13	Makanan dan minuman Jadi	18,09	15,6	17,26
14	Rokok dan Tembakau	5,07	8,00	6,05
	Makanan	45,90	55,59	49,14
15	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	27,24	22,00	25,49
16	Aneka barang dan jasa	13,55	10,11	12,40
17	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	3,00	3,09	3,03
18	Barang tahan lama	5,14	4,85	5,04
19	Pajak, pungutan dan asuransi	3,20	2,64	3,01
20	Keperluan pesta dan upacara/kenduri	1,98	1,71	1,89
	Bukan Makanan	54,10	44,41	50,86
	Total Pengeluaran	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019 (Susenas Maret 2019)

Lampiran 3.h

RATA-RATA PENGELUARAN BUKAN MAKANAN PER KAPITA PER BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	Aneka komoditas dan jasa	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	Komoditas tahan lama	Pajak, pungutan dan asuransi	Keperluan pesta dan upacara/ kenduri	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	207.175	101.457	47.621	35.630	32.786	9.465	434.134
2	Sumatera Utara	237.309	129.397	38.020	36.550	34.446	11.919	487.641
3	Sumatera Barat	242.306	133.856	51.197	73.395	35.461	19.406	555.621
4	R i a u	308.663	138.213	46.240	63.266	35.498	19.618	611.498
5	J a m b i	259.744	109.477	41.767	50.175	29.430	17.852	508.445
6	Sumatera Selatan	242.911	104.738	27.567	39.354	28.954	16.365	459.889
7	Bengkulu	269.318	129.660	39.054	62.017	32.767	21.111	553.927
8	Lampung	218.527	102.127	32.130	49.176	26.915	15.349	444.224
9	Kepulauan Bangka Belitung	385.154	155.458	49.748	107.201	46.228	14.544	758.333
10	Kepulauan Riau	512.148	255.163	57.469	83.261	61.347	19.704	989.092
11	DKI Jakarta	726.430	311.207	57.931	75.992	73.521	33.584	1.278.665
12	Jawa Barat	316.857	161.569	37.731	60.203	34.178	26.598	637.136
13	Jawa Tengah	214.255	127.520	27.262	64.720	29.259	23.966	486.982
14	DI Yogyakarta	344.935	223.712	35.151	106.507	46.893	36.084	793.282
15	Jawa Timur	262.095	135.453	28.706	54.992	31.415	20.624	533.285
16	Banten	382.433	173.590	41.930	58.813	42.535	24.758	724.059
17	B a l i	405.995	163.393	24.827	68.178	52.929	62.650	777.972
18	Nusa Tenggara Barat	225.094	118.108	33.042	71.892	27.402	14.049	489.587
19	Nusa Tenggara Timur	170.219	78.455	17.419	28.959	20.177	5.967	321.196
20	Kalimantan Barat	287.662	112.994	29.942	46.429	29.195	13.006	519.228
21	Kalimantan Tengah	347.001	134.856	31.294	65.747	37.018	20.526	636.442
22	Kalimantan Selatan	304.279	141.741	39.190	81.004	34.159	21.087	621.460
23	Kalimantan Timur	484.354	203.304	42.461	78.976	55.868	28.254	893.217
24	Kalimantan Utara	417.915	172.286	39.308	50.864	45.119	12.703	738.195
25	Sulawesi Utara	277.565	142.884	43.796	62.530	36.983	18.969	582.727
26	Sulawesi Tengah	247.717	100.292	32.692	48.688	30.826	17.817	478.032
27	Sulawesi Selatan	253.848	109.234	37.970	69.705	36.596	27.131	534.484
28	Sulawesi Tenggara	278.812	110.027	34.851	71.560	34.983	15.841	546.074
29	Gorontalo	275.787	124.988	39.220	58.842	33.568	17.501	549.906
30	Sulawesi Barat	190.471	77.761	27.418	60.388	26.732	12.816	395.586
31	Maluku	283.222	116.031	27.949	32.105	22.536	13.179	495.022
32	Maluku Utara	301.822	114.786	30.529	24.671	31.654	8.377	511.839
33	Papua Barat	397.820	166.816	29.588	49.809	38.662	18.141	700.836
34	Papua	341.191	119.407	24.358	31.837	21.674	10.959	549.426
Indonesia		297.019	144.517	35.303	58.764	35.091	21.996	592.690

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019 (Susenas, Maret 2019)

Lampiran 3.i

**TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2017 - 2019**

No	Provinsi	Tahun 2017				Tahun 2018				Tahun 2019			
		Februari		Agustus		Februari		Agustus		Februari		Agustus	
		Jumlah	TPT (%)	Jumlah	TPT (%)	Jumlah	TPT (%)	Jumlah	TPT (%)	Jumlah	TPT (%)	Jumlah	TPT (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	172.107	7,39	150.265	6,57	154.128	6,55	149.723	6,36	136.076	5,53	146.622	6,20
2	Sumatera Utara	430.203	6,41	377.288	5,60	403.959	5,59	396.027	5,56	414.316	5,56	382.438	5,41
3	Sumatera Barat	151.900	5,80	138.703	5,58	152.241	5,55	141.680	5,55	142.244	5,29	138.459	5,33
4	R i a u	180.237	5,76	184.564	6,22	188.412	5,72	192.801	6,20	183.698	5,57	190.143	5,97
5	J a m b i	65.700	3,67	66.816	3,87	67.466	3,65	69.075	3,86	64.676	3,62	73.965	4,19
6	Sumatera Selatan	161.152	3,80	181.135	4,39	175.458	4,02	175.087	4,23	173.038	3,99	185.918	4,48
7	Bengkulu	29.022	2,81	36.279	3,74	27.944	2,70	35.061	3,51	26.014	2,50	34.439	3,39
8	Lampung	189.062	4,43	176.257	4,33	190.442	4,33	171.689	4,06	174.509	3,96	171.455	4,03
9	Kep. Bangka Belitung	32.501	4,46	26.399	3,78	27.347	3,61	26.552	3,65	24.977	3,39	26.871	3,62
10	Kepulauan Riau	67.796	6,44	69.160	7,16	68.559	6,43	69.113	7,12	66.557	6,41	69.479	6,91
11	DKI Jakarta	292.703	5,36	346.945	7,14	290.118	5,34	314.841	6,24	279.588	5,13	320.901	6,22
12	Jawa Barat	1.921.987	8,49	1.839.428	8,22	1.857.425	8,16	1.848.234	8,17	1.841.756	7,73	1.901.498	7,99
13	Jawa Tengah	755.495	4,15	823.938	4,57	771.084	4,23	814.347	4,51	783.709	4,22	819.355	4,49
14	DI Yogyakarta	60.077	2,84	64.019	3,02	65.605	3,06	73.350	3,35	62.891	2,86	69.170	3,14
15	Jawa Timur	855.747	4,10	838.496	4,00	809.449	3,85	850.474	3,99	826.266	3,83	843.754	3,92
16	Banten	462.321	7,75	519.563	9,28	472.754	7,77	496.732	8,52	465.807	7,58	490.808	8,11
17	B a l i	31.610	1,28	36.143	1,48	22.345	0,86	34.485	1,37	30.262	1,19	37.551	1,52
18	Nusa Tenggara Barat	97.224	3,86	79.449	3,32	83.210	3,38	83.257	3,72	81.293	3,27	84.516	3,42
19	Nusa Tenggara Timur	80.248	3,21	78.548	3,27	76.326	2,98	74.748	3,01	78.529	3,10	83.030	3,35
20	Kalimantan Barat	105.678	4,22	105.061	4,36	106.340	4,15	104.518	4,26	106.590	4,14	110.272	4,45
21	Kalimantan Tengah	42.895	3,13	53.962	4,23	44.416	3,18	54.397	4,01	47.189	3,33	56.790	4,10
22	Kalimantan Selatan	75.925	3,53	98.956	4,77	84.478	3,86	95.278	4,50	78.726	3,50	91.730	4,31
23	Kalimantan Timur	143.617	8,55	114.289	6,91	125.167	6,90	114.313	6,60	126.529	6,66	110.574	6,09
24	Kalimantan Utara	16.774	5,17	18.315	5,54	16.272	4,68	17.797	5,22	20.681	5,80	15.380	4,40
25	Sulawesi Utara	77.056	6,12	80.483	7,18	76.389	6,09	80.664	6,86	64.107	5,37	75.485	6,25
26	Sulawesi Tengah	46.317	2,97	54.369	3,81	50.082	3,19	51.481	3,43	54.843	3,54	46.802	3,15
27	Sulawesi Selatan	190.411	4,77	213.695	5,61	224.885	5,39	213.105	5,34	225.281	5,42	200.304	4,97
28	Sulawesi Tenggara	39.564	3,14	39.631	3,30	35.894	2,79	40.724	3,26	38.392	2,96	45.292	3,59
29	Gorontalo	21.524	3,65	23.450	4,28	22.551	3,62	23.347	4,03	21.855	3,47	23.809	4,06
30	Sulawesi Barat	19.132	2,98	19.744	3,21	16.244	2,45	20.227	3,16	9.682	1,45	21.054	3,18
31	Maluku	59.745	7,77	65.735	9,29	56.958	7,38	54.891	7,27	52.821	6,91	54.575	7,08
32	Maluku Utara	26.849	4,82	27.516	5,33	27.369	4,65	25.831	4,77	27.731	5,09	27.303	4,97
33	Papua Barat	33.214	7,52	27.952	6,49	26.129	5,67	28.086	6,30	24.322	5,28	28.846	6,24
34	Papua	69.469	3,96	63.770	3,62	53.818	2,91	58.756	3,20	61.885	3,42	67.173	3,65
Indonesia		7.005.262	5,33	7.040.323	5,50	6.871.264	5,13	7.000.691	5,34	6.816.840	5,01	7.045.761	5,28

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Lampiran 3.j

**RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS
MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019**

No	Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	9,79	9,40	9,59
2	Sumatera Utara	9,88	9,55	9,71
3	Sumatera Barat	9,19	9,25	9,22
4	R i a u	9,52	9,17	9,35
5	J a m b i	9,17	8,54	8,86
6	Sumatera Selatan	8,81	8,39	8,60
7	Bengkulu	9,28	8,87	9,08
8	Lampung	8,61	8,10	8,36
9	Kepulauan Bangka Belitung	8,54	8,14	8,35
10	Kepulauan Riau	10,25	10,00	10,13
11	DKI Jakarta	11,40	10,82	11,11
12	Jawa Barat	9,12	8,46	8,79
13	Jawa Tengah	8,45	7,63	8,03
14	DI Yogyakarta	10,23	9,44	9,83
15	Jawa Timur	8,58	7,67	8,11
16	Banten	9,43	8,71	9,07
17	B a l i	9,87	8,50	9,19
18	Nusa Tenggara Barat	8,58	7,43	7,98
19	Nusa Tenggara Timur	8,20	7,76	7,98
20	Kalimantan Barat	8,13	7,46	7,80
21	Kalimantan Tengah	9,07	8,57	8,83
22	Kalimantan Selatan	8,96	8,22	8,59
23	Kalimantan Timur	10,17	9,56	9,88
24	Kalimantan Utara	9,50	8,96	9,24
25	Sulawesi Utara	9,58	9,69	9,63
26	Sulawesi Tengah	9,11	8,84	8,98
27	Sulawesi Selatan	8,91	8,56	8,73
28	Sulawesi Tenggara	9,54	8,97	9,25
29	Gorontalo	7,80	8,43	8,11
30	Sulawesi Barat	8,37	8,08	8,22
31	Maluku	10,11	9,95	10,03
32	Maluku Utara	9,59	9,04	9,32
33	Papua Barat	10,26	9,52	9,92
34	Papua	7,45	6,18	6,85
Indonesia		9,08	8,42	8,75

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Lampiran 3.k

**ANGKA MELEK HURUF (PERSENTASE PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF)
MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2015 - 2019**

No	Provinsi	Laki-laki					Perempuan					Laki-laki + Perempuan				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
1	Aceh	98,75	99,02	99,02	98,99	99,03	96,53	96,51	96,89	97,09	97,41	97,63	97,74	97,94	98,03	98,21
2	Sumatera Utara	99,32	99,39	99,45	99,53	99,60	98,04	98,38	98,34	98,61	98,70	98,68	98,88	98,89	99,07	99,15
3	Sumatera Barat	99,29	99,37	99,47	99,46	99,48	97,85	98,27	98,25	98,69	98,87	98,56	98,81	98,85	99,07	99,17
4	R i a u	99,55	99,56	99,53	99,55	99,53	98,16	98,56	98,79	98,83	98,88	98,87	99,07	99,17	99,20	99,21
5	J a m b i	98,88	98,87	98,94	99,08	99,16	96,75	97,11	97,21	97,17	97,21	97,84	98,01	98,09	98,15	98,20
6	Sumatera Selatan	98,90	99,37	99,32	99,29	99,22	97,52	97,53	97,74	98,00	98,29	98,22	98,46	98,54	98,66	98,76
7	Bengkulu	98,94	99,07	99,06	98,96	99,11	96,27	96,37	96,70	96,82	96,86	97,63	97,75	97,90	97,91	98,01
8	Lampung	98,41	98,08	98,31	98,33	98,45	94,89	95,42	95,40	95,47	95,72	96,67	96,78	96,89	96,93	97,11
9	Kepulauan Bangka Belitung	99,03	98,86	98,85	98,54	98,99	96,78	96,35	96,64	96,91	97,11	97,63	97,66	97,79	97,76	98,09
10	Kepulauan Riau	99,84	99,20	99,36	99,26	99,18	98,53	98,48	98,27	98,46	98,82	98,79	98,84	98,83	98,87	99,00
11	DKI Jakarta	98,84	99,85	99,75	99,89	99,91	99,33	99,43	99,59	99,55	99,57	99,59	99,64	99,67	99,72	99,74
12	Jawa Barat	98,86	98,91	99,02	99,14	99,14	97,14	97,51	97,43	97,81	97,90	98,01	98,22	98,23	98,48	98,53
13	Jawa Tengah	96,36	96,33	96,40	96,32	96,29	90,01	90,38	90,50	90,68	90,90	93,12	93,30	93,39	93,45	93,54
14	DI Yogyakarta	97,35	97,21	97,34	97,09	97,87	91,78	92,07	92,05	92,66	92,16	94,50	94,59	94,64	94,83	94,96
15	Jawa Timur	94,94	94,93	95,00	94,99	95,23	88,17	88,41	88,78	88,85	89,53	91,47	91,59	91,82	91,85	92,32
16	Banten	98,57	98,67	98,76	98,85	98,87	96,14	96,38	96,33	96,34	96,32	97,37	97,55	97,57	97,62	97,62
17	B a l i	90,83	96,37	96,4	96,49	97,38	88,94	89,23	89,39	89,48	91,66	92,77	92,82	92,90	92,98	94,53
18	Nusa Tenggara Barat	92,84	91,12	91,07	91,86	92,12	83,50	83,42	83,59	83,42	83,49	86,97	87,06	87,14	87,42	87,59
19	Nusa Tenggara Timur	95,41	93,16	93,33	93,3	94,66	90,12	89,97	90,11	90,57	91,87	91,45	91,52	91,68	91,90	93,24
20	Kalimantan Barat	99,26	95,74	95,34	95,58	96,14	89,10	88,93	89,51	89,48	90,20	92,32	92,39	92,48	92,58	93,21
21	Kalimantan Tengah	99,23	99,52	99,55	99,48	99,54	98,45	98,36	98,56	98,91	98,86	98,88	98,97	99,08	99,21	99,22
22	Kalimantan Selatan	99,20	99,33	99,26	99,19	99,23	97,17	97,22	97,52	97,63	97,76	98,21	98,28	98,40	98,42	98,50
23	Kalimantan Timur	96,66	99,32	99,50	99,34	99,28	98,12	98,25	98,36	98,53	98,75	98,69	98,82	98,96	98,96	99,03
24	Kalimantan Utara	99,69	95,95	96,22	96,01	97,41	93,08	94,01	93,88	94,21	95,22	94,99	95,05	95,14	95,18	96,39
25	Sulawesi Utara	99,69	99,87	99,77	99,83	99,76	99,56	99,71	99,74	99,92	99,83	99,63	99,79	99,76	99,87	99,80
26	Sulawesi Tengah	98,24	98,11	98,29	98,5	98,54	96,41	96,88	97,07	97,22	97,88	97,34	97,51	97,69	97,87	98,22
27	Sulawesi Selatan	93,26	93,59	93,38	93,56	94,16	89,47	89,63	90,06	90,19	90,87	91,29	91,52	91,65	91,81	92,45
28	Sulawesi Tenggara	96,57	96,52	96,45	96,44	96,88	91,69	91,97	92,24	92,51	92,96	94,10	94,25	94,32	94,46	94,91
29	Gorontalo	98,02	98,49	98,33	98,48	98,91	98,45	98,39	98,55	98,77	98,60	98,24	98,44	98,44	98,63	98,75
30	Sulawesi Barat	94,44	94,22	93,9	94,49	94,75	90,88	91,31	91,72	91,23	92,45	92,64	92,75	92,79	92,85	93,59
31	Maluku	99,31	99,27	99,46	99,4	99,50	98,39	98,61	98,80	99,03	99,28	98,85	98,94	99,13	99,22	99,39
32	Maluku Utara	99,08	99,11	99,29	99,34	99,26	97,87	98,20	98,04	98,16	98,30	98,49	98,67	98,68	98,76	98,79
33	Papua Barat	98,07	98,00	98,18	98,28	98,63	95,50	95,97	95,99	96,34	96,70	96,88	97,05	97,16	97,37	97,72
34	Papua	75,59	76,72	79,22	81,69	82,36	65,47	64,60	67,86	71,26	73,07	70,83	71,02	73,89	76,79	78,00
Indonesia		97,11	97,17	97,25	97,33	97,48	93,34	93,59	93,76	93,99	94,33	95,22	95,38	95,50	95,66	95,90

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Keterangan : Angka Melek Huruf tahun 2011-2013 dihitung ulang dengan mempertimbangkan perubahan angka proyeksi penduduk tahun 2010-2035

Lampiran 3.I

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2017 - 2019

No	Provinsi	2017				2018				2019			
		7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	Aceh	99,85	98,09	82,15	34,28	99,86	98,49	82,92	32,59	99,75	98,52	83,26	32,54
2	Sumatera Utara	99,49	96,60	76,76	26,80	99,50	96,75	77,41	25,31	99,41	96,89	77,67	25,75
3	Sumatera Barat	99,50	96,29	82,86	35,45	99,51	96,37	83,08	33,87	99,52	96,23	83,63	35,66
4	Riau	98,98	94,73	76,52	27,28	99,07	94,95	77,27	27,19	99,36	95,37	77,29	28,16
5	Jambi	99,59	95,89	71,54	24,12	99,67	96,14	71,94	22,16	99,70	96,42	71,97	23,32
6	Sumatera Selatan	99,63	94,01	69,05	19,17	99,71	94,41	69,65	17,15	99,71	94,51	70,29	18,07
7	Bengkulu	99,80	97,20	79,07	29,90	99,87	97,36	79,33	29,15	99,77	97,18	79,39	30,71
8	Lampung	99,78	94,76	70,03	20,96	99,86	95,00	70,83	20,60	99,80	94,89	71,05	20,69
9	Kep. Bangka Belitung	99,64	92,41	66,99	14,99	99,85	92,70	67,11	15,99	99,76	92,87	67,79	17,01
10	Kep. Riau	99,32	99,08	82,80	19,13	99,52	99,20	83,78	18,24	99,48	98,50	84,04	18,98
11	DKI Jakarta	99,67	97,64	71,50	24,60	99,77	97,77	71,81	24,41	99,63	98,33	72,01	24,52
12	Jawa Barat	99,51	93,77	66,62	21,50	99,52	94,15	67,17	21,96	99,53	94,18	67,29	22,71
13	Jawa Tengah	99,62	95,48	68,48	22,13	99,76	95,79	69,02	21,92	99,77	96,11	69,65	22,41
14	DI Yogyakarta	99,87	99,63	87,61	51,33	99,90	99,72	88,39	51,69	99,90	99,56	88,97	51,85
15	Jawa Timur	99,57	96,77	71,51	23,34	99,62	97,02	72,18	22,86	99,65	97,43	72,74	24,80
16	Banten	99,31	95,67	67,77	21,33	99,39	95,79	68,35	20,42	99,44	95,79	68,72	21,43
17	Bali	99,44	97,72	82,16	26,56	99,56	97,92	82,35	27,24	99,74	97,72	82,83	27,86
18	Nusa Tenggara Barat	99,43	97,69	76,61	28,52	99,43	97,72	76,89	25,74	99,46	97,92	77,51	25,59
19	Nusa Tenggara Timur	98,27	94,76	74,65	27,80	98,28	94,95	74,83	28,27	98,47	95,11	75,36	29,27
20	Kalimantan Barat	98,44	92,51	67,53	25,80	98,43	92,84	68,35	23,86	98,52	92,85	68,37	23,69
21	Kalimantan Tengah	99,50	93,37	66,62	24,15	99,66	93,87	66,95	24,27	99,66	94,09	66,95	23,98
22	Kalimantan Selatan	99,55	92,33	68,30	23,53	99,64	92,43	68,66	23,82	99,53	92,83	69,19	24,34
23	Kalimantan Timur	99,67	98,79	81,32	30,04	99,76	98,89	81,55	29,84	99,68	98,83	81,81	29,89
24	Kalimantan Utara	98,34	96,04	75,12	20,72	98,24	96,38	75,62	23,04	98,82	96,50	76,06	23,11
25	Sulawesi Utara	99,37	94,91	73,04	24,22	99,36	95,00	73,67	21,45	99,39	95,18	74,04	22,55
26	Sulawesi Tengah	98,15	92,41	74,87	26,31	98,24	92,74	75,05	27,15	98,40	93,01	75,73	27,39
27	Sulawesi Selatan	99,16	93,09	70,60	32,16	99,25	93,13	70,81	33,72	99,23	93,22	70,85	34,44
28	Sulawesi Tenggara	99,32	94,08	72,94	30,03	99,28	94,29	73,47	30,01	99,13	94,78	74,03	31,27
29	Gorontalo	98,76	91,23	69,86	29,21	98,76	91,38	70,75	30,58	98,96	91,64	71,44	30,97
30	Sulawesi Barat	98,10	89,88	68,03	23,49	98,25	89,95	68,69	24,10	98,34	89,92	69,31	23,64
31	Maluku	99,72	96,86	79,08	38,20	99,71	97,05	79,12	37,82	99,61	97,29	79,65	38,58
32	Maluku Utara	99,19	97,24	76,06	32,10	99,08	97,47	76,36	31,36	98,97	96,97	76,41	31,23
33	Papua Barat	97,27	96,92	80,60	31,92	97,31	97,08	80,81	30,84	97,68	96,58	81,49	31,48
34	Papua	81,80	79,09	63,35	24,57	82,43	80,00	63,48	23,37	82,67	80,13	63,50	22,91
Indonesia		99,14	95,08	71,42	24,77	99,22	95,36	71,99	24,40	99,24	95,51	72,36	25,21

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Keterangan : APS tahun 2011-2013 dihitung ulang dengan mempertimbangkan perubahan angka proyeksi penduduk tahun 2010-2035

Lampiran 3.m

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019

No	Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki + Perempuan			
		7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	99,82	97,88	82,62	31,23	99,67	99,17	83,95	33,88	99,75	98,52	83,26	32,54
2	Sumatera Utara	99,39	95,82	74,82	24,73	99,43	98,02	80,74	26,79	99,41	96,89	77,67	25,75
3	Sumatera Barat	99,55	94,69	78,78	34,20	99,50	97,90	88,50	37,14	99,52	96,23	83,63	35,66
4	Riau	99,35	94,57	75,14	25,91	99,37	96,16	79,66	30,54	99,36	95,37	77,29	28,16
5	Jambi	99,59	96,04	71,16	23,02	99,81	96,77	72,82	23,64	99,70	96,42	71,97	23,32
6	Sumatera Selatan	99,71	93,64	68,91	18,33	99,71	95,47	71,81	17,78	99,71	94,51	70,29	18,07
7	Bengkulu	99,86	96,30	77,07	30,08	99,69	98,08	81,87	31,43	99,77	97,18	79,39	30,71
8	Lampung	99,65	93,55	68,07	20,25	99,95	96,39	73,94	21,16	99,80	94,89	71,05	20,69
9	Kep. Bangka Belitung	99,61	92,19	65,37	14,97	99,91	93,60	70,30	19,27	99,76	92,87	67,79	17,01
10	Kepulauan Riau	99,43	98,32	83,83	17,43	99,52	98,69	84,30	20,32	99,48	98,50	84,04	18,98
11	DKI Jakarta	99,89	98,00	72,86	24,79	99,36	98,68	71,20	24,27	99,63	98,33	72,01	24,52
12	Jawa Barat	99,37	93,25	67,57	22,05	99,69	95,14	66,98	23,39	99,53	94,18	67,29	22,71
13	Jawa Tengah	99,75	95,52	68,26	22,93	99,79	96,74	71,09	21,87	99,77	96,11	69,65	22,41
14	DI Yogyakarta	99,96	99,53	87,04	53,80	99,83	99,59	90,89	49,80	99,90	99,56	88,97	51,85
15	Jawa Timur	99,47	97,24	71,87	24,91	99,86	97,63	73,66	24,69	99,65	97,43	72,74	24,80
16	Banten	99,17	94,90	68,85	19,71	99,73	96,69	68,58	23,22	99,44	95,79	68,72	21,43
17	B a l i	99,87	97,63	83,36	28,89	99,60	97,82	82,29	26,75	99,74	97,72	82,83	27,86
18	Nusa Tenggara Barat	99,30	98,25	78,48	28,79	99,61	97,55	76,51	22,31	99,46	97,92	77,51	25,59
19	Nusa Tenggara Timur	98,07	93,67	73,64	29,47	98,88	96,65	77,19	29,06	98,47	95,11	75,36	29,27
20	Kalimantan Barat	98,39	93,16	67,92	23,59	98,66	92,55	68,83	23,80	98,52	92,85	68,37	23,69
21	Kalimantan Tengah	99,57	94,37	65,59	26,50	99,76	93,79	68,42	21,24	99,66	94,09	66,95	23,98
22	Kalimantan Selatan	99,55	92,23	67,99	23,89	99,52	93,50	70,41	24,83	99,53	92,83	69,19	24,34
23	Kalimantan Timur	99,68	98,21	82,07	27,89	99,67	99,52	81,52	32,16	99,68	98,83	81,81	29,89
24	Kalimantan Utara	99,12	95,24	77,90	23,82	98,52	97,86	74,15	22,32	98,82	96,50	76,06	23,11
25	Sulawesi Utara	99,15	94,19	73,83	21,14	99,64	96,23	74,27	24,05	99,39	95,18	74,04	22,55
26	Sulawesi Tengah	98,00	91,00	73,36	27,03	98,82	94,99	78,27	27,77	98,40	93,01	75,73	27,39
27	Sulawesi Selatan	98,87	92,62	68,75	30,80	99,61	93,85	72,99	38,16	99,23	93,22	70,85	34,44
28	Sulawesi Tenggara	98,86	94,28	71,82	29,91	99,41	95,34	76,31	32,62	99,13	94,78	74,03	31,27
29	Gorontalo	98,71	90,24	64,47	29,66	99,20	93,24	79,27	32,25	98,96	91,64	71,44	30,97
30	Sulawesi Barat	97,66	87,61	64,53	24,82	99,01	92,48	74,62	22,42	98,34	89,92	69,31	23,64
31	Maluku	99,59	96,63	78,41	36,13	99,63	97,98	81,08	41,26	99,61	97,29	79,65	38,58
32	Maluku Utara	98,89	96,34	75,88	28,35	99,05	97,60	76,96	34,43	98,97	96,97	76,41	31,23
33	Papua Barat	97,81	95,76	80,59	30,67	97,56	97,48	82,53	32,34	97,68	96,58	81,49	31,48
34	Papua	82,56	79,20	65,74	25,03	82,79	81,18	61,14	20,38	82,67	80,13	63,50	22,91
Indonesia		99,12	94,79	71,37	24,81	99,35	96,26	73,41	25,62	99,24	95,51	72,36	25,21

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019 (Susenas, Maret 2019)

Lampiran 3.n

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2015 - 2019

No	Provinsi	2015			2016			2017			2018			2019		
		SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Aceh	113,36	97,88	83,33	111,26	99,15	87,47	110,31	98,74	87,52	113,85	99,30	84,80	109,93	97,42	90,09
2	Sumatera Utara	112,62	95,41	84,14	110,89	90,71	93,25	109,50	90,74	93,64	111,10	89,98	91,57	109,49	90,38	94,04
3	Sumatera Barat	113,25	90,94	81,42	110,39	91,05	84,70	110,46	90,40	88,39	110,99	90,92	83,97	109,31	91,41	88,88
4	Riau	110,40	94,14	76,16	110,04	93,84	78,30	108,30	92,40	85,05	106,92	94,18	83,87	106,81	93,95	84,17
5	Jambi	111,99	91,78	76,12	112,97	90,75	80,36	112,40	86,37	83,54	111,98	87,55	78,93	111,11	87,31	82,50
6	Sumatera Selatan	114,47	93,56	73,18	114,33	88,54	82,51	112,14	89,09	83,44	114,14	86,51	77,40	113,30	86,97	80,85
7	Bengkulu	116,16	88,79	82,79	113,13	90,38	83,56	112,71	90,52	87,10	113,53	92,08	85,57	109,98	89,50	93,80
8	Lampung	113,38	100,83	73,90	111,44	93,58	82,98	109,77	91,04	85,16	110,11	94,18	81,56	107,36	91,11	85,73
9	Kep. Bangka Belitung	111,07	87,60	76,41	111,75	84,38	79,10	110,58	84,53	82,88	111,15	85,93	82,21	108,44	85,34	87,11
10	Kep. Riau	108,27	92,38	93,20	108,86	90,40	89,47	106,82	90,45	95,79	107,30	92,44	90,99	107,64	92,82	86,69
11	DKI Jakarta	105,26	88,35	76,35	104,32	90,89	73,09	103,37	93,88	79,51	105,27	94,91	73,98	104,83	91,02	74,77
12	Jawa Barat	109,42	90,07	70,23	108,09	89,58	70,56	107,54	88,80	76,48	106,24	90,96	75,31	105,52	90,75	77,82
13	Jawa Tengah	110,36	91,40	82,15	109,46	89,96	86,27	108,44	91,09	84,35	108,18	91,96	84,15	107,74	91,70	86,76
14	DI Yogyakarta	106,69	97,88	82,64	106,75	93,15	91,87	106,29	94,77	93,38	105,84	96,98	87,43	106,18	95,00	89,07
15	Jawa Timur	108,64	91,13	80,02	108,17	92,54	81,23	106,79	92,22	81,43	106,69	94,93	79,11	105,56	94,24	84,80
16	Banten	112,07	92,27	69,76	109,05	92,17	71,65	109,56	91,14	75,89	109,50	91,71	71,70	107,93	91,61	72,92
17	Bali	105,00	96,82	86,61	104,97	96,19	86,41	104,35	96,29	90,04	103,02	96,14	87,74	103,52	97,26	87,96
18	Nusa Tenggara Barat	111,54	91,94	89,51	110,78	93,40	91,25	109,63	94,97	93,89	108,82	93,83	89,64	108,50	92,07	90,86
19	Nusa Tenggara Timur	116,46	88,96	75,54	114,12	89,56	79,34	114,05	91,35	78,83	116,58	88,51	77,81	114,95	87,82	84,63
20	Kalimantan Barat	114,82	82,30	81,88	113,75	79,79	87,00	115,05	81,20	82,48	116,97	83,04	79,25	112,58	83,26	82,49
21	Kalimantan Tengah	114,76	95,94	70,70	114,01	86,30	78,44	112,48	87,30	80,38	110,02	95,79	74,83	110,05	88,74	82,27
22	Kalimantan Selatan	111,14	82,81	73,88	111,63	85,78	76,88	110,30	85,70	77,44	110,21	86,17	75,68	108,69	83,83	78,86
23	Kalimantan Timur	112,61	97,90	90,31	110,04	95,28	95,38	108,07	91,46	99,51	108,02	92,57	96,08	106,84	91,03	94,96
24	Kalimantan Utara	101,66	100,48	83,77	103,96	96,60	89,85	103,86	98,12	87,68	102,31	102,95	89,23	101,17	98,25	97,91
25	Sulawesi Utara	111,23	91,06	86,30	110,26	89,50	86,32	108,74	88,52	91,73	109,02	88,47	82,25	108,17	89,22	86,60
26	Sulawesi Tengah	107,28	90,73	82,87	105,78	89,48	83,45	104,19	91,86	84,85	105,28	92,88	83,53	105,13	90,63	87,35
27	Sulawesi Selatan	111,33	85,56	78,03	109,71	83,38	83,66	109,63	83,97	83,14	110,28	86,97	81,74	108,46	84,22	86,09
28	Sulawesi Tenggara	111,56	87,39	81,39	109,96	86,70	81,81	112,10	88,06	80,01	110,81	85,23	84,83	109,25	85,34	86,81
29	Gorontalo	110,58	81,87	86,74	108,34	83,71	88,67	111,30	81,70	80,89	111,95	80,17	84,25	110,88	78,95	88,64
30	Sulawesi Barat	105,92	80,25	84,98	106,23	81,00	83,49	110,19	83,02	80,34	108,56	82,36	84,48	107,32	82,71	84,10
31	Maluku	112,99	88,92	95,13	110,30	90,61	92,12	112,07	94,99	89,71	112,25	95,58	87,15	112,19	90,40	95,29
32	Maluku Utara	115,41	93,90	84,61	113,70	89,13	83,67	113,14	87,05	91,56	113,74	91,10	88,04	109,73	86,53	93,17
33	Papua Barat	113,46	90,33	89,00	111,49	92,44	89,59	110,21	90,96	89,69	110,72	89,68	90,74	111,24	88,49	96,41
34	Papua	95,15	73,59	66,97	94,74	72,07	66,85	92,94	82,20	67,94	94,47	87,81	65,07	91,94	78,11	76,33
Indonesia		110,50	91,17	78,02	109,31	90,12	80,89	108,50	90,23	82,84	108,61	91,52	80,68	107,46	90,57	83,98

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Keterangan : APK tahun 2011-2013 dihitung ulang dengan mempertimbangkan perubahan angka proyeksi penduduk tahun 2010-2035

Lampiran 3.o

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019

No	Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki + Perempuan			
		SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	PT (19-24)	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	PT (19-24)	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	PT (19-24)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	110,29	99,26	88,66	33,29	109,55	95,55	91,65	40,33	109,93	97,42	90,09	36,77
2	Sumatera Utara	110,00	91,95	89,04	23,13	108,98	88,73	99,44	28,33	109,49	90,38	94,04	25,70
3	Sumatera Barat	111,16	89,23	82,49	32,11	107,39	93,77	95,29	38,31	109,31	91,41	88,88	35,20
4	Riau	107,50	94,52	78,32	25,43	106,09	93,39	90,63	30,06	106,81	93,95	84,17	27,68
5	Jambi	111,55	87,02	85,45	23,58	110,64	87,59	79,37	27,96	111,11	87,31	82,50	25,70
6	Sumatera Selatan	113,28	87,36	78,23	20,10	113,31	86,54	83,74	21,89	113,30	86,97	80,85	20,95
7	Bengkulu	109,42	90,90	95,44	25,02	110,55	88,07	92,05	38,33	109,98	89,50	93,80	31,21
8	Lampung	107,24	87,38	84,81	16,64	107,48	95,31	86,62	20,03	107,36	91,11	85,73	18,30
9	Kep. Bangka Belitung	109,66	83,19	79,93	11,16	107,14	87,64	94,57	11,97	108,44	85,34	87,11	11,55
10	Kepulauan Riau	109,93	97,86	78,04	21,38	105,32	87,69	97,47	20,22	107,64	92,82	86,69	20,75
11	DKI Jakarta	103,78	90,92	76,14	31,81	105,95	91,12	73,49	32,69	104,83	91,02	74,77	32,27
12	Jawa Barat	105,03	92,10	76,38	19,97	106,03	89,36	79,46	22,31	105,52	90,75	77,82	21,13
13	Jawa Tengah	108,26	90,17	85,85	18,03	107,17	93,33	87,70	17,68	107,74	91,70	86,76	17,86
14	DI Yogyakarta	106,86	91,90	88,13	63,85	105,42	98,42	90,01	60,51	106,18	95,00	89,07	62,23
15	Jawa Timur	105,63	95,39	83,05	23,67	105,49	93,07	86,63	24,57	105,56	94,24	84,80	24,11
16	Banten	107,49	91,48	70,31	26,68	108,41	91,75	75,70	28,72	107,93	91,61	72,92	27,68
17	B a l i	103,07	96,46	91,88	29,86	104,01	98,08	83,95	29,83	103,52	97,26	87,96	29,84
18	Nusa Tenggara Barat	108,86	92,78	91,94	26,97	108,14	91,29	89,74	24,40	108,50	92,07	90,86	25,70
19	Nusa Tenggara Timur	115,80	84,69	80,55	24,41	114,08	91,15	88,96	26,00	114,95	87,82	84,63	25,18
20	Kalimantan Barat	113,60	82,78	82,08	19,26	111,50	83,73	82,90	22,03	112,58	83,26	82,49	20,62
21	Kalimantan Tengah	110,43	87,50	82,30	22,93	109,66	90,08	82,23	19,26	110,05	88,74	82,27	21,18
22	Kalimantan Selatan	108,15	83,58	80,35	20,06	109,30	84,12	77,35	25,38	108,69	83,83	78,86	22,63
23	Kalimantan Timur	107,43	92,30	92,09	28,96	106,23	89,63	98,17	34,43	106,84	91,03	94,96	31,52
24	Kalimantan Utara	104,26	95,77	99,31	15,99	98,04	100,94	96,45	23,10	101,17	98,25	97,91	19,34
25	Sulawesi Utara	108,28	87,10	84,87	26,23	108,05	91,47	88,51	30,00	108,17	89,22	86,60	28,05
26	Sulawesi Tengah	106,51	90,91	79,10	31,68	103,70	90,36	96,21	32,46	105,13	90,63	87,35	32,07
27	Sulawesi Selatan	108,21	84,93	82,39	31,85	108,71	83,49	89,85	38,85	108,46	84,22	86,09	35,31
28	Sulawesi Tenggara	109,99	85,34	83,73	38,16	108,47	85,34	89,99	40,79	109,25	85,34	86,81	39,48
29	Gorontalo	111,74	78,34	79,19	28,87	110,08	79,64	99,27	32,55	110,88	78,95	88,64	30,73
30	Sulawesi Barat	107,80	83,62	74,62	25,24	106,84	81,71	94,64	24,90	107,32	82,71	84,10	25,07
31	Maluku	114,72	90,58	88,08	38,59	109,65	90,20	103,66	41,87	112,19	90,40	95,29	40,15
32	Maluku Utara	109,54	87,28	87,64	33,13	109,94	85,78	98,89	40,75	109,73	86,53	93,17	36,74
33	Papua Barat	114,00	87,84	89,62	30,29	108,48	89,20	104,21	28,37	111,24	88,49	96,41	29,37
34	Papua	91,98	77,65	84,06	18,49	91,91	78,63	68,19	16,87	91,94	78,11	76,33	17,75
Indonesia		107,61	90,64	82,03	24,05	107,31	90,50	86,06	26,24	107,46	90,57	83,98	25,13

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019 (Susenas, Maret 2019)

Lampiran 3.p

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2015 - 2019

No	Provinsi	2015			2016			2017			2018			2019		
		SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Pake t B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Aceh	97,99	85,55	69,82	98,16	85,73	70,00	98,54	86,31	70,15	99,10	86,38	70,26	99,12	86,48	70,35
2	Sumatera Utara	96,47	78,48	66,69	96,57	78,71	66,85	97,22	79,12	67,05	97,63	79,25	67,27	97,67	80,26	67,53
3	Sumatera Barat	98,12	76,00	66,90	98,23	76,19	67,12	98,64	76,47	67,30	98,66	77,08	67,48	98,67	78,10	68,53
4	Riau	96,63	78,22	62,60	96,74	78,53	62,76	97,08	78,87	63,02	97,26	79,12	63,47	97,32	79,94	63,55
5	Jambi	97,68	77,94	59,41	97,81	78,09	59,52	98,41	78,57	59,98	99,04	79,38	60,92	99,07	79,48	60,92
6	Sumatera Selatan	96,41	76,18	58,27	96,59	76,43	58,59	97,16	76,89	59,06	97,85	76,91	59,87	97,91	77,58	59,92
7	Bengkulu	98,10	76,88	64,97	98,22	77,02	65,29	98,60	77,85	65,33	98,63	78,03	65,45	98,66	78,81	65,51
8	Lampung	98,32	78,20	58,39	98,46	78,34	58,85	99,02	79,24	58,97	99,21	80,23	59,18	99,24	80,40	59,41
9	Kep. Bangka Belitung	96,66	72,42	57,02	96,75	72,75	57,22	97,42	73,06	57,69	97,71	73,96	57,86	97,73	74,13	58,41
10	Kep. Riau	98,68	83,77	71,23	98,83	84,06	71,58	98,93	84,28	71,98	99,12	84,59	72,90	99,13	85,54	72,97
11	DKI Jakarta	96,91	80,20	59,04	97,01	80,35	59,30	97,64	80,72	59,54	98,03	80,81	60,01	98,12	81,68	60,24
12	Jawa Barat	97,68	79,55	56,73	97,82	79,76	56,92	98,05	80,29	57,22	98,25	81,01	57,33	98,27	81,26	57,53
13	Jawa Tengah	96,57	78,66	58,27	96,64	78,89	58,49	97,13	79,13	59,20	97,75	79,31	59,31	97,77	79,84	59,35
14	DI Yogyakarta	99,23	82,86	68,60	99,21	83,05	68,96	99,29	83,25	69,66	99,50	83,61	70,22	99,53	84,04	70,49
15	Jawa Timur	97,38	81,16	60,31	97,49	81,35	60,76	97,77	81,52	61,49	97,88	81,98	61,51	98,01	82,84	61,77
16	Banten	96,98	79,84	57,04	97,22	79,93	57,21	97,56	80,59	57,88	97,97	80,91	58,72	97,98	81,93	58,80
17	Bali	95,64	84,78	71,53	95,75	84,99	71,71	96,09	85,32	72,40	96,19	86,00	73,00	96,81	86,75	73,01
18	Nusa Tenggara Barat	97,80	82,83	64,97	97,90	83,17	65,19	98,13	83,57	65,67	98,86	83,88	65,77	98,87	83,92	66,04
19	Nusa Tenggara Timur	94,95	66,32	52,51	95,24	66,56	52,87	95,40	67,16	53,32	96,12	68,14	53,67	96,16	69,19	53,68
20	Kalimantan Barat	96,09	64,55	50,32	96,22	64,69	50,43	96,59	65,19	50,96	97,09	65,91	51,16	97,09	66,67	51,21
21	Kalimantan Tengah	98,54	75,76	52,36	98,67	75,92	52,50	98,94	76,14	53,86	99,08	76,70	53,67	99,14	77,71	53,82
22	Kalimantan Selatan	97,75	72,51	55,58	98,05	72,70	55,91	98,45	73,37	57,15	98,80	73,84	57,78	98,81	74,84	57,82
23	Kalimantan Timur	97,00	79,06	67,78	97,13	79,20	67,92	97,43	79,58	68,23	98,40	79,68	68,43	98,41	80,42	68,55
24	Kalimantan Utara	91,83	77,25	62,34	92,18	77,46	62,80	92,46	77,66	63,15	92,72	78,20	64,05	93,15	78,42	64,39
25	Sulawesi Utara	93,97	73,02	62,23	94,12	73,15	62,50	94,46	73,87	62,81	94,93	74,18	62,83	94,97	74,30	62,98
26	Sulawesi Tengah	92,35	71,10	63,32	92,48	71,25	63,61	92,75	72,25	63,80	92,82	73,20	64,25	93,17	73,82	64,66
27	Sulawesi Selatan	96,84	73,51	59,47	96,99	73,67	59,62	97,49	74,36	59,86	98,03	75,13	60,03	98,06	75,82	60,14
28	Sulawesi Tenggara	96,15	75,43	62,23	96,27	75,54	62,63	96,62	76,49	62,71	97,51	76,64	62,87	97,53	76,95	62,92
29	Gorontalo	97,09	68,71	56,24	97,23	68,89	56,37	97,54	69,15	56,82	98,39	69,33	57,38	98,41	70,28	57,52
30	Sulawesi Barat	95,29	68,92	56,78	95,41	69,10	57,08	95,51	69,40	57,46	95,83	69,43	57,58	95,86	69,36	57,64
31	Maluku	94,34	73,29	63,07	94,50	73,40	63,49	95,50	73,99	63,65	95,80	74,08	63,68	96,21	74,68	64,23
32	Maluku Utara	96,65	75,38	63,20	96,75	75,68	63,47	97,01	76,26	63,52	97,09	76,31	63,88	97,09	76,20	63,95
33	Papua Barat	92,90	68,29	62,40	93,06	68,58	62,62	93,58	68,92	62,74	93,66	69,11	63,11	93,76	69,92	63,15
34	Papua	78,56	54,21	43,22	78,66	54,26	43,27	78,83	56,13	43,48	79,14	57,09	44,31	79,19	57,19	44,32
Indonesia		96,70	77,82	59,71	96,82	77,95	59,95	97,19	78,40	60,37	97,58	78,84	60,67	97,64	79,40	60,84

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Keterangan : APM tahun 2011-2013 dihitung ulang dengan mempertimbangkan perubahan angka proyeksi penduduk tahun 2010-2035

Lampiran 3.q

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PERINGKAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2015-2019

No	Provinsi	2015		2016		2017		2018		2019	
		IPM	Peringkat	IPM	Peringkat	IPM	Peringkat	IPM	Peringkat	IPM	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Aceh	69,45	13	70,00	11	70,60	11	71,19	11	71,90	11
2	Sumatera Utara	69,51	10	70,00	11	70,57	12	71,18	12	71,74	12
3	Sumatera Barat	69,98	9	70,73	9	71,24	9	71,73	9	72,39	9
4	Riau	70,84	6	71,20	6	71,79	6	72,44	6	73,00	6
5	Jambi	68,89	17	69,62	15	69,99	16	70,65	17	71,26	17
6	Sumatera Selatan	67,46	23	68,24	22	68,86	23	69,39	23	70,02	23
7	Bengkulu	68,59	20	69,33	17	69,95	18	70,64	18	71,21	18
8	Lampung	66,95	25	67,65	23	68,25	24	69,02	24	69,57	24
9	Kepulauan Bangka Belitung	69,05	15	69,55	16	69,99	17	70,67	16	71,30	16
10	Kepulauan Riau	73,75	4	73,99	4	74,45	4	74,84	4	75,48	4
11	DKI Jakarta	78,99	1	79,60	1	80,06	1	80,47	1	80,76	1
12	Jawa Barat	69,50	11	70,05	10	70,69	10	71,30	10	72,03	10
13	Jawa Tengah	69,49	12	69,98	12	70,52	13	71,12	13	71,73	13
14	DI Yogyakarta	77,59	2	78,38	2	78,89	2	79,53	2	79,99	2
15	Jawa Timur	68,95	16	69,74	14	70,27	15	70,77	15	71,50	15
16	Banten	70,27	8	70,96	8	71,42	8	71,95	8	72,44	8
17	Bali	73,27	5	73,65	5	74,30	5	74,77	5	75,38	5
18	Nusa Tenggara Barat	65,19	30	65,81	29	66,58	29	67,30	29	68,14	29
19	Nusa Tenggara Timur	62,67	32	63,13	31	63,73	32	64,39	32	65,23	32
20	Kalimantan Barat	65,59	29	65,88	28	66,26	30	66,98	30	67,65	30
21	Kalimantan Tengah	68,53	21	69,13	20	69,79	21	70,42	21	70,91	21
22	Kalimantan Selatan	68,38	22	69,05	21	69,65	22	70,17	22	70,72	22
23	Kalimantan Timur	74,17	3	74,59	3	75,12	3	75,83	3	76,61	3
24	Kalimantan Utara	68,76	18	69,20	19	69,84	20	70,56	20	71,15	20
25	Sulawesi Utara	70,39	7	71,05	7	71,66	7	72,20	7	72,99	7
26	Sulawesi Tengah	66,76	26	67,47	25	68,11	26	68,88	25	69,50	25
27	Sulawesi Selatan	69,15	14	69,76	13	70,34	14	70,90	14	71,66	14
28	Sulawesi Tenggara	68,75	19	69,31	18	69,86	19	70,61	19	71,20	19
29	Gorontalo	65,86	28	66,29	27	67,01	28	67,71	28	68,49	28
30	Sulawesi Barat	62,96	31	63,60	30	64,30	31	65,10	31	65,73	31
31	Maluku	67,05	24	67,60	24	68,19	25	68,87	26	69,45	26
32	Maluku Utara	65,91	27	66,63	26	67,20	27	67,76	27	68,70	27
33	Papua Barat	61,73	33	62,21	32	62,99	33	63,74	33	64,70	33
34	Papua	57,25	34	58,05	33	59,09	34	60,06	34	60,84	34
Indonesia		69,55		70,18		70,81		71,39		71,92	

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020 (update 27 Februari 2020)

jk,

Lampiran 3.r

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KOMPONEN MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2019

No	Provinsi	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp 000)		Capaian		Pertumbuhan
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018-2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	69,64	69,87	14,27	14,30	9,09	9,18	9.186	9.603	71,19	71,90	0,71
2	Sumatera Utara	68,61	68,95	13,14	13,15	9,34	9,45	10.391	10.649	71,18	71,74	0,56
3	Sumatera Barat	69,01	69,31	13,95	14,01	8,76	8,92	10.638	10.925	71,73	72,39	0,66
4	Riau	71,19	71,48	13,11	13,14	8,92	9,03	10.968	11.255	72,44	73,00	0,56
5	Jambi	70,89	71,06	12,90	12,93	8,23	8,45	10.357	10.592	70,65	71,26	0,61
6	Sumatera Selatan	69,41	69,65	12,36	12,39	8,00	8,18	10.652	10.937	69,39	70,02	0,63
7	Bengkulu	68,84	69,21	13,58	13,59	8,61	8,73	10.162	10.409	70,64	71,21	0,57
8	Lampung	70,18	70,51	12,61	12,63	7,82	7,92	9.858	10.114	69,02	69,57	0,55
9	Kepulauan Bangka Belitung	70,18	70,50	11,87	11,94	7,84	7,98	12.666	12.959	70,67	71,30	0,63
10	Kepulauan Riau	69,64	69,80	12,82	12,83	9,81	9,99	13.976	14.466	74,84	75,48	0,64
11	DKI Jakarta	72,67	72,79	12,95	12,97	11,05	11,06	18.128	18.527	80,47	80,76	0,29
12	Jawa Barat	72,66	72,85	12,45	12,48	8,15	8,37	10.790	11.152	71,30	72,03	0,73
13	Jawa Tengah	74,18	74,23	12,63	12,68	7,35	7,53	10.777	11.102	71,12	71,73	0,61
14	DI Yogyakarta	74,82	74,92	15,56	15,58	9,32	9,38	13.946	14.394	79,53	79,99	0,46
15	Jawa Timur	70,97	71,18	13,10	13,16	7,39	7,59	11.380	11.739	70,77	71,50	0,73
16	Banten	69,64	69,84	12,85	12,88	8,62	8,74	11.994	12.267	71,95	72,44	0,49
17	Bali	71,68	71,99	13,23	13,27	8,65	8,84	13.886	14.146	74,77	75,38	0,61
18	Nusa Tenggara Barat	65,87	66,28	13,47	13,48	7,03	7,27	10.284	10.640	67,30	68,14	0,84
19	Nusa Tenggara Timur	66,38	66,85	13,10	13,15	7,30	7,55	7.566	7.769	64,39	65,23	0,84
20	Kalimantan Barat	70,18	70,56	12,55	12,58	7,12	7,31	8.860	9.055	66,98	67,65	0,67
21	Kalimantan Tengah	69,64	69,69	12,55	12,57	8,37	8,51	10.931	11.236	70,42	70,91	0,49
22	Kalimantan Selatan	68,23	68,49	12,50	12,52	8,00	8,20	12.062	12.253	70,17	70,72	0,55
23	Kalimantan Timur	73,96	74,22	13,67	13,69	9,48	9,70	11.917	12.359	75,83	76,61	0,78
24	Kalimantan Utara	72,50	72,54	12,82	12,84	8,87	8,94	8.943	9.343	70,56	71,15	0,59
25	Sulawesi Utara	71,26	71,58	12,68	12,73	9,24	9,43	10.731	11.115	72,20	72,99	0,79
26	Sulawesi Tengah	67,78	68,23	13,13	13,14	8,52	8,75	9.488	9.604	68,88	69,50	0,62
27	Sulawesi Selatan	70,08	70,43	13,34	13,36	8,02	8,26	10.814	11.118	70,90	71,66	0,76
28	Sulawesi Tenggara	70,72	70,97	13,53	13,55	8,69	8,91	9.262	9.436	70,61	71,20	0,59
29	Gorontalo	67,45	67,93	13,03	13,06	7,46	7,69	9.839	10.075	67,71	68,49	0,78
30	Sulawesi Barat	64,58	64,82	12,59	12,62	7,50	7,73	9.051	9.235	65,10	65,73	0,63
31	Maluku	65,59	65,82	13,92	13,94	9,58	9,81	8.721	8.887	68,87	69,45	0,58
32	Maluku Utara	67,80	68,18	13,62	13,63	8,72	9,00	7.980	8.308	67,76	68,70	0,94
33	Papua Barat	65,55	65,90	12,53	12,72	7,27	7,44	7.816	8.125	63,74	64,70	0,96
34	Papua	65,36	65,65	10,83	11,05	6,52	6,65	7.159	7.336	60,06	60,84	0,78
Indonesia		71,20	71,34	12,91	12,95	8,17	8,34	11.059	11.299	71,39	71,92	0,53

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020 (update Februari 2020)

Lampiran 4.a

JUMLAH PUSKESMAS PER PROVINSI
TAHUN 2015 - 2019

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	339	340	341	348	359
2	Sumatera Utara	571	571	571	581	601
3	Sumatera Barat	264	264	269	275	275
4	Riau	212	213	215	216	228
5	Jambi	176	183	186	195	205
6	Sumatera Selatan	322	322	322	332	341
7	Bengkulu	180	180	180	180	179
8	Lampung	291	292	297	302	310
9	Kepulauan Bangka Belitung	62	62	63	64	64
10	Kepulauan Riau	72	73	74	83	86
11	DKI Jakarta	340	340	340	321	315
12	Jawa Barat	1.050	1.050	1.056	1.069	1.072
13	Jawa Tengah	875	875	876	881	878
14	DI Yogyakarta	121	121	121	121	121
15	Jawa Timur	960	960	963	967	968
16	Banten	233	233	233	242	243
17	Bali	120	120	120	120	120
18	Nusa Tenggara Barat	158	158	160	166	169
19	Nusa Tenggara Timur	371	371	372	381	402
20	Kalimantan Barat	238	238	241	244	246
21	Kalimantan Tengah	195	195	196	200	203
22	Kalimantan Selatan	230	230	230	233	235
23	Kalimantan Timur	174	175	179	183	186
24	Kalimantan Utara	49	49	49	56	55
25	Sulawesi Utara	187	188	189	193	195
26	Sulawesi Tengah	189	189	193	202	206
27	Sulawesi Selatan	448	448	451	458	459
28	Sulawesi Tenggara	269	269	274	284	290
29	Gorontalo	93	93	93	93	93
30	Sulawesi Barat	94	94	94	94	95
31	Maluku	199	199	199	208	209
32	Maluku Utara	127	128	129	134	147
33	Papua Barat	151	151	155	159	159
34	Papua	394	393	394	408	420
Indonesia		9.754	9.767	9.825	9.993	10.134

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2020

Lampiran 4.b

**JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP PER PROVINSI
TAHUN 2015 - 2019**

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas Rawat Inap					Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	143	143	143	148	179	196	197	198	200	180
2	Sumatera Utara	164	164	163	175	184	407	407	408	406	417
3	Sumatera Barat	91	91	91	91	108	173	173	178	184	167
4	Riau	79	79	80	81	102	133	134	135	135	126
5	Jambi	68	68	71	74	81	108	115	115	121	124
6	Sumatera Selatan	95	95	95	95	98	227	227	227	237	243
7	Bengkulu	46	46	46	47	52	134	134	134	133	127
8	Lampung	112	112	115	119	136	179	180	182	183	174
9	Kepulauan Bangka Belitung	21	21	21	21	21	41	41	42	43	43
10	Kepulauan Riau	28	28	29	32	36	44	45	45	51	50
11	DKI Jakarta	30	30	30	28	28	310	310	310	293	287
12	Jawa Barat	176	182	185	186	291	874	868	871	883	781
13	Jawa Tengah	320	320	322	361	368	555	555	554	520	510
14	DI Yogyakarta	43	43	43	49	49	78	78	78	72	72
15	Jawa Timur	519	519	520	534	553	441	441	443	433	415
16	Banten	56	56	56	56	82	177	177	177	186	161
17	Bali	35	35	35	38	42	85	85	85	82	78
18	Nusa Tenggara Barat	109	109	110	111	122	49	49	50	55	47
19	Nusa Tenggara Timur	137	137	137	151	163	234	234	235	230	239
20	Kalimantan Barat	95	95	95	118	125	143	143	146	126	121
21	Kalimantan Tengah	73	73	73	75	88	122	122	123	125	115
22	Kalimantan Selatan	46	50	50	50	50	184	180	180	183	185
23	Kalimantan Timur	95	95	96	97	102	79	80	83	86	84
24	Kalimantan Utara	32	32	32	32	27	17	17	17	24	28
25	Sulawesi Utara	92	92	92	92	94	95	96	97	101	101
26	Sulawesi Tengah	79	79	79	84	102	110	110	114	118	104
27	Sulawesi Selatan	227	227	257	269	301	221	221	194	189	158
28	Sulawesi Tenggara	80	82	81	82	93	189	187	193	202	197
29	Gorontalo	23	23	26	28	32	70	70	67	65	61
30	Sulawesi Barat	44	45	45	45	58	50	49	49	49	37
31	Maluku	64	64	64	64	77	135	135	135	144	132
32	Maluku Utara	27	27	27	36	45	100	101	102	98	102
33	Papua Barat	43	44	45	44	44	108	107	110	115	115
34	Papua	104	105	105	110	115	290	288	289	298	305
Indonesia		3.396	3.411	3.459	3.623	4.048	6.358	6.356	6.366	6.370	6.086

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2019

Lampiran 4.c

**RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN
TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kecamatan	Rasio Puskesmas per Kecamatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	359	289	1,24
2	Sumatera Utara	601	450	1,34
3	Sumatera Barat	275	179	1,54
4	Riau	228	169	1,35
5	Jambi	205	141	1,45
6	Sumatera Selatan	341	241	1,41
7	Bengkulu	179	129	1,39
8	Lampung	310	228	1,36
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	47	1,36
10	Kepulauan Riau	86	75	1,15
11	DKI Jakarta	315	44	7,16
12	Jawa Barat	1.072	627	1,71
13	Jawa Tengah	878	576	1,52
14	DI Yogyakarta	121	78	1,55
15	Jawa Timur	968	666	1,45
16	Banten	243	155	1,57
17	Bali	120	57	2,11
18	Nusa Tenggara Barat	169	117	1,44
19	Nusa Tenggara Timur	402	309	1,30
20	Kalimantan Barat	246	174	1,41
21	Kalimantan Tengah	203	136	1,49
22	Kalimantan Selatan	235	153	1,54
23	Kalimantan Timur	186	103	1,81
24	Kalimantan Utara	55	53	1,04
25	Sulawesi Utara	195	171	1,14
26	Sulawesi Tengah	206	175	1,18
27	Sulawesi Selatan	459	311	1,48
28	Sulawesi Tenggara	290	219	1,32
29	Gorontalo	93	77	1,21
30	Sulawesi Barat	95	69	1,38
31	Maluku	209	118	1,77
32	Maluku Utara	147	116	1,27
33	Papua Barat	159	560	0,28
34	Papua	420	218	1,93
Indonesia		10.134	7.230	1,40

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2019;

Jumlah kecamatan berdasarkan Permendagri No. 137 tahun 2017.

Lampiran 4.d

AKREDITASI PUSKESMAS DI INDONESIA
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Puskesmas Terakreditasi	Jumlah Kecamatan dengan Minimal 1 Puskesmas Terakreditasi	Persentase Puskesmas Terakreditasi (%)	Status Akreditasi Puskesmas				Jumlah Puskesmas Belum Terakreditasi
							Dasar	Madya	Utama	Purna	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	359	333	23	275	92,76	100	203	28	2	26
2	Sumatera Utara	601	559	33	406	93,01	236	293	29	1	42
3	Sumatera Barat	275	271	19	165	98,55	61	164	41	5	4
4	Riau	228	214	12	160	93,86	66	120	28	0	14
5	Jambi	205	188	11	129	91,71	54	112	19	3	17
6	Sumatera Selatan	341	333	17	212	97,65	90	196	42	5	8
7	Bengkulu	179	179	10	121	100,00	70	100	9	0	0
8	Lampung	310	296	15	220	95,48	25	208	59	4	14
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	64	7	44	100,00	8	36	19	1	0
10	Kepulauan Riau	86	83	7	66	96,51	20	42	20	1	3
11	DKI Jakarta	315	151	6	42	47,94	11	89	20	31	164
12	Jawa Barat	1.072	1.028	27	620	95,90	179	617	205	27	44
13	Jawa Tengah	878	873	35	571	99,43	97	467	270	39	5
14	DI Yogyakarta	121	121	5	78	100,00	0	43	64	14	0
15	Jawa Timur	968	963	38	660	99,48	72	530	316	45	5
16	Banten	243	231	8	147	95,06	44	138	47	2	12
17	Bali	120	120	9	57	100,00	13	66	31	10	0
18	Nusa Tenggara Barat	169	163	10	115	96,45	34	94	31	4	6
19	Nusa Tenggara Timur	402	367	22	286	91,29	166	180	21	0	35
20	Kalimantan Barat	246	230	14	164	93,50	68	133	24	5	16
21	Kalimantan Tengah	203	194	14	127	95,57	72	100	20	2	9
22	Kalimantan Selatan	235	233	13	150	99,15	73	125	32	3	2
23	Kalimantan Timur	186	182	10	103	97,85	36	102	38	6	4
24	Kalimantan Utara	55	55	5	42	100,00	21	24	9	1	0
25	Sulawesi Utara	195	169	15	125	86,67	76	73	19	1	26
26	Sulawesi Tengah	206	198	13	156	96,12	70	109	19	0	8
27	Sulawesi Selatan	459	454	24	296	98,91	80	235	118	21	5
28	Sulawesi Tenggara	290	263	17	201	90,69	94	140	27	2	27
29	Gorontalo	93	92	6	72	98,92	22	50	17	3	1
30	Sulawesi Barat	95	85	6	64	89,47	18	54	13	0	10
31	Maluku	209	156	11	83	74,64	69	77	10	0	53
32	Maluku Utara	147	113	10	94	76,87	42	64	6	1	34
33	Papua Barat	159	72	13	62	45,28	35	32	5	0	87
34	Papua	420	120	20	99	28,57	55	52	13	0	300
Indonesia		10.134	9.153	505	6.212	90,32	2.177	5.068	1.669	239	981

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2019, per 22 April 2019

Lampiran 4.e

JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI LIMA JENIS TENAGA KESEHATAN
PROMOTIF DAN PREVENTIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2018 - 2019

No	Provinsi	2018		2019	
		Jumlah Puskesmas*	Jumlah Puskesmas Memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan Promotif Preventif	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas Memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan Promotif Preventif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	345	179	359	163
2	Sumatera Utara	570	142	601	191
3	Sumatera Barat	276	133	275	172
4	Riau	232	99	228	95
5	Jambi	207	124	205	95
6	Sumatera Selatan	341	162	341	146
7	Bengkulu	180	72	179	56
8	Lampung	295	84	310	148
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	45	64	59
10	Kepulauan Riau	85	36	86	36
11	DKI Jakarta	343	32	315	43
12	Jawa Barat	1.070	237	1.072	406
13	Jawa Tengah	882	406	878	613
14	DI Yogyakarta	121	92	121	102
15	Jawa Timur	965	469	968	437
16	Banten	237	51	243	80
17	Bali	120	56	120	45
18	Nusa Tenggara Barat	165	113	169	110
19	Nusa Tenggara Timur	376	205	402	179
20	Kalimantan Barat	243	143	246	133
21	Kalimantan Tengah	200	89	203	80
22	Kalimantan Selatan	234	156	235	163
23	Kalimantan Timur	189	123	186	89
24	Kalimantan Utara	56	34	55	30
25	Sulawesi Utara	194	25	195	45
26	Sulawesi Tengah	200	83	206	100
27	Sulawesi Selatan	455	236	459	235
28	Sulawesi Tenggara	283	107	290	127
29	Gorontalo	93	42	93	53
30	Sulawesi Barat	95	61	95	42
31	Maluku	207	32	209	31
32	Maluku Utara	134	57	147	67
33	Papua Barat	158	36	159	41
34	Papua	402	68	420	73
Indonesia		10.017	4.029	10.134	4.485

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

* Puskesmas yang melaporkan data

Lampiran 4.f

JUMLAH PUSKESMAS DENGAN PELAYANAN PENGEMBANGAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar	Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar (%)	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Olahraga pada Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Olahraga pada Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerjanya (%)	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Kesehatan Olahraga bagi Anak Sekolah Dasar	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kesehatan Olahraga bagi Anak Sekolah Dasar (%)	Terbentuknya Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas	
									Sasaran	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	359	247	68,80	265	73,82	196	54,60	53	53
2	Sumatera Utara	601	437	72,71	496	82,53	485	80,70	141	141
3	Sumatera Barat	275	190	69,09	209	76,00	198	72,00	284	284
4	Riau	228	201	88,16	201	88,16	78	34,21	230	230
5	Jambi	205	175	85,37	181	88,29	178	86,83	169	169
6	Sumatera Selatan	341	281	82,40	235	68,91	281	82,40	174	174
7	Bengkulu	179	179	100,00	179	100,00	174	97,21	241	241
8	Lampung	310	264	85,16	257	82,90	214	69,03	190	190
9	Kep. Bangka Belitung	64	64	100,00	64	100,00	64	100,00	88	88
10	Kepulauan Riau	86	80	93,02	83	96,51	83	96,51	202	202
11	DKI Jakarta	315	325	103,17	330	104,76	299	94,92	99	99
12	Jawa Barat	1072	693	64,65	932	86,94	513	47,85	470	470
13	Jawa Tengah	878	712	81,09	688	78,36	876	99,77	789	789
14	DI Yogyakarta	121	121	100,00	121	100,00	121	100,00	107	107
15	Jawa Timur	968	949	98,04	923	95,35	923	95,35	1246	1336
16	Banten	243	237	97,53	235	96,71	194	79,84	194	194
17	Bali	120	107	89,17	118	98,33	91	75,83	29	29
18	Nusa Tenggara Barat	169	162	95,86	160	94,67	89	52,66	322	322
19	Nusa Tenggara Timur	402	284	70,65	272	67,66	205	51,00	300	300
20	Kalimantan Barat	246	195	79,27	185	75,20	237	96,34	209	209
21	Kalimantan Tengah	203	128	63,05	95	46,80	95	46,80	86	86
22	Kalimantan Selatan	235	178	75,74	176	74,89	73	31,06	173	173
23	Kalimantan Timur	186	101	54,30	116	62,37	67	36,02	57	57
24	Kalimantan Utara	55	37	67,27	33	60,00	40	72,73	44	44
25	Sulawesi Utara	195	193	98,97	193	98,97	193	98,97	64	64
26	Sulawesi Tengah	206	192	93,20	165	80,10	146	70,87	136	136
27	Sulawesi Selatan	459	452	98,47	447	97,39	51	11,11	624	624
28	Sulawesi Tenggara	290	254	87,59	259	89,31	286	98,62	36	36
29	Gorontalo	93	93	100,00	93	100,00	93	100,00	46	46
30	Sulawesi Barat	95	94	98,95	84	88,42	71	74,74	163	163
31	Maluku	209	156	74,64	126	60,29	126	60,29	107	107
32	Maluku Utara	147	109	74,15	107	72,79	81	55,10	60	60
33	Papua Barat	159	118	74,21	98	61,64	84	52,83	17	17
34	Papua	420	100	23,81	93	22,14	69	16,43	49	49
Indonesia		10.134	8.108	80,01	8.219	81,10	6.974	68,82	7.199	7.289

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2019

Lampiran 4.g

JUMLAH PUSKESMAS YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan yang Sudah Dilatih				Puskesmas yang melakukan Pembinaan Penyehat Tradisional (HATTRA)
					Dilatih Ramuan	Dilatih Akupunktur	Dilatih Akupresur	Asuhan Mandiri (ASMAN), Pemanfaatan TOGA, dan Akupresur	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	359	212	59,05	21	107	2	107	73
2	Sumatera Utara	601	296	49,25	44	74	0	32	241
3	Sumatera Barat	275	160	58,18	10	88	0	47	74
4	Riau	228	143	62,72	29	111	3	36	18
5	Jambi	205	149	72,68	6	73	3	42	100
6	Sumatera Selatan	341	139	40,76	9	72	0	28	81
7	Bengkulu	179	73	40,78	31	31	0	20	50
8	Lampung	310	271	87,42	14	81	3	38	267
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	64	100,00	1	50	1	27	62
10	Kepulauan Riau	86	74	86,05	40	58	4	39	52
11	DKI Jakarta	315	135	42,86	18	43	4	12	133
12	Jawa Barat	1.072	553	51,59	12	89	3	7	508
13	Jawa Tengah	878	200	22,78	38	142	3	39	40
14	DI Yogyakarta	121	97	80,17	22	52	18	28	54
15	Jawa Timur	968	432	44,63	17	196	10	167	148
16	Banten	243	146	60,08	30	96	7	36	26
17	Bali	120	121	100,83	48	114	2	56	39
18	Nusa Tenggara Barat	169	161	95,27	26	80	0	53	141
19	Nusa Tenggara Timur	402	119	29,60	5	73	0	34	29
20	Kalimantan Barat	246	134	54,47	23	61	0	59	51
21	Kalimantan Tengah	203	81	39,90	21	25	2	19	35
22	Kalimantan Selatan	235	208	88,51	6	15	5	28	198
23	Kalimantan Timur	186	167	89,78	9	41	2	42	151
24	Kalimantan Utara	55	37	67,27	0	32	0	4	14
25	Sulawesi Utara	195	129	66,15	22	77	0	60	21
26	Sulawesi Tengah	206	106	51,46	10	96	0	12	74
27	Sulawesi Selatan	459	188	40,96	10	122	4	21	75
28	Sulawesi Tenggara	290	118	40,69	26	70	1	43	37
29	Gorontalo	93	76	81,72	17	41	1	34	55
30	Sulawesi Barat	95	33	34,74	10	29	1	1	0
31	Maluku	209	148	70,81	23	98	1	37	114
32	Maluku Utara	147	110	74,83	9	42	2	66	90
33	Papua Barat	159	34	21,38	4	24	1	2	17
34	Papua	420	25	5,95	13	15	0	1	0
Indonesia		10.134	5.139	50,71	624	2.418	83	1.277	3.068

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2019

Keterangan: Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih puskesmas bisa lebih dari satu jenis pelatihan

Lampiran 4.h

JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT JENIS, KEPEMILIKAN, DAN PROVINSI
TAHUN 2019

No	Fasilitas Kesehatan	Pemilikan/Pengelola													
		Kemenkes		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kab/Kota		TNI/POLRI		BUMN		Swasta		Jumlah	
		RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Aceh	0	0	1	2	24	0	5	0	2	0	32	3	64	5
2	Sumatera Utara	1	0	2	4	34	0	9	0	10	1	134	22	190	27
3	Sumatera Barat	1	1	3	2	20	0	4	0	2	0	19	26	49	29
4	Riau	0	0	2	1	16	0	4	0	3	1	35	12	60	14
5	Jambi	0	0	1	1	13	0	2	0	0	0	20	3	36	4
6	Sumatera Selatan	2	0	1	4	30	0	4	0	3	0	27	13	67	17
7	Bengkulu	0	0	1	1	12	0	3	0	0	0	6	1	22	2
8	Lampung	0	0	2	1	15	0	2	0	0	0	37	21	56	22
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	1	1	10	0	0	0	0	0	10	3	21	4
10	Kepulauan Riau	0	0	2	0	10	0	3	0	1	0	12	5	28	5
11	DKI Jakarta	3	7	30	1	0	0	9	2	8	1	88	41	138	52
12	Jawa Barat	1	4	3	2	46	2	14	0	4	1	227	57	295	66
13	Jawa Tengah	2	3	4	3	49	1	12	0	3	1	189	37	259	45
14	DI Yogyakarta	1	0	0	2	8	0	3	0	0	1	48	20	60	23
15	Jawa Timur	0	1	8	6	58	0	23	2	5	2	202	77	296	88
16	Banten	1	0	2	0	10	0	3	0	1	0	65	34	82	34
17	Bali	1	0	1	2	14	0	3	0	1	0	38	8	58	10
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	2	2	13	0	2	0	0	0	15	3	32	5
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	1	1	22	0	5	0	0	0	21	2	49	3
20	Kalimantan Barat	0	0	1	2	19	0	5	0	1	0	16	7	42	9
21	Kalimantan Tengah	0	0	1	0	16	1	2	0	0	0	5	1	24	2
22	Kalimantan Selatan	0	0	2	2	15	0	4	0	2	0	14	7	37	9
23	Kalimantan Timur	0	0	3	1	16	1	4	0	1	0	20	9	44	11
24	Kalimantan Utara	0	0	1	0	7	0	1	0	0	0	1	0	10	0
25	Sulawesi Utara	2	0	3	2	15	0	4	0	0	1	17	3	41	6
26	Sulawesi Tengah	0	0	2	0	21	0	3	0	1	0	6	5	33	5
27	Sulawesi Selatan	2	0	3	4	32	0	7	1	1	1	36	24	81	30
28	Sulawesi Tenggara	0	0	1	1	17	0	2	0	1	0	14	0	35	1
29	Gorontalo	0	0	1	0	9	0	0	0	0	0	3	1	13	1
30	Sulawesi Barat	0	0	1	0	6	0	1	0	0	0	3	1	11	1
31	Maluku	1	0	2	1	15	0	4	0	0	0	7	0	29	1
32	Maluku Utara	0	0	2	1	11	0	2	0	0	0	5	0	20	1
33	Papua Barat	0	0	0	0	10	0	5	0	1	0	3	0	19	0
34	Papua	0	0	2	1	27	0	5	0	0	0	9	0	43	1
Indonesia		18	16	92	51	640	5	159	5	51	10	1.384	446	2.344	533

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2020

Lampiran 4.i

AKREDITASI RUMAH SAKIT DI INDONESIA
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Rumah Sakit	Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi	Rumah Sakit Swasta Terakreditasi	TOTAL RS PROVINSI	Total Rumah Sakit Terakreditasi	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)
1	Aceh	69	32	33	65	65	94,20
2	Sumatera Utara	218	45	118	163	163	74,77
3	Sumatera Barat	78	28	37	65	65	83,33
4	Riau	74	21	41	62	62	83,78
5	Jambi	40	16	17	33	33	82,50
6	Sumatera Selatan	84	32	33	65	65	77,38
7	Bengkulu	24	15	6	21	21	87,50
8	Lampung	78	18	47	65	65	83,33
9	Kepulauan Bangka Belitung	25	10	8	18	18	72,00
10	Kepulauan Riau	33	14	15	29	29	87,88
11	DKI Jakarta	190	54	113	167	167	87,89
12	Jawa Barat	361	68	254	322	322	89,20
13	Jawa Tengah	304	75	198	273	273	89,80
14	DI Yogyakarta	83	14	54	68	68	81,93
15	Jawa Timur	384	99	251	350	350	91,15
16	Banten	116	14	82	96	96	82,76
17	Bali	68	21	43	64	64	94,12
18	Nusa Tenggara Barat	37	18	14	32	32	86,49
19	Nusa Tenggara Timur	52	24	21	45	45	86,54
20	Kalimantan Barat	51	25	20	45	45	88,24
21	Kalimantan Tengah	26	19	3	22	22	84,62
22	Kalimantan Selatan	46	22	20	42	42	91,30
23	Kalimantan Timur	55	20	23	43	43	78,18
24	Kalimantan Utara	10	7	1	8	8	80,00
25	Sulawesi Utara	47	22	19	41	41	87,23
26	Sulawesi Tengah	38	20	10	30	30	78,95
27	Sulawesi Selatan	111	46	48	94	94	84,68
28	Sulawesi Tenggara	36	21	9	30	30	83,33
29	Gorontalo	14	8	4	12	12	85,71
30	Sulawesi Barat	12	8	1	9	9	75,00
31	Maluku	30	18	5	23	23	76,67
32	Maluku Utara	21	13	4	17	17	80,95
33	Papua Barat	19	11	3	14	14	73,68
34	Papua	44	26	6	32	32	72,73
Indonesia		2.878	904	1.561	2.465	2.465	85,65

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan (Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan), Kemenkes RI, 2019

Lampiran 4.j

**PERSENTASE RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA KELAS C
YANG MEMILIKI 4 DOKTER SPESIALIS DASAR DAN 3 DOKTER SPESIALIS PENUNJANG
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jumlah Rumah Sakit Kabupaten/Kota Kelas C yang Melaporkan Data	Jumlah RS yang Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	15	7	47
2	Sumatera Utara	21	19	90
3	Sumatera Barat	15	9	60
4	Riau	11	10	91
5	Jambi	9	4	44
6	Sumatera Selatan	9	4	44
7	Bengkulu	7	3	43
8	Lampung	12	9	75
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	3	43
10	Kepulauan Riau	5	3	60
11	DKI Jakarta*	1	1	100
12	Jawa Barat	14	11	79
13	Jawa Tengah	27	20	74
14	DI Yogyakarta	4	3	75
15	Jawa Timur	25	20	80
16	Banten	4	2	50
17	Bali	3	2	67
18	Nusa Tenggara Barat	10	8	80
19	Nusa Tenggara Timur	17	5	29
20	Kalimantan Barat	12	6	50
21	Kalimantan Tengah	12	4	33
22	Kalimantan Selatan	11	8	73
23	Kalimantan Timur	9	5	56
24	Kalimantan Utara	4	3	75
25	Sulawesi Utara	10	5	50
26	Sulawesi Tengah	12	7	58
27	Sulawesi Selatan	22	14	64
28	Sulawesi Tenggara	9	5	56
29	Gorontalo	5	2	40
30	Sulawesi Barat	4	3	75
31	Maluku	5	0	0
32	Maluku Utara	5	2	40
33	Papua Barat	6	2	33
34	Papua	8	7	88
Indonesia		350	216	62

Sumber :

Sistem

Catatan: *tidak ada data

Lampiran 4.k

JUMLAH UNIT TRANSFUSI DARAH MENURUT PROVINSI DAN PENYELENGGARA DI INDONESIA
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah UTD		
		Pemerintah/ Pemerintah Daerah	Palang Merah Indonesia (PMI)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	17	4	21
2	Sumatera Utara	20	8	28
3	Sumatera Barat	13	5	18
4	Riau	8	5	13
5	Jambi	9	1	10
6	Sumatera Selatan	12	5	17
7	Bengkulu	7	3	10
8	Lampung	6	7	13
9	Kepulauan Bangka Belitung	5	3	8
10	Kepulauan Riau	3	3	6
11	DKI Jakarta	1	2	3
12	Jawa Barat	3	23	26
13	Jawa Tengah	0	36	36
14	DI Yogyakarta	1	5	6
15	Jawa Timur	2	37	39
16	Banten	0	7	7
17	Bali	0	10	10
18	Nusa Tenggara Barat	5	3	8
19	Nusa Tenggara Timur	12	6	18
20	Kalimantan Barat	9	4	13
21	Kalimantan Tengah	10	3	13
22	Kalimantan Selatan	10	3	13
23	Kalimantan Timur	3	7	10
24	Kalimantan Utara	1	3	4
25	Sulawesi Utara	4	5	9
26	Sulawesi Tengah	8	5	13
27	Sulawesi Selatan	18	7	25
28	Sulawesi Tenggara	7	2	9
29	Gorontalo	4	3	7
30	Sulawesi Barat	3	1	4
31	Maluku	9	1	10
32	Maluku Utara	7	1	8
33	Papua Barat	8	2	10
34	Papua	9	4	13
Indonesia		234	224	458

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2019

Lampiran 4.1

JUMLAH KLINIK PRATAMA DAN KLINIK UTAMA MENURUT KEPEMILIKAN
DAN PROVINSI TAHUN 2019

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah Klinik Pratama dan Klinik Utama					
		Pemerintah Provinsi		TNI/POLRI		Jumlah	
		Klinik Pratama	Klinik Utama	Klinik Pratama	Klinik Utama	Klinik Pratama	Klinik Utama
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(13)	(14)
1	Aceh	99	3	12	0	111	3
2	Sumatera Utara	959	60	21	0	980	60
3	Sumatera Barat	221	19	8	0	229	19
4	Riau	160	16	5	0	165	16
5	Jambi	137	9	2	0	139	9
6	Sumatera Selatan	236	12	7	0	243	12
7	Bengkulu	59	6	1	0	60	6
8	Lampung	278	6	5	0	283	6
9	Kepulauan Bangka Belitung	57	14	5	0	62	14
10	Kepulauan Riau	216	13	18	0	234	13
11	DKI Jakarta	651	207	40	0	691	207
12	Jawa Barat	180	109	8	0	188	109
13	Jawa Tengah	850	22	30	0	880	22
14	DI Yogyakarta	919	168	15	0	934	168
15	Jawa Timur	793	41	73	0	866	41
16	Banten	731	28	3	0	734	28
17	Bali	152	24	5	0	157	24
18	Nusa Tenggara Barat	98	26	7	0	105	26
19	Nusa Tenggara Timur	95	4	9	0	104	4
20	Kalimantan Barat	91	8	3	0	94	8
21	Kalimantan Tengah	163	14	1	0	164	14
22	Kalimantan Selatan	40	6	4	0	44	6
23	Kalimantan Timur	271	6	3	0	274	6
24	Kalimantan Utara	1	0	3	0	4	0
25	Sulawesi Utara	23	3	8	0	31	3
26	Sulawesi Tengah	50	16	6	0	56	16
27	Sulawesi Selatan	220	67	14	0	234	67
28	Sulawesi Tenggara	59	0	9	0	68	0
29	Gorontalo	2	6	1	0	3	6
30	Sulawesi Barat	4	0	2	0	6	0
31	Maluku	17	3	9	0	26	3
32	Maluku Utara	3	0	3	0	6	0
33	Papua Barat	52	5	16	0	68	5
34	Papua	33	3	5	0	38	3
Indonesia		7.920	924	361	0	8.281	924

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2020

Lampiran 4.m

JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN
DAN PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Pemilikan/Pengelola				
		Kemenkes	Pemerintah Provinsi	pemerintah kabupaten/kota	Swasta	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)
1	Aceh	0	1	7	5	13
2	Sumatera Utara	0	1	3	39	43
3	Sumatera Barat	0	1	6	12	19
4	Riau	0	1	5	6	12
5	Jambi	0	1	5	6	12
6	Sumatera Selatan	1	0	8	11	20
7	Bengkulu	0	1	5	18	24
8	Lampung	0	1	2	3	6
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	1	3	20	24
10	Kepulauan Riau	0	0	0	12	12
11	DKI Jakarta	1	1	0	220	222
12	Jawa Barat	0	1	25	168	194
13	Jawa Tengah	0	1	36	151	188
14	DI Yogyakarta	0	1	4	16	21
15	Jawa Timur	1	0	29	152	182
16	Banten	0	1	8	71	80
17	Bali	0	1	4	20	25
18	Nusa Tenggara Barat	0	1	4	26	31
19	Nusa Tenggara Timur	0	1	5	9	15
20	Kalimantan Barat	0	1	5	12	18
21	Kalimantan Tengah	0	1	7	2	10
22	Kalimantan Selatan	0	1	4	11	16
23	Kalimantan Timur	0	1	5	29	35
24	Kalimantan Utara	0	0	4	0	4
25	Sulawesi Utara	0	1	1	6	8
26	Sulawesi Tengah	0	1	0	1	2
27	Sulawesi Selatan	1	0	10	13	24
28	Sulawesi Tenggara	0	1	5	2	8
29	Gorontalo	0	1	2	4	7
30	Sulawesi Barat	0	1	1	1	3
31	Maluku	0	1	2	1	4
32	Maluku Utara	0	0	1	1	2
33	Papua Barat	0	0	0	2	2
34	Papua	0	1	0	6	7
Indonesia		4	27	206	1.056	1.293

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2020

Lampiran 8.a

JUMLAH RUMAH SAKIT DAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT
MENURUT KELAS RUMAH SAKIT DAN PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Kelas A			Kelas B			Kelas C			Kelas D dan Kelas D Pratama			Belum Ditetapkan Kelas		
		RS		TT	RS		TT	RS		TT	RS		TT	RS		TT
		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Aceh	2	2,90	1.092	10	14,49	2.687	31	44,93	3.378	25	36,23	1.377	1	1,45	42
2	Sumatera Utara	2	0,92	1.248	30	13,82	6.928	120	55,30	11.229	55	25,35	2.407	10	4,61	167
3	Sumatera Barat	2	2,56	1.114	6	7,69	960	50	64,10	4.115	17	21,79	854	3	3,85	-
4	Riau	1	1,35	230	7	9,46	1.799	41	55,41	3.631	24	32,43	1.151	1	1,35	-
5	Jambi	-	-	-	4	10,00	1.041	25	62,50	2.600	11	27,50	397	-	-	-
6	Sumatera Selatan	2	2,38	1.169	8	9,52	1.544	41	48,81	4.359	31	36,90	1.883	2	2,38	41
7	Bengkulu	-	-	-	2	8,33	638	13	54,17	1.491	9	37,50	489	-	-	-
8	Lampung	1	1,28	610	5	6,41	1.152	54	69,23	4.902	18	23,08	976	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	2	8,00	255	15	60,00	1.481	8	32,00	325	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	6	18,18	1.159	19	57,58	1.557	7	21,21	295	1	3,03	37
11	DKI Jakarta	17	8,95	6.580	71	37,37	11.440	72	37,89	4.542	28	14,74	1.091	2	1,05	11
12	Jawa Barat	7	1,94	2.381	70	19,39	16.666	206	57,06	19.596	73	20,22	4.073	5	1,39	326
13	Jawa Tengah	9	2,96	4.173	34	11,18	11.371	135	44,41	16.994	126	41,45	8.383	-	-	-
14	DI Yogyakarta	3	3,61	1.106	12	14,46	2.435	31	37,35	1.638	35	42,17	1.399	2	2,41	-
15	Jawa Timur	5	1,30	4.134	58	15,10	14.474	183	47,66	17.007	134	34,90	8.367	4	1,04	87
16	Banten	-	-	-	23	19,83	5.027	82	70,69	5.621	8	6,90	524	3	2,59	50
17	Bali	3	4,41	1.199	11	16,18	2.015	41	60,29	3.106	13	19,12	593	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	3	8,11	804	19	51,35	2.064	15	40,54	899	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	2	3,85	457	26	50,00	2.759	23	44,23	1.295	1	1,92	20
20	Kalimantan Barat	-	-	-	5	9,80	1.629	31	60,78	3.255	14	27,45	613	1	1,96	10
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	3	11,54	845	17	65,38	1.419	6	23,08	292	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	2	4,35	930	6	13,04	992	29	63,04	2.818	9	19,57	390	-	-	-
23	Kalimantan Timur	1	1,82	190	7	12,73	2.351	28	50,91	2.657	18	32,73	893	1	1,82	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	1	10,00	392	4	40,00	545	5	50,00	148	-	-	-
25	Sulawesi Utara	1	2,13	942	3	6,38	454	25	53,19	2.980	16	34,04	971	2	4,26	31
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	3	7,89	1.027	25	65,79	3.007	10	26,32	375	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	2	1,80	1.530	25	22,52	5.272	63	56,76	6.528	18	16,22	892	3	2,70	11
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	2	5,56	664	14	38,89	1.467	17	47,22	631	3	8,33	60
29	Gorontalo	-	-	-	2	14,29	671	6	42,86	821	6	42,86	509	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	6	50,00	1.022	4	33,33	244	2	16,67	-
31	Maluku	-	-	-	4	13,33	596	7	23,33	712	18	60,00	818	1	3,33	-
32	Maluku Utara	-	-	-	1	4,76	243	5	23,81	540	12	57,14	576	3	14,29	59
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	6	31,58	755	11	57,89	599	2	10,53	48
34	Papua	-	-	-	2	4,55	484	14	31,82	2.386	22	50,00	989	6	13,64	196
Indonesia		60	2,09	28.628	428	14,88	98.472	1.484	51,58	142.982	846	29,41	45.718	59	2,05	1.196

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020 per 2 Januari 2020

Ket: 1. Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS
2. Estimasi Jumlah Penduduk 2019; Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2019 (BPS di Olah Pusdatin)
3. Rasio tempat tidur per 1.000 penduduk

Lampiran 8.b

JUMLAH RUMAH SAKIT DAN RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2018 - 2019

No	Provinsi	2018				2019			
		Estimasi Jumlah Penduduk 2018	Total			Estimasi Jumlah Penduduk 2019	Total		
			RS	TT			RS	TT	
				Jumlah	Rasio			Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	5.281.314	67	8.449	1,60	5.371.532	69	8.576	1,60
2	Sumatera Utara	14.415.391	211	22.205	1,54	14.562.549	217	21.979	1,51
3	Sumatera Barat	5.382.077	77	7.040	1,31	5.441.197	78	7.043	1,29
4	Riau	6.814.909	73	6.652	0,98	6.971.745	74	6.811	0,98
5	Jambi	3.570.272	41	4.086	1,14	3.624.579	40	4.038	1,11
6	Sumatera Selatan	8.370.320	78	9.045	1,08	8.470.683	84	8.996	1,06
7	Bengkulu	1.963.300	23	2.346	1,19	1.991.838	24	2.618	1,31
8	Lampung	8.370.485	77	7.582	0,91	8.447.737	78	7.640	0,90
9	Kep. Bangka Belitung	1.459.873	24	1.929	1,32	1.488.792	25	2.061	1,38
10	Kepulauan Riau	2.136.521	33	3.083	1,44	2.189.653	33	3.048	1,39
11	DKI Jakarta	10.467.629	203	24.352	2,33	10.557.810	190	23.664	2,24
12	Jawa Barat	48.683.861	350	41.572	0,85	49.316.712	361	43.042	0,87
13	Jawa Tengah	34.490.835	290	39.657	1,15	34.718.204	304	40.921	1,18
14	DI Yogyakarta	3.802.872	82	6.905	1,82	3.842.932	83	6.578	1,71
15	Jawa Timur	39.500.851	381	42.266	1,07	39.698.631	384	44.069	1,11
16	Banten	12.689.736	112	11.038	0,87	12.927.316	116	11.222	0,87
17	Bali	4.292.154	65	6.595	1,54	4.336.923	68	6.913	1,59
18	Nusa Tenggara Barat	5.013.687	36	3.556	0,71	5.070.385	37	3.767	0,74
19	Nusa Tenggara Timur	5.371.519	50	4.365	0,81	5.456.203	52	4.531	0,83
20	Kalimantan Barat	5.001.664	48	5.153	1,03	5.069.127	51	5.507	1,09
21	Kalimantan Tengah	2.660.209	26	2.425	0,91	2.714.859	26	2.556	0,94
22	Kalimantan Selatan	4.182.695	44	4.781	1,14	4.244.096	46	5.130	1,21
23	Kalimantan Timur	3.648.835	54	6.700	1,84	3.721.389	55	6.091	1,64
24	Kalimantan Utara	716.407	10	1.008	1,41	742.245	10	1.085	1,46
25	Sulawesi Utara	2.484.392	46	5.219	2,10	2.506.981	47	5.378	2,15
26	Sulawesi Tengah	3.010.443	37	4.111	1,37	3.054.023	38	4.409	1,44
27	Sulawesi Selatan	8.771.970	106	13.389	1,53	8.851.240	111	14.233	1,61
28	Sulawesi Tenggara	2.653.654	34	2.871	1,08	2.704.737	36	2.822	1,04
29	Gorontalo	1.185.492	14	1.864	1,57	1.202.631	14	2.001	1,66
30	Sulawesi Barat	1.355.554	12	1.231	0,91	1.380.256	12	1.266	0,92
31	Maluku	1.773.776	28	2.471	1,39	1.802.870	30	2.126	1,18
32	Maluku Utara	1.232.632	20	1.355	1,10	1.255.771	21	1.418	1,13
33	Papua Barat	937.458	18	1.292	1,38	959.617	19	1.402	1,46
34	Papua	3.322.526	43	4.117	1,24	3.379.302	44	4.055	1,20
Indonesia		265.015.313	2.813	310.710	1,17	268.074.565	2.877	316.996	1,18

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020 per 2 Januari 2020

Ket : 1. Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS

2. Estimasi Jumlah Penduduk 2018 dan 2019: Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2018 dan 2019 (BPS di Olah Pusdatin)

3. Rasio tempat tidur per 1.000 penduduk

Lampiran 9.a

**PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN ESENSIAL
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Melapor	Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat & Vaksin Esensial*	
				Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	359	350	348	99,43
2	Sumatera Utara	601	569	545	95,78
3	Sumatera Barat	275	272	268	98,53
4	Riau	228	214	207	96,73
5	Jambi	205	183	183	100,00
6	Sumatera Selatan	341	280	253	90,36
7	Bengkulu	179	179	167	93,30
8	Lampung	310	301	283	94,02
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	64	64	100,00
10	Kepulauan Riau	86	87	86	98,85
11	DKI Jakarta	315	335	330	98,51
12	Jawa Barat	1.072	1.058	1.014	95,84
13	Jawa Tengah	878	760	729	95,92
14	D.I. Yogyakarta	121	121	121	100,00
15	Jawa Timur	968	689	685	99,42
16	Banten	243	234	229	97,86
17	Bali	120	120	120	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	169	170	170	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	402	399	329	82,46
20	Kalimantan Barat	246	245	244	99,59
21	Kalimantan Tengah	203	189	172	91,01
22	Kalimantan Selatan	235	235	235	100,00
23	Kalimantan Timur	186	187	186	99,47
24	Kalimantan Utara	55	50	50	100,00
25	Sulawesi Utara	195	188	188	100,00
26	Sulawesi Tengah	206	207	196	94,69
27	Sulawesi Selatan	459	448	446	99,55
28	Sulawesi Tenggara	290	283	259	91,52
29	Gorontalo	93	90	87	96,67
30	Sulawesi Barat	95	94	94	100,00
31	Maluku	209	199	199	100,00
32	Maluku Utara	147	128	127	99,22
33	Papua Barat	159	160	153	95,63
34	Papua	420	392	366	93,37
Indonesia		10.134	9.480	9.133	96,34

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2019, per 08 Maret 2019

Keterangan: *) Isi dengan jumlah puskesmas yang memiliki obat dan vaksin esensial ≥80%

Lampiran 9.b

**JUMLAH SARANA PRODUKSI
BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019**

No	Provinsi	Industri Farmasi	Industri Obat Tradisional/Ekstrak Bahan Alam (IOT/IEBA)	Usaha Kecil/Mikro Obat Tradisional (UKOT/UMOT)	Produksi Alat Kesehatan	Produksi Perbekalan Kesehatan dan Rumah Tangga (PKRT)	Industri Kosmetika
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	0	0	5	1	0	2
2	Sumatera Utara	3	1	101	11	16	26
3	Sumatera Barat	1	0	18	0	1	5
4	Riau	0	0	2	0	0	2
5	Jambi	0	0	2	0	2	1
6	Sumatera Selatan	2	1	3	2	2	1
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	0	13	0	4	4
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	3	8	2	2
11	DKI Jakarta	77	18	531	65	82	97
12	Jawa Barat	70	53	571	87	91	153
13	Jawa Tengah	20	21	240	45	39	76
14	DI Yogyakarta	1	1	45	5	4	21
15	Jawa Timur	33	17	209	47	62	132
16	Banten	18	20	79	42	58	96
17	Bali	0	1	31	1	1	41
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	12	1	0	3
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	6	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	5	1	0	3
21	Kalimantan Tengah	0	0	3	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	2	6	0	1	8
23	Kalimantan Timur	0	0	1	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	1	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	4	0	1	0
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	0	1	37	1	2	9
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	1	2	0	0	1
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	25	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0
34	Papua	0	0	0	0	0	0
Indonesia		225	137	1.955	317	368	683

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2019, per 08 Maret 2019

Note: Jumlah sarana final akan didapat setelah Pertemuan Pemutakhiran Data Nasional tentatif diawal bulan Maret

Lampiran 9.c

**JUMLAH SARANA DISTRIBUSI
BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019**

No	Provinsi	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Apotek	Toko Alat Kesehatan	Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	29	447	596	33
2	Sumatera Utara	82	1.406	1.552	97
3	Sumatera Barat	40	588	273	56
4	Riau	46	759	489	70
5	Jambi	32	407	177	30
6	Sumatera Selatan	57	591	192	76
7	Bengkulu	16	266	115	15
8	Lampung	51	672	138	75
9	Kepulauan Bangka Belitung	14	182	96	8
10	Kepulauan Riau	36	292	269	43
11	DKI Jakarta	295	2.230	555	1.103
12	Jawa Barat	299	4.855	1.787	391
13	Jawa Tengah	269	3.812	380	205
14	DI Yogyakarta	45	602	42	61
15	Jawa Timur	273	4.146	503	303
16	Banten	85	1.634	448	230
17	Bali	53	888	97	67
18	Nusa Tenggara Barat	27	489	114	23
19	Nusa Tenggara Timur	31	397	84	35
20	Kalimantan Barat	35	365	340	36
21	Kalimantan Tengah	7	299	132	8
22	Kalimantan Selatan	39	444	562	43
23	Kalimantan Timur	50	712	227	58
24	Kalimantan Utara	3	94	40	2
25	Sulawesi Utara	44	288	96	33
26	Sulawesi Tengah	22	440	214	24
27	Sulawesi Selatan	103	1.327	270	124
28	Sulawesi Tenggara	30	454	70	24
29	Gorontalo	14	169	32	7
30	Sulawesi Barat	0	132	57	0
31	Maluku	13	180	86	18
32	Maluku Utara	6	150	21	7
33	Papua Barat	16	168	18	4
34	Papua	49	375	54	72
Indonesia		2.211	30.260	10.126	3.381

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2019, per 08 Maret 2019

Note: Jumlah sarana final akan didapat setelah Pertemuan Pemutakhiran Data Nasional tentatif diawal bulan Maret

Lampiran 9.d

**PERSENTASE INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA (IFK) YANG MELAKUKAN MANAJEMEN
PENGELOLAAN OBAT DAN VAKSIN SESUAI STANDAR TRIWULAN IV TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jumlah IFK	IFK Sesuai Standar	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	21	91,30
2	Sumatera Utara	33	29	87,88
3	Sumatera Barat	19	19	100,00
4	Riau	12	10	83,33
5	Jambi	11	11	100,00
6	Sumatera Selatan	17	16	94,12
7	Bengkulu	10	9	90,00
8	Lampung	15	13	86,67
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,00
10	Kepulauan Riau	7	7	100,00
11	DKI Jakarta	6	3	50,00
12	Jawa Barat	27	25	92,59
13	Jawa Tengah	35	35	100,00
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00
15	Jawa Timur	38	38	100,00
16	Banten	8	8	100,00
17	Bali	9	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	9	90,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	20	90,91
20	Kalimantan Barat	14	13	92,86
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,00
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,00
23	Kalimantan Timur	10	10	100,00
24	Kalimantan Utara	5	5	100,00
25	Sulawesi Utara	15	12	80,00
26	Sulawesi Tengah	13	12	92,31
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,00
28	Sulawesi Tenggara	17	17	100,00
29	Gorontalo	6	6	100,00
30	Sulawesi Barat	6	6	100,00
31	Maluku	11	9	81,82
32	Maluku Utara	10	7	70,00
33	Papua Barat	13	7	53,85
34	Papua	29	24	82,76
Indonesia		514	473	92,02

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2019, per 08 Maret 2019

Lampiran 10

JUMLAH POSYANDU DAN POSBINDU PTM MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019

NO	Provinsi	Jumlah Balita*	Strata Posyandu**										Posyandu Aktif**		Jumlah Posbindu PTM***
			Pratama		Madya		Purnama		Mandiri		Jumlah Posyandu	Rasio Posyandu Per 100 Balita			
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Aceh	567.911	694	9,5	4.289	58,5	2.053	28,0	296	4,0	7.332	1,29	2.349	32,0	4.156
2	Sumatera Utara	1.501.845	1.223	7,9	6.385	41,1	7.534	48,5	401	2,6	15.543	1,03	7.935	51,1	1.699
3	Sumatera Barat	537.142	131	1,7	1.389	18,4	4.116	54,4	1.932	25,5	7.568	1,41	6.048	79,9	2.211
4	Riau	743.920	508	9,2	1.921	34,8	2.164	39,2	926	16,8	5.519	0,74	3.090	56,0	911
5	Jambi	320.370	245	7,0	1.414	40,6	1.359	39,0	469	13,4	3.487	1,09	1.828	52,4	825
6	Sumatera Selatan	791.707	170	2,6	1.617	24,4	4.214	63,7	615	9,3	6.616	0,84	4.829	73,0	2.492
7	Bengkulu	181.828	51	2,5	360	17,7	1.300	63,8	328	16,1	2.039	1,12	1.628	79,8	948
8	Lampung	755.887	80	1,0	1.470	18,1	4.553	56,1	2.007	24,7	8.110	1,07	6.560	80,9	2.236
9	Kep. Bangka Belitung	134.333	33	3,0	270	24,6	650	59,3	144	13,1	1.097	0,82	794	72,4	589
10	Kepulauan Riau	215.244	76	5,3	500	34,8	648	45,1	213	14,8	1.437	0,67	861	59,9	474
11	DKI Jakarta	888.844	10	0,2	187	4,2	1.606	35,8	2.681	59,8	4.484	0,50	4.287	95,6	1.711
12	Jawa Barat	4.326.811	957	1,9	17.780	34,7	20.761	40,5	11.808	23,0	51.306	1,19	32.569	63,5	6.111
13	Jawa Tengah	2.626.652	1.812	3,7	11.361	23,0	19.295	39,1	16.942	34,3	49.410	1,88	36.237	73,3	6.934
14	D.I. Yogyakarta	277.779	212	3,7	763	13,3	1.678	29,3	3.071	53,7	5.724	2,06	4.749	83,0	1.134
15	Jawa Timur	2.817.658	1.812	3,7	11.361	23,0	19.295	39,1	16.942	34,3	49.410	1,75	36.237	73,3	9.618
16	Banten	1.211.246	1.071	10,1	4.663	44,0	4.186	39,5	680	6,4	10.600	0,88	4.866	45,9	1.409
17	Bali	322.445	4	0,1	1.260	26,2	3.376	70,2	169	3,5	4.809	1,49	3.545	73,7	667
18	Nusa Tenggara Barat	495.439	92	1,3	2.758	37,7	3.924	53,6	543	7,4	7.317	1,48	4.467	61,0	1.519
19	Nusa Tenggara Timur	644.647	1.068	10,5	4.014	39,3	4.724	46,2	412	4,0	10.218	1,59	5.136	50,3	1.804
20	Kalimantan Barat	491.513	917	17,9	2.567	50,1	1.423	27,8	216	4,2	5.123	1,04	1.639	32,0	1.344
21	Kalimantan Tengah	254.902	582	22,6	807	31,4	1.127	43,8	57	2,2	2.573	1,01	1.184	46,0	891
22	Kalimantan Selatan	396.321	389	9,9	2.239	56,9	1.216	30,9	92	2,3	3.936	0,99	1.308	33,2	1.545
23	Kalimantan Timur	349.803	598	13,3	1.974	43,9	1.406	31,3	518	11,5	4.496	1,29	1.924	42,8	652
24	Kalimantan Utara	75.676	115	15,6	337	45,8	179	24,3	105	14,3	736	0,97	284	38,6	87
25	Sulawesi Utara	203.874	467	33,6	807	58,1	108	7,8	8	0,6	1.390	0,68	116	8,3	467
26	Sulawesi Tengah	299.228	330	9,9	1.085	32,6	1.774	53,3	141	4,2	3.330	1,11	1.915	57,5	670
27	Sulawesi Selatan	824.715	668	6,7	2.938	29,4	5.041	50,5	1.337	13,4	9.984	1,21	6.378	63,9	3.507
28	Sulawesi Tenggara	300.182	599	19,1	1.168	37,2	1.118	35,6	252	8,0	3.137	1,05	1.370	43,7	676
29	Gorontalo	113.200	73	5,8	618	48,7	556	43,8	22	1,7	1.269	1,12	578	45,5	546
30	Sulawesi Barat	151.664	30	18,6	83	51,6	44	27,3	4	2,5	161	0,11	48	29,8	660
31	Maluku	206.863	793	35,2	856	38,0	578	25,7	26	1,2	2.253	1,09	604	26,8	341
32	Maluku Utara	139.223	141	8,9	543	34,3	692	43,7	206	13,0	1.582	1,14	898	56,8	533
33	Papua Barat	100.798	1.260	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1.260	1,25	0	0,0	272
34	Papua	335.253	527	15,0	400	11,4	2.594	73,7	0	0,0	3.521	1,05	2.594	73,7	165
Indonesia		23.604.923	17.738	6,0	90.184	30,4	125.292	42,2	63.563	21,4	296.777	1,26	188.855	63,6	59.804

Sumber: * Estimasi Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2020

** Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, 2020

*** Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, 2020

Ket: Posyandu aktif: posyandu purnama + mandiri

PTM: Penyakit Tidak Menular

Lampiran 11.a

**JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2019**

No	Provinsi	Dokter Spesialis ^a			Dokter Umum			Total			Dokter Gigi Spesialis			Dokter Gigi			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Aceh	356	342	698	465	1.050	1.515	821	1.392	2.213	5	13	18	65	300	365	70	313	383
2	Sumatera Utara	905	545	1.450	953	2.018	2.971	1.858	2.563	4.421	18	25	43	128	621	749	146	646	792
3	Sumatera Barat	404	351	755	317	924	1.241	721	1.275	1.996	7	11	18	64	378	442	71	389	460
4	Riau	349	220	569	453	984	1.437	802	1.204	2.006	6	8	14	65	358	423	71	366	437
5	Jambi	198	120	318	270	588	858	468	708	1.176	10	8	18	47	182	229	57	190	247
6	Sumatera Selatan	366	298	664	352	866	1.218	718	1.164	1.882	11	14	25	65	213	278	76	227	303
7	Bengkulu	97	78	175	150	288	438	247	366	613	2	5	7	22	105	127	24	110	134
8	Lampung	396	184	580	440	863	1.303	836	1.047	1.883	4	11	15	35	157	192	39	168	207
9	Kep. Bangka Belitung	99	63	162	201	317	518	300	380	680	5	5	10	32	69	101	37	74	111
10	Kepulauan Riau	212	118	330	206	396	602	418	514	932	16	9	25	37	120	157	53	129	182
11	DKI Jakarta	2.785	2.299	5.084	1.940	4.341	6.281	4.725	6.640	11.365	204	443	647	369	1.506	1.875	573	1.949	2.522
12	Jawa Barat	1.833	1.198	3.031	2.167	3.573	5.740	4.000	4.771	8.771	72	116	188	267	1.195	1.462	339	1.311	1.650
13	Jawa Tengah	2.224	1.358	3.582	2.432	3.733	6.165	4.656	5.091	9.747	63	106	169	308	1.081	1.389	371	1.187	1.558
14	DI Yogyakarta	542	458	1.000	481	933	1.414	1.023	1.391	2.414	49	83	132	82	329	411	131	412	543
15	Jawa Timur	2.726	1.793	4.519	2.573	3.710	6.283	5.299	5.503	10.802	126	200	326	414	1.492	1.906	540	1.692	2.232
16	Banten	616	496	1.112	724	1.290	2.014	1.340	1.786	3.126	19	41	60	72	474	546	91	515	606
17	Bali	737	393	1.130	736	785	1.521	1.473	1.178	2.651	17	16	33	138	363	501	155	379	534
18	Nusa Tenggara Barat	191	144	335	346	493	839	537	637	1.174	3	11	14	33	129	162	36	140	176
19	Nusa Tenggara Timur	64	71	135	218	381	599	282	452	734	1	0	1	28	111	139	29	111	140
20	Kalimantan Barat	162	90	252	303	387	690	465	477	942	5	8	13	38	98	136	43	106	149
21	Kalimantan Tengah	125	94	219	224	322	546	349	416	765	4	6	10	24	77	101	28	83	111
22	Kalimantan Selatan	286	161	447	264	528	792	550	689	1.239	11	15	26	70	163	233	81	178	259
23	Kalimantan Timur	278	187	465	298	583	881	576	770	1.346	11	24	35	62	199	261	73	223	296
24	Kalimantan Utara	63	38	101	107	141	248	170	179	349	2	3	5	14	32	46	16	35	51
25	Sulawesi Utara	226	176	402	303	635	938	529	811	1.340	1	5	6	38	89	127	39	94	133
26	Sulawesi Tengah	108	134	242	181	314	495	289	448	737	1	3	4	32	104	136	33	107	140
27	Sulawesi Selatan	490	588	1.078	430	1.029	1.459	920	1.617	2.537	22	55	77	118	568	686	140	623	763
28	Sulawesi Tenggara	100	87	187	192	361	553	292	448	740	0	4	4	37	140	177	37	144	181
29	Gorontalo	68	56	124	94	165	259	162	221	383	1	1	2	12	50	62	13	51	64
30	Sulawesi Barat	42	41	83	76	149	225	118	190	308	2	4	6	17	70	87	19	74	93
31	Maluku	49	40	89	90	224	314	139	264	403	1	1	2	12	40	52	13	41	54
32	Maluku Utara	45	36	81	93	150	243	138	186	324	3	1	4	13	35	48	16	36	52
33	Papua Barat	50	33	83	86	133	219	136	166	302	1	0	1	10	29	39	11	29	40
34	Papua	76	55	131	225	354	579	301	409	710	1	1	2	19	57	76	20	58	78
Indonesia		17.268	12.345	29.613	18.390	33.008	51.398	35.658	45.353	81.011	704	1.256	1.960	2.787	10.934	13.721	3.491	12.190	15.681

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Keterangan : a) Jumlah termasuk S3;

b) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali;

c) Fasilitas Kesehatan terdiri dari, puskesmas, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

Lampiran 11.b

**JUMLAH TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2019**

No	Provinsi	Dokter Spesialis ^a			Dokter Umum			Total			Dokter Gigi Spesialis			Dokter Gigi			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Aceh	0	0	0	225	607	832	225	607	832	0	1	1	46	237	283	46	238	284
2	Sumatera Utara	9	4	13	432	1.157	1.589	441	1.161	1.602	0	3	3	82	490	572	82	493	575
3	Sumatera Barat	2	3	5	110	444	554	112	447	559	0	1	1	36	282	318	36	283	319
4	Riau	1	0	1	205	554	759	206	554	760	0	0	0	42	261	303	42	261	303
5	Jambi	0	1	1	104	266	370	104	267	371	0	0	0	27	116	143	27	116	143
6	Sumatera Selatan	1	8	9	138	436	574	139	444	583	0	1	1	43	125	168	43	126	169
7	Bengkulu	0	0	0	79	147	226	79	147	226	0	0	0	12	60	72	12	60	72
8	Lampung	0	0	0	206	472	678	206	472	678	0	1	1	14	113	127	14	114	128
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	68	123	191	68	123	191	0	0	0	22	44	66	22	44	66
10	Kepulauan Riau	2	0	2	86	226	312	88	226	314	0	0	0	21	75	96	21	75	96
11	DKI Jakarta	0	0	0	370	1.410	1.780	370	1.410	1.780	0	0	0	82	416	498	82	416	498
12	Jawa Barat	1	2	3	752	1.637	2.389	753	1.639	2.392	0	0	0	134	729	863	134	729	863
13	Jawa Tengah	1	0	1	711	1.311	2.022	712	1.311	2.023	1	4	5	144	626	770	145	630	775
14	DI Yogyakarta	0	0	0	107	319	426	107	319	426	0	2	2	15	156	171	15	158	173
15	Jawa Timur	0	1	1	721	1.466	2.187	721	1.467	2.188	0	3	3	197	862	1.059	197	865	1.062
16	Banten	3	4	7	160	472	632	163	476	639	2	0	2	38	264	302	40	264	304
17	Bali	0	0	0	213	249	462	213	249	462	0	0	0	77	196	273	77	196	273
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	137	218	355	137	218	355	0	0	0	25	88	113	25	88	113
19	Nusa Tenggara Timur	0	1	1	125	229	354	125	230	355	0	0	0	25	84	109	25	84	109
20	Kalimantan Barat	1	0	1	165	215	380	166	215	381	0	1	1	19	71	90	19	72	91
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	107	186	293	107	186	293	0	0	0	15	62	77	15	62	77
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	120	308	428	120	308	428	1	1	2	40	107	147	41	108	149
23	Kalimantan Timur	0	0	0	118	283	401	118	283	401	0	0	0	41	140	181	41	140	181
24	Kalimantan Utara	0	0	0	40	58	98	40	58	98	0	0	0	12	23	35	12	23	35
25	Sulawesi Utara	1	1	2	130	359	489	131	360	491	0	0	0	21	47	68	21	47	68
26	Sulawesi Tengah	0	2	2	93	165	258	93	167	260	0	0	0	24	72	96	24	72	96
27	Sulawesi Selatan	0	4	4	189	610	799	189	614	803	0	1	1	74	402	476	74	403	477
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	93	229	322	93	229	322	0	0	0	24	104	128	24	104	128
29	Gorontalo	0	0	0	32	81	113	32	81	113	0	0	0	8	39	47	8	39	47
30	Sulawesi Barat	0	0	0	39	92	131	39	92	131	0	0	0	12	56	68	12	56	68
31	Maluku	0	0	0	45	132	177	45	132	177	0	0	0	7	27	34	7	27	34
32	Maluku Utara	0	1	1	45	74	119	45	75	120	0	0	0	8	30	38	8	30	38
33	Papua Barat	0	0	0	36	60	96	36	60	96	0	0	0	3	14	17	3	14	17
34	Papua	0	1	1	106	192	298	106	193	299	0	0	0	10	34	44	10	34	44
Indonesia		22	33	55	6.307	14.787	21.094	6.329	14.820	21.149	4	19	23	1.400	6.452	7.852	1.404	6.471	7.875

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Keterangan : a) Jumlah termasuk S3;

b) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

Lampiran 11.c

JUMLAH TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Dokter Spesialis ^a			Dokter Umum			Total			Dokter Gigi Spesialis			Dokter Gigi			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Aceh	356	342	698	244	474	718	600	816	1.416	5	13	18	23	71	94	28	84	112
2	Sumatera Utara	911	553	1.464	535	864	1.399	1.446	1.417	2.863	18	26	44	45	143	188	63	169	232
3	Sumatera Barat	404	347	751	201	462	663	605	809	1.414	7	10	17	23	93	116	30	103	133
4	Riau	347	220	567	246	419	665	593	639	1.232	6	8	14	26	95	121	32	103	135
5	Jambi	193	117	310	125	253	378	318	370	688	10	8	18	15	58	73	25	66	91
6	Sumatera Selatan	366	295	661	216	438	654	582	733	1.315	11	13	24	21	90	111	32	103	135
7	Bengkulu	97	78	175	65	139	204	162	217	379	2	5	7	6	37	43	8	42	50
8	Lampung	396	184	580	239	405	644	635	589	1.224	4	10	14	22	50	72	26	60	86
9	Kep. Bangka Belitung	96	64	160	111	163	274	207	227	434	5	5	10	9	23	32	14	28	42
10	Kepulauan Riau	208	117	325	110	145	255	318	262	580	14	9	23	14	37	51	28	46	74
11	DKI Jakarta	2.751	2.269	5.020	958	1.789	2.747	3.709	4.058	7.767	195	419	614	124	492	616	319	911	1.230
12	Jawa Barat	1.802	1.170	2.972	1.088	1.484	2.572	2.890	2.654	5.544	71	114	185	93	368	461	164	482	646
13	Jawa Tengah	2.206	1.333	3.539	1.270	1.605	2.875	3.476	2.938	6.414	60	98	158	129	337	466	189	435	624
14	DI Yogyakarta	543	459	1.002	301	488	789	844	947	1.791	46	73	119	46	99	145	92	172	264
15	Jawa Timur	2.652	1.733	4.385	1.451	1.757	3.208	4.103	3.490	7.593	121	190	311	154	407	561	275	597	872
16	Banten	621	494	1.115	423	576	999	1.044	1.070	2.114	19	41	60	21	141	162	40	182	222
17	Bali	715	379	1.094	398	433	831	1.113	812	1.925	17	15	32	48	125	173	65	140	205
18	Nusa Tenggara Barat	189	142	331	199	263	462	388	405	793	3	11	14	6	37	43	9	48	57
19	Nusa Tenggara Timur	64	70	134	89	155	244	153	225	378	1	0	1	3	26	29	4	26	30
20	Kalimantan Barat	160	91	251	134	185	319	294	276	570	5	7	12	18	28	46	23	35	58
21	Kalimantan Tengah	127	96	223	112	131	243	239	227	466	4	6	10	10	17	27	14	23	37
22	Kalimantan Selatan	285	158	443	139	209	348	424	367	791	10	15	25	27	47	74	37	62	99
23	Kalimantan Timur	279	186	465	168	273	441	447	459	906	11	24	35	21	51	72	32	75	107
24	Kalimantan Utara	62	38	100	68	83	151	130	121	251	2	3	5	2	8	10	4	11	15
25	Sulawesi Utara	225	176	401	165	278	443	390	454	844	1	6	7	19	48	67	20	54	74
26	Sulawesi Tengah	106	131	237	87	148	235	193	279	472	1	3	4	9	33	42	10	36	46
27	Sulawesi Selatan	488	582	1.070	230	423	653	718	1.005	1.723	22	54	76	37	160	197	59	214	273
28	Sulawesi Tenggara	100	89	189	105	137	242	205	226	431	0	4	4	13	37	50	13	41	54
29	Gorontalo	66	56	122	57	77	134	123	133	256	1	1	2	5	11	16	6	12	18
30	Sulawesi Barat	42	41	83	39	58	97	81	99	180	2	4	6	5	16	21	7	20	27
31	Maluku	49	39	88	42	87	129	91	126	217	1	1	2	6	12	18	7	13	20
32	Maluku Utara	44	36	80	51	77	128	95	113	208	3	1	4	5	5	10	8	6	14
33	Papua Barat	48	32	80	53	70	123	101	102	203	1	0	1	7	15	22	8	15	23
34	Papua	76	54	130	119	164	283	195	218	413	1	1	2	10	25	35	11	26	37
Indonesia		17.074	12.171	29.245	9.838	14.712	24.550	26.912	26.883	53.795	680	1.198	1.878	1.022	3.242	4.264	1.702	4.440	6.142

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Keterangan : a) Jumlah termasuk S3;

b) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

Lampiran 11.d

**JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019**

No	Provinsi	Dokter Spesialis Dasar				Dokter Spesialis Penunjang					Spesialis Lain	Dokter Gigi Spesialis	Total
		Spesialis Penyakit Dalam	Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Spesialis Anak	Spesialis Bedah	Spesialis Radiologi	Spesialis Anestesi	Spesialis Patologi Klinik	Spesialis Patologi Anatomi	Spesialis Rehabilitasi Medik			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	119	78	86	56	24	51	33	6	5	250	18	726
2	Sumatera Utara	226	201	189	111	42	91	78	27	5	559	49	1.578
3	Sumatera Barat	106	84	83	74	21	52	47	17	2	311	18	815
4	Riau	90	87	77	57	24	36	26	13	1	211	16	638
5	Jambi	67	58	37	36	12	24	18	8	1	115	19	395
6	Sumatera Selatan	131	107	91	81	28	45	16	23	6	250	29	807
7	Bengkulu	34	31	21	27	8	11	10	3	0	45	8	198
8	Lampung	73	98	66	61	34	46	32	10	1	225	15	661
9	Kepulauan Bangka Belitung	23	26	23	20	9	10	10	4	0	57	13	195
10	Kepulauan Riau	38	48	35	34	17	23	16	9	1	134	27	382
11	DKI Jakarta	649	625	540	238	241	396	165	88	44	2.493	695	6.174
12	Jawa Barat	415	431	388	261	163	245	115	32	34	1.149	206	3.439
13	Jawa Tengah	561	469	407	322	191	279	119	41	29	1.452	187	4.057
14	DI Yogyakarta	139	114	132	75	59	70	45	16	5	452	162	1.269
15	Jawa Timur	567	581	438	312	226	299	184	81	33	2.082	353	5.156
16	Banten	141	165	142	85	57	96	48	11	7	451	66	1.269
17	Bali	149	178	143	93	47	79	22	23	3	467	37	1.241
18	Nusa Tenggara Barat	42	52	35	31	18	26	12	3	1	144	14	378
19	Nusa Tenggara Timur	27	31	18	19	7	18	13	0	1	21	1	156
20	Kalimantan Barat	33	45	33	31	14	17	11	3	2	81	15	285
21	Kalimantan Tengah	33	36	23	26	11	21	16	3	2	74	10	255
22	Kalimantan Selatan	63	59	48	36	19	28	24	6	6	188	29	506
23	Kalimantan Timur	72	65	47	39	27	45	20	9	5	179	37	545
24	Kalimantan Utara	14	12	14	7	6	7	6	2	2	33	5	108
25	Sulawesi Utara	95	59	57	37	13	29	9	1	3	128	7	438
26	Sulawesi Tengah	38	30	25	26	14	17	10	2	0	123	4	289
27	Sulawesi Selatan	148	133	92	99	73	74	63	23	2	439	83	1.229
28	Sulawesi Tenggara	31	27	23	17	18	15	9	2	1	68	4	215
29	Gorontalo	27	11	18	13	6	9	6	2	0	42	2	136
30	Sulawesi Barat	11	12	8	12	4	6	4	0	0	29	7	93
31	Maluku	12	13	6	9	6	5	10	2	1	29	3	96
32	Maluku Utara	21	15	8	14	3	9	6	0	0	19	9	104
33	Papua Barat	20	16	12	14	8	5	2	0	0	17	1	95
34	Papua	12	27	20	14	4	8	10	0	2	37	2	136
Indonesia		4.227	4.024	3.385	2.387	1.454	2.192	1.215	470	205	12.354	2.151	34.064

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 11.e

KECUKUPAN DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, PERAWAT DAN BIDAN DI PUSKESMAS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Dokter			Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Dokter Gigi			Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Perawat			Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Bidan		
		Cukup	Kurang	Lebih	Cukup	Kurang	Lebih	Cukup	Kurang	Lebih	Cukup	Kurang	Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	26,55	14,97	58,47	54,24	32,77	12,99	4,52	12,15	83,33	1,41	3,95	94,63
2	Sumatera Utara	22,50	15,17	62,33	35,67	38,00	26,33	4,67	16,67	78,67	2,17	2,17	95,67
3	Sumatera Barat	39,57	11,51	48,92	69,78	10,43	19,78	12,95	19,78	67,27	1,44	1,44	97,12
4	Riau	14,59	9,87	75,54	53,65	14,16	32,19	6,01	5,58	88,41	3,43	1,29	95,28
5	Jambi	37,56	20,98	41,46	58,05	36,59	5,37	6,34	15,61	78,05	1,95	2,44	95,61
6	Sumatera Selatan	38,42	21,11	40,47	40,76	54,25	4,99	3,23	7,04	89,74	1,17	1,76	97,07
7	Bengkulu	46,93	25,70	27,37	34,08	62,57	3,35	7,82	11,17	81,01	1,12	1,12	97,77
8	Lampung	36,04	9,74	54,22	24,03	67,86	8,12	3,25	5,19	91,56	0,65	0,00	99,35
9	Kep. Bangka Belitung	21,88	6,25	71,88	71,88	14,06	14,06	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
10	Kepulauan Riau	24,14	10,34	65,52	47,13	25,29	27,59	2,30	6,90	90,80	1,15	1,15	97,70
11	DKI Jakarta	10,71	0,30	88,99	76,79	4,17	19,05	3,87	77,98	18,15	10,12	68,45	21,43
12	Jawa Barat	26,91	5,44	67,65	52,90	34,38	12,72	10,23	19,63	70,14	4,52	4,24	91,24
13	Jawa Tengah	28,16	6,84	64,99	71,84	20,41	7,75	8,89	12,77	78,34	1,48	4,68	93,84
14	DI Yogyakarta	9,92	0,83	89,26	60,33	1,65	38,02	19,01	14,88	66,12	4,13	12,40	83,47
15	Jawa Timur	38,57	14,17	47,26	66,29	13,65	20,06	4,24	3,72	92,04	1,65	1,03	97,31
16	Banten	22,31	6,61	71,07	39,26	21,90	38,84	11,16	15,70	73,14	2,07	1,65	96,28
17	Bali	11,67	1,67	86,67	29,17	3,33	67,50	3,33	1,67	95,00	0,00	0,00	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	35,50	21,30	43,20	60,36	36,09	3,55	0,59	4,14	95,27	2,96	3,55	93,49
19	Nusa Tenggara Timur	36,53	49,74	13,73	24,61	73,06	2,33	4,66	15,28	80,05	4,66	11,66	83,68
20	Kalimantan Barat	42,04	24,49	33,47	34,29	64,08	1,63	2,86	12,24	84,90	4,90	7,76	87,35
21	Kalimantan Tengah	35,47	33,99	30,54	29,56	66,50	3,94	2,46	0,99	96,55	0,49	2,46	97,04
22	Kalimantan Selatan	40,08	11,81	48,10	57,81	40,08	2,11	3,80	3,80	92,41	2,11	1,69	96,20
23	Kalimantan Timur	30,11	26,88	43,01	52,69	27,42	19,89	2,15	13,44	84,41	3,23	10,22	86,56
24	Kalimantan Utara	37,50	33,93	28,57	37,50	50,00	12,50	3,57	7,14	89,29	1,79	8,93	89,29
25	Sulawesi Utara	17,77	26,40	55,84	27,41	69,04	3,55	5,58	13,71	80,71	9,14	31,98	58,88
26	Sulawesi Tengah	40,29	36,89	22,82	39,81	56,31	3,88	0,49	6,80	92,72	0,00	0,97	99,03
27	Sulawesi Selatan	42,08	22,99	34,92	59,87	19,74	20,39	6,29	11,50	82,21	7,81	8,46	83,73
28	Sulawesi Tenggara	49,13	35,19	15,68	40,77	56,79	2,44	5,92	24,04	70,03	4,88	9,76	85,37
29	Gorontalo	49,46	26,88	23,66	49,46	49,46	1,08	6,45	9,68	83,87	3,23	1,08	95,70
30	Sulawesi Barat	43,16	33,68	23,16	58,95	34,74	6,32	7,37	23,16	69,47	6,32	7,37	86,32
31	Maluku	36,02	51,66	12,32	15,17	83,89	0,95	13,74	19,43	66,82	10,43	45,50	44,08
32	Maluku Utara	35,97	48,20	15,83	24,46	74,10	1,44	7,91	30,22	61,87	6,47	5,76	87,77
33	Papua Barat	26,53	63,27	10,20	8,16	89,80	2,04	4,08	30,61	65,31	12,93	41,50	45,58
34	Papua	26,11	58,22	15,67	10,70	87,99	1,31	8,88	38,12	53,00	8,62	53,26	38,12
Indonesia		31,61	19,97	48,42	48,11	38,80	13,09	6,32	15,79	77,90	3,69	9,96	86,34

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 11.f

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR*
MENURUT JENIS TENAGA DAN PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/ Kota Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar	Jumlah Tenaga Kesehatan																Tenaga Penunjang Kesehatan	Total SDM Kesehatan
			Dokter Spesialis	Dokter	Dokter Gigi Spesialis	Dokter Gigi	Tenaga Psikologi Klinis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keterampilan Fisik	Tenaga Keteknisian Medis	Tenaga Teknuk Biomedika	Tenaga Kesehatan Tradisional	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Aceh	3	36	162	2	49	2	880	1.197	141	287	118	116	18	124	108	0	3.240	511	3.751
2	Sumatera Utara	5	39	172	0	42	2	1.900	1.959	148	214	49	109	21	59	96	0	4.810	646	5.456
3	Sumatera Barat	3	51	120	0	48	2	901	932	145	93	46	83	12	113	117	0	2.663	1.035	3.698
4	Riau	6	178	573	2	151	2	3.374	3.264	487	283	99	198	64	206	391	1	9.273	3.023	12.296
5	Sumatera Selatan	2	21	104	0	22	2	1.030	1.021	116	71	43	71	10	53	64	0	2.628	648	3.276
6	Bengkulu	1	6	23	0	3	1	301	464	43	56	17	36	2	4	34	0	990	180	1.170
7	Lampung	2	16	56	1	3	0	485	762	52	47	25	35	3	32	48	0	1.565	344	1.909
8	Kepulauan Riau	5	258	476	13	124	4	2.837	1.479	440	168	152	148	48	198	313	0	6.658	2.721	9.379
9	Jawa Timur	4	113	346	12	114	2	3.462	2.851	274	160	103	205	11	114	266	0	8.033	3.102	11.135
10	Banten	2	68	238	4	59	0	1.600	1.653	189	128	41	60	4	27	67	0	4.138	1.051	5.189
11	Nusa Tenggara Barat	8	131	546	8	115	11	5.660	3.879	573	366	408	515	77	430	612	0	13.331	4.299	17.630
12	Nusa Tenggara Timur	19	118	522	1	122	5	6.563	4.766	724	708	593	677	82	655	705	3	16.244	3.742	19.986
13	Kalimantan Barat	9	107	383	5	65	1	4.442	2.880	443	298	280	333	37	326	416	0	10.016	2.561	12.577
14	Kalimantan Tengah	1	6	23	1	2	1	392	254	36	21	11	28	4	15	58	0	852	335	1.187
15	Kalimantan Selatan	1	16	32	0	7	0	386	320	65	25	43	81	2	34	54	0	1.065	328	1.393
16	Kalimantan Timur	2	17	92	3	19	0	777	390	106	66	45	43	9	25	78	0	1.670	813	2.483
17	Kalimantan Utara	2	31	94	2	27	0	862	547	139	112	33	60	9	47	82	0	2.045	735	2.780
18	Sulawesi Utara	2	21	62	1	5	0	806	187	53	36	72	61	6	26	21	0	1.357	320	1.677
19	Sulawesi Tengah	9	86	267	0	78	8	3.907	3.307	564	900	315	250	27	157	246	0	10.112	2.245	12.357
20	Sulawesi Selatan	1	17	38	0	23	3	313	304	94	80	33	45	2	26	25	0	1.003	159	1.162
21	Sulawesi Tenggara	3	24	92	0	29	1	1.041	895	151	200	80	137	12	68	76	0	2.806	543	3.349
22	Gorontalo	3	22	81	0	23	0	852	617	144	245	82	157	4	23	66	0	2.316	771	3.087
23	Sulawesi Barat	2	35	82	2	34	0	501	405	101	103	45	37	3	28	49	0	1.425	224	1.649
24	Maluku	8	42	183	0	31	2	2.899	1.369	176	325	296	322	14	49	133	0	5.841	857	6.698
25	Maluku Utara	6	26	98	2	21	1	1.081	1.064	153	344	70	148	15	26	154	0	3.203	570	3.773
26	Papua Barat	7	24	66	0	9	0	1.230	616	87	103	39	86	5	21	59	0	2.345	611	2.956
27	Papua	27	102	452	1	57	3	4.270	1.850	444	392	228	286	23	97	461	66	8.732	3.049	11.781
Indonesia		143	1.611	5.383	60	1.282	53	52.752	39.232	6.088	5.831	3.366	4.327	524	2.983	4.799	70	128.361	35.423	163.784

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020
*berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 dan Surat Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS no 2421/Dt.7.2/04/2015

Lampiran 11.g

**JUMLAH DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI
MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2019**

No	Provinsi	Dokter	Dokter Spesialis	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	3.871	704	648	34	5.257
2	Sumatera Utara	11.191	2.520	2.053	146	15.910
3	Sumatera Barat	3.623	955	987	38	5.603
4	Riau	4.426	756	874	44	6.100
5	Jambi	1.949	317	289	15	2.570
6	Sumatera Selatan	3.788	1.070	638	38	5.534
7	Bengkulu	966	149	150	8	1.273
8	Lampung	2.862	500	302	18	3.682
9	Kepulauan Bangka Belitung	532	142	124	12	810
10	Kepulauan Riau	1.172	291	290	17	1.770
11	DKI Jakarta	19.660	7.613	5.867	1.127	34.267
12	Jawa Barat	22.083	5.383	4.986	692	33.144
13	Jawa Tengah	13.277	3.976	2.350	229	19.832
14	DI Yogyakarta	4.223	1.501	1.094	308	7.126
15	Jawa Timur	16.810	5.627	4.891	858	28.186
16	Banten	7.129	1.643	2.043	205	11.020
17	Bali	4.513	1.582	1.134	64	7.293
18	Nusa Tenggara Barat	1.486	296	230	17	2.029
19	Nusa Tenggara Timur	1.013	191	223	5	1.432
20	Kalimantan Barat	1.444	313	235	20	2.012
21	Kalimantan Tengah	881	198	143	12	1.234
22	Kalimantan Selatan	1.548	455	364	23	2.390
23	Kalimantan Timur	2.141	619	520	50	3.330
24	Kalimantan Utara	268	77	77	8	430
25	Sulawesi Utara	2.968	638	278	11	3.895
26	Sulawesi Tengah	1.011	209	156	4	1.380
27	Sulawesi Selatan	5.242	1.834	1.519	144	8.739
28	Sulawesi Tenggara	756	169	225	5	1.155
29	Gorontalo	334	106	56	3	499
30	Sulawesi Barat	171	47	77	7	302
31	Maluku	535	97	84	6	722
32	Maluku Utara	268	53	53	6	380
33	Papua Barat	340	75	52	2	469
34	Papua	1.145	214	123	8	1.490
Indonesia		143.626	40.320	33.135	4.184	221.265

Sumber: Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, 2020

Lampiran 11.h

JUMLAH PESERTA PENUGASAN KHUSUS RESIDEN DOKTER SPESIALIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2017- 2019

No	Provinsi	Jumlah Residen		
		2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	25	18	15
2	Sumatera Utara	58	43	34
3	Sumatera Barat	9	12	16
4	Riau	37	24	12
5	Jambi	8	10	5
6	Sumatera Selatan	22	22	8
7	Bengkulu	20	9	4
8	Lampung	7	11	6
9	Kepulauan Bangka Belitung	8	8	8
10	Kepulauan Riau	9	3	8
11	DKI Jakarta	0	1	0
12	Jawa Barat	44	52	27
13	Jawa Tengah	19	7	13
14	DI Yogyakarta	1	1	1
15	Jawa Timur	26	11	14
16	Banten	13	6	6
17	Bali	4	5	12
18	Nusa Tenggara Barat	12	14	13
19	Nusa Tenggara Timur	24	21	14
20	Kalimantan Barat	15	11	4
21	Kalimantan Tengah	22	20	8
22	Kalimantan Selatan	17	20	11
23	Kalimantan Timur	8	5	5
24	Kalimantan Utara	13	11	7
25	Sulawesi Utara	11	3	4
26	Sulawesi Tengah	24	15	14
27	Sulawesi Selatan	26	14	10
28	Sulawesi Tenggara	27	24	6
29	Gorontalo	12	7	3
30	Sulawesi Barat	6	7	2
31	Maluku	25	5	7
32	Maluku Utara	17	23	15
33	Papua Barat	19	17	12
34	Papua	31	30	15
Indonesia		619	490	339

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 11.i

**JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN NUSANTARA SEHAT BERBASIS TIM
BATCH XII-XIV (PERIODE I-III TAHUN 2019)**

No	Provinsi	Batch XII (Periode I Tahun 2019)		Batch XIII (Periode II Tahun 2019)		Batch XIV (Periode III Tahun 2019)	
		Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	1	7	4	9	2	5
2	Sumatera Utara	2	7	3	4	1	4
3	Sumatera Barat	0	0	1	1	0	0
4	Riau	0	0	1	4	0	0
5	Jambi	0	0	3	3	0	0
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	1	1	3	5	0	0
8	Lampung	0	0	0	0	0	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0
11	Jawa Barat	0	0	1	7	0	0
12	Jawa Timur	0	0	0	0	0	0
13	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0
14	Nusa Tenggara Timur	2	3	4	7	4	6
15	Kalimantan Barat	2	2	0	0	3	5
16	Kalimantan Tengah	2	2	0	0	1	1
17	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0
18	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0
19	Kalimantan Utara	0	0	0	0	2	3
20	Sulawesi Utara	1	1	0	0	3	6
21	Sulawesi Tengah	4	11	1	1	1	2
22	Sulawesi Selatan	0	0	2	3	0	0
23	Sulawesi Tenggara	4	5	4	9	2	5
24	Gorontalo	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Barat	1	1	1	1	0	0
26	Maluku	2	5	3	6	2	6
27	Maluku Utara	1	1	3	5	1	2
28	Papua Barat	1	1	0	0	2	8
29	Papua	1	3	4	5	0	0
Indonesia		25	50	38	70	24	53

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 11.j

**JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA TIM NUSANTARA SEHAT (BATCH XII SAMPAI DENGAN BATCH XIV/ PERIODE I SAMPAI DENGAN III TAHUN 2019)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jumlah Tenaga									Total
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	0	0	20	16	13	17	11	21	21	119
2	Sumatera Utara	0	0	15	13	14	11	8	14	15	90
3	Sumatera Barat	1	0	0	1	0	1	1	1	0	5
4	Riau	1	0	4	3	3	4	3	4	1	23
5	Jambi	1	1	3	2	2	2	2	3	2	18
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	1	6	6	4	6	3	5	3	34
8	Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Jawa Barat	0	0	3	4	6	6	5	7	6	37
12	Jawa Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Nusa Tenggara Timur	4	0	16	13	12	14	5	14	14	92
15	Kalimantan Barat	0	0	7	6	6	4	2	7	7	39
16	Kalimantan Tengah	1	1	3	2	2	2	3	1	3	18
17	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kalimantan Utara	0	0	2	3	3	3	2	1	3	17
20	Sulawesi Utara	2	0	7	4	7	3	5	7	7	42
21	Sulawesi Tengah	3	2	14	11	9	3	11	12	13	78
22	Sulawesi Selatan	0	1	2	3	1	3	2	3	2	17
23	Sulawesi Tenggara	3	1	17	16	10	16	11	18	17	109
24	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Barat	1	0	2	2	1	1	0	2	1	10
26	Maluku	3	0	14	15	15	13	4	16	17	97
27	Maluku Utara	1	1	8	7	5	7	4	8	7	48
28	Papua Barat	1	0	9	8	7	8	4	8	8	53
29	Papua	2	0	8	8	4	7	3	8	4	44
Indonesia		24	8	160	143	124	131	89	160	151	990

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 11.k

JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN NUSANTARA SEHAT INDIVIDU
PERIODE I-X TAHUN 2019 (BATCH XIII s/d XX)

No	Provinsi	Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V		Periode VI		Periode VII		Periode VIII		Periode IX		Periode X	
		Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(11)	(12)	(13)	(14)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	2	4	6	25	2	3	1	5	4	9	1	1	5	15	10	65	17	63	4	18
2	Sumatera Utara	2	10	1	1	2	3	2	5	4	18	5	14	8	13	4	11	4	18	5	15
3	Sumatera Barat	3	3	0	0	5	16	0	0	4	8	1	2	1	2	10	44	11	65	8	16
4	Riau	1	2	2	2	5	12	0	0	1	2	2	2	1	1	3	11	4	17	3	9
5	Jambi	0	0	0	0	5	18	0	0	3	6	1	1	2	3	4	24	4	18	3	5
6	Sumatera Selatan	2	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	14	6	22	4	12
7	Bengkulu	4	5	1	3	3	4	0	0	1	1	1	1	4	14	0	0	0	1	0	0
8	Lampung	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	2	12	2	10
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	5
10	Kepulauan Riau	2	2	2	3	3	5	0	0	1	1	0	0	0	0	2	4	3	5	3	7
11	Jawa Barat	1	7	1	3	1	7	0	0	0	0	0	0	2	13	0	0	1	5	0	1
12	Jawa Tengah	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	1	18	1	6
13	Jawa Timur	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	3	16	1	4
14	Nusa Tenggara Barat	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	2	3	1	8	1	6	1	3
15	Nusa Tenggara Timur	4	7	3	11	4	24	1	2	5	36	8	23	4	12	3	9	6	14	1	1
16	Kalimantan Barat	2	12	2	8	1	5	1	1	2	5	3	15	2	13	1	3	5	12	1	3
17	Kalimantan Tengah	4	14	2	2	4	7	1	1	4	8	3	9	3	4	1	1	4	5	0	0
18	Kalimantan Selatan	1	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13	4	8	1	4
19	Kalimantan Timur	1	1	0	1	0	0	0	0	2	7	1	3	2	12	1	2	1	2	0	0
20	Kalimantan Utara	1	4	0	0	1	4	0	0	0	0	2	6	2	7	1	1	1	2	1	1
21	Sulawesi Utara	1	1	0	0	1	6	1	1	1	1	2	4	1	1	5	12	8	33	5	24
22	Sulawesi Tengah	8	13	8	13	10	40	1	6	6	8	10	30	5	25	2	9	7	40	4	21
23	Sulawesi Selatan	4	11	1	2	1	2	0	0	1	4	1	2	2	3	2	19	3	15	2	3
24	Sulawesi Tenggara	9	58	8	35	7	34	1	1	5	17	6	24	6	37	1	3	8	38	4	11
25	Gorontalo	1	1	0	1	1	3	0	0	2	3	3	12	1	3	2	4	6	27	4	13
26	Sulawesi Barat	3	4	3	5	3	14	0	0	3	7	3	7	3	7	0	0	0	0	4	6
27	Maluku	1	4	1	2	3	10	1	2	1	2	3	13	1	5	0	0	2	5	2	7
28	Maluku Utara	3	5	0	0	2	14	0	0	4	15	4	10	5	22	6	10	6	36	4	8
29	Papua Barat	1	1	2	4	2	8	0	0	0	0	2	3	1	2	1	2	2	6	2	5
30	Papua	0	0	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	4	1	4	1	2
Indonesia		64	181	45	125	71	245	11	26	56	161	63	184	65	219	75	303	123	515	74	220

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 11.1

**JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA NUSANTARA SEHAT INDIVIDU (PERIODE I-X TAHUN 2019 / BATCH XIII s/d XX)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jumlah Tenaga									Total
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	32	48	90	15	19	17	37	65	48	371
2	Sumatera Utara	19	8	18	26	22	8	29	39	21	190
3	Sumatera Barat	22	10	49	32	25	47	23	38	21	267
4	Riau	5	7	6	0	10	5	14	26	16	89
5	Jambi	16	14	4	3	14	14	9	32	16	122
6	Sumatera Selatan	2	0	2	0	7	7	12	22	16	68
7	Bengkulu	6	4	12	0	4	0	9	6	5	46
8	Lampung	1	0	6	2	12	4	10	20	8	63
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	3	5	1	1	3	3	5	21
10	Kepulauan Riau	5	0	9	1	3	6	2	9	3	38
11	Jawa Barat	10	11	0	0	4	3	3	11	10	52
12	Jawa Tengah	2	2	10	0	17	1	0	9	15	56
13	Jawa Timur	1	3	6	5	4	6	0	11	3	39
14	Nusa Tenggara Barat	1	1	5	12	0	6	3	3	4	35
15	Nusa Tenggara Timur	23	8	29	28	30	22	10	37	25	212
16	Kalimantan Barat	14	1	12	4	14	16	8	13	19	101
17	Kalimantan Tengah	8	1	4	10	6	3	11	10	15	68
18	Kalimantan Selatan	4	0	4	5	9	3	4	1	3	33
19	Kalimantan Timur	2	0	0	1	9	3	9	12	7	43
20	Kalimantan Utara	2	0	0	0	1	0	7	12	5	27
21	Sulawesi Utara	3	7	20	33	23	24	14	21	33	178
22	Sulawesi Tengah	26	9	50	57	23	3	28	62	67	325
23	Sulawesi Selatan	9	3	19	32	7	5	3	11	6	95
24	Sulawesi Tenggara	46	22	186	26	48	18	40	43	76	505
25	Gorontalo	5	7	11	0	6	4	8	8	34	83
26	Sulawesi Barat	14	7	15	20	3	6	7	1	5	78
27	Maluku	11	0	12	19	6	2	3	7	7	67
28	Maluku Utara	9	3	39	19	28	12	33	23	39	205
29	Papua Barat	0	1	14	13	7	8	14	6	7	70
30	Papua	0	0	9	3	6	1	2	3	3	27
Indonesia		298	177	644	371	368	255	355	564	542	3574

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 11.m

**JUMLAH DOKTER PESERTA INTERNSHIP
MENURUT BULAN PEMBERANGKATAN DAN PROVINSI TAHUN 2019**

No	Provinsi	Pemberangkatan				Jumlah
		Februari	Mei - Juni	September - Oktober	November - Desember	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	-	106	110	100	316
2	Sumatera Utara	177	78	181	104	540
3	Sumatera Barat	83	72	57	161	373
4	Riau	76	73	57	103	309
5	Jambi	84	44	36	67	231
6	Sumatera Selatan	105	41	133	144	423
7	Bengkulu	130	33	0	68	231
8	Lampung	18	83	71	78	250
9	Kepulauan Bangka Belitung	41	0	30	108	179
10	Kepulauan Riau	18	59	57	74	208
11	DKI Jakarta	168	131	167	125	591
12	Jawa Barat	307	185	415	300	1.207
13	Jawa Tengah	119	250	471	441	1.281
14	DI Yogyakarta	36	54	69	137	296
15	Jawa Timur	714	221	418	464	1.817
16	Banten	121	40	154	78	393
17	Bali	135	75	113	218	541
18	Nusa Tenggara Barat	34	28	37	94	193
19	Nusa Tenggara Timur	115	24	89	72	300
20	Kalimantan Barat	55	31	68	29	183
21	Kalimantan Tengah	36	11	20	26	93
22	Kalimantan Selatan	61	30	45	81	217
23	Kalimantan Timur	75	52	74	122	323
24	Kalimantan Utara	17	0	32	20	69
25	Sulawesi Utara	72	35	44	40	191
26	Sulawesi Tengah	54	57	40	15	166
27	Sulawesi Selatan	119	106	89	158	472
28	Sulawesi Tenggara	46	29	48	53	176
29	Gorontalo	39	27	0	50	116
30	Sulawesi Barat	18	17	0	20	55
31	Maluku	53	23	28	9	113
32	Maluku Utara	11	8	15	31	65
33	Papua Barat	43	14	0	6	63
34	Papua	31	20	39	48	138
Indonesia		3.211	2.057	3.207	3.644	12.119

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 11.n

JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS (PGDS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Spesialis Anak		Spesialis Obstetri dan Ginekologi		Spesialis Penyakit Dalam		Spesialis Bedah		Spesialis Anestesi		Total
		Tubel	Mandiri	Tubel	Mandiri	Tubel	Mandiri	Tubel	Mandiri	Tubel	Mandiri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	1	0	2	0	0	0	7	0	2	0	12
2	Sumatera Utara	4	0	2	5	1	1	5	4	0	0	22
3	Sumatera Barat	2	1	0	5	1	2	0	2	1	2	16
4	Riau	0	0	1	1	2	4	2	1	0	0	11
5	Jambi	1	0	1	0	3	2	1	2	3	1	14
6	Sumatera Selatan	0	4	8	2	0	1	3	2	5	4	29
7	Bengkulu	0	4	2	2	1	2	2		1	1	15
8	Lampung	1	3	3	2	3	0	6	1	1	0	20
9	Kep. Bangka Belitung	1	0	1	2	0	0	1	1	0	0	6
10	Kepulauan Riau	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1	5
11	DKI Jakarta	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3
12	Jawa Barat	7	5	5	5	3	9	5	2	1	1	43
13	Jawa Tengah	2	3	1	4	3	2	6	1	0	0	22
14	DI Yogyakarta	1	1	1	0	1	1	2	1	0	0	8
15	Jawa Timur	2	7	3	7	5	12	1	2	2	3	44
16	Banten	0	0	0	0	1	0	2	0	1	2	6
17	Bali	4	2	2	2	0	2	4	1	0	1	18
18	Nusa Tenggara Barat	5	5	1	3	1	3	2	2	1	2	25
19	Nusa Tenggara Timur	2	1	1	5	6	7	4	3	3	1	33
20	Kalimantan Barat	2	2	0	2	3	2	3	1	1	2	18
21	Kalimantan Tengah	3	4	4	6	3	3	0	1	1	1	26
22	Kalimantan Selatan	1	1	4	0	4	2	2	0	0	0	14
23	Kalimantan Timur	4	1	2	1	3	0	4	3	1	1	20
24	Kalimantan Utara	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6
25	Sulawesi Utara	1	2	0	2	0	2	2	2	0	2	13
26	Sulawesi Tengah	2	6	1	5	0	6	1	3	1	1	26
27	Sulawesi Selatan	5	1	1	1	1	2	5	2	4	0	22
28	Sulawesi Tenggara	0	2	2	1	1	3	3	1	1	2	16
29	Gorontalo	1	1	1	1	1	0	0	2	0	0	7
30	Sulawesi Barat	1	1	1	1	0	1	0	0	2	1	8
31	Maluku	2	1	1	2	3	4	2	0	3	1	19
32	Maluku Utara	0	1	0	1	1	1	1	0	2	0	7
33	Papua Barat	1	2	0	1	1	0	0	1	1	0	7
34	Papua	4	0	3	1	3	2	2	3	1	0	19
35	TNI/POLRI	2	0	5	0	8	0	9	0	1	0	25
Indonesia		63	62	61	72	65	77	89	46	40	30	605

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 12.a

**JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2019**

No	Provinsi	Puskesmas				Rumah Sakit				Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya				Total			
		Perawat ^a			Bidan	Perawat ^a			Bidan	Perawat ^a			Bidan	Perawat ^a			Bidan
		L	P	L+P		L	P	L+P		L	P	L+P		L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Aceh	1.161	2.994	4.155	8.309	1.720	3.488	5.208	2.237	40	54	94	74	2.921	6.536	9.457	10.620
2	Sumatera Utara	1.691	4.702	6.393	14.338	1.871	5.758	7.629	2.925	90	128	218	118	3.652	10.588	14.240	17.381
3	Sumatera Barat	380	2.078	2.458	4.809	897	4.601	5.498	1.040	20	95	115	81	1.297	6.774	8.071	5.930
4	Riau	901	2.568	3.469	4.907	1.010	3.145	4.155	1.583	39	51	90	104	1.950	5.764	7.714	6.594
5	Jambi	772	1.696	2.468	3.428	785	2.593	3.378	912	104	147	251	289	1.661	4.436	6.097	4.629
6	Sumatera Selatan	1.431	4.245	5.676	9.372	1.336	5.259	6.595	2.068	55	83	138	79	2.822	9.587	12.409	11.519
7	Bengkulu	505	1.246	1.751	2.609	709	1.480	2.189	782	21	26	47	47	1.235	2.752	3.987	3.438
8	Lampung	1.631	2.489	4.120	6.964	1.729	3.228	4.957	1.560	59	86	145	143	3.419	5.803	9.222	8.667
9	Kep. Bangka Belitung	308	710	1.018	863	552	1.317	1.869	401	83	138	221	102	943	2.165	3.108	1.366
10	Kepulauan Riau	275	859	1.134	1.173	536	1.807	2.343	531	31	56	87	49	842	2.722	3.564	1.753
11	DKI Jakarta	494	1.428	1.922	1.774	4.391	19.503	23.894	2.987	454	680	1.134	774	5.339	21.611	26.950	5.535
12	Jawa Barat	4.498	5.780	10.278	14.906	7.674	16.943	24.617	5.058	328	524	852	1.025	12.500	23.247	35.747	20.989
13	Jawa Tengah	3.497	5.594	9.091	15.224	10.213	22.949	33.162	5.942	778	2.076	2.854	2.173	14.488	30.619	45.107	23.339
14	DI Yogyakarta	273	625	898	878	1.571	5.455	7.026	907	51	236	287	251	1.895	6.316	8.211	2.036
15	Jawa Timur	6.021	8.184	14.205	15.400	10.971	21.173	32.144	6.534	708	1.107	1.815	1.006	17.700	30.464	48.164	22.940
16	Banten	827	1.283	2.110	3.495	1.856	5.426	7.282	1.661	82	140	222	339	2.765	6.849	9.614	5.495
17	Bali	502	999	1.501	2.233	1.854	4.441	6.295	1.913	116	319	435	352	2.472	5.759	8.231	4.498
18	Nusa Tenggara Barat	1.365	2.045	3.410	3.119	1.265	2.266	3.531	1.065	64	67	131	55	2.694	4.378	7.072	4.239
19	Nusa Tenggara Timur	1.343	3.014	4.357	4.158	419	1.694	2.113	786	23	40	63	37	1.785	4.748	6.533	4.981
20	Kalimantan Barat	1.514	1.766	3.280	3.060	1.082	2.086	3.168	749	57	58	115	105	2.653	3.910	6.563	3.914
21	Kalimantan Tengah	1.438	1.938	3.376	2.749	716	1.414	2.130	589	72	55	127	53	2.226	3.407	5.633	3.391
22	Kalimantan Selatan	1.020	1.472	2.492	3.467	1.562	2.291	3.853	994	97	92	189	75	2.679	3.855	6.534	4.536
23	Kalimantan Timur	746	1.474	2.220	2.196	1.185	2.656	3.841	947	12	60	72	50	1.943	4.190	6.133	3.193
24	Kalimantan Utara	327	592	919	710	183	455	638	217	10	20	30	10	520	1.067	1.587	937
25	Sulawesi Utara	328	1.662	1.990	1.152	559	2.240	2.799	444	33	77	110	18	920	3.979	4.899	1.614
26	Sulawesi Tengah	862	1.956	2.818	3.630	618	2.023	2.641	939	51	69	120	54	1.531	4.048	5.579	4.623
27	Sulawesi Selatan	1.129	4.493	5.622	6.436	1.473	5.982	7.455	2.126	104	198	302	185	2.706	10.673	13.379	8.747
28	Sulawesi Tenggara	716	1.961	2.677	3.044	656	1.888	2.544	909	40	66	106	36	1.412	3.915	5.327	3.989
29	Gorontalo	258	681	939	1.062	310	899	1.209	361	25	46	71	33	593	1.626	2.219	1.456
30	Sulawesi Barat	222	641	863	986	143	500	643	157	12	32	44	35	377	1.173	1.550	1.178
31	Maluku	469	1.332	1.801	1.006	345	1.331	1.676	420	45	89	134	30	859	2.752	3.611	1.456
32	Maluku Utara	357	668	1.025	1.456	264	720	984	379	23	30	53	30	644	1.418	2.062	1.865
33	Papua Barat	424	858	1.282	854	233	660	893	276	12	21	33	12	669	1.539	2.208	1.142
34	Papua	1.071	1.731	2.802	1.762	513	1.320	1.833	470	45	46	91	46	1.629	3.097	4.726	2.278
Indonesia		38.756	75.764	114.520	151.529	61.201	158.991	220.192	50.869	3.784	7.012	10.796	7.870	103.741	241.767	345.508	210.268

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Keterangan : a) Jumlah termasuk S3;

b) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

c) Fasilitas Kesehatan terdiri dari, puskesmas, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI BARU TENAGA KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kesehatan Masyarakat				Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keterampilan Fisik				Tenaga Keteknisian Medik								Tenaga Teknik Biomedika					Tenaga Kesehatan Tradisional	Tenaga Psikologi Klinis	Total
				Kesehatan Masyarakat	Promosi Kesehatan	Epidemiolog Kesehatan	Pembimbing Kesehatan Kerja			Fisioterapi	Okupasi Terapis	Terapis Wicara	Akupunktur	Rekam Medis	Teknik Kardiovaskular	Teknis Pelayanan Darah	Refraksionis Optisien	Teknis Gigi	Penata Anestesi	Terapis Gigi dan Mulut	Audiologis	Radiografer	Elektromedis	Ahlil Teknologi Laboratorium Medik	Fisikawan Medis	Ortotis Prostetik	Tradisional Komplementer		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
1	Aceh	2.152	852	209	0	0	0	25	63	35	0	0	0	10	0	0	12	1	4	83	0	1	20	2	0	0	0	4	3.473
2	Sumatera Utara	3.026	3.423	747	1	13	5	180	202	36	1	5	0	88	0	1	50	1	17	110	0	107	35	310	1	0	0	3	8.362
3	Sumatera Barat	1.052	840	246	0	1	1	93	177	16	1	3	0	81	0	0	48	11	5	112	0	21	12	83	0	0	0	12	2.815
4	Riau	1.359	986	217	3	5	0	18	262	111	3	4	0	84	1	1	16	7	2	12	1	32	4	138	0	0	0	4	3.270
5	Jambi	1.033	688	179	0	3	0	88	88	55	1	0	1	7	0	0	9	0	5	51	0	17	0	48	0	0	0	6	2.279
6	Sumatera Selatan	2.920	2.122	486	5	3	10	138	253	64	2	4	0	173	0	0	42	14	6	91	0	45	8	172	0	0	0	19	6.577
7	Bengkulu	726	534	109	8	0	3	5	21	6	0	0	2	18	0	0	2	0	2	0	0	13	1	79	0	0	0	6	1.535
8	Lampung	1.492	1.091	94	0	5	1	81	99	6	0	2	8	18	0	0	4	39	7	29	0	76	5	113	0	0	0	2	3.172
9	Kep. Bangka Belitung	346	124	62	4	1	1	7	30	4	0	1	0	5	0	0	7	4	0	7	0	3	2	7	2	0	0	2	619
10	Kepulauan Riau	533	352	54	2	2	3	45	13	3	0	0	0	3	0	1	2	0	4	1	0	2	1	18	0	0	0	5	1.044
11	DKI Jakarta	4.393	1.222	395	7	5	60	86	295	164	62	51	4	122	19	11	165	81	38	109	11	161	158	469	22	26	0	45	8.181
12	Jawa Barat	8.677	4.642	639	139	21	1	95	530	190	18	67	2	543	0	3	142	4	24	209	0	322	32	1.331	6	8	1	54	17.700
13	Jawa Tengah	7.477	2.719	840	32	18	3	309	454	96	67	117	82	408	0	23	90	4	5	159	0	326	110	788	2	17	78	44	14.268
14	DI Yogyakarta	1.738	801	233	37	10	1	86	228	49	6	8	0	225	0	105	22	15	1	54	0	91	27	66	1	1	0	74	3.879
15	Jawa Timur	8.239	6.927	725	10	6	5	313	765	142	16	15	24	428	0	2	93	17	31	120	0	136	138	1.439	7	0	33	41	19.672
16	Banten	1.431	936	190	13	0	1	6	94	17	12	9	0	27	0	2	20	5	2	19	0	20	6	93	1	0	0	18	2.922
17	Bali	1.492	556	119	1	3	0	45	128	67	4	0	3	92	0	0	2	76	1	87	0	76	2	122	0	1	0	14	2.891
18	Nusa Tenggara Barat	1.297	681	111	1	2	3	30	187	34	4	1	2	51	0	17	3	0	0	15	0	23	11	75	0	1	0	8	2.557
19	Nusa Tenggara Timur	1.364	1.180	179	2	3	0	134	97	26	1	0	0	32	0	2	5	0	2	53	0	9	9	155	2	0	0	0	3.255
20	Kalimantan Barat	2.013	800	205	4	3	0	23	98	22	1	0	0	19	0	1	10	1	2	29	0	24	7	31	0	0	0	14	3.307
21	Kalimantan Tengah	892	412	44	0	2	0	8	34	2	1	1	1	5	0	0	2	0	0	6	0	5	1	13	1	1	0	2	1.433
22	Kalimantan Selatan	1.165	503	143	2	2	0	56	92	8	1	2	0	47	0	0	4	3	2	83	0	31	41	89	0	3	0	11	2.288
23	Kalimantan Timur	673	569	142	2	3	0	9	22	9	0	7	0	6	0	1	3	3	7	20	0	7	13	125	1	0	0	1	1.623
24	Kalimantan Utara	110	70	24	2	5	0	5	2	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	5	0	0	0	1	232
25	Sulawesi Utara	1.256	272	94	0	0	1	163	36	21	3	3	0	0	0	0	4	5	1	34	0	1	1	42	0	0	0	0	1.937
26	Sulawesi Tengah	1.268	716	267	1	1	0	68	91	8	0	0	0	4	1	1	0	0	4	18	0	6	4	15	0	0	0	2	2.475
27	Sulawesi Selatan	3.838	2.446	328	11	80	7	79	145	24	3	1	0	196	25	2	1	7	10	146	0	15	10	423	0	2	0	7	7.806
28	Sulawesi Tenggara	1.037	664	296	3	26	1	54	86	8	0	0	0	2	0	1	1	0	1	68	0	3	17	96	0	0	0	1	2.365
29	Gorontalo	767	723	70	0	0	0	18	61	13	0	0	0	5	0	0	0	0	1	3	0	1	0	37	0	0	0	0	1.699
30	Sulawesi Barat	285	258	18	0	11	0	11	43	8	0	0	0	1	0	0	0	1	0	8	0	0	0	7	0	0	0	0	651
31	Maluku	592	186	18	0	5	0	47	44	4	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	0	5	0	34	0	0	0	5	950
32	Maluku Utara	371	228	87	1	1	1	46	46	7	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	0	4	3	34	0	0	0	1	840
33	Papua Barat	246	114	44	0	4	0	4	8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	1	1	1	19	0	0	0	0	447
34	Papua	2.667	558	272	0	1	0	41	105	10	0	0	0	2	0	0	1	0	0	7	0	6	1	105	0	0	0	1	3.777
Indonesia		67.927	39.195	7.886	291	245	108	2.416	4.899	1.267	207	301	129	2.705	46	174	763	301	191	1.757	13	1.592	680	6.583	46	60	112	407	140.301

Sumber : Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, 2020
Keterangan: registrasi baru adalah tenaga kesehatan yang baru teregistrasi pada tahun 2019.

Lampiran 12.c

JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI ULANG TENAGA KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kesehatan Masyarakat				Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gra	Tenaga Keterampilan Fisik				Tenaga Keteniknisan Medik								Tenaga Teknik Biomedika					Tenaga Kesehatan Tradisional	Tenaga Psikologi Klinis	Total
				Kesehatan Masyarakat	Promosi Kesehatan	Epidemiologi Kesehatan	Pembimbing Kesehatan Kerja			Fisioterapi	Okupasi Terapis	Terapi Wicara	Akupunktur	Rekam Medik	Teknik Kardiovaskular	Teknik Pelayanan Darah	Refraksions Optisien	Teknik Gigi	Pemeriksaan Anestesi	Terapi Gigi dan Mulut	Audiologi	Radiografi	Elektromedis	Abi Teknologi Laboratorium Medik	Fisikawan Medik	Ortodontik Prostetik	Tradisional Komplementer		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
1	Aceh	1.880	3.110	60	0	0	0	79	16	21	0	0	0	16	0	0	6	0	5	133	0	11	13	69	0	0	0	0	5.419
2	Sumatera Utara	3.449	5.496	141	1	0	1	45	55	57	0	0	0	27	0	0	42	0	27	111	0	85	37	128	10	1	0	0	9.713
3	Sumatera Barat	812	1.259	14	1	0	0	15	55	18	0	0	0	26	0	0	14	0	10	6	0	16	0	94	1	1	0	0	2.342
4	Riau	973	933	32	0	2	0	5	57	26	1	1	0	27	0	3	5	1	12	17	0	19	10	69	0	4	0	0	2.197
5	Jambi	1.115	1.146	13	1	0	0	39	25	13	0	0	0	5	0	1	7	1	6	9	0	18	0	29	1	1	1	0	2.431
6	Sumatera Selatan	3.281	3.411	39	10	1	0	11	46	36	0	0	0	16	0	0	7	0	17	56	0	32	9	115	2	0	1	0	7.090
7	Bengkulu	512	715	8	2	0	0	10	26	10	0	0	0	1	0	0	2	0	4	3	0	24	0	127	0	0	0	0	1.444
8	Lampung	892	1.044	32	0	3	0	15	33	7	3	0	1	9	0	0	2	1	6	36	0	16	0	117	1	1	0	0	2.219
9	Kep. Bangka Belitung	673	362	3	0	0	3	4	55	11	0	0	0	5	0	0	1	0	5	9	0	9	0	22	0	0	0	0	1.162
10	Kepulauan Riau	221	190	2	0	2	1	8	3	6	0	1	1	3	0	0	1	1	3	2	0	12	1	23	1	0	0	0	482
11	DKI Jakarta	3.424	1.033	46	7	5	8	14	54	126	9	16	1	53	11	14	47	2	14	112	0	134	33	220	6	3	0	0	5.392
12	Jawa Barat	5.929	5.366	61	55	2	1	34	245	169	0	19	0	51	0	5	36	3	76	136	0	144	12	714	7	2	0	0	13.067
13	Jawa Tengah	7.032	4.258	59	54	8	0	154	154	298	6	14	11	217	0	4	41	0	35	108	0	476	3	254	11	10	0	0	13.207
14	DI Yogyakarta	551	422	23	30	3	0	22	37	31	0	2	0	86	0	2	2	0	2	58	0	34	0	207	2	0	0	0	1.514
15	Jawa Timur	1.058	5.085	44	0	0	9	24	31	41	3	3	0	124	0	1	56	10	15	83	0	86	90	170	0	1	88	2	7.024
16	Banten	2.049	454	8	2	0	0	9	13	12	0	3	0	10	0	2	12	0	1	44	0	35	1	80	1	0	0	7	2.743
17	Bali	1.048	1.421	25	0	0	0	57	9	48	1	1	0	6	0	0	4	0	3	24	0	28	2	114	2	0	0	0	2.793
18	Nusa Tenggara Barat	839	906	4	0	0	0	5	33	9	0	0	0	12	0	11	5	0	6	18	0	56	1	184	0	0	0	0	2.089
19	Nusa Tenggara Timur	318	670	0	0	0	0	6	9	5	0	0	0	8	0	1	4	0	3	16	0	9	0	174	0	0	0	0	1.223
20	Kalimantan Barat	876	936	13	0	1	0	31	21	17	0	1	0	10	0	0	0	0	1	97	0	34	0	30	0	0	0	0	2.068
21	Kalimantan Tengah	501	274	4	0	1	0	7	18	3	0	0	0	3	0	0	8	0	3	17	0	27	0	41	0	0	0	0	907
22	Kalimantan Selatan	1.028	713	17	0	1	2	4	62	4	0	0	0	12	0	0	4	0	4	38	0	55	3	81	1	1	0	0	2.030
23	Kalimantan Timur	2.387	930	6	0	1	0	36	21	41	0	2	0	19	0	0	2	2	7	32	0	35	4	168	1	2	0	0	3.696
24	Kalimantan Utara	37	180	0	0	1	0	1	2	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0	7	0	1	0	9	0	0	0	0	241
25	Sulawesi Utara	353	501	1	0	1	1	0	5	17	0	0	0	0	0	0	2	0	4	32	0	5	0	14	0	0	0	0	936
26	Sulawesi Tengah	863	412	11	0	2	0	6	7	25	0	0	0	3	0	1	0	0	7	16	0	6	0	98	0	0	0	0	1.457
27	Sulawesi Selatan	2.804	2.515	8	1	9	4	26	35	23	1	2	0	66	0	5	3	4	28	15	0	48	2	340	2	1	0	0	5.942
28	Sulawesi Tenggara	828	566	9	0	3	0	13	49	15	0	0	0	6	0	0	0	0	7	5	0	9	0	118	0	0	0	0	1.628
29	Gorontalo	97	4	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	8	0	0	0	0	116
30	Sulawesi Barat	267	201	2	0	3	0	0	13	4	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	0	8	0	19	0	0	0	0	526
31	Maluku	139	196	0	0	0	0	25	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	1	0	23	0	0	0	0	397
32	Maluku Utara	129	57	0	0	0	0	4	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	34	0	0	0	0	237
33	Papua Barat	396	111	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	8	0	12	0	0	0	0	537
34	Papua	96	267	0	0	0	0	9	30	2	0	0	0	4	0	0	2	0	1	3	0	5	1	46	0	0	0	0	466
Indonesia		46.857	45.144	685	164	49	30	721	1.231	1.108	24	65	14	829	11	50	316	25	321	1.253	0	1.489	222	3.951	49	28	90	9	104.735

Sumber : Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, 2020

Keterangan: registrasi ulang terdiri dari perpanjangan, naik level, alih profesi, dan rekognisi pembelajaran lampau.

Lampiran 12.d

**JUMLAH BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF
MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI PER 31 DESEMBER 2019**

No	Provinsi	Jumlah Bidan sebagai PTT Aktif			
		Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	1	2	-	3
2	Sumatera Utara	5	5	-	10
3	Sumatera Barat	-	-	1	1
4	Riau	-	-	-	-
5	Jambi	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	1	-	1
8	Lampung	2	1	1	4
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	1	-	1
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	6	-	-	6
13	Jawa Tengah	3	-	-	3
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-
15	Jawa Timur	5	-	-	5
16	Banten	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	1	1	2
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	1	2	1	4
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	1	1
28	Sulawesi Tenggara	-	1	-	1
29	Gorontalo	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	1	1
32	Maluku Utara	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	6	6
34	Papua	-	-	-	-
Indonesia		23	14	12	49

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2020

Keterangan: - = sudah tidak ada PTT lagi

Lampiran 13.a

**JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2019**

No	Provinsi	Kesehatan Masyarakat			Kesehatan Lingkungan			Gizi		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	446	1.432	1.878	222	622	844	77	702	779
2	Sumatera Utara	406	1.617	2.023	219	434	653	106	970	1.076
3	Sumatera Barat	130	477	607	128	359	487	85	762	847
4	Riau	200	518	718	86	180	266	32	484	516
5	Jambi	171	348	519	149	266	415	51	370	421
6	Sumatera Selatan	387	1.159	1.546	135	573	708	61	678	739
7	Bengkulu	248	621	869	107	123	230	52	356	408
8	Lampung	258	527	785	196	346	542	86	443	529
9	Kepulauan Bangka Belitung	92	220	312	43	117	160	38	192	230
10	Kepulauan Riau	71	139	210	74	131	205	22	166	188
11	DKI Jakarta	94	283	377	186	336	522	179	1.115	1.294
12	Jawa Barat	816	1.486	2.302	461	799	1.260	280	1.674	1.954
13	Jawa Tengah	448	1.443	1.891	604	1.073	1.677	285	2.296	2.581
14	DI Yogyakarta	67	213	280	141	169	310	86	514	600
15	Jawa Timur	365	1.432	1.797	502	937	1.439	441	2.639	3.080
16	Banten	161	349	510	82	201	283	67	402	469
17	Bali	103	257	360	175	236	411	73	431	504
18	Nusa Tenggara Barat	160	286	446	167	366	533	117	555	672
19	Nusa Tenggara Timur	285	486	771	238	431	669	157	587	744
20	Kalimantan Barat	159	341	500	221	265	486	107	466	573
21	Kalimantan Tengah	140	253	393	86	138	224	57	398	455
22	Kalimantan Selatan	178	338	516	206	301	507	137	706	843
23	Kalimantan Timur	130	321	451	94	200	294	64	243	307
24	Kalimantan Utara	68	138	206	31	42	73	16	96	112
25	Sulawesi Utara	82	340	422	161	285	446	77	322	399
26	Sulawesi Tengah	394	1.073	1.467	185	322	507	59	373	432
27	Sulawesi Selatan	488	1.566	2.054	219	732	951	109	1.071	1.180
28	Sulawesi Tenggara	340	1.077	1.417	140	351	491	109	658	767
29	Gorontalo	105	501	606	72	151	223	61	343	404
30	Sulawesi Barat	51	190	241	42	85	127	15	142	157
31	Maluku	121	375	496	152	238	390	65	404	469
32	Maluku Utara	132	500	632	41	88	129	33	262	295
33	Papua Barat	62	150	212	46	50	96	25	159	184
34	Papua	156	336	492	150	178	328	65	320	385
Indonesia		7.514	20.792	28.306	5.761	11.125	16.886	3.294	21.299	24.593

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

b) Fasilitas Kesehatan terdiri dari, puskesmas, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

Lampiran 13.b

**JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2019**

No	Provinsi	Kesehatan Masyarakat			Kesehatan Lingkungan			Gizi		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	253	999	1.252	137	468	605	46	422	468
2	Sumatera Utara	226	1.077	1.303	146	325	471	65	607	672
3	Sumatera Barat	67	315	382	82	256	338	26	386	412
4	Riau	131	323	454	63	122	185	18	237	255
5	Jambi	106	230	336	77	190	267	32	185	217
6	Sumatera Selatan	266	772	1.038	79	408	487	38	338	376
7	Bengkulu	158	379	537	62	85	147	27	161	188
8	Lampung	189	365	554	143	261	404	64	271	335
9	Kepulauan Bangka Belitung	50	127	177	23	75	98	26	115	141
10	Kepulauan Riau	28	80	108	39	76	115	8	80	88
11	DKI Jakarta	17	86	103	113	238	351	34	358	392
12	Jawa Barat	463	981	1.444	337	637	974	126	898	1.024
13	Jawa Tengah	267	999	1.266	368	744	1.112	145	1.006	1.151
14	DI Yogyakarta	46	129	175	63	91	154	36	163	199
15	Jawa Timur	212	808	1.020	296	593	889	238	977	1.215
16	Banten	100	194	294	51	152	203	25	201	226
17	Bali	39	93	132	116	123	239	32	146	178
18	Nusa Tenggara Barat	105	185	290	106	267	373	97	340	437
19	Nusa Tenggara Timur	201	347	548	183	351	534	133	414	547
20	Kalimantan Barat	109	232	341	166	209	375	74	322	396
21	Kalimantan Tengah	99	168	267	71	108	179	41	277	318
22	Kalimantan Selatan	124	250	374	133	236	369	99	480	579
23	Kalimantan Timur	95	249	344	58	153	211	48	141	189
24	Kalimantan Utara	38	79	117	26	30	56	8	52	60
25	Sulawesi Utara	45	216	261	116	220	336	50	224	274
26	Sulawesi Tengah	239	667	906	129	246	375	44	236	280
27	Sulawesi Selatan	276	881	1.157	136	510	646	64	621	685
28	Sulawesi Tenggara	234	714	948	96	256	352	86	455	541
29	Gorontalo	58	338	396	44	111	155	38	224	262
30	Sulawesi Barat	33	129	162	35	68	103	12	101	113
31	Maluku	51	185	236	106	147	253	44	244	288
32	Maluku Utara	64	290	354	27	61	88	27	151	178
33	Papua Barat	37	90	127	35	31	66	17	109	126
34	Papua	90	208	298	84	119	203	44	203	247
Indonesia		4.516	13.185	17.701	3.746	7.967	11.713	1.912	11.145	13.057

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

Lampiran 13.c

**JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA TAHUN 2019**

No	Provinsi	Kesehatan Masyarakat			Kesehatan Lingkungan			Gizi		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	139	320	459	69	136	205	26	279	305
2	Sumatera Utara	92	292	384	44	70	114	33	354	387
3	Sumatera Barat	40	97	137	35	80	115	56	360	416
4	Riau	42	124	166	13	42	55	13	236	249
5	Jambi	30	53	83	49	54	103	19	178	197
6	Sumatera Selatan	52	189	241	44	115	159	20	318	338
7	Bengkulu	44	143	187	33	22	55	21	190	211
8	Lampung	31	91	122	28	63	91	21	170	191
9	Kepulauan Bangka Belitung	19	41	60	12	21	33	9	73	82
10	Kepulauan Riau	19	33	52	20	43	63	14	87	101
11	DKI Jakarta	76	189	265	74	99	173	144	756	900
12	Jawa Barat	260	345	605	92	136	228	157	768	925
13	Jawa Tengah	59	185	244	166	245	411	119	1.193	1.312
14	DI Yogyakarta	6	42	48	72	74	146	50	340	390
15	Jawa Timur	103	417	520	173	303	476	181	1.578	1.759
16	Banten	47	121	168	26	48	74	40	202	242
17	Bali	34	94	128	40	78	118	41	262	303
18	Nusa Tenggara Barat	20	57	77	29	63	92	15	199	214
19	Nusa Tenggara Timur	34	61	95	34	52	86	21	148	169
20	Kalimantan Barat	31	71	102	39	47	86	26	135	161
21	Kalimantan Tengah	15	31	46	12	23	35	14	108	122
22	Kalimantan Selatan	33	55	88	64	61	125	37	221	258
23	Kalimantan Timur	12	34	46	29	32	61	16	98	114
24	Kalimantan Utara	9	24	33	5	10	15	8	45	53
25	Sulawesi Utara	24	76	100	29	49	78	26	92	118
26	Sulawesi Tengah	83	260	343	37	53	90	14	124	138
27	Sulawesi Selatan	107	374	481	44	139	183	36	407	443
28	Sulawesi Tenggara	43	168	211	25	57	82	16	177	193
29	Gorontalo	11	72	83	10	19	29	13	97	110
30	Sulawesi Barat	7	28	35	4	9	13	2	40	42
31	Maluku	30	91	121	24	57	81	12	120	132
32	Maluku Utara	28	109	137	9	14	23	4	90	94
33	Papua Barat	13	35	48	11	15	26	6	49	55
34	Papua	25	59	84	51	37	88	16	108	124
Indonesia		1.618	4.381	5.999	1.446	2.366	3.812	1.246	9.602	10.848

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

Lampiran 14.a

JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik			Tenaga Teknik Biomedika Lainnya			Keterapihan Fisik			Keteknisian Medis		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	81	757	838	212	206	418	64	239	303	177	747	924
2	Sumatera Utara	190	985	1.175	155	226	381	85	160	245	171	723	894
3	Sumatera Barat	140	812	952	211	163	374	60	132	192	226	1.102	1.328
4	Riau	108	641	749	93	124	217	38	116	154	147	406	553
5	Jambi	132	567	699	69	64	133	29	85	114	101	430	531
6	Sumatera Selatan	147	833	980	146	200	346	44	166	210	194	853	1.047
7	Bengkulu	88	300	388	87	60	147	10	29	39	58	152	210
8	Lampung	170	629	799	160	139	299	41	81	122	155	424	579
9	Kepulauan Bangka Belitung	82	243	325	80	45	125	14	65	79	71	221	292
10	Kepulauan Riau	58	211	269	75	61	136	22	40	62	80	162	242
11	DKI Jakarta	737	1.880	2.617	810	601	1.411	363	609	972	796	1.705	2.501
12	Jawa Barat	780	2.283	3.063	670	460	1.130	238	507	745	939	2.077	3.016
13	Jawa Tengah	800	3.152	3.952	954	791	1.745	462	868	1.330	996	3.060	4.056
14	DI Yogyakarta	169	660	829	209	182	391	121	213	334	230	868	1.098
15	Jawa Timur	794	3.279	4.073	926	706	1.632	339	563	902	1.017	2.279	3.296
16	Banten	173	632	805	181	174	355	73	196	269	181	419	600
17	Bali	167	462	629	242	113	355	68	59	127	151	448	599
18	Nusa Tenggara Barat	161	539	700	167	94	261	46	92	138	242	413	655
19	Nusa Tenggara Timur	175	490	665	78	69	147	25	67	92	181	567	748
20	Kalimantan Barat	182	438	620	105	48	153	23	57	80	228	441	669
21	Kalimantan Tengah	131	335	466	93	40	133	20	31	51	117	234	351
22	Kalimantan Selatan	174	620	794	130	71	201	37	52	89	193	551	744
23	Kalimantan Timur	159	461	620	99	63	162	41	78	119	111	204	315
24	Kalimantan Utara	41	94	135	38	21	59	8	13	21	48	59	107
25	Sulawesi Utara	66	132	198	36	15	51	32	57	89	65	280	345
26	Sulawesi Tengah	103	229	332	50	46	96	10	57	67	97	154	251
27	Sulawesi Selatan	218	890	1.108	193	279	472	76	197	273	233	889	1.122
28	Sulawesi Tenggara	110	350	460	54	59	113	15	61	76	96	286	382
29	Gorontalo	42	90	132	31	23	54	10	10	20	17	70	87
30	Sulawesi Barat	40	89	129	12	26	38	7	21	28	26	82	108
31	Maluku	35	137	172	33	21	54	3	25	28	28	65	93
32	Maluku Utara	49	175	224	23	49	72	9	19	28	30	48	78
33	Papua Barat	59	135	194	18	19	37	4	17	21	27	50	77
34	Papua	151	400	551	40	24	64	10	20	30	51	80	131
Indonesia		6.712	23.930	30.642	6.480	5.282	11.762	2.447	5.002	7.449	7.480	20.549	28.029

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

b) Fasilitas Kesehatan terdiri dari, puskesmas, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

Lampiran 14.b

JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik			Tenaga Teknik Biomedika Lainnya			Keterapihan Fisik			Keteknisian Medis		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	32	326	358	6	10	16	9	60	69	74	408	482
2	Sumatera Utara	73	413	486	4	9	13	9	15	24	59	427	486
3	Sumatera Barat	47	297	344	3	4	7	6	12	18	67	502	569
4	Riau	36	249	285	0	1	1	3	17	20	22	170	192
5	Jambi	48	205	253	1	0	1	2	6	8	48	236	284
6	Sumatera Selatan	53	334	387	2	10	12	3	16	19	49	403	452
7	Bengkulu	26	113	139	3	6	9	1	0	1	3	54	57
8	Lampung	66	257	323	7	4	11	0	3	3	77	293	370
9	Kepulauan Bangka Belitung	27	90	117	2	1	3	1	0	1	26	106	132
10	Kepulauan Riau	14	63	77	1	0	1	0	0	0	8	58	66
11	DKI Jakarta	116	232	348	12	1	13	2	6	8	80	313	393
12	Jawa Barat	200	740	940	15	19	34	8	16	24	275	991	1.266
13	Jawa Tengah	217	878	1.095	29	28	57	50	141	191	289	1.092	1.381
14	DI Yogyakarta	37	167	204	2	7	9	16	21	37	60	284	344
15	Jawa Timur	225	960	1.185	24	26	50	33	54	87	279	779	1.058
16	Banten	27	131	158	5	6	11	1	9	10	39	131	170
17	Bali	35	99	134	3	1	4	3	2	5	71	199	270
18	Nusa Tenggara Barat	56	239	295	20	3	23	3	3	6	98	187	285
19	Nusa Tenggara Timur	114	308	422	4	7	11	6	15	21	101	365	466
20	Kalimantan Barat	90	217	307	3	2	5	1	1	2	125	273	398
21	Kalimantan Tengah	55	164	219	3	1	4	1	0	1	68	154	222
22	Kalimantan Selatan	63	280	343	1	2	3	3	5	8	98	345	443
23	Kalimantan Timur	45	203	248	0	0	0	1	3	4	43	105	148
24	Kalimantan Utara	18	38	56	0	1	1	0	1	1	24	31	55
25	Sulawesi Utara	24	28	52	1	1	2	6	16	22	37	208	245
26	Sulawesi Tengah	49	108	157	0	0	0	0	2	2	52	77	129
27	Sulawesi Selatan	67	366	433	4	9	13	5	15	20	120	480	600
28	Sulawesi Tenggara	47	144	191	1	4	5	3	12	15	37	134	171
29	Gorontalo	16	38	54	0	0	0	0	0	0	3	31	34
30	Sulawesi Barat	22	63	85	0	0	0	0	6	6	13	43	56
31	Maluku	8	44	52	2	1	3	1	5	6	12	26	38
32	Maluku Utara	24	82	106	1	3	4	1	3	4	8	27	35
33	Papua Barat	25	71	96	1	0	1	0	1	1	9	22	31
34	Papua	87	218	305	1	2	3	0	2	2	12	35	47
Indonesia		2.089	8.165	10.254	161	169	330	178	468	646	2.386	8.989	11.375

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

Lampiran 14.c

**JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIK DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA TAHUN 2019**

No	Provinsi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik			Tenaga Teknik Biomedika Lainnya			Keterapihan Fisik			Keteknisian Medis		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	47	422	469	202	194	396	55	182	237	102	336	438
2	Sumatera Utara	99	518	617	148	220	368	75	151	226	108	295	403
3	Sumatera Barat	87	463	550	204	157	361	52	120	172	152	588	740
4	Riau	67	359	426	93	122	215	35	99	134	121	233	354
5	Jambi	67	300	367	67	64	131	27	79	106	50	181	231
6	Sumatera Selatan	94	491	585	144	189	333	41	150	191	144	449	593
7	Bengkulu	56	153	209	84	54	138	9	29	38	55	97	152
8	Lampung	99	352	451	150	134	284	41	77	118	80	133	213
9	Kepulauan Bangka Belitung	42	121	163	76	41	117	13	61	74	43	109	152
10	Kepulauan Riau	42	139	181	73	61	134	21	39	60	71	107	178
11	DKI Jakarta	584	1.484	2.068	789	585	1.374	328	542	870	687	1.292	1.979
12	Jawa Barat	522	1.359	1.881	628	423	1.051	223	476	699	633	1.052	1.685
13	Jawa Tengah	484	1.887	2.371	892	720	1.612	385	665	1.050	660	1.799	2.459
14	DI Yogyakarta	112	464	576	215	181	396	107	188	295	164	546	710
15	Jawa Timur	517	2.018	2.535	882	662	1.544	299	476	775	701	1.449	2.150
16	Banten	130	472	602	170	165	335	69	181	250	135	287	422
17	Bali	109	312	421	234	108	342	61	52	113	76	220	296
18	Nusa Tenggara Barat	93	256	349	147	88	235	38	80	118	138	211	349
19	Nusa Tenggara Timur	54	168	222	73	60	133	19	52	71	77	198	275
20	Kalimantan Barat	85	205	290	99	46	145	22	54	76	98	164	262
21	Kalimantan Tengah	66	143	209	86	39	125	19	31	50	48	80	128
22	Kalimantan Selatan	90	301	391	128	70	198	34	45	79	96	200	296
23	Kalimantan Timur	106	228	334	97	63	160	40	75	115	64	96	160
24	Kalimantan Utara	20	50	70	35	19	54	8	12	20	24	29	53
25	Sulawesi Utara	37	81	118	34	14	48	26	40	66	27	66	93
26	Sulawesi Tengah	51	119	170	50	45	95	10	54	64	44	76	120
27	Sulawesi Selatan	143	492	635	185	268	453	71	181	252	109	400	509
28	Sulawesi Tenggara	53	177	230	51	54	105	12	50	62	58	151	209
29	Gorontalo	24	48	72	30	23	53	10	10	20	9	36	45
30	Sulawesi Barat	17	25	42	12	26	38	7	15	22	13	38	51
31	Maluku	25	76	101	25	16	41	2	20	22	16	33	49
32	Maluku Utara	25	91	116	22	46	68	8	16	24	22	20	42
33	Papua Barat	30	54	84	18	18	36	4	14	18	17	26	43
34	Papua	57	144	201	39	21	60	10	18	28	39	45	84
Indonesia		4.134	13.972	18.106	6.182	4.996	11.178	2.181	4.334	6.515	4.881	11.042	15.923

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

Lampiran 15.a

JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Tenaga Kefarmasian								
		Tenaga Kefarmasian ^a			Apoteker			Total		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	128	949	1.077	50	272	322	178	1.221	1.399
2	Sumatera Utara	183	1.384	1.567	100	445	545	283	1.829	2.112
3	Sumatera Barat	122	1.010	1.132	61	332	393	183	1.342	1.525
4	Riau	118	772	890	62	336	398	180	1.108	1.288
5	Jambi	88	642	730	59	278	337	147	920	1.067
6	Sumatera Selatan	190	1.103	1.293	82	309	391	272	1.412	1.684
7	Bengkulu	75	361	436	33	167	200	108	528	636
8	Lampung	140	547	687	73	238	311	213	785	998
9	Kepulauan Bangka Belitung	86	379	465	54	172	226	140	551	691
10	Kepulauan Riau	82	279	361	54	169	223	136	448	584
11	DKI Jakarta	847	3.807	4.654	374	1.275	1.649	1.221	5.082	6.303
12	Jawa Barat	980	4.013	4.993	591	1.840	2.431	1.571	5.853	7.424
13	Jawa Tengah	817	5.539	6.356	533	2.830	3.363	1.350	8.369	9.719
14	DI Yogyakarta	140	1.007	1.147	96	650	746	236	1.657	1.893
15	Jawa Timur	834	5.279	6.113	528	2.310	2.838	1.362	7.589	8.951
16	Banten	204	1.060	1.264	110	518	628	314	1.578	1.892
17	Bali	118	673	791	162	236	398	280	909	1.189
18	Nusa Tenggara Barat	180	376	556	86	241	327	266	617	883
19	Nusa Tenggara Timur	124	524	648	38	152	190	162	676	838
20	Kalimantan Barat	129	440	569	72	197	269	201	637	838
21	Kalimantan Tengah	99	323	422	57	214	271	156	537	693
22	Kalimantan Selatan	172	734	906	85	265	350	257	999	1.256
23	Kalimantan Timur	171	559	730	85	278	363	256	837	1.093
24	Kalimantan Utara	46	160	206	35	93	128	81	253	334
25	Sulawesi Utara	82	320	402	36	162	198	118	482	600
26	Sulawesi Tengah	106	539	645	65	225	290	171	764	935
27	Sulawesi Selatan	190	1.063	1.253	167	887	1.054	357	1.950	2.307
28	Sulawesi Tenggara	98	449	547	73	317	390	171	766	937
29	Gorontalo	30	186	216	25	106	131	55	292	347
30	Sulawesi Barat	26	130	156	33	90	123	59	220	279
31	Maluku	30	129	159	15	148	163	45	277	322
32	Maluku Utara	27	144	171	27	116	143	54	260	314
33	Papua Barat	28	93	121	25	95	120	53	188	241
34	Papua	109	265	374	36	171	207	145	436	581
Indonesia		6.799	35.238	42.037	3.982	16.134	20.116	10.781	51.372	62.153

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020 (Update per 31 Desember 2019)

Keterangan : a) Termasuk analis farmasi, asisten apoteker, dan sarjana farmasi;

b) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

c) Fasilitas Kesehatan terdiri dari, puskesmas, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

Lampiran 15.b

JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Tenaga Kefarmasian								
		Tenaga Kefarmasian ^a			Apoteker			Total		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	39	421	460	18	83	101	57	504	561
2	Sumatera Utara	66	578	644	26	154	180	92	732	824
3	Sumatera Barat	38	323	361	17	91	108	55	414	469
4	Riau	33	284	317	26	109	135	59	393	452
5	Jambi	25	226	251	12	63	75	37	289	326
6	Sumatera Selatan	64	425	489	27	104	131	91	529	620
7	Bengkulu	18	119	137	9	42	51	27	161	188
8	Lampung	52	207	259	20	88	108	72	295	367
9	Kepulauan Bangka Belitung	13	98	111	22	45	67	35	143	178
10	Kepulauan Riau	17	71	88	20	64	84	37	135	172
11	DKI Jakarta	146	508	654	37	118	155	183	626	809
12	Jawa Barat	217	909	1.126	161	486	647	378	1.395	1.773
13	Jawa Tengah	161	881	1.042	104	447	551	265	1.328	1.593
14	DI Yogyakarta	24	142	166	13	99	112	37	241	278
15	Jawa Timur	156	880	1.036	74	317	391	230	1.197	1.427
16	Banten	31	124	155	29	150	179	60	274	334
17	Bali	28	122	150	27	55	82	55	177	232
18	Nusa Tenggara Barat	55	141	196	25	76	101	80	217	297
19	Nusa Tenggara Timur	73	311	384	14	58	72	87	369	456
20	Kalimantan Barat	45	213	258	30	81	111	75	294	369
21	Kalimantan Tengah	58	161	219	29	96	125	87	257	344
22	Kalimantan Selatan	64	273	337	41	122	163	105	395	500
23	Kalimantan Timur	54	234	288	36	113	149	90	347	437
24	Kalimantan Utara	14	58	72	14	33	47	28	91	119
25	Sulawesi Utara	36	140	176	17	53	70	53	193	246
26	Sulawesi Tengah	49	294	343	27	94	121	76	388	464
27	Sulawesi Selatan	50	403	453	41	289	330	91	692	783
28	Sulawesi Tenggara	44	220	264	34	135	169	78	355	433
29	Gorontalo	9	93	102	9	49	58	18	142	160
30	Sulawesi Barat	14	73	87	22	51	73	36	124	160
31	Maluku	7	53	60	2	48	50	9	101	110
32	Maluku Utara	13	61	74	14	48	62	27	109	136
33	Papua Barat	11	52	63	6	38	44	17	90	107
34	Papua	57	129	186	15	69	84	72	198	270
Indonesia		1.781	9.227	11.008	1.018	3.968	4.986	2.799	13.195	15.994

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020 (Update per 31 Desember 2019)

Keterangan : a) Termasuk analis farmasi, asisten apoteker, dan sarjana farmasi;

b) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

Lampiran 15.c

**JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA TAHUN 2019**

No	Provinsi	Tenaga Kefarmasian								
		Tenaga Kefarmasian ^a			Apoteker			Total		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	78	491	569	31	168	199	109	659	768
2	Sumatera Utara	96	755	851	68	257	325	164	1.012	1.176
3	Sumatera Barat	74	610	684	41	209	250	115	819	934
4	Riau	80	453	533	29	208	237	109	661	770
5	Jambi	47	325	372	24	135	159	71	460	531
6	Sumatera Selatan	111	633	744	54	185	239	165	818	983
7	Bengkulu	48	206	254	17	89	106	65	295	360
8	Lampung	76	320	396	46	129	175	122	449	571
9	Kepulauan Bangka Belitung	53	159	212	18	63	81	71	222	293
10	Kepulauan Riau	61	181	242	33	88	121	94	269	363
11	DKI Jakarta	615	2.795	3.410	206	767	973	821	3.562	4.383
12	Jawa Barat	594	2.429	3.023	210	829	1.039	804	3.258	4.062
13	Jawa Tengah	517	3.247	3.764	211	1.256	1.467	728	4.503	5.231
14	DI Yogyakarta	97	715	812	42	330	372	139	1.045	1.184
15	Jawa Timur	589	3.577	4.166	244	1.198	1.442	833	4.775	5.608
16	Banten	145	836	981	63	315	378	208	1.151	1.359
17	Bali	80	473	553	67	153	220	147	626	773
18	Nusa Tenggara Barat	116	211	327	52	143	195	168	354	522
19	Nusa Tenggara Timur	32	169	201	16	79	95	48	248	296
20	Kalimantan Barat	68	205	273	37	97	134	105	302	407
21	Kalimantan Tengah	30	131	161	26	106	132	56	237	293
22	Kalimantan Selatan	89	386	475	33	120	153	122	506	628
23	Kalimantan Timur	107	304	411	42	146	188	149	450	599
24	Kalimantan Utara	27	93	120	21	50	71	48	143	191
25	Sulawesi Utara	40	152	192	17	86	103	57	238	295
26	Sulawesi Tengah	48	224	272	33	116	149	81	340	421
27	Sulawesi Selatan	111	560	671	93	430	523	204	990	1.194
28	Sulawesi Tenggara	43	203	246	28	157	185	71	360	431
29	Gorontalo	20	86	106	12	46	58	32	132	164
30	Sulawesi Barat	11	39	50	10	36	46	21	75	96
31	Maluku	17	61	78	9	74	83	26	135	161
32	Maluku Utara	10	69	79	12	54	66	22	123	145
33	Papua Barat	15	32	47	10	38	48	25	70	95
34	Papua	44	118	162	19	87	106	63	205	268
Indonesia		4.189	21.248	25.437	1.874	8.244	10.118	6.063	29.492	35.555

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020 (Update per 31 Desember 2019)

Keterangan : a) Termasuk analis farmasi, asisten apoteker, dan sarjana farmasi;

b) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

Lampiran 16.a

JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan									Total		
		Pejabat Struktural			Tenaga Pendidik			Tenaga Dukungan Manajemen					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	500	506	1.006	2	8	10	3.132	3.520	6.652	3.634	4.034	7.668
2	Sumatera Utara	644	898	1.542	8	15	23	3.217	4.652	7.869	3.869	5.565	9.434
3	Sumatera Barat	357	697	1.054	1	9	10	2.532	3.347	5.879	2.890	4.053	6.943
4	Riau	356	439	795	2	5	7	2.889	3.165	6.054	3.247	3.609	6.856
5	Jambi	416	350	766	3	6	9	1.763	2.256	4.019	2.182	2.612	4.794
6	Sumatera Selatan	500	577	1.077	4	6	10	4.006	5.127	9.133	4.510	5.710	10.220
7	Bengkulu	305	289	594	5	3	8	1.104	1.421	2.525	1.414	1.713	3.127
8	Lampung	521	518	1.039	6	22	28	3.384	4.361	7.745	3.911	4.901	8.812
9	Kepulauan Bangka Belitung	191	232	423	0	2	2	1.554	1.767	3.321	1.745	2.001	3.746
10	Kepulauan Riau	266	248	514	10	12	22	1.556	1.730	3.286	1.832	1.990	3.822
11	DKI Jakarta	835	1.138	1.973	24	33	57	16.256	13.948	30.204	17.115	15.119	32.234
12	Jawa Barat	1.800	1.572	3.372	8	19	27	16.796	14.202	30.998	18.604	15.793	34.397
13	Jawa Tengah	1.826	1.808	3.634	51	96	147	20.941	20.692	41.633	22.818	22.596	45.414
14	DI Yogyakarta	303	384	687	6	11	17	3.934	4.054	7.988	4.243	4.449	8.692
15	Jawa Timur	1.729	2.102	3.831	61	48	109	22.893	21.687	44.580	24.683	23.837	48.520
16	Banten	356	500	856	2	3	5	4.210	3.923	8.133	4.568	4.426	8.994
17	Bali	418	346	764	4	7	11	4.288	5.119	9.407	4.710	5.472	10.182
18	Nusa Tenggara Barat	508	255	763	59	87	146	3.398	2.425	5.823	3.965	2.767	6.732
19	Nusa Tenggara Timur	386	400	786	1	0	1	1.745	1.678	3.423	2.132	2.078	4.210
20	Kalimantan Barat	422	241	663	2	2	4	1.922	2.241	4.163	2.346	2.484	4.830
21	Kalimantan Tengah	390	242	632	1	1	2	1.565	1.823	3.388	1.956	2.066	4.022
22	Kalimantan Selatan	546	349	895	17	6	23	2.818	2.956	5.774	3.381	3.311	6.692
23	Kalimantan Timur	451	378	829	2	1	3	2.840	3.009	5.849	3.293	3.388	6.681
24	Kalimantan Utara	121	110	231	1	0	1	945	862	1.807	1.067	972	2.039
25	Sulawesi Utara	211	349	560	1	6	7	926	1.448	2.374	1.138	1.803	2.941
26	Sulawesi Tengah	286	297	583	3	13	16	1.458	1.910	3.368	1.747	2.220	3.967
27	Sulawesi Selatan	597	720	1.317	0	3	3	2.468	3.138	5.606	3.065	3.861	6.926
28	Sulawesi Tenggara	354	372	726	3	5	8	906	1.335	2.241	1.263	1.712	2.975
29	Gorontalo	138	180	318	1	2	3	796	1.235	2.031	935	1.417	2.352
30	Sulawesi Barat	131	154	285	0	0	0	347	381	728	478	535	1.013
31	Maluku	192	205	397	2	3	5	625	867	1.492	819	1.075	1.894
32	Maluku Utara	186	165	351	0	0	0	379	576	955	565	741	1.306
33	Papua Barat	214	150	364	0	0	0	564	562	1.126	778	712	1.490
34	Papua	453	311	764	9	9	18	1.440	1.467	2.907	1.902	1.787	3.689
Indonesia		16.909	17.482	34.391	299	443	742	139.597	142.884	282.481	156.805	160.809	317.614

Sumber: Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

Lampiran 16.b

JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Tenaga Psikologi Klinis			Tenaga Kesehatan Tradisional					
					Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan			Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	14	68	82	0	0	0	0	4	4
2	Sumatera Utara	2	28	30	0	2	2	0	6	6
3	Sumatera Barat	6	30	36	0	6	6	0	0	0
4	Riau	2	34	36	2	0	2	0	0	0
5	Jambi	4	14	18	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	14	66	80	10	6	16	0	8	8
7	Bengkulu	8	10	18	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	4	12	16	0	0	0	0	22	22
9	Kepulauan Bangka Belitung	4	14	18	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	2	12	14	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	14	128	142	42	54	96	58	112	170
12	Jawa Barat	12	84	96	0	0	0	12	2	14
13	Jawa Tengah	30	188	218	4	2	6	2	14	16
14	DI Yogyakarta	6	130	136	0	12	12	0	2	2
15	Jawa Timur	36	158	194	10	44	54	10	42	52
16	Banten	2	4	6	0	0	0	0	0	0
17	Bali	8	38	46	2	0	2	0	10	10
18	Nusa Tenggara Barat	4	32	36	2	0	2	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	2	8	10	2	4	6	0	0	0
20	Kalimantan Barat	6	20	26	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	4	10	14	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	6	54	60	0	0	0	8	4	12
23	Kalimantan Timur	2	8	10	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	2	8	10	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	4	14	18	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	12	22	34	0	0	0	0	2	2
27	Sulawesi Selatan	6	8	14	0	2	2	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	4	14	18	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	4	8	12	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	2	4	6	0	0	0	0	4	4
33	Papua Barat	0	8	8	0	0	0	0	0	0
34	Papua	2	4	6	0	2	2	56	68	124
Indonesia		228	1.240	1.468	74	134	208	146	300	446

Sumber: Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

b) Fasilitas Kesehatan terdiri dari, puskesmas, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

Lampiran 16.c

JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Tenaga Psikologi Klinis			Tenaga Kesehatan Tradisional					
					Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan			Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	4	8	12	0	0	0	0	4	4
2	Sumatera Utara	0	12	12	0	2	2	0	2	2
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	6	6	0	0	0
4	Riau	0	4	4	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	6	6	12	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	2	4	6	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	2	2	0	0	0	0	0	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	4	0	4	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	12	0	12	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	0	2	2	0	0	0	0	0	0
14	DI Yogyakarta	6	128	134	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	14	2	16	10	40	50	10	40	50
16	Banten	0	2	2	0	0	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	4	4	2	0	2	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	2	4	6	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	12	12	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	6	6	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	2	4	6	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	2	10	12	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	2	2	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua	2	0	2	0	2	2	56	68	124
Indonesia		54	208	262	14	54	68	66	114	180

Sumber: Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

Lampiran 16.d

JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Tenaga Psikologi Klinis			Tenaga Kesehatan Tradisional					
					Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan			Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	8	46	54	0	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	2	16	18	0	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	6	30	36	0	0	0	0	0	0
4	Riau	2	30	32	2	0	2	0	0	0
5	Jambi	4	14	18	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	8	60	68	10	6	16	0	8	8
7	Bengkulu	6	6	12	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	4	10	14	0	0	0	0	0	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	14	14	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	12	12	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	2	128	130	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	12	64	76	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	30	180	210	0	0	0	0	0	0
14	DI Yogyakarta	0	2	2	0	0	0	0	2	2
15	Jawa Timur	22	156	178	0	2	2	0	0	0
16	Banten	2	2	4	0	0	0	0	0	0
17	Bali	6	34	40	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	4	28	32	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	2	8	10	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	6	8	14	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	2	10	12	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	6	54	60	0	0	0	8	4	12
23	Kalimantan Timur	2	6	8	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	2	2	4	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	2	10	12	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	10	8	18	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	4	4	8	0	0	0	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	4	14	18	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	4	8	12	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	2	2	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	8	8	0	0	0	0	0	0
34	Papua	0	4	4	0	0	0	0	0	0
Indonesia		162	978	1.140	12	8	20	8	14	22

Sumber: Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

Lampiran 16.e

JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III POLTEKKES
MENURUT JENIS PROGRAM STUDI TAHUN 2019

No	Nama Poltekkes	Program Studi																		Total
		Keperawatan	Kebidanan	Keperawatan Gigi	Analisis Farmasi Dan Makanan	Farmasi	Jamu	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Fisioterapi	Okupasi Terapi	Terapi Wicara	Akupunktur	Analisis Kesehatan	Teknik Gigi	Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi	Perekam dan Informasi Kesehatan	Teknik Elektro Medik	Ortetik Prostetik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Aceh	358	116	83	-	81	-	34	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	718
2	Medan	155	303	85	-	87	-	91	87	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	902
3	Padang	189	134	71	-	-	-	79	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541
4	Riau	76	39	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195
5	Jambi	57	38	37	-	20	-	46	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	215
6	Palembang	285	155	81	-	75	-	-	77	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	749
7	Bengkulu	156	122	-	-	-	-	85	69	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	522
8	Tanjung Karang	204	177	48	-	54	-	78	45	-	-	-	-	92	26	-	-	-	-	724
9	Tanjung Pinang	60	76	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202
10	Pangkal Pinang	71	29	-	-	30	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156
11	Jakarta I	80	76	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241
12	Jakarta II	-	-	-	74	155	-	60	74	-	-	-	-	-	41	43	-	37	-	484
13	Jakarta III	190	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	-	-	-	-	-	451
14	Bandung	205	203	70	-	55	-	42	73	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	729
15	Tasikmalaya	153	79	75	-	39	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	506
16	Semarang	853	243	86	-	-	-	92	72	-	-	-	-	85	-	140	88	-	-	1.659
17	Surakarta	98	94	-	-	-	89	-	-	96	99	66	45	-	-	-	-	-	46	633
18	Yogyakarta	78	36	80	-	-	-	79	48	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	360
19	Surabaya	263	198	36	-	-	-	116	37	-	-	-	-	70	-	-	-	49	-	769
20	Malang	460	145	-	-	-	-	-	114	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	803
21	Banten	92	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	260
22	Denpasar	186	57	110	-	-	-	26	50	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	482
23	Mataram	133	55	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	308
24	Kupang	459	186	110	-	117	-	70	89	-	-	-	-	97	-	-	-	-	-	1.128
25	Pontianak	94	50	125	-	-	-	39	63	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	426
26	Palangkaraya	131	12	-	-	-	-	-	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265
27	Banjarmasin	38	42	35	-	-	-	40	51	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	250
28	Kalimantan Timur	118	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	260
29	Manado	86	54	67	-	69	-	44	38	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	411
30	Palu	172	117	-	-	-	-	61	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388
31	Makassar	247	98	44	-	88	-	42	45	45	-	-	-	48	-	-	-	-	-	657
32	Kendari	73	84	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	254
33	Gorontalo	143	132	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322
34	Mamuju	27	37	-	-	-	-	15	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120
35	Maluku	272	227	-	-	-	-	102	67	-	-	-	-	109	-	-	-	-	-	777
36	in Sur Ternate	88	81	-	-	-	-	43	31	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	280
37	Jayapura	438	184	-	-	41	-	61	18	-	-	-	-	93	-	-	-	-	-	835
38	Sorong	191	115	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341
Total		6.979	4.083	1.328	74	911	89	1.411	1.843	141	99	66	45	1.622	67	183	250	86	46	19.323

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Catatan : - = tidak ada program studi di poltekkes

Lampiran 16.f

JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III RPL POLTEKKES
MENURUT JENIS PROGRAM STUDI TAHUN 2019

No	Nama Poltekkes	Program Studi								Total
		Keperawatan	Kebidanan	Keperawatan Gigi	Farmasi	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Analisis Kesehatan	Perekam dan Informasi Kesehatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	443	168	103	79	14	13	-	-	820
2	Medan	107	144	72	48	36	57	89	-	553
3	Padang	42	-	107	-	26	41	-	-	216
4	Riau	78	-	-	-	-	-	-	-	78
5	Jambi	146	13	86	-	23	-	-	-	268
6	Palembang	260	44	86	44	-	20	79	-	533
7	Bengkulu	73	-	-	-	1	-	123	-	197
8	Tanjung Karang	161	65	60	29	-	-	-	-	315
9	Tanjung Pinang	13	8	-	-	-	-	-	-	21
10	Pangkal Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11	Jakarta I	32	-	194	-	-	-	-	-	226
12	Jakarta II	-	-	-	84	-	10	-	-	94
13	Jakarta III	21	-	-	-	-	-	40	-	61
14	Bandung	106	18	34	40	57	59	21	-	335
15	Tasikmalaya	106	19	29	-	-	-	-	-	154
16	Semarang	141	37	99	-	-	2	20	28	327
17	Surakarta	83	13	-	-	-	-	-	-	96
18	Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	0
19	Surabaya	111	101	148	-	-	52	25	-	437
20	Malang	83	4	-	-	-	-	-	-	87
21	Banten	76	16	-	-	-	-	-	-	92
22	Denpasar	49	-	22	-	-	15	41	-	127
23	Mataram	94	-	-	-	-	-	66	-	160
24	Kupang	183	216	103	26	39	9	25	-	601
25	Pontianak	77	17	16	-	8	-	-	-	115
26	Palangkaraya	29	-	-	-	-	43	-	-	72
27	Banjarmasin	67	-	56	-	33	13	-	-	169
28	Kalimantan Timur	40	13	-	-	-	-	8	-	61
29	Manado	165	47	82	59	83	12	34	-	482
30	Palu	183	67	-	-	32	-	-	-	282
31	Makassar	149	13	97	55	7	24	73	-	418
32	Kendari	150	-	-	-	-	19	-	-	169
33	Gorontalo	69	-	-	-	-	-	-	-	69
34	Mamuju	-	-	-	-	-	-	-	-	0
35	Maluku	204	100	-	-	10	-	-	-	314
36	Ternate	77	-	-	-	-	14	-	-	91
37	Jayapura	301	132	-	22	-	-	68	-	523
38	Sorong	146	-	-	-	-	-	-	-	146
Total		4.065	1.255	1.394	486	369	403	712	28	8.709

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Catatan: - = tidak ada program studi di poltekkes

Lampiran 16.g

JUMLAH LULUSAN PROGRAM DIPLOMA IV POLTEKKES
MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2019

No	Poltekkes	Kebidanan	Keperawatan		Kesehatan Lingkungan	Gizi	Keterampilan Fisik				Teknik Biomedika				Jumlah
			Keperawatan	Keperawatan Gigi		Gizi	Fisioterapi	Okupasi Terapi	Terapi Wicara	Akupunktur	Analisis Kesehatan	Teknik Elektromedik	Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi	Ortodontik Prostetik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Aceh	104	94	130	65	87	-	-	-	-	-	-	-	-	480
2	Medan	131	47	-	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	275
3	Padang	148	-	-	37	68	-	-	-	-	-	-	-	-	253
4	Riau	70	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108
5	Jambi	116	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166
6	Palembang	35	43	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	114
7	Bengkulu	85	34	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	162
8	Tanjung Karang	77	36	-	35	-	-	-	-	-	36	-	-	-	184
9	Tanjung Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pangkal Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Jakarta I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18
12	Jakarta II	-	-	-	42	46	-	-	-	-	-	38	62	-	188
13	Jakarta III	77	-	-	-	-	83	-	-	-	37	-	-	-	197
14	Bandung	-	-	-	41	75	-	-	-	-	84	-	-	-	200
15	Tasikmalaya	156	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234
16	Semarang	321	97	121	59	86	-	-	-	-	-	-	184	-	868
17	Surakarta	159	88	-	-	-	106	64	62	40	-	-	-	48	567
18	Yogyakarta	132	39	81	66	80	-	-	-	-	76	-	-	-	474
19	Surabaya	133	37	38	52	-	-	-	-	-	86	72	-	-	418
20	Malang	314	86	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	463
21	Banten	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
22	Denpasar	57	75	-	72	95	-	-	-	-	-	-	-	-	299
23	Mataram	46	88	-	-	82	-	-	-	-	60	-	-	-	276
24	Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Pontianak	177	75	-	50	73	-	-	-	-	117	-	-	-	492
26	Palangkaraya	127	48	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	203
27	Banjarmasin	34	32	34	39	44	-	-	-	-	49	-	-	-	232
28	Kalimantan Timur	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
29	Manado	104	68	-	32	46	-	-	-	-	-	-	-	-	250
30	Palu	93	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
31	Makassar	71	93	134	82	106	129	-	-	-	83	-	-	-	698
32	Kendari	182	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	200
33	Gorontalo	124	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232
34	Mamuju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
35	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
36	Ternate	36	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
37	Jayapura	76	43	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	159
38	Sorong	44	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94
Total		3.266	1.521	641	672	1.213	318	64	62	40	628	110	246	66	8.847

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Catatan: - = tidak ada program studi di poltekkes

Lampiran 16.h

**JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI
MENURUT JENIS TENAGA DAN PROVINSI TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jenis Tenaga Kesehatan													Jumlah
		Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Tenaga Teknik Biomedika	Tenaga Keterampilan Fisik	Tenaga Keteknisian Medis	Tenaga Teknik Kefarmasian	Apoteker	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Aceh	545	118	4.732	2.003	717	307	271	185	45	19	523	626	0	10.091
2	Sumatera Utara	2.432	362	6.619	5.897	1.716	202	441	566	272	210	457	2.423	295	21.892
3	Sumatera Barat	1.083	367	4.352	2.544	719	300	573	522	102	111	676	1.037	260	12.646
4	Riau	215	0	2.327	1.460	674	0	263	166	0	102	177	662	0	6.046
5	Jambi	277	0	1.366	909	294	148	71	17	0	71	119	242	0	3.514
6	Sumatera Selatan	602	119	4.071	2.815	702	165	202	429	49	116	377	978	0	10.625
7	Bengkulu	120	0	1.781	1.132	177	188	245	268	0	0	55	428	0	4.394
8	Lampung	1.329	0	2.969	1.690	187	240	105	337	54	0	223	337	0	7.471
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	343	137	61	0	58	0	0	0	0	57	0	656
10	Kepulauan Riau	240	0	774	408	0	131	0	12	0	0	0	5	0	1.570
11	DKI Jakarta	4.441	1.193	7.132	3.109	2.089	306	954	571	474	543	1.161	3.478	1.836	27.287
12	Jawa Barat	2.060	560	16.047	5.381	1.177	298	838	1.956	315	268	1.709	4.356	1.169	36.134
13	Jawa Tengah	2.303	471	16.987	4.397	1.620	391	1.009	1.713	857	1.569	1.502	4.990	1.694	39.503
14	DI Yogyakarta	1.526	627	4.651	1.774	745	264	631	486	149	487	843	1.677	1.324	15.184
15	Jawa Timur	3.516	1.449	21.493	6.582	1.182	475	1.542	1.893	243	440	1.505	3.577	1.316	45.213
16	Banten	721	0	4.592	1.721	528	0	0	124	11	0	224	335	0	8.256
17	Bali	682	212	2.962	522	281	196	282	237	139	238	321	490	126	6.688
18	Nusa Tenggara Barat	306	0	2.130	666	54	25	271	438	0	0	112	321	0	4.323
19	Nusa Tenggara Timur	128	0	2.089	1.093	200	147	151	148	0	0	240	311	0	4.507
20	Kalimantan Barat	113	0	2.206	1.164	318	96	167	278	0	0	267	402	117	5.128
21	Kalimantan Tengah	84	0	843	781	0	0	118	118	0	0	0	213	0	2.157
22	Kalimantan Selatan	159	61	2.873	848	386	249	244	380	33	55	386	1.076	115	6.865
23	Kalimantan Timur	90	5	1.792	739	380	56	0	182	0	0	0	321	113	3.678
24	Kalimantan Utara	0	0	254	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362
25	Sulawesi Utara	395	95	3.450	880	366	249	173	133	0	18	231	350	0	6.340
26	Sulawesi Tengah	410	0	1.543	1.052	455	94	55	0	0	0	0	381	0	3.990
27	Sulawesi Selatan	1.344	294	10.252	4.421	1.862	266	364	757	0	395	1.053	2.914	575	24.497
28	Sulawesi Tenggara	25	0	1.421	1.061	472	0	171	198	0	0	116	435	0	3.899
29	Gorontalo	0	0	1.131	536	247	0	96	29	0	0	28	123	0	2.190
30	Sulawesi Barat	0	0	583	329	89	24	37	0	0	0	0	39	0	1.101
31	Maluku	1	0	1.443	459	178	270	154	197	0	0	0	0	0	2.702
32	Maluku Utara	0	0	360	377	159	80	87	74	0	0	0	14	0	1.151
33	Papua Barat	0	0	695	220	46	0	56	0	0	0	0	0	0	1.017
34	Papua	489	0	1.943	984	108	109	100	237	0	0	0	261	0	4.231
Indonesia		25.636	5.933	138.206	58.199	18.189	5.276	9.729	12.651	2.743	4.642	12.305	32.859	8.940	335.308

Sumber : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Lampiran 16.i

JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Dokter Spesialis Dasar				Dokter Spesialis Penunjang					Spesialis Lain	Dokter Gigi Spesialis	Total
		Spesialis Penyakit Dalam	Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Spesialis Anak	Spesialis Bedah	Spesialis Radiologi	Spesialis Anestesi	Spesialis Patologi Klinik	Spesialis Patologi Anatomi	Spesialis Rehabilitasi Medik			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	7
2	Sumatera Utara	3	9	0	10	0	0	0	7	0	22	16	67
3	Sumatera Barat	24	6	11	6	0	0	7	2	0	35	0	91
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	16	22	9	26	0	18	0	4	0	18	0	113
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	87	65	59	111	33	49	9	12	11	209	79	724
12	Jawa Barat	21	17	25	94	28	33	15	15	0	148	69	465
13	Jawa Tengah	25	34	16	22	13	30	30	5	0	144	0	319
14	DI Yogyakarta	33	20	28	40	19	11	14	7	0	96	68	336
15	Jawa Timur	66	13	43	65	19	19	15	7	0	217	89	553
16	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bali	30	16	28	18	0	13	0	3	0	74	0	182
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	14	12	26	13	0	0	0	0	0	32	0	97
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	19	20	21	35	21	21	19	11	0	61	35	263
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indonesia		338	238	266	443	133	194	109	73	11	1.056	356	3.217

Sumber : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Lampiran 17.a

**CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	PBI APBN	Penduduk yang Didaftarkan Pemda	Bukan PBI			Total	%
					Pekerja Penerima Upah	Pekerja Bukan Penerima Upah	Bukan Pekerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	5.459.891	2.134.262	2.352.407	840.304	40.938	137.015	5.504.926	100,82
2	Sumatera Utara	14.703.532	4.722.225	1.560.781	2.417.670	2.079.745	314.015	11.094.436	75,45
3	Sumatera Barat	5.498.751	1.810.058	824.688	846.261	828.497	120.254	4.429.758	80,56
4	Riau	7.128.305	1.598.120	690.212	1.412.871	847.810	61.637	4.610.650	64,68
5	Jambi	3.677.894	952.254	319.768	637.707	630.089	48.376	2.588.194	70,37
6	Sumatera Selatan	8.567.923	2.709.021	1.570.744	1.220.148	854.970	119.816	6.474.699	75,57
7	Bengkulu	2.019.848	738.380	163.000	336.831	320.859	26.173	1.585.243	78,48
8	Lampung	8.521.201	3.834.771	808.317	948.330	918.223	110.163	6.619.804	77,69
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.517.590	227.100	281.246	269.994	321.643	19.681	1.119.664	73,78
10	Kepulauan Riau	2.242.198	326.747	226.138	776.419	380.648	17.524	1.727.476	77,04
11	DKI Jakarta	10.644.986	1.080.477	5.359.397	9.691.840	1.001.804	357.889	17.491.407	164,32
12	Jawa Barat	49.935.858	16.628.476	4.223.987	8.411.225	6.427.362	866.347	36.557.397	73,21
13	Jawa Tengah	34.940.078	15.793.737	3.383.203	5.298.847	3.737.963	682.855	28.896.605	82,70
14	D I Yogyakarta	3.882.288	1.494.455	522.428	778.855	373.696	146.482	3.315.916	85,41
15	Jawa Timur	39.872.395	15.554.866	3.045.145	5.691.146	3.888.406	853.408	29.032.971	72,81
16	Banten	13.160.496	3.269.082	2.111.442	3.441.218	1.571.016	145.456	10.538.214	80,07
17	Bali	4.380.824	871.983	1.513.531	1.128.655	562.090	86.230	4.162.489	95,02
18	Nusa Tenggara Barat	5.125.622	2.887.029	523.250	534.241	310.629	54.870	4.310.019	84,09
19	Nusa Tenggara Timur	5.541.394	2.980.815	585.883	572.193	254.495	83.205	4.476.591	80,78
20	Kalimantan Barat	5.134.760	1.807.915	343.952	983.010	616.122	72.338	3.823.337	74,46
21	Kalimantan Tengah	2.769.156	524.784	806.574	767.572	279.770	38.259	2.416.959	87,28
22	Kalimantan Selatan	4.303.979	995.288	709.877	809.115	484.789	73.017	3.072.086	71,38
23	Kalimantan Timur	3.793.152	723.610	419.829	1.381.794	872.208	46.224	3.443.665	90,79
24	Kalimantan Utara	768.505	148.154	171.336	187.011	128.570	6.911	641.982	83,54
25	Sulawesi Utara	2.528.794	870.543	803.275	436.296	406.084	79.137	2.595.335	102,63
26	Sulawesi Tengah	3.096.976	1.219.243	654.149	483.901	303.505	42.828	2.703.626	87,30
27	Sulawesi Selatan	8.928.004	3.448.123	2.532.574	1.218.520	1.086.116	221.338	8.506.671	95,28
28	Sulawesi Tenggara	2.755.589	1.209.218	584.213	398.623	180.324	36.982	2.409.360	87,44
29	Gorontalo	1.219.576	540.457	369.215	156.665	56.088	17.320	1.139.745	93,45
30	Sulawesi Barat	1.405.012	646.256	343.343	168.755	129.582	20.005	1.307.941	93,09
31	Maluku	1.831.880	764.428	236.717	308.345	104.972	43.667	1.458.129	79,60
32	Maluku Utara	1.278.764	370.409	257.786	223.922	65.109	14.908	932.134	72,89
33	Papua Barat	981.822	784.356	230.820	223.870	57.373	14.590	1.311.009	133,53
34	Papua	3.435.430	2.847.894	313.249	522.512	127.016	32.046	3.842.717	111,86
Total		271.052.473	96.514.536	38.842.476	53.524.666	30.248.511	5.010.966	224.141.155	82,69

Sumber : BPJS Kesehatan, 2020

Lampiran 17.b

FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
TAHUN 2019

No	Provinsi	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama					Total
		Dokter Praktik Perorangan	Klinik Pratama	Puskesmas	RS Tipe D Pratama	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
1	Aceh	82	178	353	0	3	616
2	Sumatera Utara	139	543	586	2	9	1.279
3	Sumatera Barat	115	150	274	2	36	577
4	Riau	91	269	227	0	24	611
5	Jambi	84	73	196	0	16	369
6	Sumatera Selatan	247	218	341	0	46	852
7	Bengkulu	95	43	179	1	17	335
8	Lampung	137	185	310	0	10	642
9	Kepulauan Bangka Belitung	33	32	64	1	5	135
10	Kepulauan Riau	13	127	81	0	1	222
11	DKI Jakarta	18	349	324	0	1	692
12	Jawa Barat	536	1354	1066	0	67	3.023
13	Jawa Tengah	1156	704	878	1	306	3.045
14	D I Yogyakarta	112	118	121	0	37	388
15	Jawa Timur	756	777	967	0	222	2.722
16	Banten	13	424	242	0	3	682
17	Bali	334	119	120	4	91	668
18	Nusa Tenggara Barat	100	53	166	1	12	332
19	Nusa Tenggara Timur	94	84	403	1	32	614
20	Kalimantan Barat	83	86	245	0	13	427
21	Kalimantan Tengah	75	60	201	0	7	343
22	Kalimantan Selatan	163	104	234	0	40	541
23	Kalimantan Timur	126	152	185	2	44	509
24	Kalimantan Utara	30	21	51	3	6	111
25	Sulawesi Utara	168	60	191	0	30	449
26	Sulawesi Tengah	47	50	205	4	12	318
27	Sulawesi Selatan	214	215	458	1	82	970
28	Sulawesi Tenggara	66	40	286	1	10	403
29	Gorontalo	35	33	93	0	7	168
30	Sulawesi Barat	36	20	94	1	5	156
31	Maluku	34	24	205	0	8	271
32	Maluku Utara	38	21	136	2	10	207
33	Papua Barat	25	21	155	0	3	204
34	Papua	59	59	413	5	13	549
Total		5.354	6.766	10.050	32	1.228	23.430

Sumber: BPJS Kesehatan, 2020

Lampiran 18

PERSENTASE DESA YANG MEMANFAATKAN DANA DESA UNTUK KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Desa		
		Jumlah	Yang Memanfaatkan Dana Desa Untuk Kesehatan	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	6.497	63	0,97
2	Sumatera Utara	5.417	4.408	81,37
3	Sumatera Barat	928	688	74,14
4	Riau	1.591	1.519	95,47
5	Jambi	1.399	712	50,89
6	Sumatera Selatan	2.853	1.982	69,47
7	Bengkulu	1.341	1.227	91,50
8	Lampung	2.435	1.981	81,36
9	Kepulauan Bangka Belitung	309	273	88,35
10	Kepulauan Riau	275	258	93,82
11	DKI Jakarta		-	0,00
12	Jawa Barat	5.312	4.072	76,66
13	Jawa Tengah	7.809	6.390	81,83
14	D I Yogyakarta	392	381	97,19
15	Jawa Timur	7.724	4.038	52,28
16	Banten	1.238	1.238	100,00
17	Bali	636	609	95,75
18	Nusa Tenggara Barat	995	995	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	3.026	1.232	40,71
20	Kalimantan Barat	2.031	1.318	64,89
21	Kalimantan Tengah	1.432	1.406	98,18
22	Kalimantan Selatan	1.864	1.123	60,25
23	Kalimantan Timur	841	211	25,09
24	Kalimantan Utara	447	29	6,49
25	Sulawesi Utara	1.507	559	37,09
26	Sulawesi Tengah	1.842	1.842	100,00
27	Sulawesi Selatan	2.255	2.078	92,15
28	Sulawesi Tenggara	1.911	1.273	66,61
29	Gorontalo	657	515	78,39
30	Sulawesi Barat	575	312	54,26
31	Maluku	1.198	619	51,67
32	Maluku Utara	1.063	773	72,72
33	Papua Barat	1.742	652	37,43
34	Papua	5.411	3.679	67,99
INDONESIA		74.953	48.455	64,65

Sumber: Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2020

Lampiran 19.a

**ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019**

NO	SUMBER BIAYA	ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN	
		Rupiah	%
(1)	(2)	(3)	(4)
	ANGGARAN KESEHATAN BERSUMBER:		
1	APBN PUSAT	71.121.947.000.000	57,80
	a. Rupiah Murni	55.737.300.000.000	
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	448.662.000.000	
	c. Badan Layanan Umum (BLU)	14.018.900.000.000	
	d. Pinjaman Luar Negeri (PLN)	282.500.000.000	
	e. Hibah Langsung Luar Negeri (HLL)	634.585.000.000	
2	DANA DEKONSENTRASI	1.040.240.000.000	0,85
3	DANA ALOKASI KHUSUS	29.502.000.000.000	23,97
	a. DAK Fisik	19.243.400.000.000	
	b. DAK Nonfisik	10.258.600.000.000	
4	SUMBER PEMERINTAH LAIN*	21.391.400.000.000	17,38
TOTAL ANGGARAN KESEHATAN (Rp.)		123.055.602.624.050	
TOTAL APBN (Rp.)		2.461.112.052.481.000,00	
% APBN KESEHATAN THD APBN INDONESIA			5%
ANGGARAN KESEHATAN PERKAPITA		Rp 453.992	

Sumber: Sistem Evaluasi Realisasi Anggaran Pemerintah Biro Keuangan dan BMN dan Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes 2020

Lampiran 19.b

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENURUT ESELON I TAHUN 2019**

No	Unit Eselon I	Anggaran Kementerian Kesehatan											
		Kantor Pusat			Kantor Daerah			Dekonsentrasi			Jumlah		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Sekretariat Jenderal	37971955767000,00	37.747.508.288.101	99,41	-	-	0,00	99.707.151.000	90.331.492.490	90,60	38.071.662.918.000	37.837.839.780.591	99,39
2	Inspektorat Jenderal	118.172.589.000	114.600.192.101	96,98	-	-	0,00	-	-	0,00	118.172.589.000	114.600.192.101	96,98
3	Ditjen Kesehatan Masyarakat	1369319582000,00	1.229.715.754.717	89,80	21.602.866.000	21013499193,00	97,27	320.236.839.000	298.653.156.151	93,26	1.711.159.287.000	1.549.382.410.061	90,55
4	Ditjen Pelayanan Kesehatan	717.349.102.000	626.778.868.417	87,37	18.663.162.157.000	16836971245735,00	90,21	64.459.500.000	59.179.894.705	91,81	19.444.970.759.000	17.522.930.008.857	90,12
5	Ditjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	1875262797000,00	1.781.426.538.495	95,00	1.075.075.374.000	1024273785689,00	95,27	365.298.745.000	318.794.113.632	87,27	3.315.636.916.000	3.124.494.437.816	94,24
6	Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan	2.793.475.661.000	1.921.448.952.814	68,78	-	-	0,00	62.000.000.000	57.882.118.785	93,36	2.855.475.661.000	1.979.331.071.599	69,32
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	650897646000,00	572.071.472.651	87,89	194.947.892.000	182145156044,00	93,43	-	-	0,00	845.845.538.000	754.216.628.695	89,17
8	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	1.348.539.588.000	1.238.707.190.680	91,86	3.281.936.284.000	3038779388260,00	92,59	128.538.920.000	119.044.854.354	92,61	4.759.014.792.000	4.396.531.433.294	92,38
Kementerian Kesehatan		46.844.972.732.000	45.232.257.257.976	96,56	23.236.724.573.000	21.103.183.074.921	90,82	1.040.241.155.000	943.885.630.117	90,74	71.121.938.460.000	67.279.325.963.014	94,60

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 19.c

**ALOKASI DAN REALISASI REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
MENURUT JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Jenis Belanja	Unit Eselon I								
		Setjen	Itjen	Ditjen Kesehatan Masyarakat	Ditjen Pelayanan Kesehatan	Ditjen P2P	Ditjen Farmalkes	Badan Litbangkes	Badan PPSDM Kesehatan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.	BELANJA PEGAWAI									
	Anggaran	1.154.790.934.000	40.396.454.000	69.493.452.000	2.347.481.282.000	559.279.769.000	36.116.701.000	176.218.199.000	1.109.508.853.000	5.493.285.644.000
	Realisasi	1.138.366.884.776	40.354.456.991	68.932.238.917	2.263.645.217.971	538.984.726.173	34.077.506.069	171.224.680.247	1.064.938.006.188	5.320.523.717.332
	%	98,58	99,90	99,19	96,43	96,37	94,35	97,17	95,98	96,86
B.	BELANJA BARANG									
	Anggaran	917.138.386.000	76.095.271.000	1.633.347.248.000	13.614.116.883.000	2.402.819.920.000	2.807.957.301.000	564.954.635.000	3.069.980.681.000	25.086.410.325.000
	Realisasi	844.570.842.782	72.594.098.010	1.474.163.925.911	12.520.855.325.894	2.248.808.599.011	1.934.820.092.905	488.623.414.481	2.807.389.410.714	22.391.825.709.708
	%	92,09	95,40	90,25	91,97	93,59	68,90	86,49	91,45	89,259
C.	BELANJA MODAL									
	Anggaran	86.933.598.000	1.680.864.000	8.318.587.000	3.483.372.594.000	353.537.227.000	11.401.659.000	104.672.704.000	579.525.258.000	4.629.442.491.000
	Realisasi	77.759.379.033	1.651.637.100	6.286.245.233	2.739.871.464.992	336.979.112.632	10.433.472.625	94.368.533.967	524.168.016.392	3.791.517.861.974
	%	89,45	98,26	75,57	78,66	95,32	91,51	90,16	90,45	81,90
D.	BELANJA BANSOS									
	Anggaran	35.912.800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	35.912.800.000.000
	Realisasi	35.777.142.674.000	0	0	0	0	0	0	0	35.777.142.674.000
	%	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
	TOTAL									
	Anggaran	38.071.662.918.000	118.172.589.000	1.711.159.287.000	19.444.970.759.000	3.315.636.916.000	2.855.475.661.000	845.845.538.000	4.759.014.792.000	71.121.938.460.000
	Realisasi	37.837.839.780.591	114.600.192.101	1.549.382.410.061	17.524.372.008.857	3.124.772.437.816	1.979.331.071.599	754.216.628.695	4.396.495.433.294	67.281.009.963.014
	%	99,39	96,98	90,55	90,12	94,24	69,32	89,17	92,38	94,60

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 19.d

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN ESELON 1 KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENURUT SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Sumber Dana	Unit Eselon I								
		Setjen	Itjen	Ditjen Kesmas	Ditjen Yankes	Ditjen P2P	Ditjen Farmalkes	Badan Litbangkes	Badan PPSDM Kesehatan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.	RUPIAH MURNI									
	Anggaran	38.054.219.189.000	118.172.589.000	1.689.562.252.000	5.748.426.942.000	2.619.139.765.000	2.833.841.643.000	827.979.026.000	3.845.996.541.000	55.737.337.947.000
	Realisasi	37.820.755.685.338	114.600.192.101	1.528.549.074.751	5.370.927.640.472	2.473.636.194.973	1.958.379.276.196	736.760.509.869	3.572.985.955.128	53.576.594.528.828
	%	99,39	96,98	90,47	93,43	94,44	69,11	88,98	92,90	96,12
B.	PINJAMAN LUAR NEGERI									
	Anggaran				282.000.000.000				500.000.000	282.500.000.000
	Realisasi				246.364.038.460					246.364.038.460
	%	0,00	0,00	0,00	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21
C.	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK									
	Anggaran	9.009.161.000		1.017.137.000	34.484.103.000	115.746.136.000	15.073.380.000	2.671.607.000	270.660.189.000	448.661.713.000
	Realisasi	8.649.875.905		1.014.356.296	24.817.398.615	110.026.579.723	14.456.633.619	2.418.385.140	241.349.561.123	402.732.790.421
	%	96,01		99,73	71,97	95,06	95,91	90,52	89,17	89,76
D.	BADAN LAYANAN UMUM									
	Anggaran				13.378.942.484.000				639.911.421.000	14.018.853.905.000
	Realisasi				11.881.149.757.592				580.213.276.243	12.461.363.033.835
	%	0,00	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	90,67	88,89
E.	HIBAH LUAR NEGERI									
	Anggaran									
	Realisasi									
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI (HLL)									
	Anggaran	8.434.568.000		20.579.898.000	1.117.230.000	580.751.015.000	6.560.638.000	15.194.905.000	1.946.641.000	634.584.895.000
	Realisasi	8.434.219.348		19.818.979.014	1.113.173.718	541.109.663.120	6.495.161.784	15.037.733.686	1.946.640.800	593.955.571.470
	%	100,00		96,30	99,64	93,17	99,00	98,97	100,00	93,60
	TOTAL									
	Anggaran	38.071.662.918.000	118.172.589.000	1.711.159.287.000	19.444.970.759.000	3.315.636.916.000	2.855.475.661.000	845.845.538.000	4.759.014.792.000	71.121.938.460.000
	Realisasi	37.837.839.780.591	114.600.192.101	1.549.382.410.061	17.524.372.008.857	3.124.772.437.816	1.979.331.071.599	754.216.628.695	4.396.495.433.294	67.281.009.963.014
	%	99,39	96,98	90,55	90,12	94,24	69,32	89,17	92,38	94,60

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 19.e

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DEKONSENTRASI KMENTERIAN KESEHATAN RI
MENURUT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Provinsi	Alokasi	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	33.242.305.000	28.569.217.834	85,94
2	Sumatera Utara	43.604.874.000	38.972.632.479	89,38
3	Sumatera Barat	25.690.656.000	24.036.368.821	93,56
4	Riau	22.658.675.000	20.851.025.117	92,02
5	Jambi	22.119.474.000	21.520.917.498	97,29
6	Sumatera Selatan	29.348.520.000	26.866.682.899	91,54
7	Bengkulu	23.492.877.000	22.706.273.681	96,65
8	Lampung	25.883.687.000	24.591.753.613	95,01
9	Kepulauan Bangka Belitung	16.516.239.000	15.201.342.854	92,04
10	Kepulauan Riau	19.773.751.000	18.292.778.436	92,51
11	DKI Jakarta	15.897.847.000	14.790.679.991	93,04
12	Jawa Barat	51.917.659.000	40.610.116.154	78,22
13	Jawa Tengah	57.254.877.000	53.896.387.641	94,13
14	D.I. Yogyakarta	16.569.846.000	15.288.186.388	92,27
15	Jawa Timur	53.136.951.000	47.146.177.651	88,73
16	Banten	23.232.724.000	19.215.801.030	82,71
17	Bali	20.283.135.000	18.428.069.157	90,85
18	Nusa Tenggara Barat	24.228.463.000	22.625.354.122	93,38
19	Nusa Tenggara Timur	42.587.160.000	41.167.778.651	96,67
20	Kalimantan Barat	26.036.079.000	22.365.223.427	85,90
21	Kalimantan Tengah	24.886.158.000	23.075.846.336	92,73
22	Kalimantan Selatan	24.791.847.000	22.728.485.778	91,68
23	Kalimantan Timur	25.558.493.000	22.878.769.213	89,52
24	Kalimantan Utara	18.728.004.000	16.554.798.753	88,40
25	Sulawesi Utara	27.257.139.000	26.087.382.000	95,71
26	Sulawesi Tengah	32.622.857.000	31.954.815.610	97,95
27	Sulawesi Selatan	40.041.303.000	36.773.715.342	91,84
28	Sulawesi Tenggara	28.975.753.000	27.709.715.414	95,63
29	Gorontalo	21.231.903.000	20.633.455.431	97,18
30	Sulawesi Barat	19.493.195.000	18.201.814.511	93,38
31	Maluku	27.745.546.000	23.532.557.868	84,82
32	Maluku Utara	26.488.492.000	25.269.387.621	95,40
33	Papua Barat	48.840.223.000	44.391.333.367	90,89
34	Papua	80.104.443.000	66.950.785.429	83,58
Dekonsentrasi Kemenkes		1.040.241.155.000	943.885.630.117	90,74

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 19.f

**ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019**

No	Provinsi	DAK Fisik			DAK Non Fisik		
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	718.158.039.000	418.432.442.461	58,26	361.086.006.000	278.750.624.093	77,20
2	Sumatera Utara	808.177.881.000	479.851.227.811	59,37	596.872.694.000	452.792.713.811	75,86
3	Sumatera Barat	717.228.956.000	398.746.360.953	55,60	277.372.082.000	210.690.750.487	75,96
4	Riau	510.997.915.000	252.511.602.460	49,42	243.149.636.000	194.072.943.090	79,82
5	Jambi	286.367.199.000	195.155.950.767	68,15	198.053.157.000	168.305.696.216	84,98
6	Sumatera Selatan	435.543.081.000	314.441.410.283	72,20	335.488.544.000	312.657.260.271	93,19
7	Bengkulu	433.765.834.000	304.241.946.017	70,14	180.094.095.000	145.461.557.068	80,77
8	Lampung	328.170.834.000	212.629.644.421	64,79	298.979.106.000	193.589.365.425	64,75
9	Kepulauan Bangka Belitung	183.730.990.000	154.962.854.884	84,34	69.539.472.000	55.310.067.939	79,54
10	Kepulauan Riau	304.041.567.000	166.478.986.900	54,76	88.924.384.000	66.033.118.899	74,26
11	DKI Jakarta	3.924.532.000	1.230.845.000	31,36	20.075.000.000	19.209.619.841	95,69
12	Jawa Barat	997.250.448.000	601.954.778.733	60,36	942.416.934.000	792.457.167.262	84,09
13	Jawa Tengah	958.315.496.000	661.550.997.921	69,03	797.353.751.000	661.689.126.833	82,99
14	D.I. Yogyakarta	153.128.625.000	134.145.079.020	87,60	114.621.234.000	99.195.999.296	86,54
15	Jawa Timur	1.129.686.420.000	658.173.080.049	58,26	853.519.638.000	652.545.243.566	76,45
16	Banten	296.689.434.000	200.613.571.276	67,62	203.687.075.000	177.554.123.737	87,17
17	Bali	194.504.022.000	153.737.657.399	79,04	114.487.592.000	94.775.525.195	82,78
18	Nusa Tenggara Barat	1.026.023.223.000	533.454.568.614	51,99	191.499.525.000	92.679.558.073	48,40
19	Nusa Tenggara Timur	1.078.926.390.000	687.398.797.897	63,71	528.433.553.000	387.795.652.758	73,39
20	Kalimantan Barat	840.607.241.000	576.237.510.295	68,55	320.014.927.000	281.852.740.155	88,07
21	Kalimantan Tengah	334.118.415.000	258.547.354.286	77,38	246.568.819.000	200.031.635.962	81,13
22	Kalimantan Selatan	420.260.652.000	316.340.648.626	75,27	241.511.455.000	157.065.814.704	65,03
23	Kalimantan Timur	257.322.599.000	190.263.595.805	73,94	197.239.090.000	149.470.270.185	75,78
24	Kalimantan Utara	115.885.993.000	66.666.927.773	57,53	75.363.073.000	49.089.450.124	65,14
25	Sulawesi Utara	572.456.387.000	312.707.594.337	54,63	223.632.006.000	127.449.069.924	56,99
26	Sulawesi Tengah	860.337.262.000	591.509.157.088	68,75	256.278.602.000	209.233.374.996	81,64
27	Sulawesi Selatan	943.134.712.000	621.131.711.723	65,86	502.684.553.000	391.864.576.315	77,95
28	Sulawesi Tenggara	537.612.721.000	317.679.525.626	59,09	313.910.076.000	272.752.943.428	86,89
29	Gorontalo	291.860.323.000	140.756.920.588	48,23	111.073.700.000	73.924.652.897	66,55
30	Sulawesi Barat	325.281.220.000	209.557.911.340	64,42	124.123.185.000	84.466.549.949	68,05
31	Maluku	497.625.767.000	251.111.763.094	50,46	273.944.706.000	0	0,00
32	Maluku Utara	561.537.470.000	401.940.001.563	71,58	178.826.848.000	156.313.457.248	87,41
33	Papua Barat	539.153.011.000	281.010.553.290	52,12	206.529.019.000	57.701.943.957	27,94
34	Papua	1.589.386.341.000	904.141.361.313	56,89	571.279.208.000	335.029.691.632	58,65
TOTAL		19.251.211.000.000	11.969.314.339.613	62,17	10.258.632.745.000	7.601.812.285.336	74,10

Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan RI 2020

KET:

1. Data Alokasi dan Realisasi DAK Fisik 2019 berdasarkan data dari Kemenkeu per 20 Januari 2020
2. Data Alokasi dan Realisasi DAK Fisik 2019 merupakan gabungan bidang kesehatan dan KB
3. Data Realisasi DAK Fisik 2019 masih dapat bergerak hingga 21 Juli 2020
4. Data Realisasi DAK Nonfisik 2019 berdasarkan data dari e-Renggar (Biro Perencanaan dan Anggaran) per 7 Februari 2020

Lampiran 20

JUMLAH KELAHIRAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Kelahiran		
		Hidup	Mati	Hidup + Mati
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	115.422	603	116.025
2	Sumatera Utara	302.555	618	303.173
3	Sumatera Barat	109.431	516	109.947
4	Riau	154.878	447	155.325
5	Jambi	65.762	220	65.982
6	Sumatera Selatan	159.908	412	160.320
7	Bengkulu	37.103	189	37.292
8	Lampung	150.245	469	150.714
9	Kepulauan Bangka Belitung	27.429	163	27.592
10	Kepulauan Riau	41.058	186	41.244
11	DKI Jakarta	166.696	256	166.952
12	Jawa Barat	873.575	2.170	875.745
13	Jawa Tengah	527.433	2.450	529.883
14	DI Yogyakarta	54.127	273	54.400
15	Jawa Timur	566.300	1.995	568.295
16	Banten	240.174	402	240.576
17	Bali	64.541	336	64.877
18	Nusa Tenggara Barat	103.315	800	104.115
19	Nusa Tenggara Timur	139.136	709	139.845
20	Kalimantan Barat	100.232	583	100.815
21	Kalimantan Tengah	53.804	333	54.137
22	Kalimantan Selatan	80.440	389	80.829
23	Kalimantan Timur	74.937	472	75.409
24	Kalimantan Utara	12.139	124	12.263
25	Sulawesi Utara	40.802	144	40.946
26	Sulawesi Tengah	62.707	622	63.329
27	Sulawesi Selatan	168.185	913	169.098
28	Sulawesi Tenggara	56.906	478	57.384
29	Gorontalo	23.856	231	24.087
30	Sulawesi Barat	32.851	285	33.136
31	Maluku	44.630	416	45.046
32	Maluku Utara	29.195	326	29.521
33	Papua Barat	21.850	123	21.973
34	Papua	71.339	503	71.842
Jumlah (Indonesia)		4.772.961	19.156	4.792.117
Angka Lahir Mati per 1.000 Kelahiran (Dilaporkan)			4,0	

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020 (data per 12 Februari 2020)

Keterangan : Angka Lahir Mati (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan Angka Lahir Mati yang sebenarnya di populasi

Lampiran 21

**JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PROVINSI
TAHUN 2018 - 2019**

No	Provinsi	2018		2019	
		Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Kematian Ibu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(19)
1	Aceh	116.118	141	115.422	157
2	Sumatera Utara	305.935	186	302.555	202
3	Sumatera Barat	110.146	111	109.431	116
4	Riau	154.379	100	154.878	119
5	Jambi	66.106	46	65.762	59
6	Sumatera Selatan	161.571	120	159.908	105
7	Bengkulu	37.277	39	37.103	35
8	Lampung	152.816	102	150.245	111
9	Kepulauan Bangka Belitung	27.364	43	27.429	36
10	Kepulauan Riau	41.629	51	41.058	41
11	DKI Jakarta	170.265	98	166.696	100
12	Jawa Barat	878.472	700	873.575	684
13	Jawa Tengah	532.242	421	527.433	416
14	DI Yogyakarta	54.193	35	54.127	36
15	Jawa Timur	570.819	522	566.300	520
16	Banten	242.312	247	240.174	212
17	Bali	64.771	35	64.541	45
18	Nusa Tenggara Barat	104.166	99	103.315	97
19	Nusa Tenggara Timur	137.715	141	139.136	118
20	Kalimantan Barat	101.045	86	100.232	117
21	Kalimantan Tengah	53.774	81	53.804	74
22	Kalimantan Selatan	81.296	79	80.440	63
23	Kalimantan Timur	74.904	74	74.937	79
24	Kalimantan Utara	12.140	10	12.139	21
25	Sulawesi Utara	41.125	52	40.802	51
26	Sulawesi Tengah	62.927	82	62.707	97
27	Sulawesi Selatan	169.207	139	168.185	144
28	Sulawesi Tenggara	62.386	60	62.566	66
29	Gorontalo	23.810	29	23.856	40
30	Sulawesi Barat	32.661	68	32.851	49
31	Maluku	44.440	61	44.630	52
32	Maluku Utara	29.134	49	29.195	47
33	Papua Barat	21.694	44	21.850	46
34	Papua	71.291	75	71.339	66
Jumlah (Indonesia)		4.810.130	4.226	4.778.621	4.221

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020 (data per 27 Maret 2020)

Lampiran 22

**JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB DAN PROVINSI
TAHUN 2019**

No	Provinsi	Penyebab Kematian Ibu					
		Perdarahan	Hipertensi Dalam Kehamilan	Infeksi	Gangguan Sistem Peredaran Darah *	Gangguan Metabolik**	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	47	38	6	10	3	53
2	Sumatera Utara	62	48	7	7	3	75
3	Sumatera Barat	23	22	4	7	6	54
4	Riau	38	32	2	8	2	37
5	Jambi	18	14	0	6	1	20
6	Sumatera Selatan	38	28	4	9	1	25
7	Bengkulu	16	6	0	3	0	10
8	Lampung	29	31	3	4	1	43
9	Kepulauan Bangka Belitung	13	9	3	0	1	10
10	Kepulauan Riau	17	10	0	0	0	14
11	DKI Jakarta	26	20	9	3	1	41
12	Jawa Barat	226	218	23	65	12	140
13	Jawa Tengah	105	117	18	0	0	176
14	DI Yogyakarta	6	6	3	0	0	21
15	Jawa Timur	125	162	38	0	72	123
16	Banten	64	51	11	32	6	48
17	Bali	12	8	0	0	6	19
18	Nusa Tenggara Barat	22	39	6	0	12	18
19	Nusa Tenggara Timur	49	11	10	9	0	39
20	Kalimantan Barat	35	24	7	6	0	45
21	Kalimantan Tengah	30	20	2	3	2	17
22	Kalimantan Selatan	18	18	4	1	5	17
23	Kalimantan Timur	22	18	2	6	1	30
24	Kalimantan Utara	3	7	1	2	0	8
25	Sulawesi Utara	16	8	0	0	0	27
26	Sulawesi Tengah	21	21	7	10	1	37
27	Sulawesi Selatan	47	41	5	0	13	38
28	Sulawesi Tenggara	26	12	5	2	2	19
29	Gorontalo	7	0	0	0	1	32
30	Sulawesi Barat	18	11	1	0	2	17
31	Maluku	23	5	4	2	2	16
32	Maluku Utara	21	2	2	3	1	18
33	Papua Barat	25	3	12	0	0	6
34	Papua	32	6	8	2	0	18
Jumlah (Indonesia)		1.280	1.066	207	200	157	1.311

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020 (data per 27 Maret 2020)

* Jantung, Stroke, dll

** Diabetes Mellitus, dll

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	Ibu Hamil					Ibu Bersalin/Nifas												
		Jumlah	K1		K4*		Jumlah	Persalinan Ditolong Nakes		Persalinan Di Fasyankes**		KF1		KF2		KF3		Ibu Nifas Mendapat Vit A	
			Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Aceh	126.964	114.036	89,8	99.614	78,5	121.193	100.784	83,2	99.460	82,1	100.508	82,9	99.263	81,9	93.886	77,5	99.511	82,1
2	Sumatera Utara	332.810	299.279	89,9	273.366	82,1	317.683	271.502	85,5	265.495	83,6	253.149	79,7	248.679	78,3	252.117	79,4	235.846	74,2
3	Sumatera Barat	120.374	105.827	87,9	94.386	78,4	114.903	93.081	81,0	91.908	80,0	93.146	81,1	92.293	80,3	90.581	78,8	91.504	79,6
4	Riau	170.366	148.955	87,4	141.010	82,8	162.622	133.319	82,0	122.358	75,2	134.677	82,8	119.118	73,2	127.944	78,7	134.586	82,8
5	Jambi	72.338	73.832	102,1	70.408	97,3	69.050	67.397	97,6	59.055	85,5	68.070	98,6	67.862	98,3	67.099	97,2	68.008	98,5
6	Sumatera Selatan	175.899	172.663	98,2	167.640	95,3	167.903	159.553	95,0	152.855	91,0	158.739	94,5	158.052	94,1	153.848	91,6	158.591	94,5
7	Bengkulu	40.813	39.362	96,4	35.708	87,5	38.958	34.843	89,4	34.166	87,7	34.736	89,2	34.143	87,6	33.082	84,9	34.835	89,4
8	Lampung	165.269	161.943	98,0	153.971	93,2	157.757	148.516	94,1	147.845	93,7	148.895	94,4	148.206	93,9	146.013	92,6	147.084	93,2
9	Kepulauan Bangka Belitung	30.172	28.118	93,2	26.210	86,9	28.800	26.243	91,1	24.306	84,4	26.261	91,2	26.153	90,8	25.992	90,3	26.205	91,0
10	Kepulauan Riau	45.164	46.267	102,4	36.787	81,5	43.111	41.719	96,8	34.159	79,2	41.725	96,8	41.230	95,6	39.882	92,5	41.512	96,3
11	DKI Jakarta	183.366	191.144	104,2	190.018	103,6	175.031	182.067	104,0	181.726	103,8	181.260	103,6	179.115	102,3	178.685	102,1	179.547	102,6
12	Jawa Barat	960.932	1.014.390	105,6	950.398	98,9	917.254	910.854	99,3	888.786	96,9	926.001	101,0	922.264	100,5	913.264	99,6	889.841	97,0
13	Jawa Tengah	580.176	579.511	99,9	563.539	97,1	553.805	525.059	94,8	550.540	99,4	5.924	1,1	5.921	1,1	5.920	1,1	5.925	1,1
14	DI Yogyakarta	59.540	49.063	82,4	44.214	74,3	56.833	42.468	74,7	42.433	74,7	42.438	74,7	41.857	73,6	40.617	71,5	42.223	74,3
15	Jawa Timur	622.930	622.030	99,9	562.557	90,3	594.615	577.007	97,0	570.108	95,9	0	0,0	0	0,0	567.635	95,5	529.749	89,1
16	Banten	264.191	268.127	101,5	253.311	95,9	252.183	246.567	97,8	239.617	95,0	251.599	99,8	251.991	99,9	245.908	97,5	236.542	93,8
17	Bali	70.995	72.725	102,4	67.466	95,0	67.768	66.429	98,0	66.384	98,0	66.381	98,0	66.007	97,4	65.251	96,3	65.827	97,1
18	Nusa Tenggara Barat	113.646	121.081	106,5	107.906	94,9	108.481	103.434	95,3	103.937	95,8	102.884	94,8	101.058	93,2	101.943	94,0	102.182	94,2
19	Nusa Tenggara Timur	153.050	105.539	69,0	81.666	53,4	146.093	91.221	62,4	89.133	61,0	93.843	64,2	92.511	63,3	90.138	61,7	93.144	63,8
20	Kalimantan Barat	110.255	103.071	93,5	92.583	84,0	105.244	86.803	82,5	76.283	72,5	89.228	84,8	87.664	83,3	85.737	81,5	88.527	84,1
21	Kalimantan Tengah	59.184	54.295	91,7	50.006	84,5	56.494	44.581	78,9	36.830	65,2	48.253	85,4	47.530	84,1	46.493	82,3	46.384	82,1
22	Kalimantan Selatan	88.484	82.346	93,1	69.034	78,0	84.462	71.841	85,1	65.765	77,9	71.301	84,4	70.625	83,6	68.910	81,6	70.426	83,4
23	Kalimantan Timur	82.431	79.458	96,4	69.746	84,6	78.684	69.609	88,5	67.111	85,3	69.890	88,8	67.568	85,9	64.896	82,5	67.063	85,2
24	Kalimantan Utara	13.353	15.294	114,5	13.516	101,2	12.746	13.210	103,6	12.600	98,9	13.252	104,0	13.038	102,3	12.478	97,9	13.180	103,4
25	Sulawesi Utara	44.882	43.726	97,4	37.886	84,4	42.842	36.774	85,8	36.286	84,7	37.085	86,6	36.861	86,0	36.152	84,4	37.000	86,4
26	Sulawesi Tengah	68.978	62.209	90,2	54.995	79,7	65.842	53.491	81,2	51.329	78,0	53.746	81,6	52.689	80,0	51.180	77,7	52.789	80,2
27	Sulawesi Selatan	185.004	167.513	90,5	154.236	83,4	176.594	152.892	86,6	151.336	85,7	152.930	86,6	150.332	85,1	149.819	84,8	152.584	86,4
28	Sulawesi Tenggara	68.823	58.244	84,6	48.554	70,5	59.403	52.200	87,9	48.106	81,0	52.431	88,3	70.145	118,1	49.965	84,1	51.586	86,8
29	Gorontalo	26.242	24.907	94,9	19.397	73,9	25.049	22.130	88,3	20.167	80,5	21.968	87,7	21.738	86,8	20.929	83,6	21.952	87,6
30	Sulawesi Barat	36.136	23.927	66,2	24.566	68,0	34.494	25.078	72,7	25.064	72,7	25.438	73,7	25.135	72,9	25.456	73,8	25.389	73,6
31	Maluku	49.093	27.046	55,1	33.734	68,7	46.861	28.682	61,2	23.809	50,8	30.164	64,4	29.501	63,0	29.455	62,9	31.201	66,6
32	Maluku Utara	32.115	28.555	88,9	23.457	73,0	30.655	23.136	75,5	21.019	68,6	24.021	78,4	23.858	77,8	23.077	75,3	23.660	77,2
33	Papua Barat	24.035	20.145	83,8	13.186	54,9	22.942	15.372	67,0	12.707	55,4	14.031	61,2	12.870	56,1	11.587	50,5	13.899	60,6
34	Papua	78.473	63.454	80,9	29.149	37,1	74.906	39.715	53,0	34.875	46,6	36.633	48,9	34.411	45,9	32.101	42,9	34.818	46,5
Jumlah (Indonesia)		5.256.483	5.068.082	96,4	4.654.220	88,5	5.011.261	4.557.577	90,9	4.447.558	88,8	3.470.607	69,3	3.439.688	68,6	3.948.040	78,8	3.913.120	78,1

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020 (data per 3 Maret 2020)

Keterangan: *cakupan K4 sama dengan indikator SPM "persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil"

** persalinan di fasyankes sama dengan indikator SPM "persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan"

Lampiran 23.b

**PERSENTASE PUSKESMAS* MELAKSANAKAN KELAS IBU HAMIL
DAN MELAKSANAKAN PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K)
SERTA JUMLAH RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Puskesmas Melaksanakan Kelas Ibu Hamil		Puskesmas Melaksanakan P4K		Jumlah RTK
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	359	323	89,97	310	86,35	1
2	Sumatera Utara	601	596	99,17	586	97,50	187
3	Sumatera Barat	275	272	98,91	271	98,55	12
4	Riau	226	194	85,84	223	98,67	42
5	Jambi	204	204	100,00	204	100,00	0
6	Sumatera Selatan	342	340	99,42	340	99,42	0
7	Bengkulu	180	179	99,44	178	98,89	61
8	Lampung	310	310	100,00	310	100,00	21
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	64	100,00	64	100,00	5
10	Kepulauan Riau	86	83	96,51	71	82,56	0
11	DKI Jakarta	315	315	100,00	315	100,00	0
12	Jawa Barat	1.072	1.043	97,29	1.043	97,29	0
13	Jawa Tengah	878	853	97,15	846	96,36	0
14	DI Yogyakarta	121	121	100,00	121	100,00	0
15	Jawa Timur	968	965	99,69	947	97,83	10
16	Banten	243	242	99,59	242	99,59	0
17	Bali	120	120	100,00	120	100,00	40
18	Nusa Tenggara Barat	169	169	100,00	169	100,00	3
19	Nusa Tenggara Timur	402	411	102,24	411	102,24	0
20	Kalimantan Barat	246	231	93,90	233	94,72	16
21	Kalimantan Tengah	203	168	82,76	201	99,01	86
22	Kalimantan Selatan	235	231	98,30	222	94,47	6
23	Kalimantan Timur	186	184	98,92	184	98,92	42
24	Kalimantan Utara	56	54	96,43	53	94,64	22
25	Sulawesi Utara	195	193	98,97	193	98,97	0
26	Sulawesi Tengah	206	90	43,69	171	83,01	0
27	Sulawesi Selatan	458	455	99,34	442	96,51	171
28	Sulawesi Tenggara	290	257	88,62	290	100,00	128
29	Gorontalo	93	92	98,92	67	72,04	0
30	Sulawesi Barat	95	95	100,00	94	98,95	43
31	Maluku	209	181	86,60	176	84,21	7
32	Maluku Utara	148	143	96,62	143	96,62	0
33	Papua Barat	159	73	45,91	25	15,72	2
34	Papua	420	188	44,76	218	51,90	0
Indonesia		10.134	9.439	93,14	9.483	93,58	905

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020 (data per 3 Maret 2020)

* hanya Puskesmas teregistrasi

Lampiran 24

**CAKUPAN IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jumlah Ibu Hamil	Imunisasi Td Pada Ibu Hamil											
			Td1		Td2		Td3		Td4		Td5			
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Aceh	126.964	23.256	18,3	23.848	18,8	21.382	16,8	14.869	11,7	12.067	9,5	72.166	56,8
2	Sumatera Utara	332.810	306	0,1	161	0,0	86	0,0	43	0,0	41	0,0	331	0,1
3	Sumatera Barat	120.374	14.005	11,6	17.397	14,5	14.909	12,4	12.339	10,3	11.428	9,5	56.073	46,6
4	Riau	170.366	7.296	4,3	8.860	5,2	13.388	7,9	13.221	7,8	14.855	8,7	50.324	29,5
5	Jambi	72.338	18.757	25,9	18.010	24,9	13.920	19,2	10.639	14,7	8.575	11,9	51.144	70,7
6	Sumatera Selatan	175.899	73.415	41,7	70.518	40,1	28.453	16,2	25.077	14,3	24.532	13,9	148.580	84,5
7	Bengkulu	40.813	6.973	17,1	7.051	17,3	5.455	13,4	5.486	13,4	5.871	14,4	23.863	58,5
8	Lampung	165.269	6.757	4,1	7.149	4,3	8.891	5,4	12.056	7,3	13.945	8,4	42.041	25,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	30.172	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	3	0,0
10	Kepulauan Riau	45.164	5.996	13,3	6.124	13,6	4.930	10,9	4.850	10,7	4.933	10,9	20.837	46,1
11	DKI Jakarta	183.366	33.392	18,2	37.109	20,2	38.170	20,8	34.699	18,9	38.311	20,9	148.289	80,9
12	Jawa Barat	960.932	553.340	57,6	511.494	53,2	230.125	23,9	142.315	14,8	105.808	11,0	989.742	103,0
13	Jawa Tengah	580.176	79.429	13,7	91.956	15,8	93.136	16,1	90.365	15,6	99.965	17,2	375.422	64,7
14	DI Yogyakarta	59.540	92	0,2	805	1,4	11.076	18,6	15.154	25,5	25.207	42,3	52.242	87,7
15	Jawa Timur	622.930	16.058	2,6	21.905	3,5	34.428	5,5	71.882	11,5	346.952	55,7	475.167	76,3
16	Banten	264.191	116.417	44,1	112.152	42,5	57.077	21,6	39.880	15,1	33.135	12,5	242.244	91,7
17	Bali	70.995	22	0,0	0	0,0	1.199	1,7	4.704	6,6	26.096	36,8	31.999	45,1
18	Nusa Tenggara Barat	113.646	31.459	27,7	31.654	27,9	21.905	19,3	17.202	15,1	12.611	11,1	83.372	73,4
19	Nusa Tenggara Timur	153.050	22.320	14,6	19.060	12,5	11.468	7,5	6.190	4,0	6.197	4,0	42.915	28,0
20	Kalimantan Barat	110.255	17.144	15,5	16.181	14,7	13.313	12,1	10.654	9,7	11.055	10,0	51.203	46,4
21	Kalimantan Tengah	59.184	17.220	29,1	15.270	25,8	6.540	11,1	4.599	7,8	3.650	6,2	30.059	50,8
22	Kalimantan Selatan	88.484	14.997	16,9	19.476	22,0	15.151	17,1	9.372	10,6	5.213	5,9	49.212	55,6
23	Kalimantan Timur	82.431	293	0,4	293	0,4	282	0,3	268	0,3	338	0,4	1.181	1,4
24	Kalimantan Utara	13.353	526	3,9	730	5,5	782	5,9	783	5,9	892	6,7	3.187	23,9
25	Sulawesi Utara	44.882	18.153	40,4	16.154	36,0	5.293	11,8	2.693	6,0	1.838	4,1	25.978	57,9
26	Sulawesi Tengah	68.978	23.950	34,7	25.420	36,9	22.501	32,6	17.683	25,6	14.868	21,6	80.472	116,7
27	Sulawesi Selatan	185.004	75.781	41,0	64.199	34,7	30.300	16,4	19.000	10,3	15.165	8,2	128.664	69,5
28	Sulawesi Tenggara	68.823	18.574	27,0	16.472	23,9	10.831	15,7	6.023	8,8	5.105	7,4	38.431	55,8
29	Gorontalo	26.242	15.264	58,2	14.161	54,0	1.815	6,9	854	3,3	1.054	4,0	17.884	68,2
30	Sulawesi Barat	36.136	7.800	21,6	6.667	18,4	4.023	11,1	2.065	5,7	2.017	5,6	14.772	40,9
31	Maluku	49.093	10.438	21,3	8.918	18,2	3.515	7,2	1.779	3,6	1.811	3,7	16.023	32,6
32	Maluku Utara	32.115	15.860	49,4	13.593	42,3	3.506	10,9	1.730	5,4	1.566	4,9	20.395	63,5
33	Papua Barat	24.035	786	3,3	760	3,2	713	3,0	721	3,0	995	4,1	3.189	13,3
34	Papua	78.473	13.979	17,8	10.757	13,7	5.876	7,5	3.208	4,1	2.962	3,8	22.803	29,1
Jumlah (Indonesia)		5.256.483	1.260.055	24,0	1.214.304	23,1	734.440	14,0	602.403	11,5	859.059	16,3	3.410.207	64,9

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020 (data per 15 April 2020)

Lampiran 25

**PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jumlah WUS Tidak Hamil (15-39 Tahun)	Imunisasi Td Pada WUS Tidak Hamil									
			Td1		Td2		Td3		Td4		Td5	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	988.710	20.342	2,1	10.554	1,1	9.900	1,0	7.086	0,7	6.996	0,7
2	Sumatera Utara	2.503.713	306	0,0	161	0,0	86	0,0	43	0,0	41	0,0
3	Sumatera Barat	917.126	8.383	0,9	4.888	0,5	6.292	0,7	4.234	0,5	5.949	0,6
4	Riau	1.261.037	3.060	0,2	2.548	0,2	4.861	0,4	3.567	0,3	3.202	0,3
5	Jambi	671.263	7.261	1,1	4.664	0,7	4.131	0,6	3.463	0,5	4.123	0,6
6	Sumatera Selatan	1.526.033	24.878	1,6	20.482	1,3	11.232	0,7	7.268	0,5	12.042	0,8
7	Bengkulu	367.039	978	0,3	263	0,1	429	0,1	286	0,1	391	0,1
8	Lampung	1.449.941	2.595	0,2	2.760	0,2	4.788	0,3	3.624	0,2	3.357	0,2
9	Kepulauan Bangka Belitung	266.307	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10	Kepulauan Riau	422.910	3.886	0,9	2.120	0,5	2.302	0,5	1.646	0,4	1.837	0,4
11	DKI Jakarta	2.060.947	28.239	1,4	19.784	1,0	28.824	1,4	26.883	1,3	35.043	1,7
12	Jawa Barat	8.808.194	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
13	Jawa Tengah	5.781.717	108.271	1,9	75.838	1,3	87.651	1,5	103.980	1,8	109.569	1,9
14	DI Yogyakarta	656.297	55	0,0	27	0,0	1.879	0,3	1.193	0,2	3.494	0,5
15	Jawa Timur	6.788.034	57.896	0,9	75.847	1,1	226.900	3,3	732.173	10,8	3.502.983	51,6
16	Banten	2.417.375	65.645	2,7	58.364	2,4	56.307	2,3	50.142	2,1	64.510	2,7
17	Bali	738.304	0	0,0	0	0,0	9	0,0	90	0,0	170	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	940.257	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	890.083	2.715	0,3	3.586	0,4	1.775	0,2	857	0,1	1.083	0,1
20	Kalimantan Barat	915.153	8.150	0,9	7.475	0,8	8.589	0,9	8.112	0,9	8.092	0,9
21	Kalimantan Tengah	493.480	5.023	1,0	2.366	0,5	1.149	0,2	797	0,2	645	0,1
22	Kalimantan Selatan	739.809	18.538	2,5	10.134	1,4	4.430	0,6	2.730	0,4	1.944	0,3
23	Kalimantan Timur	665.347	242	0,0	208	0,0	222	0,0	239	0,0	265	0,0
24	Kalimantan Utara	128.332	4.090	3,2	4.387	3,4	5.336	4,2	5.294	4,1	7.409	5,8
25	Sulawesi Utara	418.775	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
26	Sulawesi Tengah	530.257	9.099	1,7	8.018	1,5	7.781	1,5	6.342	1,2	2.837	0,5
27	Sulawesi Selatan	1.598.214	22.089	1,4	6.689	0,4	5.264	0,3	2.850	0,2	2.314	0,1
28	Sulawesi Tenggara	468.535	2.896	0,6	787	0,2	555	0,1	293	0,1	320	0,1
29	Gorontalo	220.938	3.042	1,4	1.331	0,6	1.423	0,6	957	0,4	939	0,4
30	Sulawesi Barat	245.342	776	0,3	315	0,1	277	0,1	185	0,1	87	0,0
31	Maluku	312.142	5.462	1,7	4.834	1,5	2.805	0,9	2.534	0,8	1.904	0,6
32	Maluku Utara	217.993	7.054	3,2	5.168	2,4	5.370	2,5	3.793	1,7	4.419	2,0
33	Papua Barat	175.066	87	0,0	145	0,1	312	0,2	357	0,2	236	0,1
34	Papua	631.305	4.240	0,7	4.506	0,7	2.978	0,5	1.619	0,3	848	0,1
Jumlah (Indonesia)		47.215.975	425.299	0,9	338.249	0,7	493.857	1,0	982.637	2,1	3.787.049	8,0

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020 (data per 15 April 2020)

Lampiran 26

**PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jumlah WUS (15-39 Tahun)	Imunisasi Td Pada WUS									
			Td1		Td2		Td3		Td4		Td5	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	1.116.440	43.598	3,9	34.402	3,1	31.282	2,8	21.955	2,0	19.063	1,7
2	Sumatera Utara	2.840.241	612	0,0	322	0,0	172	0,0	86	0,0	82	0,0
3	Sumatera Barat	1.038.287	22.388	2,2	22.285	2,1	21.201	2,0	16.573	1,6	17.377	1,7
4	Riau	1.430.854	10.356	0,7	11.408	0,8	18.249	1,3	16.788	1,2	18.057	1,3
5	Jambi	743.980	26.018	3,5	22.674	3,0	18.051	2,4	14.102	1,9	12.698	1,7
6	Sumatera Selatan	1.703.761	98.293	5,8	91.000	5,3	39.685	2,3	32.345	1,9	36.574	2,1
7	Bengkulu	407.852	7.951	1,9	7.314	1,8	5.884	1,4	5.772	1,4	6.262	1,5
8	Lampung	1.618.039	9.352	0,6	9.909	0,6	13.679	0,8	15.680	1,0	17.302	1,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	296.407	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10	Kepulauan Riau	468.702	9.882	2,1	8.244	1,8	7.232	1,5	6.496	1,4	6.770	1,4
11	DKI Jakarta	2.248.238	61.631	2,7	56.893	2,5	66.994	3,0	61.582	2,7	73.354	3,3
12	Jawa Barat	9.774.513	553.340	5,7	511.494	5,2	230.125	2,4	142.315	1,5	105.808	1,1
13	Jawa Tengah	6.367.183	187.700	2,9	167.794	2,6	180.787	2,8	194.345	3,1	209.534	3,3
14	DI Yogyakarta	715.909	147	0,0	832	0,1	12.955	1,8	16.347	2,3	28.701	4,0
15	Jawa Timur	7.415.935	73.954	1,0	97.752	1,3	261.328	3,5	804.055	10,8	3.849.935	51,9
16	Banten	2.683.918	182.062	6,8	170.516	6,4	113.384	4,2	90.022	3,4	97.645	3,6
17	Bali	809.552	22	0,0	155	0,0	1.208	0,1	4.864	0,6	26.266	3,2
18	Nusa Tenggara Barat	1.054.840	31.459	3,0	31.654	3,0	21.905	2,1	17.202	1,6	12.611	1,2
19	Nusa Tenggara Timur	1.041.569	25.035	2,4	22.646	2,2	13.243	1,3	7.047	0,7	7.280	0,7
20	Kalimantan Barat	1.026.303	25.294	2,5	23.656	2,3	21.902	2,1	18.766	1,8	19.147	1,9
21	Kalimantan Tengah	552.631	22.243	4,0	17.636	3,2	7.689	1,4	5.396	1,0	4.295	0,8
22	Kalimantan Selatan	829.235	33.535	4,0	29.610	3,6	19.581	2,4	12.102	1,5	7.157	0,9
23	Kalimantan Timur	747.741	535	0,1	501	0,1	504	0,1	507	0,1	603	0,1
24	Kalimantan Utara	141.686	4.616	3,3	5.117	3,6	6.118	4,3	6.077	4,3	8.301	5,9
25	Sulawesi Utara	464.013	18.154	3,9	16.154	3,5	5.293	1,1	2.693	0,6	1.838	0,4
26	Sulawesi Tengah	599.477	33.049	5,5	33.438	5,6	30.282	5,1	24.025	4,0	17.705	3,0
27	Sulawesi Selatan	1.784.342	97.870	5,5	70.888	4,0	35.564	2,0	21.850	1,2	17.479	1,0
28	Sulawesi Tenggara	537.160	738	0,1	17.259	3,2	11.386	2,1	6.316	1,2	5.425	1,0
29	Gorontalo	247.129	18.306	7,4	15.492	6,3	3.238	1,3	1.811	0,7	1.993	0,8
30	Sulawesi Barat	281.269	8.576	3,0	6.982	2,5	4.300	1,5	2.250	0,8	2.104	0,7
31	Maluku	361.026	15.900	4,4	13.752	3,8	6.320	1,8	4.313	1,2	3.715	1,0
32	Maluku Utara	250.040	22.914	9,2	18.761	7,5	8.876	3,5	5.523	2,2	5.985	2,4
33	Papua Barat	198.929	873	0,4	905	0,5	1.025	0,5	1.078	0,5	1.231	0,6
34	Papua	709.725	18.219	2,6	15.263	2,2	8.854	1,2	4.827	0,7	3.810	0,5
Jumlah (Indonesia)		52.506.926	1.664.622	3,2	1.552.708	3,0	1.228.296	2,3	1.585.110	3,0	4.646.107	8,8

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020 (data per 15 April 2020)

Lampiran 27.a

JUMLAH IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Ibu Hamil	TTD (90 Tablet)	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	126.964	71.977	56,7
2	Sumatera Utara	332.810	78.866	23,7
3	Sumatera Barat	120.374	92.689	77,0
4	Riau	170.366	137.149	80,5
5	Jambi	72.338	64.572	89,3
6	Sumatera Selatan	175.899	166.151	94,5
7	Bengkulu	40.813	34.463	84,4
8	Lampung	165.269	153.042	92,6
9	Kepulauan Bangka Belitung	30.172	26.315	87,2
10	Kepulauan Riau	45.164	40.952	90,7
11	DKI Jakarta	183.366	16.199	8,8
12	Jawa Barat	960.932	842.968	87,7
13	Jawa Tengah	580.176	282.635	48,7
14	DI Yogyakarta	59.540	38.685	65,0
15	Jawa Timur	622.930	372.936	59,9
16	Banten	264.191	234.710	88,8
17	Bali	70.995	67.696	95,4
18	Nusa Tenggara Barat	113.646	104.596	92,0
19	Nusa Tenggara Timur	153.050	92.112	60,2
20	Kalimantan Barat	110.255	98.896	89,7
21	Kalimantan Tengah	59.184	3.858	6,5
22	Kalimantan Selatan	88.484	72.406	81,8
23	Kalimantan Timur	82.431	6.789	8,2
24	Kalimantan Utara	13.353	10.627	79,6
25	Sulawesi Utara	44.882	44.933	100,1
26	Sulawesi Tengah	68.978	53.538	77,6
27	Sulawesi Selatan	185.004	3.135	1,7
28	Sulawesi Tenggara	77.065	47.212	61,3
29	Gorontalo	26.242	21.785	83,0
30	Sulawesi Barat	36.136	24.064	66,6
31	Maluku	49.093	32.219	65,6
32	Maluku Utara	32.115	17.149	53,4
33	Papua Barat	24.035	-	-
34	Papua	78.473	14.339	18,3
Jumlah (Indonesia)		5.264.725	3.369.664	64,0

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020 (Laporan Rutin Tahun 2019)

Lampiran 27.b

PERSENTASE REMAJA PUTRI MENDAPAT TABLET TAMBAH DARAH (TTD)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2019

No	Provinsi	Remaja Putri (12-18 tahun) 2018			Remaja Putri (12-18 tahun) 2019		
		Jumlah	Jumlah mendapat TTD	%	Jumlah	Jumlah mendapat TTD	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	278.082	89.417	32,2	271.276	55.049	20,3
2	Sumatera Utara	563.074	112.411	20,0	466.466	246.944	52,9
3	Sumatera Barat	270.100	88.988	32,9	253.833	125.294	49,4
4	Riau	279.815	66.753	23,9	279.815	147.306	52,6
5	Jambi	121.998	68.979	56,5	177.598	154.644	87,1
6	Sumatera Selatan	533.562	125.729	23,6	567.884	192.807	34,0
7	Bengkulu	117.948	55.498	47,1	88.616	33.149	37,4
8	Lampung	410.653	277.323	67,5	293.577	265.100	90,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	58.397	41.856	71,7	79.922	57.523	72,0
10	Kepulauan Riau	149.653	52.051	34,8	707.882	330.541	46,7
11	DKI Jakarta	355.653	194.992	54,8	620.836	263.857	42,5
12	Jawa Barat	2.058.054	754.159	36,6	2.141.293	1.049.276	49,0
13	Jawa Tengah	1.642.446	928.261	56,5	1.765.966	1.310.332	74,2
14	DI Yogyakarta	144.868	79.101	54,6	157.843	131.298	83,2
15	Jawa Timur	5.882.538	3.791.759	64,5	1.007.272	634.956	63,0
16	Banten	488.006	148.036	30,3	465.567	189.921	40,8
17	Bali	193.541	179.231	92,6	187.585	187.067	99,7
18	Nusa Tenggara Barat	190.129	72.668	38,2	431.367	289.827	67,2
19	Nusa Tenggara Timur	341.677	121.869	35,7	324.100	199.452	61,5
20	Kalimantan Barat	250.272	24.077	9,6	3.240.636	422.201	13,0
21	Kalimantan Tengah	85.133	10.709	12,6	116.359	67.397	57,9
22	Kalimantan Selatan	255.947	110.306	43,1	226.317	123.431	54,5
23	Kalimantan Timur	270.570	46.020	17,0	121.993	43.875	36,0
24	Kalimantan Utara	33.973	13.658	40,2	41.842	9.834	23,5
25	Sulawesi Utara	732.871	195.801	26,7	321.272	47.098	14,7
26	Sulawesi Tengah	119.050	30.318	25,5	149.305	126.444	84,7
27	Sulawesi Selatan	371.746	223.596	60,1	381.511	222.824	58,4
28	Sulawesi Tenggara	177.926	107.520	60,4	106.774	86.192	80,7
29	Gorontalo	81.162	37.216	45,9	64.903	37.842	58,3
30	Sulawesi Barat	55.578	37.769	68,0	48.281	31.807	65,9
31	Maluku	143.016	31.794	22,2	139.642	70.905	50,8
32	Maluku Utara	35.706	20.743	58,1	29.157	11.150	38,2
33	Papua Barat	32.673	21.068	64,5	22.146	8.037	36,3
34	Papua	315.150	108.046	34,3	320.924	99.711	31,1
Indonesia		17.040.966	8.267.722	48,5	15.619.759	7.273.092	46,6

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2020

Lampiran 27.c

**PERSENTASE BALITA KURUS DAN IBU HAMIL RISIKO KEK* MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2019**

No	Provinsi	Persentase Mendapat Makanan Tambahan 2018		Persentase Mendapat Makanan Tambahan	
		Balita Kurus	Ibu Hamil Risiko KEK	Balita Kurus	Ibu Hamil Risiko KEK
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)
1	Aceh	75,54	77,91	96,03	87,15
2	Sumatera Utara	80,58	83,61	96,48	98,78
3	Sumatera Barat	89,95	95,22	89,32	95,80
4	Riau	96,89	97,53	97,05	98,33
5	Jambi	92,51	94,30	93,71	80,45
6	Sumatera Selatan	99,97	99,44	99,54	100,00
7	Bengkulu	99,44	98,60	99,65	99,52
8	Lampung	85,08	92,88	89,45	93,10
9	Kepulauan Bangka Belitung	96,68	94,61	96,68	98,80
10	Kepulauan Riau	81,14	92,41	96,13	99,19
11	DKI Jakarta	96,42	93,58	99,83	90,31
12	Jawa Barat	64,19	82,04	75,68	85,90
13	Jawa Tengah	89,92	92,29	97,52	93,55
14	DI Yogyakarta	98,13	98,41	99,19	98,74
15	Jawa Timur	80,92	93,58	100,00	93,04
16	Banten	98,19	96,76	99,55	98,28
17	Bali	99,72	100,00	99,91	99,91
18	Nusa Tenggara Barat	65,64	27,97	75,74	71,36
19	Nusa Tenggara Timur	72,49	72,49	71,73	75,83
20	Kalimantan Barat	88,13	87,19	89,79	100,01
21	Kalimantan Tengah	85,48	80,33	92,74	94,16
22	Kalimantan Selatan	93,53	94,24	99,57	96,81
23	Kalimantan Timur	93,94	91,69	97,58	96,39
24	Kalimantan Utara	84,84	90,73	69,53	97,46
25	Sulawesi Utara	85,42	90,08	95,26	95,50
26	Sulawesi Tengah	62,20	59,47	82,36	87,84
27	Sulawesi Selatan	90,21	87,41	83,43	88,16
28	Sulawesi Tenggara	91,98	74,41	82,33	87,12
29	Gorontalo	99,81	100,00	100,00	100,00
30	Sulawesi Barat	88,34	98,31	81,08	95,85
31	Maluku	93,73	84,56	96,76	90,35
32	Maluku Utara	81,67	89,60	94,72	95,55
33	Papua Barat	90,94	69,44	99,81	99,85
34	Papua	50,06	67,17	81,61	73,95
Indonesia		83,88	86,41	89,64	90,52

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2020

*KEK=Kekurangan Energi Kronik

Lampiran 28.a

PESERTA KB AKTIF MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif															
			Kondom	%	Suntik	%	Pil	%	IUD/AKDR	%	MOP	%	MOW	%	Implan	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Aceh	663.436	4.617	1,3	257.086	71,6	69.634	19,4	12.659	3,5	463	0,1	3.578	1,0	10.752	3,0	359.252	54,2
2	Sumatera Utara	1.699.392	23.081	2,7	424.689	50,3	182.731	21,6	41.176	4,9	7.590	0,9	58.632	6,9	99.442	11,8	844.931	49,7
3	Sumatera Barat	739.312	10.947	2,6	265.462	62,1	50.811	11,9	34.986	8,2	1.807	0,4	15.152	3,5	46.259	10,8	427.231	57,8
4	Riau	786.393	11.275	2,8	260.147	64,3	87.389	21,6	13.924	3,4	1.903	0,5	5.598	1,4	22.599	5,6	404.738	51,5
5	Jambi	630.571	4.038	0,9	278.452	64,2	92.616	21,3	13.413	3,1	730	0,2	5.104	1,2	38.786	8,9	433.869	68,8
6	Sumatera Selatan	1.236.663	7.858	1,0	587.256	71,3	95.213	11,6	16.590	2,0	2.091	0,3	6.400	0,8	106.184	12,9	823.683	66,6
7	Bengkulu	1.616.248	4.182	1,9	149.935	66,4	27.994	12,4	7.721	3,4	771	0,3	3.207	1,4	31.205	13,8	225.786	71,4
8	Lampung	1.230.870	7.078	0,8	592.260	69,8	118.946	14,0	36.245	4,3	3.153	0,4	6.304	0,7	81.210	9,6	848.349	68,9
9	Kepulauan Bangka Belitung	212.994	1.754	1,2	87.109	60,7	41.834	29,2	4.002	2,8	331	0,2	1.858	1,3	6.183	4,3	143.402	67,3
10	Kepulauan Riau	269.383	2.878	2,3	68.703	55,6	33.442	27,1	7.483	6,1	422	0,3	3.454	2,8	6.674	5,4	123.478	45,8
11	DKI Jakarta	1.026.603	12.685	2,2	336.541	57,6	88.991	15,2	102.680	17,6	3.337	0,6	15.588	2,7	20.704	3,5	583.863	56,9
12	Jawa Barat	7.964.494	45.367	0,9	3.403.701	63,9	946.937	17,8	491.009	9,2	20.569	0,4	127.748	2,4	268.422	5,0	5.324.322	66,9
13	Jawa Tengah	5.952.837	51.798	1,3	2.641.305	67,9	397.468	10,2	281.335	7,2	22.281	0,6	143.695	3,7	329.739	8,5	3.889.902	65,3
14	DI Yogyakarta	539.881	18.107	5,7	148.884	46,5	32.548	10,2	75.253	23,5	3.198	1,0	19.674	6,1	19.495	6,1	320.357	59,3
15	Jawa Timur	6.342.339	39.407	1,0	2.571.626	62,5	753.156	18,3	295.713	7,2	27.659	0,7	148.217	3,6	247.954	6,0	4.111.391	64,8
16	Banten	1.723.728	10.519	0,9	842.381	75,6	132.906	11,9	56.967	5,1	2.905	0,3	13.454	1,2	51.618	4,6	1.113.655	64,6
17	Bali	553.505	5.556	1,5	177.832	47,7	36.847	9,9	125.742	33,8	2.084	0,6	10.948	2,9	11.459	3,1	372.552	67,3
18	Nusa Tenggara Barat	909.422	3.008	0,5	394.335	69,3	52.758	9,3	39.550	6,9	2.337	0,4	8.414	1,5	66.377	11,7	569.116	62,6
19	Nusa Tenggara Timur	466.904	853	0,5	105.654	59,3	14.327	8,0	15.413	8,6	1.178	0,7	8.588	4,8	31.122	17,5	178.313	38,2
20	Kalimantan Barat	419.165	2.108	0,8	164.656	66,0	65.711	26,3	6.327	2,5	533	0,2	1.815	0,7	7.695	3,1	249.378	59,5
21	Kalimantan Tengah	314.217	1.213	0,6	131.168	62,5	59.779	28,5	2.649	1,3	571	0,3	1.489	0,7	12.440	5,9	209.880	66,8
22	Kalimantan Selatan	651.238	3.363	0,7	232.141	51,0	189.686	41,6	7.053	1,5	1.060	0,2	3.373	0,7	17.710	3,9	455.446	69,9
23	Kalimantan Timur	523.716	5.599	1,9	154.784	52,9	89.551	30,6	22.049	7,5	1.111	0,4	6.591	2,3	11.568	4,0	292.364	55,8
24	Kalimantan Utara	80.015	767	1,9	22.222	55,6	11.433	28,6	2.105	5,3	135	0,3	941	2,4	2.195	5,5	39.933	49,9
25	Sulawesi Utara	397.771	2.577	1,0	134.432	50,8	57.720	21,8	15.681	5,9	2.330	0,9	4.880	1,8	44.816	16,9	264.766	66,6
26	Sulawesi Tengah	470.870	869	0,3	152.698	51,9	98.938	33,6	13.402	4,6	733	0,2	4.231	1,4	22.493	7,6	294.097	62,5
27	Sulawesi Selatan	1.262.066	12.577	1,6	468.974	60,5	153.581	19,8	28.736	3,7	4.442	0,6	22.549	2,9	79.889	10,3	775.190	61,4
28	Sulawesi Tenggara	326.513	5.500	3,2	91.376	52,7	44.865	25,9	6.542	3,8	964	0,6	3.312	1,9	19.835	11,4	173.358	53,1
29	Gorontalo	179.164	242	0,2	53.035	44,9	28.344	24,0	7.069	6,0	517	0,4	3.042	2,6	25.470	21,5	118.236	66,0
30	Sulawesi Barat	197.733	863	0,8	57.124	51,8	38.469	34,9	2.455	2,2	332	0,3	1.165	1,1	9.502	8,6	110.242	55,8
31	Maluku	220.949	322	0,4	60.546	70,2	11.647	13,5	1.625	1,9	145	0,2	844	1,0	10.943	12,7	86.217	39,0
32	Maluku Utara	173.311	98	0,1	63.492	69,9	8.637	9,5	1.562	1,7	154	0,2	476	0,5	16.321	18,0	90.894	52,4
33	Papua Barat	125.953	225	0,7	23.380	73,1	3.956	12,4	518	1,6	150	0,5	590	1,8	3.006	9,4	31.975	25,4
34	Papua	82.558	105	0,4	16.440	68,4	4.559	19,0	702	2,9	74	0,3	520	2,2	1.571	6,5	24.045	29,1
Jumlah (Indonesia)		38.690.214	301.436	1,2	15.419.826	63,7	4.123.424	17,0	1.790.336	7,4	118.060	0,5	661.431	2,7	1.781.638	7,4	24.196.151	62,5

Sumber: Profil Keluarga Indonesia 2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2019 (data per September 2019)

Keterangan:
AKDR: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim

MOP : Metode Operasi Pria

MOW : Metode Operasi Wanita

JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) PESERTA KELUARGA BERENCANA
MENURUT TEMPAT PELAYANAN DAN PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	PUS Peserta KB																					
		Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)							Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)							Jejaring				Pelayanan Bergerak	%	Lainnya	%
		RSUP/RSUD	RS TNI	RS Polri	RS Swasta	Klinik Utama	Jumlah	%	Puskesmas	Klinik Pratama	Praktek Dokter	RS Pratama	Jumlah	%	Pustu/Pusling/ Bidan Desa	Poskesdes/Poli ndes	Praktek Bidan	Jumlah	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	Aceh	7.486	361	170	1.027	1.510	10.554	1,6	103.791	2.314	6.087	134	112.326	16,9	76.936	35.821	97.211	209.968	31,6	3.625	0,5	29.720	4,5
2	Sumatera Utara	47.671	3.721	1.701	16.463	9.752	79.308	4,7	142.793	13.387	14.585	4.853	175.618	10,3	141.028	31.803	297.068	469.899	27,7	29.875	1,8	117.194	6,9
3	Sumatera Barat	18.726	1.228	345	4.055	1.748	26.102	3,5	82.903	2.220	5.349	219	90.691	12,3	130.765	30.613	121.526	282.904	38,3	4.714	0,6	23.825	3,2
4	Riau	11.756	431	411	5.221	4.819	22.638	2,9	77.674	3.945	9.958	3.921	95.498	12,1	85.786	17.395	142.294	245.475	31,2	6.624	0,8	42.366	5,4
5	Jambi	5.432	420	302	2.708	2.972	11.834	1,9	66.518	2.468	5.117	142	74.245	11,8	142.359	21.994	128.543	292.896	46,4	15.785	2,5	43.866	7,0
6	Sumatera Selatan	10.157	556	368	3.488	1.223	15.792	1,3	129.322	1.988	8.511	398	140.219	11,3	154.947	130.198	337.556	622.701	50,4	17.014	1,4	30.782	2,5
7	Bengkulu	4.801	223	244	1.017	589	6.874	2,2	44.076	620	1.863	81	46.640	14,7	83.384	10.204	61.033	154.621	48,9	7.968	2,5	9.944	3,1
8	Lampung	12.125	495	280	4.416	3.564	20.880	1,7	164.789	3.974	11.502	662	180.927	14,7	198.252	34.370	364.351	596.973	48,5	8.634	0,7	44.052	3,6
9	Kep. Bangka Belitung	1.995	47	17	919	577	3.555	1,7	10.521	507	2.021	101	13.150	6,2	35.694	24.361	47.970	108.025	50,7	3.128	1,5	17.344	8,1
10	Kepulauan Riau	8.976	265	31	2.512	2.317	14.101	5,2	18.351	2.262	3.396	91	24.100	8,9	15.230	6.305	44.682	66.217	24,6	950	0,4	21.772	8,1
11	DKI Jakarta	22.385	4.384	1.465	40.425	8.905	77.564	7,6	154.772	14.666	31.941	1.163	202.542	19,7	4.698	938	219.667	225.303	21,9	7.470	0,7	75.286	7,3
12	Jawa Barat	128.652	23.635	7.543	93.793	29.907	283.530	3,6	779.618	33.734	106.755	3.905	924.012	11,6	875.687	99.365	2.555.587	3.530.639	44,3	65.662	0,8	517.774	6,5
13	Jawa Tengah	167.119	9.675	2.598	58.488	11.293	249.173	4,2	577.008	17.316	78.016	3.950	676.290	11,4	661.209	155.951	1.843.701	2.660.861	44,7	28.170	0,5	278.453	4,7
14	DI Yogyakarta	25.093	1.543	559	13.613	2.203	43.011	8,0	90.885	3.208	9.724	387	104.204	19,3	11.237	1.914	128.687	141.838	26,3	1.537	0,3	32.861	6,1
15	Jawa Timur	55.453	5.747	3.196	30.583	7.223	102.202	1,6	194.601	7.762	43.994	20.472	266.829	4,2	223.779	129.814	615.922	969.515	15,3	11.643	0,2	2.800.982	44,2
16	Banten	38.731	1.494	539	22.254	12.606	75.624	4,4	195.373	14.891	23.016	2.171	235.451	13,7	202.007	21.556	477.417	700.980	40,7	23.848	1,4	91.820	5,3
17	Bali	17.046	604	428	8.989	980	28.047	5,1	75.597	2.191	22.843	183	100.814	18,2	34.013	8.150	178.344	220.507	39,8	2.487	0,4	22.074	4,0
18	Nusa Tenggara Barat	11.760	1.009	564	1.775	1.214	16.322	1,8	106.466	2.646	9.255	558	118.925	13,1	137.556	164.161	82.596	384.313	42,3	11.205	1,2	44.844	4,9
19	Nusa Tenggara Timur	10.908	274	165	839	519	12.705	2,7	79.254	502	1.101	92	80.949	17,3	45.267	28.285	2.737	76.289	16,3	1.598	0,3	9.173	2,0
20	Kalimantan Barat	3.225	585	1.211	3.173	2.291	10.485	2,5	61.150	2.014	3.326	396	66.886	16,0	54.645	54.079	48.279	157.003	37,5	3.174	0,8	19.158	4,6
21	Kalimantan Tengah	1.939	272	257	335	756	3.559	1,1	47.445	1.037	1.689	5.684	55.855	17,8	66.772	24.899	38.180	129.851	41,3	2.137	0,7	29.545	9,4
22	Kalimantan Selatan	5.166	429	171	835	1.158	7.759	1,2	70.394	1.958	5.091	75	77.518	11,9	114.590	33.499	123.350	271.439	41,7	11.041	1,7	89.245	13,7
23	Kalimantan Timur	9.661	1.148	336	7.427	2.770	21.342	4,1	74.987	2.859	10.290	429	88.565	16,9	27.502	10.989	103.215	141.706	27,1	3.286	0,6	40.634	7,8
24	Kalimantan Utara	1.323	89	20	251	465	2.148	2,7	11.048	417	2.086	46	13.597	17,0	6.509	691	10.156	17.356	21,7	863	1,1	6.326	7,9
25	Sulawesi Utara	9.496	1.183	894	2.181	2.289	16.043	4,0	77.823	1.892	13.874	975	94.564	23,8	47.691	9.901	54.342	111.934	28,1	11.678	2,9	31.683	8,0
26	Sulawesi Tengah	6.115	201	123	790	682	7.911	1,7	58.754	1.563	2.034	121	62.472	13,3	110.762	45.842	28.633	185.237	39,3	6.034	1,3	34.532	7,3
27	Sulawesi Selatan	22.308	2.390	1.284	7.064	2.966	36.012	2,9	227.333	3.145	8.120	1.346	239.944	19,0	272.332	55.083	105.924	433.339	34,3	13.265	1,1	64.070	5,1
28	Sulawesi Tenggara	5.688	1.837	1.469	1.783	2.178	12.955	4,0	53.300	1.490	2.264	443	57.497	17,6	57.387	13.477	18.005	88.869	27,2	5.496	1,7	17.601	5,4
29	Gorontalo	4.278	78	25	450	370	5.201	2,9	44.958	904	1.937	40	47.839	26,7	20.096	8.878	15.030	44.004	24,6	6.623	3,7	15.180	8,5
30	Sulawesi Barat	1.860	59	16	260	347	2.542	1,3	27.905	461	622	32	29.020	14,7	47.578	8.638	12.627	68.843	34,8	2.384	1,2	8.125	4,1
31	Maluku	1.945	397	88	276	373	3.079	1,4	33.737	506	637	18	34.898	15,8	25.934	3.782	11.940	41.656	18,9	1.720	0,8	6.547	3,0
32	Maluku Utara	1.820	46	20	105	324	2.315	1,3	29.717	272	475	22	30.486	17,6	30.730	8.190	13.802	52.722	30,4	2.332	1,3	3.315	1,9
33	Papua Barat	1.066	208	83	65	91	1.513	1,2	12.234	60	225	5	12.524	9,9	4.471	1.143	1.332	6.946	5,5	122	0,1	2.238	1,8
34	Papua	1.528	403	9	122	332	2.394	2,9	19.625	211	514	156	20.506	24,8	5.721	299	2.430	8.450	10,2	216	0,3	2.029	2,5
Indonesia		683.690	65.437	26.932	337.702	121.313	1.235.074	3,2	3.944.722	149.390	448.218	53.271	4.595.601	11,9	4.152.554	1.232.588	8.334.137	13.719.279	35,5	322.308	0,8	4.624.360	12,0

Sumber: Profil Keluarga Indonesia 2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2019 (data per September 2019)

Lampiran 29

**CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN PROVINSI
TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jumlah Ibu Bersalin	Peserta KB Pasca Persalinan															
			Kondom	%	Suntik	%	Pil	%	AKDR	%	MOP	%	MOW	%	Implan	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Aceh	121.193	5.062	6,2	43.495	52,9	27.098	33,0	2.572	3,1	709	0,9	1.718	2,1	1.461	1,8	82.150	67,8
2	Sumatera Utara	317.683	4965	11,6	15.814	37,1	11.039	25,9	4.004	9,4	203	0,5	2.514	5,9	4.750	11,1	42.641	13,4
3	Sumatera Barat	114.903	1260	4,3	6.103	20,9	2.714	9,3	1.561	5,3	12	0,0	581	2,0	886	3,0	29.213	25,4
4	Riau	162.622	2620	5,8	24.976	55,2	11.979	26,5	1.074	2,4	145	0,3	1.550	3,4	3.129	6,9	45.253	27,8
5	Jambi	69.050	676	1,8	25.066	66,4	6.915	18,3	1.318	3,5	65	0,2	313	0,8	1.355	3,6	37.744	54,7
6	Sumatera Selatan	167.903	5042	5,0	66.754	66,2	19.452	19,3	1.067	1,1	20	0,0	332	0,3	4.273	4,2	100.879	60,1
7	Bengkulu	38.958	1423	6,2	15.546	67,6	3.526	15,3	814	3,5	24	0,1	186	0,8	1.487	6,5	23.006	59,1
8	Lampung	157.757	3883	3,2	60.632	50,0	22.880	18,9	4.756	3,9	222	0,2	799	0,7	15.628	12,9	121.215	76,8
9	Kep. Bangka Belitung	28.800	356	1,9	12.528	65,8	4.392	23,1	467	2,5	19	0,1	369	1,9	909	4,8	19.040	66,1
10	Kepulauan Riau	43.111	1128	5,9	11.440	59,4	3.690	19,2	1.044	5,4	11	0,1	660	3,4	1.283	6,7	19.256	44,7
11	DKI Jakarta	175.031	17827	23,0	66.462	85,7	21.606	27,9	32.405	41,8	384	0,5	957	1,2	18.446	23,8	77.550	44,3
12	Jawa Barat	917.254	8907	2,3	262.322	67,9	69.866	18,1	25.727	6,7	774	0,2	4.125	1,1	19.955	5,2	386.196	42,1
13	Jawa Tengah	553.805	36	9,5	165	43,4	68	17,9	44	11,6	1	0,3	4	1,1	62	16,3	380	0,1
14	DI Yogyakarta	56.833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.635	-
15	Jawa Timur	594.615	8141	2,8	207.007	71,7	24.492	8,5	24.411	8,5	64	0,0	7.339	2,5	17.134	5,9	288.588	48,5
16	Banten	252.183	719	4,2	11.080	64,2	2.735	15,8	1.098	6,4	41	0,2	173	1,0	857	5,0	17.263	6,8
17	Bali	67.768	1645	4,6	19.246	54,1	3.122	8,8	8.310	23,4	32	0,1	1.826	5,1	1.383	3,9	35.552	52,5
18	Nusa Tenggara Barat	108.481	446	0,7	52.036	77,8	1.775	2,7	3.497	5,2	47	0,1	733	1,1	8.367	12,5	66.901	61,7
19	Nusa Tenggara Timur	146.093	114	1,3	4.988	54,9	869	9,6	907	10,0	4	0,0	555	6,1	1.594	17,5	9.093	6,2
20	Kalimantan Barat	105.244	270	0,9	18.850	61,8	6.487	21,3	537	1,8	2	0,0	318	1,0	769	2,5	30.503	29,0
21	Kalimantan Tengah	56.494	321	1,2	18.061	69,1	6.169	23,6	401	1,5	11	0,0	161	0,6	1.031	3,9	26.125	46,2
22	Kalimantan Selatan	84.462	1398	2,7	37.491	71,8	12.483	23,9	1.656	3,2	16	0,0	485	0,9	986	1,9	52.199	61,8
23	Kalimantan Timur	78.684	1284	3,9	20.253	60,7	5.426	16,3	3.093	9,3	14	0,0	958	2,9	2.064	6,2	33.349	42,4
24	Kalimantan Utara	12.746	782	14,6	3.235	60,4	508	9,5	290	5,4	0	0,0	237	4,4	303	5,7	5.354	42,0
25	Sulawesi Utara	42.842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
26	Sulawesi Tengah	65.842	720	2,2	13.549	41,5	7.991	24,5	3.172	9,7	1300	4,0	2.199	6,7	3.623	11,1	32.659	49,6
27	Sulawesi Selatan	176.594	409	0,7	35.373	62,2	8.495	14,9	2.813	4,9	6	0,0	1.560	2,7	7.521	13,2	56.837	32,2
28	Sulawesi Tenggara	59.403	212	1,2	10.629	62,6	4.605	27,1	303	1,8	18	0,1	233	1,4	983	5,8	16.970	28,6
29	Gorontalo	25.049	25	0,5	2.230	42,7	1.606	30,8	412	7,9	0	0,0	50	1,0	897	17,2	5.220	20,8
30	Sulawesi Barat	34.494	131	1,9	3.487	50,6	1.185	17,2	226	3,3	9	0,1	374	5,4	528	7,7	6.889	20,0
31	Maluku	46.861	56	0,8	3.572	51,8	797	11,6	46	0,7	0	0,0	137	2,0	734	10,6	6.900	14,7
32	Maluku Utara	30.655	134	0,9	8.051	55,4	998	6,9	261	1,8	19	0,1	183	1,3	1.213	8,4	14.524	47,4
33	Papua Barat	22.942	35	1,1	2.231	71,1	335	10,7	79	2,5	0	0,0	39	1,2	175	5,6	3.138	13,7
34	Papua	74.906	721	3,4	12.943	61,6	3.623	17,2	188	0,9	0	0,0	21	0,1	1.478	7,0	21.026	28,1
Jumlah (Indonesia)		5.011.261	70.748	4,1	1.095.615	63,7	298.926	17,4	128.553	7,5	4.172	0,2	31.689	1,8	125.264	7,3	1.719.248	34,3

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020 (data per 3 Maret 2020)

Lampiran 30.a

**JUMLAH DAN PERSENTASE PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN DAN KOMPLIKASI NEONATAL
MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jumlah Ibu Hamil	Perkiraan Bumil Dengan Komplikasi Kebidanan	Jumlah Lahir Hidup	Perkiraan Neonatal Komplikasi			Penanganan Komplikasi Neonatal	
				L + P	L	P	L + P	L + P	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	126.964	25.393	115.422	8.710	8.357	17.067	560	3,3
2	Sumatera Utara	332.810	66.562	302.555	22.642	21.768	44.409	17.739	39,9
3	Sumatera Barat	120.374	24.075	109.431	8.208	7.879	16.087	50	0,3
4	Riau	170.366	34.073	154.878	11.602	11.120	22.722	4.382	19,3
5	Jambi	72.338	14.468	65.762	4.913	4.705	9.618	7.391	76,8
6	Sumatera Selatan	175.899	35.180	159.908	11.964	11.490	23.453	12.974	55,3
7	Bengkulu	40.813	8.163	37.103	2.765	2.656	5.421	2.602	48,0
8	Lampung	165.269	33.054	150.245	11.270	10.819	22.088	10.905	49,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	30.172	6.034	27.429	2.059	1.974	4.033	3.385	83,9
10	Kepulauan Riau	45.164	9.033	41.058	3.147	3.025	6.172	2.552	41,3
11	DKI Jakarta	183.366	36.673	166.696	12.917	12.394	25.311	24.038	95,0
12	Jawa Barat	960.932	192.186	873.575	66.186	63.266	129.452	107.583	83,1
13	Jawa Tengah	580.176	116.035	527.433	39.983	38.009	77.992	37.092	47,6
14	DI Yogyakarta	59.540	11.908	54.127	4.174	3.990	8.164	5.204	63,7
15	Jawa Timur	622.930	124.586	566.300	42.755	40.983	83.739	68.132	81,4
16	Banten	264.191	52.838	240.174	18.134	17.418	35.552	16.894	47,5
17	Bali	70.995	14.199	64.541	4.881	4.679	9.560	6.784	71,0
18	Nusa Tenggara Barat	113.646	22.729	103.315	7.610	7.306	14.917	11.295	75,7
19	Nusa Tenggara Timur	153.050	30.610	139.136	10.190	9.794	19.985	2.479	12,4
20	Kalimantan Barat	110.255	22.051	100.232	7.486	7.176	14.663	7.822	53,3
21	Kalimantan Tengah	59.184	11.837	53.804	3.956	3.812	7.768	2.373	30,5
22	Kalimantan Selatan	88.484	17.697	80.440	5.973	5.734	11.708	7.070	60,4
23	Kalimantan Timur	82.431	16.486	74.937	5.416	5.177	10.593	5.509	52,0
24	Kalimantan Utara	13.353	2.671	12.139	1.173	1.118	2.292	1.171	51,1
25	Sulawesi Utara	44.882	8.976	40.802	3.077	2.948	6.025	0	0,0
26	Sulawesi Tengah	68.978	13.796	62.707	4.637	4.445	9.082	4.916	54,1
27	Sulawesi Selatan	185.004	37.001	168.185	12.578	12.053	24.631	14.628	59,4
28	Sulawesi Tenggara	68.823	13.765	56.906	4.655	4.454	9.109	3.176	34,9
29	Gorontalo	26.242	5.248	23.856	1.764	1.690	3.454	2.579	74,7
30	Sulawesi Barat	36.136	7.227	32.851	2.388	2.297	4.685	1.725	36,8
31	Maluku	49.093	9.819	44.630	3.252	3.126	6.378	1.857	29,1
32	Maluku Utara	32.115	6.423	29.195	2.155	2.068	4.223	0	0,0
33	Papua Barat	24.035	4.807	21.850	1.593	1.537	3.129	87	2,8
34	Papua	78.473	15.695	71.339	5.201	5.043	10.244	1.607	15,7
Jumlah (Indonesia)		5.256.483	1.051.297	4.772.961	359.416	344.310	703.725	396.561	56,4

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020 (data per 3 Maret 2020)

Lampiran 30.b

PEMERIKSAAN HIV IBU HAMIL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Ibu Hamil Diperiksa HIV	Jumlah Ibu Hamil Positif HIV	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	32.533	50	0,15
2	Sumatera Utara	48.026	231	0,48
3	Sumatera Barat	43.275	36	0,08
4	Riau	32.327	68	0,21
5	Jambi	21.319	2	0,01
6	Sumatera Selatan	62.464	73	0,12
7	Bengkulu	11.370	9	0,08
8	Lampung	61.503	25	0,04
9	Kepulauan Bangka Belitung	21.952	19	0,09
10	Kepulauan Riau	19.175	101	0,53
11	DKI Jakarta	150.362	384	0,26
12	Jawa Barat	345.276	751	0,22
13	Jawa Tengah	468.683	1.519	0,32
14	DI Yogyakarta	41.119	115	0,28
15	Jawa Timur	429.237	784	0,18
16	Banten	130.168	275	0,21
17	Bali	61.736	288	0,47
18	Nusa Tenggara Barat	35.232	171	0,49
19	Nusa Tenggara Timur	20.216	66	0,33
20	Kalimantan Barat	26.563	32	0,12
21	Kalimantan Tengah	12.048	26	0,22
22	Kalimantan Selatan	19.607	31	0,16
23	Kalimantan Timur	41.272	165	0,40
24	Kalimantan Utara	10.169	19	0,19
25	Sulawesi Utara	6.950	213	3,06
26	Sulawesi Tengah	26.835	23	0,09
27	Sulawesi Selatan	97.618	212	0,22
28	Sulawesi Tenggara	12.182	176	1,44
29	Gorontalo	9.022	4	0,04
30	Sulawesi Barat	6.699	3	0,04
31	Maluku	13.810	77	0,56
32	Maluku Utara	7.744	19	0,25
33	Papua Barat	11.813	112	0,95
34	Papua	32.168	360	1,12
Indone		2.370.473	6.439	0,27

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020 (Data SIHA per 12 Februari 2020)

Lampiran 30.c

**PERSENTASE IBU HAMIL HBsAg REAKTIF BERDASARKAN PEMERIKSAAN DARAH DENGAN MENGGUNAKAN TEST CEPAT HBsAg
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/ Kota melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B	Kabupaten/Kota Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B (%)	Target Sasaran Jumlah Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil diperiksa HBsAg	Ibu Hamil Periksa HBsAg (%)	Jumlah Ibu Hamil HBsAg Reaktif	Ibu Hamil Reaktif HBsAg (%)	Jumlah Bayi dapat HBIG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	23	23	100,00	126.964	84.932	66,89	821	0,97	451
2	Sumatera Utara	33	18	54,55	332.810	23.507	7,06	413	1,76	295
3	Sumatera Barat	19	19	100,00	120.374	60.567	50,32	643	1,06	368
4	Riau	12	12	100,00	170.366	33.243	19,51	487	1,46	212
5	Jambi	11	11	100,00	72.338	38.933	53,82	616	1,58	625
6	Sumatera Selatan	17	17	100,00	175.899	61.806	35,14	488	0,79	136
7	Bengkulu	10	10	100,00	40.813	18.279	44,79	292	1,60	230
8	Lampung	15	15	100,00	165.269	113.475	68,66	1528	1,35	1.319
9	Kep. Bangka Belitung	7	7	100,00	30.172	21.471	71,16	553	2,58	507
10	Kepulauan Riau	7	7	100,00	45.164	17.510	38,77	341	1,95	209
11	DKI Jakarta	6	6	100,00	183.366	126.610	69,05	1725	1,36	1.454
12	Jawa Barat	27	26	96,30	960.932	340.438	35,43	4385	1,29	3.015
13	Jawa Tengah	35	35	100,00	580.176	416.325	71,76	5986	1,44	3.093
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00	59.540	29.824	50,09	265	0,89	111
15	Jawa Timur	38	38	100,00	622.930	425.993	68,39	8642	2,03	4.087
16	Banten	8	8	100,00	264.191	130.680	49,46	1945	1,49	1.462
17	Bali	9	9	100,00	70.995	47.423	66,80	613	1,29	123
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00	113.646	72.339	63,65	2340	3,23	690
19	Nusa Tenggara Timur	22	16	72,73	153.050	50.782	33,18	2637	5,19	958
20	Kalimantan Barat	14	12	85,71	110.255	8.592	7,79	72	0,84	72
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,00	59.184	25.282	42,72	815	3,22	566
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,00	88.484	46.584	52,65	908	1,95	410
23	Kalimantan Timur	10	10	100,00	82.431	45.589	55,31	1034	2,27	814
24	Kalimantan Utara	5	4	80,00	13.353	9.890	74,07	226	2,29	145
25	Sulawesi Utara	15	13	86,67	44.882	9.437	21,03	145	1,54	97
26	Sulawesi Tengah	13	13	100,00	68.978	33.556	48,65	802	2,39	544
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,00	185.004	142.942	77,26	3540	2,48	2.644
28	Sulawesi Tenggara	17	15	88,24	77.065	17.352	22,52	693	3,99	419
29	Gorontalo	6	6	100,00	26.242	13.094	49,90	454	3,47	384
30	Sulawesi Barat	6	5	83,33	36.136	19.829	54,87	422	2,13	211
31	Maluku	11	8	72,73	49.093	11.329	23,08	397	3,50	201
32	Maluku Utara	10	10	100,00	32.115	11.257	35,05	481	4,27	295
33	Papua Barat	13	9	69,23	24.035	6.868	28,57	304	4,43	150
34	Papua	29	16	55,17	78.473	24.420	31,12	1051	4,30	439
		514	464	90,27	5.264.725	2.540.158	48,25	46.064	1,81	26.736

Sumber :

Keterangan: Target sasaran yang dimaksud pada kolom 4 adalah Jumlah estimasi Ibu Hamil (data Pusdatin) dari Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B saja.

HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen) merupakan antigen permukaan yang ditemukan pada virus hepatitis B yang memberikan arti adanya infeksi hepatitis B

Pemeriksaan HBsAg pada ibu hamil menggunakan RDT (Rapid Diagnostic Test) HBsAg

Bayi mendapat HBIG: Jumlah Bayi yang mendapat imunisasi HBIG (imunisasi Pasif)

HBIG (Hepatitis B Immunoglobulin) merupakan serum antibodi spesifik Hepatitis B yang memberikan perlindungan langsung kepada bayi yang lahir dari ibu dengan HBsAg reaktif (positif)

Lampiran 31

JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Kematian			
		Neonatal	Balita		
			Bayi ^a	Anak Balita	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	734	924	71	995
2	Sumatera Utara	660	790	83	873
3	Sumatera Barat	582	788	111	899
4	Riau	374	480	47	527
5	Jambi	244	290	13	303
6	Sumatera Selatan	422	508	31	539
7	Bengkulu	196	263	34	297
8	Lampung	422	513	28	541
9	Kepulauan Bangka Belitung	143	188	21	209
10	Kepulauan Riau	213	269	25	294
11	DKI Jakarta	403	583	96	679
12	Jawa Barat	2.355	2.851	213	3.064
13	Jawa Tengah	3.111	4.450	758	5.208
14	D I Yogyakarta	236	316	52	368
15	Jawa Timur	3.032	3.855	333	4.188
16	Banten	1.039	1.292	147	1.439
17	Bali	236	327	39	366
18	Nusa Tenggara Barat	674	850	40	890
19	Nusa Tenggara Timur	649	933	137	1.070
20	Kalimantan Barat	429	539	56	595
21	Kalimantan Tengah	283	335	24	359
22	Kalimantan Selatan	460	602	68	670
23	Kalimantan Timur	519	688	77	765
24	Kalimantan Utara	103	149	22	171
25	Sulawesi Utara	199	250	24	274
26	Sulawesi Tengah	333	428	30	458
27	Sulawesi Selatan	714	919	72	991
28	Sulawesi Tenggara	324	436	50	486
29	Gorontalo	167	242	22	264
30	Sulawesi Barat	261	323	16	339
31	Maluku	167	234	28	262
32	Maluku Utara	211	276	49	325
33	Papua Barat	181	216	44	260
34	Papua	168	288	66	354
Indonesia		20.244	26.395	2.927	29.322

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020 (Update sampai dengan 27 Maret 2020)

Keterangan : - a : kematian bayi termasuk kematian pada neonatal

Lampiran 32

**JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN ANAK BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA DI INDONESIA
TAHUN 2019**

No	Provinsi	Penyebab Kematian Neonatal (0-28 Hari)						Penyebab Kematian Post Neonatal (29 Hari-11 Bulan)							Penyebab Kematian Anak Balita (12-59 Bulan)						
		BBLR	ASFIKSI	Tetanus Neonatorium	SEPSIS	Kelainan Bawaan	Lain-lain	Pneumonia	Diare	Malaria	Tetanus	Kelainan Saraf	Kelainan Saluran Cerna	Lain-lain	Pneumonia	Diare	Malaria	Campak	Demam	Difteri	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Aceh	193	269	2	17	93	160	22	13	1	1	3	5	145	3	5	0	0	0	0	63
2	Sumatera Utara	189	205	4	29	53	180	18	23	0	0	0	6	83	10	9	0	0	15	1	48
3	Sumatera Barat	162	144	0	7	81	188	17	12	0	0	5	6	166	6	9	0	0	3	0	93
4	Riau	125	86	1	5	35	122	5	5	0	0	0	4	92	1	3	0	0	1	0	42
5	Jambi	83	64	1	9	25	62	4	6	0	0	0	2	34	0	2	0	0	0	1	10
6	Sumatera Selatan	154	124	5	10	32	97	10	24	0	0	1	1	50	3	7	0	0	2	0	19
7	Bengkulu	65	44	0	3	42	42	2	11	0	0	0	2	52	1	3	0	0	1	0	29
8	Lampung	137	126	2	4	66	87	9	9	0	2	0	1	70	0	3	0	0	4	0	21
9	Kep. Bangka Belitung	57	36	0	3	21	26	9	4	0	0	0	1	31	2	2	0	0	0	0	17
10	Kepulauan Riau	84	59	0	7	17	46	5	13	0	0	0	2	36	2	3	0	0	1	0	19
11	DKI Jakarta	106	89	0	22	55	131	34	18	0	0	12	6	110	20	10	0	0	5	0	61
12	Jawa Barat	948	650	3	74	273	407	84	65	2	1	7	21	316	25	17	0	0	29	0	142
13	Jawa Tengah	1097	720	0	71	461	762	146	132	0	0	35	53	973	62	71	0	1	18	4	602
14	D I Yogyakarta	61	66	0	12	58	39	8	0	0	0	1	4	67	3	5	0	0	1	0	43
15	Jawa Timur	1239	828	5	91	474	395	134	113	1	0	6	23	546	42	34	8	0	36	0	213
16	Banten	372	277	11	56	138	185	46	17	0	2	0	3	185	7	11	0	0	32	0	97
17	Bali	100	38	0	9	53	36	14	5	0	0	0	5	67	4	1	0	0	1	0	33
18	Nusa Tenggara Barat	264	204	1	31	76	98	70	13	0	0	1	0	92	11	4	0	0	2	0	23
19	Nusa Tenggara Timur	163	205	2	29	61	189	83	17	2	0	4	7	171	11	13	3	0	27	0	83
20	Kalimantan Barat	116	136	2	24	38	113	23	13	0	0	0	1	73	2	4	0	0	2	0	48
21	Kalimantan Tengah	102	81	1	17	17	65	7	11	0	0	0	1	33	0	6	0	0	3	0	15
22	Kalimantan Selatan	209	98	0	19	40	94	14	29	0	0	1	5	93	4	6	0	0	5	0	53
23	Kalimantan Timur	197	141	1	19	81	80	38	30	0	0	0	2	99	6	5	0	0	9	0	57
24	Kalimantan Utara	39	36	0	1	14	13	8	6	0	0	1	0	31	3	0	0	0	0	0	19
25	Sulawesi Utara	72	44	0	13	36	34	8	4	1	0	0	0	38	1	3	0	0	1	0	19
26	Sulawesi Tengah	93	68	2	5	31	134	29	10	2	0	0	2	52	6	3	4	0	1	0	16
27	Sulawesi Selatan	262	221	1	24	58	148	29	25	0	0	5	5	141	8	6	0	0	9	0	49
28	Sulawesi Tenggara	92	76	2	9	41	104	20	9	0	1	0	5	77	2	6	0	0	3	0	39
29	Gorontalo	67	46	0	8	14	32	7	14	0	0	0	4	50	1	7	0	0	2	0	12
30	Sulawesi Barat	86	68	4	9	13	81	7	6	1	0	1	1	46	2	2	0	0	1	0	11
31	Maluku	47	51	0	12	10	47	16	15	1	0	0	1	34	9	2	0	0	0	0	17
32	Maluku Utara	62	57	5	13	14	60	6	17	1	0	0	1	40	3	12	0	0	1	0	33
33	Papua Barat	50	48	1	32	5	45	8	7	3	0	0	0	17	4	6	0	0	0	0	34
34	Papua	57	59	0	9	5	38	39	50	3	0	0	1	27	13	34	7	0	0	0	12
Indonesia		7.150	5.464	56	703	2.531	4.340	979	746	18	7	83	181	4.137	277	314	22	1	215	6	2.092

Kemenkes RI, 2020 (Update sampai dengan 27 Maret 2020)

Lampiran 33

BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Lahir Hidup	Bayi Baru Lahir Ditimbang		BBLR	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	115.422	82.553	71,5	2.381	2,9
2	Sumatera Utara	302.555	324.445	107,2	6.511	2,0
3	Sumatera Barat	109.431	88.001	80,4	2.887	3,3
4	Riau	154.878	TAD	TAD	TAD	TAD
5	Jambi	65.762	62.681	95,3	1.094	1,7
6	Sumatera Selatan	159.908	156.467	97,8	270	0,2
7	Bengkulu	37.103	33.463	90,2	1.197	3,6
8	Lampung	150.245	146.810	97,7	3.861	2,6
9	Kepulauan Bangka Belitung	27.429	26.290	95,8	1.130	4,3
10	Kepulauan Riau	41.058	TAD	TAD	TAD	TAD
11	DKI Jakarta	166.696	26.988	16,2	147	0,5
12	Jawa Barat	873.575	873.575	100,0	18.656	2,1
13	Jawa Tengah	527.433	TAD	TAD	TAD	TAD
14	D I Yogyakarta	54.127	42.445	78,4	2.389	5,6
15	Jawa Timur	566.300	558.257	98,6	39.739	7,1
16	Banten	240.174	203.343	84,7	2.778	1,4
17	Bali	64.541	TAD	TAD	TAD	TAD
18	Nusa Tenggara Barat	103.315	TAD	TAD	TAD	TAD
19	Nusa Tenggara Timur	139.136	90.441	65,0	4.954	5,5
20	Kalimantan Barat	100.232	83.113	82,9	3.162	3,8
21	Kalimantan Tengah	53.804	42.875	79,7	1.025	2,4
22	Kalimantan Selatan	80.440	74.513	92,6	3.800	5,1
23	Kalimantan Timur	74.937	67.708	90,4	3.292	4,9
24	Kalimantan Utara	12.139	9.337	76,9	579	6,2
25	Sulawesi Utara	40.802	33.024	80,9	668	2,0
26	Sulawesi Tengah	62.707	TAD	TAD	TAD	TAD
27	Sulawesi Selatan	168.185	146.990	87,4	6.478	4,4
28	Sulawesi Tenggara	62.566	46.921	75,0	1.815	3,9
29	Gorontalo	23.856	21.290	89,2	1.119	5,3
30	Sulawesi Barat	32.851	25.869	78,7	1.413	5,5
31	Maluku	44.630	44.630	100,0	482	1,1
32	Maluku Utara	29.195	TAD	TAD	TAD	TAD
33	Papua Barat	21.850	TAD	TAD	TAD	TAD
34	Papua	71.339	TAD	TAD	TAD	TAD
Indonesia		4.778.621	3.312.029	69,3	111.827	3,4

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020
Keterangan: TAD : Tidak ada data

Lampiran 34

CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Lahir Hidup	Kunjungan Neonatal 1 Kali (KN1)		KUunjungan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap)*	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	115.422	97.952	84,9	94.451	81,8
2	Sumatera Utara	302.555	265.209	87,7	255.698	84,5
3	Sumatera Barat	109.431	93.245	85,2	90.683	82,9
4	Riau	154.878	133.768	86,4	128.698	83,1
5	Jambi	65.762	67.650	102,9	66.605	101,3
6	Sumatera Selatan	159.908	156.922	98,1	152.583	95,4
7	Bengkulu	37.103	34.712	93,6	33.731	90,9
8	Lampung	150.245	147.962	98,5	144.410	96,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	27.429	26.154	95,4	25.934	94,5
10	Kepulauan Riau	41.058	32.087	78,2	38.694	94,2
11	DKI Jakarta	166.696	176.850	106,1	173.068	103,8
12	Jawa Barat	873.575	920.593	105,4	899.532	103,0
13	Jawa Tengah	527.433	526.176	99,8	285.990	54,2
14	D I Yogyakarta	54.127	39.968	73,8	38.477	71,1
15	Jawa Timur	566.300	567.638	100,2	548.660	96,9
16	Banten	240.174	249.393	103,8	248.987	103,7
17	Bali	64.541	66.557	103,1	65.357	101,3
18	Nusa Tenggara Barat	103.315	102.899	99,6	100.676	97,4
19	Nusa Tenggara Timur	139.136	92.021	66,1	91.458	65,7
20	Kalimantan Barat	100.232	88.321	88,1	83.708	83,5
21	Kalimantan Tengah	53.804	47.534	88,3	46.282	86,0
22	Kalimantan Selatan	80.440	71.845	89,3	69.869	86,9
23	Kalimantan Timur	74.937	65.247	87,1	65.373	87,2
24	Kalimantan Utara	12.139	12.758	105,1	12.057	99,3
25	Sulawesi Utara	40.802	36.104	88,5	3.482	8,5
26	Sulawesi Tengah	62.707	52.185	83,2	56.239	89,7
27	Sulawesi Selatan	168.185	152.093	90,4	148.803	88,5
28	Sulawesi Tenggara	56.906	51.711	90,9	50.580	88,9
29	Gorontalo	23.856	22.230	93,2	21.198	88,9
30	Sulawesi Barat	32.851	25.642	78,1	25.057	76,3
31	Maluku	44.630	31.723	71,1	27.051	60,6
32	Maluku Utara	29.195	22.125	75,8	20.396	69,9
33	Papua Barat	21.850	13.676	62,6	12.461	57,0
34	Papua	71.339	37.867	53,1	31.237	43,8
Indonesia		4.772.961	4.528.817	94,9	4.157.485	87,1

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020
ase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir"

Lampiran 35

**PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI (IMD)
DAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2019**

No	Provinsi	Bayi Baru Lahir			Bayi Usia < 6 Bulan		
		Jumlah	Mendapat IMD		Jumlah	Diberi ASI Eksklusif	
			Jumlah	%		Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	82.553	59.666	72,28	79.008	43.642	55,24
2	Sumatera Utara	333.285	199.877	59,97	88.467	44.546	50,35
3	Sumatera Barat	88.163	73.506	83,38	68.047	51.659	75,92
4	Riau	143.685	101.098	70,36	102.730	75.450	73,44
5	Jambi	66.819	54.601	81,71	49.352	34.103	69,10
6	Sumatera Selatan	156.467	135.187	86,40	83.335	48.162	57,79
7	Bengkulu	33.463	23.178	69,26	14.124	10.192	72,16
8	Lampung	151.694	127.722	84,20	140.642	97.501	69,33
9	Kepulauan Bangka Belitung	26.317	21.180	80,48	19.606	11.764	60,00
10	Kepulauan Riau	39.567	32.133	81,21	33.897	20.253	59,75
11	DKI Jakarta	15.472	14.610	94,43	51.271	36.000	70,22
12	Jawa Barat	897.959	707.684	78,81	576.842	366.495	63,53
13	Jawa Tengah	483.104	404.024	83,63	388.438	269.819	69,46
14	DI Yogyakarta	42.450	37.486	88,31	30.744	23.827	77,50
15	Jawa Timur	558.257	389.714	69,81	432.841	338.806	78,27
16	Banten	54.556	33.391	61,21	95.383	51.472	53,96
17	Bali	65.540	37.327	56,95	32.946	23.627	71,71
18	Nusa Tenggara Barat	103.033	86.032	83,50	99.995	86.253	86,26
19	Nusa Tenggara Timur	91.696	69.253	75,52	70.003	53.917	77,02
20	Kalimantan Barat	84.876	62.170	73,25	59.111	37.602	63,61
21	Kalimantan Tengah	48.816	38.548	78,97	27.858	15.977	57,35
22	Kalimantan Selatan	73.847	54.264	73,48	55.936	38.047	68,02
23	Kalimantan Timur	68.522	53.548	78,15	31.172	24.480	78,53
24	Kalimantan Utara	10.537	7.562	71,77	6.943	4.461	64,25
25	Sulawesi Utara	33.933	19.629	57,85	9.491	4.831	50,90
26	Sulawesi Tengah	62.707	46.371	73,95	35.255	19.280	54,69
27	Sulawesi Selatan	149185	126370	84,71	119471	84606	70,82
28	Sulawesi Tenggara	47867	45433	94,92	32030	21399	66,81
29	Gorontalo	21312	18439	86,52	13953	6877	49,29
30	Sulawesi Barat	25905	21951	84,74	16768	12827	76,50
31	Maluku	44630	15605	34,97	14463	6269	43,35
32	Maluku Utara	21125	16351	77,40	19768	11872	60,06
33	Papua Barat	13000	398	3,06	9303	3825	41,12
34	Papua	22204	11718	52,77	34422	14256	41,42
Indonesia		4.162.546	3.146.025	75,58	2.943.615	1.994.097	67,74

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2020

Lampiran 37

CAKUPAN DESA/KELURAHAN *UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION* (UCI)
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan UCI	% Desa/Kelurahan UCI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	6.507	1.546	23,8
2	Sumatera Utara	6.113	5.047	82,6
3	Sumatera Barat	4.120	2.852	69,2
4	Riau	1.872	1.255	67,0
5	Jambi	1.564	1.502	96,0
6	Sumatera Selatan	3.263	3.083	94,5
7	Bengkulu	1.516	1.400	92,3
8	Lampung	2.651	2.447	92,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	391	388	99,2
10	Kepulauan Riau	409	349	85,3
11	DKI Jakarta	267	267	100,0
12	Jawa Barat	5.957	5.585	93,8
13	Jawa Tengah	8.551	8.549	100,0
14	D I Yogyakarta	438	438	100,0
15	Jawa Timur	8.503	7.674	90,3
16	Banten	1.552	1.380	88,9
17	Bali	716	716	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	1.142	1.075	94,1
19	Nusa Tenggara Timur	3.351	2.555	76,2
20	Kalimantan Barat	2.136	1.510	70,7
21	Kalimantan Tengah	1.578	1.195	75,7
22	Kalimantan Selatan	2.006	1.796	89,5
23	Kalimantan Timur	1.038	881	84,9
24	Kalimantan Utara	479	336	70,1
25	Sulawesi Utara	1.838	1.626	88,5
26	Sulawesi Tengah	2.021	1.703	84,3
27	Sulawesi Selatan	3.040	2.912	95,8
28	Sulawesi Tenggara	2.262	2.029	89,7
29	Gorontalo	729	699	95,9
30	Sulawesi Barat	654	510	78,0
31	Maluku	1.235	911	73,8
32	Maluku Utara	1.200	1.029	85,8
33	Papua Barat	1.697	1.278	75,3
34	Papua	2.158	954	44,2
Indonesia		82.954	67.477	81,3

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020 (Update sampai dengan 18 Mei 2020)

Lampiran 38

**CAKUPAN IMUNISASI HEPATITIS B0 (0 -7 HARI) DAN BCG PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jumlah Lahir Hidup			Bayi Diimunisasi																	
					HB0												BCG					
					< 24 Jam						1 - 7 Hari											
					L		P		L + P		L		P		L + P		L		P		L + P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Aceh	57.714	57.708	115.422	33.672	58,3	31.462	54,5	65.134	56,4	12.910	22,4	12.388	21,5	25.298	21,9	39.241	68,0	37.418	64,8	76.659	66,4
2	Sumatera Utara	151.012	151.543	302.555	102.710	68,0	101.591	67,0	204.301	67,5	26.927	17,8	27.068	17,9	53.995	17,8	136.403	90,3	135.787	89,6	272.190	90,0
3	Sumatera Barat	54.584	54.847	109.431	38.760	71,0	36.645	66,8	75.405	68,9	8.860	16,2	8.231	15,0	17.091	15,6	45.991	84,3	44.009	80,2	90.000	82,2
4	Riau	79.419	75.459	154.878	52.310	65,9	49.616	65,8	101.926	65,8	7.364	9,3	7.087	9,4	14.451	9,3	62.577	78,8	60.386	80,0	122.963	79,4
5	Jambi	33.564	32.198	65.762	34.254	102,1	32.670	101,5	66.924	101,8	1.314	3,9	1.336	4,1	2.650	4,0	35.569	106,0	33.075	102,7	68.643	104,4
6	Sumatera Selatan	81.258	78.650	159.908	64.263	79,1	62.988	80,1	127.251	79,6	18.076	22,2	17.275	22,0	35.351	22,1	81.732	100,6	81.642	103,8	163.374	102,2
7	Bengkulu	18.917	18.186	37.103	16.000	84,6	14.987	82,4	30.987	83,5	4.110	21,7	4.106	22,6	8.216	22,1	17.836	94,3	17.078	93,9	34.914	94,1
8	Lampung	76.940	73.305	150.245	63.186	82,1	60.842	83,0	124.028	82,6	10.924	14,2	10.847	14,8	21.771	14,5	75.252	97,8	73.121	99,7	148.373	98,8
9	Kep. Bangka Belitung	14.273	13.156	27.429	13.211	92,6	12.375	94,1	25.586	93,3	162	1,1	186	1,4	348	1,3	13.278	93,0	12.213	92,8	25.491	92,9
10	Kepulauan Riau	20.923	20.135	41.058	19.189	91,7	19.022	94,5	38.211	93,1	940	4,5	884	4,4	1.824	4,4	20.291	97,0	19.998	99,3	40.289	98,1
11	DKI Jakarta	83.456	83.240	166.696	82.909	99,3	80.750	97,0	163.659	98,2	4.544	5,4	4.667	5,6	9.211	5,5	85.875	102,9	83.754	100,6	169.629	101,8
12	Jawa Barat	442.347	431.228	873.575	452.871	102,4	437.288	101,4	890.159	101,9	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	456.594	103,2	442.303	102,6	898.897	102,9
13	Jawa Tengah	261.617	265.816	527.433	260.571	99,6	246.295	92,7	506.866	96,1	11.707	4,5	11.376	4,3	23.083	4,4	276.970	105,9	263.672	99,2	540.642	102,5
14	D I Yogyakarta	21.293	21.055	42.348	19.501	91,6	18.176	86,3	37.677	89,0	1.040	4,9	876	4,2	1.916	4,5	20.533	96,4	19.123	90,8	39.656	93,6
15	Jawa Timur	279.699	286.601	566.300	298.505	106,7	285.018	99,4	583.523	103,0	3.459	1,2	1.460	0,5	4.919	0,9	301.365	107,7	288.146	100,5	589.511	104,1
16	Banten	122.346	117.828	240.174	111.026	90,7	106.821	90,7	217.847	90,7	17.288	14,1	15.892	13,5	33.180	13,8	125.572	102,6	121.152	102,8	246.724	102,7
17	Bali	32.528	32.013	64.541	30.945	95,1	29.817	93,1	60.762	94,1	5.192	16,0	4.707	14,7	9.899	15,3	36.065	110,9	34.055	106,4	70.120	108,6
18	Nusa Tenggara Barat	50.158	53.157	103.315	49.696	99,1	47.213	88,8	96.909	93,8	1.605	3,2	1.516	2,9	3.121	3,0	52.198	104,1	49.358	92,9	101.556	98,3
19	Nusa Tenggara Timur	69.021	70.115	139.136	42.641	61,8	40.336	57,5	82.977	59,6	5.128	7,4	5.096	7,3	10.224	7,3	51.580	74,7	49.740	70,9	101.320	72,8
20	Kalimantan Barat	50.972	49.260	100.232	28.682	56,3	27.568	56,0	56.250	56,1	13.860	27,2	13.359	27,1	27.219	27,2	44.370	87,0	43.105	87,5	87.475	87,3
21	Kalimantan Tengah	28.165	25.639	53.804	18.369	65,2	16.900	65,9	35.269	65,6	5.552	19,7	5.346	20,9	10.898	20,3	24.725	87,8	23.702	92,4	48.427	90,0
22	Kalimantan Selatan	40.859	39.581	80.440	23.165	56,7	26.755	67,6	49.920	62,1	10.174	24,9	11.637	29,4	21.811	27,1	33.748	82,6	36.900	93,2	70.648	87,8
23	Kalimantan Timur	39.296	35.641	74.937	31.087	79,1	28.770	80,7	59.857	79,9	3.289	8,4	3.318	9,3	6.607	8,8	35.778	91,0	33.782	94,8	69.560	92,8
24	Kalimantan Utara	6.444	5.695	12.139	5.331	82,7	4.923	86,4	10.254	84,5	549	8,5	483	8,5	1.032	8,5	6.410	99,5	5.988	105,1	12.398	102,1
25	Sulawesi Utara	20.832	19.970	40.802	11.475	55,1	10.601	53,1	22.076	54,1	7.252	34,8	7.001	35,1	14.253	34,9	19.992	96,0	18.600	93,1	38.592	94,6
26	Sulawesi Tengah	32.001	30.706	62.707	19.145	59,8	18.259	59,5	37.404	59,6	7.587	23,7	7.353	23,9	14.940	23,8	28.797	90,0	27.675	90,1	56.472	90,1
27	Sulawesi Selatan	82.315	85.870	168.185	71.088	86,4	67.839	79,0	138.927	82,6	8.799	10,7	8.556	10,0	17.355	10,3	80.414	97,7	77.965	90,8	158.379	94,2
28	Sulawesi Tenggara	31.461	31.105	62.566	25.518	81,1	23.850	76,7	49.368	78,9	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	28.502	90,6	27.081	87,1	55.583	88,8
29	Gorontalo	11.955	11.901	23.856	9.056	75,8	8.929	75,0	17.985	75,4	619	5,2	553	4,6	1.172	4,9	9.933	83,1	9.534	80,1	19.467	81,6
30	Sulawesi Barat	16.509	16.342	32.851	10.693	64,8	10.042	61,4	20.735	63,1	2.247	13,6	1.994	12,2	4.241	12,9	13.346	80,8	12.364	75,7	25.710	78,3
31	Maluku	22.515	22.115	44.630	10.242	45,5	10.171	46,0	20.413	45,7	4.898	21,8	4.630	20,9	9.528	21,3	18.853	83,7	17.990	81,3	36.843	82,6
32	Maluku Utara	14.886	14.309	29.195	10.064	67,6	9.242	64,6	19.306	66,1	2.031	13,6	1.769	12,4	3.800	13,0	12.505	84,0	11.682	81,6	24.187	82,8
33	Papua Barat	11.511	10.339	21.850	4.800	41,7	4.874	47,1	9.674	44,3	4.411	38,3	4.283	41,4	8.694	39,8	9.684	84,1	9.329	90,2	19.013	87,0
34	Papua	37.403	33.936	71.339	7.102	19,0	6.865	20,2	13.967	19,6	12.372	33,1	11.472	33,8	23.844	33,4	26.087	69,7	24.880	73,3	50.967	71,4
Indonesia		2.398.193	2.368.649	4.766.842	2.072.037	86,4	1.989.500	84,0	4.061.537	85,2	225.190	9,4	216.752	9,2	441.942	9,3	2.328.065	97,1	2.246.606	94,8	4.574.672	96,0

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemendes RI 2020 (Update sampai dengan 18 Mei 2020)

Keterangan: TAD : Tidak ada data

Lampiran 39.a

CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4*, CAMPAK/MR, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Bayi (SURVIVING INFANT)			Bayi Dimunisasi																											
					DPT-HB-Hib3						Polio 4*						Campak/MR						IMUNISASI DASAR LENGKAP									
					L		P		L + P		L		P		L + P		L		P		L + P		L		P		L + P					
		L	P	L+P	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)			
1	Aceh	58.069	55.712	113.781	32.539	56,0	31.522	56,6	64.061	56,3	34.705	59,8	33.672	60,4	68.377	60,1	28.959	49,9	28.109	50,5	57.068	50,2	29.192	50,3	28.667	51,5	57.859	50,9				
2	Sumatera Utara	150.945	145.118	296.063	134.772	89,3	133.390	91,9	268.162	90,6	131.206	86,9	130.947	90,2	262.153	88,5	131.810	87,3	133.619	92,1	265.429	89,7	128.055	84,8	127.133	87,6	255.188	86,2				
3	Sumatera Barat	54.723	52.524	107.247	42.971	78,5	41.310	78,6	84.281	78,6	42.500	77,7	40.872	77,8	83.372	77,7	42.511	77,7	41.179	78,4	83.690	78,0	41.348	75,6	40.350	76,8	81.698	76,2				
4	Riau	77.345	74.136	151.481	60.387	78,1	58.407	78,8	118.794	78,4	60.004	77,6	58.137	78,4	118.141	78,0	59.470	76,9	57.304	77,3	116.774	77,1	56.244	72,7	54.741	73,8	110.985	73,3				
5	Jambi	32.751	31.368	64.119	34.162	104,3	32.543	103,7	66.704	104,0	34.139	104,2	32.594	103,9	66.732	104,1	34.243	104,6	32.455	103,5	66.697	104,0	33.603	102,6	32.290	102,9	65.893	102,8				
6	Sumatera Selatan	79.758	76.597	156.355	81.862	102,6	81.812	106,8	163.674	104,7	81.044	101,6	81.424	106,3	162.468	103,9	80.961	101,5	80.626	105,3	161.587	103,3	80.514	100,9	80.361	104,9	160.875	102,9				
7	Bengkulu	18.435	17.705	36.140	17.355	94,1	16.563	93,5	33.918	93,9	17.063	92,6	16.398	92,6	33.461	92,6	17.620	95,6	15.096	85,3	32.716	90,5	17.606	95,5	16.916	95,5	34.522	95,5				
8	Lampung	75.130	72.125	147.255	74.886	99,7	73.132	101,4	148.018	100,5	73.498	97,8	71.881	99,7	145.379	98,7	73.289	97,5	71.342	98,9	144.631	98,2	73.985	98,5	72.185	100,1	146.170	99,3				
9	Kep. Bangka Belitung	13.727	13.162	26.889	12.515	91,2	11.671	88,7	24.186	89,9	12.495	91,0	11.662	88,6	24.157	89,8	12.751	92,9	11.818	89,8	24.569	91,4	12.771	93,0	11.844	90,0	24.615	91,5				
10	Kepulauan Riau	20.977	20.169	41.146	20.154	96,1	19.826	98,3	39.980	97,2	20.088	95,8	19.742	97,9	39.830	96,8	19.472	92,8	19.357	96,0	38.829	94,4	20.047	95,6	19.827	98,3	39.874	96,9				
11	DKI Jakarta	86.115	82.628	168.743	84.207	97,8	81.626	98,8	165.833	98,3	84.114	97,7	81.664	98,8	165.778	98,2	84.359	98,0	82.177	99,5	166.536	98,7	83.666	97,2	81.725	98,9	165.391	98,0				
12	Jawa Barat	441.241	421.775	863.016	449.355	101,8	445.603	105,6	894.958	103,7	436.083	98,8	422.213	100,1	858.296	99,5	445.637	101,0	431.855	102,4	877.492	101,7	427.474	96,9	415.688	98,6	843.162	97,7				
13	Jawa Tengah	266.555	253.393	519.948	277.207	104,0	265.191	104,7	542.398	104,3	274.889	103,1	262.294	103,5	537.183	103,3	275.050	103,2	262.953	103,8	538.003	103,5	272.696	102,3	260.978	103,0	533.674	102,6				
14	DI Yogyakarta	19.705	18.423	38.128	20.427	103,7	19.874	103,5	39.501	103,6	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	20.245	102,7	18.923	102,7	39.168	102,7	20.243	102,7	18.898	102,6	39.141	102,7				
15	Jawa Timur	285.035	273.222	558.257	298.237	104,6	283.382	103,7	581.619	104,2	293.342	102,9	279.894	102,4	573.236	102,7	294.761	103,4	280.593	102,7	575.354	103,1	294.952	103,5	281.584	103,1	576.536	103,1				
16	Banten	120.893	116.122	237.015	121.635	100,6	118.063	101,7	239.698	101,1	121.475	100,5	117.990	101,6	239.465	101,0	120.190	99,4	117.066	100,8	237.256	100,1	118.913	98,4	115.825	99,7	234.738	99,0				
17	Bali	32.537	31.195	63.732	34.496	106,0	32.357	103,7	66.853	104,9	33.475	102,9	31.504	101,0	64.979	102,0	34.510	106,1	32.254	103,4	66.764	104,8	34.187	105,1	32.241	103,4	66.428	104,2				
18	Nusa Tenggara Barat	50.736	48.708	99.444	53.948	106,3	51.549	105,8	105.497	106,1	53.776	106,0	51.357	105,4	105.133	105,7	53.288	105,0	50.408	103,5	103.696	104,3	53.041	104,5	50.135	102,9	103.176	103,8				
19	Nusa Tenggara Timur	67.936	65.294	133.230	55.161	81,2	52.998	81,0	108.059	81,1	53.149	78,2	51.350	78,6	104.499	78,4	51.688	76,1	50.259	77,0	101.947	76,5	50.702	74,6	49.032	75,1	99.734	74,9				
20	Kalimantan Barat	49.908	47.843	97.751	42.815	85,8	41.187	86,1	84.002	85,9	42.003	84,2	40.663	85,0	82.666	84,6	42.041	84,2	40.241	84,1	82.282	84,2	41.139	82,4	39.460	82,5	80.599	82,5				
21	Kalimantan Tengah	26.372	25.413	51.785	23.861	90,5	22.626	89,0	46.487	89,8	23.696	89,9	22.503	88,5	46.199	89,2	23.776	90,2	22.469	88,4	46.245	89,3	23.469	89,0	22.133	87,1	45.602	88,1				
22	Kalimantan Selatan	39.822	38.228	78.050	32.493	81,6	35.617	93,2	68.110	87,3	32.728	82,2	35.467	92,8	68.195	87,4	32.277	81,1	35.143	91,9	67.420	86,4	31.810	79,9	35.422	92,7	67.232	86,1				
23	Kalimantan Timur	36.108	34.513	70.621	34.503	95,6	32.692	94,7	67.195	95,1	33.874	93,8	32.385	93,8	66.259	93,8	34.179	94,7	32.355	93,7	66.534	94,2	33.681	93,3	31.738	92,0	65.419	92,6				
24	Kalimantan Utara	7.823	7.455	15.278	6.060	77,5	5.724	76,8	11.784	77,1	6.005	76,8	5.638	75,6	11.643	76,2	5.833	74,6	5.476	73,5	11.309	74,0	5.634	72,0	5.240	70,3	10.874	71,2				
25	Sulawesi Utara	20.512	19.652	40.164	19.920	97,1	18.738	95,3	38.658	96,3	19.802	96,5	18.670	95,0	38.472	95,8	19.261	93,9	18.358	93,4	37.619	93,7	19.225	93,7	18.040	91,8	37.265	92,8				
26	Sulawesi Tengah	30.913	29.634	60.547	29.117	94,2	28.158	95,0	57.275	94,6	29.166	94,3	28.060	94,7	57.226	94,5	28.464	92,1	27.362	92,3	55.826	92,2	28.810	93,2	27.613	93,2	56.423	93,2				
27	Sulawesi Selatan	83.855	80.354	164.209	80.521	96,0	78.142	97,2	158.663	96,6	80.172	95,6	77.846	96,9	158.018	96,2	80.913	96,5	78.328	97,5	159.241	97,0	79.666	95,0	77.122	96,0	156.788	95,5				
28	Sulawesi Tenggara	31.035	29.691	60.726	27.262	87,8	25.953	87,4	53.215	87,6	27.113	87,4	25.905	87,2	53.018	87,3	27.981	90,2	26.271	88,5	54.252	89,3	28.029	90,3	25.660	86,4	53.689	88,4				
29	Gorontalo	11.761	11.264	23.025	9.522	81,0	9.215	81,8	18.737	81,4	9.494	80,7	9.192	81,6	18.686	81,2	9.909	84,3	9.515	84,5	19.424	84,4	9.860	83,8	9.600	85,2	19.460	84,5				
30	Sulawesi Barat	15.921	15.311	31.232	12.923	81,2	12.054	78,7	24.977	80,0	12.961	81,4	12.235	79,9	25.196	80,7	13.015	81,7	12.192	79,6	25.207	80,7	12.827	80,6	11.978	78,2	24.815	79,5				
31	Maluku	21.681	20.827	42.518	18.622	85,9	18.093	86,8	36.715	86,4	18.538	85,5	17.663	84,8	36.201	85,1	17.962	82,8	17.284	82,9	35.246	82,9	16.444	75,8	16.289	78,2	32.733	77,0				
32	Maluku Utara	14.367	13.789	28.156	12.035	83,8	11.305	82,0	23.340	82,9	12.097	84,2	11.311	82,0	23.408	83,1	11.975	83,4	11.187	81,1	23.162	82,3	11.759	81,8	10.938	79,3	22.697	80,6				
33	Papua Barat	10.618	10.244	20.862	9.235	87,0	8.949	87,4	18.184	87,2	8.978	84,5	8.717	85,1	17.695	84,8	9.373	88,3	9.002	87,9	18.375	88,1	8.831	83,2	8.558	83,5	17.389	83,4				
34	Papua	34.673	33.620	68.293	23.739	68,5	22.823	67,9	46.562	68,2	25.399	73,3	24.228	72,1	49.627	72,7	24.240	69,9	23.553	70,1	47.793	70,0	24.741	71,4	24.373	72,5	49.114	71,9				
Indonesia		2.387.982	2.287.224	4.675.206	2.288.903	95,9	2.221.194	97,1	4.510.097	96,5	2.239.070	93,8	2.166.078	92,7	4.405.148	94,2	2.262.012	94,7	2.186.129	95,6	4.448.141	95,1	2.225.174	93,2	2.154.585	94,2	4.379.759	93,7				

Lampiran 39.b

***DROP OUT RATE* CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB/HiB(1) - CAMPAK DAN CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB/HiB(1) - DPT/HB/HiB(3)
PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2017-2019**

No	Provinsi	2017		2018		2019	
		DPT/HB/HiB(1)- Campak	DPT/HB/HiB(1) - DPT/HB/HiB(3)	DPT/HB/HiB(1)- Campak	DPT/HB/HiB(1) - DPT/HB/HiB(3)	DPT/HB/HiB(1)- Campak	DPT/HB/HiB(1) - DPT/HB/HiB(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	8,2	5,5	13,7	7,1	19,7	9,8
2	Sumatera Utara	5,0	2,6	9,5	2,3	2,5	1,5
3	Sumatera Barat	5,3	3,8	2,9	3,2	5,8	5,2
4	Riau	5,4	2,9	4,4	3,2	5,6	3,9
5	Jambi	1,1	1,4	0,7	2,8	1,4	1,4
6	Sumatera Selatan	2,4	-0,3	-0,9	0,4	1,8	0,5
7	Bengkulu	3,8	1,0	-5,1	2,6	7,6	4,2
8	Lampung	-0,2	-0,3	-1,4	0,0	3,0	0,7
9	Kepulauan Bangka Belitung	-0,7	0,9	1,5	3,9	3,0	4,5
10	Kepulauan Riau	2,3	0,5	-8,9	1,7	3,2	0,3
11	DKI Jakarta	37,1	1,4	1,1	0,6	-0,1	0,4
12	Jawa Barat	5,1	3,8	11,6	2,0	2,5	0,6
13	Jawa Tengah	4,4	0,3	-2,2	0,1	1,2	0,4
14	DI Yogyakarta	-1,5	0,5	1,4	0,3	1,3	0,4
15	Jawa Timur	4,3	2,7	1,7	1,3	2,1	1,1
16	Banten	8,6	4,3	4,6	3,1	4,0	3,0
17	Bali	0,6	2,8	1,6	2,0	4,9	4,8
18	Nusa Tenggara Barat	1,6	0,9	1,2	2,7	2,5	0,8
19	Nusa Tenggara Timur	3,4	1,5	-27,8	11,1	6,7	1,1
20	Kalimantan Barat	3,8	2,7	-4,5	3,0	6,4	4,4
21	Kalimantan Tengah	5,8	5,8	-12,6	2,6	5,5	5,0
22	Kalimantan Selatan	3,5	4,7	-2,8	7,5	2,8	1,8
23	Kalimantan Timur	2,5	2,7	2,2	2,4	5,2	4,2
24	Kalimantan Utara	7,7	4,3	9,6	6,4	9,9	6,1
25	Sulawesi Utara	2,5	1,2	-0,8	0,7	4,8	2,1
26	Sulawesi Tengah	1,8	2,5	-9,4	0,3	5,0	2,5
27	Sulawesi Selatan	2,0	2,7	-4,2	5,0	0,5	0,8
28	Sulawesi Tenggara	4,7	4,7	0,9	5,0	2,8	4,6
29	Gorontalo	-1,2	-1,2	-2,2	1,3	0,0	3,5
30	Sulawesi Barat	2,7	3,1	-8,6	4,6	2,9	3,8
31	Maluku	6,7	4,2	14,0	4,8	5,7	1,7
32	Maluku Utara	4,7	4,1	4,8	1,2	4,2	3,5
33	Papua Barat	2,1	0,8	-8,9	4,9	4,2	5,2
34	Papua	4,3	12,1	1,8	12,6	9,5	11,8
Indonesia		4,1	2,6	2,5	2,3	3,1	1,8

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020 (Update sampai dengan 18 Mei 2020)

Lampiran 39.c

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2017-2019

No	Provinsi	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
		Jumlah Kab/Kota	Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap	%	Jumlah Kab/Kota	Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap	%	Jumlah Kab/Kota	Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	23	12	52,17	23	5	21,74	23	3	13,04
2	Sumatera Utara	33	25	75,76	33	20	60,61	33	20	60,61
3	Sumatera Barat	19	16	84,21	19	9	47,37	19	8	42,11
4	Riau	12	9	75,00	12	4	33,33	12	6	50,00
5	Jambi	11	11	100,00	11	11	100,00	11	11	100,00
6	Sumatera Selatan	17	17	100,00	17	16	94,12	17	17	100,00
7	Bengkulu	10	10	100,00	10	10	100,00	10	10	100,00
8	Lampung	15	15	100,00	15	15	100,00	15	15	100,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,00	7	6	85,71	7	4	57,14
10	Kepulauan Riau	7	7	100,00	7	7	100,00	7	6	85,71
11	DKI Jakarta	6	6	100,00	6	6	100,00	6	6	100,00
12	Jawa Barat	27	27	100,00	27	26	96,30	27	27	100,00
13	Jawa Tengah	35	35	100,00	35	35	100,00	35	35	100,00
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00	5	5	100,00	5	5	100,00
15	Jawa Timur	38	38	100,00	38	37	97,37	38	37	97,37
16	Banten	8	7	87,50	8	7	87,50	8	8	100,00
17	Bali	9	9	100,00	9	9	100,00	9	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00	10	10	100,00	10	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	12	54,55	22	6	27,27	22	6	27,27
20	Kalimantan Barat	14	13	92,86	14	6	42,86	14	6	42,86
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,00	14	11	78,57	14	9	64,29
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,00	13	11	84,62	13	13	100,00
23	Kalimantan Timur	10	10	100,00	10	9	90,00	10	9	90,00
24	Kalimantan Utara	5	4	80,00	5	3	60,00	5	2	40,00
25	Sulawesi Utara	15	13	86,67	15	9	60,00	15	11	73,33
26	Sulawesi Tengah	13	13	100,00	13	12	92,31	13	12	92,31
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,00	24	21	87,50	24	21	87,50
28	Sulawesi Tenggara	17	17	100,00	17	13	76,47	17	14	82,35
29	Gorontalo	6	6	100,00	6	4	66,67	6	5	83,33
30	Sulawesi Barat	6	5	83,33	6	2	33,33	6	3	50,00
31	Maluku	11	7	63,64	11	6	54,55	11	5	45,45
32	Maluku Utara	10	6	60,00	10	3	30,00	10	5	50,00
33	Papua Barat	13	9	69,23	13	10	76,92	13	8	61,54
34	Papua	29	7	24,14	29	10	34,48	29	13	44,83
Indonesia		514	439	85,41	514	374	72,76	514	379	73,74

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020 (Update sampai dengan 18 Mei 2020)

Lampiran 40.a

**CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib 4 DAN CAMPAK/MR2 PADA ANAK USIA DIBAWAH DUA TAHUN (BADUTA)
MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jumlah Baduta			Baduta Diimunisasi											
					DPT-HB-Hib4						Campak/MR2					
					L		P		L + P		L		P		L + P	
		L	P	L+P	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	58.403	56.036	114.439	14.606	25,0	16.185	28,9	30.791	26,9	17.986	30,8	11.259	20,1	29.244	25,6
2	Sumatera Utara	152.573	146.711	299.284	106.534	69,8	103.987	70,9	210.521	70,3	97.376	63,8	96.920	66,1	194.296	64,9
3	Sumatera Barat	55.065	52.863	107.928	24.484	44,5	23.632	44,7	48.116	44,6	22.160	40,2	21.329	40,3	43.489	40,3
4	Riau	77.007	73.824	150.831	35.700	46,4	34.052	46,1	69.752	46,2	32.528	42,2	31.473	42,6	64.001	42,4
5	Jambi	32.888	31.502	64.390	28.769	87,5	27.045	85,9	55.814	86,7	27.183	82,7	26.128	82,9	53.311	82,8
6	Sumatera Selatan	80.497	77.322	157.819	73.578	91,4	73.439	95,0	147.017	93,2	74.483	92,5	74.625	96,5	149.108	94,5
7	Bengkulu	18.511	17.781	36.292	14.833	80,1	14.464	81,3	29.297	80,7	13.324	72,0	12.908	72,6	26.232	72,3
8	Lampung	76.284	73.245	149.529	65.874	86,4	64.183	87,6	130.057	87,0	60.717	79,6	59.348	81,0	120.065	80,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	13.685	13.124	26.809	8.579	62,7	8.136	62,0	16.715	62,3	7.160	52,3	6.843	52,1	14.003	52,2
10	Kepulauan Riau	21.295	20.481	41.776	16.042	75,3	15.418	75,3	31.460	75,3	15.006	70,5	14.676	71,7	29.682	71,1
11	DKI Jakarta	88.018	84.475	172.493	83.570	94,9	82.609	97,8	166.179	96,3	83.238	94,6	81.822	96,9	165.060	95,7
12	Jawa Barat	443.440	423.953	867.393	341.116	76,9	332.863	78,5	673.979	77,7	329.029	74,2	319.789	75,4	648.818	74,8
13	Jawa Tengah	268.873	255.614	524.487	241.545	89,8	233.326	91,3	474.871	90,5	231.017	85,9	222.588	87,1	453.605	86,5
14	D I Yogyakarta	19.064	18.248	37.312	19.341	101,5	18.308	100,3	37.649	100,9	18.730	98,2	17.749	97,3	36.479	97,8
15	Jawa Timur	287.390	275.523	562.913	259.974	90,5	249.820	90,7	509.794	90,6	260.863	90,8	252.674	91,7	513.537	91,2
16	Banten	121.855	117.063	238.918	98.608	80,9	96.470	82,4	195.078	81,7	93.558	76,8	91.685	78,3	185.243	77,5
17	Bali	32.644	31.302	63.946	25.390	77,8	23.506	75,1	48.896	76,5	25.313	77,5	23.626	75,5	48.939	76,5
18	Nusa Tenggara Barat	51.073	49.044	100.117	40.059	78,4	38.123	77,7	78.182	78,1	37.386	73,2	36.371	74,2	73.757	73,7
19	Nusa Tenggara Timur	67.195	64.593	131.788	28.722	42,7	28.215	43,7	56.937	43,2	27.141	40,4	26.370	40,8	53.511	40,6
20	Kalimantan Barat	50.243	48.171	98.414	29.788	59,3	29.430	61,1	59.218	60,2	27.578	54,9	26.325	54,6	53.903	54,8
21	Kalimantan Tengah	26.332	25.376	51.708	15.544	59,0	14.573	57,4	30.117	58,2	14.068	53,4	13.620	53,7	27.688	53,5
22	Kalimantan Selatan	40.188	38.586	78.774	22.240	55,3	25.551	66,2	47.791	60,7	18.236	45,4	21.126	54,8	39.362	50,0
23	Kalimantan Timur	36.158	34.578	70.736	24.762	68,5	23.791	68,8	48.553	68,6	20.971	58,0	20.369	58,9	41.340	58,4
24	Kalimantan Utara	7.713	7.340	15.053	4.271	55,4	3.962	54,0	8.233	54,7	3.587	46,5	3.465	47,2	7.052	46,8
25	Sulawesi Utara	20.660	19.797	40.457	14.445	69,9	13.236	66,9	27.681	68,4	12.234	59,2	11.711	59,2	23.945	59,2
26	Sulawesi Tengah	30.967	29.689	60.656	22.678	73,2	21.643	72,9	44.321	73,1	24.367	78,7	23.620	79,6	47.987	79,1
27	Sulawesi Selatan	84.250	80.746	164.996	70.669	83,9	68.516	84,9	139.185	84,4	67.753	80,4	66.577	82,5	134.330	81,4
28	Sulawesi Tenggara	30.899	29.564	60.463	19.630	63,5	18.696	63,2	38.326	63,4	16.976	54,9	15.950	54,0	32.926	54,5
29	Gorontalo	11.714	11.221	22.935	6.471	55,2	6.180	55,1	12.651	55,2	5.745	49,0	5.608	50,0	11.353	49,5
30	Sulawesi Barat	15.801	15.199	31.000	8.992	56,9	8.571	56,4	17.563	56,7	7.542	47,7	7.261	47,8	14.803	47,8
31	Maluku	21.536	20.701	42.237	14.183	65,9	13.329	64,4	27.512	65,1	13.971	64,9	14.393	69,5	28.364	67,2
32	Maluku Utara	14.333	13.758	28.091	8.563	59,7	7.674	55,8	16.237	57,8	7.068	49,3	6.459	46,9	13.527	48,2
33	Papua Barat	10.527	10.159	20.686	7.443	70,7	7.159	70,5	14.602	70,6	6.201	58,9	5.798	57,1	11.999	58,0
34	Papua	34.607	33.563	68.170	14.783	42,7	13.817	41,2	28.600	42,0	13.163	38,0	12.650	37,7	25.813	37,9
Indonesia		2.401.688	2.301.152	4.702.840	1.811.786	75,4	1.759.909	76,5	3.571.695	75,9	1.733.658	72,2	1.683.115	73,1	3.416.773	72,7

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian RI, 2020 (Update sampai dengan 18 Mei 2020)

Lampiran 40.b
CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Sasaran (Siswa SD/Sederajat)*		Campak (Kelas 1)		DT (Kelas 1)		Td (Kelas 2)	
		Kelas 1	Kelas 2	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	112.055	111.297	31.732	28,32	46.873	41,83	48.150	43,26
2	Sumatera Utara	312.635	314.858	256.573	82,07	274.660	87,85	287.151	91,20
3	Sumatera Barat	108.795	109.109	80.658	74,14	81.298	74,73	86.718	79,48
4	Riau	142.106	140.538	118.802	83,60	124.070	87,31	123.757	88,06
5	Jambi	64.488	64.531	67.886	105,27	68.630	106,42	69.688	107,99
6	Sumatera Selatan	161.981	162.148	163.341	100,84	165.114	101,93	164.349	101,36
7	Bengkulu	36.787	36.766	34.637	94,16	34.679	94,27	35.515	96,60
8	Lampung	161.200	163.088	157.651	97,80	158.943	98,60	160.882	98,65
9	Kepulauan Bangka Belitung	26.490	26.304	28.566	107,84	27.711	104,61	27.363	104,03
10	Kepulauan Riau	44.855	44.372	36.687	81,79	36.269	80,86	37.083	83,57
11	DKI Jakarta	191.164	191.186	154.449	80,79	161.856	84,67	157.658	82,46
12	Jawa Barat	872.748	873.927	815.868	93,48	801.875	91,88	807.181	92,36
13	Jawa Tengah	551.018	558.189	551.343	100,06	539.074	97,83	471.503	84,47
14	DI Yogyakarta	56.472	56.390	49.642	87,91	46.076	81,59	47.362	83,99
15	Jawa Timur	586.732	592.493	594.658	101,35	595.723	101,53	613.882	103,61
16	Banten	251.192	251.536	225.161	89,64	226.490	90,17	226.720	90,13
17	Bali	65.936	66.127	69.552	105,48	69.578	105,52	71.292	107,81
18	Nusa Tenggara Barat	100.427	100.634	98.705	98,29	98.213	97,80	99.906	99,28
19	Nusa Tenggara Timur	122.297	121.430	114.467	93,60	121.049	98,98	117.039	96,38
20	Kalimantan Barat	99.583	99.630	97.260	97,67	98.194	98,61	95.951	96,31
21	Kalimantan Tengah	49.272	48.878	51.787	105,10	52.987	107,54	50.426	103,17
22	Kalimantan Selatan	82.982	83.646	70.688	85,18	71.349	85,98	71.246	85,18
23	Kalimantan Timur	67.874	67.425	69.503	102,40	70.838	104,37	69.682	103,35
24	Kalimantan Utara	15.009	14.909	12.293	81,90	12.124	80,78	12.303	82,52
25	Sulawesi Utara	42.585	42.976	36.714	86,21	37.813	88,79	36.062	83,91
26	Sulawesi Tengah	59.375	59.365	37.965	63,94	40.428	68,09	41.517	69,94
27	Sulawesi Selatan	166.852	167.111	151.545	90,83	152.434	91,36	156.310	93,54
28	Sulawesi Tenggara	58.378	57.912	50.224	86,03	50.127	85,87	48.368	83,52
29	Gorontalo	21.860	21.701	19.172	87,70	18.372	84,04	17.764	81,86
30	Sulawesi Barat	28.516	28.145	25.929	90,93	25.543	89,57	25.762	91,53
31	Maluku	39.376	39.047	33.966	86,26	33.653	85,47	31.423	80,47
32	Maluku Utara	111.067	27.282	21.703	19,54	20.945	18,86	22.035	80,77
33	Papua Barat	18.877	18.632	13.944	73,87	13.435	71,17	12.856	69,00
34	Papua	64.739	64.118	33.661	51,99	33.239	51,34	32.473	50,65
Indonesia		4.895.723	4.825.700	4.376.732	89,40	4.409.662	90,07	4.377.377	90,71

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020 (Update sampai dengan 18 Mei 2020)

Catatan :

Dengan berlakunya PMK No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, maka pemberian imunisasi pada BIAS dilakukan pada kelas 1, 2 dan 5 SD. Pada tahun 2017-2018, pemberian imunisasi pada BIAS hanya dilakukan pada kelas 1 dan 2 saja, dan kelas 5 SD akan dilakukan mulai tahun 2019.

Lampiran 41

**CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019**

No	Kecamatan	Bayi 6-11 Bulan			Anak Balita (12-59 Bulan)			Balita (6-59 Bulan)		
		Jumlah	Mendapat Vit A		Jumlah	Mendapat Vit A		Jumlah	Mendapat Vit A	
			S	%		S	%		S	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	100.708	96.541	95,9	295.080	280.146	94,9	395.788	376.687	95,2
2	Sumatera Utara	168.082	153.218	91,2	211.803	193.746	91,5	379.885	346.964	91,3
3	Sumatera Barat	104.203	91.191	87,5	363.978	317.827	87,3	468.181	409.018	87,4
4	Riau	154.834	134.865	87,1	603.347	488.644	81,0	758.181	623.509	82,2
5	Jambi	73.937	69.756	94,3	243.500	225.678	92,7	317.437	295.434	93,1
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	754.305	645.364	85,6
7	Bengkulu	37.886	35.237	93,0	105.205	96.620	91,8	143.091	131.857	92,1
8	Lampung	254.703	237.260	93,2	636.215	601.302	94,5	890.918	838.562	94,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.082	24.376	86,8	95.140	83.165	87,4	123.222	107.541	87,3
10	Kepulauan Riau	42.939	37.537	87,4	189.961	146.832	77,3	232.900	184.369	79,2
11	DKI Jakarta	118.322	107.102	90,5	365.886	338.964	92,6	484.208	446.066	92,1
12	Jawa Barat	897.612	605.914	67,5	3.304.121	1.642.202	49,7	4.201.733	2.248.116	53,5
13	Jawa Tengah	256.839	251.533	97,9	1.752.286	1.746.496	99,7	2.009.125	1.998.029	99,4
14	DI Yogyakarta	44.518	44.514	100,0	163.060	163.055	100,0	207.578	207.569	100,0
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	2.817.658	1.998.231	70,9
16	Banten	252.627	232.096	91,9	953.545	812.111	85,2	1.206.171	1.044.206	86,6
17	Bali	47.747	47.513	99,5	184.546	183.224	99,3	232.293	230.737	99,3
18	Nusa Tenggara Barat	112.437	111.278	99,0	376.598	367.488	97,6	489.035	478.766	97,9
19	Nusa Tenggara Timur	106.191	98.577	92,8	333.929	311.308	93,2	440.120	409.885	93,1
20	Kalimantan Barat	101.521	85.849	84,6	379.996	309.064	81,3	481.517	394.913	82,0
21	Kalimantan Tengah	58.670	42.840	73,0	176.522	148.203	84,0	235.192	191.043	81,2
22	Kalimantan Selatan	124.209	109.324	88,0	172.197	158.650	92,1	273.226	236.367	86,5
23	Kalimantan Timur	73.355	59.992	81,8	300.636	215.895	71,8	373.991	275.887	73,8
24	Kalimantan Utara	14.447	9.994	69,2	53.896	31.168	57,8	68.343	41.162	60,2
25	Sulawesi Utara	38.973	36.989	94,9	117.055	108.783	92,9	156.028	145.772	93,4
26	Sulawesi Tengah	48.063	42.319	88,0	176.786	162.364	91,8	224.849	204.683	91,0
27	Sulawesi Selatan	203.513	189.265	93,0	567.122	518.193	91,4	770.635	707.458	91,8
28	Sulawesi Tenggara	50.684	42.996	84,8	179.417	149.091	83,1	230.101	192.087	83,5
29	Gorontalo	18.869	17.916	94,9	68.445	61.966	90,5	87.314	79.882	91,5
30	Sulawesi Barat	27.624	23.435	84,8	92.965	77.333	83,2	120.589	100.768	83,6
31	Maluku	22.343	17.346	77,6	135.545	104.105	76,8	157.888	121.451	76,9
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua	136.586	40.194	29,4	266.960	88.828	33,3	403.546	129.022	32,0
Indonesia		3.720.522	3.096.966	83,2	12.865.742	10.132.451	78,8	20.135.047	15.841.404	78,7

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2020

Keterangan: Pelaporan pemberian vitamin A dilakukan pada Februari dan Agustus, maka perhitungan bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A dalam setahun dihitung dengan mengakumulasi bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A di bulan Februari dan yang mendapat vitamin A di bulan Agustus.

Untuk perhitungan anak balita 12-59 bulan yang mendapat vitamin A menggunakan data bulan Agustus.

Lampiran 43

JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI

TAHUN 2019

No	Provinsi	2018			2019		
		Jumlah Sasaran Balita (S)	Ditimbang		Jumlah Sasaran Balita (S)	Ditimbang	
			Jumlah (D)	% (D/S)		Jumlah (D)	% (D/S)
		L+P	L+P	L+P	L+P	L+P	L+P
(1)	(2)	(5)	(8)	(11)	(5)	(8)	(11)
1	Aceh	446.179	368.203	82,52	438.922	355.768	81,1
2	Sumatera Utara	2.543.829	2.006.023	78,86	429.601	415.398	96,7
3	Sumatera Barat	456.285	366.296	80,28	429.064	349.559	81,5
4	Riau	737.112	444.016	60,24	-	-	-
5	Jambi	92.224	67.058	72,71	-	-	-
6	Sumatera Selatan	932.567	563.856	60,46	785.415	603.637	76,9
7	Bengkulu	182.262	111.426	61,14	138.764	105.465	76,0
8	Lampung	761.172	605.508	79,55	677.602	540.927	79,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	123.352	83.208	67,46	119.761	82.669	69,0
10	Kepulauan Riau	207.465	123.148	59,36	359.111	209.011	58,2
11	DKI Jakarta	503.777	374.605	74,36	474.982	390.606	82,2
12	Jawa Barat	5.287.839	2.737.760	51,77	4.326.811	3.451.352	79,8
13	Jawa Tengah	2.523.131	2.083.387	82,57	-	-	-
14	DI Yogyakarta	199.708	161.478	80,86	195.540	158.391	81,0
15	Jawa Timur	2.870.423	2.273.426	79,2	2.817.658	2.189.488	77,7
16	Banten	879.907	662.045	75,24	1.112.622	814.213	73,2
17	Bali	222.703	188.648	84,71	227.010	185.575	81,7
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	435.676	345.857	79,38	443.879	356.770	80,4
20	Kalimantan Barat	354.041	190.925	53,93	412.415	364.567	88,4
21	Kalimantan Tengah	199.472	64.841	32,51	2.329.225	1.288.705	55,3
22	Kalimantan Selatan	399.384	252.007	63,1	379.741	247.220	65,1
23	Kalimantan Timur	349.792	173.265	49,53	278.872	157.452	56,5
24	Kalimantan Utara	65.537	33.477	51,08	60.457	26.951	44,6
25	Sulawesi Utara	165.718	132.380	79,88	155.361	123.732	79,6
26	Sulawesi Tengah	100.938	79.729	78,99	209.307	147.996	70,7
27	Sulawesi Selatan	1.000.492	560.696	56,04	660.889	493.280	74,6
28	Sulawesi Tenggara	267.570	185.841	69,46	237.130	180.615	76,2
29	Gorontalo	87.138	53.860	61,81	103.664	75.601	72,9
30	Sulawesi Barat	116.064	91.601	78,92	112.509	85.654	76,1
31	Maluku	0	0	-	196.422	123.743	63,0
32	Maluku Utara	105.197	78.396	74,52	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	335.253	100.956	30,1
Indonesia		22.616.954	15.462.966	68,37	18.447.987	13.625.298	73,86

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2020

Lampiran 44.a

PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/U
MENURUT PROVINSI TAHUN 2018

No	Provinsi	2018			
		Gizi Buruk	Gizi Kurang	Gizi Baik	Gizi Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	6,30	14,40	76,30	3,00
2	Sumatera Utara	5,80	12,90	76,50	4,90
3	Sumatera Barat	3,90	13,00	82,10	1,00
4	Riau	4,40	11,20	80,70	3,60
5	Jambi	4,90	8,20	81,90	5,10
6	Sumatera Selatan	3,90	8,40	83,60	4,00
7	Bengkulu	2,40	10,40	81,70	5,50
8	Lampung	2,70	10,20	84,70	2,40
9	Kepulauan Bangka Belitung	4,60	12,50	80,30	2,50
10	Kepulauan Riau	2,70	8,80	84,40	4,10
11	DKI Jakarta	1,50	11,70	84,10	2,70
12	Jawa Barat	2,50	8,10	87,20	2,20
13	Jawa Tengah	3,50	11,50	83,00	2,10
14	DI Yogyakarta	1,40	9,90	87,50	1,20
15	Jawa Timur	3,60	11,60	82,20	2,60
16	Banten	3,00	10,60	83,30	3,10
17	Bali	1,60	11,20	85,00	2,10
18	Nusa Tenggara Barat	4,40	14,40	78,80	2,30
19	Nusa Tenggara Timur	6,90	17,60	74,00	1,50
20	Kalimantan Barat	5,20	14,30	77,50	3,00
21	Kalimantan Tengah	4,70	13,80	77,30	4,20
22	Kalimantan Selatan	3,90	14,50	80,30	1,30
23	Kalimantan Timur	3,40	7,40	85,90	3,30
24	Kalimantan Utara	1,70	15,80	80,60	2,00
25	Sulawesi Utara	6,30	10,90	80,00	2,80
26	Sulawesi Tengah	3,80	15,50	79,10	1,60
27	Sulawesi Selatan	4,80	14,80	77,50	2,90
28	Sulawesi Tenggara	6,30	13,20	78,80	1,70
29	Gorontalo	8,10	16,00	71,30	4,70
30	Sulawesi Barat	5,70	14,20	79,50	0,60
31	Maluku	10,30	12,50	74,40	2,80
32	Maluku Utara	6,50	14,40	74,80	4,30
33	Papua Barat	4,10	12,10	80,90	2,90
34	Papua	4,50	11,70	77,70	6,10
Indonesia		3,80	11,40	82,00	2,70

Sumber: Riskesdas 2018

Lampiran 44.b

PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/U
MENURUT PROVINSI TAHUN 2018

No	Provinsi	2018			
		Gizi Buruk	Gizi Kurang	Gizi Baik	Gizi Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	6,70	16,80	73,60	2,90
2	Sumatera Utara	5,40	14,30	76,30	4,00
3	Sumatera Barat	3,50	15,40	79,50	1,60
4	Riau	4,30	14,00	78,10	3,50
5	Jambi	3,80	11,90	80,00	4,20
6	Sumatera Selatan	4,90	12,30	78,60	4,20
7	Bengkulu	2,80	10,40	82,30	4,50
8	Lampung	3,10	12,80	81,20	2,80
9	Kepulauan Bangka Belitung	3,40	13,60	78,70	4,30
10	Kepulauan Riau	3,20	9,80	82,60	4,40
11	DKI Jakarta	2,30	12,00	80,90	4,80
12	Jawa Barat	2,60	10,60	84,30	2,50
13	Jawa Tengah	3,10	13,70	80,60	2,70
14	DI Yogyakarta	2,50	13,00	82,30	2,20
15	Jawa Timur	3,30	13,40	79,80	3,40
16	Banten	3,60	12,60	79,90	3,90
17	Bali	2,00	11,10	83,80	3,10
18	Nusa Tenggara Barat	5,90	20,50	71,50	2,10
19	Nusa Tenggara Timur	7,30	22,20	69,30	1,10
20	Kalimantan Barat	5,20	18,60	73,10	3,00
21	Kalimantan Tengah	5,50	16,30	74,10	4,10
22	Kalimantan Selatan	5,50	19,00	73,00	2,50
23	Kalimantan Timur	3,20	11,50	80,80	4,50
24	Kalimantan Utara	2,40	14,40	80,30	2,90
25	Sulawesi Utara	4,20	11,20	81,60	2,90
26	Sulawesi Tengah	4,80	18,60	74,70	1,80
27	Sulawesi Selatan	4,60	18,40	74,20	2,90
28	Sulawesi Tenggara	5,60	16,40	76,20	1,80
29	Gorontalo	6,80	19,30	69,10	4,70
30	Sulawesi Barat	6,30	18,40	74,10	1,20
31	Maluku	7,40	17,50	72,40	2,70
32	Maluku Utara	5,60	16,60	74,80	3,00
33	Papua Barat	5,10	14,10	77,50	3,20
34	Papua	5,10	11,40	76,00	7,40
Indonesia		3,90	13,80	79,20	3,10

Sumber: Riskesdas 2018

Lampiran 44.c

PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS TB/U
MENURUT PROVINSI TAHUN 2018

No	Provinsi	2018		
		Sangat Pendek	Pendek	Normal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	18,90	19,00	62,10
2	Sumatera Utara	13,60	18,60	67,90
3	Sumatera Barat	10,60	18,20	71,10
4	Riau	9,80	15,00	75,20
5	Jambi	15,70	14,60	69,70
6	Sumatera Selatan	13,70	16,10	70,20
7	Bengkulu	10,40	18,60	71,00
8	Lampung	12,20	15,20	72,60
9	Kepulauan Bangka Belitung	9,50	13,80	76,70
10	Kepulauan Riau	8,60	21,50	69,90
11	DKI Jakarta	7,00	9,20	83,80
12	Jawa Barat	13,20	15,90	70,90
13	Jawa Tengah	13,90	19,40	66,80
14	DI Yogyakarta	8,30	12,20	79,50
15	Jawa Timur	15,20	18,40	66,40
16	Banten	8,70	14,60	76,70
17	Bali	9,20	15,40	75,30
18	Nusa Tenggara Barat	8,10	17,00	74,90
19	Nusa Tenggara Timur	17,40	18,50	64,10
20	Kalimantan Barat	13,10	18,30	68,50
21	Kalimantan Tengah	15,90	18,30	65,90
22	Kalimantan Selatan	13,30	18,20	68,50
23	Kalimantan Timur	11,80	18,20	70,00
24	Kalimantan Utara	8,70	22,10	69,20
25	Sulawesi Utara	11,90	14,70	73,40
26	Sulawesi Tengah	11,70	16,10	72,20
27	Sulawesi Selatan	13,30	20,60	66,20
28	Sulawesi Tenggara	10,30	16,00	73,60
29	Gorontalo	13,10	15,40	71,60
30	Sulawesi Barat	12,60	24,50	62,90
31	Maluku	14,10	17,80	68,10
32	Maluku Utara	12,30	19,60	68,10
33	Papua Barat	12,50	17,70	69,70
34	Papua	15,10	18,90	66,00
Indonesia		12,80	17,10	70,10

Sumber: Riskesdas 2018

Lampiran 44.d

PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS TB/U
MENURUT PROVINSI TAHUN 2018

No	Provinsi	2018		
		Sangat Pendek	Pendek	Normal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	16,00	21,10	62,90
2	Sumatera Utara	13,20	19,20	67,60
3	Sumatera Barat	9,60	20,30	70,10
4	Riau	10,30	17,10	72,60
5	Jambi	13,40	16,80	69,90
6	Sumatera Selatan	14,40	17,20	68,30
7	Bengkulu	9,80	18,20	72,00
8	Lampung	9,60	17,70	72,70
9	Kepulauan Bangka Belitung	7,30	16,10	76,60
10	Kepulauan Riau	8,50	15,10	76,40
11	DKI Jakarta	6,10	11,50	82,40
12	Jawa Barat	11,70	19,40	68,90
13	Jawa Tengah	11,20	20,10	68,80
14	DI Yogyakarta	6,30	15,10	78,60
15	Jawa Timur	12,90	19,90	67,20
16	Banten	9,60	17,00	73,40
17	Bali	5,60	16,30	78,20
18	Nusa Tenggara Barat	9,20	24,30	66,50
19	Nusa Tenggara Timur	16,00	26,70	57,40
20	Kalimantan Barat	11,40	21,90	66,70
21	Kalimantan Tengah	12,70	21,30	66,00
22	Kalimantan Selatan	12,00	21,10	66,90
23	Kalimantan Timur	10,20	19,00	70,80
24	Kalimantan Utara	6,80	20,10	73,10
25	Sulawesi Utara	9,80	15,70	74,50
26	Sulawesi Tengah	11,90	20,40	67,70
27	Sulawesi Selatan	12,50	23,20	64,30
28	Sulawesi Tenggara	10,10	18,60	71,30
29	Gorontalo	12,70	19,80	67,50
30	Sulawesi Barat	16,20	25,40	58,40
31	Maluku	12,50	21,50	66,00
32	Maluku Utara	11,00	20,40	68,60
33	Papua Barat	11,70	16,10	72,30
34	Papua	15,30	17,80	66,90
Indonesia		11,50	19,30	69,20

Sumber: Riskesdas 2018

Lampiran 44.e

PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/TB
MENURUT PROVINSI TAHUN 2018

No	Provinsi	2018			
		Sangat Kurus	Kurus	Normal	Gemuk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	6,70	7,80	74,20	11,30
2	Sumatera Utara	6,30	8,30	74,70	10,70
3	Sumatera Barat	4,90	9,70	79,90	5,50
4	Riau	5,40	10,40	76,70	7,60
5	Jambi	7,20	7,00	73,60	12,20
6	Sumatera Selatan	5,90	5,40	77,50	11,20
7	Bengkulu	3,40	6,30	78,40	12,00
8	Lampung	4,90	6,90	79,30	8,90
9	Kepulauan Bangka Belitung	3,40	8,40	82,30	6,00
10	Kepulauan Riau	3,40	5,70	82,00	8,80
11	DKI Jakarta	4,50	8,10	81,20	6,20
12	Jawa Barat	4,00	5,40	80,80	9,80
13	Jawa Tengah	3,50	6,10	80,20	10,20
14	DI Yogyakarta	0,70	7,40	88,30	3,60
15	Jawa Timur	3,60	7,10	78,60	10,60
16	Banten	7,20	6,30	79,10	7,40
17	Bali	2,40	4,60	84,70	8,30
18	Nusa Tenggara Barat	4,60	10,30	80,60	4,50
19	Nusa Tenggara Timur	6,60	8,20	79,90	5,20
20	Kalimantan Barat	4,90	11,90	75,10	8,10
21	Kalimantan Tengah	4,20	8,60	76,50	10,70
22	Kalimantan Selatan	3,40	8,70	80,60	7,30
23	Kalimantan Timur	3,70	5,10	82,30	9,00
24	Kalimantan Utara	1,30	3,50	89,50	5,70
25	Sulawesi Utara	4,10	8,00	78,90	9,00
26	Sulawesi Tengah	4,00	10,50	80,80	4,70
27	Sulawesi Selatan	4,00	8,30	79,20	8,50
28	Sulawesi Tenggara	5,40	8,50	79,00	7,20
29	Gorontalo	5,30	10,30	78,70	5,70
30	Sulawesi Barat	3,70	8,60	82,50	5,20
31	Maluku	6,30	11,10	77,10	5,50
32	Maluku Utara	3,90	10,20	78,10	7,70
33	Papua Barat	5,90	6,00	79,70	8,40
34	Papua	5,00	8,20	71,80	15,00
Indonesia		4,50	7,20	79,20	9,00

Sumber: Riskesdas 2018

Lampiran 44.f

**PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/TB
MENURUT PROVINSI TAHUN 2018**

No	Provinsi	2018			
		Sangat Kurus	Kurus	Normal	Gemuk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	5,00	6,90	79,30	8,80
2	Sumatera Utara	4,60	7,50	79,10	8,90
3	Sumatera Barat	2,90	8,40	83,30	5,40
4	Riau	4,20	8,00	80,00	7,80
5	Jambi	5,70	6,30	77,10	10,80
6	Sumatera Selatan	4,70	6,70	77,80	10,80
7	Bengkulu	3,50	4,80	81,40	10,40
8	Lampung	3,90	6,80	82,20	7,20
9	Kepulauan Bangka Belitung	2,80	7,10	82,20	8,00
10	Kepulauan Riau	4,50	6,70	79,50	9,20
11	DKI Jakarta	3,90	6,20	82,00	7,90
12	Jawa Barat	3,20	5,20	82,90	8,70
13	Jawa Tengah	2,70	5,80	83,90	7,60
14	DI Yogyakarta	1,20	7,20	86,90	4,70
15	Jawa Timur	2,90	6,30	81,60	9,30
16	Banten	4,60	5,90	81,00	8,60
17	Bali	1,90	4,40	85,90	7,90
18	Nusa Tenggara Barat	4,40	10,00	82,30	3,30
19	Nusa Tenggara Timur	4,60	8,20	83,40	3,80
20	Kalimantan Barat	4,00	10,30	77,70	8,00
21	Kalimantan Tengah	4,00	9,90	76,20	9,80
22	Kalimantan Selatan	3,90	9,20	79,70	7,10
23	Kalimantan Timur	2,00	5,50	83,00	9,40
24	Kalimantan Utara	1,10	3,50	87,80	7,60
25	Sulawesi Utara	2,90	6,70	82,80	7,70
26	Sulawesi Tengah	3,70	9,20	83,70	3,50
27	Sulawesi Selatan	2,50	7,50	82,90	7,10
28	Sulawesi Tenggara	3,40	8,50	81,90	6,10
29	Gorontalo	3,80	10,60	80,20	5,40
30	Sulawesi Barat	3,20	7,30	84,00	5,50
31	Maluku	4,00	9,10	81,80	5,00
32	Maluku Utara	4,00	7,90	82,50	5,70
33	Papua Barat	3,90	8,30	80,00	7,80
34	Papua	4,80	5,50	76,50	13,20
Indonesia		3,50	6,70	81,80	8,00

Sumber: Riskesdas 2018

Lampiran 45

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK SD/MI, SMP/MTS, DAN SMA/MA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2019

No	Provinsi	SEKOLAH								
		SD/MI			SMP/MTS			SMA/MA		
		Jumlah	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	Jumlah	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	Jumlah	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	4.038	3.800	94,1	1.393	1.306	93,8	908	791	87,1
2	Sumatera Utara	10.343	9.634	93,1	3.290	3.054	92,8	2.299	2.134	92,8
3	Sumatera Barat	4.318	4.022	93,1	1.247	967	77,5	769	545	70,9
4	Riau	7.447	3.728	50,1	3.478	1.558	44,8	2.641	943	35,7
5	Jambi	2.749	2.697	98,1	1.074	976	90,9	618	549	88,8
6	Sumatera Selatan	5.105	4.975	97,5	1.657	1.608	97,0	993	930	93,7
7	Bengkulu	1.470	1.306	88,8	470	453	96,4	252	239	94,8
8	Lampung	5.449	5.115	93,9	1.971	1.799	91,3	1.153	1.022	88,6
9	Kepulauan Bangka Belitung	861	857	99,5	261	259	99,2	157	157	100,0
10	Kepulauan Riau	1.023	1.021	99,8	428	428	100,0	258	255	98,8
11	DKI Jakarta	2.920	2.890	99,0	1.318	1.267	96,1	1.192	1.060	88,9
12	Jawa Barat	23.407	22.483	96,1	7.747	6.370	82,2	7.158	7.158	100,0
13	Jawa Tengah	22.724	21.712	95,5	4.893	4.519	92,4	2.914	2.620	89,9
14	D I Yogyakarta	2.063	2.063	100,0	520	520	100,0	384	370	96,4
15	Jawa Timur	26.305	25.919	98,5	7.802	7.546	96,7	4.980	4.792	96,2
16	Banten	5.634	5.474	97,2	2.601	2.347	90,2	1.640	1.130	68,9
17	Bali	2.362	2.349	99,4	446	446	100,0	340	339	99,7
18	Nusa Tenggara Barat	4.015	954	23,8	1.739	434	25,0	1.167	434	37,2
19	Nusa Tenggara Timur	5.215	787	15,1	1.704	446	26,2	829	38	4,6
20	Kalimantan Barat	4.773	1.751	36,7	1.577	523	33,2	756	284	37,6
21	Kalimantan Tengah	2.917	2.505	85,9	990	807	81,5	459	390	85,0
22	Kalimantan Selatan	3.508	3.177	90,6	970	797	82,2	477	389	81,6
23	Kalimantan Timur	1.964	1.823	92,8	736	655	89,0	462	413	89,4
24	Kalimantan Utara	503	503	100,0	197	197	100,0	107	107	100,0
25	Sulawesi Utara	2.315	2.059	88,9	782	634	81,1	435	344	79,1
26	Sulawesi Tengah	3.105	2.913	93,8	1.132	969	85,6	556	516	92,8
27	Sulawesi Selatan	7.122	6.874	96,5	2.394	2.123	88,7	1.399	1.094	78,2
28	Sulawesi Tenggara	2.357	1.886	80,0	872	750	86,0	486	480	98,8
29	Gorontalo	1.029	1.007	97,9	314	292	93,0	151	119	78,8
30	Sulawesi Barat	1.481	1.408	95,1	490	462	94,3	294	182	61,9
31	Maluku	1.903	1.198	63,0	758	396	52,2	441	292	66,2
32	Maluku Utara	1.443	1.250	86,6	635	513	80,8	387	330	85,3
33	Papua Barat	1.072	199	18,6	327	40	12,2	190	44	23,2
34	Papua	2.554	855	33,5	682	313	45,9	387	186	48,1
Indonesia		175.494	151.194	86,2	56.895	45.774	80,5	37.639	30.676	81,5

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 48

PELAYANAN SKRINING USIA PRODUKTIF
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Sasaran	Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang Mendapatkan Pelayanan	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	3.493.780	39.315	1,1
2	Sumatera Utara	9.364.527	15.352	0,2
3	Sumatera Barat	3.514.210	1.522.268	43,3
4	Riau	4.647.818	1.047.460	22,5
5	Jambi	2.498.673	811.020	32,5
6	Sumatera Selatan	5.700.320	794.821	13,9
7	Bengkulu	1.361.087	115.460	8,5
8	Lampung	5.677.528	77.668	1,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.026.461	675.450	65,8
10	Kepulauan Riau	1.486.370	883.681	59,5
11	DKI Jakarta	7.459.400	2.391.081	32,1
12	Jawa Barat	33.624.868	9.072.413	27,0
13	Jawa Tengah	23.516.110	514.950	2,2
14	D I Yogyakarta	2.646.038	18.263	0,7
15	Jawa Timur	27.629.783	16.788.152	60,8
16	Banten	8.879.282	40.895	0,5
17	Bali	3.016.219	1.645.530	54,6
18	Nusa Tenggara Barat	3.325.110	103.025	3,1
19	Nusa Tenggara Timur	3.324.958	29.220	0,9
20	Kalimantan Barat	3.380.256	43.587	1,3
21	Kalimantan Tengah	1.887.438	27.239	1,4
22	Kalimantan Selatan	2.869.079	119.940	4,2
23	Kalimantan Timur	2.587.626	9.391	0,4
24	Kalimantan Utara	495.685	167.884	33,9
25	Sulawesi Utara	1.713.748	17.940	1,0
26	Sulawesi Tengah	2.038.940	12.855	0,6
27	Sulawesi Selatan	5.840.507	1.250.365	21,4
28	Sulawesi Tenggara	1.706.475	244.423	14,3
29	Gorontalo	814.606	284.735	35,0
30	Sulawesi Barat	895.455	33.500	3,7
31	Maluku	1.138.851	4.536	0,4
32	Maluku Utara	801.866	29.577	3,7
33	Papua Barat	650.276	2.724	0,4
34	Papua	2.341.572	810	0,0
Indonesia		181.354.922	38.835.530	21,4

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 49

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT
MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Usia Lanjut (60 Tahun+)		
		Jumlah	Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	376.504	tad	0,0
2	Sumatera Utara	1.159.762	592.702	51,1
3	Sumatera Barat	533.528	392.711	73,6
4	Riau	402.731	168.477	41,8
5	Jambi	278.298	195.493	70,2
6	Sumatera Selatan	681.660	336.492	49,4
7	Bengkulu	149.832	84.525	56,4
8	Lampung	755.480	509.531	67,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	116.070	90.735	78,2
10	Kepulauan Riau	104.395	74.477	71,3
11	DKI Jakarta	842.832	670.722	79,6
12	Jawa Barat	4.599.478	2.697.384	58,6
13	Jawa Tengah	4.679.233	3.010.529	64,3
14	DI Yogyakarta	552.231	311.901	56,5
15	Jawa Timur	5.183.447	3.931.116	75,8
16	Banten	822.917	509.138	61,9
17	Bali	486.762	442.124	90,8
18	Nusa Tenggara Barat	429.738	239.105	55,6
19	Nusa Tenggara Timur	435.809	tad	0,0
20	Kalimantan Barat	398.948	244.561	61,3
21	Kalimantan Tengah	164.034	63.928	39,0
22	Kalimantan Selatan	321.633	151.897	47,2
23	Kalimantan Timur	239.166	96.475	40,3
24	Kalimantan Utara	49.361	29.068	58,9
25	Sulawesi Utara	280.162	227.303	81,1
26	Sulawesi Tengah	249.592	142.124	56,9
27	Sulawesi Selatan	849.960	511.220	60,1
28	Sulawesi Tenggara	545.806	55.430	10,2
29	Gorontalo	97.290	65.409	67,2
30	Sulawesi Barat	92.180	58.536	63,5
31	Maluku	130.122	63.460	48,8
32	Maluku Utara	79.987	78.015	97,5
33	Papua Barat	45.726	11.422	25,0
34	Papua	124.091	31.177	25,1
Indonesia		26.258.765	16.087.187	61,3

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2019

Lampiran 50

**PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Puskesmas									
			Melaksanakan Orientasi P4K		Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Remaja		Melaksanakan Penjangkaran Kesehatan Kelas 1		Melaksanakan Penjangkaran Kesehatan Kelas 7 Dan 10		Melaksanakan Penjangkaran Kesehatan Kelas 1. 7. 10	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Aceh	359	310	86,35	167	46,52	332	92,48	317	88,3	306	85,24
2	Sumatera Utara	601	586	97,5	348	57,9	573	95,34	566	94,18	566	94,18
3	Sumatera Barat	275	271	98,55	247	89,82	257	93,45	255	92,73	248	90,18
4	Riau	226	222	98,23	222	98,23	308	136,28	302	133,63	303	134,07
5	Jambi	204	204	100	193	94,61	204	100	204	100	204	100
6	Sumatera Selatan	342	340	99,42	242	70,76	300	87,72	290	84,8	280	81,87
7	Bengkulu	180	178	98,89	145	80,56	166	92,22	161	89,44	160	88,89
8	Lampung	310	310	100	289	93,23	309	99,68	306	98,71	303	97,74
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	64	100	64	100	64	100	64	100	64	100
10	Kepulauan Riau	86	71	82,56	61	70,93	84	97,67	83	96,51	83	96,51
11	DKI Jakarta	315	315	100	206	65,4	315	100	315	100	315	100
12	Jawa Barat	1.072	1.033	96,36	670	62,5	1.065	99,35	1.035	96,55	1.035	96,55
13	Jawa Tengah	878	846	96,36	720	82	868	98,86	868	98,86	868	98,86
14	DI Yogyakarta	121	121	100	84	69,42	121	100	112	92,56	97	80,17
15	Jawa Timur	968	947	97,83	553	57,13	939	97	936	96,69	927	95,76
16	Banten	243	242	99,59	176	72,43	239	98,35	186	76,54	174	71,6
17	Bali	120	120	100	120	100	120	100	120	100	120	100
18	Nusa Tenggara Barat	169	169	100	169	100	169	100	169	100	169	100
19	Nusa Tenggara Timur	402	411	102,24	293	72,89	411	102,24	411	102,24	387	96,27
20	Kalimantan Barat	246	233	94,72	147	59,76	191	77,64	193	78,46	190	77,24
21	Kalimantan Tengah	203	201	99,01	108	53,2	178	87,68	177	87,19	177	87,19
22	Kalimantan Selatan	235	222	94,47	133	56,6	217	92,34	173	73,62	173	73,62
23	Kalimantan Timur	186	184	98,92	166	89,25	133	71,51	93	50	88	47,31
24	Kalimantan Utara	56	53	94,64	48	85,71	55	98,21	55	98,21	55	98,21
25	Sulawesi Utara	195	193	98,97	121	62,05	165	84,62	152	77,95	149	76,41
26	Sulawesi Tengah	206	171	83,01	64	31,07	182	88,35	174	84,47	174	84,47
27	Sulawesi Selatan	458	442	96,51	253	55,24	449	98,03	414	90,39	397	86,68
28	Sulawesi Tenggara	290	290	100	107	36,9	254	87,59	249	85,86	244	84,14
29	Gorontalo	93	67	72,04	64	68,82	93	100	93	100	93	100
30	Sulawesi Barat	95	94	98,95	57	60	84	88,42	84	88,42	84	88,42
31	Maluku	209	176	84,21	125	59,81	198	94,74	170	81,34	162	77,51
32	Maluku Utara	148	143	96,62	77	52,03	139	93,92	141	95,27	141	95,27
33	Papua Barat	159	25	15,72	61	38,36	42	26,42	34	21,38	37	23,27
34	Papua	420	218	51,9	138	32,86	175	41,67	139	33,1	121	28,81
Indonesia		10.134	9.472	93,47	6.638	65,50	9.399	92,75	9.041	89,21	8894	87,8

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2019

Lampiran 51.a

**JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS ANAK, CASE NOTIFICATION RATE (CNR) PER 100.000 PENDUDUK
DAN CASE DETECTION RATE (CDR) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Perkiraan Jumlah Terduga Tuberkulosis	Perkiraan Jumlah Terduga Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	% Orang Terduga Tuberkulosis (TBC) Mendapatkan Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis					Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus Tuberkulosis Per 100.000 Penduduk	Perkiraan Insiden Tuberkulosis (Dalam Absolut) *	Case Detection Rate (CDR%)	Kasus Tuberkulosis Anak 0-14 Tahun	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis Anak (%)
						Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan					
						Jumlah	%	Jumlah	%						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Aceh	5.371.532	58.758	32.650	55,6	5.489	65,4	2.907	34,6	8.396	156	20.125	41,7	232	9,6
2	Sumatera Utara	14.562.549	203.271	69.591	34,2	19.457	65,0	10.483	35,0	29.940	206	62.745	47,7	1.889	25,1
3	Sumatera Barat	5.441.197	80.579	60.137	74,6	6.808	61,7	4.218	38,3	11.026	203	22.944	48,1	1.726	62,7
4	Riau	6.971.745	99.465	35.824	36,0	6.763	62,9	3.997	37,1	10.760	154	27.601	39,0	1.106	33,4
5	Jambi	3.624.579	26.554	14.737	55,5	3.011	60,3	1.986	39,7	4.997	138	13.665	36,6	590	36,0
6	Sumatera Selatan	8.470.683	143.249	61.945	43,2	11.994	60,8	7.729	39,2	19.723	233	33.733	58,5	1.956	48,3
7	Bengkulu	1.991.838	20.895	14.792	70,8	1.995	61,0	1.273	39,0	3.268	164	7.750	42,2	449	48,3
8	Lampung	8.447.737	84.018	73.279	87,2	9.195	57,4	6.811	42,6	16.006	189	29.473	54,3	1.655	46,8
9	Kep. Bangka Belitung	1.488.792	15.574	14.023	90,0	1.365	63,0	803	37,0	2.168	146	5.916	36,6	274	38,6
10	Kepulauan Riau	2.189.653	37.213	19.023	51,1	3.268	60,0	2.181	40,0	5.449	249	10.827	50,3	618	47,6
11	DKI Jakarta	10.557.810	230.243	110.754	48,1	23.664	57,1	17.780	42,9	41.444	393	47.375	87,5	5.401	95,0
12	Jawa Barat	49.316.712	621.621	248.511	40,0	67.040	54,5	55.981	45,5	123.021	249	127.906	96,2	20.914	136,3
13	Jawa Tengah	34.718.204	385.101	195.536	50,8	30.326	55,5	24.314	44,5	54.640	157	82.978	65,8	7.062	70,9
14	DI Yogyakarta	3.842.932	30.638	23.458	76,6	2.351	56,7	1.793	43,3	4.144	108	9.064	45,7	686	63,1
15	Jawa Timur	39.698.631	432.201	306.642	70,9	36.229	55,4	29.219	44,6	65.448	165	95.811	68,3	5.239	45,6
16	Banten	12.927.316	142.395	74.278	52,2	16.617	57,7	12.195	42,3	28.812	223	33.058	87,2	3.123	78,7
17	Bali	4.336.923	29.537	19.784	67,0	2.489	59,1	1.721	40,9	4.210	97	12.391	34,0	245	16,5
18	Nusa Tenggara Barat	5.070.385	51.965	17.972	34,6	4.450	61,2	2.820	38,8	7.270	143	17.715	41,0	494	23,2
19	Nusa Tenggara Timur	5.456.203	59.685	41.514	69,6	4.267	56,6	3.275	43,4	7.542	138	18.833	40,0	444	19,6
20	Kalimantan Barat	5.069.127	47.478	20.973	44,2	5.982	64,1	3.352	35,9	9.334	184	17.212	54,2	1.131	54,8
21	Kalimantan Tengah	2.714.859	30.410	12.825	42,2	2.372	61,9	1.461	38,1	3.833	141	9.369	40,9	286	25,4
22	Kalimantan Selatan	4.244.096	58.659	32.307	55,1	4.180	60,5	2.724	39,5	6.904	163	15.069	45,8	750	41,5
23	Kalimantan Timur	3.721.389	57.878	38.427	66,4	4.462	57,7	3.268	42,3	7.730	208	14.442	53,5	964	55,6
24	Kalimantan Utara	742.245	13.455	7.225	53,7	1.097	61,6	684	38,4	1.781	240	2.768	64,3	332	99,9
25	Sulawesi Utara	2.506.981	45.412	32.288	71,1	5.245	63,7	2.988	36,3	8.233	328	9.521	86,5	180	15,8
26	Sulawesi Tengah	3.054.023	44.122	41.708	94,5	3.572	62,2	2.175	37,8	5.747	188	10.207	56,3	214	17,5
27	Sulawesi Selatan	8.851.240	146.856	39.927	27,2	11.495	58,7	8.073	41,3	19.568	221	30.985	63,2	1.102	29,6
28	Sulawesi Tenggara	2.704.737	30.720	27.832	90,6	2.650	61,6	1.655	38,4	4.305	159	8.992	47,9	141	13,1
29	Gorontalo	1.202.631	17.255	6.034	35,0	2.336	57,4	1.731	42,6	4.067	338	4.301	94,6	173	33,5
30	Sulawesi Barat	1.380.256	17.329	14.648	84,5	1.599	57,5	1.184	42,5	2.783	202	4.440	62,7	107	20,1
31	Maluku	1.802.870	31.974	12.601	39,4	2.528	57,8	1.846	42,2	4.374	243	6.579	66,5	346	43,8
32	Maluku Utara	1.255.771	14.871	5.581	37,5	1.299	59,0	904	41,0	2.203	175	4.188	52,6	117	23,3
33	Papua Barat	959.617	14.823	6.809	45,9	1.538	55,8	1.219	44,2	2.757	287	6.509	42,4	304	38,9
34	Papua	3.379.302	89.947	35.814	39,8	6.509	54,3	5.482	45,7	11.991	355	18.508	64,8	2.861	128,8
Indonesia		268.074.565	3.414.150	1.769.449	51,8	313.642	57,7	230.232	42,3	543.874	203	843.000	64,5	63.111	62,4

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI

*) Berdasarkan Modeling Tahun 2018.

Keterangan:

Data terduga Tuberkulosis tabel berdasarkan data individu, saat ini masih ada data individu dan agregat, untuk Jambi dan Sumatera Selatan menggunakan data agregat sehingga NA
Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll

Lampiran 51.b

**JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS SEMUA TIPE
MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2019**

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																		
		0 - 14		15 - 24		25 - 34		35 - 44		45 - 54		55 - 64		≥ 65		Tidak diketahui*		Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Aceh	126	125	557	404	771	448	911	469	1.172	588	1.148	500	804	373	-	-	5.489	2.907	8.396
2	Sumatera Utara	1.107	872	2.299	2.062	3.011	1.749	3.382	1.512	3.901	1.803	3.649	1.580	2.033	864	75	41	19.457	10.483	29.940
3	Sumatera Barat	923	803	744	737	953	615	977	570	1.107	583	1.137	527	967	383	-	-	6.808	4.218	11.026
4	Riau	601	517	786	685	1.085	750	1.254	640	1.294	618	1.080	524	663	263	-	-	6.763	3.997	10.760
5	Jambi	312	285	372	337	427	341	519	310	517	322	496	253	365	138	3	-	3.011	1.986	4.997
6	Sumatera Selatan	1.100	955	1.205	1.025	1.712	1.260	1.839	1.258	2.101	1.270	2.306	1.181	1.730	780	1	-	11.994	7.729	19.723
7	Bengkulu	280	187	179	192	280	195	311	203	351	193	339	184	255	119	-	-	1.995	1.273	3.268
8	Lampung	918	739	834	994	1.263	1.194	1.434	1.165	1.739	1.155	1.678	925	1.329	639	-	-	9.195	6.811	16.006
9	Kep. Bangka Belitung	155	130	163	114	209	161	234	132	235	112	224	93	145	61	-	-	1.365	803	2.168
10	Kepulauan Riau	329	291	444	491	673	536	693	414	571	244	347	127	210	77	1	1	3.268	2.181	5.449
11	DKI Jakarta	2.873	2.691	3.550	3.552	4.242	3.079	4.000	2.774	3.823	2.554	3.183	2.010	1.993	1.120	-	-	23.664	17.780	41.444
12	Jawa Barat	11.159	10.457	9.851	11.878	10.542	8.930	9.695	7.972	10.045	7.326	8.660	5.563	6.346	3.217	742	638	67.040	55.981	123.021
13	Jawa Tengah	3.749	3.338	3.361	4.333	4.098	3.588	4.269	3.539	5.056	3.838	5.363	3.415	4.430	2.263	-	-	30.326	24.314	54.640
14	DI Yogyakarta	390	337	356	351	291	261	263	233	347	229	324	196	380	186	-	-	2.351	1.793	4.144
15	Jawa Timur	2.813	2.531	4.390	5.352	4.462	4.416	5.148	4.570	6.935	5.247	6.995	4.469	5.435	2.600	51	34	36.229	29.219	65.448
16	Banten	1.595	1.444	2.414	2.427	3.141	2.290	2.915	1.929	2.805	1.892	2.189	1.380	1.392	685	166	148	16.617	12.195	28.812
17	Bali	131	113	309	297	418	349	414	307	482	304	362	207	369	143	4	1	2.489	1.721	4.210
18	Nusa Tenggara Barat	243	251	478	437	685	481	756	460	869	555	784	411	635	225	-	-	4.450	2.820	7.270
19	Nusa Tenggara Timur	214	248	628	596	800	641	655	490	648	482	664	439	658	379	-	-	4.267	3.275	7.542
20	Kalimantan Barat	674	568	736	537	970	531	987	539	1.066	505	916	436	633	236	-	-	5.982	3.352	9.334
21	Kalimantan Tengah	132	157	208	194	393	250	456	282	502	262	399	197	282	119	-	-	2.372	1.461	3.833
22	Kalimantan Selatan	431	324	439	367	564	388	690	477	828	507	735	426	493	235	-	-	4.180	2.724	6.904
23	Kalimantan Timur	542	493	541	614	774	659	796	533	733	456	670	331	406	182	-	-	4.462	3.268	7.730
24	Kalimantan Utara	189	173	100	108	145	101	157	98	209	96	167	66	130	42	-	-	1.097	684	1.781
25	Sulawesi Utara	112	92	600	471	731	451	906	466	1.092	581	980	521	813	404	11	2	5.245	2.988	8.233
26	Sulawesi Tengah	116	98	398	404	612	382	648	361	685	392	618	329	495	209	-	-	3.572	2.175	5.747
27	Sulawesi Selatan	567	540	1.471	1.417	1.786	1.285	1.854	1.204	2.266	1.571	1.925	1.212	1.622	843	4	1	11.495	8.073	19.568
28	Sulawesi Tenggara	75	71	355	311	403	311	499	254	499	320	506	242	313	146	-	-	2.650	1.655	4.305
29	Gorontalo	89	89	354	305	343	221	394	293	467	345	393	313	296	165	-	-	2.336	1.731	4.067
30	Sulawesi Barat	62	46	243	238	252	200	279	186	308	237	229	158	226	119	-	-	1.599	1.184	2.783
31	Maluku	201	212	465	353	462	347	441	305	406	274	345	205	208	150	-	-	2.528	1.846	4.374
32	Maluku Utara	63	60	202	221	213	173	264	150	213	126	195	81	149	93	-	-	1.299	904	2.203
33	Papua Barat	181	151	333	328	357	282	274	202	177	133	127	89	89	34	-	-	1.538	1.219	2.757
34	Papua	1.554	1.446	1.627	1.419	1.317	1.187	825	697	648	380	375	249	163	104	-	-	6.509	5.482	11.991
Indonesia		34.006	30.834	40.992	43.551	48.385	38.052	49.139	34.994	54.097	35.500	49.508	28.839	36.457	17.596	1.058	866	313.642	230.232	543.874
		11,92%		15,54%		15,89%		15,47%		16,47%		14,41%		9,94%		0,35%		100%		

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI
Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan
*: Data berdasarkan hasil penapisiran kasus SIM RS Mopping up

Lampiran 51.c

JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS
MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																		
		0 - 14		15 - 24		25 - 34		35 - 44		45 - 54		55 - 64		≥ 65		Tidak diketahui*		Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Aceh	14	19	290	180	406	239	467	236	580	306	553	235	356	140	-	-	2.666	1.355	4.021
2	Sumatera Utara	160	124	1.200	973	1.705	914	2.023	843	2.273	1.040	1.989	832	971	414	75	41	10.396	5.181	15.577
3	Sumatera Barat	43	52	490	449	661	370	680	378	794	394	790	353	612	234	-	-	4.070	2.230	6.300
4	Riau	45	59	406	322	634	366	787	354	836	352	650	304	353	119	-	-	3.711	1.876	5.587
5	Jambi	53	51	272	224	325	238	398	233	419	250	383	194	265	101	-	-	2.115	1.291	3.406
6	Sumatera Selatan	184	152	706	537	991	715	1.150	733	1.227	736	1.242	598	805	340	1	-	6.306	3.811	10.117
7	Bengkulu	12	9	100	89	156	92	191	121	207	121	208	99	147	60	-	-	1.021	591	1.612
8	Lampung	76	78	521	604	844	723	998	695	1.141	747	1.112	602	855	383	-	-	5.547	3.832	9.379
9	Kep. Bangka Belitung	5	2	97	68	145	109	155	93	172	85	158	57	92	35	-	-	824	449	1.273
10	Kepulauan Riau	23	13	240	268	383	260	413	212	354	142	214	78	127	44	-	-	1.754	1.017	2.771
11	DKI Jakarta	165	177	1.878	1.669	2.279	1.324	2.264	1.325	2.198	1.290	1.634	929	756	398	-	-	11.174	7.112	18.286
12	Jawa Barat	451	585	4.695	5.106	5.269	3.667	4.994	3.491	5.100	3.353	4.048	2.303	2.579	1.143	111	154	27.247	19.802	47.049
13	Jawa Tengah	108	147	1.769	2.288	2.351	1.986	2.587	1.913	2.974	2.082	2.960	1.636	1.977	848	-	-	14.726	10.900	25.626
14	DI Yogyakarta	16	22	184	153	144	135	158	113	204	116	177	88	171	66	-	-	1.054	693	1.747
15	Jawa Timur	142	197	2.197	2.471	2.491	2.097	3.143	2.521	4.254	3.074	4.056	2.357	2.713	1.167	-	-	18.996	13.884	32.880
16	Banten	100	81	1.061	990	1.546	928	1.449	872	1.369	848	956	556	551	237	21	25	7.053	4.537	11.590
17	Bali	7	4	165	162	228	177	245	166	306	170	230	120	232	77	4	1	1.417	877	2.294
18	Nusa Tenggara Barat	20	38	290	232	457	289	512	293	606	413	559	288	416	147	-	-	2.860	1.700	4.560
19	Nusa Tenggara Timur	22	35	324	307	448	356	357	273	360	232	305	191	283	140	-	-	2.099	1.534	3.633
20	Kalimantan Barat	91	61	446	325	652	337	695	362	742	343	599	279	362	134	-	-	3.587	1.841	5.428
21	Kalimantan Tengah	7	8	117	88	228	134	248	163	267	140	223	94	156	53	-	-	1.246	680	1.926
22	Kalimantan Selatan	21	16	214	172	282	174	403	248	432	287	347	181	189	87	-	-	1.888	1.165	3.053
23	Kalimantan Timur	35	30	259	253	371	281	407	274	442	270	370	185	209	73	-	-	2.093	1.366	3.459
24	Kalimantan Utara	6	4	62	82	99	66	115	57	152	74	123	43	95	25	-	-	652	351	1.003
25	Sulawesi Utara	36	34	395	321	518	321	641	324	779	415	664	358	510	265	-	-	3.543	2.038	5.581
26	Sulawesi Tengah	18	23	227	254	388	264	445	247	434	231	377	196	270	99	-	-	2.159	1.314	3.473
27	Sulawesi Selatan	31	36	856	777	1.167	824	1.247	794	1.456	1.011	1.208	697	921	422	-	-	6.886	4.561	11.447
28	Sulawesi Tenggara	8	16	245	207	264	207	378	191	353	218	335	171	192	103	-	-	1.775	1.113	2.888
29	Gorontalo	40	40	253	207	239	149	283	202	333	230	255	205	196	103	-	-	1.599	1.136	2.735
30	Sulawesi Barat	14	11	184	149	190	149	193	121	233	166	172	105	138	87	-	-	1.124	788	1.912
31	Maluku	10	11	263	199	277	194	278	164	251	153	201	113	110	79	-	-	1.390	913	2.303
32	Maluku Utara	10	9	140	166	153	123	194	121	169	98	149	55	79	58	-	-	894	630	1.524
33	Papua Barat	16	20	175	156	193	139	160	112	101	70	61	31	34	14	-	-	740	542	1.282
34	Papua	66	83	898	744	769	610	462	351	352	172	217	122	85	46	-	-	2.849	2.128	4.977
Indonesia		2.055	2.247	21.619	21.192	27.253	18.957	29.120	18.596	31.870	19.629	27.525	14.655	17.807	7.741	212	221	157.461	103.238	260.699
		1,65%		16,42%		17,73%		18,30%		19,75%		16,18%		9,80%		0,17%		100%		

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI

Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

* : Data berdasarkan hasil penyisiran kasus SIM RS Mopping up

ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Kasus Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis Yang Terdaftar dan Diobati ^{*)}			Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis Terdaftar Dan Diobati ^{*)}			Angka Kesembuhan (Cure Rate) Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis						Angka Pengobatan Lengkap (Complete Rate) Semua Kasus Tuberkulosis						Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate/SR) Semua Kasus Tuberkulosis						Jumlah Kematian Selama Pengobatan Tuberkulosis	
								Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan		Jumlah	%
		L	P	L + P	L	P	L + P	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1	Aceh	2.442	1.153	3.595	5.210	2.906	8.116	1.753	71,8	852	73,9	2.605	72,5	2.854	54,8	1.800	61,9	4.654	57,3	4.607	88,4	2.652	91,3	7.259	89,4	119	1,5
2	Sumatera Utara	10.489	5.443	15.932	18.439	10.132	28.571	7.512	71,6	3.895	71,6	11.407	71,6	9.451	51,3	5.528	54,6	14.979	52,4	16.963	92,0	9.423	93,0	26.386	92,4	554	1,9
3	Sumatera Barat	3.531	1.712	5.243	6.508	3.723	10.231	2.636	74,7	1.291	75,4	3.927	74,9	3.039	46,7	2.028	54,5	5.067	49,5	5.675	87,2	3.319	89,1	8.994	87,9	278	2,7
4	Riau	3.853	1.960	5.813	7.272	4.278	11.550	2.416	62,7	1.223	62,4	3.639	62,6	3.923	53,9	2.547	59,5	6.470	56,0	6.339	87,2	3.770	88,1	10.109	87,5	243	2,1
5	Jambi	1.917	1.094	3.011	2.502	1.563	4.065	1.679	87,6	954	87,2	2.633	87,4	566	22,6	457	29,2	1.023	25,2	2.245	89,7	1.411	90,3	3.656	89,9	71	1,7
6	Sumatera Selatan	5.472	3.246	8.718	10.311	6.458	16.769	3.867	70,7	2.374	73,1	6.241	71,6	5.546	53,8	3.676	56,9	9.222	55,0	9.413	91,3	6.050	93,7	15.463	92,2	238	1,4
7	Bengkulu	1.085	607	1.692	2.115	1.358	3.473	856	78,9	470	77,4	1.326	78,4	728	34,4	518	38,1	1.246	35,9	1.584	74,9	988	72,8	2.572	74,1	74	2,1
8	Lampung	5.400	3.757	9.157	8.589	6.303	14.892	5.174	95,8	3.602	95,9	8.776	95,8	3.158	36,8	2.554	40,5	5.712	38,4	8.332	97,0	6.156	97,7	14.488	97,3	237	1,6
9	Kep. Bangka Belitung	695	403	1.098	1.170	762	1.932	549	79,0	318	78,9	867	79,0	493	42,1	368	48,3	861	44,6	1.042	89,1	686	90,0	1.728	89,4	103	5,3
10	Kepulauan Riau	1.231	729	1.960	2.581	1.772	4.353	842	68,4	531	72,8	1.373	70,1	1.379	53,4	1.063	60,0	2.442	56,1	2.221	86,1	1.594	90,0	3.815	87,6	153	3,5
11	DKI Jakarta	10.110	6.624	16.734	21.093	15.973	37.066	6.342	62,7	4.203	63,5	10.545	63,0	10.750	51,0	9.108	57,0	19.858	53,6	17.092	81,0	13.311	83,3	30.403	82,0	674	1,8
12	Jawa Barat	22.103	15.777	37.880	51.810	41.739	93.549	15.461	69,9	11.467	72,7	26.928	71,1	28.502	55,0	24.779	59,4	53.281	57,0	43.963	84,9	36.246	86,8	80.209	85,7	1.514	1,6
13	Jawa Tengah	13.698	10.055	23.753	28.830	23.332	52.162	9.760	71,3	7.565	75,2	17.325	72,9	14.401	50,0	12.677	54,3	27.078	51,9	24.161	83,8	20.242	86,8	44.403	85,1	1.444	2,8
14	DI Yogyakarta	918	670	1.588	2.138	1.677	3.815	689	75,1	535	79,9	1.224	77,1	1.067	49,9	924	55,1	1.991	52,2	1.756	82,1	1.459	87,0	3.215	84,3	270	7,1
15	Jawa Timur	16.223	11.702	27.925	31.945	25.769	57.714	12.735	78,5	9.536	81,5	22.271	79,8	15.547	48,7	14.132	54,8	29.679	51,4	28.282	88,5	23.668	91,8	51.950	90,0	2.201	3,8
16	Banten	5.967	3.772	9.739	13.375	9.906	23.281	4.329	72,5	2.845	75,4	7.174	73,7	7.812	58,4	6.334	63,9	14.146	60,8	12.141	90,8	9.179	92,7	21.320	91,6	438	1,9
17	Bali	1.228	718	1.946	2.142	1.471	3.613	899	73,2	549	76,5	1.448	74,4	1.002	46,8	781	53,1	1.783	49,3	1.901	88,7	1.330	90,4	3.231	89,4	271	7,5
18	Nusa Tenggara Barat	2.580	1.537	4.117	4.046	2.518	6.564	2.306	89,4	1.405	91,4	3.711	90,1	1.476	36,5	980	38,9	2.456	37,4	3.782	93,5	2.385	94,7	6.167	94,0	250	3,8
19	Nusa Tenggara Timur	2.250	1.560	3.810	4.209	3.195	7.404	1.577	70,1	1.140	73,1	2.717	71,3	1.906	45,3	1.550	48,5	3.456	46,7	3.483	82,8	2.690	84,2	6.173	83,4	174	2,4
20	Kalimantan Barat	3.043	1.622	4.665	5.107	2.955	8.062	2.477	81,4	1.290	79,5	3.767	80,8	1.948	38,1	1.224	41,4	3.172	39,3	4.425	86,6	2.514	85,1	6.939	86,1	158	2,0
21	Kalimantan Tengah	1.250	671	1.921	2.314	1.290	3.604	892	71,4	506	75,4	1.398	72,8	1.023	44,2	592	45,9	1.615	44,8	1.915	82,8	1.098	85,1	3.013	83,6	103	2,9
22	Kalimantan Selatan	2.538	1.381	3.919	4.774	2.959	7.733	1.778	70,1	1.000	72,4	2.778	70,9	2.219	46,5	1.551	52,4	3.770	48,8	3.997	83,7	2.551	86,2	6.548	84,7	271	3,5
23	Kalimantan Timur	2.035	1.295	3.330	3.951	2.788	6.739	1.710	84,0	1.127	87,0	2.837	85,2	1.967	49,8	1.525	54,7	3.492	51,8	3.677	93,1	2.652	95,1	6.329	93,9	203	3,0
24	Kalimantan Utara	522	315	837	928	640	1.568	251	48,1	176	55,9	427	51,0	422	45,5	338	52,8	760	48,5	673	72,5	514	80,3	1.187	75,7	73	4,7
25	Sulawesi Utara	3.234	1.911	5.145	4.129	2.490	6.619	2.339	72,3	1.408	73,7	3.747	72,8	1.052	25,5	666	26,7	1.718	26,0	3.391	82,1	2.074	83,3	5.465	82,6	130	2,0
26	Sulawesi Tengah	1.779	1.015	2.794	3.191	1.948	5.139	1.297	72,9	747	73,6	2.044	73,2	1.619	50,7	1.061	54,5	2.680	52,2	2.916	91,4	1.808	92,8	4.724	91,9	176	3,4
27	Sulawesi Selatan	5.494	3.786	9.280	10.614	7.579	18.193	3.918	71,3	2.857	75,5	6.775	73,0	5.267	49,6	3.890	51,3	9.157	50,3	9.185	86,5	6.747	89,0	15.932	87,6	707	3,9
28	Sulawesi Tenggara	1.960	1.316	3.276	2.808	1.877	4.685	1.434	73,2	996	75,7	2.430	74,2	831	29,6	567	30,2	1.398	29,8	2.265	80,7	1.563	83,3	3.828	81,7	131	2,8
29	Gorontalo	1.628	1.219	2.847	2.148	1.644	3.792	1.330	81,7	983	80,6	2.313	81,2	496	23,1	397	24,1	893	23,5	1.826	85,0	1.380	83,9	3.206	84,5	28	0,7
30	Sulawesi Barat	958	649	1.607	1.274	884	2.158	725	75,7	515	79,4	1.240	77,2	431	33,8	304	34,4	735	34,1	1.156	90,7	819	92,6	1.975	91,5	89	4,1
31	Maluku	1.229	952	2.181	2.511	2.104	4.615	648	52,7	517	54,3	1.165	53,4	809	32,2	734	34,9	1.543	33,4	1.457	58,0	1.251	59,5	2.708	58,7	70	1,5
32	Maluku Utara	862	555	1.417	1.238	837	2.075	389	45,1	246	44,3	635	44,8	626	50,6	474	56,6	1.100	53,0	1.015	82,0	720	86,0	1.735	83,6	111	5,3
33	Papua Barat	582	511	1.093	1.214	1.094	2.308	127	21,8	123	24,1	250	22,9	369	30,4	338	30,9	707	30,6	496	40,9	461	42,1	957	41,5	54	2,3
34	Papua	2.571	1.968	4.539	6.219	5.299	11.518	1.216	47,3	1.020	51,8	2.236	49,3	2.967	47,7	2.708	51,1	5.675	49,3	4.183	67,3	3.728	70,4	7.911	68,7	383	3,3
Indonesia		140.877	91.685	232.562	276.705	201.223	477.928	101.913	72,3	68.266	74,5	170.179	73,2	135.646	49,0	108.173	53,8	243.819	51,0	237.559	85,9	176.439	87,7	413.998	86,6	11.993	2,5

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemendes RI

Keterangan:

*) Kasus Tuberkulosis terdapat dan diobati berdasarkan kohort yang sama dari kasus yang dinilai kesembuhan dan pengobatan lengkap

Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BPA, Lembaga Pemasyarakatan,

Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll

*) Hasil Pengobatan tahun 2019 berdasarkan kohort penemuan kasus tahun 2018

Lampiran 53.a

PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Balita	Prevalensi Pneumonia Pada Balita (%)	Perkiraan Pneumonia Balita	Realisasi Penemuan Penderita Pneumonia Pada Balita																				
					Pneumonia				Pneumonia Berat				Jumlah			%	Jumlah Kematian Balita Karena Pneumonia				Total			CFR (%)	
					< 1 Tahun		1-4 Tahun		< 1 Tahun		1-4 Tahun		L	P	L+P		< 1 Tahun		1-4 Tahun		L	P	L+P		
					L	P	L	P	L	P	L	P					L	P	L	P					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
1	Aceh	488.041	4,46	21.767	448	372	1.326	1.015	19	14	45	26	1.838	1.427	3.265	15,0	9	6	0	0	9	6	15	0,46	
2	Sumatera Utara	1.401.611	2,99	41.908	1.416	1.214	1.968	1.785	102	48	60	32	3.546	3.079	6.625	15,8	5	4	0	0	5	4	9	0,14	
3	Sumatera Barat	531.634	3,91	20.787	1.521	1.207	3.807	3.274	98	64	118	117	5.544	4.662	10.206	49,1	0	2	0	0	0	2	2	0,02	
4	Riau	661.443	2,67	17.661	591	447	1.718	1.366	33	38	42	37	2.384	1.888	4.272	24,2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5	Jambi	360.052	3,15	11.342	464	384	1.397	1.105	56	34	49	36	1.966	1.559	3.525	31,1	0	1	1	0	1	1	2	0,06	
6	Sumatera Selatan	874.326	3,61	31.563	1.742	1.670	3.765	3.255	107	54	46	43	5.660	5.022	10.682	33,8	0	0	2	1	2	1	3	0,03	
7	Bengkulu	214.665	2,00	4.293	115	88	159	164	2	3	9	10	285	265	550	12,8	0	1	1	0	1	1	2	0,36	
8	Lampung	833.292	2,23	18.582	1.320	1.340	3.416	2.859	167	141	170	126	5.073	4.466	9.539	51,3	1	3	1	0	2	3	5	0,05	
9	Kep. Bangka Belitung	137.287	6,05	8.306	546	413	1.671	1.440	6	5	29	15	2.252	1.873	4.125	49,7	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
10	Kepulauan Riau	137.287	3,98	5.464	686	230	587	462	8	4	16	19	1.297	715	2.012	36,8	0	0	1	0	1	0	1	0,05	
11	DKI Jakarta	1.045.731	4,24	44.339	8.709	7.048	15.892	13.914	260	118	229	184	25.090	21.264	46.354	104,5	1	0	0	0	1	0	1	0,00	
12	Jawa Barat	4.806.324	4,62	222.052	19.030	16.949	34.812	30.847	1.117	705	799	607	55.758	49.108	104.866	47,2	10	5	4	5	14	10	24	0,02	
13	Jawa Tengah	2.652.751	3,61	95.764	7.503	6.352	18.634	16.120	442	315	496	401	27.075	23.188	50.263	52,5	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
14	DI Yogyakarta	282.671	4,32	12.211	1.455	908	2.392	1.857	56	58	97	89	4.000	2.912	6.912	56,6	7	6	0	0	2	7	8	15	0,22
15	Jawa Timur	3.928.277	4,45	174.808	11.544	11.286	33.559	31.380	642	238	389	323	46.134	43.227	89.361	51,1	12	8	6	9	18	17	35	0,04	
16	Banten	1.180.349	4,12	48.630	6.072	5.755	11.934	10.832	202	139	102	115	18.310	16.841	35.151	72,3	9	5	2	1	11	6	17	0,05	
17	Bali	428.097	2,05	8.776	1.061	639	1.963	1.366	18	16	17	16	3.059	2.037	5.096	58,1	4	13	2	4	6	17	23	0,45	
18	Nusa Tenggara Barat	504.214	6,38	32.169	4.571	3.729	6.378	5.568	369	238	316	239	11.634	9.774	21.408	66,5	7	1	0	1	7	2	9	0,04	
19	Nusa Tenggara Timur	537.337	4,28	22.998	1.288	984	1.491	1.261	298	295	461	542	3.538	3.082	6.620	28,8	1	2	9	10	10	12	22	0,33	
20	Kalimantan Barat	469.747	2,12	9.959	381	242	555	465	24	11	13	18	973	736	1.709	17,2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
21	Kalimantan Tengah	269.018	4,37	11.756	224	156	386	285	15	21	18	28	643	490	1.133	9,6	2	1	0	0	2	1	3	0,26	
22	Kalimantan Selatan	414.260	5,53	22.909	2.105	1.574	4.635	3.645	94	62	74	87	6.908	5.368	12.276	53,6	0	1	0	0	0	1	1	0,01	
23	Kalimantan Timur	370.991	2,86	10.610	1.038	598	1.925	1.478	34	16	23	28	3.020	2.120	5.140	48,4	1	1	0	0	1	1	2	0,04	
24	Kalimantan Utara	71.443	2,86	2.043	303	180	498	360	19	8	10	9	830	557	1.387	67,9	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
25	Sulawesi Utara	238.270	2,68	6.386	144	87	266	242	6	1	2	4	418	334	752	11,8	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
26	Sulawesi Tengah	240.918	5,19	12.504	1.507	1.215	2.952	2.430	103	69	90	64	4.652	3.778	8.430	67,4	5	2	2	1	7	3	10	0,12	
27	Sulawesi Selatan	717.711	3,79	27.201	981	652	1.769	1.379	86	63	86	92	2.922	2.186	5.108	18,8	5	7	2	1	7	8	15	0,29	
28	Sulawesi Tenggara	267.729	3,84	10.281	830	597	1.196	952	30	8	17	18	2.073	1.575	3.648	35,5	4	9	5	4	9	13	22	0,60	
29	Gorontalo	119.222	4,84	5.770	570	508	968	832	39	29	49	18	1.626	1.387	3.013	52,2	1	0	0	0	1	0	1	0,03	
30	Sulawesi Barat	131.921	4,88	6.438	247	172	562	458	16	10	8	11	833	651	1.484	23,1	1	0	3	2	4	2	6	0,40	
31	Maluku	153.195	3,74	5.729	249	136	379	296	18	5	10	12	656	449	1.105	19,3	22	40	68	130	90	170	260	23,53	
32	Maluku Utara	118.716	2,29	2.719	163	158	281	207	9	6	7	3	460	374	834	30,7	3	1	0	0	3	1	4	0,48	
33	Papua Barat	35.059	2,88	1.010	248	195	410	396	15	16	11	13	684	620	1.304	129,1	13	9	10	10	23	19	42	3,22	
34	Papua	321.497	2,80	9.002	2	2	5	7	0	0	1	0	8	9	17	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Indonesia		24.945.087	3,55	885.551	79.074	67.487	163.656	143.302	4.510	2.852	3.909	3.382	251.149	217.023	468.172	52,9	123	128	119	181	242	309	551	0,12	

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Keterangan:

Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

Persentase perkiraan kasus pneumonia pada balita berbeda untuk setiap provinsi, sesuai hasil riskesdas

Lampiran 53.b

**BALITA BATUK/KESUKARAN BERNAFAS YANG DIBERIKAN TATALAKSANA STANDAR
DAN KABUPATEN/KOTA DENGAN 50% PUSKESMAS MELAKUKAN TATALAKSANA STANDAR MINIMAL 60%
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019**

No	Provinsi	Balita Batuk Atau Kesukaran Bernafas			Batuk Bukan Pneumonia			Jumlah Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota Yang 50% Puskesmas Yang Melakukan Tatalaksana Standar Minimal 60%	Persentase Kab/Kota Yang 50% Puskesmas Yang Melakukan Tatalaksana Standar Minimal 60%
		Jumlah Kunjungan	Diberikan Tatalaksana Standar (Dihitung Napas/ Lihat TDDK*)	Persentase Yang Diberikan Tatalaksana Standar	L	P	L + P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	140.327	65.717	46,8	86.981	84.789	171.770	23	6	26,09
2	Sumatera Utara	182.752	145.567	79,7	122.360	120.886	243.246	33	16	48,48
3	Sumatera Barat	153.240	147.152	96,0	78.083	76.499	154.582	19	18	94,74
4	Riau	159.821	122.939	76,9	93.493	91.547	185.040	12	5	41,67
5	Jambi	147.642	128.550	87,1	71.862	68.350	140.212	11	10	90,91
6	Sumatera Selatan	231.781	211.491	91,2	122.905	123.895	246.800	17	13	76,47
7	Bengkulu	46.818	41.219	88,0	24.076	24.024	48.100	10	8	80,00
8	Lampung	265.850	215.469	81,0	139.492	138.118	277.610	15	13	86,67
9	Kep. Bangka Belitung	47.962	44.570	92,9	22.775	21.494	44.269	7	7	100,00
10	Kepulauan Riau	55.111	30.918	56,1	26.892	29.466	56.358	7	1	14,29
11	DKI Jakarta	528.669	524.528	99,2	253.799	234.559	488.358	6	6	100,00
12	Jawa Barat	1.361.229	1.008.795	74,1	678.627	667.320	1.345.947	27	17	62,96
13	Jawa Tengah	776.213	711.675	91,7	481.602	490.476	972.078	35	18	51,43
14	DI Yogyakarta	55.899	53.269	95,3	46.524	43.373	89.897	5	4	80,00
15	Jawa Timur	874.060	753.743	86,2	457.964	471.054	929.018	38	30	78,95
16	Banten	484.844	351.174	72,4	233.980	232.122	466.102	8	8	100,00
17	Bali	99.424	92.564	93,1	54.248	48.665	102.913	9	7	77,78
18	Nusa Tenggara Barat	252.052	190.863	75,7	126.117	118.637	244.754	10	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	208.217	190.809	91,6	119.748	118.118	237.866	22	18	81,82
20	Kalimantan Barat	52.995	45.757	86,3	61.109	56.133	117.242	14	4	28,57
21	Kalimantan Tengah	73.039	64.449	88,2	43.419	41.012	84.431	14	8	57,14
22	Kalimantan Selatan	134.134	120.540	89,9	66.931	62.205	129.136	13	5	38,46
23	Kalimantan Timur	144.051	112.679	78,2	85.423	79.132	164.555	10	5	50,00
24	Kalimantan Utara	30.595	30.328	99,1	21.815	19.112	40.927	5	3	60,00
25	Sulawesi Utara	42.052	27.234	64,8	38.029	38.183	76.212	15	8	53,33
26	Sulawesi Tengah	106.893	101.782	95,2	55.399	52.955	108.354	13	12	92,31
27	Sulawesi Selatan	101.919	67.068	65,8	73.154	68.378	141.532	24	9	37,50
28	Sulawesi Tenggara	53.696	44.723	83,3	33.830	30.229	64.059	17	6	35,29
29	Gorontalo	39.007	29.374	75,3	18.118	16.855	34.973	6	5	83,33
30	Sulawesi Barat	39.226	30.018	76,5	21.478	20.490	41.968	6	4	66,67
31	Maluku	66.695	42.454	63,7	37.956	35.869	73.825	11	3	27,27
32	Maluku Utara	41.736	35.707	85,6	33.892	32.050	65.942	10	4	40,00
33	Papua Barat	47.320	42.229	89,2	24.747	24.136	48.883	13	2	15,38
34	Papua	2.565	810	31,6	1.288	1.260	2.548	29	1	3,45
Indonesia		7.047.834	5.826.163	82,7	3.858.116	3.781.391	7.639.507	514	294	57,20

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Keterangan:

* TDDK = tarikan dinding dada ke dalam

Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut di beberapa kab/kota termasuk kasus yang ditemukan di RS

Lampiran 54

JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)															Jumlah estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV (minimal)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
		≤ 4 Tahun		5 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		20 - 24 Tahun		25 - 49 Tahun		≥ 50 Tahun		Total					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	T			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(20)	(21)	(22)
1	Aceh	1	-	2	-	6	-	26	3	99	30	7	-	141	33	174	219.839	34.062	15,49
2	Sumatera Utara	16	14	10	6	17	5	274	93	1.389	457	126	56	1.832	631	2.463	558.271	72.922	13,06
3	Sumatera Barat	5	1	1	6	8	2	66	10	313	87	30	12	423	118	541	233.326	49.076	21,03
4	Riau	1	4	1	2	4	3	63	18	309	108	35	10	413	145	558	302.526	45.425	15,02
5	Jambi	1	4	1	1	3	1	16	7	58	33	3	3	82	49	131	135.766	23.219	17,10
6	Sumatera Selatan	4	6	4	2	6	-	65	21	321	127	41	4	441	160	601	309.438	78.875	25,49
7	Bengkulu	2	4	2	2	1	-	10	9	89	49	6	3	110	67	177	75.949	16.017	21,09
8	Lampung	7	5	4	3	6	7	60	23	309	122	18	4	404	164	568	299.464	69.402	23,18
9	Kep. Bangka Belitung	1	4	2	4	2	3	17	10	89	82	15	5	126	108	234	58.590	25.586	43,67
10	Kepulauan Riau	15	15	3	4	6	3	78	19	411	226	55	19	568	286	854	93.561	25.510	27,27
11	DKI Jakarta	29	39	14	20	98	62	853	211	3.729	1.171	366	109	5.089	1.612	6.701	393.274	211.642	53,82
12	Jawa Barat	61	41	36	19	118	65	851	252	2.954	1.371	214	84	4.234	1.832	6.066	1.699.164	431.794	25,41
13	Jawa Tengah	50	44	26	24	81	39	348	251	2.366	1.579	547	275	3.418	2.212	5.630	1.019.482	529.197	51,91
14	DI Yogyakarta	8	6	4	4	13	2	116	10	315	129	75	32	531	183	714	112.367	44.619	39,71
15	Jawa Timur	92	46	44	40	71	77	565	430	3.523	2.761	853	433	5.148	3.787	8.935	1.125.152	489.955	43,55
16	Banten	11	10	9	7	37	21	224	94	801	366	50	13	1.132	511	1.643	474.504	153.086	32,26
17	Bali	20	13	9	9	27	25	203	142	1.042	588	127	78	1.428	855	2.283	134.656	77.889	57,84
18	Nusa Tenggara Barat	16	6	1	1	5	1	21	16	115	69	5	2	163	95	258	200.330	40.376	20,15
19	Nusa Tenggara Timur	14	7	5	4	8	6	45	49	376	247	35	25	483	338	821	255.709	23.384	9,14
20	Kalimantan Barat	9	9	9	1	14	11	51	28	345	172	34	15	462	236	698	206.834	33.671	16,28
21	Kalimantan Tengah	3	2	1	1	1	4	17	19	94	62	12	6	128	94	222	111.197	13.941	12,54
22	Kalimantan Selatan	14	10	3	2	6	5	44	36	224	100	22	8	313	161	474	172.630	24.701	14,31
23	Kalimantan Timur	17	7	4	7	18	10	120	65	614	317	93	29	866	435	1.301	169.099	60.097	35,54
24	Kalimantan Utara	6	1	-	-	2	5	15	15	95	51	8	1	126	73	199	28.166	12.565	44,61
25	Sulawesi Utara	1	8	4	3	17	23	79	58	263	159	37	21	401	272	673	86.619	16.986	19,61
26	Sulawesi Tengah	3	3	-	-	5	3	48	16	179	73	19	1	254	96	350	126.441	31.693	25,07
27	Sulawesi Selatan	12	9	12	7	21	11	219	49	871	250	61	15	1.196	341	1.537	347.055	123.987	35,73
28	Sulawesi Tenggara	1	5	-	1	1	3	18	10	89	41	9	2	118	62	180	122.513	14.503	11,84
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	6	3	32	7	-	-	38	10	48	47.360	11.905	25,14
30	Sulawesi Barat	-	2	-	-	-	-	6	2	41	16	1	1	48	21	69	62.499	7.751	12,40
31	Maluku	8	8	-	1	5	5	52	31	173	139	33	7	271	191	462	85.185	18.164	21,32
32	Maluku Utara	3	6	-	2	3	12	30	14	104	76	13	4	153	114	267	55.285	9.418	17,04
33	Papua Barat	16	25	3	4	9	34	44	114	185	240	18	5	275	422	697	42.669	14.603	34,22
34	Papua	58	41	21	17	75	310	328	584	1.061	1.110	85	63	1.628	2.125	3.753	133.855	41.345	30,89
Indonesia		505	405	235	204	694	758	4.978	2.712	22.978	12.415	3.053	1.345	32.443	17.839	50.282	9.498.775	2.877.366	30,29
		1,8		0,9		2,9		15,3		70,4		8,7		100					

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020

Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

Lampiran 55.a

**JUMLAH KASUS BARU HIV
MENURUT PROVINSI TAHUN 2017 - 2019**

No	Provinsi	Jumlah Kasus Baru HIV		
		2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	111	155	174
2	Sumatera Utara	1.914	1.999	2.463
3	Sumatera Barat	563	624	541
4	Riau	711	539	558
5	Jambi	278	246	131
6	Sumatera Selatan	486	508	601
7	Bengkulu	95	107	177
8	Lampung	580	524	568
9	Kepulauan Bangka Belitung	268	205	234
10	Kepulauan Riau	1.105	1.033	854
11	DKI Jakarta	6.626	6.896	6.701
12	Jawa Barat	5.819	5.185	6.066
13	Jawa Tengah	5.425	5.400	5.630
14	DI Yogyakarta	723	833	714
15	Jawa Timur	8.204	8.608	8.935
16	Banten	1.315	1.334	1.643
17	Bali	2.441	2.211	2.283
18	Nusa Tenggara Barat	222	192	258
19	Nusa Tenggara Timur	837	842	821
20	Kalimantan Barat	608	692	698
21	Kalimantan Tengah	119	122	222
22	Kalimantan Selatan	572	297	474
23	Kalimantan Timur	1.202	1.126	1.301
24	Kalimantan Utara	172	166	199
25	Sulawesi Utara	516	555	673
26	Sulawesi Tengah	200	292	350
27	Sulawesi Selatan	1.366	1.174	1.537
28	Sulawesi Tenggara	134	106	180
29	Gorontalo	51	74	48
30	Sulawesi Barat	37	26	69
31	Maluku	688	462	462
32	Maluku Utara	145	200	267
33	Papua Barat	409	380	697
34	Papua	4.358	3.546	3.753
Indonesia		48.300	46.659	50.282

Sumber: SIHA, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 55.b

**JUMLAH KASUS BARU AIDS MENURUT JENIS KELAMIN , KELOMPOK UMUR, DAN PROVINSI
TAHUN 2019**

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																						
		< 1 Tahun		1 - 4 Tahun		5 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		20 - 29 Tahun		30 - 39 Tahun		40 - 49 Tahun		50 - 59 Tahun		≥ 60 Tahun		Tidak Diketahui Kelompok Umur		Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	Aceh	0	0	0	0	0	0	1	0	17	1	17	4	4	4	1	0	0	0	0	0	40	9	49
2	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	2	0	3	0	0	4	3	0	71	10	85	16	40	10	9	3	2	0	0	0	215	43	258
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	8	3	11
6	Sumatera Selatan	0	0	0	1	1	0	3	0	51	8	67	17	32	9	14	2	2	0	0	0	170	37	207
7	Bengkulu	1	0	0	1	1	0	0	0	13	6	17	7	13	5	3	0	1	1	0	0	49	20	69
8	Lampung	0	0	1	2	1	1	2	0	39	4	41	9	29	8	3	1	2	0	0	0	118	25	143
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	1	0	0	10	5	13	0	5	5	2	1	1	1	0	0	31	13	44
10	Kepulauan Riau	4	2	3	3	2	3	2	1	77	29	100	44	67	30	24	7	10	3	0	0	289	122	411
11	DKI Jakarta	2	1	2	1	3	1	6	4	135	28	187	40	90	29	31	12	10	3	0	0	466	119	585
12	Jawa Barat	0	0	0	1	2	2	2	0	72	13	89	32	47	17	26	4	4	2	0	0	242	71	313
13	Jawa Tengah	3	1	7	2	6	3	8	4	241	94	386	181	230	133	152	70	63	15	8	6	1.104	509	1.613
14	DI Yogyakarta	1	0	0	1	2	3	0	0	13	3	22	3	11	3	10	6	0	0	0	0	59	19	78
15	Jawa Timur	0	2	14	1	9	9	1	2	137	54	227	102	158	72	110	60	0	0	0	0	656	302	958
16	Banten	0	0	0	3	1	1	2	0	36	12	38	12	33	9	7	3	1	0	0	0	118	40	158
17	Bali	0	4	2	1	2	2	15	6	44	17	29	16	54	14	14	12	5	3	0	0	165	75	240
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	2	1	1	0	0	0	4	5	5	7	5	3	1	0	0	0	0	0	18	16	34
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	1	0	0	0	1	0	3	2	6	6	4	2	1	1	1	1	0	0	17	12	29
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	4	2	17	7	33	15	22	2	6	3	2	0	0	0	84	29	113
21	Kalimantan Tengah	1	0	1	0	0	1	0	0	9	5	12	7	7	4	4	1	1	0	0	0	35	18	53
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	5
23	Kalimantan Timur	0	0	3	4	2	3	1	0	28	15	60	23	24	13	13	8	6	0	0	0	137	66	203
24	Kalimantan Utara	0	0	2	0	0	1	2	0	7	2	20	13	11	3	2	0	2	1	0	0	46	20	66
25	Sulawesi Utara	1	0	0	0	1	1	2	2	39	9	27	7	15	4	9	3	3	2	0	0	97	28	125
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	1	0	0	0	0	18	10	13	1	6	0	1	0	2	0	0	0	40	12	52
27	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	2	12	6	14	4	8	1	5	0	0	0	0	0	39	13	52
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	12	4	5	8	5	7	2	1	1	0	0	0	25	20	45
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	1	1	1	11	13	10	3	14	2	2	1	1	1	0	0	39	22	61
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua	1	1	7	2	3	10	23	98	246	263	148	110	67	38	22	12	3	7	0	0	520	541	1.061
Indonesia		16	11	48	25	37	47	79	122	1.363	628	1.677	690	1.003	428	474	211	123	40	8	6	4.828	2.208	7.036
		0,4		1,0		1,2		2,9		28,3		33,6		20,3		9,7		2,3		0,2		100		

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020

Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = jumlah laki-laki dan Perempuan

Lampiran 55.c

**JUMLAH KASUS KUMULATIF AIDS MENURUT JENIS KELAMIN , KELOMPOK UMUR, DAN PROVINSI
TAHUN 2019**

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																							
		< 1 Tahun		1 - 4 Tahun		5 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		20 - 29 Tahun		30 - 39 Tahun		40 - 49 Tahun		50 - 59 Tahun		≥ 60 Tahun		Kelompok Umur Tidak Diketahui		Jenis Kelamin Tidak Diketahui	Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	Aceh	1	0	8	1	7	1	3	2	112	52	168	56	84	23	22	2	4	0	0	0	0	409	137	546
2	Sumatera Utara	1	0	41	35	25	24	27	11	1.001	381	1.221	426	439	147	155	45	31	4	22	11	18	2.963	1.084	4.065
3	Sumatera Barat	3	0	13	5	8	15	16	2	313	67	398	120	198	41	30	12	9	2	9	4	952	997	268	2.217
4	Riau	1	4	27	28	22	11	20	10	584	265	678	265	287	99	111	30	25	2	0	1	0	1.755	715	2.470
5	Jambi	1	1	6	3	2	0	3	2	192	73	217	60	83	22	33	7	4	2	0	1	38	541	171	750
6	Sumatera Selatan	0	0	12	9	7	6	12	4	361	119	386	114	165	28	61	6	5	3	12	12	0	1.021	301	1.322
7	Bengkulu	51	34	4	11	2	3	4	0	93	56	96	55	37	14	11	4	3	1	0	2	3	301	180	484
8	Lampung	4	1	12	18	7	6	14	2	245	112	293	120	110	30	30	14	9	2	6	0	0	730	305	1.035
9	Kep. Bangka Belitung	9	3	4	9	5	6	1	4	88	40	149	48	62	24	20	6	11	4	44	8	2	393	152	547
10	Kepulauan Riau	14	7	19	11	8	8	14	6	338	224	476	258	281	114	108	30	45	16	6	0	1	1.309	674	1.984
11	DKI Jakarta	4	1	20	8	17	12	18	7	626	109	896	152	400	71	143	25	35	7	2	1	7.963	2.161	393	10.517
12	Jawa Barat	62	19	73	80	39	42	46	35	2.168	866	1.748	734	500	207	147	53	29	4	128	62	20	4.940	2.102	7.062
13	Jawa Tengah	40	12	133	102	78	73	59	64	1.714	1.068	2.606	1.475	1.721	849	866	376	299	65	56	47	21	7.572	4.131	11.724
14	DI Yogyakarta	1	0	20	8	140	51	4	2	127	62	173	100	123	47	78	32	17	6	357	180	9	1.040	488	1.537
15	Jawa Timur	53	40	266	180	154	107	101	138	3.402	2.474	4.677	2.910	2.795	1.396	1.190	505	297	102	0	0	0	12.935	7.852	20.787
16	Banten	41	16	39	27	16	14	60	22	929	351	813	314	249	75	71	16	19	6	13	4	52	2.250	845	3.147
17	Bali	54	44	144	84	31	31	60	75	1.543	888	2.062	912	995	390	440	134	127	45	99	44	28	5.555	2.647	8.230
18	Nusa Tenggara Barat	2	2	19	20	9	10	6	4	157	114	223	123	81	36	21	9	1	1	5	3	1	524	322	847
19	Nusa Tenggara Timur	2	7	20	14	8	8	9	21	421	330	515	207	194	94	75	21	20	7	3	0	112	1.267	709	2.088
20	Kalimantan Barat	4	4	23	15	11	12	98	129	630	509	718	245	226	62	80	19	18	4	0	1	0	1.808	1.000	2.808
21	Kalimantan Tengah	1	0	4	4	0	4	0	3	49	47	90	40	30	18	17	4	5	1	5	3	0	201	124	325
22	Kalimantan Selatan	5	2	4	3	4	3	2	2	71	67	105	51	53	12	16	7	2	1	0	0	0	262	148	410
23	Kalimantan Timur	7	10	17	17	11	11	10	16	335	269	413	238	181	89	94	27	25	1	3	1	0	1.096	679	1.775
24	Kalimantan Utara	0	0	16	16	4	1	7	3	89	66	177	68	92	22	20	6	12	1	0	0	5	417	183	605
25	Sulawesi Utara	7	6	20	15	11	7	26	16	473	210	445	183	272	80	92	21	19	4	8	9	0	1.373	551	1.924
26	Sulawesi Tengah	1	2	12	8	5	2	3	14	183	141	201	88	77	28	26	6	3	3	6	6	0	517	298	815
27	Sulawesi Selatan	6	8	20	24	25	19	55	17	1.031	321	905	308	310	88	94	22	20	5	89	33	16	2.555	845	3.416
28	Sulawesi Tenggara	0	3	2	0	1	3	4	6	83	46	88	44	33	20	12	7	1	0	169	91	0	393	220	613
29	Gorontalo	1	3	0	4	0	1	5	2	73	17	58	18	19	4	5	2	0	0	1	2	0	162	53	215
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	9	4	5	2	0	0	0	0	0	0	0	17	8	25
31	Maluku	3	2	9	11	1	4	5	9	141	123	156	104	74	36	50	22	21	3	0	0	0	460	314	774
32	Maluku Utara	4	3	5	5	0	4	7	10	132	132	169	80	77	28	26	6	7	1	1	1	0	428	270	698
33	Papua Barat	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1.734	2	5	1.741
34	Papua	20	17	204	135	85	179	716	1.912	5.197	5.841	3.531	2.437	1.339	803	470	242	285	144	0	0	41	11.847	11.710	23.598
Indonesia		403	251	1.216	911	743	678	1.415	2.550	22.904	15.445	24.861	12.358	11.593	4.999	4.614	1.718	1.408	447	1.044	527	11.016	70.201	39.884	121.101
		0,5		1,8		1,2		3,3		31,7		30,7		13,7		5,2		1,5		1,3					

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020
Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

Lampiran 55.d

JUMLAH KEMATIAN AKIBAT AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
TAHUN 2019

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																							
		< 1 Tahun		1 - 4 Tahun		5 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		20 - 29 Tahun		30 - 39 Tahun		40 - 49 Tahun		50 - 59 Tahun		≥ 60 Tahun		Tidak Diketahui		Total			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L + P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
1	Aceh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	4	5	
2	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7	0	3	0	2	0	0	0	0	0	16	0	16	
7	Bengkulu	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	2	2	1	0	0	0	0	0	10	2	12	
8	Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	
10	Kepulauan Riau	1	1	0	0	0	1	0	0	8	1	8	9	4	7	2	0	1	0	0	0	24	19	43	
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	13	5	7	4	1	2	1	1	0	0	26	15	41	
12	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	1	1	0	2	0	0	0	15	1	16	
13	Jawa Tengah	0	0	0	1	0	2	2	0	16	4	31	18	23	9	21	6	1	2	0	1	94	43	137	
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	6	0	6	
15	Jawa Timur	0	0	1	0	1	0	0	0	19	7	47	17	31	17	21	9	0	0	0	0	120	50	170	
16	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	3	1	0	1	0	0	0	0	0	9	5	14	
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5	1	6	
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	3	
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	2	2	1	2	1	1	0	0	0	9	6	15	
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Kalimantan Timur	0	0	1	1	0	1	1	0	1	3	8	2	2	4	2	2	2	0	0	0	17	13	30	
24	Kalimantan Utara	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	2	3	2	0	0	1	1	0	0	9	5	14	
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	11	2	13	
27	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3	2	5	
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	4	8	
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Papua	0	0	1	1	0	0	1	6	8	10	4	3	3	1	3	1	0	1	0	0	20	23	43	
Indonesia		2	1	4	3	1	4	4	7	86	39	149	65	98	50	64	21	10	5	0	1	418	196	614	
		0,5		1,1		0,8		1,8		20,4		34,9		24,1		13,8		2,4		0,2					

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020

Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

Lampiran 55.e

**JUMLAH KASUS BARU DAN KASUS KUMULATIF AIDS
MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2019**

No	Provinsi	Jumlah Kasus Baru			Jumlah Kasus Kumulatif s.d. Desember 2019
		2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	78	89	49	546
2	Sumatera Utara	155	149	TAD	4.065
3	Sumatera Barat	267	347	258	2.217
4	Riau	383	269	TAD	2.470
5	Jambi	87	25	11	750
6	Sumatera Selatan	170	246	207	1.322
7	Bengkulu	29	55	69	484
8	Lampung	41	143	143	1.035
9	Kepulauan Bangka Belitung	57	38	44	547
10	Kepulauan Riau	208	289	411	1.984
11	DKI Jakarta	567	717	585	10.517
12	Jawa Barat	1.251	247	313	7.062
13	Jawa Tengah	1.719	1.941	1.613	11.724
14	DI Yogyakarta	50	48	78	1.537
15	Jawa Timur	741	1.586	958	20.787
16	Banten	512	207	158	3.147
17	Bali	736	549	240	8.230
18	Nusa Tenggara Barat	93	27	34	847
19	Nusa Tenggara Timur	11	94	29	2.088
20	Kalimantan Barat	110	95	113	2.808
21	Kalimantan Tengah	12	25	53	325
22	Kalimantan Selatan	14	0	5	410
23	Kalimantan Timur	358	171	203	1.775
24	Kalimantan Utara	55	267	66	605
25	Sulawesi Utara	127	332	125	1.924
26	Sulawesi Tengah	144	2	52	815
27	Sulawesi Selatan	220	337	TAD	3.416
28	Sulawesi Tenggara	92	113	52	613
29	Gorontalo	61	5	TAD	215
30	Sulawesi Barat	6	0	TAD	25
31	Maluku	88	68	45	774
32	Maluku Utara	34	108	61	698
33	Papua Barat	0	0	TAD	1.741
34	Papua	2.012	1.601	1.061	23.598
Indonesia		10.488	10.190	7.036	121.101

Sumber: SIHA, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 55.f

**JUMLAH DAN PERSENTASE KASUS AIDS PADA PENGGUNA NAPZA SUNTIKAN (IDU)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jumlah Kasus Baru AIDS	Jumlah Kasus Baru AIDS pada IDU	Persentase Kasus Baru AIDS pada IDU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	49	0	0,00
2	Sumatera Utara	TAD	TAD	TAD
3	Sumatera Barat	258	10	3,88
4	Riau	TAD	TAD	TAD
5	Jambi	11	2	18,18
6	Sumatera Selatan	207	2	0,97
7	Bengkulu	69	0	0,00
8	Lampung	143	1	0,70
9	Kepulauan Bangka Belitung	44	0	0,00
10	Kepulauan Riau	411	0	0,00
11	DKI Jakarta	585	41	7,01
12	Jawa Barat	313	12	3,83
13	Jawa Tengah	1.613	5	0,31
14	DI Yogyakarta	78	0	0,00
15	Jawa Timur	958	5	0,52
16	Banten	158	6	3,80
17	Bali	240	1	0,42
18	Nusa Tenggara Barat	34	0	0,00
19	Nusa Tenggara Timur	29	0	0,00
20	Kalimantan Barat	113	1	0,88
21	Kalimantan Tengah	53	0	0,00
22	Kalimantan Selatan	5	0	0,00
23	Kalimantan Timur	203	0	0,00
24	Kalimantan Utara	66	0	0,00
25	Sulawesi Utara	125	1	0,80
26	Sulawesi Tengah	52	0	0,00
27	Sulawesi Selatan	TAD	TAD	TAD
28	Sulawesi Tenggara	52	0	0,00
29	Gorontalo	TAD	TAD	TAD
30	Sulawesi Barat	TAD	TAD	TAD
31	Maluku	45	45	100,00
32	Maluku Utara	61	0	0,00
33	Papua Barat	TAD	TAD	TAD
34	Papua	1.061	1	0,09
Indonesia		7.036	133	1,89

Sumber: SIHA, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 56

**KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jumlah Target Penemuan		Diare									
				Dilayani				Mendapat Oralit				Mendapat Zinc	
				Semua Umur		Balita		Semua Umur		Balita		Balita	
		Semua Umur	Balita	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	145.031	95.750	74.415	51,3	24.690	25,8	74.415	100,0	24.690	100,0	23.094	93,5
2	Sumatera Utara	393.189	253.211	215.250	54,7	66.594	26,3	201.300	93,5	65.789	98,8	50.242	75,4
3	Sumatera Barat	146.912	90.562	88.290	60,1	25.053	27,7	88.244	99,9	25.053	100,0	25.053	100,0
4	Riau	188.237	125.425	83.358	44,3	29.083	23,2	77.202	92,6	27.634	95,0	26.161	90,0
5	Jambi	97.864	54.014	70.023	71,6	25.337	46,9	64.282	91,8	24.024	94,8	23.427	92,5
6	Sumatera Selatan	228.708	133.482	173.537	75,9	63.585	47,6	165.937	95,6	61.614	96,9	59.443	93,5
7	Bengkulu	53.780	30.656	26.966	50,1	10.591	34,5	26.586	98,6	10.522	99,3	10.590	100,0
8	Lampung	228.089	127.443	114.536	50,2	36.656	28,8	114.407	99,9	36.647	100,0	36.636	99,9
9	Kep. Bangka Belitung	40.197	22.649	17.669	44,0	7.399	32,7	17.505	99,1	7.399	100,0	7.399	100,0
10	Kepulauan Riau	59.121	36.290	29.895	50,6	7.834	21,6	29.895	100,0	7.834	100,0	7.834	100,0
11	DKI Jakarta	285.061	149.859	298.293	104,6	98.478	65,7	298.293	100,0	98.478	100,0	98.478	100,0
12	Jawa Barat	1.331.551	729.500	881.093	66,2	347.078	47,6	753.695	85,5	330.595	95,3	338.108	97,4
13	Jawa Tengah	937.392	442.854	559.994	59,7	171.577	38,7	413.686	73,9	151.508	88,3	163.416	95,2
14	DI Yogyakarta	103.759	46.834	69.902	67,4	14.125	30,2	57.987	83,0	10.492	74,3	12.657	89,6
15	Jawa Timur	1.071.863	475.057	678.248	63,3	221.523	46,6	641.618	94,6	213.048	96,2	210.421	95,0
16	Banten	349.038	204.216	250.516	71,8	107.857	52,8	234.799	93,7	102.841	95,3	101.893	94,5
17	Bali	117.097	54.364	62.505	53,4	16.097	29,6	51.579	82,5	14.021	87,1	13.751	85,4
18	Nusa Tenggara Barat	136.900	83.531	127.151	92,9	57.264	68,6	127.151	100,0	57.264	100,0	57.264	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	147.317	108.687	27.597	18,7	13.824	12,7	26.376	95,6	13.298	96,2	13.014	94,1
20	Kalimantan Barat	136.866	82.869	59.061	43,2	24.104	29,1	57.289	97,0	22.508	93,4	24.104	100,0
21	Kalimantan Tengah	100.301	42.976	48.493	48,3	17.668	41,1	48.493	100,0	17.668	100,0	17.668	100,0
22	Kalimantan Selatan	114.591	66.820	66.532	58,1	26.450	39,6	55.971	84,1	24.151	91,3	25.977	98,2
23	Kalimantan Timur	100.478	58.977	68.256	67,9	24.715	41,9	55.713	81,6	21.946	88,8	21.514	87,0
24	Kalimantan Utara	20.041	12.759	16.287	81,3	6.956	54,5	11.287	69,3	5.091	73,2	5.409	77,8
25	Sulawesi Utara	67.688	34.373	19.435	28,7	7.624	22,2	17.032	87,6	7.624	100,0	6.987	91,6
26	Sulawesi Tengah	82.459	50.450	52.584	63,8	19.925	39,5	47.195	89,8	17.805	89,4	17.913	89,9
27	Sulawesi Selatan	238.983	139.047	145.456	60,9	47.932	34,5	102.478	70,5	37.639	78,5	40.355	84,2
28	Sulawesi Tenggara	73.028	50.611	27.212	37,3	11.483	22,7	23.882	87,8	11.031	96,1	10.728	93,4
29	Gorontalo	32.471	19.086	21.869	67,3	9.727	51,0	15.325	70,1	7.267	74,7	8.607	88,5
30	Sulawesi Barat	37.267	25.571	32.427	87,0	10.727	42,0	32.427	100,0	10.727	100,0	10.727	100,0
31	Maluku	48.677	34.877	15.332	31,5	8.063	23,1	15.332	100,0	8.063	100,0	8.063	100,0
32	Maluku Utara	33.906	23.473	19.861	58,6	10.435	44,5	17.883	90,0	9.548	91,5	9.914	95,0
33	Papua Barat	25.910	16.995	8.578	33,1	4.407	25,9	7.596	88,6	4.093	92,9	4.074	92,4
34	Papua	91.241	56.524	34.892	38,2	17.083	30,2	34.892	100,0	17.083	100,0	17.083	100,0
Indonesia		7.265.013	3.979.790	4.485.513	61,7	1.591.944	40,0	4.007.752	89,3	1.504.995	94,5	1.508.004	94,7
Angka Kesakitan Diare Per 1.000 Penduduk		270	843										

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 57

**KASUS BARU KUSTA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Kasus Baru									Angka Penemuan Kasus Baru (NCDR/New Case Detection Rate) Per 100.000 Penduduk
			Pausi Basiler (PB)/ Kusta kering			Multi Basiler (MB)/ Kusta Basah			PB + MB			
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	5.371.532	37	40	77	180	97	277	217	137	354	6,59
2	Sumatera Utara	14.562.549	4	9	13	115	64	179	119	73	192	1,32
3	Sumatera Barat	5.441.197	12	8	20	45	26	71	57	34	91	1,67
4	Riau	6.971.745	7	3	10	62	35	97	69	38	107	1,53
5	Jambi	3.624.579	8	6	14	57	23	80	65	29	94	2,59
6	Sumatera Selatan	8.470.683	13	12	25	135	75	210	148	87	235	2,77
7	Bengkulu	1.991.838	1	1	2	11	7	18	12	8	20	1,00
8	Lampung	8.447.737	5	6	11	92	42	134	97	48	145	1,72
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.488.792	7	4	11	24	11	35	31	15	46	3,09
10	Kepulauan Riau	2.189.653	5	2	7	21	20	41	26	22	48	2,19
11	DKI Jakarta	10.557.810	68	30	98	319	153	472	387	183	570	5,40
12	Jawa Barat	49.316.712	108	86	194	1.253	653	1.906	1.361	739	2.100	4,26
13	Jawa Tengah	34.718.204	77	65	142	767	427	1.194	844	492	1.336	3,85
14	DI Yogyakarta	3.842.932	3	6	9	35	16	51	38	22	60	1,56
15	Jawa Timur	39.698.631	114	121	235	1.676	1.029	2.705	1.790	1.150	2.940	7,41
16	Banten	12.927.316	50	62	112	527	288	815	577	350	927	7,17
17	Bali	4.336.923	3	10	13	74	33	107	77	43	120	2,77
18	Nusa Tenggara Barat	5.070.385	19	23	42	179	100	279	198	123	321	6,33
19	Nusa Tenggara Timur	5.456.203	18	14	32	230	127	357	248	141	389	7,13
20	Kalimantan Barat	5.069.127	4	4	8	51	21	72	55	25	80	1,58
21	Kalimantan Tengah	2.714.859	7	3	10	42	33	75	49	36	85	3,13
22	Kalimantan Selatan	4.244.096	14	9	23	84	44	128	98	53	151	3,56
23	Kalimantan Timur	3.721.389	13	14	27	117	51	168	130	65	195	5,24
24	Kalimantan Utara	742.245	1	2	3	24	12	36	25	14	39	5,25
25	Sulawesi Utara	2.506.981	52	54	106	305	179	484	357	233	590	23,53
26	Sulawesi Tengah	3.054.023	25	21	46	169	80	249	194	101	295	9,66
27	Sulawesi Selatan	8.851.240	79	90	169	576	407	983	655	497	1.152	13,02
28	Sulawesi Tenggara	2.704.737	7	13	20	125	69	194	132	82	214	7,91
29	Gorontalo	1.202.631	4	7	11	124	83	207	128	90	218	18,13
30	Sulawesi Barat	1.380.256	24	14	38	101	43	144	125	57	182	13,19
31	Maluku	1.802.870	24	20	44	260	127	387	284	147	431	23,91
32	Maluku Utara	1.255.771	89	107	196	405	308	713	494	415	909	72,39
33	Papua Barat	959.617	220	311	531	502	237	739	722	548	1.270	132,34
34	Papua	3.379.302	180	189	369	752	412	1.164	932	601	1.533	45,36
Indonesia		268.074.565	1.302	1.366	2.668	9.439	5.332	14.771	10.741	6.698	17.439	6,51
Proporsi Jenis Kelamin			48,8	51,2		63,9	36,1		61,6	38,4		

Sumber: Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, per Mei 2020

Lampiran 58

KASUS BARU KUSTA CACAT TINGKAT 0, CACAT TINGKAT 2, DAN PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Kasus Baru									
			Penderita Kusta	Cacat Tingkat 0		Cacat Tingkat 2		Angka Cacat Tingkat 2 Per 1.000.000 Penduduk	Penderita Kusta Anak <15 Tahun		Penderita Kusta Anak <15 Tahun dengan Cacat Tingkat 2	
				Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	5.371.532	354	324	91,53	15	4,24	2,79	35	9,89	0	0,00
2	Sumatera Utara	14.562.549	192	126	65,63	36	18,75	2,47	16	8,33	0	0,00
3	Sumatera Barat	5.441.197	91	33	36,26	10	10,99	1,84	5	5,49	0	0,00
4	Riau	6.971.745	107	95	88,79	6	5,61	0,86	9	8,41	0	0,00
5	Jambi	3.624.579	94	68	72,34	16	17,02	4,41	6	6,38	1	16,67
6	Sumatera Selatan	8.470.683	235	216	91,91	15	6,38	1,77	16	6,81	1	6,25
7	Bengkulu	1.991.838	20	13	65,00	4	20,00	2,01	2	10,00	0	0,00
8	Lampung	8.447.737	145	131	90,34	9	6,21	1,07	9	6,21	1	11,11
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.488.792	46	45	97,83	0	0,00	0,00	4	8,70	0	0,00
10	Kepulauan Riau	2.189.653	48	45	93,75	3	6,25	1,37	10	20,83	0	0,00
11	DKI Jakarta	10.557.810	570	487	85,44	36	6,32	3,41	36	6,32	3	8,33
12	Jawa Barat	49.316.712	2.100	1.598	76,10	161	7,67	3,26	169	8,05	3	1,78
13	Jawa Tengah	34.718.204	1.336	1.111	83,16	116	8,68	3,34	59	4,42	1	1,69
14	DI Yogyakarta	3.842.932	60	51	85,00	3	5,00	0,78	1	1,67	0	0,00
15	Jawa Timur	39.698.631	2.940	2.237	76,09	320	10,88	8,06	202	6,87	10	4,95
16	Banten	12.927.316	927	775	83,60	81	8,74	6,27	69	7,44	1	1,45
17	Bali	4.336.923	120	116	96,67	4	3,33	0,92	6	5,00	0	0,00
18	Nusa Tenggara Barat	5.070.385	321	288	89,72	10	3,12	1,97	27	8,41	0	0,00
19	Nusa Tenggara Timur	5.456.203	389	339	87,15	19	4,88	3,48	24	6,17	0	0,00
20	Kalimantan Barat	5.069.127	80	60	75,00	14	17,50	2,76	6	7,50	2	33,33
21	Kalimantan Tengah	2.714.859	85	71	83,53	4	4,71	1,47	8	9,41	0	0,00
22	Kalimantan Selatan	4.244.096	151	129	85,43	4	2,65	0,94	10	6,62	0	0,00
23	Kalimantan Timur	3.721.389	195	179	91,79	7	3,59	1,88	12	6,15	0	0,00
24	Kalimantan Utara	742.245	39	36	92,31	2	5,13	2,69	3	7,69	0	0,00
25	Sulawesi Utara	2.506.981	590	570	96,61	4	0,68	1,60	50	8,47	0	0,00
26	Sulawesi Tengah	3.054.023	295	263	89,15	18	6,10	5,89	25	8,47	0	0,00
27	Sulawesi Selatan	8.851.240	1.152	958	83,16	79	6,86	8,93	86	7,47	0	0,00
28	Sulawesi Tenggara	2.704.737	214	195	91,12	8	3,74	2,96	5	2,34	0	0,00
29	Gorontalo	1.202.631	218	202	92,66	10	4,59	8,32	20	9,17	1	5,00
30	Sulawesi Barat	1.380.256	182	179	98,35	2	1,10	1,45	22	12,09	0	0,00
31	Maluku	1.802.870	431	398	92,34	22	5,10	12,20	61	14,15	1	1,64
32	Maluku Utara	1.255.771	909	875	96,26	13	1,43	10,35	201	22,11	0	0,00
33	Papua Barat	959.617	1.270	1.216	95,75	40	3,15	41,68	371	29,21	2	0,54
34	Papua	3.379.302	1.533	1.480	96,54	30	1,96	8,88	424	27,66	3	0,71
Indonesia		268.074.565	17.439	14.909	85,49	1.121	6,43	4,18	2.009	11,52	30	1,49

Sumber: Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, per Mei 2020

Lampiran 59

JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS DAN PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Kasus Terdaftar			Provinsi dengan Eliminasi Kusta	
			PB	MB	PB + MB	Angka Prevalensi Per 10.000 Penduduk	Status Eliminasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	5.371.532	36	303	339	0,63	Eliminasi
2	Sumatera Utara	14.562.549	7	195	202	0,14	Eliminasi
3	Sumatera Barat	5.441.197	12	59	71	0,13	Eliminasi
4	Riau	6.971.745	11	140	151	0,22	Eliminasi
5	Jambi	3.624.579	6	104	110	0,30	Eliminasi
6	Sumatera Selatan	8.470.683	15	228	243	0,29	Eliminasi
7	Bengkulu	1.991.838	1	19	20	0,10	Eliminasi
8	Lampung	8.447.737	7	186	193	0,23	Eliminasi
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.488.792	8	44	52	0,35	Eliminasi
10	Kepulauan Riau	2.189.653	6	61	67	0,31	Eliminasi
11	DKI Jakarta	10.557.810	132	908	1.040	0,99	Eliminasi
12	Jawa Barat	49.316.712	126	2.204	2.330	0,47	Eliminasi
13	Jawa Tengah	34.718.204	100	1.548	1.648	0,47	Eliminasi
14	DI Yogyakarta	3.842.932	11	83	94	0,24	Eliminasi
15	Jawa Timur	39.698.631	146	3.150	3.296	0,83	Eliminasi
16	Banten	12.927.316	45	1.008	1.053	0,81	Eliminasi
17	Bali	4.336.923	8	124	132	0,30	Eliminasi
18	Nusa Tenggara Barat	5.070.385	24	313	337	0,66	Eliminasi
19	Nusa Tenggara Timur	5.456.203	23	451	474	0,87	Eliminasi
20	Kalimantan Barat	5.069.127	6	135	141	0,28	Eliminasi
21	Kalimantan Tengah	2.714.859	10	116	126	0,46	Eliminasi
22	Kalimantan Selatan	4.244.096	12	162	174	0,41	Eliminasi
23	Kalimantan Timur	3.721.389	13	194	207	0,56	Eliminasi
24	Kalimantan Utara	742.245	1	42	43	0,58	Eliminasi
25	Sulawesi Utara	2.506.981	90	610	700	2,79	Belum Eliminasi
26	Sulawesi Tengah	3.054.023	10	251	261	0,85	Eliminasi
27	Sulawesi Selatan	8.851.240	112	1.018	1.130	1,28	Belum Eliminasi
28	Sulawesi Tenggara	2.704.737	16	230	246	0,91	Eliminasi
29	Gorontalo	1.202.631	7	212	219	1,82	Belum Eliminasi
30	Sulawesi Barat	1.380.256	17	184	201	1,46	Belum Eliminasi
31	Maluku	1.802.870	30	447	477	2,65	Belum Eliminasi
32	Maluku Utara	1.255.771	89	893	982	7,82	Belum Eliminasi
33	Papua Barat	959.617	567	1.010	1.577	16,43	Belum Eliminasi
34	Papua	3.379.302	186	1.416	1.602	4,74	Belum Eliminasi
Indonesia		268.074.565	1.890	18.048	19.938	0,74	Eliminasi

Sumber: Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI

Lampiran 59.b

**PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT (RELEASE FROM TREATMENT/RFT) MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019**

No	Provinsi	KUSTA (PB)		KUSTA (MB)	
		TAHUN 2018		TAHUN 2017	
		PENDERITA PB ^a	RFT PB (%)	PENDERITA MB ^b	RFT MB (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	84	97,5	224	93,1
2	Sumatera Utara	11	-	130	-
3	Sumatera Barat	7	83,3	48	78,8
4	Riau	16	75,0	122	78,8
5	Jambi	12	100,0	53	98,3
6	Sumatera Selatan	44	100,0	253	100,0
7	Bengkulu	3	100,0	24	95,8
8	Lampung	1	100,0	159	94,8
9	Kep. Bangka Belitung	9	53,8	41	50,0
10	Kepulauan Riau	6	100,0	28	68,6
11	DKI Jakarta	43	83,7	275	80,9
12	Jawa Barat	194	83,4	1.623	90,6
13	Jawa Tengah	133	85,7	1.491	89,1
14	DI Yogyakarta	7	0,0	77	78,3
15	Jawa Timur	304	86,6	3.017	90,4
16	Banten	87	96,6	842	90,3
17	Bali	9	90,9	68	92,2
18	Nusa Tenggara Barat	39	86,8	194	57,6
19	Nusa Tenggara Timur	45	-	360	-
20	Kalimantan Barat	10	80,0	51	69,2
21	Kalimantan Tengah	3	70,0	31	67,5
22	Kalimantan Selatan	11	83,3	94	17,7
23	Kalimantan Timur	22	70,8	128	87,3
24	Kalimantan Utara	9	100,0	37	75,7
25	Sulawesi Utara	58	85,0	406	83,2
26	Sulawesi Tengah	35	97,1	307	96,1
27	Sulawesi Selatan	95	93,9	941	83,9
28	Sulawesi Tenggara	31	86,5	294	79,1
29	Gorontalo	18	84,0	192	91,2
30	Sulawesi Barat	43	93,1	159	89,5
31	Maluku	62	-	336	-
32	Maluku Utara	122	86,3	453	77,2
33	Papua Barat	405	65,5	512	65,5
34	Papua	496	-	731	-
Indonesia		2.474	83,8	13.701	84,9

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI

Keterangan :

a = Penderita kusta PB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 1 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2018, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2017 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu

b= Penderita kusta MB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 2 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2018, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2016 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu

Lampiran 60

**PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B	Kabupaten/Kota Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	23	100,00
2	Sumatera Utara	33	18	54,55
3	Sumatera Barat	19	19	100,00
4	Riau	12	12	100,00
5	Jambi	11	11	100,00
6	Sumatera Selatan	17	17	100,00
7	Bengkulu	10	10	100,00
8	Lampung	15	15	100,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,00
10	Kepulauan Riau	7	7	100,00
11	DKI Jakarta	6	6	100,00
12	Jawa Barat	27	26	96,30
13	Jawa Tengah	35	35	100,00
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00
15	Jawa Timur	38	38	100,00
16	Banten	8	8	100,00
17	Bali	9	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	16	72,73
20	Kalimantan Barat	14	12	85,71
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,00
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,00
23	Kalimantan Timur	10	10	100,00
24	Kalimantan Utara	5	4	80,00
25	Sulawesi Utara	15	13	86,67
26	Sulawesi Tengah	13	13	100,00
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,00
28	Sulawesi Tenggara	17	15	88,24
29	Gorontalo	6	6	100,00
30	Sulawesi Barat	6	5	83,33
31	Maluku	11	8	72,73
32	Maluku Utara	10	10	100,00
33	Papua Barat	13	9	69,23
34	Papua	29	16	55,17
Indonesia		514	464	90,27

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI

Keterangan: target 2019 = 80%

Lampiran 61

**KASUS AFP (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA <15 TAHUN DAN PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jumlah Penduduk <15 Tahun	Jumlah Kasus Non Polio AFP	Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun	Spesimen adekuat (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	1.649.604	34,00	2,06	80,60
2	Sumatera Utara	4.523.805	102,00	2,25	95,10
3	Sumatera Barat	1.601.175	51,00	3,19	85,20
4	Riau	2.095.663	18,00	0,86	53,00
5	Jambi	962.311	41,00	4,26	93,20
6	Sumatera Selatan	2.364.478	68,00	2,88	81,50
7	Bengkulu	543.403	12,00	2,21	91,70
8	Lampung	2.309.825	47,00	2,03	67,40
9	Kep. Bangka Belitung	394.227	6,00	1,52	66,70
10	Kepulauan Riau	644.297	14,00	2,17	93,40
11	DKI Jakarta	2.614.791	73,00	2,79	51,60
12	Jawa Barat	12.830.749	243,00	1,89	84,60
13	Jawa Tengah	8.151.005	254,00	3,12	94,80
14	DI Yogyakarta	828.296	28,00	3,38	79,40
15	Jawa Timur	8.782.719	192,00	2,19	70,80
16	Banten	3.580.803	77,00	2,15	83,60
17	Bali	1.005.560	30,00	2,98	86,70
18	Nusa Tenggara Barat	1.478.602	3,00	0,20	50,00
19	Nusa Tenggara Timur	1.856.377	24,00	1,29	75,00
20	Kalimantan Barat	1.448.197	29,00	2,00	93,20
21	Kalimantan Tengah	735.273	4,00	0,54	37,50
22	Kalimantan Selatan	1.186.777	32,00	2,70	65,00
23	Kalimantan Timur	999.225	14,00	1,40	50,00
24	Kalimantan Utara	218.717	3,00	1,37	100,00
25	Sulawesi Utara	620.911	23,00	3,70	87,00
26	Sulawesi Tengah	861.489	11,00	1,28	84,70
27	Sulawesi Selatan	2.457.016	47,00	1,91	77,80
28	Sulawesi Tenggara	880.032	9,00	1,02	60,00
29	Gorontalo	328.641	7,00	2,13	70,00
30	Sulawesi Barat	427.010	14,00	3,28	93,40
31	Maluku	584.954	8,00	1,37	66,70
32	Maluku Utara	407.074	2,00	0,49	100,00
33	Papua Barat	285.230	22,00	7,71	52,20
34	Papua	977.647	64,00	6,55	59,40
Indonesia		70.635.883	1606	2,27	80

Lampiran 62.a

**JUMLAH PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019**

No	Provinsi	Difteri				Pertusis	Tetanus Neonatorum		Suspek Campak		
		Jumlah Kasus			Meninggal	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Meninggal	Jumlah Kasus		
		L	P	L+P		L+P	L+P		L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	11	23	34	0	10	0	0	487	485	972
2	Sumatera Utara	11	11	22	3	13	0	0	5	10	15
3	Sumatera Barat	1	2	3	0	2	0	0	47	77	124
4	Riau	2	3	5	0	13	0	0	42	64	106
5	Jambi	0	0	0	0	8	2	1	75	76	151
6	Sumatera Selatan	5	2	7	0	22	5	1	336	317	653
7	Bengkulu	0	0	0	0	4	0	0	6	2	8
8	Lampung	3	3	6	0	3	1	0	128	136	264
9	Kep. Bangka Belitung	1	1	2	1	5	0	0	38	35	73
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	17	19	36
11	DKI Jakarta	44	33	77	1	1	0	0	711	663	1374
12	Jawa Barat	60	51	111	10	11	0	0	315	360	675
13	Jawa Tengah	4	3	7	0	18	0	0	769	793	1562
14	DI Yogyakarta	0	2	2	0	4	0	0	346	379	725
15	Jawa Timur	96	82	178	1	9	0	0	354	369	723
16	Banten	11	16	27	2	5	0	0	63	87	150
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	23	33	56
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6
19	Nusa Tenggara Timur	0	2	2	0	0	0	0	2	6	8
20	Kalimantan Barat	7	13	20	2	6	5	0	88	59	147
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	9	0	0	1	4	5
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	3	0	0	70	63	133
23	Kalimantan Timur	4	5	9	0	0	1	0	74	66	140
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	48	42	90
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	1	0	0	6	14	20
26	Sulawesi Tengah	2	1	3	0	0	0	0	61	72	133
27	Sulawesi Selatan	2	3	5	0	6	1	0	158	152	310
28	Sulawesi Tenggara	1	3	4	2	33	0	0	18	14	32
29	Gorontalo	0	0	0	0	6	0	0	6	10	16
30	Sulawesi Barat	1	1	2	0	1	0	0	12	17	29
31	Maluku	0	0	0	0	2	0	0	1	2	3
32	Maluku Utara	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	2	0	2	1	33	2	0	11	7	18
34	Papua	0	1	1	0	135	0	0	35	27	62
Jumlah		268	261	529	23	386	17	2	4354	4465	8819
Case Fatality Rate (%)					4,35			11,76			
Insidens Rate Suspek Campak (1/100.000 penduduk)											3,29
Indonesia		268	261	529	23	386	17	2	4.354	4.465	8.819

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2020
Published : 04 April 2020

Lampiran 62.b

**JUMLAH KASUS TETANUS NEONATORUM DAN FAKTOR RISIKO
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019**

No	Provinsi	Total	Meninggal	Case Fatality Rate (%)	Faktor Risiko																								
					Pemeriksaan Kehamilan					Status Imunisasi				Penolong Persalinan				Perawatan Tali Pusat				Pemotongan Tali Pusat				Dirawat di RS			
					Dokter	Bidan/Perawat	Tradisional	Tanpa pemeriksaan	Tidak Diketahui	TT2 +	TT1	Tidak Dimunisasi	Tidak Diketahui	Dokter	Bidan/Perawat	Tradisional	Tidak Diketahui	Alkohol/Iodium	Tradisional	Lain-lain	Tidak Diketahui	Gunting	Bambu	Lain-lain	Tidak Diketahui	Ya	Tidak	Tidak Diketahui	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	
1	Aceh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	2	1	50	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	0	2	0	0
6	Sumatera Selatan	5	1	20	0	2	0	1	2	0	0	3	2	0	2	1	2	0	3	0	2	3	0	0	2	3	0	2	2
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	5	0	0	0	5	0	0	0	1	1	3	0	0	0	5	0	0	4	1	0	2	2	1	0	4	1	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0
34	Papua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indonesia		17	2	12	0	9	1	4	3	3	1	9	4	0	2	11	4	0	9	5	3	7	3	4	3	13	1	3	3

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2020
Published : 04 April 2020

Lampiran 62.c

**JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK PER BULAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jumlah Kasus per Bulan												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Aceh	162	106	215	97	50	33	62	66	49	44	81	7	972
2	Sumatera Utara	1	0	0	1	0	0	0	7	3	0	2	1	15
3	Sumatera Barat	14	16	14	8	9	3	14	5	6	12	14	9	124
4	Riau	9	8	7	11	10	10	5	7	9	18	10	2	106
5	Jambi	6	10	6	2	4	7	16	25	8	28	35	4	151
6	Sumatera Selatan	44	46	54	67	43	33	37	62	74	74	58	61	653
7	Bengkulu	0	3	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8
8	Lampung	25	25	22	37	20	22	23	17	30	18	19	6	264
9	Kep. Bangka Belitung	7	2	9	19	22	1	0	3	1	1	6	2	73
10	Kepulauan Riau	4	1	11	4	5	1	4	1	2	3	0	0	36
11	DKI Jakarta	142	128	91	87	99	71	96	121	146	179	116	98	1.374
12	Jawa Barat	100	64	51	48	58	19	47	43	78	69	77	21	675
13	Jawa Tengah	130	211	159	177	123	85	131	107	108	135	115	81	1.562
14	DI Yogyakarta	66	64	56	49	45	38	58	49	68	95	85	52	725
15	Jawa Timur	86	77	64	68	67	31	56	48	61	92	47	26	723
16	Banten	8	8	11	12	13	8	5	20	7	24	22	12	150
17	Bali	1	5	5	1	5	4	3	3	4	10	5	10	56
18	Nusa Tenggara Barat	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6
19	Nusa Tenggara Timur	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
20	Kalimantan Barat	16	8	4	11	7	2	0	41	14	21	2	21	147
21	Kalimantan Tengah	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
22	Kalimantan Selatan	5	5	23	7	6	6	7	0	12	4	20	38	133
23	Kalimantan Timur	23	25	16	6	9	7	6	7	7	14	18	2	140
24	Kalimantan Utara	8	15	9	9	2	6	8	10	8	6	1	8	90
25	Sulawesi Utara	1	0	1	3	3	2	1	0	2	4	2	1	20
26	Sulawesi Tengah	18	18	9	22	14	8	21	8	8	3	4	0	133
27	Sulawesi Selatan	34	45	24	38	21	15	15	43	26	23	18	8	310
28	Sulawesi Tenggara	4	5	4	0	1	0	0	0	2	8	8	0	32
29	Gorontalo	10	0	0	0	1	0	0	2	3	0	0	0	16
30	Sulawesi Barat	8	3	0	3	0	1	1	2	7	2	0	2	29
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	2	1	0	0	0	0	0	0	10	5	0	18
34	Papua	2	3	1	0	8	4	4	9	4	7	18	2	62
Indonesia		948	907	871	787	645	417	621	709	748	904	788	474	8.819

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2020
Published : 04 April 2020

Lampiran 62.d

**JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK DAN KASUS SUSPEK CAMPAK YANG DIVAKSINASI
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jumlah Kasus Menurut Kelompok Umur (Tahun)												Total Kasus	Total Divaksinasi	Proporsi Divaksinasi terhadap Kasus
		<1 Tahun		1-4 Tahun		5-9 Tahun		10-14 Tahun		> 14 Tahun		Tidak Diketahui				
		Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(11)	(12)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	24	40	45	260	19	313	9	123	15	170	3	66	972	115	11,83
2	Sumatera Utara	0	0	0	1	0	7	0	3	0	4	0	0	15	0	0,00
3	Sumatera Barat	8	8	18	26	20	30	10	18	23	41	0	1	124	79	63,71
4	Riau	9	9	14	23	12	31	5	17	7	20	0	6	106	47	44,34
5	Jambi	10	10	19	32	17	40	11	27	14	38	0	4	151	71	47,02
6	Sumatera Selatan	99	105	209	265	99	150	30	61	38	56	15	16	653	490	75,04
7	Bengkulu	1	1	3	3	1	2	1	1	1	1	0	0	8	7	87,50
8	Lampung	15	23	33	86	12	89	5	36	1	29	0	1	264	66	25,00
9	Kep. Bangka Belitung	9	12	13	19	6	29	1	3	4	8	0	2	73	33	45,21
10	Kepulauan Riau	2	2	10	13	12	12	2	2	6	7	0	0	36	32	88,89
11	DKI Jakarta	310	332	320	505	122	282	40	102	50	135	1	18	1.374	843	61,35
12	Jawa Barat	123	126	116	163	80	145	48	74	76	165	0	2	675	443	65,63
13	Jawa Tengah	187	187	200	363	90	375	34	213	20	419	0	5	1.562	531	33,99
14	DI Yogyakarta	112	112	136	213	31	167	11	76	6	152	0	5	725	296	40,83
15	Jawa Timur	105	122	55	194	3	142	3	105	1	123	0	37	723	167	23,10
16	Banten	37	37	41	52	11	24	1	9	14	28	0	0	150	104	69,33
17	Bali	8	9	11	17	5	12	0	3	3	15	0	0	56	27	48,21
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	2	6	0	0,00
19	Nusa Tenggara Timur	1	1	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	8	1	12,50
20	Kalimantan Barat	17	19	31	37	19	28	7	9	2	38	2	16	147	78	53,06
21	Kalimantan Tengah	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	5	1	20,00
22	Kalimantan Selatan	8	12	13	35	0	32	0	23	0	29	0	2	133	21	15,79
23	Kalimantan Timur	17	23	11	35	4	34	3	16	1	28	0	4	140	36	25,71
24	Kalimantan Utara	21	21	32	35	12	20	5	6	7	8	0	0	90	77	85,56
25	Sulawesi Utara	0	0	2	9	0	3	0	2	0	5	0	1	20	2	10,00
26	Sulawesi Tengah	17	17	29	38	13	20	15	21	21	31	0	6	133	95	71,43
27	Sulawesi Selatan	52	54	58	108	27	45	36	49	28	54	0	0	310	201	64,84
28	Sulawesi Tenggara	4	4	8	13	5	9	2	4	0	2	0	0	32	19	59,38
29	Gorontalo	0	0	0	1	0	5	0	5	0	5	0	0	16	0	0,00
30	Sulawesi Barat	1	2	2	4	0	6	0	3	0	14	0	0	29	3	10,34
31	Maluku	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0,00
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
33	Papua Barat	8	8	8	8	0	0	1	1	0	1	0	0	18	17	94,44
34	Papua	16	16	22	22	8	9	5	5	9	10	0	0	62	60	96,77
Indonesia		1.222	1.313	1.459	2.582	628	2.065	285	1.019	347	1.646	21	194	8.819	3.962	44,93

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2020

Ket: * Divaksinasi = telah menerima minimal satu dosis imunisasi campak

Published : 04 April 2020

Lampiran 62.e

**FREKUENSI KLB DAN JUMLAH KASUS PADA SUSPEK KLB CAMPAK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019**

No	Provinsi	Laporan KLB					
		Total KLB	Frekuensi KLB dengan Spesimen > 5	Frekuensi KLB dengan Investigasi Penuh	Frekuensi KLB dengan Laporan ke Pusat	Total Kasus	Meninggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	5	4	5	5	41	0
2	Sumatera Utara	1	1	1	1	6	0
3	Sumatera Barat	1	0	1	1	5	0
4	Riau	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	1	1	1	1	8	0
6	Sumatera Selatan	2	1	2	2	22	0
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	2	2	2	2	25	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	2	2	2	2	21	0
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	5	3	5	5	32	0
16	Banten	0	0	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	2	0	2	2	7	0
20	Kalimantan Barat	7	4	5	7	50	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	1	1	1	1	21	0
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	2	2	2	2	14	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0
34	Papua	1	0	0	1	8	0
Indonesia		32	21	29	32	260	0

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2020
Published : 04 April 2020

Lampiran 62.f

**DISTRIBUSI KLB CAMPAK BERDASARKAN KONFIRMASI LABORATORIUM
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019**

No	Provinsi	Konfirmasi Laboratorium											Tanpa Spesimen	
		Total Darah (Serum) Sampel	Campak		Rubella		Gabungan (Campak dan Rubella)		Negatif		Pending Lab			
			Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Aceh	34	1	11	2	11	2	19	0	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	6	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0
6	Sumatera Selatan	11	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22	0	0
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	14	2	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	21	1	5	0	0	0	0	1	16	0	0	0	0
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	32	0	0	1	10	0	0	3	15	1	7	0	0
16	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	7	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	29	1	6	0	0	0	0	2	16	2	11	2	17
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	6	0	0	0	0	0	0	1	21	0	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	14	0	0	0	0	0	0	2	14	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
Indonesia		184	7	54	4	27	2	19	9	82	6	48	3	25

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2020
Published : 04 April 2020

Lampiran 63

**KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DI DESA/KELURAHAN YANG DITANGANI < 24 JAM
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019**

No	Provinsi	KLB di Desa/Kelurahan		
		Jumlah	Ditangani <24 jam	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	34	18	53
2	Sumatera Utara	14	7	50
3	Sumatera Barat	9	7	78
4	Riau	1	1	100
5	Jambi	0	0	0
6	Sumatera Selatan	6	5	83
7	Bengkulu	3	2	67
8	Lampung	6	6	100
9	Kep. Bangka Belitung	8	7	88
10	Kepulauan Riau	1	1	100
11	DKI Jakarta	16	16	100
12	Jawa Barat	62	50	81
13	Jawa Tengah	13	10	77
14	DI Yogyakarta	2	1	50
15	Jawa Timur	37	13	35
16	Banten	5	5	100
17	Bali	3	2	67
18	Nusa Tenggara Barat	6	6	100
19	Nusa Tenggara Timur	8	4	50
20	Kalimantan Barat	9	4	44
21	Kalimantan Tengah	7	7	100
22	Kalimantan Selatan	4	1	25
23	Kalimantan Timur	4	3	75
24	Kalimantan Utara	6	5	83
25	Sulawesi Utara	2	2	100
26	Sulawesi Tengah	6	3	50
27	Sulawesi Selatan	14	11	79
28	Sulawesi Tenggara	3	3	100
29	Gorontalo	3	3	100
30	Sulawesi Barat	4	3	75
31	Maluku	2	2	100
32	Maluku Utara	2	2	100
33	Papua Barat	1	1	100
34	Papua	3	2	67
Indonesia		304	213	70

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2020

Lampiran 63.b

JUMLAH KEJADIAN KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA DAN WAKTU KEJADIAN DI INDONESIA
TAHUN 2019

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian												Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Banjir	19	9	15	14	8	15	1	1	0	1	2	12	97
2	Letusan Gunung Api	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4
3	Gempa Bumi	0	1	1	1	0	1	1	5	4	0	3	0	17
4	Gempa Bumi dan Tsunami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tanah Longsor	1	5	1	4	3	2	0	0	0	0	0	2	18
6	Banjir Bandang	1	2	3	3	0	0	1	1	0	0	2	4	17
7	Kekeringan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Angin Puting Beliung	7	5	13	0	3	0	1	1	4	7	12	12	65
9	Gelombang Pasang/Badai	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	4
10	Banjir dan Tanah Longsor	3	2	8	8	2	2	0	0	0	0	0	5	30
11	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Alam		31	26	42	32	16	20	4	9	8	8	19	37	252
1	Kebakaran	3	3	3	0	4	2	6	8	9	6	8	0	52
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	3	4	4	4	0	3	17	49	5	0	0	0	89
3	Kecelakaan Transportasi Darat	0	2	0	1	0	1	0	0	1	0	1	2	8
4	Kecelakaan Transportasi Laut-Udara	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0	5
5	Kecelakaan Industri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Penyakit	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
7	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Keracunan	1	3	0	1	5	3	0	4	5	3	3	4	32
8	Gagal Teknologi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
9	Wabah Penyakit (Epidemi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Non Alam		6	11	8	6	4	7	23	59	16	6	9	2	191
1	Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3
2	Aksi Teror dan Sabotase	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Jumlah Bencana Sosial		0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	2	0	5
Total Jumlah Bencana 2019		37	37	51	38	20	28	27	68	24	15	30	39	448

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 63.c

**JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA
TAHUN 2019**

No	Jenis Bencana	Frekuensi	Jumlah Provinsi	Meninggal	Luka Berat/ Rawat Inap	Luka Ringan/Rawat Jalan	Hilang	Pengungsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Banjir	97	27	43	183	19.661	5	104.821
2	Letusan Gunung Api	4	3	0	0	713	0	286
3	Gempa Bumi	17	9	64	147	7.732	0	306.412
4	Gempa Bumi dan Tsunami	0	0	0	0	0	0	0
5	Tanah Longsor	18	9	34	20	2	20	1.513
6	Banjir Bandang	17	8	109	157	11.921	92	19.164
7	Kekeringan	0	0	0	0	0	0	0
8	Angin Puting Beliung	65	18	4	36	146	0	6.238
9	Gelombang Pasang/Badai	4	4	0	0	31	0	402
10	Banjir dan Tanah Longsor	30	15	98	87	3.648	6	8.316
11	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Alam		252		352	630	43.854	123	447.152
1	Kebakaran	52	12	3	14	3.085	0	10.800
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	89	7	0	0	1.184.968	0	132
3	Kecelakaan Transportasi Darat	8	5	69	54	184	6	0
4	Kecelakaan Transportasi Laut-Udara	5	4	34	56	147	6	0
5	Kecelakaan Industri	0	0	0	0	0	0	0
6	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Penyakit	3	2	8	7	846	0	0
7	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Keracunan	32	14	10	1.158	1.959	0	0
8	Gagal Teknologi	2	1	1	0	118	0	0
9	Wabah Penyakit (Epidemi)	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Non Alam		191		125	1.289	1.191.307	12	10.932
1	Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial	3	2	4	10	2	0	4.536
2	Aksi Teror dan Sabotase	2	1	3	8	0	0	0
Jumlah Bencana Sosial		5		7	18	2	0	4.536
Indonesia		448		484	1.937	1.235.163	135	462.620

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 63.d

JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	Frekuensi	Meninggal	Luka Berat/ Rawat Inap	Luka Ringan/ Rawat Jalan	Hilang	Pengungsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	9	0	0	0	0	940
2	Sumatera Utara	10	6	165	225	5	190
3	Sumatera Barat	15	7	39	2.053	4	1.956
4	Riau	31	0	0	314.861	0	249
5	Jambi	15	0	1	262.832	0	461
6	Sumatera Selatan	22	35	21	302.599	6	1.130
7	Bengkulu	11	25	4	688	4	812
8	Lampung	5	2	1	5	0	1.920
9	Kepulauan Bangka Belitung	2	0	0	1	0	128
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	33	3	9	73	0	11.191
12	Jawa Barat	45	40	152	605	0	7.358
13	Jawa Tengah	38	3	309	457	0	8.318
14	DI Yogyakarta	4	3	3	14	2	162
15	Jawa Timur	36	34	136	7.316	2	9.767
16	Banten	11	5	27	120	1	1.439
17	Bali	3	0	6	61	0	20
18	Nusa Tenggara Barat	5	7	19	874	0	143
19	Nusa Tenggara Timur	7	9	23	182	0	744
20	Kalimantan Barat	20	1	2	185.906	0	1.834
21	Kalimantan Tengah	17	0	322	55.481	0	0
22	Kalimantan Selatan	24	2	0	67.417	2	988
23	Kalimantan Timur	8	0	0	2	0	20.061
24	Kalimantan Utara	1	0	1	0	0	0
25	Sulawesi Utara	9	28	26	2.045	18	1.501
26	Sulawesi Tengah	10	4	0	6	1	5.317
27	Sulawesi Selatan	21	82	241	4.297	1	18.424
28	Sulawesi Tenggara	8	16	100	9.196	3	45.854
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	4	0	1	49	0	258
31	Maluku	12	43	144	4.755	0	248.339
32	Maluku Utara	4	14	29	2.497	0	54.615
33	Papua Barat	1	0	0	0	0	225
34	Papua	7	115	156	10.546	86	18.276
Indonesia		448	484	1.937	1.235.163	135	462.620

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 64.f

**JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA DAN CAPAIAN PEMERIKSAAN JAMAAH HAJI SEBELUM KEBERANGKATAN MENURUT PROVINSI TEMPAT PEMERIKSAAN
TAHUN 2018-2019**

No	Provinsi	JUMLAH JEMAAH HAJI SEBELUM KEBERANGKATAN		CAPAIAN PEMERIKSAAN JAMAAH HAJI SEBELUM KEBERANGKATAN	
		2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	4.464	4.490	103,28	99,57
2	Sumatera Utara	8.401	8.386	103,16	100,55
3	Sumatera Barat	4.702	4.668	102,87	96,58
4	Riau	5.093	5.211	104,19	99,38
5	Jambi	2.933	2.957	102,16	96,43
6	Sumatera Selatan	7.130	7.132	102,37	101,74
7	Bengkulu	1.641	1.669	100,98	95,26
8	Lampung	7.139	7.146	102,08	100,12
9	Kep. Bangka Belitung	1.078	1.103	101,87	94,01
10	Kepulauan Riau	1.280	1.320	100,39	96,41
11	DKI Jakarta	8.070	7.911	103,33	98,96
12	Jawa Barat	39.105	38.527	102,76	102,57
13	Jawa Tengah	30.803	30.530	101,67	100,79
14	DI Yogyakarta	3.227	3.197	103,13	98,39
15	Jawa Timur	35.684	35.872	102,23	103,04
16	Banten	9.573	9.648	102,37	100,91
17	Bali	701	710	102,29	87,67
18	Nusa Tenggara Barat	4.560	4.649	102,33	99,65
19	Nusa Tenggara Timur	659	686	102,09	88,91
20	Kalimantan Barat	2.547	2.579	101,78	98,41
21	Kalimantan Tengah	1.628	1.663	103,90	99,38
22	Kalimantan Selatan	3.885	3.909	104,57	95,14
23	Kalimantan Timur	2.601	2.687	101,81	97,96
24	Kalimantan Utara	423	394	96,16	73,07
25	Sulawesi Utara	698	728	99,58	97,35
26	Sulawesi Tengah	2.001	2.043	102,15	98,80
27	Sulawesi Selatan	7.412	7.499	103,11	99,69
28	Sulawesi Tenggara	2.035	2.079	101,88	97,35
29	Gorontalo	991	1.005	102,24	95,33
30	Sulawesi Barat	1.464	1.484	101,99	96,22
31	Maluku	1.080	1.089	100,09	98,74
32	Maluku Utara	1.085	1.101	101,85	101,21
33	Papua Barat	726	729	101,38	93,27
34	Papua	1.067	1.107	101,39	100,22
Indonesia		205.886	205.908	102,44	100,35

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2020

Keterangan:

- Kalimantan Utara masih bergabung dengan Kalimantan Timur (data provinsi diambil dari Siskohat Kemenag).
- Cakupan / % dari jumlah data hasil pemeriksaan di Siskohatkes dibagi kuota jemaah haji per provinsi dari Kemenag
- Cakupan tahun 2018 lebih dari 100% karena ada jemaah cadangan dan jemaah pengganti. Setiap jemaah diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan guna menetapkan status Istitaah kesehatan. Istitaah kesehatan menjadi salahsatu syarat dalam pelunasan BPIH

Lampiran 64.g

**PENYAKIT TERBANYAK RAWAT JALAN KLOTER HAJI
TAHUN 2019**

No	Nama Penyakit	Kode ICD-X	Jumlah Kasus	% Rawat Jalan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Acute nasopharyngitis [common cold]	J00	81.312	17,49
2	Essential (primary) hypertension	I10	46.635	12,26
3	Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified	J06	37.192	7,44
4	Myalgia	M79.1	32.573	7,32
5	Cough	R05	30.984	6,98
6	Acute upper respiratory infection, unspecified	J06.9	30.030	6,80
7	Acute pharyngitis	J02	24.285	5,56
8	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	E11	15.679	4,52
9	Influenza, virus not identified	J11	12.780	3,59
10	Dyspepsia	K30	11.077	2,54

Sumber: Siskohatkes, Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 64.h

**JUMLAH JEMAAH HAJI WAFAT DI ARAB SAUDI BERDASARKAN PENYEBAB PENYAKIT
TAHUN 2019**

No	Sebab Penyakit	Pra Armina		Armina		Pasca Armina		Total Arab Saudi	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Infectious And Parasitic Diseases		0,0	1	1,2	3	1,0	4	0,8
2	Neoplasms		0,0	1	1,2	7	2,3	8	1,6
3	Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		0,0	1	1,2	1	0,3	2	0,4
4	Endocrine, nutritional and metabolic diseases	7	7,1	5	6,0	7	2,3	19	3,9
5	Diseases of the nervous system	2	2,0		0,0	1	0,3	3	0,6
6	Diseases of the circulatory system	36	36,4	25	30,1	83	26,7	144	29,2
7	Diseases of the respiratory system	19	19,2	16	19,3	85	27,3	120	24,3
8	Diseases of the digestive system	2	2,0	4	4,8	6	1,9	12	2,4
9	Diseases of the genitourinary system		0,0	2	2,4	5	1,6	7	1,4
10	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified	32	32,3	25	30,1	110	35,4	167	33,9
11	Injury, poisoning and certain other consequences of external causes	1	1,0	3	3,6	2	0,6	6	1,2
12	External causes of morbidity and mortality		0,0		0,0	1	0,3	1	0,2
13	Unintentional Injuries		0,0		0,0		0,0	0	0,0
Jumlah		99	100,0	83	100,0	311	100,0	493	100,0

Sumber: Siskohatkes, Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 64.i

**JUMLAH DAN PROPORSI JEMAAH HAJI WAFAT
TAHUN 2015-2019**

No	Provinsi	2015			2016			2017			2018			2019		
		Jemaah	Jemaah Wafat	Proporsi Wafat (%)	Jemaah	Jemaah Wafat	Proporsi Wafat (%)	Jemaah	Jemaah Wafat	Proporsi Wafat (%)	Jemaah	Jemaah Wafat	Proporsi Wafat (%)	Jemaah	Jemaah Wafat	Proporsi Wafat (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	3.186	22	0,69	3.191	11	0,34	4.445	24	0,54	4.464	14	0,31	4.617	17	0,37
2	Sumatera Utara	6.583	23	0,35	6.593	15	0,23	8.390	28	0,33	8.401	18	0,21	8.625	23	0,27
3	Sumatera Barat	3.626	11	0,30	3.628	8	0,22	4.654	17	0,37	4.702	2	0,04	4.831	9	0,19
4	Riau	4.075	14	0,34	4.078	8	0,20	5.105	18	0,35	5.093	6	0,12	5.360	14	0,26
5	Jambi	2.119	11	0,52	2.128	4	0,19	2.946	20	0,68	2.933	7	0,24	3.044	20	0,66
6	Sumatera Selatan	5.125	11	0,21	5.133	15	0,29	7.099	21	0,30	7.130	14	0,20	7.618	11	0,14
7	Bengkulu	1.301	2	0,15	1.300	3	0,23	1.651	10	0,61	1.641	7	0,43	1.672	7	0,42
8	Lampung	5.047	15	0,30	5.053	13	0,26	7.134	26	0,36	7.139	14	0,20	7.424	20	0,27
9	Kep. Bangka Belitung	742	4	0,54	740	2	0,27	1.078	3	0,28	1.078	2	0,19	1.109	3	0,27
10	Kepulauan Riau	806	1	0,12	789	1	0,13	1.301	4	0,31	1.280	2	0,16	1.312	5	0,38
11	DKI Jakarta	5.652	16	0,28	5.825	9	0,15	8.033	10	0,12	8.070	13	0,16	9.214	16	0,17
12	Jawa Barat	30.369	158	0,52	30.264	53	0,18	39.218	93	0,24	39.105	56	0,14	41.293	78	0,19
13	Jawa Tengah	23.969	72	0,30	23.966	47	0,20	30.689	100	0,33	30.803	59	0,19	31.546	72	0,23
14	DI Yogyakarta	2.507	7	0,28	2.512	4	0,16	3.200	4	0,13	3.227	8	0,25	3.839	7	0,18
15	Jawa Timur	27.446	120	0,44	27.394	64	0,23	35.349	130	0,37	35.684	63	0,18	38.672	81	0,21
16	Banten	6.894	19	0,28	6.852	8	0,12	9.609	23	0,24	9.573	15	0,16	10.142	23	0,23
17	Bali	513	2	0,39	514	2	0,39	706	4	0,57	701	1	0,14	724	0	0,00
18	Nusa Tenggara Barat	3.642	18	0,49	3.632	8	0,22	4.547	17	0,37	4.560	10	0,22	4.672	8	0,17
19	Nusa Tenggara Timur	520	1	0,19	516	4	0,78	668	2	0,30	659	4	0,61	673	2	0,30
20	Kalimantan Barat	1.877	20	1,07	1.880	2	0,11	2.544	11	0,43	2.547	10	0,39	2.605	8	0,31
21	Kalimantan Tengah	1.091	10	0,92	1.093	4	0,37	1.619	4	0,25	1.628	2	0,12	1.661	8	0,48
22	Kalimantan Selatan	3.074	8	0,26	3.085	6	0,19	3.876	14	0,36	3.885	5	0,13	4.052	8	0,20
23	Kalimantan Timur	2.274	6	0,26	2.273	3	0,13	3.027	4	0,13	2.601	4	0,15	2.694	6	0,22
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423	2	0,47	424	3	0,71
25	Sulawesi Utara	555	6	1,08	558	3	0,54	721	6	0,83	698	3	0,43	712	2	0,28
26	Sulawesi Tengah	1.417	3	0,21	1.421	2	0,14	2.014	4	0,20	2.001	1	0,05	2.071	8	0,39
27	Sulawesi Selatan	5.830	12	0,21	5.855	10	0,17	7.385	12	0,16	7.412	11	0,15	7.565	13	0,17
28	Sulawesi Tenggara	1.361	1	0,07	1.359	1	0,07	2.038	2	0,10	2.035	2	0,10	2.106	4	0,19
29	Gorontalo	723	1	0,14	715	2	0,28	992	2	0,20	991	2	0,20	1.030	3	0,29
30	Sulawesi Barat	1.163	12	1,03	1.164	2	0,17	1.472	3	0,20	1.464	2	0,14	1.487	2	0,13
31	Maluku	568	3	0,53	571	0	0,00	1.080	7	0,65	1.080	3	0,28	1.084	4	0,37
32	Maluku Utara	856	1	0,12	858	3	0,35	1.088	8	0,74	1.085	1	0,09	1.093	5	0,46
33	Papua Barat	566	2	0,35	569	0	0,00	724	0	0,00	726	1	0,14	729	2	0,27
34	Papua	855	3	0,35	850	1	0,12	1.081	2	0,19	1.067		0,00	1.089	1	0,09
Indonesia		156.332	615	0,39	156.359	318	0,20	205.483	633	0,31	205.886	364	0,18	216.789	493	0,23

Sumber: Siskohatkes, Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 64.j

**JUMLAH JAMAAH HAJI YANG BERANGKAT (SETELAH OPERASIONAL HAJI)
TAHUN 2019**

No	Provinsi	2019
(1)	(2)	(3)
1	Aceh	4.650
2	Sumatera Utara	8.549
3	Sumatera Barat	5.037
4	Riau	5.386
5	Jambi	3.292
6	Sumatera Selatan	7.255
7	Bengkulu	1.940
8	Lampung	7.415
9	Kep. Bangka Belitung	1.262
10	Kepulauan Riau	1.516
11	DKI Jakarta	8.227
12	Jawa Barat	39.477
13	Jawa Tengah	31.134
14	DI Yogyakarta	3.570
15	Jawa Timur	35.971
16	Banten	9.912
17	Bali	1.060
18	Nusa Tenggara Barat	4.952
19	Nusa Tenggara Timur	969
20	Kalimantan Barat	2.764
21	Kalimantan Tengah	1.943
22	Kalimantan Selatan	4.158
23	Kalimantan Timur	2.878
24	Kalimantan Utara	780
25	Sulawesi Utara	894
26	Sulawesi Tengah	2.246
27	Sulawesi Selatan	7.827
28	Sulawesi Tenggara	2.358
29	Gorontalo	1.191
30	Sulawesi Barat	1.784
31	Maluku	1.280
32	Maluku Utara	1.335
33	Papua Barat	960
34	Papua	1.405
Indonesia		215.377

Sumber: Siskohatkes, Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 65.a

KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Jumlah Kasus	Incidence Rate per 100.000 Penduduk	Meninggal	CFR (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	5.371.532	2.386	44,42	6	0,25
2	Sumatera Utara	14.562.549	7.731	53,09	38	0,49
3	Sumatera Barat	5.441.197	2.263	41,59	9	0,40
4	Riau	6.971.745	4.126	59,18	30	0,73
5	Jambi	3.624.579	2.158	59,54	16	0,74
6	Sumatera Selatan	8.470.683	2.799	33,04	16	0,57
7	Bengkulu	1.991.838	1.479	74,25	13	0,88
8	Lampung	8.447.737	5.611	66,42	17	0,30
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.488.792	1.012	67,97	10	0,99
10	Kepulauan Riau	2.189.653	1.865	85,17	11	0,59
11	DKI Jakarta	10.557.810	8.705	82,45	0	0,00
12	Jawa Barat	49.316.712	23.483	47,62	97	0,41
13	Jawa Tengah	34.718.204	9.124	26,28	123	1,35
14	DI Yogyakarta	3.842.932	3.301	85,90	6	0,18
15	Jawa Timur	39.698.631	18.397	46,34	186	1,01
16	Banten	12.927.316	2.915	22,55	14	0,48
17	Bali	4.336.923	4.979	114,80	5	0,10
18	Nusa Tenggara Barat	5.070.385	2.971	58,60	16	0,54
19	Nusa Tenggara Timur	5.456.203	4.059	74,39	55	1,36
20	Kalimantan Barat	5.069.127	2.798	55,20	21	0,75
21	Kalimantan Tengah	2.714.859	1.616	59,52	24	1,49
22	Kalimantan Selatan	4.244.096	2.381	56,10	15	0,63
23	Kalimantan Timur	3.721.389	6.723	180,66	44	0,65
24	Kalimantan Utara	742.245	1.774	239,00	15	0,85
25	Sulawesi Utara	2.506.981	2.381	94,97	27	1,13
26	Sulawesi Tengah	3.054.023	1.947	63,75	17	0,87
27	Sulawesi Selatan	8.851.240	3.265	36,89	19	0,58
28	Sulawesi Tenggara	2.704.737	1.479	54,68	8	0,54
29	Gorontalo	1.202.631	1.221	101,53	23	1,88
30	Sulawesi Barat	1.380.256	796	57,67	8	1,01
31	Maluku	1.802.870	236	13,09	5	2,12
32	Maluku Utara	1.255.771	1.195	95,16	16	1,34
33	Papua Barat	959.617	354	36,89	3	0,85
34	Papua	3.379.302	597	17,67	6	1,01
Indonesia		268.074.565	138.127	51,53	919	0,67

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

Lampiran 65.b

**JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TERJANGKIT DEMAM BERDARAH DENGUE
MENURUT PROVINSI TAHUN 2017 - 2019**

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota			Kabupaten/Kota Terjangkit					
		2017	2018	2019	2017		2018		2019	
					Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	23	23	23	23	100,00	22	95,65	23	100,00
2	Sumatera Utara	33	33	33	30	90,91	32	96,97	32	96,97
3	Sumatera Barat	19	19	19	19	100,00	19	100,00	19	100,00
4	Riau	12	12	12	12	100,00	12	100,00	12	100,00
5	Jambi	11	11	11	9	81,82	11	100,00	11	100,00
6	Sumatera Selatan	17	17	17	17	100,00	17	100,00	17	100,00
7	Bengkulu	10	10	10	10	100,00	10	100,00	10	100,00
8	Lampung	15	15	15	15	100,00	15	100,00	15	100,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	7	7	100,00	7	100,00	7	100,00
10	Kepulauan Riau	7	7	7	5	71,43	4	57,14	7	100,00
11	DKI Jakarta	6	6	6	5	83,33	5	83,33	6	100,00
12	Jawa Barat	27	27	27	20	74,07	21	77,78	27	100,00
13	Jawa Tengah	35	35	35	35	100,00	35	100,00	35	100,00
14	DI Yogyakarta	5	5	5	5	100,00	5	100,00	5	100,00
15	Jawa Timur	38	38	38	38	100,00	37	97,37	38	100,00
16	Banten	8	8	8	8	100,00	7	87,50	8	100,00
17	Bali	9	9	9	9	100,00	9	100,00	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	10	8	80,00	9	90,00	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	22	22	14	63,64	13	59,09	22	100,00
20	Kalimantan Barat	14	14	14	14	100,00	14	100,00	14	100,00
21	Kalimantan Tengah	14	14	14	14	100,00	14	100,00	14	100,00
22	Kalimantan Selatan	13	13	13	12	92,31	12	92,31	13	100,00
23	Kalimantan Timur	10	10	10	10	100,00	10	100,00	10	100,00
24	Kalimantan Utara	5	5	5	4	80,00	5	100,00	5	100,00
25	Sulawesi Utara	15	15	15	13	86,67	15	100,00	15	100,00
26	Sulawesi Tengah	13	13	13	13	100,00	11	84,62	13	100,00
27	Sulawesi Selatan	24	24	24	21	87,50	23	95,83	24	100,00
28	Sulawesi Tenggara	17	17	17	11	64,71	12	70,59	16	94,12
29	Gorontalo	6	6	6	6	100,00	6	100,00	6	100,00
30	Sulawesi Barat	6	6	6	6	100,00	5	83,33	6	100,00
31	Maluku	11	11	11	7	63,64	6	54,55	7	63,64
32	Maluku Utara	10	10	10	2	20,00	4	40,00	8	80,00
33	Papua Barat	13	13	13	4	30,77	4	30,77	7	53,85
34	Papua	29	29	29	8	27,59	9	31,03	10	34,48
Indonesia		514	514	514	434	84,44	440	85,60	481	93,58

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 66.a

**KESAKITAN AKIBAT MALARIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2019**

No	Provinsi	Penduduk	Malaria										
			Suspek	Konfirmasi Laboratorium			% Konfirmasi Laboratorium	Positif			Pengobatan Standar	% Pengobatan Standar	Annual Paracite Incidence (API) per 1.000 Penduduk
				Mikrosko pis	Rapid Diagnosti c Test (RDT)	Total		L	P	L+P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	5.371.532	55.026	31.947	22.600	54.547	99,1	84	8	92	91	98,9	0,02
2	Sumatera Utara	14.562.549	38.220	13.398	17.730	31.128	81,4	590	443	1.033	977	94,6	0,07
3	Sumatera Barat	5.441.197	10.065	6.226	3.013	9.239	91,8	160	156	316	312	98,7	0,06
4	Riau	6.971.745	8.792	3.425	5.342	8.767	99,7	100	37	137	133	97,1	0,02
5	Jambi	3.624.579	50.273	29.974	19.862	49.836	99,1	43	23	66	66	100,0	0,02
6	Sumatera Selatan	8.470.683	35.912	21.417	14.485	35.902	100,0	355	247	602	594	98,7	0,07
7	Bengkulu	1.991.838	28.015	17.187	10.825	28.012	100,0	50	32	82	78	95,1	0,04
8	Lampung	8.447.737	49.975	29.617	20.223	49.840	99,7	1.009	512	1.521	1.469	96,6	0,18
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.488.792	52.894	33.168	18.947	52.115	98,5	98	32	130	127	97,7	0,09
10	Kepulauan Riau	2.189.653	3.555	1.804	973	2.777	78,1	85	54	139	137	98,6	0,06
11	DKI Jakarta	10.557.810	91	89	2	91	100,0	83	8	91	70	76,9	0,01
12	Jawa Barat	49.316.712	25.521	20.277	934	21.211	83,1	396	40	436	421	96,6	0,01
13	Jawa Tengah	34.718.204	42.832	38.617	1.727	40.344	94,2	271	26	297	292	98,3	0,01
14	DI Yogyakarta	3.842.932	7.650	7.620	30	7.650	100,0	12	0	12	12	100,0	0,00
15	Jawa Timur	39.698.631	30.533	25.292	224	25.516	83,6	602	34	636	614	96,5	0,02
16	Banten	12.927.316	655	86	561	647	98,8	32	1	33	30	90,9	0,00
17	Bali	4.336.923	10.725	8.922	1	8.923	83,2	26	6	32	26	81,3	0,01
18	Nusa Tenggara Barat	5.070.385	151.038	106.397	27.580	133.977	88,7	606	348	954	936	98,1	0,19
19	Nusa Tenggara Timur	5.456.203	540.372	455.186	80.410	535.596	99,1	6.967	5.942	12.909	10.334	80,1	2,37
20	Kalimantan Barat	5.069.127	33.320	16.932	14.064	30.996	93,0	15	7	22	13	59,1	0,00
21	Kalimantan Tengah	2.714.859	24.590	10.867	11.915	22.782	92,6	170	32	202	187	92,6	0,07
22	Kalimantan Selatan	4.244.096	18.177	10.082	7.973	18.055	99,3	744	117	861	851	98,8	0,20
23	Kalimantan Timur	3.721.389	15.384	7.349	6.546	13.895	90,3	1.913	152	2.065	1.676	81,2	0,55
24	Kalimantan Utara	742.245	5.337	1.947	2.720	4.667	87,4	54	2	56	42	75,0	0,08
25	Sulawesi Utara	2.506.981	14.318	5.620	8.183	13.803	96,4	321	180	501	468	93,4	0,20
26	Sulawesi Tengah	3.054.023	46.097	12.470	30.594	43.064	93,4	105	74	179	160	89,4	0,06
27	Sulawesi Selatan	8.851.240	23.359	13.240	9.291	22.531	96,5	715	146	861	768	89,2	0,10
28	Sulawesi Tenggara	2.704.737	20.975	9.358	9.319	18.677	89,0	585	227	812	784	96,6	0,30
29	Gorontalo	1.202.631	25.682	17.344	8.218	25.562	99,5	20	12	32	32	100,0	0,03
30	Sulawesi Barat	1.380.256	23.566	11.685	11.699	23.384	99,2	189	5	194	194	100,0	0,14
31	Maluku	1.802.870	83.669	60.611	21.648	82.259	98,3	769	533	1.302	972	74,7	0,72
32	Maluku Utara	1.255.771	58.817	44.295	14.169	58.464	99,4	322	258	580	550	94,8	0,46
33	Papua Barat	959.617	158.068	124.317	33.535	157.852	99,9	4.156	2.923	7.079	6.907	97,6	7,38
34	Papua	3.379.302	878.483	760.759	112.758	873.517	99,4	121.410	94.970	216.380	204.053	94,3	64,03
Indonesia		268.074.565	2.571.986	1.957.525	548.101	2.505.626	97,4	143.057	107.587	250.644	234.381	93,5	0,93

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Ket: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

Lampiran 66.b

JUMLAH KAB/KOTA DENGAN API<1 DAN YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Endemisitas Malaria			
		Bebas Malaria (Sudah Mendapat Sertifikat Eliminasi)	Endemis Rendah (API<1)	Endemis Sedang (API 1-5)	Endemis Tinggi (API >5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	21	2	0	0
2	Sumatera Utara	21	11	1	0
3	Sumatera Barat	17	1	1	0
4	Riau	10	2	0	0
5	Jambi	7	4	0	0
6	Sumatera Selatan	8	9	0	0
7	Bengkulu	3	7	0	0
8	Lampung	11	3	1	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	6	1	0	0
10	Kepulauan Riau	3	3	1	0
11	DKI Jakarta	6	0	0	0
12	Jawa Barat	23	4	0	0
13	Jawa Tengah	33	2	0	0
14	DI Yogyakarta	4	1	0	0
15	Jawa Timur	38	0	0	0
16	Banten	6	2	0	0
17	Bali	9	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	3	7	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	15	4	3
20	Kalimantan Barat	3	11	0	0
21	Kalimantan Tengah	10	4	0	0
22	Kalimantan Selatan	7	6	0	0
23	Kalimantan Timur	3	5	1	1
24	Kalimantan Utara	1	4	0	0
25	Sulawesi Utara	6	9	0	0
26	Sulawesi Tengah	5	8	0	0
27	Sulawesi Selatan	20	4	0	0
28	Sulawesi Tenggara	9	7	1	0
29	Gorontalo	2	4	0	0
30	Sulawesi Barat	5	1	0	0
31	Maluku	0	8	3	0
32	Maluku Utara	0	8	2	0
33	Papua Barat	0	3	6	4
34	Papua	0	4	10	15
Indonesia		300	160	31	23

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 66.c

ANNUAL PARASITE INSIDENCE (API) MALARIA PER 1.000 PENDUDUK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2016- 2019

No	Provinsi	API			
		2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	0,05	0,06	0,02	0,02
2	Sumatera Utara	0,27	0,17	0,09	0,07
3	Sumatera Barat	0,12	0,10	0,09	0,06
4	Riau	0,03	0,03	0,01	0,02
5	Jambi	0,14	0,05	0,05	0,02
6	Sumatera Selatan	0,28	0,11	0,08	0,07
7	Bengkulu	1,40	0,53	0,16	0,04
8	Lampung	0,40	0,52	0,38	0,18
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,11	0,07	0,16	0,09
10	Kepulauan Riau	0,36	0,17	0,11	0,06
11	DKI Jakarta	0,01	0,01	0,01	0,01
12	Jawa Barat	0,01	0,01	0,00	0,01
13	Jawa Tengah	0,03	0,03	0,02	0,01
14	DI Yogyakarta	0,03	0,02	0,01	0,00
15	Jawa Timur	0,01	0,00	0,01	0,02
16	Banten	0,01	0,00	0,00	0,00
17	Bali	0,00	0,01	0,02	0,01
18	Nusa Tenggara Barat	0,24	0,15	0,34	0,19
19	Nusa Tenggara Timur	5,40	5,76	3,42	2,37
20	Kalimantan Barat	0,06	0,03	0,02	0,00
21	Kalimantan Tengah	0,19	0,29	0,25	0,07
22	Kalimantan Selatan	0,52	0,28	0,20	0,20
23	Kalimantan Timur	0,35	0,44	0,63	0,55
24	Kalimantan Utara	0,03	0,09	0,04	0,08
25	Sulawesi Utara	0,72	0,37	0,25	0,20
26	Sulawesi Tengah	0,48	0,18	0,06	0,06
27	Sulawesi Selatan	0,12	0,14	0,15	0,10
28	Sulawesi Tenggara	0,44	0,21	0,31	0,30
29	Gorontalo	0,15	0,04	0,05	0,03
30	Sulawesi Barat	0,09	0,11	0,19	0,14
31	Maluku	3,95	2,30	1,16	0,72
32	Maluku Utara	2,44	0,79	0,39	0,46
33	Papua Barat	18,23	14,97	8,49	7,38
34	Papua	45,85	59,00	52,99	64,03
Indonesia		0,88	0,99	0,84	0,93

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 67.a

PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2019

No	Provinsi	Penderita Kronis Filariasis				
		Kasus Kronis Tahun Sebelumnya	Kasus Kronis Baru Ditemukan	Kasus Kronis Pindah	Kasus Kronis Meninggal	Jumlah Seluruh Kasus Kronis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	578	27	0	22	583
2	Sumatera Utara	183	0	0	0	183
3	Sumatera Barat	239	0	0	52	187
4	Riau	236	0	0	79	157
5	Jambi	267	20	0	0	287
6	Sumatera Selatan	169	0	0	3	166
7	Bengkulu	64	0	0	0	64
8	Lampung	40	0	0	7	33
9	Kepulauan Bangka Belitung	104	0	0	2	102
10	Kepulauan Riau	31	50	0	0	81
11	DKI Jakarta	23	0	0	0	23
12	Jawa Barat	781	9	52	3	735
13	Jawa Tengah	439	33	1	69	402
14	DI Yogyakarta	3	0	0	0	3
15	Jawa Timur	412	0	0	150	262
16	Banten	129	0	1	12	116
17	Bali	18	0	0	16	2
18	Nusa Tenggara Barat	10	0	0	0	10
19	Nusa Tenggara Timur	1.542	0	0	2	1.540
20	Kalimantan Barat	254	0	0	9	245
21	Kalimantan Tengah	90	0	0	38	52
22	Kalimantan Selatan	23	0	0	3	20
23	Kalimantan Timur	319	0	0	0	319
24	Kalimantan Utara	15	0	0	4	11
25	Sulawesi Utara	20	0	0	0	20
26	Sulawesi Tengah	193	8	1	7	193
27	Sulawesi Selatan	82	0	0	0	82
28	Sulawesi Tenggara	62	0	0	12	50
29	Gorontalo	4	1	0	0	5
30	Sulawesi Barat	43	12	0	0	55
31	Maluku	37	2	0	0	39
32	Maluku Utara	34	0	0	7	27
33	Papua Barat	622	467	0	0	1.089
34	Papua	3.615	0	0	0	3.615
Indonesia		10.681	592	2	425	10.758

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

Lampiran 67.b

**JUMLAH KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA, BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI < 1%,
DAN MASIH MELAKSANAKAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL (POPM) FILARIASIS SERTA ELIMINASI FILARIASIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis	Jumlah Kabupaten/Kota Berhasil Menurunkan Mikrofilaria < 1%	Persentase Kabupaten/Kota Berhasil Menurunkan Mikrofilaria < 1%	Jumlah Kabupaten/Kota yang Masih Melaksanakan POPM Filariasis	Persentase Kabupaten/Kota yang Masih Melaksanakan POPM Filariasis	Jumlah Kabupaten/Kota Eliminasi Filariasis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	12	2	16,7	9	75,0	2
2	Sumatera Utara	9	8	88,9	1	11,1	5
3	Sumatera Barat	10	10	100,0	0	0,0	6
4	Riau	10	10	100,0	0	0,0	5
5	Jambi	5	5	100,0	0	0,0	1
6	Sumatera Selatan	9	5	55,6	4	44,4	0
7	Bengkulu	5	5	100,0	0	0,0	0
8	Lampung	1	1	100,0	0	0,0	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	5	71,4	2	28,6	5
10	Kepulauan Riau	3	1	33,3	2	66,7	0
11	DKI Jakarta	0	0	-	0	-	0
12	Jawa Barat	11	8	72,7	3	27,3	6
13	Jawa Tengah	9	0	0,0	8	88,9	0
14	DI Yogyakarta	0	0	-	0	-	0
15	Jawa Timur	0	0	-	0	-	0
16	Banten	5	5	100,0	0	0,0	5
17	Bali	0	0	-	0	-	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	-	0	-	0
19	Nusa Tenggara Timur	18	4	22,2	14	77,8	2
20	Kalimantan Barat	9	0	0,0	8	88,9	0
21	Kalimantan Tengah	11	4	36,4	7	63,6	3
22	Kalimantan Selatan	8	6	75,0	2	25,0	1
23	Kalimantan Timur	6	3	50,0	3	50,0	0
24	Kalimantan Utara	4	1	25,0	3	75,0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	-	0	-	0
26	Sulawesi Tengah	9	5	55,6	4	44,4	2
27	Sulawesi Selatan	4	3	75,0	1	25,0	2
28	Sulawesi Tenggara	12	8	66,7	4	33,3	3
29	Gorontalo	6	6	100,0	0	0,0	4
30	Sulawesi Barat	4	2	50,0	2	50,0	1
31	Maluku	8	0	0,0	8	100,0	0
32	Maluku Utara	6	1	16,7	5	83,3	1
33	Papua Barat	12	0	0,0	11	91,7	0
34	Papua	23	6	26,1	17	73,9	2
Indonesia		236	114	48,3	118	50,0	56

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Ket: * = kabupaten/kota non endemis filariasis

** = kabupaten/kota dalam masa pasca surveilans POPM filariasis

Lampiran 67.c

SITUASI RABIES MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2017 - 2019

No	Provinsi	2017			2018			2019		
		GHPR	VAR	LYSSA	GHPR	VAR	LYSSA	GHPR	VAR	LYSSA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	495	298	0	684	458	0	893	634	0
2	Sumatera Utara	5.348	3.989	11	5.667	4.148	7	8.163	6.429	12
3	Sumatera Barat	4.473	2.440	6	1.721	992	2	4.850	2.908	1
4	Riau	2.037	1.865	1	1.402	1.242	0	2.514	1.999	1
5	Jambi	948	928	0	1.301	1.212	0	1.056	877	8
6	Sumatera Selatan	1.210	687	4	1.886	1.532	1	2.079	1.899	1
7	Bengkulu	1.386	1.203	2	1.415	1.305	1	1.608	1.505	0
8	Lampung	1.362	1.249	0	1.605	1.496	5	1.946	1.887	0
9	Kepulauan Bangka Belitung*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	470	304	0	1.266	707	0	1.563	944	0
13	Jawa Tengah	152	88	0	249	47	0	254	89	0
14	DI Yogyakarta*	6	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Banten	203	202	0	254	243	0	192	130	0
17	Bali	29.391	15.965	2	26.130	13.137	4	38.187	20.622	4
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	2.400	982	13
19	Nusa Tenggara Timur	10.139	9.308	10	12.530	11.743	12	13.599	11.816	15
20	Kalimantan Barat	3.279	2.991	22	3.912	3.759	25	4.398	4.171	14
21	Kalimantan Tengah	437	267	0	-	-	-	715	490	0
22	Kalimantan Selatan	314	300	0	359	348	1	438	376	0
23	Kalimantan Timur	525	453	0	1.240	1.078	0	680	625	0
24	Kalimantan Utara	72	0	0	26	23	0	155	104	0
25	Sulawesi Utara	4.444	2.420	15	5.423	3.268	16	5.851	3.129	17
26	Sulawesi Tengah	2.537	2.389	3	2.758	2.591	5	3.461	3.314	8
27	Sulawesi Selatan	2.043	1.041	22	6.125	4.513	15	6.583	3.210	12
28	Sulawesi Tenggara	1.286	1.255	3	767	761	5	1.254	1.249	1
29	Gorontalo	742	553	5	1.003	961	10	1.063	991	5
30	Sulawesi Barat	380	272	2	1.187	1.009	-	716	675	0
31	Maluku	938	825	0	1.639	1.314	2	1.133	835	3
32	Maluku Utara	295	289	3	317	-	0	306	283	0
33	Papua Barat*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		74.912	51.581	111	80.866	57.887	111	106.057	72.173	115
Persentase VAR/GHPR		68,9%			71,6%			68,1%		

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Ket : GHPR = Gigitan Hewan Penular Rabies (belum confirmed lab), VAR = Kasus digigit yang diberi Vaksin Anti Rabies, LYSSA = Positif rabies dan mati

* daerah bebas rabies

Lampiran 67.d

JUMLAH KASUS, MENINGGAL, DAN CASE FATALITY RATE (CFR) LEPTOSPIROSIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2017 - 2019

No	Provinsi	2017			2018			2019		
		K	M	CFR	K	M	CFR	K	M	CFR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	DKI Jakarta	1	0	0,00	31	2	6,45	37	0	0,00
2	Jawa Barat	5	0	0,00	2	0	0,00	32	1	3,13
3	Jawa Tengah	409	65	15,89	427	89	20,84	458	67	14,63
4	DI Yogyakarta	295	38	12,88	186	16	8,60	183	8	4,37
5	Jawa Timur	106	19	17,92	128	10	7,81	147	23	15,65
6	Banten	92	14	15,22	115	31	26,96	52	19	36,54
7	Maluku	-	-	-	5	2	40,00	2	1	50,00
8	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	8	3	37,50
9	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	1	0	0,00
Indonesia		908	136	14,98	894	148	16,55	920	122	13,26

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Ket. : K= Kasus, M= Meninggal,

CFR=Case Fatality Rate

Lampiran 67.e

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN PENGENDALIAN VEKTOR TERPADU (PVT)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota PVT	Persentase Kabupaten/Kota PVT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	19	82,61
2	Sumatera Utara	33	27	81,82
3	Sumatera Barat	19	16	84,21
4	Riau	12	12	100,00
5	Jambi	11	11	100,00
6	Sumatera Selatan	17	15	88,24
7	Bengkulu	10	9	90,00
8	Lampung	15	13	86,67
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,00
10	Kepulauan Riau	7	7	100,00
11	DKI Jakarta	6	6	100,00
12	Jawa Barat	27	23	85,19
13	Jawa Tengah	35	30	85,71
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00
15	Jawa Timur	38	33	86,84
16	Banten	8	8	100,00
17	Bali	9	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	17	77,27
20	Kalimantan Barat	14	12	85,71
21	Kalimantan Tengah	14	12	85,71
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,00
23	Kalimantan Timur	10	10	100,00
24	Kalimantan Utara	5	4	80,00
25	Sulawesi Utara	15	15	100,00
26	Sulawesi Tengah	13	10	76,92
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,00
28	Sulawesi Tenggara	17	15	88,24
29	Gorontalo	6	6	100,00
30	Sulawesi Barat	6	6	100,00
31	Maluku	11	9	81,82
32	Maluku Utara	10	8	80,00
33	Papua Barat	13	11	84,62
34	Papua	29	24	82,76
Indonesia		514	456	88,72

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 69

PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS (DM) MENURUT PROVINSI

TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Penderita	Jumlah Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	142.373	94.912	66,66
2	Sumatera Utara	139.697	125.517	89,85
3	Sumatera Barat	59.024	59.024	84,6
4	Riau	501.921	49.689	9,90
5	Jambi	581	10	1,72
6	Sumatera Selatan	117.733	117.733	100,00
7	Bengkulu	13.457	13.457	100,00
8	Lampung	84.089	108.492	129,02
9	Kepulauan Bangka Belitung	25.806	25.818	100,05
10	Kepulauan Riau	32.055	30.284	94,48
11	DKI Jakarta	260.666	165.766	0,64
12	Jawa Barat	552.151	416.616	75,45
13	Jawa Tengah	120.835	2.066	1,71
14	D I Yogyakarta	67.071	55.190	82,29
15	Jawa Timur	844.018	816.729	96,77
16	Banten	233.890	233.890	100,00
17	Bali	60.423	50.318	83,28
18	Nusa Tenggara Barat	53.139	4.139	7,79
19	Nusa Tenggara Timur	20.599	14.668	71,21
20	Kalimantan Barat	111.941	49.702	44,40
21	Kalimantan Tengah	22.730	329	1,45
22	Kalimantan Selatan	89.888	72.467	80,62
23	Kalimantan Timur	3.151	36	1,14
24	Kalimantan Utara	13.959	8.619	61,75
25	Sulawesi Utara	59.229	32.138	54,26
26	Sulawesi Tengah	12.434	59	0,47
27	Sulawesi Selatan	148.331	103.687	69,90
28	Sulawesi Tenggara	100.205	20.823	20,78
29	Gorontalo	22.384	6.785	30,31
30	Sulawesi Barat	10.940	186	1,70
31	Maluku	1.254	88	7,02
32	Maluku Utara	4.019	128	3,18
33	Papua Barat	3.061	100	3,27
34	Papua	8.644	8.529	98,67
Indonesia		3.941.698	2.687.994	68,19

Sumber: Ditjen P2P (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), Kementerian Kesehatan, 2020

Lampiran 70.a

REKAPITULASI DETEKSI DINI KANKER SERVIKS (IVA)
MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2019

No	Provinsi	Pemeriksaan 2019	Total Pemeriksaan s.d 2019	Cakupan Pemeriksaan s.d 2019 (%)	Hasil Pemeriksaan s.d 2019			
					IVA positif	Curiga Ca leher rahim	Tumor Payudara	Curiga Ca Payudara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	11866	18.078	2,6	72	150	672	2
2	Sumatera Utara	89.293,00	347.733	18,8	1.564	23	990	24
3	Sumatera Barat	32.053	164.814	24,0	2.178	174	152	t.a.d
4	Riau	30.208,00	120.902	13,4	775	56	96	27
5	Jambi	43.562	40.817	8,2	1.056	7	635	14
6	Sumatera Selatan	194.020	229.254	20,0	1.927	45	354	0
7	Bengkulu	7.052,00	29.990	11,0	554	8	51	12
8	Lampung	88.671,00	294.990	23,4	3.009	573	2082	423
9	Kep. Bangka Belitung	29.792,00	100.394	51,3	711	68	250	40
10	Kepulauan Riau	5.819,00	38.372	11,8	470	67	274	27
11	DKI Jakarta	91.036,00	409.173	24,6	3.414	231	4.610	65
12	Jawa Barat	113.838	464.462	6,8	7.285	708	6109	763
13	Jawa Tengah	t.a.d	251.663	5,1	25.300	727	2173	252
14	DI Yogyakarta	t.a.d	41.006	7,6	771	49	168	29
15	Jawa Timur	147.977,00	695.331	11,6	19.815	569	1521	223
16	Banten	23.915	91.013	9,4	1.190	384	1118	271
17	Bali	57.087	107.329	16,6	4.543	251	1915	80
18	Nusa Tenggara Barat	18.379,00	130.857	18,1	1.602	46	250	42
19	Nusa Tenggara Timur	42.253	77.518	12,4	307	130	95	0
20	Kalimantan Barat	16032	61.470	9,2	1.505	206	635	212
21	Kalimantan Tengah	t.a.d	17.311	4,7	411	12	70	7
22	Kalimantan Selatan	27.251,00	159.976	26,6	1.546	125	99	22
23	Kalimantan Timur	t.a.d	38.457	7,5	220	119	171	25
24	Kalimantan Utara	5.144,00	19.673	22,5	463	83	133	295
25	Sulawesi Utara	4.923,00	32.875	9,2	833	7	10	t.a.d
26	Sulawesi Tengah	13.567	50.289	12,1	456	13	101	8
27	Sulawesi Selatan	45.509	105.510	39,0	1.044	89	3860	t.a.d
28	Sulawesi Tenggara	1.131	5.570	1,7	110	5	21	5
29	Gorontalo	1.024,00	4.384	2,7	170	-	53	t.a.d
30	Sulawesi Barat	24.579	187.978	104,2	23	14	23	14
31	Maluku	t.a.d	15.282	7,1	587	49	152	20
32	Maluku Utara	3.094,00	5.926	3,8	72	11	26	3
33	Papua Barat	200,00	7.884	6,6	177	14	37	1
34	Papua	1.078,00	4.202	0,9	25	2	4	4
Indonesia		1.170.353,00	4.370.483	12,2	84.185	5.015	28.910	2.910

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Ket : Sasaran = perempuan usia 30-50 tahun

Lampiran 70.b

**JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PENGENDALIAN TERPADU (PANDU) PTM
MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas Pandu PTM	Persentase Puskesmas Pandu PTM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	359	329	91,64
2	Sumatera Utara	601	476	79,20
3	Sumatera Barat	275	268	97,45
4	Riau	228	157	68,86
5	Jambi	205	117	57,07
6	Sumatera Selatan	341	316	92,67
7	Bengkulu	179	137	76,54
8	Lampung	310	286	92,26
9	Kep. Bangka Belitung	64	63	98,44
10	Kepulauan Riau	86	78	90,70
11	DKI Jakarta	315	290	92,06
12	Jawa Barat	1.072	572	53,36
13	Jawa Tengah	878	821	93,51
14	DI Yogyakarta	121	121	100,00
15	Jawa Timur	968	771	79,65
16	Banten	243	231	95,06
17	Bali	120	120	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	169	146	86,39
19	Nusa Tenggara Timur	402	251	62,44
20	Kalimantan Barat	246	141	57,32
21	Kalimantan Tengah	203	163	80,30
22	Kalimantan Selatan	235	232	98,72
23	Kalimantan Timur	186	122	65,59
24	Kalimantan Utara	55	15	27,27
25	Sulawesi Utara	195	87	44,62
26	Sulawesi Tengah	206	120	58,25
27	Sulawesi Selatan	459	453	98,69
28	Sulawesi Tenggara	290	109	37,59
29	Gorontalo	93	90	96,77
30	Sulawesi Barat	95	95	100,00
31	Maluku	209	89	42,58
32	Maluku Utara	147	77	52,38
33	Papua Barat	159	59	37,11
34	Papua	420	63	9,92
Indonesia		10.134	7.465	73,66

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 70.c

**JUMLAH DESA YANG MELAKSANAKAN POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU)
MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Desa yang Melaksanakan Posbindu	% Desa yang Melaksanakan Posbindu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	6.497	4.328	66,62
2	Sumatera Utara	6.110	4.469	73,14
3	Sumatera Barat	1.158	1.017	87,82
4	Riau	1.859	1.026	55,19
5	Jambi	1.562	1.000	64,02
6	Sumatera Selatan	3.240	2.547	78,61
7	Bengkulu	1.513	1.413	93,39
8	Lampung	2.640	1.642	62,20
9	Kep. Bangka Belitung	391	391	100,00
10	Kepulauan Riau	417	258	61,87
11	DKI Jakarta	267	331	123,97
12	Jawa Barat	5.957	5.087	85,40
13	Jawa Tengah	8.562	5.612	65,55
14	DI Yogyakarta	438	407	92,92
15	Jawa Timur	8.501	6.196	72,89
16	Banten	1.551	1.070	68,99
17	Bali	716	604	84,36
18	Nusa Tenggara Barat	1.140	823	72,19
19	Nusa Tenggara Timur	3.353	1.450	43,24
20	Kalimantan Barat	2.130	1.238	58,12
21	Kalimantan Tengah	1.571	690	43,92
22	Kalimantan Selatan	2.008	1.394	69,42
23	Kalimantan Timur	1.038	288	27,75
24	Kalimantan Utara	482	168	34,85
25	Sulawesi Utara	1.839	1.393	75,75
26	Sulawesi Tengah	2.017	439	21,76
27	Sulawesi Selatan	3.047	2.794	91,70
28	Sulawesi Tenggara	2.288	553	24,17
29	Gorontalo	729	673	91,94
30	Sulawesi Barat	648	471	72,69
31	Maluku	1.233	186	15,09
32	Maluku Utara	1.181	465	39,37
33	Papua Barat	1.837	184	10,02
34	Papua	5.521	114	2,06
Indonesia		83.441	50.721	60,79

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 70.d

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KTR DI 50% SEKOLAH
MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Implementasi pada 50% Sekolah	
			Jumlah Kumulatif	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	8	34,8
2	Sumatera Utara	33	8	24,2
3	Sumatera Barat	19	17	89,5
4	Riau	12	6	50,0
5	Jambi	11	7	63,6
6	Sumatera Selatan	17	13	76,5
7	Bengkulu	10	3	30,0
8	Lampung	15	11	73,3
9	Kep. Bangka Belitung	7	5	71,4
10	Kepulauan Riau	7	5	71,4
11	DKI Jakarta	6	6	100,0
12	Jawa Barat	27	16	59,3
13	Jawa Tengah	35	12	34,3
14	DI Yogyakarta	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	12	31,6
16	Banten	8	7	87,5
17	Bali	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	8	80,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	7	31,8
20	Kalimantan Barat	14	8	57,1
21	Kalimantan Tengah	14	7	50,0
22	Kalimantan Selatan	13	10	76,9
23	Kalimantan Timur	10	8	80,0
24	Kalimantan Utara	5	2	40,0
25	Sulawesi Utara	15	9	60,0
26	Sulawesi Tengah	13	6	46,2
27	Sulawesi Selatan	24	10	41,7
28	Sulawesi Tenggara	17	7	41,2
29	Gorontalo	6	4	50,0
30	Sulawesi Barat	6	4	66,7
31	Maluku	11	7	63,6
32	Maluku Utara	10	5	50,0
33	Papua Barat	13	2	15,4
34	Papua	29	4	13,8
Indonesia		514	258	50,2

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

LAMPIRAN 71.a

**JUMLAH DAN PERSENTASE PUSKESMAS MENYELENGGARAKAN UPAYA KESEHATAH JIWA
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019**

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten	Jumlah Kabupaten Memiliki Puskesmas Menyelenggarakan Upaya Keswa	Persentase Kabupaten Memiliki Puskesmas Menyelenggarakan Upaya Keswa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	23	100,0
2	Sumatera Utara	33	33	100,0
3	Sumatera Barat	19	19	100,0
4	Riau	12	12	100,0
5	Jambi	11	10	90,9
6	Sumatera Selatan	17	17	100,0
7	Bengkulu	10	10	100,0
8	Lampung	15	15	100,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,0
10	Kepulauan Riau	7	7	100,0
11	DKI Jakarta	6	6	100,0
12	Jawa Barat	27	27	100,0
13	Jawa Tengah	35	30	85,7
14	D I Yogyakarta	5	-	-
15	Jawa Timur	38	37	97,4
16	Banten	8	8	100,0
17	Bali	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	7	31,8
20	Kalimantan Barat	14	14	100,0
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,0
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,0
23	Kalimantan Timur	10	3	30,0
24	Kalimantan Utara	5	5	100,0
25	Sulawesi Utara	15	15	100,0
26	Sulawesi Tengah	13	-	-
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,0
28	Sulawesi Tenggara	17	6	35,3
29	Gorontalo	6	6	100,0
30	Sulawesi Barat	6	-	-
31	Maluku	11	11	100,0
32	Maluku Utara	10	6	60,0
33	Papua Barat	13	-	-
34	Papua	29	3	10,3
Indonesia		514	407	79,2

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

LAMPIRAN 71.b

**JUMLAH KABUPATEN/KOTA MENYELENGGARAKAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH PENYALAHGUNAAN NAPZA
DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) DAN JUMLAH IPWL AKTIF**

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/ Kota Dengan IPWL	Jumlah IPWL	Jumlah IPWL Aktif	Persentase IPWL Aktif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	17	70	43	61,4
2	Sumatera Utara	14	28	28	100,0
3	Sumatera Barat	16	31	17	54,8
4	Riau	4	14	6	42,9
5	Jambi	8	31	31	100,0
6	Sumatera Selatan	11	62	23	37,1
7	Bengkulu	5	10	6	60,0
8	Lampung	1	61	2	3,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	40	7	17,5
10	Kepulauan Riau	1	7	2	28,6
11	DKI Jakarta	6	40	24	60,0
12	Jawa Barat	15	36	19	52,8
13	Jawa Tengah	15	25	22	88,0
14	D I Yogyakarta	3	9	6	66,7
15	Jawa Timur	18	46	29	63,0
16	Banten	4	10	6	60,0
17	Bali	5	13	7	53,8
18	Nusa Tenggara Barat	5	11	6	54,5
19	Nusa Tenggara Timur	7	25	7	28,0
20	Kalimantan Barat	6	21	8	38,1
21	Kalimantan Tengah	2	4	1	25,0
22	Kalimantan Selatan	6	19	13	68,4
23	Kalimantan Timur	9	40	12	30,0
24	Kalimantan Utara	2	3	3	100,0
25	Sulawesi Utara	3	14	4	28,6
26	Sulawesi Tengah	1	10	2	20,0
27	Sulawesi Selatan	5	37	10	27,0
28	Sulawesi Tenggara	1	6	2	33,3
29	Gorontalo	4	10	6	60,0
30	Sulawesi Barat	2	4	2	50,0
31	Maluku	1	5	1	20,0
32	Maluku Utara	1	4	1	25,0
33	Papua Barat	1	2	1	50,0
34	Papua	1	6	1	16,7
Indonesia		207	754	358	47,5

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 72.a

PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DILAKUKAN PENGAWASAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Sarana Air Minum	Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)				Pemeriksaan			
			Jumlah Sarana Air Minum Di IKL	%	Jumlah Sarana Air Minum Dengan Resiko Rendah + Sedang	%	Jumlah Sarana Air Minum Diambil Sampel	%	Jumlah Sarana Air Minum Memenuhi Syarat	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	269	202	75,09	183	90,59	4	1,49	3	75,00
2	Sumatera Utara	20.159	14.319	71,03	12.200	85,20	5	0,02	3	60,00
3	Sumatera Barat	67	67	100,00	65	97,01	17	25,37	14	82,35
4	Riau	3.242	1.377	42,47	1.366	99,20	452	13,94	343	75,88
5	Jambi	2.854	1.680	58,86	1.609	95,77	223	7,81	211	94,62
6	Sumatera Selatan	2.351	557	23,69	543	97,49	23	0,98	16	69,57
7	Bengkulu	1.140	1.014	88,95	939	92,60	-	-	-	-
8	Lampung	1.292	479	37,07	438	91,44	35	2,71	23	65,71
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.498	1.073	71,63	1.071	99,81	665	44,39	429	64,51
10	Kepulauan Riau	86	82	95,35	78	95,12	14	16,28	12	85,71
11	DKI Jakarta	1.204	989	82,14	982	99,29	187	15,53	77	41,18
12	Jawa Barat	6.081	1.903	31,29	1.821	95,69	77	1,27	54	70,13
13	Jawa Tengah	2.504	1.085	43,33	1.018	93,82	95	3,79	73	76,84
14	DI Yogyakarta	673	361	53,64	360	99,72	232	34,47	120	51,72
15	Jawa Timur	10.342	5.906	57,11	5.652	95,70	1.678	16,23	1.125	67,04
16	Banten	3.968	2.289	57,69	2.267	99,04	233	5,87	214	91,85
17	Bali	242	139	57,44	139	100,00	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	15.847	3.959	24,98	3.815	96,36	17	0,11	10	58,82
19	Nusa Tenggara Timur	130	129	99,23	113	87,60	5	3,85	2	40,00
20	Kalimantan Barat	957	370	38,66	292	78,92	61	6,37	61	100,00
21	Kalimantan Tengah	1.383	865	62,55	738	85,32	159	11,50	84	52,83
22	Kalimantan Selatan	1.014	616	60,75	598	97,08	20	1,97	15	75,00
23	Kalimantan Timur	4.038	2.741	67,88	2.218	80,92	720	17,83	558	77,50
24	Kalimantan Utara	299	83	27,76	83	100,00	33	11,04	15	45,45
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	68	68	100,00	50	73,53	2	2,94	2	100,00
27	Sulawesi Selatan	19.613	8.424	42,95	7.813	92,75	850	4,33	663	78,00
28	Sulawesi Tenggara	6.361	2.584	40,62	2.376	91,95	190	2,99	113	59,47
29	Gorontalo	473	473	100,00	443	93,66	7	1,48	7	100,00
30	Sulawesi Barat	1.028	703	68,39	586	83,36	11	1,07	7	63,64
31	Maluku	789	149	18,88	143	95,97	10	1,27	10	100,00
32	Maluku Utara	337	337	100,00	286	84,87	13	3,86	2	15,38
33	Papua Barat	221	177	80,09	177	100,00	112	50,68	90	80,36
34	Papua	436	346	79,36	325	93,93	71	16,28	45	63,38
Indonesia		110.966	55.546	50,06	50.787	45,77	6.221	5,61	4.401	3,97

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Keterangan: - : tidak dilakukan pemeriksaan

Lampiran 72.b

**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SUMBER AIR MINUM LAYAK MENURUT PROVINSI
TAHUN 2017-2019**

No	Provinsi	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	64,85	66,48	70,70
2	Sumatera Utara	70,07	71,95	73,86
3	Sumatera Barat	68,83	69,53	73,09
4	Riau	75,12	79,68	69,56
5	Jambi	65,73	66,66	62,94
6	Sumatera Selatan	64,02	65,31	63,26
7	Bengkulu	43,83	49,37	49,52
8	Lampung	53,79	56,78	59,65
9	Kepulauan Bangka Belitung	68,14	66,83	84,09
10	Kepulauan Riau	83,95	83,56	91,53
11	DKI Jakarta	88,93	89,59	88,44
12	Jawa Barat	70,50	71,06	72,38
13	Jawa Tengah	76,09	78,16	78,86
14	DI Yogyakarta	77,19	80,62	75,30
15	Jawa Timur	75,54	75,20	76,10
16	Banten	66,11	72,83	73,68
17	Bali	90,85	90,90	88,67
18	Nusa Tenggara Barat	70,48	73,61	74,69
19	Nusa Tenggara Timur	65,20	72,41	65,48
20	Kalimantan Barat	68,77	72,88	37,37
21	Kalimantan Tengah	63,90	65,38	69,18
22	Kalimantan Selatan	60,62	62,67	72,05
23	Kalimantan Timur	82,75	81,26	93,77
24	Kalimantan Utara	83,78	88,30	80,58
25	Sulawesi Utara	73,29	76,20	81,72
26	Sulawesi Tengah	67,10	71,13	74,67
27	Sulawesi Selatan	76,34	77,93	79,32
28	Sulawesi Tenggara	79,83	80,95	79,32
29	Gorontalo	75,00	78,99	82,33
30	Sulawesi Barat	60,66	62,98	63,55
31	Maluku	68,34	76,47	73,17
32	Maluku Utara	65,73	69,17	64,82
33	Papua Barat	73,12	77,12	70,18
34	Papua	59,09	58,35	39,05
Indonesia		72,04	73,68	73,65

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2019

Lampiran 73

**JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019**

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah KK	Jumlah KK Pengguna Sarana			Keluarga Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat)	
				Sharing/Komunal	Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP)	Jamban Sehat Permanen (JSP)	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	23	1.286.882	125.970	183.197	712.892	1.022.059	79,42
2	Sumatera Utara	33	3.620.169	252.449	679.657	2.125.618	3.057.724	84,46
3	Sumatera Barat	19	1.268.405	76.942	138.689	792.006	1.007.637	79,44
4	Riau	12	1.619.372	65.231	378.356	1.031.200	1.474.787	91,07
5	Jambi	11	913.561	56.868	200.251	551.702	808.821	88,53
6	Sumatera Selatan	17	2.167.161	139.212	385.552	1.351.108	1.875.872	86,56
7	Bengkulu	10	503.689	25.632	108.294	308.520	442.446	87,84
8	Lampung	15	2.141.382	107.260	383.671	1.476.870	1.967.801	91,89
9	Kep. Bangka Belitung	7	398.913	9.714	58.606	312.937	381.257	95,57
10	Kepulauan Riau	7	628.448	20.454	215.990	358.240	594.684	94,63
11	DKI Jakarta	6	2.972.191	175.729	231.731	2.430.797	2.838.257	95,49
12	Jawa Barat	27	13.519.285	1.215.667	2.364.603	7.536.730	11.117.000	82,23
13	Jawa Tengah	35	10.314.055	1.092.713	1.177.993	7.434.772	9.705.478	94,10
14	DI Yogyakarta	5	1.089.199	54.758	108.431	926.010	1.089.199	100,00
15	Jawa Timur	38	11.655.906	886.033	1.733.321	8.125.865	10.745.219	92,19
16	Banten	8	3.121.546	279.100	485.135	1.823.468	2.587.703	82,90
17	Bali	9	1.046.242	69.583	28.889	875.508	973.980	93,09
18	Nusa Tenggara Barat	10	1.467.724	200.186	155.642	948.738	1.304.566	88,88
19	Nusa Tenggara Timur	22	1.145.534	125.336	379.522	490.902	995.760	86,93
20	Kalimantan Barat	14	1.310.161	37.790	866.460	37.842	942.092	71,91
21	Kalimantan Tengah	14	649.165	31.304	103.369	340.946	475.619	73,27
22	Kalimantan Selatan	13	1.063.323	85.782	226.931	574.955	887.668	83,48
23	Kalimantan Timur	10	957.881	34.285	143.967	671.401	849.653	88,70
24	Kalimantan Utara	5	132.822	7.719	24.093	79.581	111.393	83,87
25	Sulawesi Utara	15	634.928	57.292	126.124	397.016	580.432	91,42
26	Sulawesi Tengah	13	737.230	44.807	95.974	444.184	584.965	79,35
27	Sulawesi Selatan	24	2.156.905	155.292	192.483	1.756.900	2.104.675	97,58
28	Sulawesi Tenggara	17	592.342	50.909	130.171	327.769	508.849	85,90
29	Gorontalo	6	310.349	82.072	11.977	151.507	245.556	79,12
30	Sulawesi Barat	6	301.903	28.272	23.133	196.673	248.078	82,17
31	Maluku	11	348.290	25.289	112.694	121.738	259.721	74,57
32	Maluku Utara	10	265.662	35.386	16.017	145.694	197.097	74,19
33	Papua Barat	13	92.190	12.407	11.767	58.280	82.454	89,44
34	Papua	29	655.748	32.358	110.832	209.228	352.418	53,74
Indonesia		514	71.088.563	5.699.801	11.593.522	45.127.597	62.420.920	87,81

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 74

DESA YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT PER PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa/Kelurahan	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)			
				Desa Melaksanakan STBM		Desa Stop BABS (SBS)	
				Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	23	6.497	3.434	52,86	556	8,56
2	Sumatera Utara	33	6.110	3.219	52,68	334	5,47
3	Sumatera Barat	19	1.158	809	69,86	235	20,29
4	Riau	12	1.859	1.575	84,72	516	27,76
5	Jambi	11	1.562	1.100	70,42	358	22,92
6	Sumatera Selatan	17	3.240	2.406	74,26	913	28,18
7	Bengkulu	10	1.513	1.174	77,59	239	15,80
8	Lampung	15	2.640	1.944	73,64	1.075	40,72
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	391	391	100,00	200	51,15
10	Kepulauan Riau	7	417	328	78,66	74	17,75
11	DKI Jakarta	6	267	251	94,01	25	9,36
12	Jawa Barat	27	5.957	4.198	70,47	1.563	26,24
13	Jawa Tengah	35	8.562	8.306	97,01	5.838	68,19
14	DI Yogyakarta	5	438	438	100,00	438	100,00
15	Jawa Timur	38	8.501	7.632	89,78	4.337	51,02
16	Banten	8	1.551	1.416	91,30	222	14,31
17	Bali	9	716	660	92,18	249	34,78
18	Nusa Tenggara Barat	10	1.140	1.125	98,68	539	47,28
19	Nusa Tenggara Timur	22	3.353	2.609	77,81	1.263	37,67
20	Kalimantan Barat	14	2.130	1.289	60,52	173	8,12
21	Kalimantan Tengah	14	1.571	1.319	83,96	324	20,62
22	Kalimantan Selatan	13	2.008	1.590	79,18	482	24,00
23	Kalimantan Timur	10	1.038	731	70,42	171	16,47
24	Kalimantan Utara	5	482	284	58,92	103	21,37
25	Sulawesi Utara	15	1.839	1.047	56,93	311	16,91
26	Sulawesi Tengah	13	2.017	1.346	66,73	336	16,66
27	Sulawesi Selatan	24	3.047	3.047	100,00	2.032	66,69
28	Sulawesi Tenggara	17	2.288	1.178	51,49	238	10,40
29	Gorontalo	6	729	497	68,18	35	4,80
30	Sulawesi Barat	6	648	510	78,70	130	20,06
31	Maluku	11	1.233	357	28,95	18	1,46
32	Maluku Utara	10	1.181	471	39,88	67	5,67
33	Papua Barat	13	1.837	401	21,83	72	3,92
34	Papua	29	5.521	853	15,45	108	1,96
Indonesia		514	83.441	57.935	69,43	23.574	28,25

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020; Kementerian Dalam Negeri, 2019 (Permendagri 72 Tahun 2019)

* SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)

Lampiran 75

PERSENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM (TTU) MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	TTU Yang Ada			TTU Memenuhi Syarat Kesehatan					
		Sarana Pendidikan (SD/MI dan SMP/MTs)	Pasar	Jumlah TTU Yang Ada	Sarana Pendidikan (SD/MI dan SMP/MTs)		Pasar		Jumlah Total	
					Σ	%	Σ	%	Σ	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	7.038	167	7.205	4.924	69,96	102	61,08	5.026	69,76
2	Sumatera Utara	15.095	150	15.245	8.849	58,62	94	62,67	8.943	58,66
3	Sumatera Barat	5.681	99	5.780	4.060	71,47	78	78,79	4.138	71,59
4	Riau	4.092	37	4.129	2.528	61,78	32	86,49	2.560	62,00
5	Jambi	5.074	60	5.134	3.401	67,03	48	80,00	3.449	67,18
6	Sumatera Selatan	7.028	92	7.120	4.896	69,66	65	70,65	4.961	69,68
7	Bengkulu	1.898	53	1.951	1.251	65,91	49	92,45	1.300	66,63
8	Lampung	7.232	77	7.309	5.117	70,75	42	54,55	5.159	70,58
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.109	18	1.127	889	80,16	15	83,33	904	80,21
10	Kepulauan Riau	1.409	7	1.416	801	56,85	9	128,57	810	57,20
11	DKI Jakarta	879	1	880	566	64,39	2	200,00	568	64,55
12	Jawa Barat	29.360	68	29.428	19.213	65,44	46	67,65	19.259	65,44
13	Jawa Tengah	27.656	151	27.807	23.025	83,25	96	63,58	23.121	83,15
14	DI Yogyakarta	2.829	19	2.848	2.015	71,23	34	178,95	2.049	71,95
15	Jawa Timur	11.180	165	11.345	4.075	36,45	143	86,67	4.218	37,18
16	Banten	6.755	18	6.773	3.158	46,75	17	94,44	3.175	46,88
17	Bali	4.950	28	4.978	2.046	41,33	21	75,00	2.067	41,52
18	Nusa Tenggara Barat	5.206	60	5.266	3.938	75,64	63	105,00	4.001	75,98
19	Nusa Tenggara Timur	12.124	139	12.263	7.335	60,50	84	60,43	7.419	60,50
20	Kalimantan Barat	5.469	54	5.523	3.970	72,59	33	61,11	4.003	72,48
21	Kalimantan Tengah	4.801	60	4.861	3.212	66,90	58	96,67	3.270	67,27
22	Kalimantan Selatan	4.098	43	4.141	2.826	68,96	34	79,07	2.860	69,07
23	Kalimantan Timur	3.022	27	3.049	1.312	43,41	13	48,15	1.325	43,46
24	Kalimantan Utara	623	18	641	456	73,19	13	72,22	469	73,17
25	Sulawesi Utara	3.824	74	3.898	702	18,36	57	77,03	759	19,47
26	Sulawesi Tengah	4.385	75	4.460	2.555	58,27	50	66,67	2.605	58,41
27	Sulawesi Selatan	9.534	157	9.691	4.248	44,56	138	87,90	4.386	45,26
28	Sulawesi Tenggara	4.325	105	4.430	1.689	39,05	69	65,71	1.758	39,68
29	Gorontalo	1.544	46	1.590	689	44,62	38	82,61	727	45,72
30	Sulawesi Barat	1.573	57	1.630	684	43,48	54	94,74	738	45,28
31	Maluku	TAD	54	54	TAD	0,00	26	48,15	26	48,15
32	Maluku Utara	3.384	53	3.437	2.671	78,93	34	64,15	2.705	78,70
33	Papua Barat	1.549	41	1.590	865	55,84	25	60,98	890	55,97
34	Papua	3.635	111	3.746	1.212	33,34	66	59,46	1.278	34,12
Indonesia		208.361	2.384	210.745	129.178	62,00	1.748	73,32	130.926	62,13

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Keterangan: TAD: Tidak ada data

Lampiran 76.a

**TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019**

No	Provinsi	TPM Yang Ada					TPM Memenuhi Syarat Kesehatan									
		Jasa Boga	Rumah Makan/ Restoran	Depot Air Minum (DAM)	Makanan Jajanan/ Kantin/ Sentra Makanan Jajanan	Jumlah TPM Yang Ada	Jasa Boga		Rumah Makan/Restoran		Depot Air Minum (DAM)		Makanan Jajanan/ Kantin/ Sentra Makanan Jajanan		Jumlah TPM Memenuhi Syarat Kesehatan	
							Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Total	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	341	2.053	1.981	2.422	6.797	20	5,87	207	10,08	229	11,56	229	9,45	685	10,08
2	Sumatera Utara	430	1.290	1.904	840	4.464	8	1,86	103	7,98	236	12,39	110	13,10	457	10,24
3	Sumatera Barat	183	1.692	2.009	1.310	5.194	14	7,65	408	24,11	980	48,78	520	39,69	1.922	37,00
4	Riau	297	1.874	2.107	1.909	6.187	157	52,86	750	40,02	1.040	49,36	728	38,14	2.675	43,24
5	Jambi	108	1.142	1.146	933	3.329	28	25,93	359	31,44	549	47,91	404	43,30	1.340	40,25
6	Sumatera Selatan	235	817	890	654	2.596	82	34,89	291	35,62	312	35,06	300	45,87	985	37,94
7	Bengkulu	72	473	689	957	2.191	10	13,89	121	25,58	289	41,94	348	36,36	768	35,05
8	Lampung	246	1.658	1.322	1.344	4.570	51	20,73	359	21,65	472	35,70	562	41,82	1.444	31,60
9	Kep. Bangka Belitung	51	659	1.002	683	2.395	16	31,37	320	48,56	607	60,58	479	70,13	1.422	59,37
10	Kepulauan Riau	228	1.547	1.040	1.187	4.002	82	35,96	548	35,42	465	44,71	415	34,96	1.510	37,73
11	DKI Jakarta	377	3.177	2.316	3.312	9.182	166	44,03	1.969	61,98	1.051	45,38	2.438	73,61	5.624	61,25
12	Jawa Barat	1.298	4.268	7.649	4.462	17.677	399	30,74	1.000	23,43	2.215	28,96	1.484	33,26	5.098	28,84
13	Jawa Tengah	1.370	3.419	5.349	2.416	12.554	354	25,84	876	25,62	2.813	52,59	1.568	64,90	5.611	44,69
14	DI Yogyakarta	180	315	284	1.346	2.125	66	36,67	167	53,02	193	67,96	981	72,88	1.407	66,21
15	Jawa Timur	1.433	2.375	5.192	4.301	13.301	377	26,31	907	38,19	2.077	40,00	2.558	59,47	5.919	44,50
16	Banten	507	1.321	3.178	496	5.502	140	27,61	211	15,97	868	27,31	145	29,23	1.364	24,79
17	Bali	128	1.377	294	1.494	3.293	17	13,28	551	40,01	105	35,71	728	48,73	1.401	42,54
18	Nusa Tenggara Barat	291	1.034	506	1.119	2.950	68	23,37	363	35,11	226	44,66	435	38,87	1.092	37,02
19	Nusa Tenggara Timur	125	1.044	468	383	2.020	4	3,20	170	16,28	63	13,46	90	23,50	327	16,19
20	Kalimantan Barat	127	1.182	967	1.352	3.628	46	36,22	381	32,23	491	50,78	595	44,01	1.513	41,70
21	Kalimantan Tengah	74	710	1.278	898	2.960	20	27,03	208	29,30	488	38,18	556	18,22	1.272	42,97
22	Kalimantan Selatan	175	830	1.839	3.051	5.895	25	14,29	224	26,99	688	37,41	1.105	52,69	2.042	34,64
23	Kalimantan Timur	369	2.085	2.842	2.097	7.393	150	40,65	778	37,31	1.438	50,60	1.167	160,30	3.533	47,79
24	Kalimantan Utara	64	410	585	728	1.787	26	40,63	185	45,12	273	46,67	543	204,14	1.027	57,47
25	Sulawesi Utara	84	866	441	266	1.657	11	13,10	95	10,97	99	22,45	80	13,14	285	17,20
26	Sulawesi Tengah	82	798	822	609	2.311	41	50,00	310	38,85	455	55,35	369	8,97	1.175	50,84
27	Sulawesi Selatan	247	3.047	1.597	4.113	9.004	79	31,98	868	28,49	818	51,22	1.533	116,84	3.298	36,63
28	Sulawesi Tenggara	45	981	592	1.312	2.930	7	15,56	324	33,03	224	37,84	599	45,66	1.154	39,39
29	Gorontalo	78	487	573	842	1.980	22	28,21	124	25,46	243	42,41	133	15,80	522	26,36
30	Sulawesi Barat	40	536	233	240	1.049	14	35,00	186	34,70	117	50,21	85	35,42	402	38,32
31	Maluku	36	396	221	258	911	5	13,89	131	33,08	147	66,52	127	49,22	410	45,01
32	Maluku Utara	73	243	154	130	600	10	13,70	97	39,92	79	51,30	82	63,08	268	44,67
33	Papua Barat	58	477	198	113	846	17	29,31	173	36,27	112	56,57	58	51,33	360	42,55
34	Papua	73	443	303	251	1.070	14	19,18	66	14,90	70	23,10	64	25,50	214	20,00
Indonesia		9.525	45.026	51.971	47.828	154.350	2.546	26,73	13.830	30,72	20.532	39,51	21.618	45,20	58.526	37,92

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemendes RI, 2020

Lampiran 76.b

KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN TATANAN KAWASAN SEHAT
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/ Kota Penyelenggara Tatanan Kawasan Sehat	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	6	26,09
2	Sumatera Utara	33	19	57,58
3	Sumatera Barat	19	19	100,00
4	Riau	12	11	91,67
5	Jambi	11	11	100,00
6	Sumatera Selatan	17	14	82,35
7	Bengkulu	10	8	80,00
8	Lampung	15	13	86,67
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,00
10	Kepulauan Riau	7	7	100,00
11	DKI Jakarta	6	6	100,00
12	Jawa Barat	27	27	100,00
13	Jawa Tengah	35	35	100,00
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00
15	Jawa Timur	38	38	100,00
16	Banten	8	7	87,50
17	Bali	9	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	7	31,82
20	Kalimantan Barat	14	8	57,14
21	Kalimantan Tengah	14	3	21,43
22	Kalimantan Selatan	13	11	84,62
23	Kalimantan Timur	10	9	90,00
24	Kalimantan Utara	5	4	80,00
25	Sulawesi Utara	15	14	93,33
26	Sulawesi Tengah	13	7	53,85
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,00
28	Sulawesi Tenggara	17	9	52,94
29	Gorontalo	6	6	100,00
30	Sulawesi Barat	6	4	66,67
31	Maluku	11	3	27,27
32	Maluku Utara	10	3	30,00
33	Papua Barat	13	1	7,69
34	Papua	29	1	3,45
Indonesia		514	366	71,21

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 76.c

KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/ Kota yang Memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	12	52,17
2	Sumatera Utara	33	23	69,70
3	Sumatera Barat	19	18	94,74
4	Riau	12	12	100,00
5	Jambi	11	11	100,00
6	Sumatera Selatan	17	15	88,24
7	Bengkulu	10	9	90,00
8	Lampung	15	15	100,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,00
10	Kepulauan Riau	7	7	100,00
11	DKI Jakarta	6	6	100,00
12	Jawa Barat	27	27	100,00
13	Jawa Tengah	35	35	100,00
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00
15	Jawa Timur	38	35	92,11
16	Banten	8	8	100,00
17	Bali	9	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	9	90,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	12	54,55
20	Kalimantan Barat	14	9	64,29
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,00
22	Kalimantan Selatan	13	12	92,31
23	Kalimantan Timur	10	10	100,00
24	Kalimantan Utara	5	4	80,00
25	Sulawesi Utara	15	4	26,67
26	Sulawesi Tengah	13	13	100,00
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,00
28	Sulawesi Tenggara	17	7	41,18
29	Gorontalo	6	6	100,00
30	Sulawesi Barat	6	6	100,00
31	Maluku	11	0	0,00
32	Maluku Utara	10	7	70,00
33	Papua Barat	13	6	46,15
34	Papua	29	4	13,79
Indonesia		514	401	78,02

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 76.d

PERSENTASE RUMAH SAKIT YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS SESUAI STANDAR
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah RS	Jumlah RS yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	75	9	12,00
2	Sumatera Utara	199	31	15,58
3	Sumatera Barat	81	45	55,56
4	Riau	78	43	55,13
5	Jambi	40	11	27,50
6	Sumatera Selatan	73	9	12,33
7	Bengkulu	29	18	62,07
8	Lampung	99	81	81,82
9	Kepulauan Bangka Belitung	23	15	65,22
10	Kepulauan Riau	29	8	27,59
11	DKI Jakarta	191	184	96,34
12	Jawa Barat	330	144	43,64
13	Jawa Tengah	295	175	59,32
14	DI Yogyakarta	75	72	96,00
15	Jawa Timur	372	66	17,74
16	Banten	121	71	58,68
17	Bali	57	42	73,68
18	Nusa Tenggara Barat	32	7	21,88
19	Nusa Tenggara Timur	59	12	20,34
20	Kalimantan Barat	50	7	14,00
21	Kalimantan Tengah	30	17	56,67
22	Kalimantan Selatan	44	9	20,45
23	Kalimantan Timur	53	32	60,38
24	Kalimantan Utara	8	5	62,50
25	Sulawesi Utara	45	1	2,22
26	Sulawesi Tengah	46	32	69,57
27	Sulawesi Selatan	110	47	42,73
28	Sulawesi Tenggara	40	7	17,50
29	Gorontalo	17	5	29,41
30	Sulawesi Barat	14	1	7,14
31	Maluku	35	2	5,71
32	Maluku Utara	26	3	11,54
33	Papua Barat	22	8	36,36
34	Papua	63	1	1,59
Indonesia		2.861	1.220	42,64

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020; Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 76.e

KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI KEBIJAKAN PHBS
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/ Kota dengan Kebijakan PHBS	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	20	86,96
2	Sumatera Utara	33	24	72,73
3	Sumatera Barat	19	17	89,47
4	Riau	12	11	91,67
5	Jambi	11	11	100,00
6	Sumatera Selatan	17	12	70,59
7	Bengkulu	10	10	100,00
8	Lampung	15	15	100,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,00
10	Kepulauan Riau	7	7	100,00
11	DKI Jakarta	6	6	100,00
12	Jawa Barat	27	26	96,30
13	Jawa Tengah	35	35	100,00
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00
15	Jawa Timur	38	34	89,47
16	Banten	8	8	100,00
17	Bali	9	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	6	27,27
20	Kalimantan Barat	14	14	100,00
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,00
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,00
23	Kalimantan Timur	10	10	100,00
24	Kalimantan Utara	5	3	60,00
25	Sulawesi Utara	15	13	86,67
26	Sulawesi Tengah	13	11	84,62
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,00
28	Sulawesi Tenggara	17	15	88,24
29	Gorontalo	6	6	100,00
30	Sulawesi Barat	6	6	100,00
31	Maluku	11	9	81,82
32	Maluku Utara	10	4	40,00
33	Papua Barat	13	5	38,46
34	Papua	29	3	10,34
Indonesia		514	423	82,30

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 76.f

JUMLAH KABUPATEN/KOTA* YANG MELAKSANAKAN MINIMAL 5 TEMA KAMPANYE GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
TAHUN 2017-2019

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/kota	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	23	5	5	5
2	Sumatera Utara	33	9	7	7
3	Sumatera Barat	19	10	4	4
4	Riau	12	3	2	1
5	Jambi	11	4	2	2
6	Sumatera Selatan	17	5	3	3
7	Bengkulu	10	5	2	3
8	Lampung	15	3	3	3
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	1	1	1
10	Kepulauan Riau	7	6	1	2
11	DKI Jakarta	6	0	1	1
12	Jawa Barat	27	0	5	5
13	Jawa Tengah	35	0	8	5
14	DI Yogyakarta	5	5	1	1
15	Jawa Timur	38	27	9	6
16	Banten	8	7	2	1
17	Bali	9	9	2	2
18	Nusa Tenggara Barat	10	3	3	2
19	Nusa Tenggara Timur	22	3	4	10
20	Kalimantan Barat	14	0	3	3
21	Kalimantan Tengah	14	8	3	3
22	Kalimantan Selatan	13	11	3	3
23	Kalimantan Timur	10	6	2	2
24	Kalimantan Utara	5	0	1	1
25	Sulawesi Utara	15	8	3	3
26	Sulawesi Tengah	13	4	3	3
27	Sulawesi Selatan	24	0	5	5
28	Sulawesi Tenggara	17	0	3	2
29	Gorontalo	6	0	1	1
30	Sulawesi Barat	6	3	1	2
31	Maluku	11	3	2	2
32	Maluku Utara	10	0	2	2
33	Papua Barat	13	0	2	2
34	Papua	29	0	2	2
Indonesia		514	148	101	100

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Keterangan: * Kabupaten/kota lokus setiap tahun berbeda



PUSAT DATA DAN INFORMASI

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
2020

ISBN 978-602-416-977-0



9 786024 169770